



KOTA PANGKALPINANG

2022 | RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH RKPD

TEMA PEMBANGUNAN RKPD 2022:

PENGUATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KESEHATAN
MASYARAKAT MENUJU DAYA SAING DAERAH

BAPPELITBANGDA



Pangkalpinang
kota beribu
senyuman





WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, dan Undang – Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 4 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 04 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

21. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 16 Seri E);
22. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 57).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
6. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode dua puluh (20) tahun.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode lima (5) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang.
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN DAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

RKPD Kota Tahun 2022 merupakan pedoman penyempurnaan Rancangan Akhir Renja PD Kota Tahun 2022 dan pedoman penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022 dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Kota Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

Penyusunan dan Pembentukan RKPD Kota Tahun 2022 berpedoman pada RPJPD Kota Tahun 2007-2026, RKP Tahun 2022, RPJMN Tahun 2020-2024, Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, Perubahan RPJMD Kota Tahun 2018-2023, serta RKPD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2022.

Pasal 4

- 1) Dalam hal RKP Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 belum ditetapkan, penyusunan RKPD Kota Tahun 2022 mengacu pada rancangan akhir RKP Tahun 2022.
- 2) Dalam hal Perubahan RPJMD Kota Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 belum ditetapkan, penyusunan RKPD Kota Tahun 2022 mengacu pada rancangan akhir Perubahan RPJMD Kota Tahun 2018-2023.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 5

Dokumen RKPD Kota Tahun 2022 tersusun berdasarkan sistematika yang terdiri atas:

- BAB I Pendahuluan;
- BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
- BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
- BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- BAB VII Penutup.

Pasal 6

RKPD Kota Tahun 2022 secara rinci sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 1 Juli 2021

WALIKOTA PANGKALPINANG,



MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 1 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,



RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021 NOMOR 26

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kami telah dapat menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2022. Pada proses penyusunan RKPD kita sedang menghadapi wabah pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia, hal ini berakibat kepada capaian kinerja sejak tahun 2020 berubah drastis dikarenakan sejumlah anggaran perangkat daerah dialihkan untuk kebutuhan penanganan COVID-19. Begitu juga dengan pendapatan daerah yang bersumber dari transfer pemerintah pusat yang dikurangi serta pendapatan asli daerah (PAD) yang mengalami penurunan. Hal ini berakibat kepada kegiatan yang tertunda tahun 2020 dan terus berlanjut di tahun 2021.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2022 disusun mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Selanjutnya RKPD tahun 2022 juga mempedomani RPJMN Tahun 2020-2024, RKP Tahun 2022, , Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023, serta RKPD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2022, sehingga arah dan kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun kedepan sudah sinkron antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

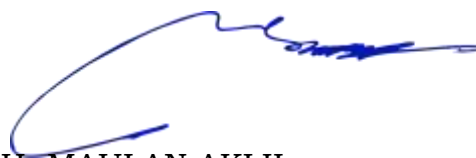


RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022 akan dijadikan dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Kota Pangkalpinang tahun 2022. Diharapkan hasil perencanaan tertuang di dalam RKPD Tahun 2022 dapat direalisasikan secara maksimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Pangkalpinang sehingga dapat terwujud Visi Kota Pangkalpinang yang Sejahtera, Nyaman, Unggul dan Makmur.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian dokumen ini, perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang dan semua pihak yang telah mendukung penyusunan dokumen RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022. Semoga apa yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan ini dapat dijadikan pedoman dan memberikan manfaat bagi pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pangkalpinang.

Salam Sehat...dan selalu TERSENYUM.....

WALI KOTA PANGKALPINANG



H. MAULAN AKLIL

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xvi
 BAB I	
PENDAHULUAN.....	I 1
I.1 Latar Belakang	I 1
I.2 Dasar Hukum Penyusunan	I 6
I.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I 12
I.4 Maksud dan Tujuan	I 16
I.5 Sistematika Dokumen RKPD.....	I 16
 BAB II	
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II 1
2.1 Kondisi Umum Daerah.....	II 1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II 1
A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	II 1
1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi.....	II 1
2. Letak Astronomis dan Geografis.....	II 3
3. Kondisi Topografi.....	II 4
4. Kondisi Geologi dan Struktur Tanah.....	II 5
5. Kondisi Klimatologi.....	II 6
6. Kondisi Demografis.....	II 7
B. Potensi Pengembangan Wilayah.....	II 10
1. Kawasan Perumahan dan Permukiman.....	II 10
2. Kawasan Perdagangan dan Jasa.....	II 11
3. Kawasan Perkantoran Pemerintah.....	II 13
4. Kawasan Peruntukan Industri.....	II 14
5. Kawasan Pergudangan.....	II 15
6. Kawasan Pelabuhan.....	II 15
7. Kawasan Pariwisata.....	II 16
8. Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau.....	II 18
9. Kawasan Peruntukan Sektor Informal.....	II 19
10. Kawasan Pendidikan.....	II 20
11. Kawasan Kesehatan.....	II 20
12. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.....	II 21
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II 22
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	II 22
1. Pertumbuhan PDRB.....	II 22
2. PDRB Per Kapita.....	II 29
3. Laju Inflasi.....	II 30
4. Indeks Pembangunan Manusia.....	II 31
5. Persentase Penduduk Miskin.....	II 33
6. Tingkat Pengangguran Terbuka.....	II 43
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II 44
1. Pendidikan.....	II 44
a. Harapan Lama Sekolah.....	II 44
b. Rata-Rata Lama Sekolah.....	II 45

	2. Kesehatan.....	II 47
	a. Usia Harapan Hidup.....	II 47
	3. Ketenagakerjaan.....	II 49
2.1.2.3	Fokus Seni Budaya.....	II 51
	1. Kebudayaan.....	II 51
	2. Pemuda dan Olahraga.....	II 51
2.1.3	Aspek Pelayanan Umum.....	II 52
2.1.3.1	Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar.....	II 52
	1. Pendidikan.....	II 52
	2. Kesehatan.....	II 57
	3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II 65
	4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	II 69
	5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.....	II 71
	6. Sosial.....	II 75
2.1.3.2	Fokus Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar.....	II 76
	7. Tenaga Kerja.....	II 76
	8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II 77
	9. Pangan.....	II 86
	10. Pertanahan.....	II 89
	11. Lingkungan Hidup.....	II 90
	12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	II 96
	13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa..	II 98
	14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	II 100
	15. Perhubungan.....	II 103
	16. Komunikasi dan Informatika.....	II 107
	17. Koperasi dan UKM.....	II 110
	18. Penanaman Modal.....	II 113
	19. Kepemudaan dan Olahraga.....	II 115
	20. Statistik.....	II 117
	21. Persandian.....	II 118
	22. Kebudayaan.....	II 119
	23. Perpustakaan.....	II 121
	24. Kearsipan.....	II 123
2.1.3.3	Urusan Pilihan.....	II 125
	25. Kelautan dan Perikanan.....	II 125
	26. Pariwisata.....	II 126
	27. Pertanian.....	II 127
	28. Perdagangan.....	II 130
	29. Perindustrian.....	II 134
2.1.4	Aspek Daya Saing Daerah.....	II 136
2.1.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II 136
	1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita.....	II 136
	2. Nilai Tukar Petani.....	II 138
	3. Ekspor Impor.....	II 139

4. Perbankan.....	II 140
2.1.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi.....	II 141
1. Angka Kriminalitas.....	II 141
2. Perizinan.....	II 141
2.1.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia.....	II 144
1. Kualitas Tenaga Kerja.....	II 144
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.....	II 145
2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD 2020.....	II 146
1. Sekretariat DPRD.....	II 146
2. Sekretariat Daerah.....	II 147
3. Inspektorat Daerah.....	II 149
4. Badan Keuangan Daerah.....	II 150
5. Bappelitbangda.....	II 151
6. BKPSDMD.....	II 152
7. BPBD.....	II 153
8. Badan Kesbangpol.....	II 154
9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	II 155
10. Dinas Kesehatan.....	II 157
11. Dinas Sosial.....	II 159
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang..	II 160
13. Dinas Perumahan dan Permukiman.....	II 163
14. Satuan Polisi Pamong Praja.....	II 164
15. Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja.....	II 165
16. Dinas Pangan dan Pertanian.....	II 166
17. Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan.....	II 166
18. Dinas Dukcapil.....	II 167
19. Dinas Lingkungan Hidup.....	II 168
20. Dinas Pariwisata.....	II 169
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.....	II 171
22. Dinas Komunikasi dan Informatika.....	II 172
23. Dinas Perhubungan.....	II 173
24. Dinas Kelautan dan Perikanan.....	II 174
25. Dinas Pemuda dan Olahraga.....	II 175
26. Dinas PPPA dan KB.....	II 176
27. Kecamatan Rangkui.....	II 177
28. Kecamatan Gerunggang.....	II 178
29. Kecamatan Pangkalbalam.....	II 179
30. Kecamatan Taman Sari.....	II 180
31. Kecamatan Bukit Intan.....	II 181
32. Kecamatan Girimaya.....	II 183
33. Kecamatan Gabek.....	II 184
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II 271
2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II 271
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah daerah.....	II 278
2.3.2.1 Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar.....	II 278
1. Pendidikan.....	II 278

2.	Kesehatan.....	II 283
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	II 280
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	II 285
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.....	II 281
6.	Sosial.....	II 282
2.3.2.2	Urusan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar.....	II 283
7.	Tenaga Kerja.....	II 283
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II 284
9.	Pangan.....	II 284
10.	Pertanahan.....	II 284
11.	Lingkungan Hidup.....	II 285
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	II 286
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa..	II 286
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	II 287
15.	Perhubungan.....	II 287
16.	Komunikasi dan Informatika.....	II 288
17.	Koperasi dan UKM.....	II 289
18.	Penanaman Modal.....	II 289
19.	Kepemudaan dan Olahraga.....	II 289
20.	Statistik.....	II 290
21.	Persandian.....	II 290
22.	Kebudayaan.....	II 290
23.	Perpustakaan.....	II 290
24.	Kearsipan.....	II 291
2.3.2.3	Urusan Pilihan.....	II 291
25.	Kelautan dan Perikanan.....	II 291
26.	Pariwisata.....	II 292
27.	Pertanian.....	II 292
28.	Perdagangan.....	II 293
29.	Perindustrian.....	II 293
2.3.2.4	Urusan Pendukung Urusan Pemerintah.....	II 294
30.	Sekretariat Daerah.....	II 294
31.	Sekretariat DPRD.....	II 295
2.3.2.5	Urusan Penunjang Urusan Pemerintah.....	II 295
32.	Perencanaan.....	II 295
33.	Keuangan Daerah.....	II 295
34.	Kepegawaian.....	II 296
35.	Pendidikan dan Pelatihan.....	II 296
36.	Penelitian dan Pengembangan.....	II 296
2.3.2.6	Unsur Pengawasan.....	II 296
37.	Pengawasan.....	II 296
2.3.2.7	Unsur Kewilayahan.....	II 297
38.	Kecamatan.....	II 297
2.3.2.8	Unsur Pemerintahan Umum.....	II 298
39.	Kesatuan Bangsa dan Politik.....	II 298
2.4	Pokok-Pokok Pikiran DPRD.....	II 299

2.5	Capaian Inovasi Daerah.....	II 336
2.6	Capaian TPB/SDGs.....	II 343
2.7	Capaian Standar Pelayanan Minimal.....	II 397
2.7.1	Urusan Pendidikan.....	II 397
2.7.2	Urusan Kesehatan.....	II 399
2.7.3	Urusan Pekerjaan Umum.....	II 401
2.7.4	Urusan Perumahan Rakyat.....	II 402
2.7.5	Urusan Trantibumlinmas.....	II 404
2.7.6	Urusan Sosial.....	II 405
AB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III 1
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III 4
3.1.1	Kondisi Ekonomi Daerah	III 5
a.	PDRB.....	III 5
b.	Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	III 11
c.	PDRB Per Kapita.....	III 16
d.	Tingkat Inflasi.....	III 17
e.	Tingkat Investasi.....	III 18
f.	Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	III 20
g.	Ekspor dan Impor.....	III 21
h.	Pengangguran.....	III 22
i.	Tingkat Kemiskinan.....	III 23
j.	Gini Ratio.....	III 25
3.1.2	Tantangan dan Prospek Perekonomian.....	III 27
3.1.2.1	Tantangan Perekonomian Regional dan Nasional Tahun 2022.....	III 27
3.1.2.2	Tantangan Perekonomian Kota Pangkalpinang Tahun 2022.....	III 29
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III 33
3.2.1	Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.....	III 33
3.2.2	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III 55
3.2.3	Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III 57
3.2.4	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III 67
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV 1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV 4
4.1.1	Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional.....	IV 5
4.1.2	Telaahan Tujuan dan Sasaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022	IV 13
4.1.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Pangkalpinang.....	IV 18
4.2	Prioritas Pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2022.....	IV 24
4.2.1	Sinkronisasi Prioritas Daerah Dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi.....	IV 56
4.2.1.1	Sinkronisasi Prioritas Daerah Dengan Prioritas Nasional.....	IV 56
4.2.1.2	Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's).....	IV 84

4.2.1.3	Sinkronisasi Prioritas Daerah Dengan Prioritas Provinsi.....	IV 117
4.2.1.4	Penyelarasan Permasalahan Pembangunan, Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV 165
4.2.1.5	Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	IV 172
4.3	Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan Pembangunan Lintas Bidang Melalui Pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial.....	IV 181
4.3.1	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Unggulan Melalui Penguatan Sektor Industri Pengolahan dan UMKM.....	IV 182
4.3.2	Perwujudan Kemudahan Investasi Untuk Pengembangan Sektor Pariwisata, Industri dan Perdagangan.....	IV 188
4.3.3	Percepatan Pengentasan Kemiskinan.....	IV 193
4.3.4	Optimalisasi Perlindungan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat.....	IV 197
4.3.5	Pemantapan Reformasi Birokrasi.....	IV 199
4.3.6	Peningkatan Pelayanan Publik.....	IV 203
4.3.7	Perwujudan Kualitas Pendidikan Berbasis Karakter	IV 206
4.3.8	Pengembangan Potensi Wisata Daerah.....	IV 208
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V 1
5.1	Rencana Program Prioritas	V 4
1.	Urusan Pemerintah Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	V 4
2.	Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	V 6
3.	Urusan Pemerintah Pilihan	V 11
4.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintah	V 12
5.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintah	V 13
6.	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah	V 14
7.	Unsur Kewilayahan	V 14
8.	Unsur Pemerintahan Umum	V 14
5.2	Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	V 15
5.3	Aspirasi Masyarakat	V 45
5.4	Pagu Indikatif	V 90
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	
6.1	Indikator Kinerja Utama.....	VI 2
6.2	Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	VI 4
BAB VII	P E N U T U P.....	VII 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Banyaknya Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Pangkalpinang.....	II 3
Tabel 2.2	Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Curah Hujan, dan Penyinaran Matahari Menurut Stasiun BMKG Kota Pangkalpinang Tahun 2020.....	II 7
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Kota Pangkalpinang Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2018-2020.....	II 8
Tabel 2.4	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pangkalpinang Per Kecamatan Tahun 2010-2020.....	II 9
Tabel 2.5	Kepadatan Penduduk Kota Pangkalpinang Per Kecamatan Tahun 2020.....	II 9
Tabel 2.6	PDRB Kota Pangkalpinang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020.....	II 23
Tabel 2.7	PDRB Kota Pangkalpinang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2020.....	II 24
Tabel 2.8	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Pangkalpinang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha 2016-2020.....	II 25
Tabel 2.9	Pertumbuhan Ekonomi Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Lainnya Tahun 2020.....	II 27
Tabel 2.10	Angka Partisipasi Sekolah Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2020.....	II 53
Tabel 2.11	Kondisi Gedung Ruang Kelas SD & SMP Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2020.....	II 53
Tabel 2.12	Rasio Guru ASN Dengan Jumlah Guru Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Di Kota Pangkalpinang Tahun 2016 – 2020.....	II 54
Tabel 2.13	Capaian Indikator Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pangkalpinang Tahun 2016 – 2020.....	II 55
Tabel 2.14	Capaian Indikator Angka Kelulusan Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pangkalpinang Tahun 2016 – 2020.....	II 55
Tabel 2.15	Capaian Indikator Angka Melanjutkan Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pangkalpinang Tahun 2016–2020.....	II 56
Tabel 2.16	Capaian Indikator Kualitas Pendidikan Guru Yang	II 56

	Memenuhi Kualifikasi S1/D.IVJenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pangkalpinang Tahun 2016 – 2020.....	
Tabel 2.17	Perkembangan Indikator Makro Kesehatan Tahun 2016-2020.....	II 58
Tabel 2.18	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2016-2020	II 61
Tabel 2.19	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2020.....	II 68
Tabel 2.20	Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019.....	II 70
Tabel 2.21	Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2015-2019.....	II 72
Tabel 2.22	Kejadian Bencana di Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2020.....	II 74
Tabel 2.23	Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2016-2020.....	II 75
Tabel 2.24	Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2016-2020.....	II 77
Tabel 2.25	Perkembangan Indikator Komposit IPG di Kota Pangkalpinang Tahun 2016 – 2020.....	II 80
Tabel 2.26	Perkembangan Indikator Komposit IDG di Kota Pangkalpinang Tahun 2015 – 2019.....	II 83
Tabel 2.27	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2013-2017.....	II 85
Tabel 2.28	Capaian Kinerja Urusan Pangan Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2020.....	II 88
Tabel 2.29	Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2020.....	II 90
Tabel 2.30	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020.....	II 92
Tabel 2.31	Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2016-2020.....	II 94
Tabel 2.32	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020.....	II 96

Tabel 2.33	Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2020.....	II 97
Tabel 2.34	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2015 – 2019.....	II 100
Tabel 2.35	Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016 – 2020.....	II 102
Tabel 2.36	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2016-2020.....	II 106
Tabel 2.37	Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020.....	II 109
Tabel 2.38	Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM Tahun 2016-2020.....	II 113
Tabel 2.39	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2016-2020.....	II 114
Tabel 2.40	Capaian Kinerja Urusan Pemuda Olahraga Tahun 2016-2020.....	II 116
Tabel 2.41	Capaian Kinerja Urusan Persandian Tahun 2013-2017	II 118
Tabel 2.42	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2016-2020.....	II 120
Tabel 2.43	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2019.....	II 123
Tabel 2.44	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2020.....	II 124
Tabel 2.45	Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2020.....	II 126
Tabel 2.46	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2016-2020	II 127
Tabel 2.47	Luas Panen dan Produksi Tanaman Palawija Menurut Jenis Komoditas Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2020.....	II 128
Tabel 2.48	Jenis dan Produksi Buah-Buahan di Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2020.....	II 129
Tabel 2.49	Banyaknya Ternak di Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2020.....	II 130
Tabel 2.50	Banyaknya Unggas di Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2020.....	II 130
Tabel 2.51	Jumlah dan Jenis Pasar Tahun 2016-2020.....	II 133
Tabel 2.52	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2016-	II 134

	2020.....	
Tabel 2.53	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2013-2017.....	II 136
Tabel 2.54	Posisi Kredit Perbankan, Penghimpunan Dana Simpanan dan Kredit Mikro, Kecil dan Menengah Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2018.....	II 140
Tabel 2.55	Jenis Izin dan Non Izin yang Dilayani Oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja di Kota Pangkalpinang.....	II 142
Tabel 2.56	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2020 Kota Pangkalpinang.....	II 189
Tabel 2.57	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Kebijakan Nasional, Provinsi Bangka Belitung dan Kota Pangkalpinang.....	II 298
Tabel 2.58	Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD dan Validasi Kota Pangkalpinang.....	II 301
Tabel 2.59	Inovasi Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020.....	II 339
Tabel 2.60	Capaian dan Target Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023	II 345
Tabel 2.61	Pencapaian Penerapan Standar Minimal Urusan Pendidikan Tahun 2020.....	II 397
Tabel 2.62	Pencapaian Penerapan SPM Kesehatan Tahun 2020.....	II 399
Tabel 2.63	Pencapaian Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2020.....	II 401
Tabel 2.64	Pencapaian Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2020.....	II 403
Tabel 2.65	Pencapaian Penerapan SPM Trantibumlinmas Tahun 2020.....	II 404
Tabel 2.66	Pencapaian Penerapan SPM Sosial Tahun 2020.....	II 406
Tabel 3.1	Distribusi Persentase PDRB Kota Pangkalpinang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2016-2020.....	III 10
Tabel 3.2	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota 2017-2020.....	III 13
Tabel 3.3	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Pangkalpinang Menurut Lapangan Usaha ADHK 2016-2020.....	III 14
Tabel 3.4	Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kota Pangkalpinang.....	III 20
Tabel 3.5	Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Menurut Jenisnya di Kota Pangkalpinang, 2019-2020	III 20
Tabel 3.6	Total Ekspor dan Impor Melalui Pelabuhan Pangkalpinang di Kota Pangkalpinang	III 22
Tabel 3.7	Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kota Pangkalpinang Tahun 2022.....	III 32
Tabel 3.8	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2020	III 38
Tabel 3.9	Realisasi Penggunaan Anggaran Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2020.....	III 42

Tabel 3.10	Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2020.....	III 45
Tabel 3.11	Proyeksi Pendapatan Kota Pangkalpinang Tahun 2021-2023	III 50
Tabel 3.12	Proyeksi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Kota Pangkalpinang Tahun 2021-2023.....	III 63
Tabel 3.13	Proyeksi Anggaran Belanja Belanja Daerah Tahun 2022-2023 Kota Pangkalpinang.....	III 65
Tabel 3.14	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2021-2023 Kota Pangkalpinang.....	III 70
Tabel 4.1	Indikator Pembangunan Nasional Tahun 2022.....	IV 13
Tabel 4.2	Indikator Pembangunan Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2022.....	IV 18
Tabel 4.3	Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022.....	IV 19
Tabel 4.4	Skoring Prioritas Pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2022.....	IV 28
Tabel 4.5	Sasaran, Prioritas Pembangunan, Arah Kebijakan dan Program Kota Pangkalpinang Tahun 2022.....	IV 38
Tabel 4.6	Keselarasan Prioritas Nasional, Arah Kebijakan Nasional dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2022.....	IV 60
Tabel 4.7	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Pangkalpinang Dengan Tujuan SDGs.....	V 86
Tabel 4.8	Keselarasan antara Prioritas Pembangunan Utama Provinsi dengan Prioritas Pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2022.....	IV 122
Tabel 4.9	Keselarasan antara Prioritas Pembangunan Penunjang Provinsi dengan Prioritas Pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2022.....	IV 142
Tabel 4.10	Keselarasan Antara Permasalahan, Isu Strategis dan Prioritas Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022.....	IV 165
Tabel 4.11	Arah Kebijakan dan Program Prioritas RKPD 2022 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2020 Bidang Pendidikan.....	IV 174
Tabel 4.12	Arah Kebijakan dan Program Prioritas RKPD 2022 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2020 Bidang Kesehatan.....	IV 175
Tabel 4.13	Arah Kebijakan dan Program Prioritas RKPD 2022 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2020 Bidang Pekerjaan Umum.....	IV 177
Tabel 4.14	Arah Kebijakan dan Program Prioritas RKPD 2022 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2020 Bidang Perumahan Rakyat.....	IV 178
Tabel 4.15	Arah Kebijakan dan Program Prioritas RKPD 2022 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2020 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	IV 179
Tabel 4.16	Arah Kebijakan dan Program Prioritas RKPD 2022 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2020 Bidang Sosial.....	IV 180

Tabel 4.17	Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang Peningkatan Nilai Tambah Sektor Unggulan Melalui Penguatan Sektor Industri Pengolahan dan UMKM.....	IV 183
Tabel 4.18	Program Pembangunan Perangkat Daerah Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang Peningkatan Nilai Tambah Sektor Unggulan Melalui Penguatan Sektor Industri Pengolahan dan UMKM.....	IV 184
Tabel 4.19	<i>Stakeholder</i> yang Mendukung Prioritas Peningkatan Nilai Tambah Sektor Unggulan Melalui Penguatan Sektor Industri Pengolahan dan UMKM.....	IV 188
Tabel 4.20	Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang Perwujudan Kemudahan Investasi Untuk Pengembangan Sektor Pariwisata, Industri dan Perdagangan.....	IV 189
Tabel 4.21	Program Pembangunan Perangkat Daerah Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang Perwujudan Kemudahan Investasi Untuk Pengembangan Sektor Pariwisata, Industri dan Perdagangan.....	IV 190
Tabel 4.22	<i>Stakeholder</i> yang Mendukung Prioritas Perwujudan Kemudahan Investasi Untuk Pengembangan Sektor Pariwisata, Industri dan Perdagangan.....	IV 192
Tabel 4.23	Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang Percepatan Pengentasan Kemiskinan...	IV 193
Tabel 4.24	Program Pembangunan Perangkat Daerah Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang Percepatan Pengentasan Kemiskinan.....	IV 194
Tabel 4.25	Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang Optimalisasi Perlindungan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat.....	IV 197
Tabel 4.26	Program Pembangunan Perangkat Daerah Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang Optimalisasi Perlindungan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat	IV 198
Tabel 4.27	<i>Stakeholder</i> yang Mendukung Prioritas Optimalisasi Perlindungan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat	IV 200
Tabel 4.28	Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang Pemantapan Reformasi Birokrasi.....	IV 200
Tabel 4.29	Program Pembangunan Perangkat Daerah Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang Pemantapan Reformasi Birokrasi.....	IV 201
Tabel 4.30	Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang Peningkatan Pelayanan Publik.....	IV 203
Tabel 4.31	Program Pembangunan Perangkat Daerah Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang Peningkatan Pelayanan Publik.....	IV 204
Tabel 4.32	Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang Perwujudan Kualitas Pendidikan Berbasis Karakter.....	IV 206
Tabel 4.33	Program Pembangunan Perangkat Daerah Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang Perwujudan	IV 207

	Kualitas Pendidikan Berbasis Karakter.....	
Tabel 4.34	Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang Pengembangan Potensi Wisata Daerah	IV 208
Tabel 4.35	Program Pembangunan Perangkat Daerah Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang Pengembangan Potensi Wisata Daerah.....	IV 209
Tabel 4.36	Stakeholder Yang Mendukung Prioritas Pengembangan Potensi Wisata Daerah.....	IV 212
Tabel 5.1	Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Validasi Kota Pangkalpinang	V 17
Tabel 5.2	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Kota Pangkalpinang	V 46
Tabel 5.3	Pagu Indikatif Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022	V 90
Tabel 6.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Pangkalpinang Tahun 2019-2023.....	VI 2
Table 6.2	Target Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang 2021-2023	VI 5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2	Hubungan Keterkaitan antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya (Lampiran Permendagri No 86/2017)	I 14
Gambar 1.2	Kedudukan RKPD Kota Pangkalpinang	I 15
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kota Pangkalpinang	II 2
Gambar 2.2	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)	II 27
Gambar 2.3	Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Kota Pangkalpinang Tahun 2020 (%)	II 28
Gambar 2.4	PDRB per Kapita Kota Pangkalpinang Atas Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020	II 30
Gambar 2.5	Laju Inflasi Kota Pangkalpinang	II 31
Gambar 2.6	Perkembangan IPM Kota Pangkalpinang dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)	II 32
Gambar 2.7	Posisi IPM Kota Pangkalpinang Tahun 2020 (%)	II 33
Gambar 2.8	Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Pangkalpinang Tahun 2017-2020 (%).....	II 34
Gambar 2.9	Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kota Pangkalpinang Tahun 2020 (Rupiah/kapita/bulan)	II 35
Gambar 2.10	Perkembangan Presentase Penduduk Miskin di Kota Pangkalpinang	II 36
Gambar 2.11	Posisi Relatif Presentase Penduduk Miskin Kota Pangkalpinang	II 37
Gambar 2.12	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2020 (Ribuan Orang)	II 38
Gambar 2.13	Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kota Pangkalpinang	II 39
Gambar 2.14	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2020	II 40
Gambar 2.15	Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Pangkalpinang Tahun 2020 (%)	II 41
Gambar 2.16	Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2020 (ribuan orang)	II 42
Gambar 2.17	Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kota Pangkalpinang	II 42
Gambar 2.18	Perkembangan Tingkat Pengangguran terbuka Kota Pangkalpinang Dibanding dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2018-2020 (%)	II 43
Gambar 2.19	Posisi Relatif Tingkat pengangguran terbuka kota pangkalpinang tahun 2020 (%)	II 44
Gambar 2.20	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2020	II 45
Gambar 2.21	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kota Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung dan	II 46

	Nasional Tahun 2016-2019 (tahun)	
Gambar 2.22	Posisi Relatif Rata-rata Lama Sekolah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 (Tahun)	II 47
Gambar 2.23	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Pangkalpinang dengan Provinsi Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2016-2020 (Tahun)	II 48
Gambar 2.24	Posisi Relatif AHH Kota Pangkalpinang Tahun 2020 (Tahun)	II 49
Gambar 2.25	Perkembangan TPAK Kota Pangkalpinang dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2020 (%)	II 50
Gambar 2.26	Posisi Realatif TPAK Kota Pangkalpinang Tahun 2020 (%)	II 50
Gambar 2.27	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2016-2020 (Tahun)....	II 78
Gambar 2.28	Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Pangkalpinang Tahun 2020 (Tahun)	II 79
Gambar 2.29	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2015-2019 (Tahun)	II 81
Gambar 2.30	Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pangkalpinang Tahun 2019 (Tahun)	II 82
Gambar 2.31	Pengeluaran Konsumsi per Kapita di Kota Pangkalpinang Tahun 2020	II 138
Gambar 2.32	Perbandingan NTP Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017 dan 2018	II 139
Gambar 2.33	Kasus Kejahatan di Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2020	II 141
Gambar 2.34	Persentase Tenaga Kerja Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan Kota Pangkalpinang	II 145
Gambar 3.1	Perkembangan Nilai PDRB Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2020	III 6
Gambar 3.2	Kotribusi Terbesar Berdasarkan Lapangan Usaha, 2020	III 8
Gambar 3.3	Kontribusi Terbesar Berdasarkan Pengeluaran, 2019	III 9
Gambar 3.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2020	III 12
Gambar 3.5	Laju Inflasi di Kota Pangkalpinang (persen) 2016-2020	III 17
Gambar 3.6	Laju Deflasi di Kota Pangkalpinang (persen) 2016-2020	III 18
Gambar 3.7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung (persen), 2018-2020	III 23
Gambar 3.8	Data Kemiskinan di Kota Pangkalpinang Tahun 2020	III 25
Gambar 3.9	Koefisien Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2020	III 26
Gambar 3.10	Indeks Gini Menurut Perkantoran dan Perdesaan Tahun 2017-2020	III 26
Gambar 3.11	Perkembangan Pendapatan, Belanja Daerah dan	III 33

	Pembiayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2020 (dalam milyar)	
Gambar 4.1	7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024	IV 11
Gambar 4.2	Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022	IV 17



- BAB I -

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada tahun 2021 dihadapkan pada tantangan yang berat dengan adanya pandemi Covid-19. Perekonomian mengalami kontraksi, pengangguran terbuka dan angka kemiskinan juga mengalami peningkatan. Selain itu, hasil evaluasi terhadap capaian kinerja daerah menunjukkan capaian yang jauh dari yang diperkirakan. Pemerintah sejak tahun 2020 telah melakukan berbagai upaya pengendalian Covid-19 melalui kebijakan pembatasan sosial, penguatan sistem testing-tracing-treatment, dan pemberian stimulus bagi masyarakat terdampak. Dalam mencapai herd immunity, pada tahun 2021 telah dimulai pemberian vaksin secara bertahap. Dampak pandemi Covid-19 masih mungkin berlanjut hingga tahun 2022, karena itu, berbagai bentuk intervensi pemerintah baik secara promotif, preventif, maupun kuratif, termasuk pelaksanaan vaksinasi untuk mencapai *herd immunity* perlu dilanjutkan. Pandemi Covid-19 juga perlu dipandang sebagai momentum untuk penguatan sistem kesehatan nasional dengan meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan dan optimalisasi partisipasi masyarakat dalam mewujudkan gerakan masyarakat hidup sehat.



Pemerintah pusat dan daerah perlu merumuskan kebijakan yang responsif dan adaptif agar dampak ekonomi akibat pandemi tidak sampai menimbulkan krisis yang berkepanjangan. Kebijakan ini berhubungan dengan perencanaan pembangunan dimana Pemerintah sudah menetapkan program, target, dan *major projects* di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022, Perubahan RPJMD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017-2022, Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 dan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2022 disusun mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Perencanaan pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2022 menggunakan 4 (empat) pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis serta pendekatan atas bawah serta bawah-atas. Berikut penjelasan dari masing-masing pendekatan.

1. Pendekatan Teknokratis

Yang dimaksud dengan pendekatan teknokratis adalah proses pendekatan yang mengedepankan penggunaan metoda dan kerangka



berpikir ilmiah dan sistematis dalam melakukan analisis masalah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam hal ini proses teknokratik digunakan pada proses penyusunan perkiraan ekonomi makro daerah dan menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan. Pendekatan teknokratik dilakukan melalui forum diskusi dan konsultasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk tenaga ahli dari lembaga/institusi dan perguruan tinggi; serta pejabat yang menangani perencanaan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang

2. Pendekatan Partisipatif

Yang dimaksud dengan pendekatan partisipatif dalam hal ini adalah proses yang dilakukan dengan mengembangkan forum konsultasi publik yang melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat dalam merumuskan masalah dan prioritas pembangunan daerah tahun 2022. Hal ini dijalankan melalui Musrenbang dan dialog interaktif dengan pemangku kepentingan guna menyusun Rencana Kerja yang akuntabel. Pendekatan ini melibatkan semua pemangku kepentingan antara lain diikuti oleh unsur pemerintah dan masyarakat melalui penyelenggaraan musrenbang dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota dengan menghimpun hasil dari rembuk warga. Pendekatan



juga dilakukan dalam bentuk forum konsultasi publik yang melibatkan para pakar dan tokoh masyarakat sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 80 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3. Pendekatan Politik

Pendekatan politik dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih dalam RKPD Tahun 2022 ini mengacu pada Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023. Pada prinsipnya pendekatan politik memandang bahwa proses penyusunan RKPD harus mengedepankan kehendak dan kepentingan rakyat pemilih yang sudah memberikan hak pilihnya kepada organisasi politik dan Kepala Daerah berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan. Dalam penyusunan RKPD Tahun 2022 dilakukan dengan cara mengedepankan proses politik di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pendekatan politik juga dilakukan melalui sinergitas Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan DPRD.

4. Pendekatan Atas – Bawah dan Bawah – Atas

Pendekatan atas bawah dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan mengacu pada prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023 serta agenda dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam rancangan RKP dan



RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022. Pendekatan atas – bawah dan bawah – atas diselenggarakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan diantaranya melalui Forum Rapat Koordinasi Pembangunan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian/Lembaga terkait.

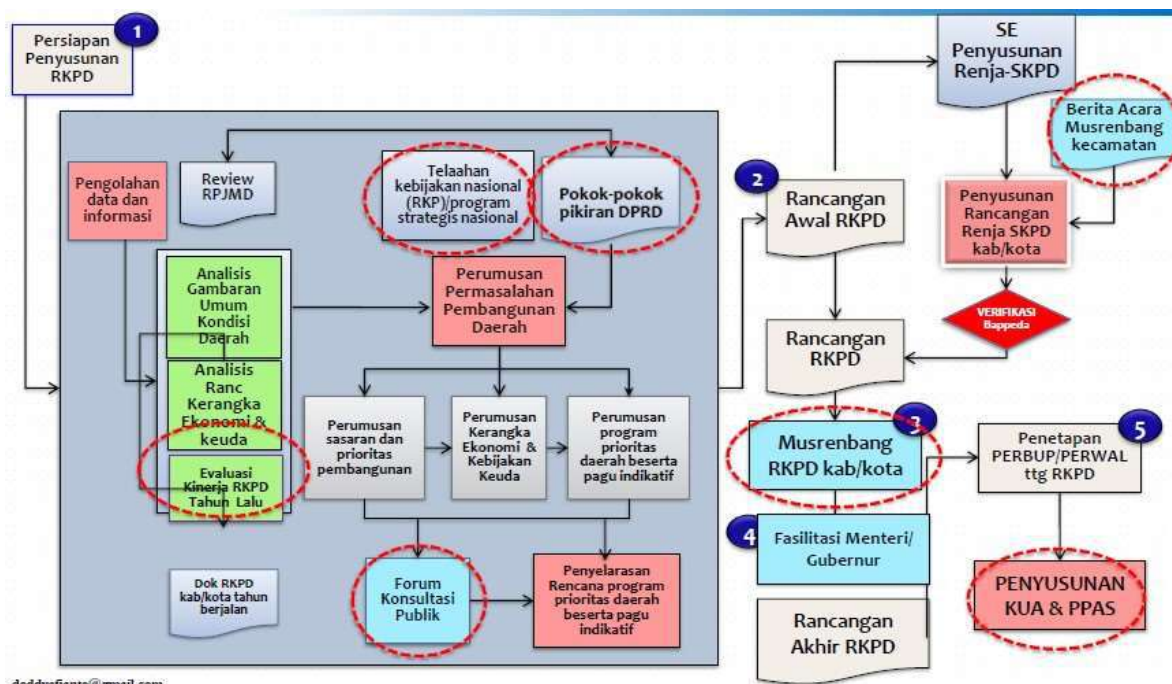
Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah pada RKPD 2022 melalui proses teknokratik, partisipatif, politik, atas - bawah dan bawah - atas sehingga diharapkan diperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kota Pangkalpinang. Dengan demikian kegiatan yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang akan bisa menjawab kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran, memenuhi kebijakan belanja dengan prinsip *money follow priority program*, tidak lagi *money follow function*. Hal ini berarti bahwa dilakukan prioritas program secara ketat, tidak lagi mengalokasikan kegiatan berdasarkan struktur organisasi semata.

Secara diagramatis, skema alur penyusunan RKPD dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1

Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-



- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berita (Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran



Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 4 Seri E);

21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 04 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
23. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 16 Seri E);
24. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57)



sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 05).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.



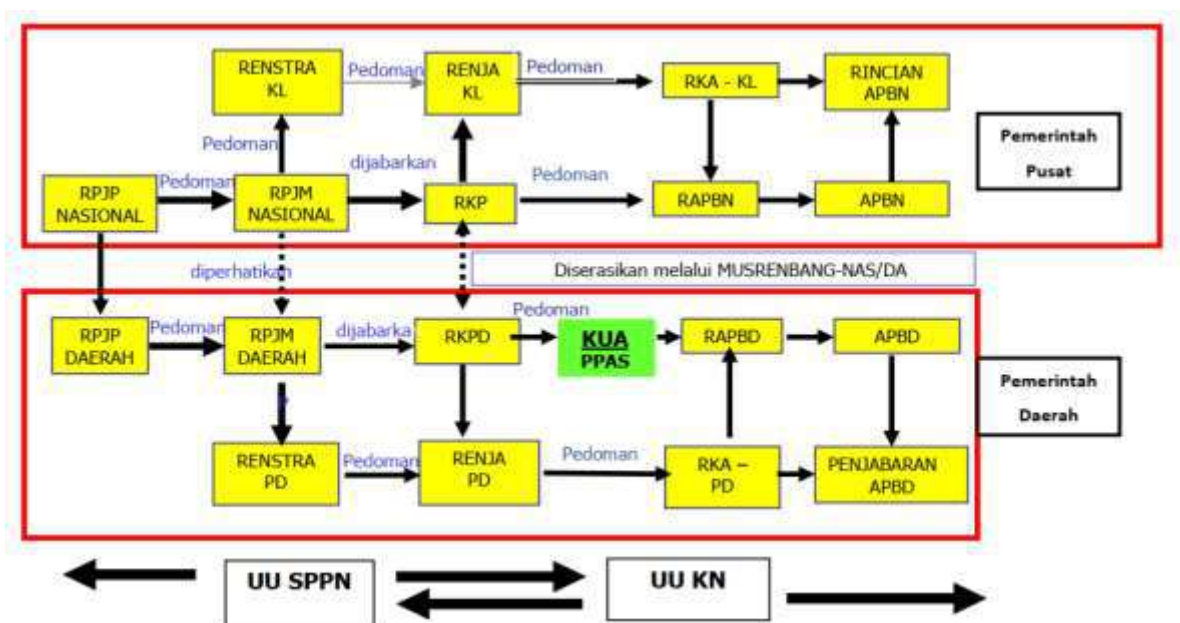
Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan tersebut meliputi (1) RPJPD, (2) RPJMD, (3) Renstra-PD, (4) RKPD dan (5) Renja-PD. Secara substansi, keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

Sesuai dengan tahapan penyusunan RKPD dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa RKPD mengacu pada RPJMD Kabupaten/Kota, RKP, RKPD Provinsi,, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. RKPD digunakan untuk memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang dalam menyusun Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.

Adapun gambaran tentang hubungan antara RKPD Kota Pangkalpinang dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.2 berikut:

Gambar 1.2

Hubungan Keterkaitan antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya (Lampiran Permendagri No 86/2017)



Mengacu pada Gambar 1.2, dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut:

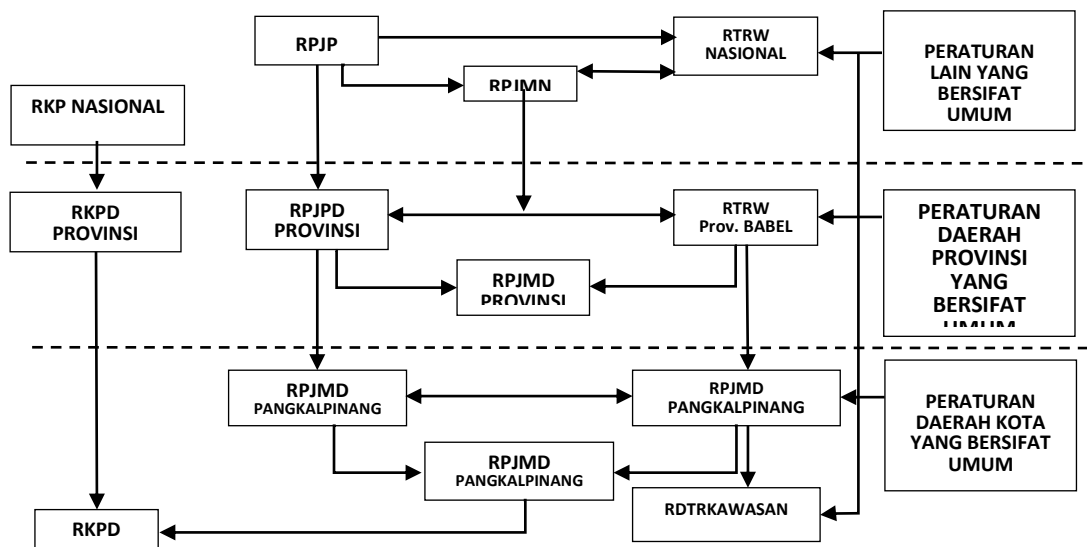
1. RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme Musrenbang.
2. RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJMD yang didalamnya memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.



3. RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja PD yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah.
4. RKPD nantinya dijabarkan ke dalam RAPBD dengan berpedoman juga kepada Renja Perangkat Daerah.

Gambar 1.3

Kedudukan RKPD Kota Pangkalpinang



Dalam penyusunan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022 telah mengacu dan berpedoman pada rancangan akhir RKP Nasional Tahun 2022, RKPD Pemerintah Daerah Bangka Belitung Tahun 2022, RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2026, dan rancangan akhir Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023. Selain itu kedudukan RKPD tidak dapat dipisahkan dari dokumen perencanaan tata ruang wilayah. Kedudukan RKPD Kota Pangkalpinang secara lebih jelas dapat dilihat dalam Gambar 1.3 di atas.



1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah pembangunan tahunan Kota Pangkalpinang dan sinergitas program dan kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Kota Pangkalpinang maupun yang dilaksanakan bersama-sama masyarakat. Adapun tujuan penyusunan RKPD Tahun 2022 adalah sebagai:

1. Pedoman bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2022;
2. Kerangka acuan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2022;
3. Pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Renja-PD; dan
4. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang



Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kota Pangkalpinang, RKP/Program Strategis Nasional, dan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk penyusunan RKPD Kota Pangkalpinang.

1.4 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan



1.5 Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memberikan gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan

2.1 Kondisi Umum Daerah

Memberikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan



realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggungjawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

2.3 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menggambarkan tentang kondisi ekonomi daerah secara makro meliputi pertumbuhan ekonomi, PDRB Perkapita, laju inflasi, investasi, ekspor dan impor, Tingkat Pengangguran, Tingkat Kemiskinan, Gini Ratio, serta tantangan dan prospek perekonomian.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menggambarkan perkembangan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kota Pangkalpinang tahun 2016-2020, serta Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan,



arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan pembiayaan daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat tema pembangunan, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan prioritas pembangunan tahun 2022, keselarasan dan sinerginya dengan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi, keselarasan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs, Standar Pelayanan Minimal, serta strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan pembangunan lintas bidang melalui pendekatan holistik, tematik, integratif dan spasial

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2022

Memuat beberapa isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan urusan, pagu indikatif yang disediakan guna mendukung program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan serta target yang akan dicapai pada tahun 2022

5.2 Telaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD

Memuat saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Walikota untuk Perencanaan Tahun 2022. Selanjutnya, Walikota memberikan telaahan terkait dengan



arah kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai tindak lanjut pokok-pokok pikiran DPRD dimaksud.

5.3 Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang

Memuat aspirasi masyarakat yang didapatkan berdasarkan hasil penjangkaran melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), baik Musrenbang RKPD di tingkat Kecamatan maupun Musrenbang RKPD Kota, dan telah diinput dalam aplikasi SIPD.

5.4 Kerangka Pendanaan Tahun 2022

Berisi gambaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII P E N U T U P



- BAB II -

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

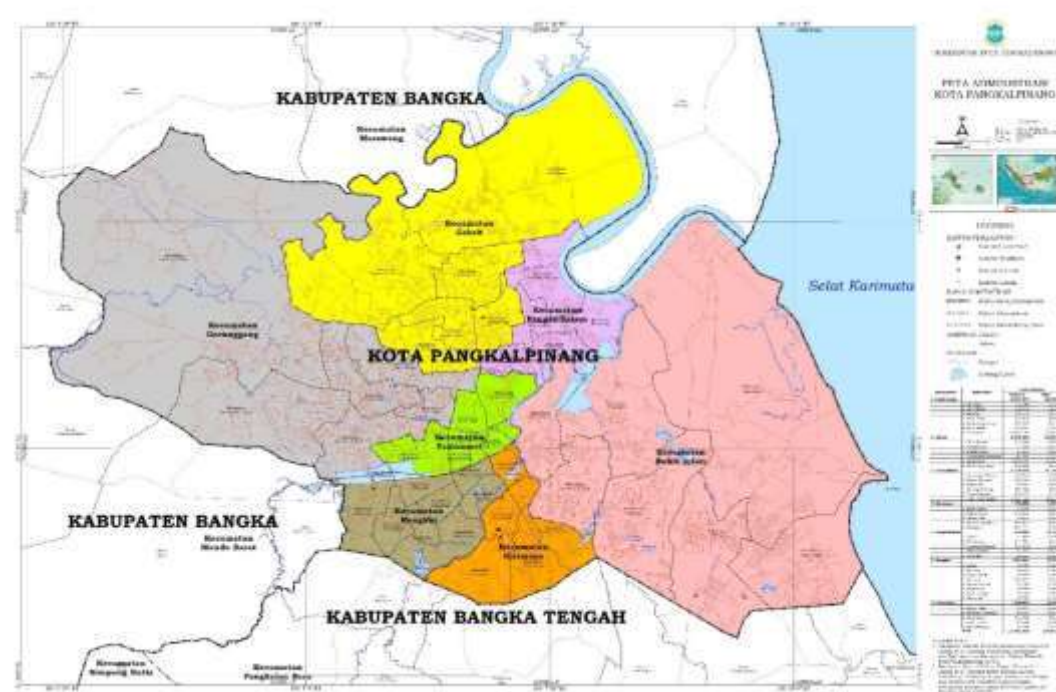
1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Pangkalpinang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Luas wilayah Kota Pangkalpinang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka dan Antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah $\pm 104,405 \text{ km}^2$. Luasan Kota Pangkalpinang hanya sebesar 0,72 persen dari total keseluruhan luas wilayah Provinsi dan merupakan wilayah kota/kabupaten terkecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Batas-batas wilayah Kota Pangkalpinang Sebelah Utara Kecamatan Merawang (Kabupaten Bangka), sebelah timur Selat Karimata, sebelah selatan Kecamatan Pangkalanbaru (Kabupaten Bangka Tengah), dan sebelah barat Mendo Barat (Kabupaten Bangka) seperti terlihat pada Gambar 2.1 berikut:



Gambar 2. 1

Peta Administrasi Kota Pangkalpinang



Sumber: Pangkalpinang Dalam Angka Tahun 2021, BPS Kota Pangkalpinang

Pembentukan Kota Pangkalpinang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan wilayah administrasi meliputi 2 (dua) kabupaten dan 1 (satu) kota. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka dengan demikian wilayah administrasi pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota, dengan ibukota provinsi adalah Kota Pangkalpinang. Wilayah Kota Pangkalpinang terdiri dari 7



Kecamatan dan 42 Kelurahan, rincian kecamatan dan kelurahan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1

Banyaknya Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Pangkalpinang

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase	Jumlah Kelurahan
1.	Rangkui	5,039	4,83	8
2.	Bukit Intan	35,420	33,93	7
3.	Girimaya	4,497	4,31	5
4.	Pangkalbalam	4,723	4,52	5
5.	Gabek	20,393	4,31	6
6.	Tamansari	3,190	19,53	5
7.	Gerunggang	31,143	3,06	6
Total		104,405	100	42

Sumber: BPS Kota Pangkalpinang, 2021

2. Letak Astronomis dan Geografis

Berdasarkan kondisi geografisnya, wilayah Kota Pangkalpinang terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah lautan. Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2000 yang telah disahkan secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbentuk atas dua pulau besar dan ratusan pulau kecil. Kota Pangkalpinang yang merupakan kota dengan luasan terkecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak di Pulau Bangka. Secara astronomis, Kota Pangkalpinang terletak antara 02°03' – 02°10' LS dan 106°02' – 106°12' BT.

Bila ditinjau dari sudut geografisnya Kota Pangkalpinang merupakan daerah yang strategis, jika dikaitkan dengan pembangunan nasional dan pembangunan provinsi baru. Hal ini dikarenakan Kota Pangkalpinang sebagai ibukota provinsi mempunyai fungsi sebagai pusat pengembangan pembangunan di



Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai pusat pengembangan wilayah bagi Provinsi Bangka Belitung dalam perkembangannya selama beberapa tahapan pembangunan, Kota Pangkalpinang telah mengalami beberapa kemajuan yang cukup pesat, hal ini ditandai dengan pertumbuhan fisik Kota Pangkalpinang.

3. Kondisi Topografi

Kota Pangkalpinang secara umum mempunyai ketinggian antara 0 hingga 70 meter dari permukaan laut (m DPL), yang terbagi ke dalam lima kelas yaitu: 0-5 m DPL, 5-15 m DPL, 15-30 m DPL, 30-45 m DPL, dan 45-70 m DPL. Ketinggian tempat yang paling tinggi adalah Bukit Jurumudi dengan ketinggian 69 m DPL. Sebagian besar Kota Pangkalpinang merupakan daerah yang bergelombang sampai dengan datar yakni berkisar dari 0-30 m DPL. Sedangkan ketinggian 30-70 m DPL terletak di Kecamatan Gerunggang, Kecamatan Pangkalbalam dan Kecamatan Bukit Intan. Kelerengan Kota Pangkalpinang dibagi menjadi enam kelas lereng, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kelas lereng 0-2% (topografi sangat datar hingga cekungan), tersusun atas batuan endapan dan bukan endapan, berupa daerah pantai, rawa, danau dan bantaran sungai. Wilayah dengan kelerengan ini terdapat di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui dan Kecamatan Gerunggang.



2. Kelas lereng 2-8% (topografi datar), lokasinya mulai dari pantai timur hingga kaki perbukitan terdapat di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui, Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Gerunggang.
3. Kelas lereng 8-15% (topografi landai agak miring), merupakan kaki perbukitan, daerah perbukitan kecil, dataran berombak, yang terdapat di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui, Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Gerunggang.
4. Kelas lereng 15-25% (topografi agak curam), terdapat pada perbukitan bergelombang, terdapat menyebar antara perbukitan kecil di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui, Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Gerunggang.
5. Kelas lereng 25-40% (topografi curam), terdapat di perbukitan, terdapat di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam dan Kecamatan Gerunggang.
6. Kelas lereng >40% (topografi sangat curam), terdapat di puncak-puncak perbukitan di Kecamatan Gerunggang.

4. Kondisi Geologi dan Struktur Tanah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan daratan dan perairan Bangka Belitung merupakan satu kesatuan dari bagian dataran Sunda. Struktur geologi yang terdapat di



Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya Kota Pangkalpinang terdiri dari beberapa formasi batuan antara lain batuan malihan (metamorf) yang terdiri dari sekis dan gneis sebagai batuan tertua.

Struktur geologi di Kota Pangkalpinang secara umum terdiri dari formasi tertua berupa batu kapur berumur Permo Karbon, menyusul Slate berumur Trias Atas dan terakhir Intrusi Granit berumur setelah Trias Jura. Susunan batuan granit bervariasi dari granis hingga diorit dengan inklusi mineral berwarna yaitu Biotit, dan ada kalanya Amfibol Hijau.

Jika dilihat secara morfologi, wilayah Kota Pangkalpinang berbentuk cekung dimana pusat kota berada di daerah rendah. Daerah-daerah yang berbukit mengelompok pada bagian Barat hingga Selatan Kota Pangkalpinang. Salah satunya terletak di Bukit Girimaya. Morfologi Kota Pangkalpinang pada dasarnya berbentuk cekung, dimana bagian pusat kota lebih rendah. Keadaan ini memberikan dampak negatif, seperti wilayah Kota Pangkalpinang menjadi rawan banjir terutama pada musim hujan atau pengaruh pasang surut air laut melalui Sungai Rangkui yang membelah Kota Pangkalpinang.

5. Kondisi Klimatologi

Kota Pangkalpinang memiliki iklim tropis kering selama 3 bulan berturut-turut, dimana iklim basah mencapai 7 bulan sampai dengan 9 bulan. Secara umum, kondisi klimatologi di Kota



Pangkalpinang berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan di Stasiun BMKG Kota Pangkalpinang Tahun 2019 ditampilkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2

Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Curah Hujan, dan Penyinaran Matahari Menurut Stasiun BMKG Kota Pangkalpinang Tahun 2020

No	Uraian	Keterangan	Kondisi
1	Suhu (°C)	Maksimum	32,1
		Minimum	23,4
		Rata-Rata	27,1
2	Kelembaban Udara (%)	Maksimum	96
		Minimum	61
		Rata-Rata	83
3	Tekanan Udara (mb)	Rata-Rata	1.005,4
4	Penyinaran Matahari (%)	Rata-Rata	47,4
5	Kecepatan Angin (knots)	Maksimum	7,7
		Minimum	0,0
		Rata-Rata	2,5
6	Curah Hujan	Intensitas (mm)	2.705,9
		Hari	254

Sumber: Badan Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Kota Pangkalpinang

Kondisi klimatologi berdasarkan tabel tersebut, dapat digambarkan kelembaban udara di wilayah Pangkalpinang rata-rata berkisar antara 61% hingga 96% dengan kelembaban udara rata-rata adalah 83%. Temperatur udara rata-rata di wilayah sekitar Stasiun Pangkalpinang berkisar antara 23,4°C hingga 32,1°C. sehingga temperatur udara rata-rata sebesar 27,1°C. Kecepatan angin rata-rata 2,5 knot. Lama penyinaran matahari di wilayah Pangkalpinang adalah 47,4%. Adapun curah hujan dalam setahun mencapai 254 hari, dengan intensitas 2.705,9 mm.

6. Kondisi Demografis

Gambaran Demografi di suatu wilayah dapat dilihat dari jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, dan kepadatan penduduk



yang terdapat di dalamnya. Perkembangan jumlah penduduk Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2018-2019 ditampilkan pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2. 3
Jumlah Penduduk Kota Pangkalpinang Menurut Kecamatan
dan Jenis Kelamin Tahun 2018-2020

No	Kecamatan	2018			2019			2020		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1.	Rangkui	20.616	19.486	40.102	19.527	19.197	38.724	19.351	18.945	38.296
2.	Bukit Intan	19.376	18.835	38.211	19.544	18.774	38.318	19.757	19.041	38.798
3.	Girimaya	10.695	10.446	21.141	9.694	9.543	19.237	9.637	9.510	19.147
4.	Pangkalbalam	11.728	10.956	22.684	11.508	11.059	22.567	11.375	11.009	22.384
5.	Gabek	13.402	12.882	26.284	15.939	15.543	31.482	16.619	16.325	32.944
6.	Tamansari	12.080	11.475	23.555	10.732	10.551	21.283	10.514	10.300	20.814
7.	Gerunggang	18.982	17.561	36.543	22.138	21.630	43.768	22.914	22.456	45.370
Total		106.879	101.641	208.520	109.082	106.297	215.379	110.167	107.586	217.753

Sumber: BPS Kota Pangkalpinang, 2021

Jumlah penduduk Kota Pangkalpinang tahun 2020 sebanyak 217.753 jiwa, terdiri dari 110.167 jiwa laki-laki dan 107.586 jiwa perempuan. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa komposisi jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan di Kota Pangkalpinang. Adapun jumlah penduduk terbanyak menurut Kecamatan di Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 berada di Kecamatan Gerunggang sebanyak 45.370 jiwa dan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Girimaya sebanyak 19.147 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di Kota Pangkalpinang pada tahun 2010-2020 mencapai 2,19%. Apabila melihat dari data per kecamatan, maka terlihat bahwa terdapat 6 kecamatan yang menunjukkan laju pertumbuhan



yang positif, sedangkan 1 kecamatan lainnya menunjukkan laju pertumbuhan negatif.

Tabel 2. 4
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pangkalpinang
Per Kecamatan Tahun 2010-2020

No	Kecamatan	Laju Pertumbuhan (%)
1.	Rangkui	0,63
2.	Bukit Intan	2,46
3.	Girimaya	0,28
4.	Pangkalbalam	1,48
5.	Gabek	4,59
6.	Tamansari	-0,62
7.	Gerunggang	4,35
Pangkalpinang		2,19

Sumber: BPS Kota Pangkalpinang, 2021

Kepadatan penduduk Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 sebesar 2.093 jiwa per km². Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kota Pangkalpinang yaitu Kecamatan Rangkui sebesar 7.085 jiwa per km² sedangkan kepadatan terkecil berada di Kecamatan Bukit Intan yang hanya mencapai 1.167 jiwa per km², secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Kepadatan Penduduk Kota Pangkalpinang Per Kecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Per km ²)
1.	Rangkui	5,039	7.085
2.	Bukit Intan	35,420	1.167
3.	Girimaya	4,497	4.031
4.	Pangkalbalam	4,723	4.688
5.	Gabek	20,393	1.717
6.	Tamansari	3,190	5.791
7.	Gerunggang	31,143	1.534
Kota Pangkalpinang		104,405	2.093

Sumber: BPS, buku Kota Pangkalpinang dalam Angka, 2021



B. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan arahan rencana kawasan budidaya yang tercantum dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 maka, pengembangan wilayah budidaya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan sebagai berikut:

1. Kawasan Perumahan dan Permukiman

Kawasan perumahan dan permukiman adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian. Dengan asumsi setiap keluarga menempati satu rumah dengan rata-rata jumlah anggota keluarga 5 jiwa/KK, maka berdasarkan proyeksi jumlah penduduk, dapat diprediksi kebutuhan rumah di Kota Pangkalpinang pada tahun 2030 sebanyak 60.678 unit rumah.

Adapun arahan tingkat kepadatan perumahan dan permukiman di Kota Pangkalpinang dibagi menjadi:

1. kawasan perumahan dan permukiman kepadatan tinggi, dengan jumlah 54-97 rumah/ha, dikembangkan di pusat kota seluas kurang lebih 1.300 ha meliputi Kecamatan Tamansari, Kecamatan Rangkui, sebagian Kecamatan Gerunggang, sebagian Kecamatan Gabek dan sebagian Kecamatan Pangkalbalam.



2. kawasan perumahan dan permukiman kepadatan sedang, dengan jumlah 24-53 rumah/ha, dikembangkan seluas kurang lebih 2.550 ha meliputi sebagian Kecamatan Gabek, sebagian Kecamatan Gerunggang, sebagian Kecamatan Bukit Intan, sebagian Kecamatan Girimaya dan sebagian Kecamatan Pangkalbalam.
3. kawasan perumahan dan permukiman kepadatan rendah, dengan jumlah 0-23 rumah/ha, dikembangkan seluas $\pm$ 1.800 ha meliputi sebagian Kecamatan Gerunggang, sebagian Kecamatan Gabek dan sebagian Kecamatan Bukit Intan.

2. Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan perdagangan dan jasa adalah lokasi yang ditetapkan untuk transaksi langsung antara pembeli dan pedagang atau kegiatan pelayanan yang wadah fisiknya antara lain berupa pertokoan, pasar, pusat belanja dan perkantoran. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa ditujukan untuk menyediakan ruang bagi pengembangan sektor ekonomi melalui lapangan usaha perdagangan, pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Kawasan perdagangan dan jasa memiliki fungsi antara lain:

- a. memfasilitasi kegiatan transaksi perdagangan dan jasa antar masyarakat yang membutuhkan (sisi permintaan) dan masyarakat yang menjual jasa (sisi penawaran); dan



- b. menyerap tenaga kerja dan memberikan kontribusi yang dominan terhadap PDRB.

Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di Kota Pangkalpinang direncanakan berdasarkan skala pelayanannya, yang secara umum terdiri dari:

- a. Kawasan perdagangan dan jasa skala regional.

Mencakup kegiatan perdagangan antar kota antarpulau yang lebih berorientasi ke arah luar kota, yang meliputi komoditas hasil perikanan, perkebunan serta komoditas lainnya termasuk barang-barang untuk keperluan rumah tangga. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala regional diarahkan pada kawasan pusat kota yaitu di sekitar Kelurahan Pasar Padi (Kecamatan Girimaya), Kelurahan Bintang dan Kelurahan Masjid Jamik (Kecamatan Rangkui), koridor jalan kolektor primer 1, pasar modern di Kelurahan Semabung Lama (Kecamatan Bukit Intan) kawasan Teluk Bayur CBD (Central Business District) di Kelurahan Pasir Putih (Kecamatan Bukit Intan) serta kawasan Air Mawar CBD di Kelurahan Air Mawar (Kecamatan Bukit Intan).

- b. Pusat perdagangan dan jasa skala kota.

Meliputi pengembangan kawasan Pasar Kampung Melayu di Kelurahan Batin Tikal (Kecamatan Tamansari) dan Kelurahan Bukit Sari (Kecamatan Gerunggang), koridor jalan kolektor



primer 2, Jalan Batin Tikal dan Jalan Kampung Melayu. Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa pada kawasan ini adalah perdagangan dan jasa modern, pertokoan, dengan skala pelayanan wilayah kota.

c. Perdagangan dan jasa skala kecamatan.

Meliputi pengembangan kawasan Pasar Rumpit di Kelurahan Ketapang (Kecamatan Pangkalbalam), kawasan Pasar Parit Lalang di Kelurahan Parit Lalang (Kecamatan Rangkui) dan rencana pengembangan pasar kecamatan di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Gerunggang, Kecamatan Gabek dan Kecamatan Girimaya. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa untuk semua skala pelayanan di atas, dilakukan dengan upaya penataan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung kawasan seperti bangunan pertokoan, kawasan parkir, jaringan jalan, sarana angkutan umum, jalur pejalan kaki, serta kualitas bangunan.

3. Kawasan Perkantoran Pemerintah

Bertujuan untuk menyediakan ruang bagi kegiatan pemerintahan tingkat kota maupun provinsi. Adapun untuk perkembangan perkantoran swasta dan jasa komersial diarahkan pada kawasan perdagangan dan jasa. Untuk mencapai kebijakan tersebut, strategi yang akan ditempuh, meliputi:



- a. memusatkan kantor-kantor di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di kawasan sekitar kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kelurahan Air Itam dan Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan; dan
- b. memusatkan kantor-kantor di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang di kawasan sekitar kantor Walikota Pangkalpinang di Kelurahan Sriwijaya dan Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya.

4. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengembangan kawasan peruntukan industri ditujukan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing industri serta menyediakan ruang bagi pengembangan sektor ekonomi melalui lapangan usaha industri pengolahan dan industri perdagangan. Kawasan peruntukan industri memiliki fungsi antara lain:

- a. memfasilitasi kegiatan industri agar tercipta aglomerasi kegiatan produksi di satu lokasi dengan biaya investasi prasarana yang efisien;
- b. mendukung upaya penyediaan lapangan kerja;
- c. meningkatkan nilai tambah komoditas yang pada gilirannya meningkatkan PDRB di wilayah yang bersangkutan; dan



d. mempermudah koordinasi pengendalian dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan.

Kegiatan industri yang ada saat ini di Kota Pangkalpinang tersebar di berbagai kelurahan yang sebagian berada pada kawasan perumahan dan permukiman. Untuk pengembangan lebih lanjut kegiatan industri di Kota Pangkalpinang dipusatkan di Kawasan Peruntukan Industri Ketapang Kecamatan Pangkalbalam seluas 825 ha.

5. Kawasan Pergudangan

Kawasan pergudangan adalah kawasan yang ditujukan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan gudang, yang meliputi kegiatan perpindahan dan penyimpanan barang. Berdasarkan pertimbangan aspek aksesibilitas terhadap kawasan pelabuhan dan industri, maka kawasan pergudangan di wilayah Kota Pangkalpinang akan diarahkan pengembangannya di Kecamatan Gabek serta sebagian di Kecamatan Pangkalbalam yang merupakan salah satu kawasan strategis di Kota Pangkalpinang.

6. Kawasan Pelabuhan

Kota Pangkalpinang memiliki pelabuhan laut dan pelabuhan pendukung kegiatan perikanan. Pelabuhan laut terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang



dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan inter dan antarmoda transportasi. Pelabuhan perikanan terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Kawasan pelabuhan di Kota Pangkalpinang akan diarahkan pengembangannya di sekitar Jembatan Emas Pangkalpinang muara Sungai Baturusa sebagai Kawasan New Port Pangkalpinang.

7. Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata adalah wilayah yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut dan tidak mengganggu kelestarian budaya, keindahan alam dan lingkungan. Jenis obyek wisata yang diusahakan dan dikembangkan di kawasan pariwisata dapat berupa wisata alam,



wisata sejarah dan konservasi budaya. Pengembangan kawasan pariwisata ditujukan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau mengusahakan objek, daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, serta usaha lain yang terkait di bidang tersebut. Kawasan pariwisata memiliki fungsi antara lain:

- a. memperkenalkan, mendayagunakan, dan melestarikan nilai-nilai sejarah/budaya lokal dan keindahan alam; dan
- b. mendukung upaya penyediaan lapangan kerja yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah yang bersangkutan.

Adapun rencana pengembangan kawasan pariwisata di Kota Pangkalpinang ditetapkan sebagai berikut:

- (a) kawasan pariwisata alam:
 - (1) Pantai Pasir Padi dan Pantai Tanjung Bunga
 - (2) Hutan kota
- (b) kawasan pariwisata budaya, yang akan dikembangkan di ruang cagar budaya.
- (c) kawasan pariwisata buatan, yang akan dikembangkan pada:
 - (1) ATM (Alun-Alun Taman Merdeka) di Kecamatan Tamansari;
 - (2) BBG (Bangka Botanical Garden) di Kecamatan Bukit Intan;
 - (3) Wisata Kuliner Pasar Mambo di Kecamatan Rangkui;
 - (4) Stadion Aquatic di Kecamatan Gerunggang;



- (5) Wisata Air di Kolam Retensi Kacang Pedang di Kecamatan Gerunggang, Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Rangkui;
- (6) Waterpark di Kecamatan Tamansari;
- (7) Wisata Kolong Teluk Bayur, Kolong Kepuh, Kolong Akit; dan
- (8) Lapangan golf Girimaya di Kecamatan Girimaya.

8. Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau

Ruang terbuka non hijau (RTNH) adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, ruang terbuka yang diperkeras (*paved*) maupun ruang terbuka biru (RTB) yang berupa permukaan sungai, kolong/danau, maupun areal-areal yang diperuntukkan khusus sebagai area genangan (retensi). Pengembangan kawasan RTNH ditujukan untuk memberikan dukungan terhadap fungsi kegiatan-kegiatan pemerintahan dan kegiatan permukiman, serta terselenggaranya keserasian kehidupan lingkungan dan sosial. Penyediaan dan pemanfaatan RTNH secara langsung membentuk keindahan dan kenyamanan, maka bila ditinjau dari segi-segi sosial-politik dan ekonomi, dapat berfungsi penting bagi perkembangan pariwisata yang pada saatnya juga akan kembali berpengaruh terhadap kesehatan perkembangan sosial, politik dan ekonomi suatu hubungan antara wilayah perdesaan-perkotaan tertentu.



Adapun rencana pengembangan RTNH di Kota Pangkalpinang terdiri atas seluruh kolong yang ada di Kota Pangkalpinang, Plaza Gedung Tudung Saji, halaman dan tempat parkir fasilitas umum, serta jalur-jalur trotoar dan pedestrian.

9. Kawasan Peruntukan Sektor Informal

Kawasan peruntukan sektor informal ditujukan untuk memberikan ruang yang khusus disediakan untuk menampung pedagang kaki lima (PKL) berupa pelataran dan ruang-ruang di pinggir jalan di pusat-pusat perdagangan (pasar) atau keramaian dengan lokasi yang sesuai dengan karakteristik kaki lima. Pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai suatu bentuk usaha informal yang dilakukan oleh seorang/badan/lembaga dengan menjual barang atau produk dagangan yang tidak memiliki tempat usaha permanen dan sewaktu-waktu dapat berpindah-pindah tempat untuk menjajakan barang dagangannya. Berdagang secara informal merupakan solusi termudah bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya di tengah kesempatan kerja formal yang terbatas.

Berdasarkan pertimbangan kondisi kota, konsep dan prinsip penataan, maka rencana pengembangan kawasan peruntukan sektor informal di Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

- a. kawasan peruntukan sektor informal yang direncanakan pada waktu tertentu yang terdiri atas kuliner malam di Jalan Kapten



Munzir Thalib dan Jalan Ican Saleh, serta Pasar Ramadhan di Jalan Batin Tikal, Jalan Masjid Jamik dan Jalan Depati Hamzah; dan

- b. kawasan peruntukan sektor informal yang terintegrasi dengan kawasan perdagangan dan jasa.

10. Kawasan Pendidikan

Ditujukan untuk pengembangan prasarana dan sarana pendidikan untuk menunjang kegiatan pelayanan masyarakat di sektor pendidikan. Pengembangan kawasan pendidikan di wilayah Kota Pangkalpinang ditujukan sebagai kawasan pengembangan untuk pendidikan tinggi, yang akan diarahkan pengembangannya di Kecamatan Gabek. Adapun untuk pengembangan pendidikan tingkat dasar sampai dengan pendidikan tingkat menengah atas maupun kejuruan dapat diarahkan menyatu pada lingkungan perumahan dan permukiman yang disesuaikan dengan standar kebutuhan prasarana dan sarana kawasan.

11. Kawasan Kesehatan

Ditujukan untuk pengembangan prasarana dan sarana kesehatan untuk menunjang kegiatan pelayanan masyarakat di sektor kesehatan. Pengembangan kawasan kesehatan di wilayah Kota Pangkalpinang ditujukan untuk pengembangan prasarana rumah sakit umum daerah dengan skala regional, yang akan diarahkan pengembangannya di Kecamatan Girimaya. Adapun



untuk pengembangan prasarana dan sarana kesehatan lingkungan dapat diarahkan menyatu pada lingkungan perumahan dan permukiman sesuai dengan standar kebutuhan prasarana dan sarana kawasan.

12. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Ditujukan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. Strategi secara umum untuk meningkatkan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan antara lain:

- a. mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan;
- b. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
- c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga; dan
- d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

Berdasarkan kondisi *eksisting* serta perkembangan kebutuhan, maka rencana pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan di wilayah Kota Pangkalpinang terdiri atas wilayah:

- a. Kepolisian Daerah (POLDA) Kepulauan Bangka Belitung di Kecamatan Bukit Intan;



- b. Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Pangkalpinang di Kecamatan Tamansari; dan
- c. Komando Resort Militer (KOREM) 045 Garuda Jaya / Komando Distrik Militer (KODIM) 0413 Bangka di Kecamatan Bukit Intan dan rencana pengembangannya di Kecamatan Gerunggang.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan PDRB

PDRB pada prinsipnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan). Perkembangan PDRB Kota Pangkalpinang Atas Harga Berlaku pada tahun 2016 hingga 2019 dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan namun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Perkembangan ini dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut.



Tabel 2.6
PDRB Kota Pangkalpinang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun
2016-2020 (Juta rupiah)

Sektor PDRB	PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHB (Juta Rupiah)				
	2016	2017	2018 ^r	2019*	2020**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	554.263	559.351	635.921	676.109	738.024
Pertambangan dan Penggalan	-	-	-	-	-
Industri Pengolahan	1.984.236	2.086.418	2.083.626	1.818.369	1.718.860
Pengadaan Listrik dan Gas	8.255	9.726	10.573	14.235	14.521
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.740	4.223	4.244	4.337	4.667
Konstruksi	1.198.149	1.332.758	1.453.796	1.657.273	1.641.009
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.003.109	3.334.508	3.526.643	3.676.940	3.506.355
Transportasi dan Pergudangan	684.665	761.854	831.007	895.333	844.432
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	384.813	417.933	447.556	530.073	552.532
Informasi dan Komunikasi	315.383	347.249	398.305	473.535	560.059
Jasa Keuangan dan Asuransi	516.446	551.580	626.103	669.900	626.180
Real Estate	587.474	640.907	712.428	742.772	786.160
Jasa Perusahaan	54.770	59.979	67.547	72.598	63.733
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	786.266	862.495	931.274	1.029.725	1.001.292
Jasa Pendidikan	615.686	668.254	729.194	806.904	826.436



Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	211.944	233.161	248.092	280.227	287.838
Jasa lainnya	207.294	238.170	262.244	300.418	291.653
Produk Domestik Regional Bruto	11.116.493	12.108.566	12.955.302	13.653.823	13.463.751

Sumber: Kota Pangkalpinang dalam angka 2021; ^r = angka revisi, ^{**} = angka sementara, ^{***} = angka sangat sementara

PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kota Pangkalpinang juga terus mengalami peningkatan pada tahun 2016-2020 seperti halnya PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kota Pangkalpinang. Perkembangan PDRB ADHK di Kota Pangkalpinang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.7

**PDRB Kota Pangkalpinang Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2016-2020(Juta rupiah)**

Sektor PDRB	PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK (Juta Rupiah)				
	2016	2017	2018 ^r	2019 [*]	2020 ^{**}
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	384.696	365.452	397.738	410.550	433.876
Pertambangan dan Penggalan	-	-	-	-	-
Industri Pengolahan	1.615.041	1.671.151	1.613.426	1.440.107	1.375.010
Pengadaan Listrik dan Gas	5.552	5.791	6.166	8.090	8.165
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.358	2.538	2.399	2.448	2.585
Konstruksi	819.009	873.932	929.328	1.023.106	1.008.216
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.111.081	2.250.878	2.358.470	2.420.063	2.268.144
Transportasi dan Pergudangan	470.604	510.771	547.956	574.262	520.727
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	262.199	278.720	290.796	327.267	311.725
Informasi dan Komunikasi	289.701	316.080	363.155	426.997	505.466



Jasa Keuangan dan Asuransi	368.711	378.248	415.929	437.809	408.381
Real Estate	403.162	422.097	461.822	471.778	491.117
Jasa Perusahaan	37.596	38.378	41.041	41.945	34.521
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	516.157	541.873	595.406	654.350	610.081
Jasa Pendidikan	366.604	383.361	419.786	456.365	452.243
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	152.560	164.894	172.563	191.122	193.340
Jasa lainnya	140.985	154.318	166.808	185.213	174.213
Produk Domestik Regional Bruto	7.945.986	8.358.482	8.782.789	9.071.472	8.797.810

Sumber: BPS Kota Pangkalpinang dalam angka 2021; r = angka revisi, * = angka sementara, ** = angka sangat sementara

Laju Pertumbuhan PDRB Kota Pangkalpinang selama kurun waktu tahun 2016-2020 kondisinya fluktuatif. Dari 4,24% pada tahun 2016 terjadi penurunan menjadi -3,02% tahun 2020. Pada tahun 2020, pertumbuhan paling tinggi adalah di Informasi dan Komunikasi, yakni sebesar 18.38%. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.8

Laju Pertumbuhan PDRB Kota Pangkalpinang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2016-2020

Lapangan Usaha	2016	2017	2018 ^r	2019 [*]	2020 ^{**}
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,13	-5,00	8,83	3,22	5,68
Pertambangan dan Penggalan	-	-	-	-	-
Industri Pengolahan	3,95	3,47	-3,45	-10,74	-4,52
Pengadaan Listrik dan Gas	13,74	4,88	6,46	31,21	0,92
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,07	7,61	-5,45	2,03	5,60
Konstruksi	6,86	6,71	6,34	10,09	-1,46
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,58	6,62	4,78	2,61	-6,28
Transportasi dan Pergudangan	5,08	8,54	7,28	4,80	-9,32



Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,74	6,30	4,33	12,54	-4,75
Informasi dan Komunikasi	9,14	9,11	14,89	17,58	18,38
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,54	2,59	9,96	5,26	-6,72
Real Estate	3,36	4,70	9,41	2,16	4,10
Jasa Perusahaan	0,08	2,08	6,94	2,20	-17,70
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,48	4,98	9,88	9,90	-6,77
Jasa Pendidikan	7,67	4,57	9,50	8,71	-0,90
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,65	8,08	4,65	10,76	1,16
Jasa lainnya	9,99	9,46	8,09	11,03	-5,94
Produk Domestik Regional Bruto	5,17	5,19	5,08	3,29	-3,02

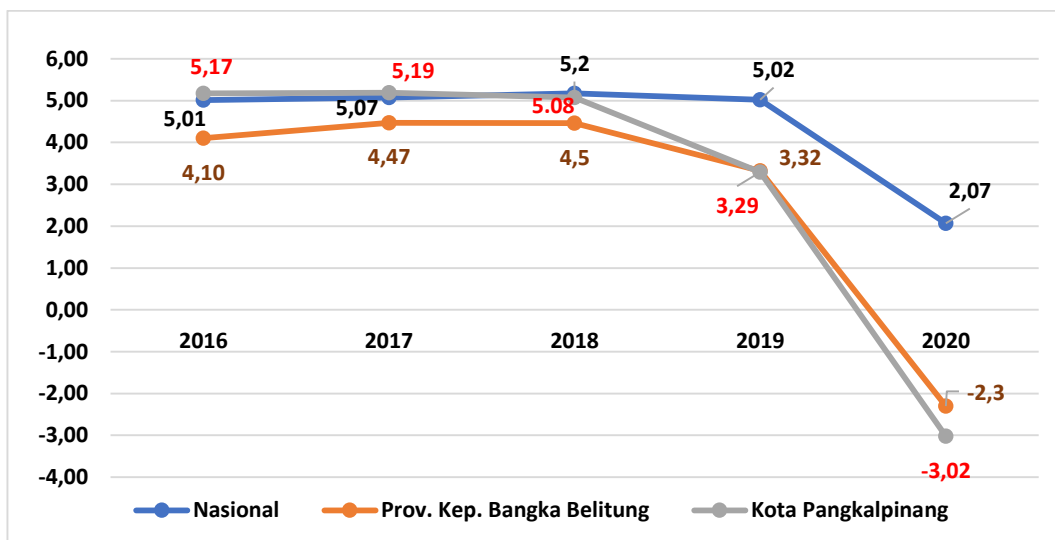
Sumber: Kota Pangkalpinang Dalam Angka 2021; * = angka revisi, ** = angka sementara, *** = angka sangat sementara

Pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang kembali mengalami penurunan pada tahun 2020. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang selalu menunjukkan perlambatan dari tahun ke tahun setelah sempat meningkat di tahun 2016-2017. Berbeda dengan capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengalami penurunan yang drastis pada tahun 2020, hal ini diakibatkan oleh *Pandemic Covid*. Secara rinci bisa dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2. 2

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)



Sumber: Kota Pangkalpinang Dalam Angka, BPS, 2021

Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang sebesar -3,02 menurun jauh sebesar 6,31% dari tahun 2019, dan berada di atas capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,72% di tahun 2020. Jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitar yang terdapat di Prov. Pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang tahun 2020 menempati posisi ke-5 di bawah Kabupaten Belitung timur, Belitung dan Belitung Timur.

Tabel 2.9

Pertumbuhan Ekonomi Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Lainnya Tahun 2020

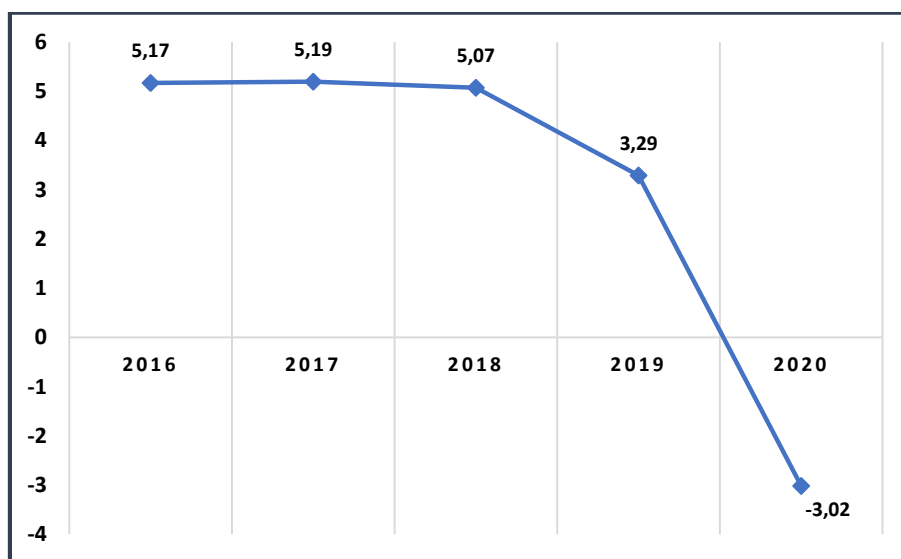
Kabupaten/Kota	% Pertumbuhan
Bangka	-0,73 %
Belitung	%
Bangka Barat	-5,43 %
Bangka Tengah	-2,36%



Bangka Selatan	-1,99%
Belitung Timur	-0,66%
Pangkalpinang	-3,02 %

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2021

Gambar 2. 3
Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Kota Pangkalpinang
Tahun 2020 (%)



Sumber: Kota Pangkalpinang dalam Angka 2021, BPS



2. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto per Kapita atas dasar harga berlaku diperoleh dari perhitungan total nilai PDRB atas dasar harga berlaku suatu wilayah dibagi dengan penduduk pertengahan tahun wilayah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.

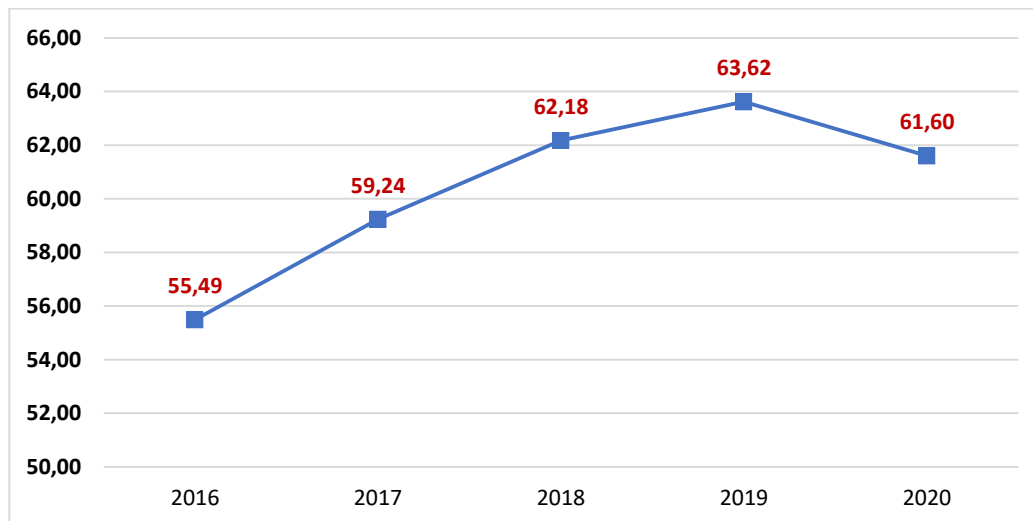
Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan perkapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor dan transfer yang mengalir ke luar (*transfer out*) sama dengan yang masuk (*transfer in*), maka pendapatan per kapita dapat ditunjukkan melalui tingkat PDRB per kapita.

PDRB per kapita penduduk Kota Pangkalpinang menurut dasar harga berlaku dalam kurun 2016-2020 naik dari Rp 55.49 menjadi Rp 61.60 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Nasional Bruto (PNB) per satu orang penduduk.



Gambar 2.4

**PDRB per Kapita Kota Pangkalpinang Atas Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2016 - 2020**



Sumber: BPS, PDRB Kota Pangkalpinang Menurut Lapangan Usaha 2015-2019
*= angka sementara** = angka sangat sementara

3. Laju Inflasi

Inflasi yang terjadi di Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan nilai yang fluktuatif. Nilai inflasi tertinggi yang dialami oleh Kota Pangkalpinang mencapai 7,78% pada tahun 2016. Kemudian tahun 2020 inflasi mencapai 0,43%. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.5.

Gambar 2. 5**Laju Inflasi Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2020**

Sumber: Kota Pangkalpinang dalam Angka 2021, BPS

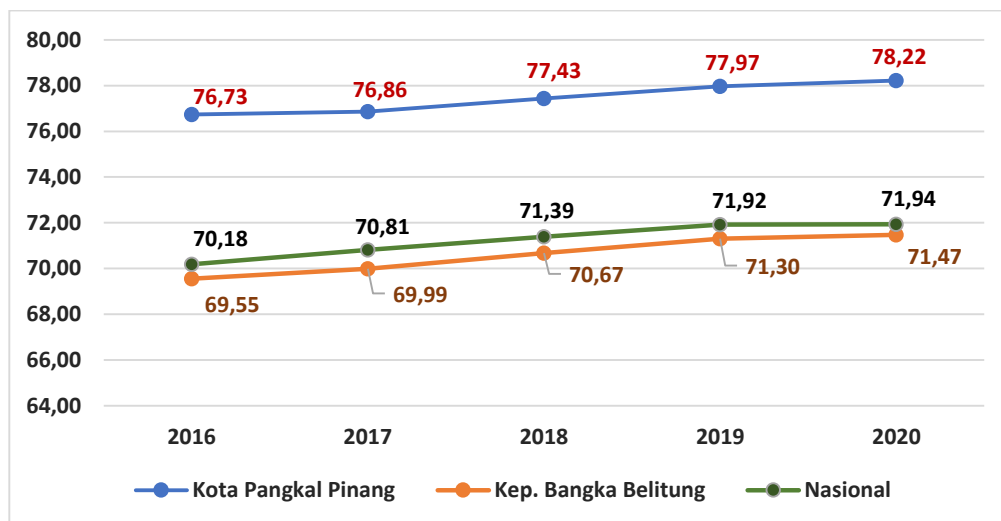
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Besarnya nilai IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 IPM Kota Pangkalpinang mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 76,73 meningkat menjadi 76,86 pada tahun 2019. Kondisi tersebut menunjukkan kategori tinggi karena sudah berada di atas angka 70. Peningkatan capaian IPM Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 relevan



terhadap peningkatan IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional, selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.6.

Gambar 2. 6
Perkembangan IPM Kota Pangkalpinang dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)

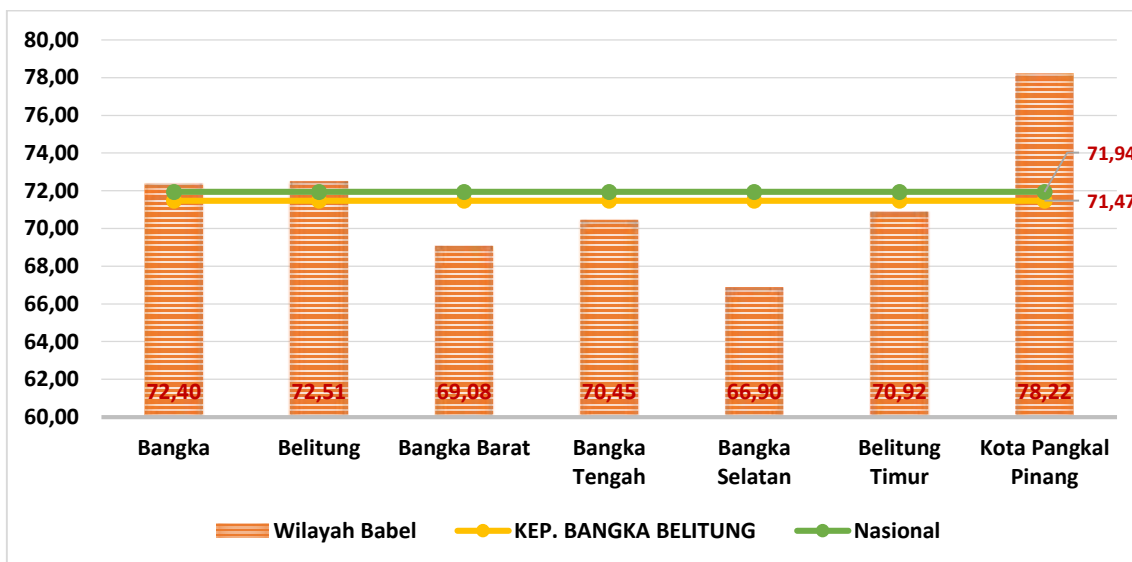


Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2021

IPM Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 sebesar 78,22 berada di atas capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu 71,47 dan Nasional sebesar 71,94. Dibandingkan dengan IPM kabupaten/kota sekitarnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang menunjukkan posisi tertinggi. Lebih jelasnya mengenai Posisi relatif IPM Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 7

Posisi IPM Kota Pangkalpinang Tahun 2020 (%)



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2021

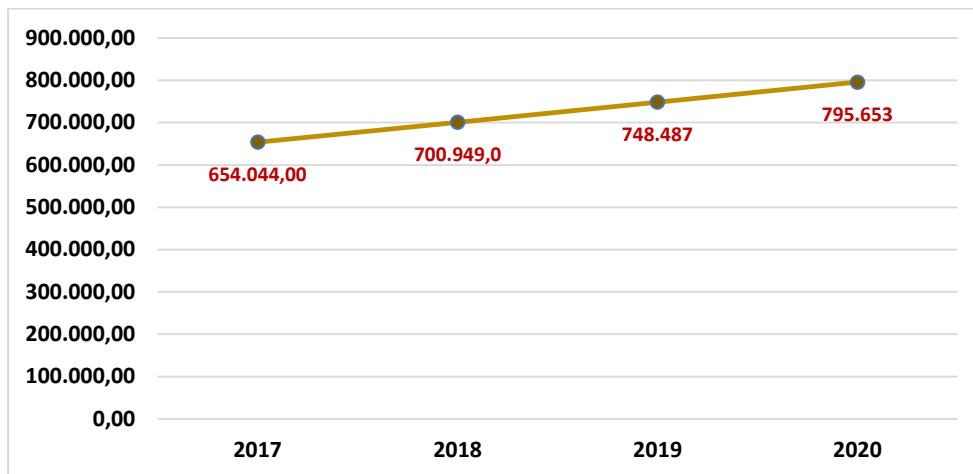
5. Persentase Penduduk Miskin

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), yaitu kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan. Tingkat kemiskinan yang terdapat di Kota Pangkalpinang dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 posisi garis kemiskinan Kota Pangkalpinang mencapai Rp. 795.653.



Gambar 2.8

**Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Pangkalpinang
Tahun 2017-2020 (%)**

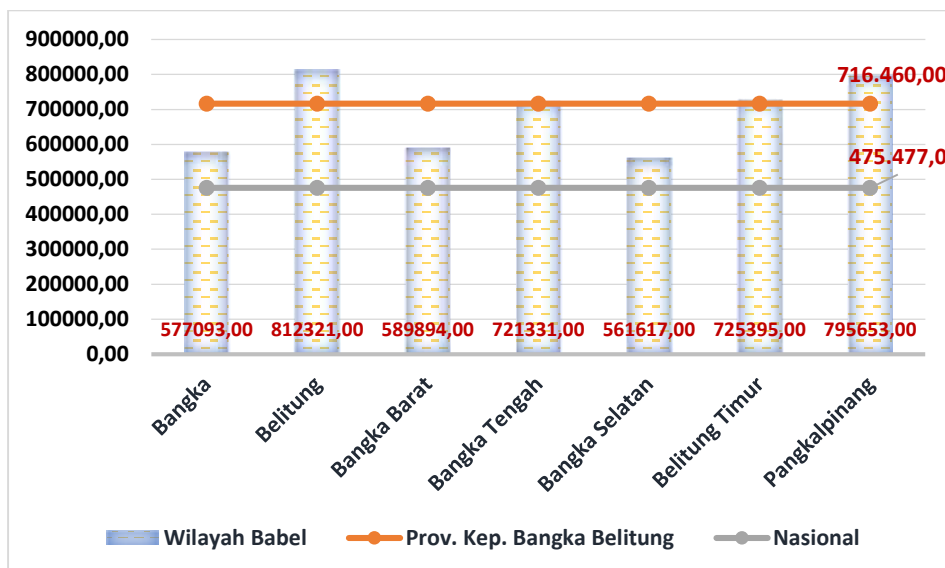


Sumber: Pangkalpinang Dalam Angka Tahun 2021, BPS

Jika dilihat per kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka Kota Pangkalpinang memiliki nilai garis kemiskinan tertinggi ke-2 diantara kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini mengindikasikan tingginya tingkat kemiskinan yang terjadi di Kota Pangkalpinang jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain di Provinsi Bangka Belitung.

Gambar 2.9

**Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kota Pangkalpinang Tahun 2020
(Rupiah/kapita/bulan)**

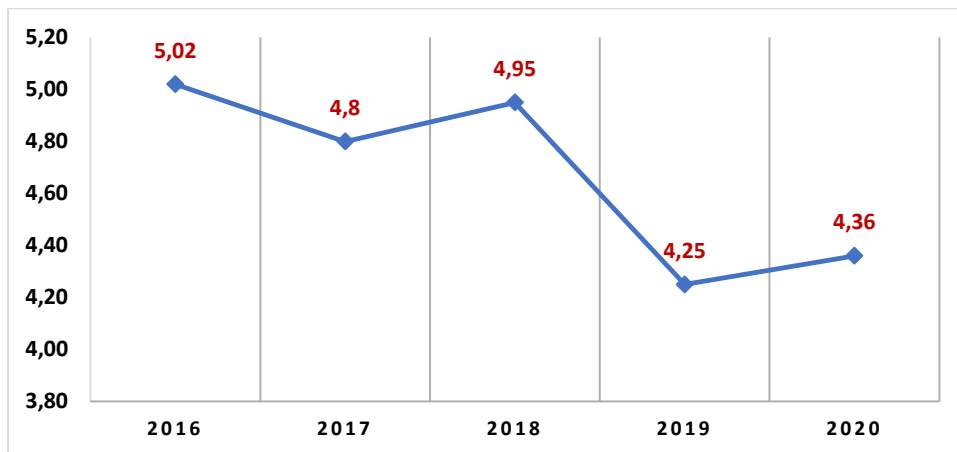


Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2021, BPS Provinsi

Persentase penduduk miskin Kota Pangkalpinang selama kurun waktu lima tahun (tahun 2016-2020) mengalami kondisi yang fluktuatif, yaitu dari tahun 2016 sebesar 5,02% turun menjadi 4,8% pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018 naik menjadi 4,95%. Penurunan terjadi pada tahun 2019 yaitu 4,25% kemudian kembali naik pada tahun 2019 menjadi 4,36%.



Gambar 2.10
Perkembangan Presentase Penduduk Miskin di Kota Pangkalpinang
Tahun 2016-2020 (%)

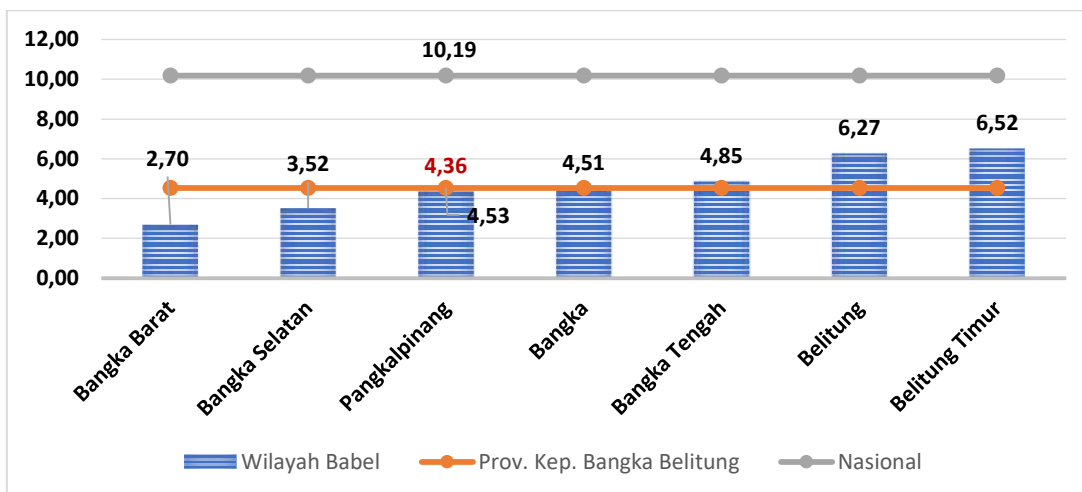


Sumber: BPS, Kota Pangkalpinang Dalam Angka 2021

Sedangkan posisi relatif persentase penduduk miskin Kota Pangkalpinang tahun 2020 sebesar 4,36% berada di bawah Provinsi Bangka Belitung (4,53%) dan Nasional (10,19%). Dibandingkan dengan kabupaten se Bangka Belitung pada tahun 2020, persentase penduduk miskin Kota Pangkalpinang menempati peringkat ketiga terendah setelah Kabupaten Bangka sebesar 4,51%, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.11

**Posisi Relatif Presentase Penduduk Miskin
Kota Pangkalpinang Tahun 2020**

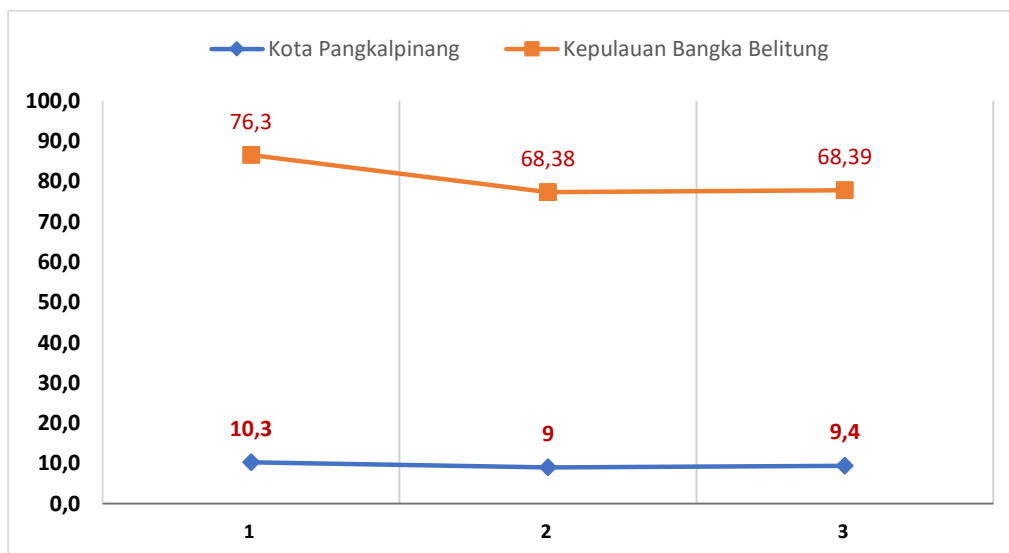


Sumber: BPS Provnsi Kepulauan Bangka Belitung dalam angka, 2021

Sejalan dengan capaian persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin Kota Pangkalpinang pada tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami jumlah yang fluktuatif, yaitu pada tahun 2018 sebesar 10,3 ribu orang dan pada tahun 2019 menurun menjadi sebesar 9 ribu orang kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 9,4 ribu orang, secara rinci terlihat pada gambar berikut.



Gambar 2.12
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Pangkalpinang
Tahun 2018-2020 (Ribu Orang)

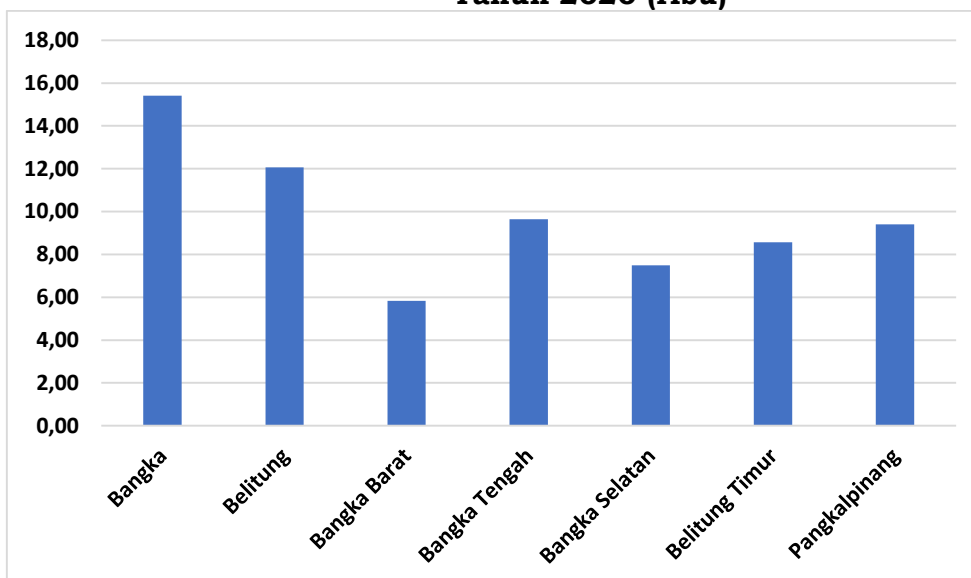


Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2021

Sedangkan posisi relatif jumlah penduduk miskin Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 sebesar 9,4 ribu orang berada menempati posisi keempat terendah setelah Kabupaten Bangka Tengah, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.13
Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kota Pangkalpinang
Tahun 2020 (ribu)

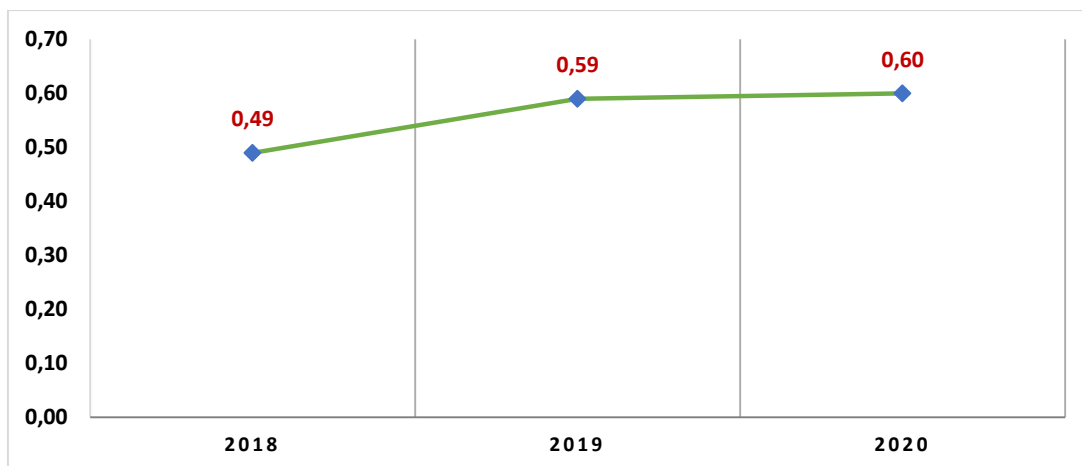


Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2021

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Pangkalpinang selama kurun waktu tiga tahun (2018-2020) mengalami instabilitas, yaitu pada tahun 2018 ke tahun 2019 naik dari 0,49 menjadi 0,59, kemudian kembali meningkat 0,60 , secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.14
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kota Pangkalpinang
Tahun 2018-2020



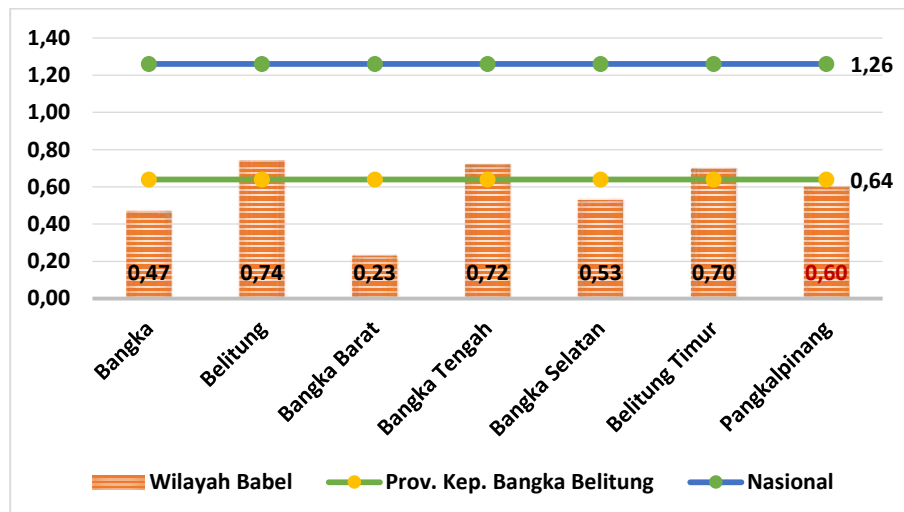
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Sedangkan posisi relatif indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 sebesar 0,64 berada menempati posisi keempat tertinggi setelah Kabupaten Bangka, dapat dilihat pada gambar 2.15



Gambar 2.15

**Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Kota Pangkalpinang Tahun 2020 (%)**



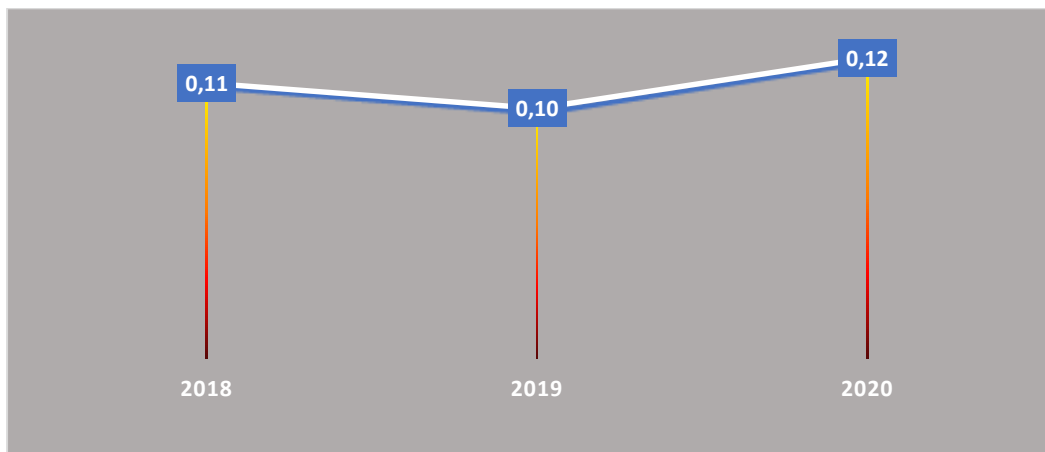
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2021

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) yaitu ukuran indeks yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Selama kurun waktu tiga tahun (2018-2020), indeks keparahan kemiskinan (P2) Kota Pangkalpinang kembali mengalami instabilitas setelah tahun 2018 dengan tetap diangka 0,11. Tahun 2020 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) meningkat menjadi 0,10 , selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.16

**Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Pangkalpinang
Tahun 2018-2020 (Ribu Orang)**

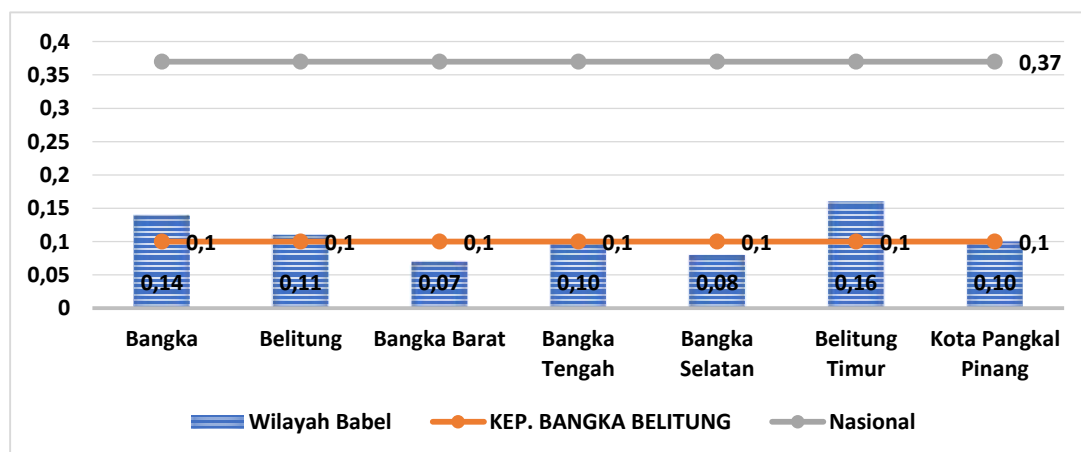


Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Sedangkan posisi relatif indeks keparahan kemiskinan (P2) di Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 sebesar 0,10 berada menempati posisi keempat tertinggi sama dengan Kabupaten Bangka Tengah, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 17

**Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kota Pangkalpinang
Tahun 2020 (%)**



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020



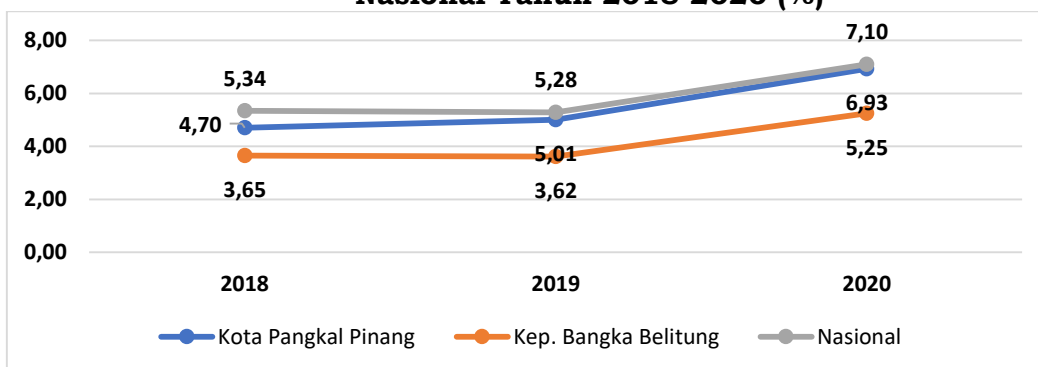
6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kota Pangkalpinang dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kota Pangkalpinang pada tahun 2018 hingga tahun 2020 terus mengalami fluktuatif. Pada tahun 2018 tingkat pengangguran terbuka di Kota Pangkalpinang mencapai 4,70%, dan naik menjadi 5,01% pada tahun 2019 namun kembali naik di tahun 2020 menjadi 6,93%. Selengkapnya dapat ditunjukkan melalui gambar berikut.

Gambar 2.18

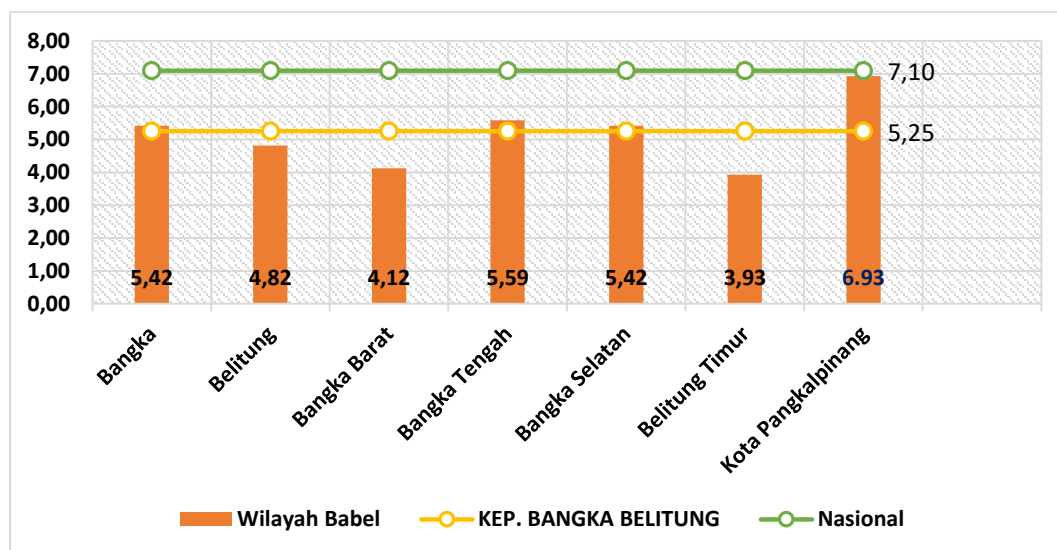
**Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pangkalpinang
Dibandingkan Dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan
Nasional Tahun 2018-2020 (%)**



Sumber: BPS, buku Prov. Kep. Bangka Belitung dalam Angka, 2021

Kondisi tingkat pengangguran terbuka Kota Pangkalpinang tahun 2020 sebesar 6,93%, berada di atas rata-rata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (5,25%) dan dibawah nasional (7,10%). Posisi nilai tingkat pengangguran terbuka Kota Pangkalpinang merupakan yang tertinggi diantara kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.19
Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka
Kota Pangkalpinang Tahun 2020 (%)



Sumber: BPS, buku Prov. Kep. Bangka Belitung dalam Angka Tahun 2021

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

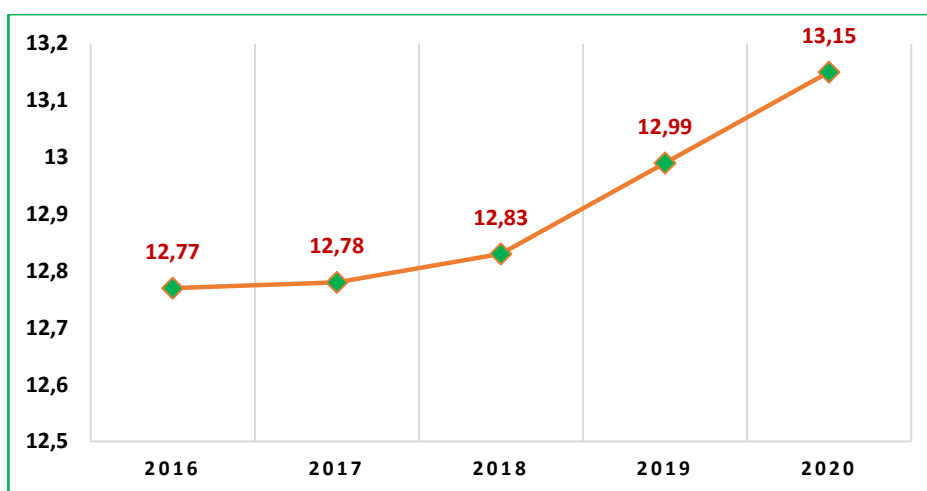
1. Pendidikan

a. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah yang merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah digunakan

untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Harapan Lama Sekolah dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Gambar 2.20
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Pangkalpinang
Tahun 2016-2020



Sumber: Kota Pangkalpinang dalam Angka, BPS, 2021

Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Pangkalpinang pada tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 12,77 tahun dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 13,15 tahun. Harapan Lama Sekolah Kota Pangkalpinang selama kurun waktu lima tahun terakhir tersebut relevan terhadap peningkatan Harapan Lama Sekolah Provinsi Bangka Belitung dan Nasional.

b. Rata-Rata Lama Sekolah

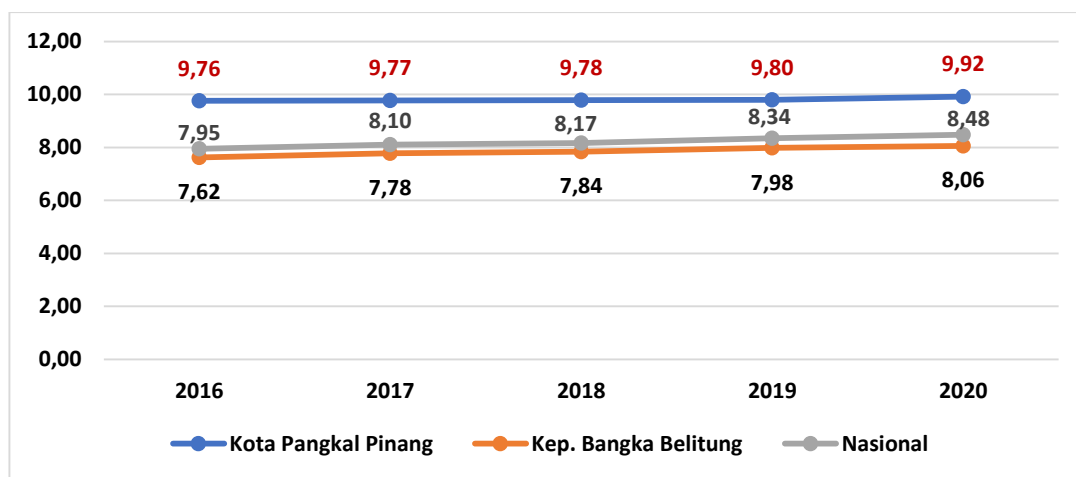
Rata-rata lama sekolah merupakan ukuran jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.



Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Pangkalpinang pada tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami kenaikan namun tidak begitu signifikan, yaitu pada tahun 2015 sebesar 9,75 tahun dan pada tahun 2019 menjadi sebesar 9,80 tahun meningkat 0,02 dari tahun 2018. Meskipun demikian perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Pangkalpinang selama kurun waktu lima tahun tersebut relevan terhadap perkembangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional yang sama-sama mengalami peningkatan. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.21

**Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Pangkalpinang,
Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2016-2019 (Tahun)**



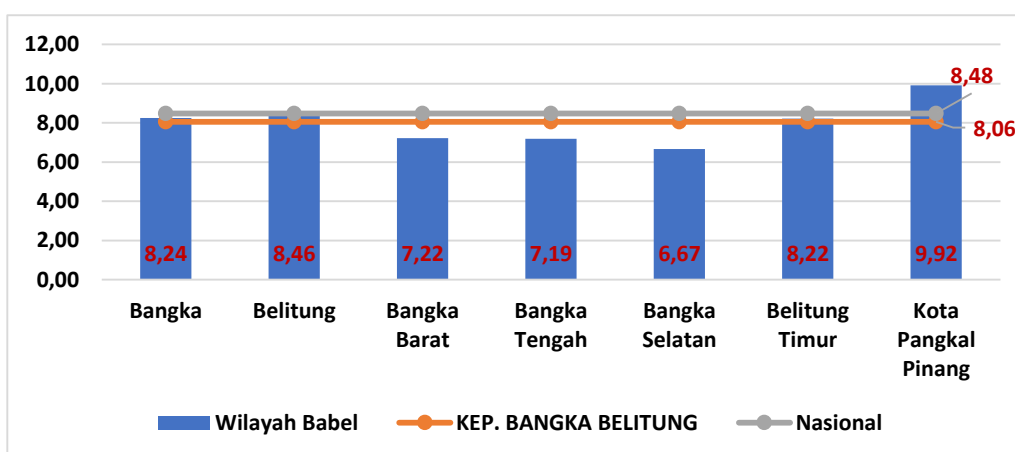
Sumber: BPS Nasional, 2020

Rata-Rata Lama Sekolah Kota Pangkalpinang tahun 2020 sebesar 9,92 tahun masih di atas rata-rata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 8,06 tahun dan Nasional sebesar 8,48 tahun. Dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya di Provinsi Bangka



Belitung pada tahun 2020, Rata-Rata Lama Sekolah Kota Pangkalpinang menempati posisi tertinggi, secara rinci bisa dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 22
Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah Kota Pangkalpinang
Tahun 2020 (Tahun)



Sumber: BPS Nasional, 2020

2. Kesehatan

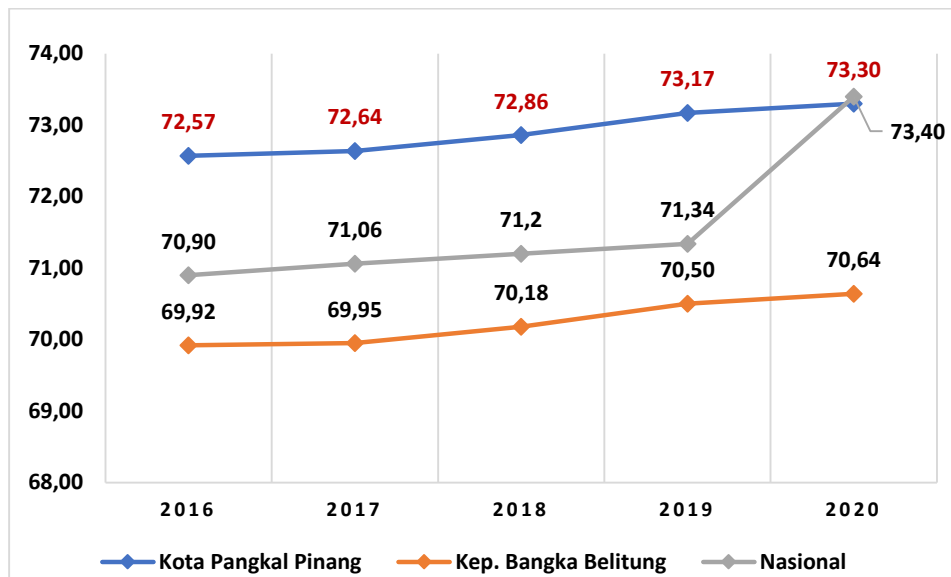
a. Usia Harapan Hidup

Angka harapan hidup saat lahir sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka harapan hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Pangkalpinang pada tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 72,57 tahun dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 73,30 tahun. Kondisi tersebut relevan terhadap peningkatan Angka Harapan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.23

**Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Pangkalpinang dengan
Provinsi Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2016-2020 (Tahun)**

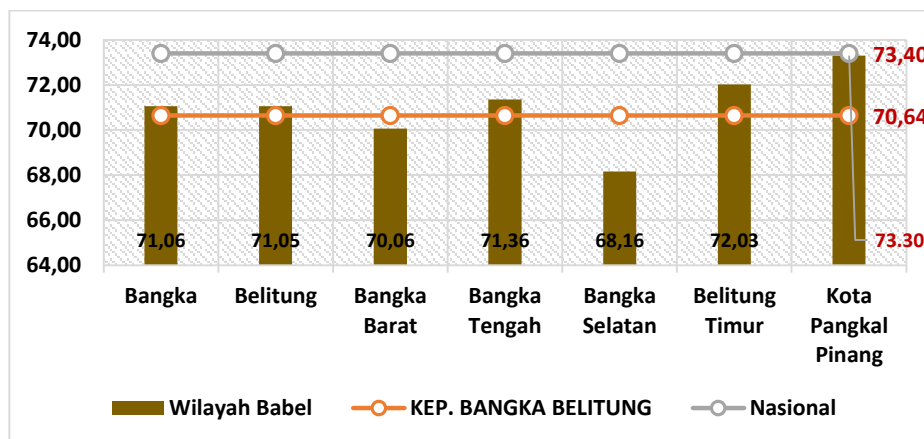


Sumber: BPS Nasional, 2021

Posisi relatif Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 sebesar 73,30 tahun berada di atas capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 70,64 tahun dan Nasional sebesar 73,40 tahun, serta menempati posisi tertinggi jika dibandingkan kabupaten/kota sekitarnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.24

Posisi Relatif AHH Kota Pangkalpinang Tahun 2020 (Tahun)



Sumber: BPS Nasional, 2021

3. Ketenagakerjaan

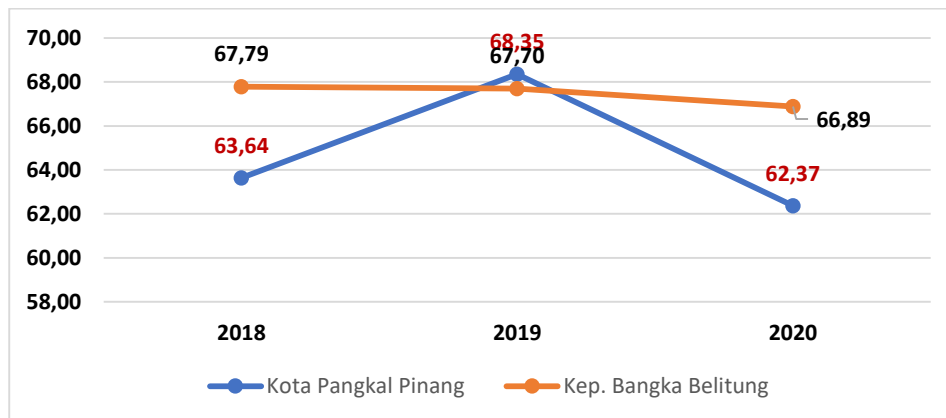
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Perkembangan TPAK Kota Pangkalpinang menunjukkan kondisi yang terus meningkat, dimana pada tahun 2018 sebesar 63,64% hingga pada tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 67,70%, kemudian hingga tahun 2020 kembali terjadi penurunan yang cukup signifikan mencapai 62,37%. Hal ini sama dengan Provinsi yang mengalami penurunan menjadi 66,89%.



Gambar 2.25

Perkembangan TPAK Kota Pangkalpinang dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2020 (%)

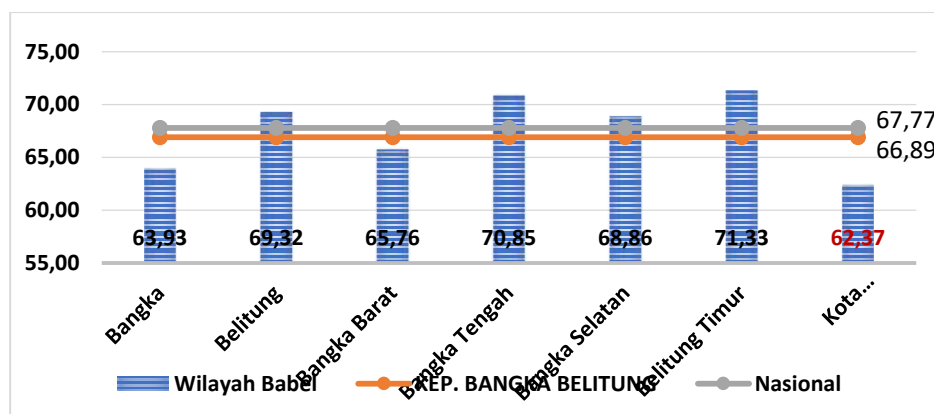


Sumber: Pangkalpinang Dalam Angka 2021, BPS

Posisi nilai tingkat pengangguran terbuka Kota Pangkalpinang menempati urutan ke 4 diantara kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 26

Posisi Relatif TPAK Kota Pangkalpinang Tahun 2020 (%)



Sumber: BPS, Buku Provinsi. Kep. Bangka Belitung Dalam Angka 2021



2.1.2.3 Fokus Seni Budaya

1. Kebudayaan

Kota Pangkalpinang merupakan salah satu wilayah yang dihuni oleh multi etnis. Keragaman etnis tersebut berdampak pada keberagaman seni budaya yang ada. Beberapa tradisi yang ada di Kota Pangkalpinang antara lain tradisi Nganggung, Ceng Beng, dan juga Perayaan hari-hari besar keagamaan.

Grup kesenian di Kota Pangkalpinang jumlahnya cukup banyak, jumlahnya pada tahun 2020 sebanyak 51 kelompok. Jumlah grup kesenian yang begitu banyak belum didukung dengan sarana prasarana yang memadai, khususnya adalah tersedianya gedung kesenian untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kesenian seperti pameran, kajian, pagelaran, festival dan lainnya, sektor kebudayaan sudah didukung dengan keberadaan gedung kesenian yang ada. Jumlah gedung kesenian di Kota Pangkalpinang hanya ada 1 unit.

2. Pemuda dan Olahraga

Prestasi keolahragaan di Kota Pangkalpinang cukup membanggakan, terbukti dari perolehan medali emas pada Kejurda Pelajar ke-9 Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kota Pangkalpinang mendominasi hasil akhir. Hasil ini sekaligus menobatkan Pangkalpinang sebagai juara umum. Kontingen Kota Pangkalpinang berhasil mengumpulkan 23 medali emas, 28 medali



perak dan 14 medali perunggu yang selanjutnya akan mewakili Babel ke Kejurnas Pelajar di Papua.

Pembinaan olahraga di Kota Pangkalpinang dilakukan oleh klub dan perkumpulan olahraga yang ada. Tahun 2020 organisasi olahraga yang ada di Kota Pangkalpinang sebanyak 1 sedangkan jumlah organisasi pemuda yang ada di Kota Pangkalpinang sebanyak 29 organisasi. Sedangkan sarana prasarana gedung olahraga maupun lapangan yang ada sebanyak 57 unit.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Aspek pelayanan pendidikan diukur melalui beberapa indikator selain indikator yang sudah diuraikan pada fokus kesejahteraan. Keberhasilan pembangunan pendidikan diukur melalui beberapa indikator yaitu Angka Partisipasi Sekolah, Ketersediaan Fasilitas Pendidikan, Rasio Guru Murid, Angka Putus Sekolah, Angka Melanjutkan dan Kualifikasi Guru.

a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah mengindikasikan seberapa besar akses (keterjangkauan) dari penduduk usia sekolah dapat menikmati pendidikan formal di sekolah. Sebagai gambaran APS pada kelompok umur yang lebih tua akan cenderung menurun. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar



dalam mengakses pendidikan secara umum. APS Kota Pangkalpinang secara rinci ditampilkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. 10

Angka Partisipasi Sekolah Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2020 (%)

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Usia 7 – 12	%	117,04	121,82	112,19	99,73	102,92
Usia 13 – 15	%	112,96	113,01	102,96	103,3	77,06
Usia 16 – 18	%	66,71	80,23	100,30	69,12	109,5

Sumber : Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang , 2021.

b. Ketersediaan Fasilitas Pendidikan

Ketersediaan sarana prasarana sekolah adalah persentase ruang kelas kondisi bangunan untuk jenjang pendidikan dasar yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yaitu: 1) persentase ruang kelas SD/MI kondisi bangunan baik. Perkembangan kondisi ruang kelas selama kurun waktu 2016-2020 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11

**Kondisi Gedung Ruang Kelas SD & SMP Kota Pangkalpinang
Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah ruang kelas	Unit	934	987	1094	1052	1059
2.	Jumlah ruang kelas baik	unit	814	866	963	981	848
3.	Jumlah ruang kelas rusak ringan	unit	107	99	98	42	185
4.	Jumlah ruang kelas rusak berat	unit	13	22	33	29	26

Sumber : Data verifikasi PDSPK 2021

c. Rasio Guru Terhadap Murid

Untuk menunjang pendidikan di Kota Pangkalpinang selain ketersediaan fasilitas pendidikan hal penting lainnya adalah peran



guru. Rasio guru terhadap murid di Kota Pangkalpinang pada semua jenjang pendidikan cukup baik. Namun demikian dengan banyaknya guru yang memasuki masa pensiun pada sampai dengan tahun 2020 perlu menjadi perhatian agar jumlah guru tetap memadai untuk pendidikan di berbagai jenjang. Perkembangan kondisi Rasio guru terhadap murid selama kurun waktu 2016-2020 terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.12

Rasio Guru ASN Dengan Jumlah Guru Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Di Kota Pangkalpinang Tahun 2016 – 2020

No.	Jenjang Pendidikan	Rasio Guru ASN terhadap Murid				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	SD/MI	82,23	78,35	53,51	55,93	52,33
2.	SMP/MTs	91,23	84,91	52,94	50,24	47,92

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang , 2021.

d. Angka Putus Sekolah (APS)

Angka Putus Sekolah (APS) pada akhir 2020 pada semua jenjang masih cukup tinggi, yaitu sebesar 0,08% untuk jenjang SD/MI, sebesar 0,26% untuk jenjang SMP/MTs. APS pada semua jenjang pendidikan perlu diupayakan untuk terus turun sampai dengan 0%. APS yang cukup tinggi dan cenderung meningkat memerlukan perhatian khusus agar mereka yang putus sekolah dapat kembali sekolah, mengikuti pendidikan non formal, atau bekerja, sehingga tidak membebani angka pengangguran. Perkembangan kondisi APS Tahun 2016-2020 terlihat pada tabel berikut:



Tabel 2.13

Capaian Indikator Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pangkalpinang Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Capaian Indikator				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0,0003	0,0004	0,02	0,02	0,08
2.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	0,0015	0,0020	0,23	0,28	0,26

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, 2020.

e. Angka Kelulusan

Angka Kelulusan menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Capaian angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2020 mencapai hampir semuanya 100%, Capaian indikator Angka Kelulusan bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14

Capaian Indikator Angka Kelulusan Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pangkalpinang Tahun 2016 – 2020

No.	Indikator	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Kelulusan SD/MI (%)	100	100	100	100	100
2	Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	100	99,99	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang, 2020

f. Angka Melanjutkan

Persentase lulusan SD/MI dan SMP/MTs yang melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya selama kurun waktu 2016-2020 mengalami penurunan untuk SD/MI ke SMP/MTs dari 102,1% di tahun 2016 menjadi 92,21% di tahun 2020 sedangkan untuk jenjang SMP/MTs ke SMA/SMK/MA dari 104,5% di tahun 2016 menjadi 104,31% di tahun 2020.



Tabel 2.15

Capaian Indikator Angka Melanjutkan Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pangkalpinang Tahun 2016–2020

No.	Indikator	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	102,18	104,39	99,11	90,4	92,21
2	Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)	104,51	92,47	95,3	94,88	104,31

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, 2021.

g. Kualitas Pendidikan Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Kualitas guru di Kota Pangkalpinang dari tahun 2016 ke tahun 2019 menunjukkan kecenderungan meningkat namun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2020 pada jenjang pendidikan TK/PAUD sebesar 51,74%, sedang pada jenjang SD/SMP sebesar 89,86%. Kualifikasi guru tampaknya masih sulit untuk bisa mencapai 100%, sebab masih ada guru yang belum memiliki motivasi ataupun kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1. Secara rinci perkembangan indikator angka kelulusan dan kualifikasi pendidik terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16

Capaian Indikator Kualitas Pendidikan Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D.IVJenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pangkalpinang Tahun 2016 – 2020

No.	Indikator	Capaian Setiap Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kualitas Pendidikan Guru TK (Guru PAUD) yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV (%)	48,19	51,77	65,10	66,82	51,74



2.	Kualitas Pendidikan Guru SD, SMP (Guru Dikdas) yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV (%)	96.40	94,48	87,20	89,41	89,86

Sumber :Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, 2021.

2. Kesehatan

Pembangunan Kesehatan diarahkan pada perwujudan derajat kesehatan masyarakat yang dapat dilihat dari meningkatnya usia harapan, menurunnya kematian ibu (AKI), kematian bayi (AKB), balita dan gizi buruk (AKABA). Usia Harapan Hidup di Kota Pangkalpinang mengalami peningkatan menjadi 73,30 tahun di tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesehatan di Kota Pangkalpinang mengalami peningkatan. AKI, AKB, AKABA dan balita gizi buruk juga mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup mengalami penurunan dari 116,2 pada tahun 2018 menjadi 141,2 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2020. Jumlah kasus kematian sebanyak 6 (enam) ibu hamil. Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup mengalami penurunan dari 3,3 pada tahun 2018 menjadi 2,1 pada tahun 2020. Prevalensi balita gizi buruk mengalami kecenderungan penurunan dari 0,78 pada tahun 2016 menjadi 0,0,9 pada tahun 2020. Penyebab gizi buruk sangat kompleks, diantaranya factor ekonomi/ kemiskinan, penyakit penyerta (seperti *labioschisis*, bocor jantung, kelainan bawaan pada anak dll), pola asuh anak yang kurang optimal setelah 6 bulan yaitu pada saat pemberian makan



bayi dan anak (PMBA), karena pada masa usia lebih 6 bulan anak harus sudah mendapatkan PMBA selain ASI.

Tabel 2.17

Perkembangan Indikator Makro Kesehatan Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR MAKRO	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Usia harapan hidup	Tahun	72,57	72,65	72,86	73,17	73,30
2.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran hidup	6,3	3,11	3,3	3,2	2,1
3.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	6,3	3,59	3,7	NA	2,6
4.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	121,7	95,72	116,2	22,9	141,2
5.	Jumlah kasus kematian ibu	Kasus	5	4	5	1	6
6.	Prevalensi balita gizi buruk	%	0,78	1,60	2,72	0,75	0,9

Sumber: Dinas kesehatan, 2021

Peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan; meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat; menurunnya kasus penyakit menular; penanganan balita gizi buruk yang baik dan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan. Namun demikian kondisi ini belum optimal karena beberapa masih perlu mendapat perhatian seperti meningkatnya kasus penyakit tidak menular. Jaminan pemeliharaan kesehatan harus dimiliki oleh setiap warga negara. Berdasarkan data yang ada penduduk miskin telah memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan.



Prevalensi balita pendek dan sangat pendek (*stunting*) mengalami kecenderungan penurunan dari 12,70% pada tahun 2017 menjadi 0,92% pada tahun 2020. Penurunan ini menunjukkan telah optimalnya peran serta lintas program dan lintas sektoral. *Stunting* adalah kondisi dimana tinggi badan anak lebih pendek dibanding tinggi badan pada umumnya, yang disebabkan kurangnya asupan asupan gizi pada masa janin/bayi (dalam kandungan) dan saat anak sudah lahir, tetapi anak baru nampak *stunting* pada usia 2 tahun. Hal ini berdampak adanya gagal tumbuh kembang kognitif berkurang, beresiko sakit, fungsi tubuh tidak seimbang, postur tubuh tidak maksimal saat dewasa. Berdasarkan indikator Tinggi Badan/Panjang Badan dibandingkan Umur (TB/U, PB/U), dimana TB anak < -3 SD (sangat pendek), dan -3 SD sampai < -2 SD (pendek).

Persentase Bayi 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif mengalami kecenderungan peningkatan dari 59,3% pada tahun 2015 menjadi 67% pada tahun 2020. Belum optimalnya pencapaian ASI Eksklusif dikarenakan oleh keyakinan ibu untuk memberikan ASI masih perlu ditingkatkan, ketelatenan untuk mengatasi masalah menyusui seperti puting masuk, ASI sedikit, bingung puting, dan lain-lain, sehingga ibu mengambil jalan dengan memberikan susu formula. Selain itu ibu bekerja/mencari nafkah ke luar kota sehingga tidak memberikan ASI Eksklusif.



Case Notification Rate TBC (CNR) adalah jumlah kasus TBC baru yang ditemukan dan ditindaklanjuti dengan pengobatan. Angka kejadian tuberkulosis (insiden semua kasus CNR) di Kota Pangkalpinang sebesar 0,18 per 100.000 penduduk. Kasus TBC di Kota Pangkalpinang telah dilakukan pengobatan dengan DOTs (97%).

Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi telah mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai 2020. Proporsi penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat antiretroviral telah mencapai 100%.

Angka kesakitan DBD Fluktuatif cenderung naik turun karena:

1. Kasus DBD sangat dipengaruhi oleh iklim/cuaca;
2. Berbanding lurus dengan curah hujan;
3. Kegiatan Pembrantasan Sarang Nyamuk (PSN) mandiri oleh masyarakat belum optimal/belum jadi budaya

Sedangkan Angka kematian DBD Fluktuatif cenderung naik karena:

1. Indikator tata laksana di rumah sakit terhadap penderita DBD yang belum merata
2. Ada keterlambatan rujukan masyarakat, sudah fase kritis baru dirujuk

Pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan turunannya dan pelayanan rujukan yang dilaksanakan oleh rumah sakit. Berdasarkan data



dibawah ini dapat dilihat bahwa pelayanan kesehatan sudah mencukupi secara kuantitas.

Tabel 2.18
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase ketersediaan obat kesehatan sesuai dengan kebutuhan	%	90,48	100	100	100	100
2.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	9,18	17,41	18,09	13,62	12,0
3.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	151,96	336,98	194,11	154,04	96,1
4.	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	%	72,4	72,3	69,1	68,3	71,5
5.	Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif	%	78,57	90,48	88,1	90,5	90,5
6.	Cakupan Penjangkaran kesehatan siswa SD (setingkat) dan SMP (setingkat)	%	99,70	99,80	96,6	98,6	40
7.	Prevalensi balita pendek dan sangat pendek (stunting)	%	-	12,70	8,0		0,96
8.	Prevalensi balita dengan berat badan rendah/ kekurangan gizi-	%	4,62	10,05	2,8	3,0	0,9
9.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100
10.	Persentase Bayi 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif	%	59,3	63,6	63,9	67,02	67
11.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	-	-	-	-	0



NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
12.	Cakupan RT mengkonsumsi garam beryodium	%	100	100	100	100	0
13.	Persentase Balita usia 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A	%	91,2	88,7	92,8	93,4	87,9
14.	Persentase Ibu hamil mendapat 90 tablet besi	%	88,74	94,41	93,9	93	91,34
15.	Persentase ibu hamil mengalami KEK	%	1,29	4,4	0,0	0,0	6,06
16. 4	Persentase Ibu hamil yang anemia	%	2,2	3,1	0,0	0,0	15,46
17.	Cakupan Rumah Sehat	%	93,85	0,0	0,0	98,72	96,11
18.	Cakupan Kualitas air bersih yang memenuhi syarat kesehatan	%	72,44	94,47	91,8	96,4	96,8
19.	Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan (Hotel, Taman, rekreasi dan tempat hiburan, dll)	%	99	97,93	97,00	98,02	99,2
20.	Cakupan Desa/ kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	%	100	100	100	100	100
21.	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	0	100	0	Tdk ada KLB
22.	Angka kejadian tuberkulosis (insiden <i>semua</i> kasu (CNR)	Per 100.000 penduduk	88,36	96,42	213,69	229,19	0,18
23.	Tingkat kematian karena tuberkulosis	Per 100.000 penduduk	4,99	5	1,41	0,0	0
24.	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (CDR)	%	100	100	100	100	409



NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
25.	Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (<i>Succes rate</i>)	%	100	100	88,26	94,10	97
26.	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi	%	0,00022	0,000386	0,017	0,032	0,016
27.	Proporsi penduduk yg terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pd obat antiretroviral	%	100	100	100	100	100
28.	Angka kejadian malaria	Per 1.000 penduduk	0,015	0,010	0,00	0,009	0,01
29.	Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)	Per 100.000 penduduk	25,46	25,07	76,2	74,07	64,2
30.	Persentase kematian DBD	%	0	0	0	0	4
31.	Non Polio usia 15 tahun ke atas (<i>Acute Flaccid Paralysis</i> (AFP))	%	0,00	3,39	2,6	0,7	0
32.	Cakupan kanker serviks	Kasus	5,42	5,06	0,6	0,3	2994
33.	Cakupan DM	kasus	41,73	0,00	74,83	97,37	71,2
34.	Cakupan hipertensi	%	50,73	100	81	86,69	96,5
35.	Persentase Pos Binaan Terpadu (Posbindu)	%	74	74	42	45	45
36.	Persentase puskesmas yang telah terakreditasi	%	0,22	0,0	0,0	0,0	100
37.	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	37,44	40,98	77,19	92,80	36
38.	Rasio puskesmas per satuan penduduk	Rasio	0,02	0,02	0,09	0,09	0,004
39.	Persentase puskesmas; puskesmas pembantu dan puskesmas keliling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai	%	100	100	100	100	100
40.	Persentase penduduk yang memiliki jaminan	%	73,52	79,46	84,4	84,9	77,3



NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
	pemeliharaan kesehatan						
41.	Cakupan pelayanan anak balita	%	91,8	89,4	94,1	92,9	91,96
42.	Proporsi cakupan pemeriksaan usila	%	23,74	43,34	45,3	90,67	75,98
43.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	94,50	96,8	97,9	96,1	94,8
44.	Cakupan kunjungan bayi	%	99,90	96,2	96,6	43,6	98,3
45.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	88,74	94,41	93,9	92,9	91,3
46.	Cakupan pelayanan nifas	%	90,2	96,1	95,1	94,8	92,9
47.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	80,58	105,9	92,7	105,1	92,4
48.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	71,10	88,1	85,1	88,74	87,1
49.	Cakupan desa bebas buang air besar (ODF)	%	21,42	26,19	38	57,14	59,52
50.	Rasio rumah sakit	Per 10.000 penduduk	0,002	0,002	0,003	0,003	32,3
51.	Cakupan Puskesmas Rawat Inap	Unit	1	1	1	1	1
52.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	99,9	96,2	96,4	96,6	95,78
53.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat	%		100	100	90,6	88,3
54.	Masyarakat terlindungi dari produk farmasi, makanan minuman yang tidak memenuhi syarat	%	100	100	100	100	100
55.	Cakupan penderita HIV	kasus	44	80	45	67	34



NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
	AIDS						
56.	Rasio posyandu per satuan balita	%	0,61	5,68	0,7	6,9	6,48
57.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	%	0,02	0,02	0,03	0,03	24
58.	Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk	%	59,90	54,48	77,19	92,80	NA
59.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC (persen)	%	137,83	139,86	100	100	100
60.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100	100	100	100
61.	Cakupan Puskesmas	%	9	9	9	9	9
62.	Cakupan Pembantu Puskesmas	%	19	19	19	19	19

Sumber: Dinas kesehatan, 2020

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Pemerintah Daerah adalah:

a. Sumber Daya Air (SDA)

- (a) Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota;
- (b) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota.

b. Air Minum

Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/ kota



c. Persampahan

Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah kabupaten/ kota.

d. Air Limbah

Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota.

e. Drainase

Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/ kota.

f. Permukiman

Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah kabupaten/ kota.

g. Bangunan Gedung

Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten/kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

h. Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah kabupaten/kota.

i. Jalan

Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota.

j. Jasa Konstruksi

1) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;



- 2) Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten/ kota;
- 3) Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil).
- 4) Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

k. Penataan Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten/ kota.

Berdasarkan tabel 2.21 dapat dilihat bahwa capaian indikator rasio panjang jalan dengan kondisi baik terhadap total panjang jalan pada tahun 2016-2020, capaian selama 5 tahun terakhir menunjukkan adanya tren fluktuatif. Rasio panjang jalan dengan kondisi baik pada tahun 2016 sebesar 65 % menurun menjadi 52,16 pada tahun 2019. Kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 91,68 persen. Untuk rasio panjang jalan dengan kondisi sedang terhadap total panjang jalan menunjukkan tren yang fluktuatif, pada tahun tahun 2016 tercatat sebesar 27,40% menurun menjadi 1,2 % pada tahun 2020. Hal ini berarti masih ada 1,2 % jaringan jalan kota dalam kondisi rusak sedang.

Untuk rasio panjang jembatan dengan kondisi baik terhadap total panjang jembatan kondisinya cenderung tetap dari tahun 2016-2020 yaitu sebesar 100%.



Persentase pengoperasian sampah di TPA selama 4 tahun terakhir cenderung meningkat dari 3,54% pada tahun 2015 menjadi 50% pada tahun 2016 dan cenderung tetap sampai dengan tahun 2019, hal ini menandakan bahwa pengembangan sistem pengelolaan sampah di Kota Pangkalpinang semakin baik setiap tahunnya meskipun belum optimal.

Capaian indikator persentase realisasi rumah tinggal bersanitasi selama tahun 2016-2020 mengalami tren fluktuatif setiap tahunnya, pada tahun 2016 persentase realisasi rumah tinggal bersanitasi tercatat sebesar 95,57% meningkat menjadi 97,61% ditahun 2017 dan menjadi 95,77% pada tahun 2020. Capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.19
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
	PEKERJAAN UMUM						
1	Rasio Panjang Jalan dengan Kondisi Baik terhadap Total Panjang Jalan	%	72,32	52,16	NA	NA	91,68
2	Rasio Panjang Jalan dengan Kondisi Sedang terhadap Total Panjang Jalan	%	19,89	27,00	NA	NA	1,12
3	Rasio Panjang Jalan dengan Kondisi Rusak terhadap Total Panjang Jalan	%	5,44	18,03	NA	NA	4,45
4	Rasio Panjang Jalan dengan Kondisi Rusak Berat terhadap Total Panjang Jalan	%	2,35	2,81	NA	NA	2,75
5	Rasio Panjang Jembatan dengan Kondisi Baik terhadap Total Panjang Jembatan	%	71,43	71,43	NA	NA	100



No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
6	Rasio Panjang Jembatan dengan Kondisi Rusak terhadap Total Panjang Jembatan	%	28,57	28,57	NA	NA	0
7	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	%	NA	0,001	NA	NA	0,19
8	Tingkat Ketersediaan data jalan dan jembatan up to date	%	100	100	NA	NA	80
9	Drainase dalam kondisi baik pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	NA	NA	NA	NA	0
10	Persentase pengoperasian TPA	%	50	50	NA	NA	NA
11	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (perpipaan PDAM, PAMSIMAS dan DAK)	%	66,4	NA	NA	NA	NA
12	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	%	NA	NA	NA	NA	NA
19	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	%	97,24	97,24	NA	NA	NA
PENATAAN RUANG							
20	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	%	NA	NA	NA	NA	0
21	Ruang publik yang berubah peruntukannya	%	NA	NA	NA	NA	0
22	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	%	NA	NA	NA	NA	0
23	Ketaatan terhadap RTRW	%	NA	NA	NA	NA	0

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang, 2018

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk Pemerintah Daerah adalah:

a. Perumahan

- 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota;
- 2) Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- 3) Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;



4) Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).

b. Kawasan Permukiman

- 1) Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- 2) Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.

c. Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota.

d. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Penyelenggaraan PSU perumahan

e. Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

Tabel 2. 20

Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	88,79	87,98	93	NA	NA
2	Cakupanketersediaan rumah layak huni	%	64	65	87,1	NA	NA
3	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	75	77	78	79	80



No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
4	Rasio pemakaman penduduk per satuan penduduk	%	NA	NA	NA	0,44%	0,43%
5	Penyediaan rumah layak huni sebagai tempat tinggal bagi korban bencana kab/kota yang mengalami kerusakan	%	NA	NA	0	0	0
6	Persentase kawasan kumuh	%	0,1657	0,1657	0,1586	0,1586	0,001849
7	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Pangkalpinang	%	87,68	89	28	NA	NA
8	Konsumsi Listrik Rumah Tangga di Kota Pangkalpinang	KWH	NA	NA	NA	NA	NA
9	Lingkungan pemukiman kumuh		196,2	196,2	187,9	187,89	21,90
10	Rumah layak huni	%	64	65	65	88,45	NA
11	Ketersediaan RTH	%	NA	NA	11,8	NA	NA

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung dengan PSU dari tahun 2015-2019 semakin baik dan terus meningkat, pada tahun 2015 tercatat sebesar 75% menjadi 80% pada tahun 2019. Persentase kawasan kumuh di Kota Pangkalpinang setiap tahunnya terus menurun, dari 0,1657 pada tahun 2015 menjadi 0,001849 pada tahun 2019.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Salah satu urusan wajib pemerintah daerah adalah urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Pada RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat memiliki 11



(sebelas) indikator kinerja. Capaian kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Pangkalpinang dari tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 21

**Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Tahun 2015-2019**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	%	79	NA	80	83	95
2	Presentase Patroli siaga Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat	Kali/hari	3	3	5	3	3
3	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP	Kali	99,90	99,90	99,90	99,90	99,90
4	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja	Per 10.000 penduduk	10,00	20	4,60	200	200
5	Jumlah penyelesaian Penegakkan Perda dan Perkada	tindakan	82	73	78	83	118
6	Jumlah Pelanggaran Perda	Kasus	91	81	84	83	120
7	Jumlah Linmas Per jumlah 10.000 Penduduk	Per 10.000 penduduk	8,00	7,76	5,5	NA	NA
8	Rasio Pos Siskamling Per jumlah desa/Kelurahan	%	NA	NA	NA	NA	NA
9	Rasio petugas Linmas	Per 10.000 penduduk	1	1	1	NA	NA
10	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	15	15	15	NA	NA
11	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	%	100	100	100	NA	NA

Sumber: Satpol PP Kota Pangkalpinang 2020

Capaian indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2015-2019 yaitu pada tahun 2015 sebesar 79% menjadi sebesar 95% pada tahun 2019. Sedangkan indikator Persentase Patroli siaga Ketertiban Umum dan



Ketertiban Masyarakat mengalami penurunan dalam kurun waktu yaitu pada tahun 2017 sebesar 5 kali/hari menjadi 3 kali/hari pada tahun 2019. Capaian Cakupan Patroli Petugas Satpol PP memiliki perkembangan yang sama sejak tahun 2015-2019 sebesar 99,90%.

Capaian rasio jumlah Polisi Pamong Praja tahun 2015-2019 mengalami perkembangan fluktuatif, yaitu tahun 2015 capaian sebesar 10%, tahun 2019 meningkat menjadi 200% per 10.000 penduduk. Cakupan Penegakkan Perda dan Perkada di Kota Pangkalpinang mengalami perkembangan capaian yang stabil. Indikator jumlah Linmas Per jumlah 10.000 Penduduk di Kota Pangkalpinang dalam jangka waktu tahun 2013-2017 mengalami perkembangan yang fluktuatif cenderung menurun yaitu capaian pada tahun 2013 sebesar 2,29%, tahun 2015 sebesar 8% dan mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi sebesar 5,5%. Permasalahan yang dialami berkaitan dengan kebutuhan jumlah linmas yang belum sesuai kebutuhan. Sehingga di tahun mendatang perlu ada penambahan dan pengembangan SDM Linmas.

Capaian rasio petugas Linmas dalam jangka waktu tahun 2013-2017 mengalami perkembangan yang stabil yaitu 1 orang Per 10.000 penduduk. Indikator tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kota Pangkalpinang juga mengalami perkembangan stabil yaitu sebesar



15 menit serta capaian cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kota Pangkalpinang pada tahun 2017 sebesar 100%.

Kejadian bencana dari tahun 2016-2020 yang terjadi di Kota Pangkalpinang antara lain bencana banjir, kebakaran, dan angin puting beliung. Jumlah kejadian bencana banjir pada tahun 2020 sebesar 18 kejadian menurun dari tahun 2019 sebesar 36 kejadian. Sedangkan kejadian bencana angin puting beliung meningkat dari tahun 2019 sebesar 6 kejadian menjadi sebesar 7 kejadian pada tahun 2020. Kejadian bencana kebakaran di Kota Pangkalpinang terdata pada tahun 2020 sebesar 1 kejadian. Berdasarkan data tersebut, maka kejadian bencana perlu mendapatkan perhatian dan ditangani oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan membangun kawasan tanggap bencana untuk meminimalisir dampak dan juga terutama korban jiwa. Adapun data kejadian bencana di Kota Pangkalpinang dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 22

Kejadian Bencana di Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2020

No	Jenis Bencana	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Banjir/Genangan	kejadian	26	2	10	36	18
3	Kebakaran	kejadian	NA	138	2	88	1
4	Angin puting beliung	kejadian	2	4	0	1	7
Jumlah			28	144	12	125	26

Sumber: BPBD Kota Pangkalpinang 2021



6. Sosial

Salah satu urusan wajib pemerintah daerah adalah urusan sosial. Capaian terhadap 6 Indikator Urusan Sosial di Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu 2016-2020 disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2. 23
Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2016-2020

NO	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PMKS	orang	7636	7624	11109	NA	12.270
2	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	83	74,5	53	53	59,70
3	Persentase penyandang cacat mental fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang menerima bantuan sosial	%	67	20,06	20	20	35,79
4	Persentase korban bencana yang menerima bantuan kebutuhan dasar saat tanggap darurat	%	80	70	87	90	100
5	Jumlah TKSK, PSM, Orsos dan lembaga dibawah binaan dinsos	orang	57	99	99	99	120
6	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	64,82	74,5	85,6	87,5	59,70

Sumber: Dinas Sosial Kota Pangkalpinang 2021

Berdasarkan Tabel 2.23, terlihat bahwa jumlah PMKS di Kota Pangkalpinang cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, Capaian indikator jumlah TKSK, PSM, Orsos dan lembaga dibawah binaan dinsos mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2016-2020 yaitu pada tahun 2016 sebesar 57 orang menjadi 120 orang pada tahun 2020.



2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

7.Tenaga Kerja

Urusan ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Kondisi ketenagakerjaan di Kota Pangkalpinang secara makro dapat dilihat dari rasio angkatan kerja yang bekerja dan tingkat pengangguran. Data menunjukkan bahwa rasio angkatan kerja yang telah bekerja menunjukkan peningkatan, yaitu pada tahun 2018 terdapat 94,20% angkatan kerja yang telah bekerja kemudian tahun 2020 menjadi 93,06% angkatan kerja yang bekerja. Meskipun mengalami peningkatan namun data tingkat pengangguran di tahun 2016 hingga 2020 juga menunjukkan adanya peningkatan maupun penurunan, pada tahun 2017 tingkat pengangguran di Kota Pangkalpinang mencapai 3,80% kemudian pada tahun 2020 menurun menjadi 6,93%.

Indikator lainnya seperti cakupan pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan terus menunjukkan penurunan dari 1,17 pada tahun 2016 menjadi 153,83 % pada tahun 2020. Jika ditinjau dari penjaminan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja yang digambarkan oleh indikator Cakupan pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan dan Cakupan pekerja / buruh yang menjadi peserta program BPJS Kesehatan maka terlihat



adanya peningkatan dari tahun 2016 hingga 2020. Capaian kinerja urusan ketenagakerjaan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 24

Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Sat.	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio Angkatan Kerja yang Bekerja	%	NA	NA	94,20	NA	93,06
2.	Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	100	76,19	NA	5,93	NA
3.	Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	100	61,54	NA	NA	NA
4.	Tingkat Pengangguran (%)	%	NA	3,80	4,70	5,01	6,93
5.	Cakupan Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan	%	1,17	36,57	73,91	53,58	153,82
6.	Jumlah Kasus Konflik Industrial	Kasus	NA	43	42	56	53
7.	Cakupan pekerja / buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	NA	77,52	77,7	77,9	77,52
8.	Cakupan pekerja / buruh yang menjadi peserta program BPJS Kesehatan	%	90	77,52	77,7	77,9	77,75

Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, 2021

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Pembangunan Gender

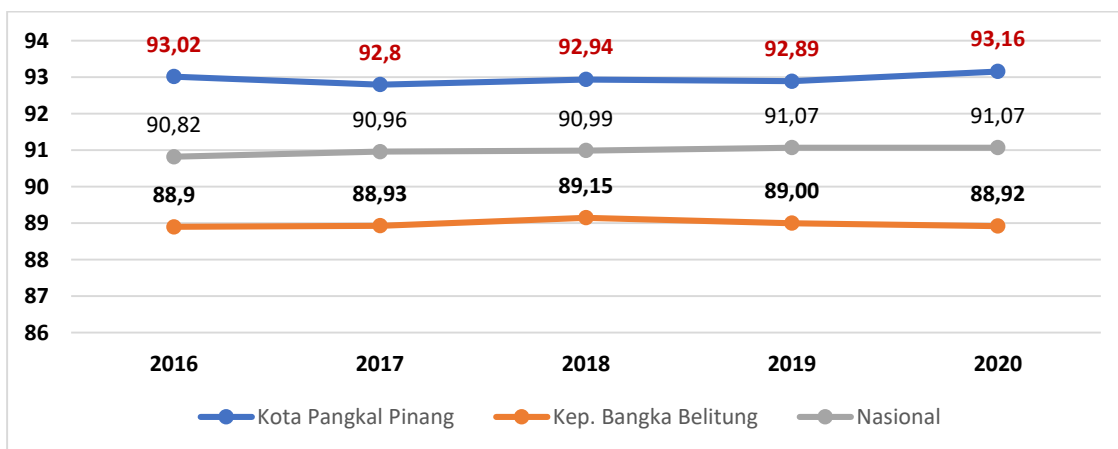
Pembangunan gender di Kota Pangkalpinang sudah cukup baik dimana dalam kurun waktu 5 tahun terakhir Indeks Pembangunan Gender di Kota Pangkalpinang memiliki capaian lebih dari 90. Selama periode tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota



Pangkalpinang yang fluktuatif. Pada tahun 2016, nilai IPG mencapai 93,02, kemudian berfluktuasi selama kurun waktu tahun 2017 hingga 2019. Pada tahun 2020 nilai IPG Kota Pangkalpinang mencapai 93,16. Kondisi ini relevan terhadap perkembangan nilai Provinsi Bangka Belitung dan Nasional, nilai IPG Kota Pangkalpinang memiliki capaian di atas rata-rata IPG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun Nasional. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.27.

Gambar 2. 27

Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2016-2020 (Tahun)



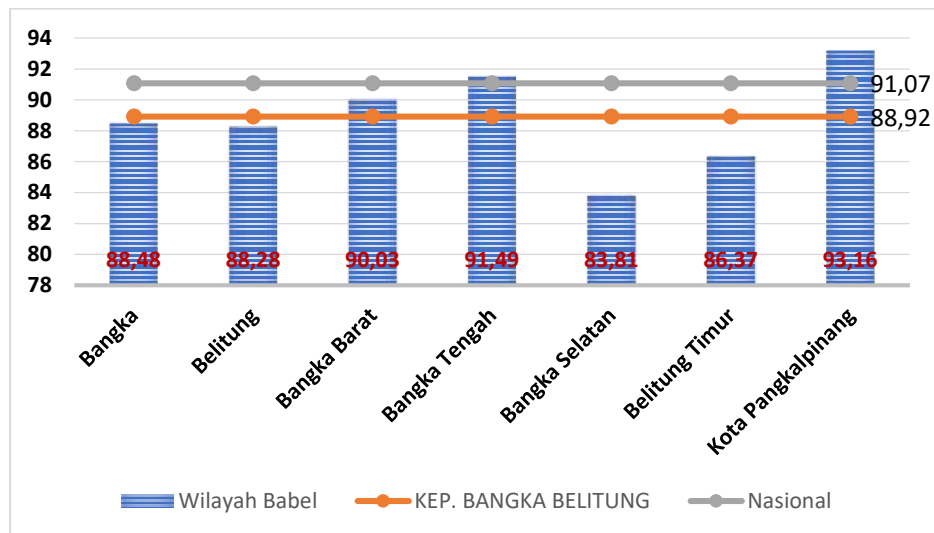
Sumber: BPS, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Capaian IPG Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 sebesar 93,16 berada di atas Provinsi Bangka Belitung sebesar 88,92 dan di atas capaian Nasional sebesar 91,07. Posisi capaian IPG dibandingkan dengan capaian IPG kabupaten sekitarnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020, disajikan pada Gambar 2.28.



Gambar 2.28

**Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kota Pangkalpinang Tahun 2020 (Tahun)**



Sumber: BPS, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2020

Komponen pembentuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) tidak berbeda dengan komponen pembentuk IPM hanya terpilah berdasarkan jenis kelamin. Dilihat pada Tabel 2.25, Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan Kota Pangkalpinang tahun 2020 sebesar 75,12 tahun lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang hanya mencapai 71,36 tahun.

Harapan lama sekolah Kota Pangkalpinang tahun 2020 didominasi oleh laki-laki sebesar 13,15 tahun sedangkan perempuan berada pada 13,14 tahun. Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah dan besarnya sumbangan pendapatan Kota Pangkalpinang tahun 2020, laki-laki juga lebih mendominasi dibandingkan perempuan. Adapun rincian data komponen pembentuk IPG Kota Pangkalpinang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.25
Perkembangan Indikator Komposit IPG di Kota Pangkalpinang
Tahun 2016 - 2020

Tahun	AHH		HLS		RLS		Pengeluaran Per Kapita	
	L	P	L	P	L	P	L	P
2016	70,60	74,43	13,01	12,76	10,12	9,39	20.368	13.430
2017	70,67	74,50	13,02	12,77	10,22	9,40	20.692	13.520
2018	70,89	74,72	13,03	12,82	10,23	9,41	21.596	14.117
2019	71,22	75,01	13,14	12,98	10,25	9,42	22.169	14.344
2020	71,36	75,12	13,15	13,14	10,37	9,61	21.846	14.130

Sumber: BPS, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

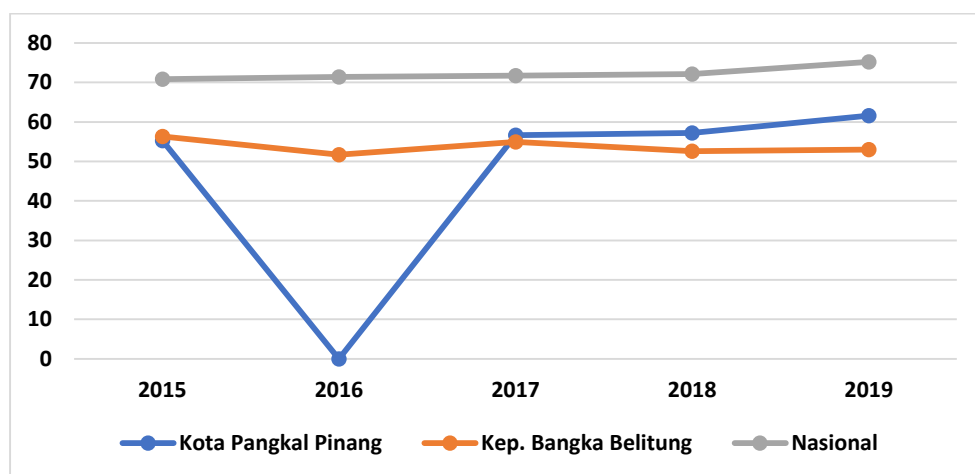
Berbeda dengan pembangunan gender, pemberdayaan gender di Kota Pangkalpinang belum terlalu optimal pencapaiannya. Pada tahun 2018, Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Pangkalpinang hanya sebesar 57,17 dengan komponen penyusunnya keterlibatan perempuan di parlemen sebesar 6,67 persen, perempuan sebagai tenaga profesional sebesar 45,70 persen dan sumbangan pendapatan perempuan sebesar 29,29 persen. Hal ini menuntut peran lebih pada dinas terkait untuk memberdayakan perempuan agar berpartisipasi aktif dan mampu memiliki daya saing sehingga emansipasi perempuan dapat terwujud.

Perkembangan capaian IDG Kota Pangkalpinang, dari tahun 2015 sebesar 55,44 hingga tahun 2019 sebesar 61,59, berada di atas



capaian Provinsi Bangka Belitung namun masih dibawah capaian Nasional, seperti terlihat pada Gambar 2.29 berikut.

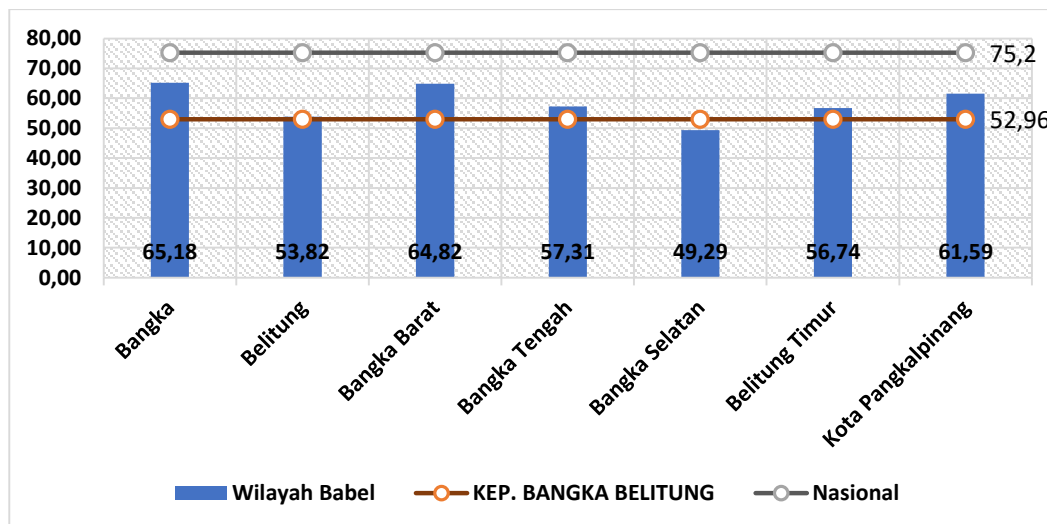
Gambar 2.29
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2015-2019 (Tahun)



Sumber: BPS, KPPA, Buku PMBG, Buku Indeks Pembangunan Manusia Prov. Kep. Bangka Belitung, 2018

Dibandingkan dengan capaian IDG kabupaten/kota sekitarnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019, Kota Pangkalpinang menempati posisi pertengahan yaitu peringkat ketiga di bawah Belitung Timur dan Bangka. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.30
Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Kota Pangkalpinang Tahun 2019 (Tahun)



Sumber: BPS, KPPA, Buku Indeks Pembangunan Manusia Prov. Kep. Bangka Belitung, 2019

Komponen pembentuk Indeks pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pangkalpinang tahun 2015-2019, dilihat dari perkembangan keterlibatan perempuan di parlemen dari tahun 2015 hingga tahun 2019 yang cenderung meningkat, meskipun pada tahun 2016 hanya ada pengukuran pada tingkat provinsi.

Kondisi perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi periode 2015 hingga 2019 di Kota Pangkalpinang mengalami nilai yang fluktuatif. Berbeda dengan kondisi indikator komposit IDG lainnya, sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja Kota Pangkalpinang terus mengalami kenaikan tiap tahun, yaitu dari 23,80% pada tahun 2015 menjadi 29,90% pada tahun 2019. Secara rinci perkembangan komponen



pembentuk IDG Kota Pangkalpinang dapat kita lihat pada Tabel berikut :

Tabel 2. 26
Perkembangan Indikator Komposit IDG di Kota Pangkalpinang
Tahun 2015 - 2019

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	Keterlibatan perempuan di parlemen (%)	8,89	NA	6,67	6,67	10
2	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	36,38	NA	43,35	45,7	41,29
3	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	23,80	NA	29,24	29,29	29,90

Sumber: BPS, KPPA, Buku Indeks Pembangunan Manusia Prov. Kep. Bangka Belitung, 2018

c. Pengarus Utamaan Gender

Implementasi Pengarus Utamaan Gender (PUG) di dalam proses pembangunan antara lain dilihat dari tersedianya anggaran responsive gender. Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG sudah mencapai 80% sejak tahun 2013 hingga tahun 2017. Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif selama kurun waktu lima tahun, yaitu tahun 2012 hingga tahun 2016 masih sebesar 6%.

Terkait dengan kualitas hidup perempuan, dapat dilihat dari capaian beberapa indikator. Persentase sumbangan pendapatan perempuan dalam rumah tangga di Kota Pangkalpinang terus meningkat dari tahun 2013 sebesar 29,55% dan pada tahun 2017 menjadi sebesar 30,41%. Persentase Perempuan di lembaga legislative sejak 2014 adalah 8%, artinya masih jauh dari apa yang



diamanatkan oleh undang-undang. Persentase perempuan yang bekerja di lingkungan pemerintah kota sebesar 39,98%, menurun dari 55,04% di tahun 2013. Sedangkan perempuan di lembaga swasta meningkat dari 44,96% di tahun 2013 menjadi 60,18% di tahun 2017.

Terkait dengan perlindungan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) cenderung menurun, pada tahun 2017 sebesar 0,012 per 1.000 rumah tangga dibandingkan pada tahun 2013 sebesar 0,077 per 1.000 rumah tangga. Namun demikian komitmen pemerintah Kota Pangkalpinang dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak termasuk TPPO tinggi, dilihat dari pelayanan yang diberikan kepada korban kekerasan. Salah satunya adalah Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu tiap tahun hingga tahun 2017 sebesar 100%.

Berkaitan dengan pengarusutamaan hak anak, Kota Pangkalpinang masih harus melakukan kerja keras, meskipun demikian Kota Pangkalpinang dalam tahap awal telah memperoleh pengakuan menuju Kota Layak Anak melalui penghargaan Kota Layak Anak Kategori Pratama pada tahun 2019, namun masih banyak indikator yang belum dilaksanakan. Kondisi lain kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang Januari dan



Juli 2020 terdapat 23 kasus terdiri atas 10 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 13 kasus kekerasan terhadap anak.

Selengkapnya data dapat disimak pada tabel berikut:

Tabel 2.27

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	55,04	57	58	NA	39,98
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	NA	8	8	8	8
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	44,96	43,00	42,00	NA	60,18
4	Perempuan di eksekutif	%	NA	NA	7.617	7.732	6.882
5	Sumbangan Pendapatan Perempuan terhadap pendapatan Keluarga	%	29,55	29,65	30,29	NA	30,41
6	Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG (Perencanaan Penganggaran Responsif Gender)	%	40	60	70	80	80
7	Skor Kabupaten Layak Anak	skor	NA	NA	NA	NA	407
8	Rasio KDRT	%	0	0,077	0,031	0,019	0,012
9	Kekerasan terhadap Anak	kasus	NA	NA	NA	NA	21
10	Persentase korban kekerasan dalam rumah tangga	%	NA	0,77	0,31	0,19	0,12
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	106	115	118	100	100
12	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	104	114	115	100	100
13	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan	%	70	73	74	100	100



No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
	anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.						
14	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	73	79	80	100	100
15	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	33	47	48	100	21
16	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	33	48	48	NA	NA
17	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	75	80	97	98	NA
18	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	0	0	0	0	NA
19	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	51,86	53,32	54,78	56,24	39,55

Sumber: Dinas Sosial, PPPA Kota Pangkalpinang 2018

9. Pangan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 mengamanatkan pembangunan pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, dan pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan. Konsep ketahanan pangan



komponen serta pihak yang berperan serta dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Ketersediaan pangan utama di Kota Pangkalpinang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Ketersediaan diharapkan sampai tingkat rumah tangga minimal 2.200 kkal/kap/hari dan protein 57 gram/kap/hari.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan adalah dengan penganekaragaman pangan. Penganekaragaman pangan adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan mutu gizi makanan dengan pola konsumsi yang lebih beragam atau usaha untuk lebih menganeekaragaman jenis konsumsi dan meningkatkan mutu gizi makanan rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengertian penganekaragaman pangan ini dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, penganekaragaman horizontal, yaitu upaya untuk menganeekaragaman konsumsi dengan memperbanyak macam komoditas pangan; kedua upaya meningkatkan produksi dari masing-masing komoditas tersebut.

Pola pangan harapan merupakan suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Pola pangan harapan biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan wilayah. Dalam menentukan PPH ada beberapa komponen yang harus diketahui diantaranya yaitu



konsumsi energi dan zat gizi total, persentase energi dan gizi aktual, dan skor kecukupan energi dan zat gizi.

Skor pola pangan harapan di Kota Pangkalpinang menunjukkan tren naik turun dari tahun ke tahun. Tahun 2017 tercatat skor PPH sebesar 87,3 menurun menjadi 84,1 pada tahun 2018, dan meningkat kembali menjadi 86,6 pada tahun 2020. Capaian kinerja urusan pangan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. 28

Capaian Kinerja Urusan Pangan Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Regulasi Ketahanan Pangan	Dokumen	Ada	Ada	NA	Ada	Ada
2.	Ketersediaan pangan utama	Ton	133,27	NA	93,23	96,97	101,04
3.	Ketersediaan energi per kapita	(kkal/kapita/hari)	2.592	2.400	2.471,45	2499	2300
4.	Ketersediaan protein perkapita	(kkal/kapita/hari)	88,9	83,3	63,8	86,7	63
5.	Ketersediaan energi per kapita	%	108,0	108,04	102,9	104,12	95
6.	Penguatan cadangan pangan	(%)	17	10	25	25	25
7.	Ketersediaan Informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	%	83,33	NA	100	100	100
8.	Stabilitas harga dan pasokan pangan	%	100	NA	100	100	100
9.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	89,30	87,3	84,1	86	86,6
10.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	100	NA	100	100	100
11.	Persentase daerah rawan pangan yang tertangani	%	100	NA	100	100	100

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang 2021



10. Pertanahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan bidang perpustakaan untuk Pemerintah Daerah adalah:

a. Izin Lokasi:

Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

b. Sengketa Tanah Garapan

Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten/kota.

c. Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota

d. Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah *Absentee*

Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* dalam Daerah kabupaten/kota.

e. Tanah Ulayat

Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota.

f. Tanah Kosong

1) Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota;



2) Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota.

g. Izin Membuka Tanah

Penerbitan izin membuka tanah.

h. Penggunaan Tanah

Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa capaian kinerja urusan pertanahan di Kota Pangkalpinang ditunjukkan melalui 2 indikator. Penyelesaian kasus tanah negara pada tahun 2016-2020 telah dapat ditangani 100%. Begitu juga dengan penyelesaian izin lokasi juga dapat ditangani 100% selama kurun waktu tahun 2016-2020. Capaian kinerja urusan pertanahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.29

**Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kota Pangkalpinang
Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	100	100	NA	NA	100
2	Penyelesaian izin lokasi	%	100	100	NA	NA	100

Sumber: DPUPR Kota Pangkalpinang, 2021

11. Lingkungan Hidup

Kinerja urusan lingkungan hidup yang terdapat di Kota Pangkalpinang dapat dilihat dari kinerja lingkungan hidup serta kinerja pengelolaan persampahan. Kinerja lingkungan hidup ditandai



dengan kontrol baik dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup baik dalam pencemaran air, udara, maupun ijin AMDAL. Sedangkan kinerja pengelolaan sampah ditunjukkan dalam kegiatan pengumpulan, pengangkutan dan proses daur ulang.

Jika ditinjau dari segi administratif, usaha yang dikelola mewajibkan pemiliknya untuk memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan perundang-undangan. Salah satu persyaratan administratif adalah perusahaan harus memiliki persyaratan administrasi dan teknis pencegahan dalam pencemaran air maupun udara. Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air serta persentase usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara merupakan dua indikator kinerja lingkungan hidup yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada indikator kinerja lainnya dalam lingkungan hidup yaitu persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti mencapai 100% pada tahun 2019 dan rasio luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya. Kinerja dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2. 30

Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	%	80	100	NA	NA	14,28
2	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	%	100	100	NA	100	100
3	Rasio luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	%	100	100	NA	100	NA
4	Persentase Usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	%	95	100	NA	NA	NA

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang, 2020

Kinerja urusan lingkungan hidup juga digambarkan melalui kinerja pengelolaan sampah yang terdapat di Kota Pangkalpinang. Adapun indikator kinerja yang terdapat pada kinerja pengelolaan sampah antara lain adalah persentase pengurangan sampah perkotaan, persentase pengangkutan sampah, persentase sampah yang tertangani, persentase pengoprasian TPA, persentase penanganan sampah, dan tempat pembuangan sampah per satuan penduduk.

Pengurangan sampah perkotaan di Kota Pangkalpinang menunjukkan kinerja yang mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2020 persentase pengurangan



sampah perkotaan menunjukkan nilai 22,11%, dimana nilai tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 sebesar 0,35%. Peningkatan kinerja pengelolaan sampah juga ditunjukkan oleh indikator kinerja lainnya seperti persentase pengangkutan sampah dan persentase sampah yang tertangani. Kedua indikator tersebut menunjukkan adanya peningkatan. Realisasi capaian pada tahun 2020 menunjukkan nilai 92,48% baik untuk persentase pengangkutan sampah maupun persentase sampah yang tertangani. Selain ketiga indikator tersebut, persentase tempat pembuangan sampah per satuan penduduk juga menunjukkan peningkatan pada realisasi kinerjanya. Hal tersebut terlihat dari realisasi kinerja pada tahun 2020 yaitu sebesar 1,01% menurun dari tahun sebelumnya sebesar 2,79%.

Berbeda dengan empat indikator kinerja pengelolaan sampah lainnya, persentase pengoperasian TPA dan persentase penanganan sampah menunjukkan peningkatan pada realisasi capaian kinerjanya. Sampai pada tahun 2020, baik persentase sampah yang tertangani dan persentase pengoperasian TPA sudah dapat mencapai 100%. Kinerja pengelolaan sampah pada tahun 2016 hingga 2020 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.31

Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase pengurangan sampah perkotaan	%	0,24	0,28	NA	0,35	22,11
2.	Persentase pengangkutan sampah	%	81	78	92	93	92,48
3.	Persentase sampah yang tertangani	%	81	78	92	93	92,48
4.	Persentase pengoperasian TPA	%	100	100	100	100	45
5.	Persentase Penanganan Sampah	%	100	100	NA	NA	79
6	Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk	%	2,425	NA	2,1	3,8	1,01

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang, 2020

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL yang menjadi kewenangan Kota merupakan salah satu indikator kinerja dalam urusan lingkungan hidup. AMDAL merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau Kegiatan. Pasal 48 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 menyebutkan bahwa dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan izin lingkungan. Kinerja pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL yang menjadi kewenangan Kota Pangkalpinang menunjukkan kondisi yang sangat baik karena mencapai 100% setiap tahunnya dari tahun 2016 hingga 2019.



Kota Pangkalpinang juga turut berupaya dalam memberikan ruang gerak kepada masyarakat untuk beraktivitas, bersosialisasi dan saling berinteraksi dalam bentuk penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Definisi RTH pada dasarnya merupakan kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana lingkungan/kota, dan atau pengamanan jaringan prasarana, dan atau budidaya pertanian. Penyediaan RTH berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah sebesar 30% dari seluruh luas wilayah perkotaan yang terdiri dari 20% peruntukan RTH yang bersifat publik dan 10% di antaranya bersifat privat.

Presentase luasan RTH publik kawasan perkotaan di Kota Pangkalpinang hingga tahun 2020 mencapai 21,30% meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya mencapai 18%. Kondisi tersebut menunjukkan RTH di Kota Pangkalpinang masih rendah karena masih berada jauh di bawah standar yang ditetapkan dalam SPM. Pemerintah Kota Pangkalpinang telah berupaya untuk meningkatkan ketersediaan RTH dengan membangun taman-taman baru. Kinerja indikator urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.32

Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL yang menjadi kewenangan Kota.	%	100	100	NA	100	95,56
2.	Rasio penyelesaian dan atau penegakan hukum lingkungan	%	100	100	NA	NA	10,81
3.	Persentase luasan RTH publik kawasan perkotaan	%	11,31	11,8	18	18	21,30

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang, 2020

12.Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan administrasi kependudukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang pemerintahan dalam negeri meliputi (1) Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga; (2) Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk; (3) Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran; dan (4) Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian. Adapun indikator kinerja urusan kependudukan dan pencatatan sipil yang terdapat di Kota Pangkalpinang pada dasarnya sama dengan yang terdapat pada Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 namun terdapat beberapa indikator tambahan diantaranya adalah kepemilikan akta kelahiran, rasio perkawinan yang dicatat di catatan sipil, kemudian penerapan KTP Nasional berbasis NIK. Berikut merupakan capaian kinerja masing-masing indikator urusan kependudukan dan pencatatan sipil yang terdapat di Kota Pangkalpinang:



Tabel 2. 33
Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Penduduk ber-KTP persatuan Penduduk	%	100	67,62	104,5	104,8	97,8
2	Rasio Bayi Ber-akta kelahiran	%	100	98,88	68	80,2	98,8
3	Kepemilikan akta kelahiran	Per 10.000 penduduk	87,41	87,41	68	79,81	86,33
4	Rasio perkawinan yang dicatat di catatan sipil	%	100	65,25	65	52,3	57,4
5	Cakupan Akta Kematian	%	54,37	57,26	20	49,68	68,11
6	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	%	99,5	99,41	100	100	96,11
7	Kepemilikan KTP	%	100	97,02	104,55	140,8	97,81
8	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, 2021

Kondisi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Pangkalpinang dalam jangka waktu 2016-2020 berjalan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari capaian rasio bayi ber-akta kelahiran yang mencapai 98,88% pada tahun 2020. Kemudian cakupan penerbitan kartu keluarga yang mencapai 96,11%. Meskipun terlihat cukup baik namun kedua indikator tersebut mengalami penurunan capaian dari tahun sebelumnya. Kemudian jika dilihat dari rasio penduduk ber-KTP terlihat adanya penurunan dari tahun 2016 yang telah mencapai 100% menjadi 97,8% pada tahun 2020. Hal ini juga ditunjukkan oleh kepemilikan KTP yang juga mengalami penurunan dari 100% di tahun 2016 menjadi 97,81% pada tahun 2020. Namun, jika dilihat dari



penerapan KTP Nasional berbasis NIK maka capaian Kota Pangkalpinang menunjukkan capaian yang sempurna yaitu 100%.

Jika dilihat dari kepemilikan akta kelahiran terlihat ada peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari 87,41/10.000 penduduk pada tahun 2016 menjadi 86,33/10.000 penduduk pada tahun 2020. Indikator lainnya yaitu rasio perkawinan yang dicatat di catatan sipil hingga tahun 2016 mencapai 100%, menurun di tahun 2020 yang hanya mencapai 57,4%. Kemudian untuk cakupan akta kematian mencapai 54,37% pada tahun 2016 mengalami fluktuasi dari tahun-tahun sebelumnya dimana tahun 2020 mencapai 68,11%

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan yang mendorong masyarakat untuk berinisiatif dalam memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu syarat dari kegiatan pemberdayaan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dinilai apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek. Pengertian subjek disini adalah motor penggerak, bukan hanya sebagai penerima manfaat atau objek semata. Dalam hal ini subjek dari pemberdayaan masyarakat biasanya merupakan sebuah lembaga kemasyarakatan seperti RT/RW, LPM, Posyandu, PKK, dan LSM.



Kinerja urusan pemberdayaan masyarakat di Kota Pangkalpinang kemudian digambarkan dari presentase PKK aktif, rata-rata jumlah kelompok binaan PKK, Posyandu aktif, LPM berprestasi, jumlah kelompok binaan LPM, swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat, pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat, serta jumlah LSM. Jika dilihat dari persentase PKK yang aktif maka terlihat kinerja yang sangat baik karena setiap tahun dapat mencapai 100%. Capaian yang baik juga terdapat pada jumlah Posyandu aktif yang mencapai 100 unit pada tahun 2013 hingga 2016.

Kemudian, jika dilihat dari rata-rata jumlah kelompok binaan PKK menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya yaitu dari 50 kelompok pada tahun 2013 menjadi 75,5 pada tahun 2016. Jika dilihat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang berprestasi di Kota Pangkalpinang setiap tahunnya juga menunjukkan peningkatan yaitu dari 11,36% pada tahun 2013 menjadi 15,17% pada tahun 2016. Hal tersebut juga berbanding lurus dengan peningkatan jumlah kelompok binaan LPM dimana pada tahun 2013 mencapai 43 unit kemudian meningkat menjadi 64,5 unit pada tahun 2016.

Selain beberapa indikator di atas, kinerja urusan pemberdayaan masyarakat juga dinilai melalui swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat, pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat, serta jumlah LSM. Jika dilihat, swadaya



Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat menunjukkan angka yang stagnan dan terlihat belum optimal yaitu 57,14% dari tahun 2013 hingga 2016. Hal tersebut juga terjadi pada pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat yang memiliki capaian kinerja stagnan pada posisi 33,33% di tahun 2013 hingga 2016. Sedangkan untuk jumlah LSM yang terdapat di Kota Pangkalpinang terus menunjukkan peningkatan dari 50% pada tahun 2013 menjadi 75,5% pada tahun 2016. Secara lebih rinci kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.34
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2015 – 2019

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	100	100
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	66	75,5	75,5	75,5	75,5
3	Posyandu aktif	Unit	100	100	100	76,7	76,7
4	LPM Berprestasi	Unit	15,00	15,17	15,17	15,17	15,17
5	Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Unit	58	64,5	64,5	64,5	64,5
6	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	57,14	57,14	58	58	58
7	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	%	33,33	33,33	33,33	33,33	34
8	Jumlah LSM	%	50	55	66	75,5	75,5

Sumber: Dinas PPPA dan KB Kota Pangkalpinang, 2020

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk Kota Pangkalpinang selalu positif dimana terjadi kenaikan jumlah penduduk baik secara alami



maupun migrasi dari luar wilayah. Pada tahun 2020, pertumbuhan penduduk di Kota Pangkalpinang mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2019 yakni mencapai 2,19 persen. Pertumbuhan penduduk ini memiliki konsekuensi jangka panjang sehingga perencanaan pembangunan perlu memberikan atensi lebih kepada pembangunan kualitas sumber daya manusia.

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak yang dimiliki perempuan selama masa reproduksinya, di Kota Pangkalpinang dari tahun 2018 sampai 2020 cenderung meningkat. Sampai dengan tahun 2020 TFR Kota Pangkalpinang mencapai 2,00. Hal ini berarti jumlah anak yang dimiliki perempuan Kota Pangkalpinang antara 2 anak. Hal ini sejalan dengan capaian unmetneed (persentase perempuan usia subur yang tidak ingin mempunyai anak lagi, atau ingin menunda kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara KB) yang masih mencapai 10,35 persen di tahun 2020.

Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam program KB antara lain didukung dengan penyediaan alat dan obat kontrasepsi. Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi dari tahun 2016 sampai tahun 2020 sudah mencapai 100%. Penggunaan alat kontrasepsi masih didominasi penggunaan alat kontrasepsi hormonal sedangkan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) sampai dengan 2020 baru mencapai 13,69%



sementara itu laki-laki yang menggunakan alat kontrasepsi masih belum optimal yaitu 6,18% tahun 2020.

Upaya lainnya untuk mensukseskan program KB adalah melalui peningkatan peran masyarakat dalam mensosialisasikan program KB. Peran masyarakat tersebut antara lain melalui kelompok Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera Bina Keluarga Balita (UPPKS- BKB), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), dan pembentukan kader. Peningkatan peran UPPKS-BKB dengan mengikutsertakan anggota yang masih usia subur dalam program KB. Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB sampai dengan tahun 2020 sebesar 84,92%. Gambaran mengenai capaian kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.35

**Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Tahun 2016 - 2020**

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	0,33	0,5	2,02	2,05	1,96
2	Total Fertility Rate (TFR)	Per 1.000 perempuan	2,76	2,56	2,37	2,00	2,00
3	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Per 1.000 perempuan	29,42	33	12,30	8,26	8,26
4	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	2,65	2,62	2,5	2,3	2,3
5	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>unmetneed</i>)	%	14,12	12,78	11,69	8,52	10,35



No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
6	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	100	100	100
7	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/ kelurahan	%	100	100	100	100	100
8	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	100	100	100	100	100
9	Rasio Akseptor KB	%	72,00	72,21	88,46	78,48	79,40
10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR (<i>Contraceptive Prevalence Rate</i>) bagi perempuan menikah usia 15 – 49	%	72,00	72,21	88,46	78,48	79,40
11	Persentase Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	24,74	26,93	14,47	14,91	13,69
12	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Pria	%	3,86	3,77	5,87	6,14	6,18
13	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	8,3	8,3	14,28	42,86	42,85
14	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa per desa	%	15	16,9	18,75	20	20
15	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	%	71,65	54,73	86,67	86,09	84,92
16	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	100	100	100	100
17	Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga	%	1,7	1,7	2,37	2,00	2,00

Sumber: Dinas PPPA dan KB Kota Pangkalpinang Tahun 2021

15. Perhubungan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan perhubungan untuk Pemerintah Daerah meliputi 4 sub urusan antara lain : 1) Lalu Lintas



dan Angkutan Jalan (LLAJ); 2) Pelayaran; 3) Penerbangan; dan 4) Perkeretaapian. Berdasarkan kondisi wilayahnya, Pemerintah Kota Pangkalpinang hanya melaksanakan sub urusan berkaitan dengan LLAJ. Kondisi kinerja urusan perhubungan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Ketersedian Kelengkapan Jalan

Persentase ketersediaan perlengkapan jalan di Kota Pangkalpinang menunjukkan peningkatan selama 5 tahun terakhir, pada tahun 2016 sebesar 80 persen menurun menjadi 52,17 persen di tahun 2020. Jika dilihat kondisi perlengkapan jalan yang tersedia di tahun 2019 menunjukkan sebesar 97,57 persen dalam kondisi baik, sebesar 1,64 persen dalam kondisi sedang dan sebesar 0,79 persen dalam kondisi rusak.

b. Angkutan Umum

Angkutan merupakan perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan, sedangkan kendaraan bermotor umum merupakan setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran (Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek).



Jumlah angkutan umum di Kota Pangkalpinang mengalami peningkatan dari 73 unit di tahun 2019 menjadi 603 unit di tahun 2020. Untuk rasio ijin trayek juga masih sangat rendah tahun 2020 sebesar 18,53 persen.

c. Penerangan Jalan Umum

Penerangan jalan Umum (PJU) merupakan lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari sehingga mempermudah pejalan kaki, pesepeda dan pengendara kendaraan dapat melihat dengan lebih jelas jalan/medan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan dari para pengguna jalan dari kegiatan/aksi kriminal. Saat ini berkaitan dengan pengelolaan PJU menjadi kewenangan urusan perhubungan di Kota Pangkalpinang. Berdasarkan data rilis dari Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang, untuk menerangi jalan di Kota Pangkalpinang butuh 11.961 lampu, sedangkan yang sudah terealisasi sampai dengan tahun 2018 sebanyak 2.611 lampu. Pada tahun 2019 telah dipasang sebanyak 115 unit tiang serta total lampu 273 lampu kiri dan kanan sepanjang Jalan Sudirman. Secara total pada tahun 2019 telah dilakukan pemasangan sebanyak 230 titik yang dipasang lampu jalan. Saat ini baru ada 2.650 titik yang terpasang lampu jalan. Sedangkan target keseluruhan sebanyak 10.961 titik, sehingga perlu dilakukan secara bertahap.



Pelayanan urusan perhubungan menjadi perlu untuk ditingkatkan mengingat jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi dan penggunaannya setiap tahun semakin meningkat. Pada tahun 2019, sebanyak 2,39 juta lebih kendaraan bermotor beroperasi di seluruh jalanan Kota Pangkalpinang. Kenaikan ini harus dibarengi dengan kualitas pelayanan perhubungan agar tidak terjadi kecelakaan ataupun hal lainnya yang tidak diinginkan.

Perkembangan kondisi kinerja urusan perhubungan Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 36

Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, <i>traffic light</i> , <i>warning light</i>)	%	80	85	88	93	52,17
	a. Rambu jalan	unit	632	507	100	230	3844
	b. Marka jalan	m ²	DPU		100	200	7
	c. <i>Traffic light</i>	unit	4	3	-	-	171
	d. <i>Warning light</i>	unit	2	2	8	-	0
	e. <i>Guardrail</i>	M	-	-	-	200	200
	f. <i>Deliniator</i>	Unit	-	-	-	-	1
	Fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik	%	50	55	57	60	97,57
	Fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi sedang	%	30	27	26	24	1,64
	Fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi rusak	%	20	18	17	16	0,79
2.	Persentase jaringan jalan yang terlayani angkutan umum	%	65	65	80	80	-
3.	Jumlah angkutan umum	Unit	172	188	NA	73	605
4.	Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	55	63	NA	54	-
5.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	menit	15	15	15	15	23,5
6.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	rupiah	65.000	65.000	65.000	65.000	60.000



No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
7.	Rasio ijin trayek	%	0,000 80213 8	NA	NA	25	18,53
8.	Jumlah uji KIR angkutan umum	Unit	7.211	7.425	NA	6.837	339
9.	Terminal Bus	Unit	3	3	3	3	3
10.	Angka Pelanggaran / kecelakaan Lalu lintas berkurang	%	79	87	NA	NA	66,96
11	Kendaraan bermotor wajib uji dengan kendaraan yang melakukan uji kelaikan jalan	Unit	7.211	7.425	7.300	6.873	5206
12	Jumlah arus keluar penumpang Angkutan Darat	%	NA	NA	NA	248.859	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang, 2020

16. Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan informatika sangat berkaitan dengan penyampaian pesan dari satu orang ke orang lain. Pembangunan jaringan komunikasi maupun informasi bertujuan untuk dapat mempercepat koordinasi dan penyelesaian berbagai tugas organisasi kelompok maupun perorangan. Pembangunan pada urusan komunikasi dan informatika ditandai melalui pengembangan komunikasi, informatika, media massa, serta peningkatan SDM di bidang komunikasi dan informatika.

Pembangunan urusan komunikasi dan informatika juga dilakukan di lingkungan perangkat daerah yaitu dengan pembuatan dan penggunaan website. Tujuan pembangunan website bagi perangkat daerah adalah untuk mempermudah komunikasi antar lembaga dengan masyarakat ataupun pihak-pihak terkait yang berusaha menjalin komunikasi untuk mendapatkan informasi. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2016 telah terdapat 5 perangkat



daerah yang telah memiliki website dan aktif melakukan update, jumlahnya meningkat hingga pada tahun 2020 terdapat 18 perangkat daerah yang telah memiliki dan aktif menggunakan website.

Sementara itu, dilihat dari sisi jumlah surat kabar dan jumlah penyiaran radio/TV yang terdapat di Kota Pangkalpinang terlihat masih pada angka yang stagnan atau tidak ada perubahan. Kemudian untuk jumlah pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi di Kota Pangkalpinang dapat dilakukan dengan lima media yaitu melalui media massa (majalah, radio, dan televisi); media baru (website, online); media tradisional (pertunjukan seni); media interpersonal (sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya); media luar ruang (buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, baliho). Berdasarkan data setiap tahunnya terdapat adanya peningkatan pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi melalui berbagai media, dan media yang paling banyak digunakan adalah media baru seperti website atau media online karena dinilai lebih efisien dan mudah dalam penyalurannya kepada masyarakat.

Persentase penduduk yang menggunakan HP atau telepon di Kota Pangkalpinang terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. pameran dan expo juga dilaksanakan satu kali setiap tahunnya guna mendukung pembangunan komunikasi dan



informatika di Kota Pangkalpinang. Kinerja pelaksanaan Pengembangan komunikasi dan informatika selama tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.37
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase BTS yang memiliki ijin dan perpanjangan	%	100	100	NA	NA	NA
2	Website Perangkat Daerah	Website	5	10	15	18	18
3	Website PD yang aktif	Website	5	10	15	18	18
4	Jumlah surat kabar nasional/ lokal		6	6	6	6	6
5	Jumlah penyiaran radio/ TV	Radio/ TV	7	7	7	7	7
6	Persentase PD Pelayanan Publik yang memiliki portal website	%	1	1	1	1	1
7	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	14	43	10	25	25
8	Persentase SDM yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang TIK	%	100	100	NA	NA	NA
9	Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui :						
	- Media massa seperti majalah, radio dan televisi	%	17	25	25	25	25
	- Media baru seperti website (media online)	%	100	100	100	100	100
	- Media tradisional seperti pertunjukan rakyat	%	17	25	NA	NA	NA
	- Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah / diskusi dan lokakarya	%	17	25	25	25	25
	- Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spaduk dan baliho	%	17	25	30	40	40
10	Persentase pengaduan informasi publik yang tertangani	%	100	100	100	100	100



No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
11	Cakupan layanan telekomunikasi	%	100	100	100	100	100
12	Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon	%	75	80	NA	NA	NA
13	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses internet	%	55	60	NA	NA	NA
14	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	Rasio	1:150 .000 14	1:150 .000 15	NA	NA	NA
15	Jumlah Provider Telekomunikasi Yang Ada di Pangkalpinang	Jumlah	6	6	6	6	6
16	Jumlah Jaringan Komunikasi	Jumlah	6	6	6	6	6
17	Pameran/expo	Jumlah	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang, 2020

17. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan bidang koperasi dan UMKM untuk Pemerintah Daerah adalah:

a. Izin Usaha Simpan Pinjam

- 1) Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.
- 2) Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota

b. Pengawasan dan pemeriksaan



1) Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.

2) Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.

c. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.

d. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.

e. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah kabupaten/kota.

f. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

g. Pengembangan UMKM

Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.



Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa capaian indikator usaha mikro dan kecil pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan. Dilihat dari tahun 2016, jumlah UKM yang ada di Kota Pangkalpinang sebanyak 26.747 unit meningkat menjadi 27.479 unit pada tahun 2020. Untuk perkembangan koperasi yang ada di Kota Pangkalpinang selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Persentase koperasi aktif sampai dengan tahun 2016 sebesar 60,59% meningkat di tahun 2020 sebesar 99%.

Jumlah KSP/USP yang masuk kategori sehat selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, terlihat dari tahun 2016 jumlah KSP/USP yang masuk kategori sehat sebanyak 16 unit meningkat menjadi 37 unit pada tahun 2020. Hal ini mengakibatkan banyaknya penyerapan tenaga kerja pada UMKM. Banyaknya jumlah UMKM yang tersebar di Kota Pangkalpinang, menjadikan meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada UMKM. Terlihat dari jumlah penyerapan tenaga kerja pada UMKM di tahun 2016 sebesar 64.406 orang meningkat menjadi 74.584 orang pada tahun 2020. Capaian indikator urusan perkembangan UMKM dan koperasi dari tahun 2016 sampai tahun 2020 bisa dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 2.38

Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Usaha Mikro dan Kecil	Unit	26.747	26.787	26.984	27.205	27.479
2	Jumlah Koperasi	Unit	203	119	119	119	119
3	Persentase Koperasi Aktif	%	60,59	67,22	58	54	99
4	Jumlah KSP / USP yang masuk kategori sehat	Unit	16	16	37	37	37
5	Ijin Simpan Pinjam yang Diterbitkan	Ijin	1	3	0	0	3
6	Persentase UMK (Usaha Mikro Kecil) dari UMKM	%	98,97	97,39	97	97	94
7	Kontribusi sub sektor industri Kecil dan Menengah dalam penyerapan tenaga kerja	%	6,754	NA	0	0	20
8	Penyerapan tenaga kerja pada UMKM	Orang	70.985	NA	72.047	72.909	74.584
9	Persentase UMKM yg mendapat kredit dari lembaga keuangan	%	NA	NA	0	0	0
10	<i>One vilage one product</i>	produk	1	1	0	0	0
11	Jumlah outlet / showroom produk umkm	outlet	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang 2020

18. Penanaman Modal

Urusan Penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 meliputi 4 sub urusan antara lain 1) Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 2) Kerja Sama Penanaman Modal; 3) Promosi Penanaman Modal; 4) dan Pelayanan Penanaman Modal.

Total Nilai investasi (PMA/PMDN) Tahun 2020 yang masuk ke Kota Pangkalpinang sebesar Rp. 2.041.393.876.256,00 dengan realisasi sebesar Rp.215.539.253.869,12. Untuk promosi Penanaman Modal Pemerintah Kota Pangkalpinang melakukan kegiatan promosi peluang penanaman modal yang dilaksanakan setahun sekali.



Berkaitan dengan peningkatan pelayanan penanaman modal Pemerintah Kota Pangkalpinang telah mengembangkan pelayanan perijinan dan non perijinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sampai dengan tahun 2020 telah berjalan 100%. Sementara itu untuk mendukung kemudahan pelayanan telah tersedia Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Skor kepuasan masyarakat akan pelayanan investasi sangat baik di tahun 2020 sebesar 86,7. Perkembangan selengkapnya kinerja urusan penanaman modal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.39

Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan usaha besar dan UMKM (jumlah MoU peminatan kerjasama kemitraan)	MoU	1	NA	NA	NA	NA
2	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal	keg	NA	1	NA	1	NA
3	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat	keg	NA	NA	NA	NA	1
4	Jumlah nilai investasi (PMA/PMDN)	milyar rupiah	NA	880	258	368	2041
5	Terselenggaranya pelayanan perijinan dan non perijinan melalui Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP)	%	%	%	NA	NA	112,07
6	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	keg	NA	NA	NA	1	NA
9	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	Jumlah ijin	0	0	0	0	0
10	Terselenggarakannya pemantauan dan pembinaan	keg	NA	NA	NA	NA	1



No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
	pelaksanaan penanaman modal						
11	Tersedianya data dan informasi peluang usaha	Paket	NA	Paket	1	1	1
12	Penyusunan Kajian Kebijakan bidang Penanaman Modal	Paket	Paket	Paket	NA	NA	NA
13	Survey Kepuasan Masyarakat	skor	skor	82,91	84,36	85,15	86,7

Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang 2020

19. Kepemudaan dan Olah Raga

Undang- Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur kewenangan urusan kepemudaan dan olahraga sebagai berikut:

a. Kepemudaan

- 1) Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota.
- 2) Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah kabupaten/kota.

b. Keolahragaan

- 1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota
- 2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota.
- 3) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi.



4) Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota.

5) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.

c. Kepramukaan

Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah kabupaten/kota

Kondisi organisasi kepemudaan di Kota Pangkalpinang belum banyak berkembang. Jumlah organisasi pemuda sebanyak 29 organisasi di tahun 2020, dengan rasio organisasi pemuda dan olahraga terhadap penduduk (per 10.000) baru mencapai 30 persen di tahun 2020. Jumlah kegiatan kepemudaan selama setahun di tahun 2020 hanya terdapat 1 kegiatan. Sementara itu untuk jumlah organisasi olahraga sebanyak 1 organisasi, prestasi yang diraih dibidang olahraga cukup baik untuk Prestasi Popda/Kejurda Provinsi sebanyak 1 prestasi diraih di tahun 2020. Untuk mendukung pengembangan olahraga diperlukan sarana dan prasarana olahraga, saat ini sudah terdapat 57 sarana gedung olahraga.

Tabel 2.40

Capaian Kinerja Urusan Pemuda Olahraga Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Organisasi Pemuda	Unit	32	32	NA	NA	29
2	Jumlah Organisasi Olah Raga	Unit	27	27	NA	NA	1
3	Jumlah Gedung Olah Raga	Unit	1	1	NA	NA	57
4	Rasio Gelanggang/Balai Remaja per 10.000	Per 10.000	0,0001	0,0001	NA	NA	29%
5	Rasio organisasi pemuda	Per	0,0059	0,0059	NA	NA	30%



No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
	dan Olahraga terhadap penduduk (per 10.000)	10.000					
6	Rasio Lapangan Olahraga terhadap penduduk (per 10.000)	Per 10.000	0,0056	0,0056	NA	NA	57%
7	Jumlah Cabang Olahraga	Unit	27	27	NA	NA	7
8	Prestasi Popda/Kejurda Provinsi	Unit	77	61	NA	NA	1
9	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	Keg	3	3	NA	NA	2
10	Jumlah Kegiatan Olahraga	keg	5	3	NA	NA	3

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2021

20.Statistik

Statistik, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik, adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Dalam statistik, kegiatan yang dilakukan adalah menyediakan, menyebarluaskan data, mengembangkan ilmu statistik dan upaya berkembangnya Sistem Statistik Nasional. Kegiatan Statistik diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional, mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien, meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan dari kegiatan statistik adalah untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir, oleh karena itu, diperlukan adanya penyediaan data yang cepat, tepat dan akurat



sehingga dapat memudahkan bagi perencana untuk menyusun perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebijakan dan peraturan di masing-masing daerah. Data yang tersedia secara berkesinambungan harus selalu diperbaharui demi terwujudnya perencanaan pembangunan yang tepat.

21. Persandian

Persandian merupakan salah satu urusan pemerintahan yang konkuren dan bersifat wajib bagi seluruh pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan fungsi persandian bukan hanya sebatas kirim terima surat/berita sandi, akan tetapi diperluas sebagai pengamanan informasi. Kinerja urusan persandian menunjukkan nilai yang fluktuatif, dimana pada tahun 2015 terdapat 2 surat yang menggunakan persandian. Kemudian tahun 2016 hanya terdapat 1 surat yang menggunakan persandian, dan pada tahun 2017 terdapat 2 surat yang menggunakan persandian. Berdasarkan capaian kinerja tersebut dapat terlihat bahwa jumlah surat menyurat yang menggunakan persandian masih sangat minim.

Tabel 2.41

Capaian Kinerja Urusan Persandian Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah surat menyurat yang menggunakan persandian	Surat	NA	NA	222	187	238

Sumber: Diskominfo Kota Pangkalpinang, 2018



22. Kebudayaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan bidang Kebudayaan untuk Pemerintah Daerah adalah:

a. Kebudayaan, dengan lingkup:

- 1) Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota.
- 2) Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota.
- 3) Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota.

b. Kesenian Tradisional;

Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota.

c. Sejarah ;

Pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota.

d. Cagar Budaya;

- 1) Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.
- 2) Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.
- 3) Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

e. Permuseuman;

Pengelolaan museum kabupaten/kota.



Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa capaian kinerja urusan kebudayaan dapat dilihat dari 9 indikator, yaitu persentase persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2016 hingga tahun 2020 sebesar 51%. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya pada tahun 2020 sebanyak 2 kegiatan, jumlah misi kesenian pada tahun 2020 sebanyak 1 kegiatan. Jumlah grup kesenian pada tahun 2020 sebesar 51 grup, cakupan kajian seni tidak ada data, cakupan fasilitasi seni pada tahun 2015 sebesar 39 paket menurun menjadi sebesar 1 paket pada tahun 2019, cakupan sumber daya manusia kesenian (pamong budaya) pada tahun 2020 sebesar 1 orang, cakupan organisasi seni pada tahun 2020 tidak ada data, dan cakupan gelar seni pada tahun 2020 sebesar 85,7%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 42

Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	100	-	100	100	51
2.	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	keg	1	1	2	2	4
3.	Jumlah Misi Kesenian	kali	13	1	2	2	1
4.	Jumlah grup kesenian	grup	NA	30	34	37	51
5.	Cakupan Kajian Seni	Paket	NA	NA	NA	NA	NA
6.	Cakupan Fasilitas Seni	Paket	NA	NA	NA	1	1
7.	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian (pamong budaya)	Orang	NA	NA	NA	1	NA
8.	Cakupan Organisasi seni	Organisasi	NA	NA	NA	NA	NA
9.	Cakupan Gelar Seni	%	100	NA	NA	1	85,7

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang 2020



23. Perpustakaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa pembagian urusan bidang perpustakaan dalam Pemerintah Daerah terdiri dari 2 aspek sebagai berikut:

- a. Pembinaan perpustakaan, dengan lingkup;
 - 1) Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - 2) Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;
 - 1) Pelestarian naskah kuno milik Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dilihat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa terdapat 6 (enam indikator) urusan perpustakaan yakni jumlah pengunjung perpustakaan per tahun; koleksi buku yang tersedia di perpustakaan; rasio perpustakaan persatuan penduduk; jumlah rata rata pengunjung/tahun; jumlah koleksi judul buku perpustakaan; dan



jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat.

Sedangkan indikator urusan perpustakaan Kota Pangkalpinang pada tahun 2016-2020 terdapat sebanyak 7 (tujuh) indikator. Indikator peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan per tahun setiap tahunnya mengalami fluktuasi dari tahun 2016-2020, dimana tahun 2016 sebesar 0,78 menurun drastis menjadi -70% pada tahun 2020. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 14.444.

Dilihat dari jumlah koleksi judul buku perpustakaan juga kembali mengalami penurunan di tahun 2020 yakni 24.966 koleksi judul. Jika dilihat dari rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah mengalami penurunan, dimana tahun 2020 sebesar 0,40 persen

Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat di Kota Pangkalpinang cukup sedikit. Sejak tahun 2016 tidak terdapat pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat, namun pada tahun 2017 sudah terdapat 1 orang pustakawan, teknis dan penilai yang telah memiliki sertifikat dan meningkat di tahun 2018 menjadi 6 orang yang memiliki sertifikat namun kembali menurun di tahun 2020 menjadi 5 orang pustakawan.



Sementara jumlah perpustakaan di Kota Pangkalpinang dari tahun 2016-2020 memiliki trend perkembangan yang meningkat setiap tahunnya. Jumlah perpustakaan tahun 2016 sebanyak 111 perpustakaan, kemudian naik menjadi 124 perpustakaan pada tahun 2020.

Tabel 2.43
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kota Pangkalpinang
Tahun 2016-2019

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan per tahun	%	0,78	0,90	NA	0,43	-70
2.	Rasio koleksi buku yang tersedia dipergustakaan daerah	%	0,54	0,54	0,53	0,52	0,40
3.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	0,51	0,59	0,19	0,27	
4.	Jumlah rata-rata pengunjung per-pustakaan / tahun	Orang	168.878	168.388	152.142	166.749	14.444
5.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	21.410	23.284	46.952	46.952	24.966
6.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	0	1	6	6	5
7.	Jumlah Perpustakaan	unit	111	111	111	111	124

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang, 2021

24. Kearsipan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa terdapat 2 (dua) indikator urusan kearsipan yakni persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku, dan peningkatan SDM.

Kota Pangkalpinang memiliki 5 (lima) indikator kinerja pada tahun 2015-2020 urusan bidang kearsipan. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku memiliki tren perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2015 persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku sebesar 51,52 persen meningkat menjadi 87,10 persen pada tahun 2019. Sementara peningkatan SDM pengelola kearsipan mengalami kenaikan yang cukup besar dari tahun 2015 hanya sebanyak 43 orang kemudian naik menjadi 90 orang pada tahun 2019.

Jumlah arsip in aktif yang dikelola mengalami perkembangan yang fluktuatif cenderung meningkat, dari tahun 2016 sebesar 4.826 dokumen menurun menjadi 3.277 dokumen pada tahun 2019. Dilihat dari cakupan sarana dan prasarana (sarpras) arsip terpelihara juga mengalami perkembangan yang meningkat.

Tabel 2.44
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kota Pangkalpinang
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capain Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Presentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	63,64	80,65	80,65	87,10	-
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	orang	45	120	121	90	3



No	Indikator	Satuan	Capain Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
3	Jumlah Arsip in aktif yang berhasil dikelola	Dok	4.826	2.208	3.278	4.469	3277
4	Cakupan sarpras arsip terpelihara	M ³	48	155	155	155	0
5	Pengelolaan Arsip Secara Baku	%	100	100	NA	NA	NA

Sumber:Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang, 2020

2.1.3.3 Urusan Pilihan

25. Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan tangkap di Kota Pangkalpinang pada tahun 2019 mengalami peningkatan produksi dibandingkan dengan 2019. Hal ini dapat dilihat dari produksi perikanan tangkap tahun 2016 sebesar 2.089 ton/tahun menurun menjadi 1.099,30 ton/tahun pada 2020. Hal ini perlu menjadi perhatian oleh pemerintah Kota Pangkalpinang melalui kebijakan-kebijakan yang membantu para nelayan.

Peningkatan capaian angka konsumsi ikan di Kota Pangkalpinang yang meningkat menunjukkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dengan konsumsi protein hewani dari ikan. Selanjutnya cakupan bina kelompok pembudidaya ikan juga mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2016-2020 yaitu capaian pada tahun 2016 sebesar 25,07 persen meningkat menjadi sebesar 45 persen pada tahun 2020. Rincian realisasi dan pencapaian indikator fokus urusan pilihan kelautan dan perikanan dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel 2.45

Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi Perikanan Tangkap	ton / tahun	2.089	2.941	3.088	930,08	1.099,30
2	Cakupan bina kelompok nelayan	%	25,07	40,60	NA	NA	45
3	Produksi Perikanan budidaya	Ton	7.519	8.126	5.795,21	2.457	1.575,95
4	Angka Konsumsi Ikan	Kg/ kapita/ tahun	41,41	38,94	41,16	44,72	57,59
5	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	%	28,08	29,45	30,65	31,82	22

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang, 2021

26. Pariwisata

Undang- Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur kewenangan urusan pariwisata sebagai berikut:

a. Destinasi Pariwisata

- 1) Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota.
- 2) Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.
- 3) Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota.
- 4) Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota.

b. Pemasaran Pariwisata

Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota

c. Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual



Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota.

d. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Jumlah obyek wisata di Kota Pangkalpinang menunjukkan peningkatan, tahun 2016 sebanyak 38 obyek meningkat menjadi 45 obyek. Pengelolaan obyek wisata di Kota Pangkalpinang masih belum optimal, sehingga minat masyarakat untuk berkunjung juga relatif rendah. Perkembangan selengkapnya urusan pariwisata dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.46

Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2016-2020

NO	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Obyek Wisata	%	40	45	45	45	45
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang) :						
	1. Mancanegara	orang	1.009	1.663	3.159	1.755	283
	2. Nusantara (Domestik)	orang	196.999	213.793	225.314	866.897	133.365
3	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	1,04	1,33	NA	NA	4.10

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang, 2021

27. Pertanian

a. Produksi Tanaman Pangan

Produksi pangan utama di Kota Pangkalpinang adalah ubi Jalar, ketela pohon dan jagung. Luas Panen ketela pohon pada tahun 2016



hingga 2020 mengalami fluktuasi namun trennya menurun. Pada tahun 2016 produksi ketela pohon sebesar 105,7 ton, meningkat menjadi 190,07 ton pada tahun 2020. Produksi ubi jalar dari 53 ton pada 2016 turun menjadi 15 ton pada 2020. Sedangkan untuk produksi jagung mengalami penurunan dari 154,1 ton pada tahun 2016 menjadi 125,2 ton pada tahun 2020. Secara rinci dapat dilihat pada tabel:

Tabel 2. 47

**Luas Panen dan Produksi Tanaman Palawija Menurut Jenis Komoditas
Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2020**

No	Jenis Komoditas	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketela Pohon					
	✓ Luas Panen (ha)	11	10	7	NA	13
	✓ produksi (ton)	105,7	376	98	NA	190,07
2	Ubi Jalar					
	✓ Luas Panen (ha)	4	5	2	NA	1
	✓ produksi (ton)	53	174	30	NA	15
3	Jagung					
	✓ Luas Panen (ha)	32,4	21,5	17,9	NA	25,8
	✓ produksi (ton)	154,1	383,79	84	NA	125,2

Sumber : BPS, Kota Pangkalpinang Dalam Angka Tahun 2021

b. Produksi Tanaman Buah-Buahan

Beberapa komoditas buah produksinya mengalami fluktuasi dari tahun 2016 sampai 2020. Buah yang mengalami tren kenaikan dari tahun 2016- 2020 yaitu belimbing dan nanas. Selengkapnya tentang produksi buah-buahan di Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.48

**Jenis dan Produksi Buah-Buahan di Kota Pangkalpinang
Tahun 2016-2020 (ton)**

Jenis Buah-buahan	2016	2017	2018	2019	2020
1) Alpukat	16,9	21,2	190	178	260
2) Mangga	26,2	21,7	240	199	187
3) Rambutan	36,4	584,7	4.005	4.602	1484
4) Duku/Langsar	3,2	3,1	63	43	43
5) Jeruk	12,7	2,9	16	5	8
6) Durian	6,2	25,2	421	269	139
7) Pepaya	46,4	98,4	647	651	558
8) Pisang	153,8	188,8	1.901	2.047	1.745
9) Nanas	3.707,8	395,3	26.816	10.267	20.949
10) Salak	18,8	15	34	42	17
11) Manggis	18,7	14,2	115	269	180
12) Jambu Biji	14,9	19	50	79	71
13) Nangka	0	23,7	59	123	68
14) Belimbing	4,7	6,2	70	80	82

BPS, Kota Pangkalpinang Dalam Angka Tahun 2021

c. Produksi Peternakan

Jenis ternak yang diusahakan di Kota Pangkalpinang, adalah ternak besar berupa sapi, sedangkan ternak kecil terdiri dari kambing dan babi. Disamping itu juga diusahakan aneka ternak, termasuk unggas (ayam, itik dan burung puyuh).

Populasi ternak di Kota Pangkalpinang kondisinya fluktuatif, dengan tren meningkat. Populasi sapi yang semula 986 ekor pada 2016 naik menjadi 1.623 ekor di tahun 2020. Jumlah kambing dari 599 ekor di tahun 2016 menurun menjadi 400 ekor di tahun 2020. Dan terakhir babi meningkat dari semula 1.678 ekor pada 2016 menjadi 1.500 ekor di tahun 2020.



Tabel 2.49

Banyaknya Ternak di Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2020

Jenis Ternak	2016	2017	2018	2019	2020
Sapi	986	962	1363	1270	1446
Kambing	599	607	350	373	400
Babi	1.678	1.399	2.142	1.832	1500

Sumber : BPS, Kota Pangkalpinang Dalam Angka Tahun 2021

Sedangkan untuk ternak unggas, di Kota Pangkalpinang terdiri dari itik, ayam petelur, ayam kampung, dan ayam pedaging. Populasi unggas yang mengalami tren kenaikan jumlahnya adalah ayam petelur dan ayam pedaging, sedangkan lainnya mengalami penurunan.

Tabel 2. 50

Banyaknya Unggas di Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2020

Jenis Unggas	2016	2017	2018	2019	2020
Itik	21.026	23.570	29.087	28.342	28.000
Ayam Petelur	5.387	5.387	5.387	35.770	5.680
Ayam Pedaging	360.000	527.000	1.928.500	2.165.100	2.200.000
Ayam Kampung	146.604	74.763	33.602	32.574	32.000

BPS, Kota Pangkalpinang Dalam Angka Tahun 2021

28. Perdagangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan bidang Perdagangan untuk Pemerintah Daerah adalah:

- Perizinan dan pendaftaran perusahaan, dengan lingkup:



- 1) Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota.
 - 2) Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.
 - 3) Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB).
 - 4) Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk:
 - 5) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
 - 6) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
 - 7) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
 - 8) Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.
 - 9) Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan berbahaya di tingkat Daerah kabupaten/kota.
 - 10) Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau.
 - 11) Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).
- b. Sarana Distribusi Perdagangan
- 1) Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.



- 2) Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.

c. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

- 1) Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah kabupaten/kota.
- 2) Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota.
- 3) Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah kabupaten/kota.
- 4) Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.

d. Pengembangan Ekspor

- 1) Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
- 2) Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota).

e. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.



Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa jumlah pasar di Kota Pangkalpinang sebanyak 9 pasar yang terbagi menjadi 4 Toko modern dan 5 pasar rakyat, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.51
Jumlah dan Jenis Pasar Tahun 2016-2020

No	Jenis Pasar	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Toko modern	unit	4	4	57	57	57
2	Pasar rakyat	unit	5	5	5	5	5
	Jumlah	unit	9	9	62	62	62

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang 2021

Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa capaian kinerja urusan perdagangan dapat dilihat dari 6 indikator yaitu, Cakupan Ukur alat takar dan perlengkapannya, Produk pasar yang diterima pasar internasional, Nilai bersih ekspor perdagangan pada tahun 2016 sebesar \$1763,895 meningkat menjadi sebesar \$54.112.701,30 pada tahun 2020, Kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB pada tahun 2016 sebesar 37,74% menurun menjadi 26,04% pada tahun 2020, Pasar rakyat yang memenuhi persyaratan pada tahun 2016 sebesar 80% meningkat menjadi sebesar 90% pada tahun 2017, Ketersediaan Informasi dan Harga dari tahun 2016 hingga tahun 2020 sebesar 264 kali. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.52

Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Ukur alat takar dan perlengkapannya	%	NA	NA	140	117	105
2	Produk pasar yang diterima pasar internasional	Jenis	NA	NA	NA	NA	NA
3	Nilai bersih ekspor perdagangan	(\$)	1.763,895	NA	1.614,546,892.53	669.477.917,75	54.112.701,30
4	Kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB	%	37,74	NA	27,32	27,14	26,04
5	Pasar rakyat yang memenuhi persyaratan	%	80	90	NA	NA	NA
6	Ketersediaan Informasi dan Harga	Kali	264	264	364	364	364

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang 2021

29. Perindustrian

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Industri adalah seluruh bentuk dari kegiatan ekonomi yang mengelolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri, sehingga dapat menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk juga jasa industri. Kota Surakarta (MEA). Keempat sektor tersebut meliputi industri tekstil dan produk tekstil, batik, mebel kayu, rotan dan metal, serta kerajinan kayu dan rotan. Keempat sektor itu memiliki potensi tinggi untuk menembus pasar baru di kawasan negara-negara ASEAN, dan juga negara-negara Masyarakat Ekonomi Eropa.

Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan bidang perindustrian untuk Pemerintah Daerah adalah:



a. Perencanaan Pembangunan Industri

Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten/kota

b. Perijinan

- 1) Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah.
- 2) Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah.
- 3) Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.

c. Sistem Informasi Industri Nasional

Penyampaian laporan informasi industri untuk:

- 1) IUI Kecil dan Izin Perluasannya;
- 2) IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan
- 3) IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.

Sektor industri mempunyai pengaruh yang besar terhadap perekonomian daerah. Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa jumlah IKM yang ada di Kota Pangkalpinang selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, pada tahun 2016 jumlah IKM yang ada di Kota Pangkalpinang sebesar 1770 unit meningkat menjadi 2650 unit pada Tahun 2020. Persentase pengusaha industri kecil yang telah mengikuti pelatihan selama 5 tahun terakhir fluktuatif setiap tahunnya, pada tahun 2020 hanya sebesar 3,77%. Namun persentase IKM yang memiliki penunjang usaha, pada tahun 2020 konsisten dalam 3 tahun belakang yaitu sebesar 100%. Sementara itu pertumbuhan jumlah industri di Kota Pangkalpinang selama 5



tahun terakhir cenderung inkonsisten, terlihat dari pada tahun 2016 sebesar 14,92% menurun menjadi 21,56 pada tahun 2020. Capaian indikator urusan perindustrian Kota Pangkalpinang dari tahun 2016-2020 bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.53
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertumbuhan Jumlah Industri	%	14,92	13,45	5,30	5,93	21,56
2	Jumlah IKM	unit	1770	2045	2058	2180	2650
3	Jumlah IKM yang dikembangkan melalui Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	Unit	94	0	50	54	58
4	Persentase Pengusaha Industri Kecil yang telah mengikuti Pelatihan	%	18,81	5,87	90,1	91	3,77
5	Persentase IKM yang memiliki Penunjang Usaha	%	15,54	6,85	100	100	100
6	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	%	7,04	NA	15,99	13,17	9

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang 2021

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Rumah tangga merupakan konsumen atau pemakai barang dan jasa sekaligus juga pemilik faktor-faktor produksi tenaga kerja, lahan, modal dan kewirausahaan. Rumah tangga menjual atau mengelola faktor-faktor produksi tersebut untuk memperoleh balas jasa. Balas jasa atau imbalan tersebut adalah upah, sewa, bunga dividen, dan laba yang merupakan komponen penerimaan atau pendapatan rumah tangga.



Penerimaan lain yang mungkin diperoleh rumah tangga adalah transfer (pemberian cuma-cuma), perkiraan pendapatan (imputasi) dari rumah milik rumah tangga tersebut yang ditempati sendiri atau ditempati pihak lain dengan bebas sewa, dan hasil produksi barang/jasa dari kegiatan yang tidak digolongkan sebagai kegiatan usaha rumah tangga. Transfer yang diterima berasal dari pemerintah, badan usaha, lembaga nirlaba, rumah tangga lain, maupun dari luar negeri.

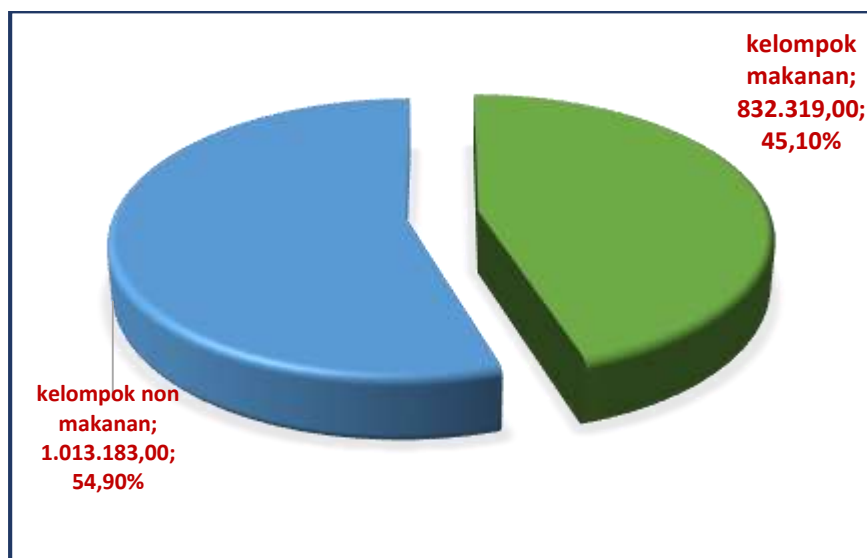
Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama seminggu/sebulan/setahun baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Pada tahun 2020, pengeluaran konsumsi per kapita di Kota Pangkalpinang mencapai Rp.1.845.502 per kapita per bulan. Sebagian besar pengeluaran tersebut dipergunakan rumah tangga untuk membeli pengeluaran konsumsi kelompok non makanan sebesar Rp.1.013. 183,- atau sebesar 54,90 persen. Sedangkan

pengeluaran konsumsi kelompok makanan sebesar Rp 832.319,- atau sebesar 45,10 persen.

Gambar 2.31

Pengeluaran Konsumsi per Kapita di Kota Pangkalpinang Tahun 2020



Sumber: Pangkalpinang Dalam Angka 2021, BPS

2. Nilai Tukar Petani

Penghitungan Nilai Tukar Petani (NTP) ini diperoleh dari perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) antara produk pertanian yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam memproduksi dan konsumsi rumah tangga. Dengan membandingkan kedua perkembangan angka tersebut, maka dapat diketahui apakah peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan petani dapat dikompensasi dengan pertambahan pendapatan petani dari hasil pertaniannya. Atau sebaliknya, apakah kenaikan harga jual produksi pertanian dapat menambah pendapatan petani yang pada

gilirannya meningkatkan kesejahteraan para petani. Semakin tinggi nilai NTP, relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani.

NTP secara umum tercatat sebesar 85,87 atau mengalami kenaikan sebesar 1,56 persen dibanding bulan sebelumnya yang mencapai 84,55. Kenaikan NTP dikarenakan It yang mengalami kenaikan sebesar 1,05 persen dan turunnya Ib sebesar 0,50 persen.

Gambar 2.32

Perbandingan NTP Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017 dan 2018



Sumber: BPS, Provinsi Bangka Belitung, 2019

3. Ekspor Impor

Komoditas ekspor Kota Pangkalpinang dilakukan melalui pelabuhan laut, yaitu melalui pelabuhan laut Pangkalbalam. Volume ekspor Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 adalah sebesar 35.262,93 ton. Volume ekspor terbesar dari pelabuhan Pangkalbalam terjadi pada Bulan Mei, yakni sebesar 9.914 ton, sedangkan volume ekspor terendah pada Bulan November sebesar 1.516 ton.



Pada tahun 2020 impor Kota Pangkalpinang menurut pelabuhan bongkar muat Pangkalbalam adalah sebesar 9.417,37 ton. Sedangkan volume Impor terendah terjadi pada bulan Maret sebesar 210 ton.

4. Perbankan

Kondisi keuangan yang beredar di masyarakat dapat terlihat dari beberapa transaksi perbankan yang dilakukan di suatu wilayah. Beberapa posisi transaksi perbankan di Kota Pangkalpinang mengalami kenaikan yang cukup signifikan, terutama posisi kredit perbankan yang mencapai Rp.12,15 trilyun pada tahun 2018 dimana pada tahun sebelumnya berkisar Rp.6,5 trilyun. Sedangkan posisi penghimpunan dana simpanan masyarakat juga meningkat hingga mencapai Rp.7 trilyun pada tahun 2018 dan posisi kredit mikro, kecil dan menengah meningkat menjadi Rp.1,46 trilyun.

Tabel 2.54

Posisi Kredit Perbankan, Penghimpunan Dana Simpanan dan Kredit Mikro, Kecil dan Menengah Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2018

No.	Uraian	2016	2017	2018
1	Posisi Kredit Perbankan (Juta Rupiah)	6.519.463	6.489.286	12.152.564
2	Posisi Penghimpunan Dana Simpanan Masyarakat (Juta Rupiah)	6.436.215	6.537.829	7.024.582
3	Posisi Kredit Mikro, Kecil dan Menengah (Juta Rupiah)	1.398.120	1.391.703	1.458.645

Sumber: Kota Pangkalpinang dalam Angka Tahun 2020



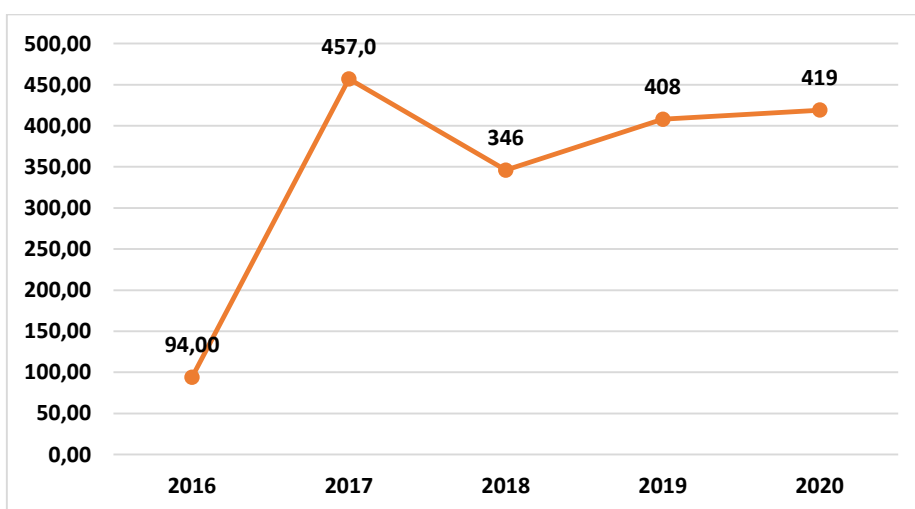
2.1.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi

1. Angka Kriminalitas

Kasus kriminal yang terjadi di Kota Pangkalpinang selama 5 tahun kondisinya fluktuatif, sempat menurun dari tahun 2017-2018. Namun terjadi kenaikan drastis dari tahun 2016 ke tahun 2017. Kasus kriminal yang paling menonjol terjadi di wilayah Kota Pangkalpinang adalah pencurian dan penyalahgunaan narkoba. Selengkapnya data kasus kejahatan di Kota pangkalpinang dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar 2.33

Kasus Kejahatan di Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2020



Sumber: Kota Pangkalpinang Dalam Angka 2021, BPS

2. Perizinan

Salah satu kondisi yang mendukung terhadap pencapaian kinerja peningkatan investasi di daerah adalah kemudahan dalam mengurus perizinan usaha. Pelayanan Perizinan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga



Kerja meliputi urusan penanaman modal, pelayanan bidang lingkungan, perdagangan, perindustrian, konstruksi, penataan ruang, kesehatan dan ketenagakerjaan serta pemberian layanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kota yang mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keamanan berkas yang meliputi pemberian, penolakan, pengeluaran dan pencabutan izin.

Saat ini Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja melayani pengurusan 61 jenis izin dan 14 non izin. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.55

Jenis Izin dan Non Izin yang Dilayani Oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja di Kota Pangkalpinang

NO.	JENIS IZIN	JENIS NON IZIN
1	Izin Mendirikan Bangunan	Tanda Daftar Perusahaan
2	Izin Lokasi	Tanda Daftar Gudang
3	Izin Penggunaan Peruntukan Lahan	Tanda Daftar Industri
4	Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota	Tanda Daftar Usaha Pariwisata
5	Izin Lokasi Pengolahan Limbah B3	Pengesahan Site Plan Perumahan
6	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	Penerbitan Kartu AK/1
7	Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air	Surat Persetujuan/Rekomendasi Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair)
8	Izin Pemanfaatan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air	Surat Persetujuan Bursa Kerja Khusus
9	Izin Lingkungan (Amdal Atau Ukl-Upl) SPPL	Pendaftaran Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
10	Surat Izin Usaha Pedagangan	Penerbitan SIU LPTKS AKL
11	Surat Izin Usaha Sarang Burung Walet	Penerbitan SIU LPTKS AKL Perpanjangan
12	Surat Izin Usaha Industri	Penerbitan SIU LPTKS AKL Perubahan
13	Surat Izin Jasa Usaha Konstruksi	Rekomendasi Izin Perpanjangan Operasional PPTKIS
14	Izin Trayek Angkutan Kota	Rekomendasi Pembuatan Pasport Calon TKI dan Verifikasi Calon TKI
15	Izin Pendirian Operasional Pendidikan Dasar	



NO.	JENIS IZIN	JENIS NON IZIN
16	Izin Pendirian/Perpanjangan Operasional Pendidikan PAUD	Izin
17	Izin Pendirian/Perpanjangan Operasional Taman Kanak – Kanak	Izin
18	Izin Pendirian/Perpanjangan Operasional Tempat Penitipan Anak (TPA)	Izin
19	Izin Pendirian/Perpanjangan Operasional Pos PAUD	Izin
20	Izin Pendirian/Perpanjangan Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan	Izin
21	Izin Pendirian/Perpanjangan Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar	Izin
22	Surat Izin Apotik	
23	Surat Izin Klinik	
24	Surat Izin Laboratorium Klinik	
25	Surat Izin Optik	
26	Surat Izin Pelayanan Radiologi	
27	Surat Izin Mendirikan Rumah Sakit	
28	Surat Izin Operasional Rumah Sakit	
29	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional	
30	Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional	
31	Surat Izin Toko Alat Kesehatan	
32	Surat Izin Toko Obat	
33	Surat Izin Tukang Gigi	
34	Surat Izin Puskesmas	
35	Surat Izin Usaha Mikro Obat Tradisional	
36	Surat Izin Kerja Tenaga Gizi	
37	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi	
38	Surat Izin Kerja Bidan	
39	Surat Izin Praktik Bidan	
40	Surat Izin Praktik Dokter	
41	Surat Izin Praktik Apoteker	
42	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	
43	Surat Izin Kerja Fisioterapis	
44	Surat Izin Praktik Fisioterapis	
45	Surat Izin Kerja Perawat	
46	Surat Izin Kerja Perekam Medis	
47	Surat Izin Kerja Radiografer	
48	Surat Izin Kerja Refraksionis Oftisien	
49	Surat Izin Kerja Tenaga Kerja Sanitarian	
50	Surat Izin Kerja Tenaga Teknisi Gigi	
51	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	
52	Surat Izin Kerja Tenaga Teknik Elektromedik	
53	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	
54	Surat Izin Kerja Terapis Wicara	
55	Surat Izin Praktik Terapis Wicara	
56	Surat Izin Praktik Okupasi Terapis	



NO.	JENIS IZIN	JENIS NON IZIN
57	Surat Izin Kerja Okupasi Terapis	
58	Surat Izin Praktik Penata Anastesi	
59	Surat Izin Tenaga Fisikawan Prostetik	
60	Surat Izin Tenaga Akupuntur	
61	Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	

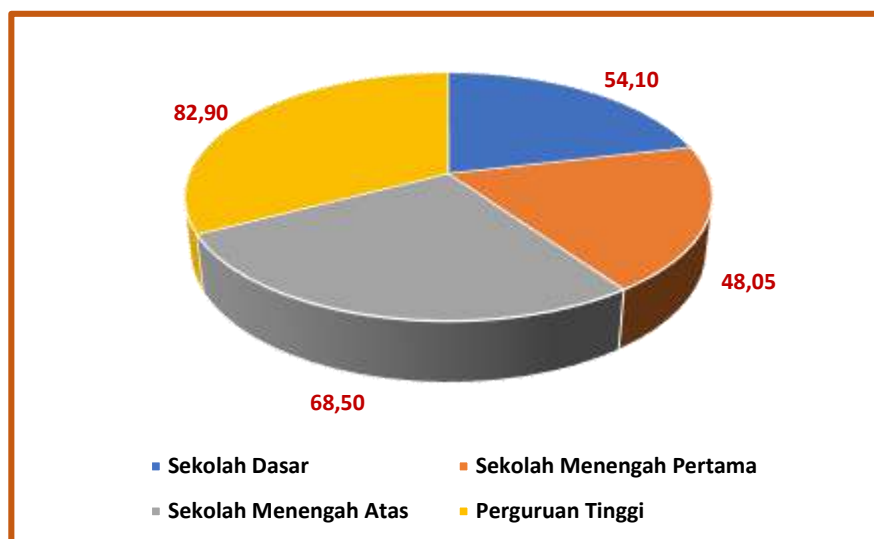
Sumber : Dinas PMPTSP Kota Pangkalpinang

2.1.4.3 Fokus Sumberdaya Manusia

1.Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah salah satunya ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan D4,S1,S2 dan S3. Sebagian besar tenaga kerja memiliki pendidikan tertinggi Perguruan Tinggi sebesar 82,90 persen, SMA sebesar 68,50 %. Selanjutnya, tenaga kerja yang memiliki pendidikan Sekolah Dasar atau belum lulus SD sebanyak 54,10 persen dan SMP sebesar 48,05 persen.

Gambar 2.34
Persentase Tenaga Kerja Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan
Kota Pangkalpinang Tahun 2020



Sumber: Kota Pangkalpinang Dalam Angka, 2021

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan untuk satu tahun yang diarahkan untuk memuat rumusan program/kegiatan guna mewujudkan tujuan dan sasaran serta target kinerja tahunan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Tahun 2019 merupakan tahun pertama periode RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 atau tahapan lima tahunan ke-3 dalam RPJPD Tahun 2007-2025. Pencapaian kinerja program tahun 2020 merupakan gambaran kinerja tahun kedua RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023, lebih



lanjut pencapaian kinerja program menurut perangkat daerah pelaksana urusan dapat diuraikan sebagai berikut:

2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD 2020

1. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD yang melaksanakan 5 program dan 39 kegiatan berdasarkan laporan hasil evaluasi Rencana Kerja telah terlaksana dengan nilai realisasi kinerja sebesar 78,91% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 38.673.988.826,- atau sebesar 91,08% dari pagu anggaran Rp. 42.460.277.282,- yang mengalami kenaikan sebesar 19,09 dari anggaran APBD induk (Rp.6.806.277.282,-), dan berdasarkan hasil realisasi capaian kinerja mendapatkan predikat kinerja Tinggi (T) dan capaian keuangan predikat kinerja yang di dapat Sangat Tinggi (ST). Rata-rata realisasi capaian kinerja yang paling tinggi ada pada pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 89,51%.

Ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana pada pelaksanaan program prioritas yaitu kegiatan Peningkatan Kualitas Jasmani pimpinan dan Anggota DPRD, kegiatan Pengamanan Penyaluran Aspirasi, kegiatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD, dan kegiatan Raperda Inisiatif DPRD dengan realisasi kinerja dan keuangan masing-masing nol persen. Kegiatan tersebut di atas tidak terlaksana akibat adanya pengurangan anggaran yang terjadi pada saat refocusing yang lalu, selain itu saat pandemi COVID-19 dibatasinya pelaksanaan kegiatan yang melibatkan banyak orang



sehingga untuk pelaksanaan pada saat triwulan IV waktu yang terlalu singkat dikhawatirkan tidak bisa terlaksana secara maksimal.

2. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah melaksanakan 17 program dan 120 kegiatan. Ada satu program yang dilaksanakan pada triwulan akhir ini yaitu program kebijakan bidang pengembangan ekonomi kreatif dan kewirausahaan. Berdasarkan laporan Rencana Kerja nilai realisasi kinerja sebesar 79,67% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 40.543.805.344,00 atau sebesar 87,84% dari pagu anggaran Rp. 46.156.787.369,-, dimana pagu anggaran mengalami kenaikan sebesar 2,38% dari anggaran APBD induk (Rp. 1.072.115.069,-).

Hasil realisasi capaian kinerja dan capaian keuangan predikat yang didapat masuk dalam kategori Tinggi (T). Rata-rata realisasi capaian kinerja yang paling tinggi ada pada pelaksanaan program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, program peningkatan komunikasi dan informasi serta media massa dan protokol, program pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan, program peningkatan pengembangan BUMD, perencanaan, pengkajian, pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta program pengembangan pemanfaatan teknologi informasi sebesar 100%. Ada beberapa kegiatan yang tidak



terlaksana yaitu Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Humas dan Protokol, Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, Penyusunan RENJA (RKT,RKA, dan DPA), Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD, Penyusunan Standar Satuan Harga, Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik, Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, Pembentukan tim Seleksi pemilihan calon Pimpinan BAZNAS Kota Pangkalpinang, Pemuktakhiran Data UKS, Monitoring UKS, Pembinaan dan Pengembangan UKS. Tidak terlaksananya beberapa kegiatan tersebut dikarenakan adanya pemangkasan anggaran pada masa refocusing yang lalu sehingga apabila dipaksakan akan dilaksanakan pada triwulan IV dikhawatirkan tidak maksimal, selain itu pula dampak pada masa pandemi COVID-19 ini acara yang bersifat rapat atau mengumpulkan banyak orang pada satu titik tertentu tidak diperbolehkan sehingga kegiatan-kegiatan yang demikian tidak dilaksanakan.

Pada sekretariat daerah ada beberapa kegiatan baru masuk pada Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Pada tahun 2020 sekretariat daerah menjalankan 15 program prioritas, tetapi akibat dari kebijakan pengurangan anggaran terkait refocusing yang lalu ada dua program yang masuk prioritas tidak dilaksanakan



sampai dengan triwulan akhir ini, sehingga Sekretariat Daerah hanya melaksanakan 13 program dan dengan jumlah kegiatan yang sama yaitu 75 kegiatan.

3. Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah pada triwulan IV melaksanakan 6 program dan 38 kegiatan. Pada triwulan IV realisasi capaian kinerja sebesar 99,78% dan keuangan terealisasi sebesar Rp. 2.776.733.072,00 atau 90,47% dari pagu anggaran Rp. 3.069.400.000,-, dimana anggaran perubahan APBD sama dengan pagu APBD induk, predikat kinerja yang di dapat Sangat Tinggi (ST) untuk realisasi capaian kinerja dan Tinggi (T) untuk realisasi capaian keuangan.

Rata-rata capaian kinerja yang paling tinggi ada pada pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan sebesar 100,00%.

Pada pelaksanaan program dan kegiatan banyak terjadi pemangkasan pada refocusing yang lalu tapi pada anggaran perubahan APBD di triwulan IV ini tidak banyak perubahan yang terjadi pada pagu anggaran sebelumnya sehingga program dan



kegiatan dalam pelaksanaan berjalan dengan lancar seperti yang terlihat pada laporan, dari semua program yang dilaksanakan hanya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur saja yang tidak mencapai 100%.

4. Badan Keuangan Daerah

Badan Keuangan Daerah melaksanakan 6 program dan 66 kegiatan. Realisasi capaian kinerja sebesar 84,72% dan capaian keuangan terealisasi sebesar Rp. 15.554.270.060,00 atau 69,22% dari pagu anggaran Rp. 22.469.181.098,-, yang mengalami kenaikan anggaran dari pagu induk sebesar 78,33% atau sebesar Rp. 9.869.181.098,00 dengan predikat kinerja yang didapat Tinggi (T) untuk capaian kinerja dan Sedang (S) untuk capaian keuangan. Kenaikan anggaran ada pada program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah sebesar Rp. 8.742.564.238,00, ada pengurangan dan penambahan pada kegiatan yang berjalan dan ada satu penambahan kegiatan baru yang telah dilaksanakan pada triwulan III yang lalu yaitu kegiatan pembayaran kewajiban atas Putusan Pengadilan yang inkracht sebesar Rp. 2.537.899.366,00.

Ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana pada triwulan IV atau capaian realisasi nol persen untuk capaian kinerja dan keuangan yaitu kegiatan Pendidikan dan Pelatihan formal dengan alasan tidak terlaksana akibat kebijakan refocusing yang lalu,



kegiatan Penyusunan analisa standar belanja tidak dilaksanakan karena kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 sehingga dana yang ada tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan tersebut, kegiatan Penyusunan rancangan perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah tidak dilaksanakan juga karena kebijakan refocusing, dan kegiatan Iuran Asuransi Kesehatan (Bagi PHL) sebesar Rp.4.000.000.000,- yang tidak terlaksana karena belum jelasnya aturan mengenai pelaksanaan asuransi ini. Rata-rata capaian kinerja yang paling tinggi ada pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yaitu 100%

5. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah melaksanakan 6 program dan 56 kegiatan. Realisasi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan secara keseluruhan sebesar 96,41% dan keuangan terealisasi sebesar Rp. 4.250.765.525,00 atau 91,57% dari pagu anggaran Rp. 4.642.101.415,- dimana anggaran tersebut berkurang 14,67% dari pagu induk atau sebesar Rp. 798.039.584,-

Predikat kinerja yang di dapat Sangat Tinggi (ST) untuk capaian kinerja dan Sangat Tinggi (ST) untuk capaian keuangan. Rata-rata capaian kinerja yang paling tinggi ada pada pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, program peningkatan



pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dan Program Penelitian dan Pengembangan yaitu 100 %. Pada Tahun 2020 ini hampir seluruh program dan kegiatan yang dianggarkan terlaksana, walaupun sama seperti perangkat daerah lainnya yang terdampak akibat kebijakan refocusing banyak program/kegiatan yang dipangkas dan yang pasti mengutamakan yang prioritas untuk dilaksanakan tetapi secara keseluruhan program/kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu

6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) melaksanakan 5 program dan 40 kegiatan, realisasi capaian kinerja sebesar 95,16% dan keuangan terealisasi sebesar Rp. 2.175.448.062,00 atau 91,86% dari pagu anggaran Rp. 2.368.274.594,- dimana anggaran tersebut berkurang sebesar 30,34% (Rp. 1.031.725.406,-) dari pagu anggaran APBD induk. Predikat capaian kinerja yang di dapat Sangat Tinggi (ST) untuk capaian kinerja dan capaian keuangan. Rata-rata capaian kinerja yang paling tinggi ada pada pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yaitu 90 %.



BKPSDMD melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah dianggarkan tetapi ada beberapa capaian kinerja yang realisasinya kecil sedangkan anggaran meraih predikat Sangat Tinggi (ST), hal ini dikarenakan adanya kebijakan relokasi anggaran saat refocusing yang lalu sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan maksimal dan anggaran mengalami pemangkasan. Efek dari pandemi ini sama seperti perangkat daerah lainnya yaitu kegiatan seperti pelaksanaan sosialisasi, diklat, dan lainnya yang bersifat berkumpul tidak diperbolehkan saat ini.

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2020 berdasarkan hasil laporan evaluasi Renja Badan Keuangan Daerah yang menggunakan anggaran perubahan APBD melaksanakan 4 program dan 24 kegiatan. Realisasi capaian kinerja sebesar 96,43% dan keuangan terealisasi sebesar Rp 4.455.110.039,- atau 89,66% dari pagu anggaran Rp. 4.969.066.400,- berkurang sebesar 2,41% (Rp. 117.066.400,-) dari pagu anggaran APBD induk.

Predikat capaian kinerja yang di dapat Sangat Tinggi (ST) dan capaian keuangan yang di dapat Tinggi (T). Rata-rata capaian kinerja yang paling tinggi ada pada seluruh pelaksanaan program sebesar 100% kecuali program



Penyelenggaraan Penanggulangan dan Mitigasi Bencana yang kinerjanya terealisasi sebesar 85,71% karena ada satu kegiatan yang tidak terlaksana yaitu kegiatan Siaga Bencana yang disiapkan untuk pembelian barang atau kebutuhan pangan untuk pengungsi korban bencana, alasan kegiatan ini tidak terlaksana karena tidak adanya bencana alam seperti banjir atau lain sebagainya pada tahun berjalan.

8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan hasil laporan evaluasi Renja melaksanakan 5 program dan 25 kegiatan,. Realisasi capaian kinerja sebesar 99,04% dan keuangan terealisasi sebesar Rp. 1.256.806.922,00 atau sebesar 92,70% dari pagu anggaran Rp. 1.355.744.969,- yang berkurang sebesar 31,56% (Rp. 625.055.031,00) dari pagu anggaran APBD induk.

Predikat capaian kinerja dan capaian keuangan yang di dapat Sangat Tinggi (ST). Rata-rata capaian kinerja yang paling tinggi ada pada pelaksanaan tiga program dari empat yang dilaksanakan yaitu sebesar 100% kecuali satu program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 95,22%, dimana ada satu kegiatan yang capaian kinerjanya



yang hanya terealisasi sebesar 52,17% akibat pemangkasan anggaran dari kebijakan refocusing yang lalu.

9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan 10 program dan 60 kegiatan. Pada saat refocusing yang lalu ada beberapa kegiatan yang dipangkas akibat tidak memungkinkan apabila dilaksanakan pada saat masa pandemi COVID-19 ini seperti jenis-jenis perlombaan baik lomba seni maupun cabang olahraga ataupun kegiatan yang melibatkan banyak orang pada satu tempat tertentu, dan kegiatan lainnya yang dianggap tidak terlalu krusial untuk dilakukan pada saat masa pandemi ini. Realisasi capaian kinerja yang dicapai oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan sebesar 97,45% dan keuangan terealisasi sebesar Rp. 55.569.725.071,00 atau sebesar 86,65% dari pagu anggaran Rp. 64.134.000.000,-.

Realisasi capaian predikat capaian kinerja yang di dapat Sangat Tinggi (ST) dan capaian keuangan yang di dapat Tinggi (T). Rata-rata capaian kinerja yang paling tinggi ada pada pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program peningkatan



pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Program Peningkatan Akses dan Mutu Layanan PAUD dan Pendidikan Non Formal yaitu 100%. Pada tahun 2020 program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan 6 program dan 112 kegiatan prioritas, tetapi pada anggaran APBD perubahan ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan 6 program dan 38 kegiatan akibat dari pandemi COVID-19 dan penyesuaian anggaran terkait refocusing yang lalu.



10. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan melaksanakan 8 program dan 132 kegiatan, pada triwulan IV realisasi capaian kinerja 91,38% dan keuangan terealisasi sebesar Rp. 108.329.161.981,00 atau 90,06% dari pagu anggaran Rp. 120.286.800.040,00 dimana pada saat refocusing mengalami kenaikan sebesar 74,31% dari pagu anggaran induk dan pada saat perubahan APBD mengalami kenaikan sebesar 30,08% dari APBD induk (Rp. 27.817.712.523,00). Penambahan anggaran sebesar 30,08% dari anggaran induk ada pada Program Peningkatan Pelayanan Mutu Layanan Kesehatan/ BLUD yang mendapat kcucuran dana dari Pemerintah pusat untuk masyarakat terkait penanggulangan pandemi akibat COVID-19 di RSUD. Pada Program peningkatan pelayanan bidang kesehatan ada tambahan 2 kegiatan baru akibat dari pandemi COVID-19 ini yaitu Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Rumah Sakit Rujukan dengan anggaran sebesar Rp. 2.446.565.750,00 pada refocusing yang lalu pada anggaran perubahan APBD ini naik menjadi Rp. 4.325.327.814,00 dan kegiatan Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Pelayanan



yang pada refocusing lalu dianggarkan Rp. 9.471.766.250,00 pada anggaran perubahan APBD naik menjadi Rp. 15.471.766.250,00. dan program peningkatan mutu bidang kesehatan dengan kegiatan pengadaan alat kesehatan ruang isolasi COVID-19 pagu Rp. 744.135.427,00 saat refocusing yang pada anggaran perubahan ini tidak mengalami kenaikan selain itu penambahan pagu tersebut juga dikarenakan masuknya anggaran DAK fisik maupun nonfisik yang belum masuk pada anggaran induk yang lalu.

Pada Dinas Kesehatan pada tahun 2020 ada perubahan nomenklatur yang diikuti dengan pemindahan urusan kewenangan Keluarga Berencana ke baru yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB sehingga sebagian capaian kinerja disesuaikan kembali dengan kewenangan yang ada. Adapun capaian kinerja pada tahun 2020 mendapatkan predikat Sangat Tinggi (ST) dan capaian keuangan Tinggi (T). Rata-rata capaian kinerja yang paling tinggi ada pada pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program



Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yaitu sebesar 100,00%.

11.Dinas Sosial

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dengan dasar adanya perubahan struktur organisasi yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang berubah nomenklatur nama menjadi Dinas Sosial. Pelaksanaan tahun 2020 berdasarkan hasil laporan evaluasi Renja melaksanakan 7 program dan 37 kegiatan. Realisasi capaian kinerja sebesar 90,76% dan keuangan terealisasi Rp. 2.906.471.079,00 atau sebesar 91,22% dari pagu anggaran Rp. 3.186.187.698,-, dimana pada saat perubahan anggaran mengalami penurunan sebesar 22,77% (Rp. 939.466.322,00) dari pagu induk.

Program dan kegiatan yang dianggarkan hampir seluruhnya terlaksana tetapi sebagaimana disampaikan di atas ada perubahan nomenklatur sehingga ada pula pula perpindahan kewenangan ke dinas baru yang berwenang mengurus urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Seperti kegiatan Pelayanan Pengangkatan Anak/Adopsi ataupun Pengembangan Forum Anak Skala Kota yang target kinerja dan keuangan



disesuaikan kembali sesuai dengan batas kewenangan yang ada pada saat kegiatan ini berjalan.

Untuk predikat persentase capaian kinerja mendapatkan predikat Tinggi (T) dan capaian keuangan yang di dapat Sangat Tinggi (ST). Rata-rata capaian kinerja yang paling tinggi ada pada pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dan Program Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial yaitu sebesar 100,00%.

12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan 7 program dan 56 kegiatan. Pada APBD induk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan 8 program dan 58 kegiatan, berarti ada satu program yang tidak dilaksanakan sejak dari anggaran refocusing sampai dengan triwulan IV ini yaitu program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, selain itu ada program yang dianggarkan pada triwulan IV tapi tidak dilaksanakan yaitu Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.



Realisasi capaian kinerja 77,18% dan keuangan terealisasi Rp. 97.218.832.106,00 atau sebesar 89,98% dari pagu anggaran Rp. 108.042.215.814,00 berkurang sebesar 11,73% (14.354.784.186,00). dari pagu anggaran induk. Ada beberapa program yang berkurang secara signifikan karena kebijakan anggaran ini seperti, tetapi secara keseluruhan dapat dilaksanakan secara optimal. Pada Program Pembangunan, Pengembangan, Penataan Infrastruktur dan sumber daya air yang menggunakan pagu APBD induk mendapatkan anggaran sebesar Rp. 86.359.436.000,00 dan pada perubahan APBD ini turun menjadi Rp. 79.059.301.612,00, dalam program ini ada dua kegiatan yang baru masuk yaitu kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong sebesar Rp. 600.000.000,00 dan kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas sebesar Rp. 120.000.000,00. Dalam program tersebut juga ada kegiatan yang dipangkas saat refocusing lalu dimasukkan kembali pada triwulan IV ini seperti Pembangunan Jalan dan Pengembangan fasilitas umum. Program Penanggulangan Banjir dan Genangan mengalami pengurangan pagu dari APBD induk sebesar Rp. 15.893.064.000,00 menjadi Rp. 11.879.642.000,00 pada triwulan IV dan dalam program ini juga melaksanakan



melaksanakan kegiatan baru yaitu Rehabilitasi /Pemeliharaan normalisasi saluran sungai dan selokan jalan sebesar Rp. 1.848.500.000,00.

Ada kegiatan yang dihilangkan karena kebijakan refocusing yang lalu yaitu Penataan Kolong Kota Pangkalpinang yang tetap tidak dilaksanakan di perubahan APBD, sedangkan kegiatan lain seperti Pembangunan Saluran Drainase / Gorong- gorong yang direfocusing dilaksanakan kembali di Perubahan APBD. Program Tata Ruang dari pagu anggaran induk Rp. 2.700.000.000,00 berkurang menjadi Rp. 1.758.521.000,00. Program Pertanahan dari pagu induk Rp. 15.275.000.000,00 berkurang menjadi Rp. 13.794.531.900,00, dalam program ini ada kegiatan yang tidak terlaksana maksimal dalam penyerapan anggarannya yaitu kegiatan Pembuatan database asset bidang tanah kota Pangkalpinang dan kegiatan Pembuatan alas hak dan dan Asset Bidang Pertanahan. Ada juga yang tidak terlaksana yaitu kegiatan Pengamanan Aset dengan alasan dibatalkan karena refocusing.

Untuk predikat capaian kinerja dan capaian keuangan yang di dapat sama yaitu Tinggi (T). Rata-rata capaian kinerja yang paling tinggi ada pada pelaksanaan Program



Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu sebesar 100%.

13. Dinas Perumahan dan Permukiman

Dinas perumahan dan permukiman melaksanakan 7 program dan 66 kegiatan, pada triwulan IV realisasi capaian kinerja 92,98% dan keuangan terealisasi Rp. 21.008.783.089,00 atau sebesar 87,14% dari pagu anggaran Rp. 24.109.865.742,00 yang berkurang sebesar 19,63% (Rp. 5.890.134.258,00) dari pagu anggaran APBD induk. Pada pelaksanaan program dan kegiatan secara keseluruhan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat melaksanakan program dan kegiatan secara optimal walaupun ada beberapa kegiatan yang capaian keuangannya masih di bawah 50% dikarenakan adanya peraturan terkait kebijakan pandemi COVID-19 seperti acara penyuluhan, rapat, dan yang sifatnya sama mengumpulkan orang di satu tempat tidak dapat dilaksanakan.

Untuk kegiatan yang tidak terlaksana ada satu yaitu kegiatan Penyediaan Rehab dan Pemberian Bantuan Rumah Layak Huni bagi Korban Relokasi Program Pemerintah dengan alasan tidak ada program pemerintah yang memerlukan relokasi, hal ini juga terkait dengan kebijakan



pemerintah pusat yang lebih prioritas dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi.

Predikat capaian kinerja yang di dapat Sangat Tinggi (ST) dan capaian keuangan yang di dapat Tinggi (T). Rata-rata capaian kinerja yang paling tinggi ada pada pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yaitu sebesar 100%.

14. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 6 program dan 23 kegiatan dengan realisasi capaian kinerja 100% dan keuangan terealisasi Rp. 10.172.970.249,00 atau sebesar 93,05% dari pagu anggaran Rp. 10.932.372.581,00, yang bertambah sebesar 5,81% (Rp. 600.404.031,00) dari pagu anggaran APBD induk, dengan predikat capaian kinerja dan capaian keuangan yang di dapat Sangat Tinggi (ST).

Rata-rata capaian kinerja yang paling tinggi ada pada seluruh pelaksanaan program yaitu sebesar 100 %. Pada pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja juga menganggarkan kembali anggaran yang dikurangi pada saat refocusing yang lalu, tetapi dengan penyesuaian anggaran pagu perubahan terhadap prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan. Tetapi secara keseluruhan hasil pelaksanaan program/kegiatan



yang dianggarkan sepanjang tahun 2020 dapat dilaksanakan secara optimal.

15. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja melaksanakan 7 program dan 38 kegiatan dengan realisasi capaian kinerja 157,42% dan keuangan terealisasi sebesar Rp. 2.712.282.967,00 atau 75,95% dari pagu anggaran Rp. 3.655.791.505,00, yang mengalami penambahan sebesar 19,86% (Rp. 605.791.505,00) dari anggaran pagu APBD induk.

Bila melihat persentase yang didapat predikat capaian kinerja masuk dalam kategori Sangat Tinggi (ST) dan capaian keuangan yang di dapat Sedang (S). Rata-rata capaian kinerja yang paling tinggi ada pada pelaksanaan Program Peningkatan Pelayanan Perijinan yaitu sebesar 527,06%, di mana dalam program ini terkait dengan pemberian izin dan survey perizinan sesuai dengan pengajuan ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, bila dilihat dari hasil realisasi kinerja pengajuan izin yang masuk sangat banyak sehingga melebihi target yang ditetapkan pada renstra dan hal ini dapat meningkatkan pendapatan daerah.



16. Dinas Pangan dan Pertanian

Dinas Pangan dan Pertanian melaksanakan 7 program dan 43 kegiatan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 69,12% dan keuangan terealisasi sebesar Rp. 1.555.753.969,00 atau 65,62% dari pagu anggaran Rp. 2.370.758.300,00, yang mengalami penurunan sebesar 37,15% (Rp. 1.401.241.700,00) dari pagu anggaran APBD induk. Bila melihat persentase yang di dapat predikat untuk capaian kinerja masuk dalam kategori Sedang (S) dan capaian keuangan yang di dapat Tinggi (T). Rata-rata capaian kinerja yang paling tinggi ada pada pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yaitu sebesar 100,00%.

17. Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan

Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan melaksanakan 8 program dan 45 kegiatan dengan realisasi capaian kinerja 97,25% dan keuangan terealisasi sebesar Rp. 5.211.408.103,00 atau 94,77% dari pagu anggaran Rp. 5.499.248.530,00, yang berkurang sebesar 38,45% (Rp. 3.434.660.607,00) dari pagu anggaran APBD induk. Bila melihat hasil total persentase pelaksanaan predikat capaian kinerja masuk dan capaian keuangan yang didapat dalam kategori Sangat Tinggi (ST) untuk keduanya. Rata-rata



capaian kinerja yang paling tinggi ada pada pelaksanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Koperasi, dan Program Pertumbuhan dan Peningkatan Kualitas UMKM yaitu sebesar 100,00%.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020 sama seperti perangkat daerah lainnya Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan mengalami pemangkasan anggaran akibat kebijakan refocusing sehingga ada beberapa kegiatan yang sudah terlaksana pada tahap awal dalam pencairan anggaran untuk persiapan pelaksanaan tidak dapat melanjutkan hingga tahap akhir yang berakibat realisasi kinerja menjadi nol persen, terutama kegiatan yang bersifat sosialisasi, rapat, workshop ataupun event yang melibatkan banyak orang pada satu tempat tidak diperbolehkan pada masa pandemi ini.

18.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 5 program dan 32 kegiatan, dengan realisasi



capaian kinerja 97,02% dan keuangan terealisasi sebesar Rp. 3.565.874.639,00 atau 92,46% dari pagu anggaran Rp. 3.856.605.167,00 yang berkurang sebesar 27,12% dari pagu anggaran APBD induk, dengan predikat capaian kinerja masuk dalam kategori Sangat Tinggi (ST) dan capaian keuangan yang didapat sama yaitu Sangat Tinggi (ST).

Pada pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada yang memulihkan kembali anggaran yang dikurangi pada saat refocusing yang lalu dan ada yang tidak, tetapi dengan penyesuaian anggaran pagu perubahan terhadap prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan. Tetapi secara keseluruhan hasil pelaksanaan program/kegiatan yang dianggarkan sepanjang tahun 2020 dapat dilaksanakan secara optimal. Rata-rata capaian kinerja yang paling tinggi ada pada pelaksanaan program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yaitu sebesar 100,00%.

19. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan 6 program dan 46 kegiatan dengan realisasi capaian kinerja 89,60% dan



keuangan terealisasi sebesar Rp. 17.776.190.179,00 atau 91,33% dari pagu anggaran Rp. 19.464.653.341,00. Untuk predikat capaian yang di dapat bila melihat dari total persentase pelaksanaan program dan kegiatan predikat capaian kinerja masuk dalam kategori Tinggi (T) dan capaian keuangan yang didapat Sangat Tinggi (ST). Rata-rata capaian kinerja yang paling tinggi ada pada pelaksanaan program pelayanan administrasi perkantoran, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yaitu sebesar 100,00%.

Pada pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup ada yang dipulihkan kembali anggaran yang dikurangi pada saat refocusing yang lalu, tetapi dengan penyesuaian anggaran pagu perubahan terhadap prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan. Tetapi secara keseluruhan hasil pelaksanaan program/kegiatan yang dianggarkan sepanjang tahun 2020 dapat dilaksanakan secara optimal

20. Dinas Pariwisata

Dinas Pariwisata melaksanakan 5 program dan 33 kegiatan, dengan realisasi capaian kinerja 94,85% dan keuangan terealisasi sebesar Rp. 3.206.120.341,00 atau 64,92% dari pagu anggaran Rp. 4.938.376.834,00. Dinas



Pariwisata mengalami penurunan pagu anggaran sebesar 38,68% dari pagu anggaran APBD induk. Untuk predikat capaian pelaksanaan program dan kegiatan bila di lihat dari jumlah total persentase yang di dapat, capaian kinerja masuk dalam kategori Sangat Tinggi (ST) dan predikat capaian keuangan Sedang (S).

Dinas Pariwisata mengalami perubahan tugas pokok dan fungsi dengan wewenang urusan kepemudaan dan olahraga pindah ke dinas yang baru dibentuk yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga, dengan adanya perubahan kewenangan urusan ini maka ada beberapa kegiatan terkait pemuda dan olahraga capaian kinerja dan keuangannya disesuaikan dengan berita acara serah terima yang dilakukan kedua dinas.

Pada tahun 2020 Dinas Pariwisata mendapatkan anggaran hibah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan besar anggaran Rp. 2.382.890.000,00 untuk pemulihan ekonomi dampak COVID-19 dengan porsi 70% untuk hotel dan restoran senilai Rp. 1.668.023.000,00 dan untuk Dinas Pariwisata senilai Rp. 714.867.000,00 untuk kegiatan pengembangan objek pariwisata unggulan.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pariwisata ada yang dipulihkan kembali anggaran yang



dikurangi pada saat refocusing yang lalu, tetapi dengan penyesuaian anggaran pagu perubahan terhadap prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan, juga ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu kegiatan penataan lanskap dengan alasan tidak cukupnya waktu dalam proses pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan pekerjaan (dana cadangan DAK). Tetapi secara keseluruhan hasil pelaksanaan program/kegiatan yang dianggarkan sepanjang tahun 2020 dapat dilaksanakan secara optimal. Rata-rata capaian kinerja yang paling tinggi ada pada pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yaitu sebesar 100 %.

21.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan 6 program dan 33 kegiatan, dengan realisasi capaian kinerja 95,81% dan keuangan terealisasi Rp. 1.344.401.312,00 atau sebesar 91,50% dari pagu anggaran Rp. 1.469.349.842,00. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengalami penurunan anggaran sebesar 2,56% dari pagu anggaran APBD induk. Untuk predikat capaian berdasarkan total persentase program dan kegiatan yang dilaksanakan predikat capaian kinerja masuk dalam kategori Sangat



Tinggi (ST) dan capaian keuangan yang didapat Sangat Tinggi (ST). Rata-rata capaian kinerja yang paling tinggi ada pada pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yaitu sebesar 100%.

Pada pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ada yang dipulihkan kembali anggaran yang dikurangi pada saat refocusing yang lalu, tetapi dengan penyesuaian anggaran pagu perubahan terhadap prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan. Tetapi secara keseluruhan hasil pelaksanaan program /kegiatan yang dianggarkan sepanjang tahun 2020 dapat dilaksanakan secara optimal.

22.Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan 7 program dan 34 kegiatan dengan capaian kinerja 95,92% dan keuangan terealisasi sebesar Rp. 1.668.096.867,00 atau 84,90% dari pagu anggaran Rp. 1.964.821.178,00, yang berkurang pada saat refocusing ini sebesar 16,41% dari pagu anggaran APBD induk. Untuk predikat capaian



kinerja dan capaian keuangan yang didapat bila di lihat dari persentase secara keseluruhan untuk realisasi capaian kinerja masuk dalam kategori Sangat Tinggi (ST) dan realisasi capaian keuangan Tinggi (T). Rata-rata capaian kinerja yang paling tinggi ada pada hampir seluruh pelaksanaan program yaitu sebesar 100,00% kecuali Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang kinerjanya terealisasi sebesar 71,43%, hal ini disebabkan ada dua kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu kegiatan Sosialisasi dan pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan kegiatan Penyelenggaran hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas akibat dari kebijakan refocusing terkait pandemi COVID-19. Secara keseluruhan hasil pelaksanaan program/kegiatan yang dianggarkan sepanjang tahun 2020 dapat dilaksanakan secara optimal.

23.Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan melaksanakan 4 program dan 50 kegiatan dengan realisasi capaian kinerja 91,68% dan keuangan terealisasi sebesar Rp. 13.371.765.525,00 atau 96,64% dari pagu anggaran Rp. 13.836.792.520,00 yang berkurang sebesar 22,46% dari pagu anggaran APBD induk. Untuk predikat capaian kinerja berdasarkan total



persentase realisasi yang di dapat, predikat capaian kinerja masuk dalam kategori Sangat Tinggi (ST) dan capaian keuangan yang didapat Sangat Tinggi (ST). Rata-rata capaian kinerja yang paling tinggi ada pada pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yaitu sebesar 100%.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana akibat dari kebijakan refocusing, yaitu kegiatan Pelaksanaan Forum Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pelayanan Forum Lalu Lintas, dan kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional Skylift/Crane yang semuanya tidak terlaksana dan ada satu kegiatan Perawatan/Pergantian Rambu-Rambu jalan yang sempat terlaksana di awal tahun tetapi karena adanya pemangkasan anggaran refocusing terkait COVID-19 maka tidak dapat dilaksanakan.

24.Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu dinas yang baru dibentuk, melaksanakan 5 program dan 18 kegiatan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 91,80% dan keuangan terealisasi sebesar Rp. 2.345.983.664,00 atau 91,87% dari pagu anggaran Rp.



2.553.583.136,00 dengan predikat realisasi capaian kinerja dan capaian keuangan yang didapat Sangat Tinggi (ST). Rata-rata capaian kinerja yang paling tinggi ada pada hampir seluruh pelaksanaan program sebesar 100 %, meskipun ada satu program yang tidak terlaksana maksimal yaitu Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Budidaya, Pemasaran dan Konsumsi dikarenakan sebagian wewenang urusan ini masih tergabung dengan Dinas Pangan dan Pertanian.

25.Dinas Pemuda dan Olahraga

Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan salah satu dinas yang baru dibentuk melaksanakan 5 program dan 23 kegiatan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 53,75% dan keuangan terealisasi sebesar Rp. 955.369.786,00 atau 72,71% dari pagu anggaran Rp. 1.314.015.500,00 dengan predikat capaian kinerja masuk dalam kategori Rendah (R) dan capaian keuangan yang didapat Sedang (S). Rata-rata capaian kinerja yang paling tinggi ada pada pelaksanaan program peningkatan kepemudaan dan olahraga yaitu sebesar 83,33%. Ada beberapa kegiatan yang yang realisasinya baik kinerja maupun keuangan kecil karena sebelum Dinas Pemuda dan Olahraga terbentuk wewenang urusan sebagian telah



dilaksanakan oleh Dinas pariwisata, oleh karena itu apabila realisasi Dinas Pemuda dan Olahraga masih sangat minim, masih dianggap wajar untuk dinas yang baru dibentuk dan berjalan saat kebijakan refocusing dilaksanakan di musim pandemi COVID-19 ini.

26. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana merupakan salah satu dinas yang baru dibentuk melaksanakan 3 program dan 18 kegiatan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 79,52% dan keuangan terealisasi sebesar Rp. 2.987.689.718,00 atau 85,56% dari pagu anggaran Rp. 3.492.107.865,00 dengan predikat capaian kinerja dan capaian keuangan yang didapat masuk dalam kategori penilaian yang sama yaitu Tinggi (T).

Rata-rata capaian kinerja yang paling tinggi ada pada pelaksanaan program pelayanan administrasi perkantoran dan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yaitu sebesar 100,00%. Ada beberapa kegiatan yang yang realisasinya baik kinerja maupun keuangan kecil atau tidak terlaksana karena sebelum Dinas Pemberdayaan



Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana terbentuk wewenang urusan sebagian telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan saat masih dalam satu Instansi, oleh karena itu apabila realisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana masih sangat minim, masih dianggap wajar untuk dinas yang baru dibentuk dan berjalan saat kebijakan refocusing dilaksanakan di musim pandemi COVID-19 ini.

27. Kecamatan Rangkui

Kecamatan Rangkui melaksanakan 5 program dan 54 kegiatan dengan realisasi capaian kinerja 98,78% dan keuangan terealisasi sebesar Rp. 7.725.627.077,00 atau 88,37% dari pagu anggaran Rp. 8.742.252.782,00, yang berkurang sebesar 9,74% dari pagu anggaran APBD induk. Predikat capaian kinerja masuk kategori Sangat Tinggi (ST) dan capaian keuangan yang didapat Tinggi (T). Rata-rata capaian kinerja yang paling tinggi ada pada hampir seluruh pelaksanaan program sebesar 100,00%, meskipun ada satu Program Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang kinerja terealisasi sebesar 93,92%.

Pada pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020 Kecamatan Rangkui ada yang dipulihkan kembali



anggaran yang dikurangi pada saat refocusing yang lalu, tetapi dengan penyesuaian anggaran pagu perubahan terhadap prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan, seperti pada kegiatan Kecamatan Sayang Ibu (KSI) dan Peringatan Hari Jadi Kota Pangkalpinang tidak terlaksana secara maksimal karena kebijakan pandemi COVID-19 yang tidak memperbolehkan adanya perkumpulan di satu tempat. Tetapi bila dinilai secara keseluruhan hasil pelaksanaan program/kegiatan yang dianggarkan sepanjang tahun 2020 dapat dilaksanakan secara optimal.

28. Kecamatan Gerunggang

Kecamatan Gerunggang melaksanakan 5 program dan 47 kegiatan dengan capaian kinerja 98,38% dan keuangan terealisasi sebesar Rp. 6.030.553.167,00 atau 83,20% dari pagu anggaran Rp. 7.248.290.159,00, yang berkurang sebesar 5,60% dari pagu anggaran APBD induk. Predikat capaian kinerja masuk Sangat Tinggi (ST) dan capaian keuangan yang didapat juga sama yaitu Tinggi (T). Rata-rata capaian kinerja yang paling tinggi ada pada hampir seluruh pelaksanaan program sebesar 100,00%, meskipun ada satu Program Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang kinerja terealisasi sebesar 93,52%.



Pada pelaksanaan program dan kegiatan ada yang dipulihkan kembali anggaran yang dikurangi pada saat refocusing yang lalu, tetapi dengan penyesuaian anggaran pagu perubahan terhadap prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan, seperti pada kegiatan Peringatan Hari Jadi Kota Pangkalpinang tidak terlaksana secara maksimal karena kebijakan pandemi COVID-19 yang tidak memperbolehkan adanya perkumpulan di satu tempat dan kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Taman Bunga dengan anggaran sebesar Rp. 802.102.300,00 dimana pada anggaran ini terdapat DABA dari provinsi sebesar Rp. 700.000.000,00 tetapi karena belum adanya petunjuk teknis maka keuangan tidak dapat dicairkan oleh karena hal itulah mengurangi nilai realisasi anggaran. Tetapi bila dinilai secara keseluruhan hasil pelaksanaan program/kegiatan yang dianggarkan sepanjang tahun 2020 dapat dilaksanakan secara optimal.

29. Kecamatan Pangkalbalam

Kecamatan Pangkalbalam melaksanakan 5 program dan 42 kegiatan dengan realisasi capaian kinerja 98,08% dan keuangan terealisasi sebesar Rp. 5.032.906.852,00 atau 83,20% dari pagu anggaran Rp. 7.248.290.159,00, yang berkurang sebesar 5,60% dari pagu anggaran APBD



induk. Predikat capaian kinerja masuk Sangat Tinggi (ST) dan capaian keuangan yang didapat masuk dalam kategori yaitu Tinggi (T). Rata-rata capaian kinerja yang paling tinggi ada pada hampir seluruh pelaksanaan program sebesar 100,00%, meskipun ada satu Program Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang kinerja terealisasi sebesar 90,41%.

Pada pelaksanaan program dan kegiatan ada yang dipulihkan kembali anggaran yang dikurangi pada saat refocusing yang lalu, tetapi dengan penyesuaian anggaran pagu perubahan terhadap prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan, seperti pada kegiatan pelaksanaan gotong royong dan kegiatan Peringatan Hari Jadi Kota Pangkalpinang tidak terlaksana secara maksimal karena kebijakan pandemi COVID-19 yang tidak memperbolehkan adanya perkumpulan di satu tempat. Tetapi bila dinilai secara keseluruhan hasil pelaksanaan program/kegiatan yang dianggarkan sepanjang tahun 2020 dapat dilaksanakan secara optimal.

30. Kecamatan Taman Sari

Kecamatan Taman Sari melaksanakan 4 program dan 37 kegiatan dengan realisasi capaian kinerja 89,32% dan keuangan terealisasi sebesar Rp. 4.893.074.663,00 atau



81,57% dari pagu anggaran Rp. 5.998.683.580,00, yang berkurang sebesar 10,14% dari pagu anggaran APBD induk. Predikat capaian kinerja masuk Tinggi (T) dan capaian keuangan yang didapat juga sama yaitu Tinggi (T). Rata-rata capaian kinerja yang paling tinggi ada pada pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yaitu sebesar 100,00%.

Pada pelaksanaan program dan kegiatan ada yang dipulihkan kembali anggaran yang dikurangi pada saat refocusing yang lalu, tetapi dengan penyesuaian anggaran pagu perubahan terhadap prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan, seperti pada kegiatan pelaksanaan gotong royong dan kegiatan Peringatan Hari Jadi Kota Pangkalpinang tidak terlaksana secara maksimal karena kebijakan pandemi COVID-19 yang tidak memperbolehkan adanya perkumpulan di satu tempat. Tetapi bila dinilai secara keseluruhan hasil pelaksanaan program/kegiatan yang dianggarkan sepanjang tahun 2020 dapat dilaksanakan secara optimal.

31. Kecamatan Bukit Intan

Kecamatan Bukit Intan melaksanakan 5 program dan 48 kegiatan dengan realisasi capaian kinerja 94,66% dan



keuangan terealisasi sebesar Rp. 6.835.232.546,00 atau 84,50% dari pagu anggaran Rp. 8.089.045.575,00, yang berkurang sebesar 6,83% dari pagu anggaran APBD induk. Predikat capaian kinerja masuk dalam kategori Sangat Tinggi (ST) dan capaian keuangan yang didapat yaitu Tinggi (T). Rata-rata capaian kinerja yang paling tinggi ada pada pelaksanaan program peningkatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, program kapasitas sumber daya aparatur dan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yaitu sebesar 100,00%.

Pada pelaksanaan program dan kegiatan ada yang dipulihkan kembali anggaran yang dikurangi pada saat refocusing yang lalu, tetapi dengan penyesuaian anggaran pagu perubahan terhadap prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan, seperti pada kegiatan Peringatan Hari Jadi Kota Pangkalpinang tidak terlaksana secara maksimal karena kebijakan pandemi COVID-19 yang tidak memperbolehkan adanya perkumpulan di satu tempat dan kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Pasir Putih dengan anggaran sebesar Rp. 810.578.000,00 dimana pada anggaran ini terdapat DABA dari provinsi sebesar Rp. 700.000.000,00, tetapi karena belum adanya



petunjuk teknis maka keuangan tidak dapat dicairkan oleh karena hal itulah mengurangi nilai realisasi anggaran. Tetapi bila dinilai secara keseluruhan hasil pelaksanaan program/kegiatan yang dianggarkan sepanjang tahun 2020 dapat dilaksanakan secara optimal.

32. Kecamatan Girimaya

Kecamatan Girimaya melaksanakan 4 program dan 43 kegiatan dengan realisasi capaian kinerja 99,30% dan keuangan terealisasi sebesar Rp. 5.163.709.494,00 atau 84,08% dari pagu anggaran Rp. 6.141.753.064,00, yang berkurang sebesar 7,99% dari pagu anggaran APBD induk. Predikat capaian kinerja masuk Sangat Tinggi (ST) dan capaian keuangan yang didapat Tinggi (T). Rata-rata capaian kinerja yang paling tinggi ada pada hampir seluruh pelaksanaan program sebesar 100,00%, meskipun ada satu Program Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang kinerja terealisasi sebesar 97,20%.

Pada pelaksanaan program dan kegiatan ada yang dipulihkan kembali anggaran yang dikurangi pada saat refocusing yang lalu, tetapi dengan penyesuaian anggaran pagu perubahan terhadap prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan, seperti pada kegiatan Peringatan Hari Jadi Kota Pangkalpinang tidak terlaksana secara maksimal



karena kebijakan pandemi COVID-19 yang tidak memperbolehkan adanya perkumpulan di satu tempat dan kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Batu Intan dengan anggaran sebesar Rp. 801.237.000,00 dimana pada anggaran ini terdapat DABA dari provinsi sebesar Rp. 700.000.000,00, tetapi karena belum adanya petunjuk teknis maka keuangan tidak dapat dicairkan oleh karena hal itulah mengurangi nilai realisasi anggaran.

33. Kecamatan Gabek

Kecamatan Gabek melaksanakan 4 program dan 46 kegiatan. Pada triwulan IV realisasi capaian kinerja 99,15% dan keuangan terealisasi sebesar Rp. 5.872.354.495,00 atau 84,27% dari pagu anggaran Rp. 6.968.782.325,00, yang berkurang sebesar 9,24% dari pagu anggaran APBD induk. Predikat capaian kinerja masuk kategori Sangat Tinggi (ST) dan capaian keuangan yang didapat Tinggi (T). Rata-rata capaian kinerja yang paling tinggi ada pada hampir seluruh pelaksanaan program sebesar 100,00%, meskipun ada satu Program Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang kinerja terealisasi sebesar 96,60%.

Pada pelaksanaan program dan kegiatan ada yang dipulihkan kembali anggaran yang dikurangi pada saat refocusing yang lalu, tetapi dengan penyesuaian anggaran



pagu perubahan terhadap prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan, seperti pada kegiatan Peringatan Hari Jadi Kota Pangkalpinang tidak terlaksana secara maksimal karena kebijakan pandemi COVID-19 yang tidak memperbolehkan adanya perkumpulan di satu tempat dan kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Gabek Satu dengan anggaran sebesar Rp. 813.289.410,00 dimana pada anggaran ini terdapat DABA dari provinsi sebesar Rp. 700.000.000,00 tetapi karena belum adanya petunjuk teknis maka keuangan tidak dapat dicairkan oleh karena hal itulah mengurangi nilai realisasi anggaran. Rata-rata capaian kinerja yang paling tinggi ada pada pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yaitu sebesar 75 %.

Secara keseluruhan jumlah program dan kegiatan masing-masing perangkat daerah banyak berkurang karena disesuaikan kembali dengan pagu anggaran refocusing tetapi pada pelaksanaan dengan pagu perubahan APBD ini ada yang dianggarkan kembali ada yang tidak disesuaikan dengan prioritas kegiatan. Pemangkasan anggaran dilakukan terhadap seluruh perangkat daerah yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Dinas Pariwisata merupakan instansi yang banyak dipangkas yaitu sebesar 38,68% atau berkurang sebesar Rp.



3.115.341.166,00 dari anggaran induk Rp. 8.053.718.000,00 menjadi Rp. 4.938.376.834,00. Penambahan anggaran terjadi pada tiga instansi yang baru dibentuk yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar 100 % dari APBD induk.

Program pada APBD induk Tahun 2020 berjumlah 196 dan 1684 kegiatan, pada masa refocusing berkurang menjadi 187 program 1326 dan pada perubahan APBD disesuaikan kembali sesuai dengan prioritas daerah yang di ampu oleh perangkat daerah dengan program sebanyak 199 dan kegiatan 1512. Untuk keseluruhan realisasi capaian kinerja sudah mencapai 94,21% dan realisasi capaian anggaran mencapai 87,93%. Berdasarkan persentase yang di dapat untuk predikat kinerja masuk dalam kategori Sangat Tinggi (ST) yang berarti di antara kisaran angka 91 -100 %, dan predikat realisasi capaian anggaran yang masuk dalam kategori Tinggi (T) yang berarti di antara kisaran angka 76-90 %.

Pada tahun 2020 pandemi penyakit virus corona mewabah di seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia sehingga pemerintah resmi menetapkan wabahvirus corona (Covid-19) sebagai bencana nasional. Penetapan status bencananasional itu tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. Mengingat wabah



tersebut terjadi semenjak awal tahun hingga sekarang maka pada triwulan ketiga tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan banyak terjadi perubahan/pergeseran menyesuaikan dengan situasi bangsa yang berakibat sebagian program/kegiatan yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan tiga yang lalu tertunda, tetapi pada triwulan IV dengan menggunakan pagu perubahan anggaran program/kegiatan yang dipangkas akibat kebijakan refocusing yang lalu dilakukan penyesuaian kembali sehingga ada yang dilaksanakan kembali ada yang tidak.

Pelaksanaan program/kegiatan saat pandemi COVID-19 ini dengan banyak peraturan yang harus kita taati bila akumulasi akhir triwulan IV tidak menjadi kendala pada capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah, hasil tersebut cukup memuaskan dan optimal mengingat tahun 2020 merupakan tahun yang spesial dalam menjalankan program/kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Penilaian tersebut bisa dinilai luar biasa mengingat dalam pelaksanaan masa pandemi COVID-19 ini banyak kegiatan yang ditunda terutama kegiatan yang bersifat berkumpul dalam satu tempat, untuk kegiatan fisik tidak ada kendala pada triwulan IV ini. Dalam hasil evaluasi dapat terlihat bahwa program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur merupakan program yang paling banyak tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal. Kegiatan tersebut dianggap sulit dilaksanakan mengingat di masa



pandemi banyak yang berfikir tentang dampak melakukan perjalanan atau pelatihan dinas keluar kota.

- 1 Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur bina marga dan perhubungan
- 2 Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman layak huni
- 3 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- 4 Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan
- 5 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
- 6 Peningkatan pertumbuhan PDR sektor unggasan
- 7 Meningkatkan aksesibilitas pendidikan di semua jenjang pendidikan formal dan non formal
- 8 Meningkatkan upaya penurunan angka kelahiran
- 9 Meningkatkan prestasi pemuda dan olah raga
- 10 Meningkatkan pelestarian nilai-nilai seni budaya daerah
- 11 Meningkatkan keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana
- 12 Meningkatkan cakupan penengakan perda dan perkara
- 13 Meningkatkan kerukunan antar kelompok masyarakat

Tabel 2.56
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2020
Kota Pangkalpinang

[illegible]

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6+8		11=10/5*100%		12
					K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Jumlah guru dan tenaga kependidikan SMP terlatih					80										
				Jumlah PTK SD berprestasi yang terseleksi ke tingkat lanjut					3										
				Jumlah PTK SMP berprestasi yang terseleksi ke tingkat lanjut					3										
				Seleksi calon kepala sekolah DIKDAS					30										
			Pengelolaan GTK PAUD	Jumlah waktu pengelolaan GTK PAUD	60	625.975.000	0	0	12	1.981.950.000,00	0	1.943.350.000	100,00	96,10	0	1.943.350.000	0,00	310,45	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah GTK PAUD yang dikelola					31										
				Jumlah GTK PAUD yang menerima insentif					289										
			Pengelolaan GTK DIKDAS	Jumlah waktu pengelolaan GTK Dikdas	60	81.337.650.000	0	0	719	13.987.380.850,00	711	13.792.919.350	98,89	139,10	711	13.792.919.350	1185,00	16,96	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										99,81	127,14			237,00	72,86	
			PREDIKAT KINERJA										ST	ST			ST	S	
			Program Peningkatan Akses dan Mutu Layanan PAUD dan Pendidikan Non Formal			2.880.115.000		-		1.742.847.270		1.719.113.012				1.719.113.012			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Non Formal	Jumlah lembaga yang mendapatkan pengembangan mutu layanan pendidikan non formal	64	732.450.000	0	0	64	54.375.000	0	54.375.000	100,00	24,04	0	54.375.000	0,00	7,42	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah Peserta terlatih dalam pendidikan kecakapan hidup					20										DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah Peserta yang mengikuti Paket A setara SD					150										DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah Peserta yang mengikuti Paket B setara SMP					300										DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah Peserta yang mengikuti Paket C setara SMU					400										DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Tersalurinya bantuan pada semua PKBM					8										DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Manajemen BOP Kesetaraan					8										DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah jenis peningkatan akses PAUD	1	400.000.000	0	0	1	60.000.000	0	59.660.000	100,00	17,11	0	59.660.000	0,00	14,92	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					7		0		1										DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					10		0		1										DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Peningkatan Mutu Layanan Kelembagaan PAUD dan Sarana PAUD	Jumlah lembaga PAUD yang mendapatkan peningkatan mutu layanan	97	120.000.000	0	0	97	114.186.000	0	111.814.000	100,00	97,92	0	111.814.000	0,00	93,18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					10				2										DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					3				1										DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Peningkatan Mutu Layanan Sarana PAUD dan PNF	Jumlah jenis upaya peningkatan mutu sarana PAUD dan PNF	2	286.840.000			2	184.000.000	0	184.000.000	100,00	64,15	0	184.000.000	0,00	64,15	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Ruang PAUD yang direhabilitasi					2										DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir PAUD yang direhabilitasi					1										DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini			448.825.000			4	162.073.000	0	145.123.000	100,00	32,33	0	145.123.000	0,00	32,33	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah Peserta yang memahami kurikulum berwawasan budaya lokal	500				90										DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Terbinanya minat, bakat dan kreatifitas anak usia dini	4				3										DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah lembaga yang melaksanakan pendidikan parenting	97				97										DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah kelurahan yang mengikuti program Bunda PAUD	168				42										DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Peningkatan fungsi pelayanan KBM di SKB Pangkalpinang	Jumlah layanan KBM di SKB	300	436.000.000	0	0	290	523.900.000,00	290	519.829.422	100,00	96,59	290	519.829.422	96,67	119,23	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Rehabilitasi Prasarana Belajar PAUD (DAK FISIK)	Jumlah Prasarana Belajar PAUD yang direhabilitasi	3	436.000.000	0	0	3	644.313.270,00	3	644.311.590	100,00	1860,49	3	644.311.590	100,00	147,78	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	98,64			28,10	68,43	
			PREDIKAT KINERJA										ST	ST			SR	S	
			Program pengelolaan bantuan operasional pendidikan (BOP) PAUD			882.350.000		-		521.000.000		462.495.500				462.495.500			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Dana BOP di TKN Kecamatan Tamansari Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOP di TKN kec. Taman Sari	100	90.100.000	0	0	100	54.000.000	100	50.700.000	100,00	93,89	100	50.700.000	100,00	56,27	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Dana BOP di TKN Pembina 1 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOP di TKN Pembina 1	100	86.600.000	0	0	100	66.600.000	100	63.600.000	100,00	95,50	100	63.600.000	100,00	73,44	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=8/6		11=10/5*100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pengelolaan Dana BOP di TKN Kecamatan Pangkalbalam Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOP di TKN Pangkal Balam	100	32.000.000	0	100	24.600.000	100	18.489.500	100,00	75,16	100	18.489.500	100,00	57,78	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Dana BOP di TKN Pembina 2 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOP di TKN Pembina 2	100	88.450.000	0	100	50.400.000	100	47.650.000	100,00	94,54	100	47.650.000	100,00	53,87	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Manajemen BOP PAUD	Jumlah lembaga yang termonitoring dalam penggunaan BOP PAUD	97	250.000.000	0	100	50.000.000	97	49.000.000	97,00	98,00	97	49.000.000	100,00	19,60	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Dana BOP di TKN Pembina 3 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOP di TKN Pembina 3	100	82.525.000	0	100	51.600.000	100	40.556.000	100,00	78,60	100	40.556.000	100,00	49,14	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Dana BOP di TKN Kecamatan Rangkui Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOP di TKN Kec. Rangkui	100	81.700.000	0	100	66.000.000	100	57.850.000	100,00	87,65	100	57.850.000	100,00	70,81	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Dana BOP di TKN Model Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOP di TKN Model	100	82.525.000	0	100	43.800.000	100	38.050.000	100,00	86,87	100	38.050.000	100,00	46,11	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Dana BOP di SKB Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOP di SKB Pangkalpinang	100	88.450.000	0	100	114.000.000	100	96.600.000	100,00	84,74	100	96.600.000	100,00	109,21	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)									99,87	88,77			100,00	59,58	
			PREDIKAT KINERJA									ST	T			ST	R	
			Program pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS)			25.044.100.000		-		29.607.600.054		22.344.537.522			-			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Dana BOS di SMPN 1 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SMPN	60	925.100.000	0	12						0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Dana BOS di SMPN 2 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SMPN	60	978.000.000	0	12						0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Dana BOS di SMPN 3 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SMPN	60	1.055.100.000	0	12						0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Dana BOS di SMPN 4 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SMPN	60	1.149.800.000	0	12						0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Dana BOS di SMPN 5 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SMPN	60	1.060.500.000	0	12						0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Dana BOS di SMPN 6 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SMPN	60	857.800.000	0	12						0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Dana BOS di SMPN 7 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SMPN	60	1.013.000.000	0	12						0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Dana BOS di SMPN 8 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SMPN	60	811.800.000	0	12						0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Dana BOS di SMPN 9 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SMPN	60	890.100.000	0	12						0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Dana BOS di SMPN 10 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SMPN	60	853.600.000	0	12						0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 48 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	290.650.000	0	12						0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 33 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	298.300.000	0	12						0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 43 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	183.150.000	0	12						0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 38 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	169.650.000	0	12						0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 7 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	178.800.000	0	12						0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 17 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	195.100.000	0	12						0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 3 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	679.600.000	0	12						0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 69 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	164.600.000	0	12						0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 37 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	166.850.000	0	12						0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 62 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	183.150.000	0	12						0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 28 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	488.950.000	0	12						0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 13 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	138.200.000	0	12						0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 26 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	216.850.000	0	12						0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 11 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	234.850.000	0	12						0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 24 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	316.100.000	0	12						0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 68 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	184.650.000	0	12						0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 61 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	195.100.000	0	12						0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 5 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	196.800.000	0	12						0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rerja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=8*8		11=10/5*100%		12	
				K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 20 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	479.600.000	0	0	12					0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 57 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	183.900.000	0	0	12					0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 54 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	150.000.000	0	0	12					0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 53 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	147.350.000	0	0	12					0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 51 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	199.250.000	0	0	12					0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 49 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	144.200.000	0	0	12					0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 39 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	163.650.000	0	0	12					0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 42 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	267.050.000	0	0	12					0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 35 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	189.700.000	0	0	12					0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 6 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	428.100.000	0	0	12					0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 2 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	188.950.000	0	0	12					0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 30 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	295.700.000	0	0	12					0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 32 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	172.850.000	0	0	12					0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 15 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	580.550.000	0	0	12					0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 12 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	169.650.000	0	0	12					0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 23 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	370.400.000	0	0	12					0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 22 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	245.850.000	0	0	12					0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 10 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	598.150.000	0	0	12					0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 21 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	256.750.000	0	0	12					0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 60 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	168.550.000	0	0	12					0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 58 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	176.250.000	0	0	12					0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 46 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	193.100.000	0	0	12					0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 56 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	156.000.000	0	0	12					0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 45 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	152.450.000	0	0	12					0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 47 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	170.400.000	0	0	12					0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 40 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	188.200.000	0	0	12					0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 41 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	149.250.000	0	0	12					0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 36 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	182.200.000	0	0	12					0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 19 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	406.750.000	0	0	12					0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 4 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	146.600.000	0	0	12					0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 64 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	182.200.000	0	0	12					0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 27 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	161.050.000	0	0	12					0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 29 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	207.700.000	0	0	12					0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 14 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	283.900.000	0	0	12					0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 1 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	374.550.000	0	0	12					0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 63 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	138.950.000	0	0	12					0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 9 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	121.350.000	0	0	12					0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 25 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN	60	179.750.000	0	0	12					0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RPJPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6*8		11=10/5*100%		12
				K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 66 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 66	199.250.000	0		0	12					0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 67 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 67	182.200.000	0		0	12					0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 8 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 8	178.800.000	0		0	12					0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 18 Pangkalpinang	Pengelolaan Dana BOS di SDN 18	157.500.000	0		0	12					0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 16 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 16	319.450.000	0		0	12					0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 65 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 65	161.950.000	0		0	12					0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 55 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 55	178.800.000	0		0	12					0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 52 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 52	264.400.000	0		0	12					0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 50 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 50	161.950.000	0		0	12					0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Dana BOS di SDN 44 Pangkalpinang	Jumlah waktu pengelolaan Dana BOS di SDN 44	192.800.000	0		0	12					0	-	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Dana BOS APBN SDN		19.239.949.872,00			100	19.239.949.872,00	80	14.854.882.172	80,00	77,21	80	14.854.882.172	80,00	77,21	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Dana BOS APBN SMPN		10.302.850.182,00			100	10.302.850.182,00	75	7.424.730.350	75,00	72,06	75	7.424.730.350	75,00	72,06	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Manajemen BOS DIKDAS	Jumlah Sekolah Yang termonitoring dalam pen	100.000.000			107	65.000.000,00	107	64.925.000	100,00	99,88		64.925.000	0,00	64,93	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												85,00	75,47			1,98	2,71	
PREDIKAT KINERJA												T	S			SR	SR	
			Program Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan Dasar		18.427.038.000		-		9.225.104.808		8.825.531.101				8.825.531.101			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Peningkatan Akses Pendidikan Dasar	Ruang kelas yang dibangun (SD)	3.750.000.000	0		0	1	1	408.145.039,00	100,00	99,01	1	404.108.000	2,44	10,78	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Peningkatan Mutu Layanan Sarana Pendidikan Dasar	Jumlah toilet/jamban yang direhabilitasi (SMP)	390.000.000	0		0	1	0	1.390.190.500,00	100,00	96,43	0	1.340.559.900	0,00	343,73	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah toilet/jamban yang direhabilitasi (SMP)					1									
				Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi (SMP)					3									
				jumlah meubelair sekolah (SD&SMP) yang dibeli					1									
			Peningkatan Mutu Layanan Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar	Jumlah jenis upaya Peningkatan Mutu Layanan Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar	5.190.000.000	0		0	6	0	511.499.615,00	100,00	98,46	0	503.635.115	0,00	9,70	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah siswa yang mengikuti USBN dan US SD					4050									DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah siswa yang mengikuti UN dan USBN SMP					3100									DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah peserta yang memahami kurikulum SD					70									DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah peserta yang memahami kurikulum SMP					60									DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Tersedianya kisi-kisi USBN dan US SD					5									DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Tersedianya kisi-kisi USBN SMP					7									DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Peningkatan Kualitas Peserta Didik Pendidikan Dasar	Jumlah jenis upaya Peningkatan Kualitas Peserta Didik Pendidikan Dasar	4.335.617.000	0		0	6	0	38.280.000,00	0,00	100,00	0	38.280.000	0,00	0,88	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah cabang perlombaan Festival lomba seni siswa nasional (FLSZN) yang diikuti SD					9									DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah cabang perlombaan Festival lomba seni siswa nasional (FLSZN) yang diikuti SMP					9									DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				jumlah mapel yang diikuti pada OSN Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD tingkat lanjutan					2									DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				jumlah mapel yang diikuti pada OSN Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP tingkat lanjutan					2									DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				jumlah tim PBB yang mengikuti lomba ketrampilan selanjutnya					4									DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6*8		11=10/5*100%		12
					K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Workshop penyusunan ANJAB, ABK, EVAJAB	Terlaksananya workshop penyusunan ANJAB, ABK dan EVAJAB	60	55.692.000			60	-					0	-	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																
			PREDIKAT KINERJA																
						1.195.650.559		144.117.160		115.654.900		114.090.400				258.207.560			
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan																DINAS KESEHATAN
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	60	88.614.650	12	13.392.000,00	20	15.701.000	20	15.701.000	100,00	100,00	32	29.093.000	53,33	32,83	DINAS KESEHATAN
			Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan semesteran	60	64.298.191	12	9.595.300,00	25	8.452.500	25	7.250.000	100,00	85,77	37	16.845.300	61,67	26,20	DINAS KESEHATAN
			penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir tahun	60	69.475.858	12	10.888.800,00	50	12.706.400	50	12.706.400	100,00	303,62	62	23.595.200	103,33	33,96	DINAS KESEHATAN
			Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)	Tersusunnya laporan dokumen RENJA (RKT,RKA,DPA)	30	80.029.250	12	12.646.500,00	6	23.250.000	6	22.888.000	100,00	161,32	18	35.534.500	60,00	44,40	DINAS KESEHATAN
			Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIIP di Lingkungan OPD	Terlaksananya Laporan SPIIP	60	55.113.610	12	8.502.820,00	12	-					12	8.502.820	20,00	15,43	DINAS KESEHATAN
			Penyusunan Perencanaan bidang kesehatan	Terlaksananya penyusunan perencanaan bidang kesehatan	16	649.953.400	12	50.219.940,00	4	13.470.000	4	13.470.000	100,00	100,00	16	63.689.940	100,00	9,80	DINAS KESEHATAN
			Pengumpulan Updating dan Analisa data dan informasi Kesehatan	Terlaksananya pengumpulan updating dan analisa data dan informasi kesehatan	60	188.165.600	12	38.871.800,00	2	42.075.000	2	42.075.000	100,00	149,64	14	80.946.800	23,33	43,02	DINAS KESEHATAN
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																
			PREDIKAT KINERJA																
			Program Peningkatan Pelayanan Mutu Layanan Kesehatan/ BLUD			377.852.338.183		50.503.499.494		62.207.339.189		58.895.271.381				106.672.805.474			DINAS KESEHATAN
			Pelayanan dan pendukung pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah	Terlaksananya pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan badan layanan umum daerah	60	112.094.073.000	12	27.858.197.029,00	12	30.689.829.062,00	12	29.382.096.107	100,00	47,23	24	57.240.293.136	40,00	51,06	DINAS KESEHATAN
			Penyelenggaraan kesehatan dasar Rumah Sakit	Terlaksananya penyelenggaraan kesehatan dasar Rumah Sakit	60	83.705.400.870	12	2.878.353.660,00	12	7.426.836.600	12	6.229.631.290	100,00	20,30	24	9.107.984.950	40,00	10,88	DINAS KESEHATAN
			Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit	Terlaksananya layanan peningkatan sarana prasarana Rumah Sakit	60	67.514.038.680,82			12	174.550.000	12	129.776.202	100,00	1,75	12	129.776.202	20,00	0,19	DINAS KESEHATAN
			Penyelenggaraan Pemeriksaan Labkesda	Terlaksananya layanan penyelenggaraan pemeriksaan labkesda	60	3.985.969.260	12	620.476.605	12	529.942.400	12	499.835.718	100,00	286,36	24	1.120.312.323	40,00	28,11	DINAS KESEHATAN
			Penyelenggaraan Kesehatan Dasar Puskesmas Gerunggang	Terlaksananya layanan penyelenggaraan kesehatan dasar Puskesmas Gerunggang	60	2.874.459.042	1	389.383.600	12	416.577.000	12	402.979.375	100,00	76,04	13	792.362.975	21,67	27,57	DINAS KESEHATAN
			Penyelenggaraan Kesehatan Dasar Puskesmas Selindung	Terlaksananya layanan penyelenggaraan kesehatan dasar Puskesmas Gerunggang	60	1.995.630.000	1	391.210.453	12	393.117.750	12	356.266.798	100,00	85,52	13	747.477.251	21,67	37,46	DINAS KESEHATAN
			Penyelenggaraan Kesehatan Dasar Puskesmas Pasir Putih	Terlaksananya layanan penyelenggaraan kesehatan dasar Puskesmas Pasir Putih	60	2.420.248.432,88	1	420.826.377	12	399.317.875	12	371.113.315	100,00	94,40	13	791.939.692	21,67	32,72	DINAS KESEHATAN
			Penyelenggaraan Kesehatan Dasar Puskesmas Air Hitam	Terlaksananya layanan penyelenggaraan kesehatan dasar Puskesmas Air Hitam	60	4.311.795.306	1	674.917.983	12	701.966.000	12	690.279.651	100,00	172,86	13	1.365.197.634	21,67	31,66	DINAS KESEHATAN
			Penyelenggaraan Kesehatan Dasar Puskesmas Girimaya	Terlaksananya layanan penyelenggaraan kesehatan dasar Puskesmas Girimaya	60	2.264.808.000	1	387.052.663	12	383.546.078	12	369.418.162	100,00	52,63	13	756.470.825	21,67	33,40	DINAS KESEHATAN
			Penyelenggaraan Kesehatan Dasar Puskesmas Taman Sari	Terlaksananya layanan penyelenggaraan kesehatan dasar Puskesmas Taman sari	60	3.661.660.821	1	1.020.704.912	12	422.551.125	12	399.862.286	100,00	104,25	13	1.420.567.198	21,67	38,80	DINAS KESEHATAN
			Penyelenggaraan Kesehatan Dasar Puskesmas Pangkal Balam	Terlaksananya layanan penyelenggaraan kesehatan dasar Puskesmas Pangkal Balam	60	2.893.584.603	1	579.514.572	12	504.936.000	12	439.078.000	100,00	103,91	13	1.018.590.572	21,67	35,20	DINAS KESEHATAN
			Penyelenggaraan Kesehatan Dasar Puskesmas Kacang Pedang	Terlaksananya layanan penyelenggaraan kesehatan dasar Puskesmas Kacang Pedang	60	1.680.329.161,88	1	360.552.618	12	352.139.625	12	346.128.670	100,00	68,55	13	706.681.288	21,67	42,06	DINAS KESEHATAN
			Penyelenggaraan Kesehatan Dasar Puskesmas Melintang	Terlaksananya layanan penyelenggaraan kesehatan dasar Puskesmas Melintang	60	3.899.572.404	1	450.675.844	12	445.495.000	12	426.488.500	100,00	121,11	13	877.164.344	21,67	22,49	DINAS KESEHATAN
			Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Gerunggang	Terlaksananya layanan penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional Puskesmas Gerunggang	60	3.165.162.000	1	624.739.743	12	703.217.495	12	559.075.097	100,00	125,50	13	1.183.814.840	21,67	37,40	DINAS KESEHATAN
			Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Selindung	Terlaksananya layanan penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional Puskesmas Selindung	60	2.858.856.000	1	717.520.339	12	675.216.481	12	470.367.352	100,00	66,89	13	1.187.887.691	21,67	41,55	DINAS KESEHATAN
			Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Pasir Putih	Terlaksananya layanan penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional Puskesmas Pasir putih	60	2.252.625.375	1	556.433.574	12	504.547.457	12	381.176.903	100,00	56,45	13	937.610.477	21,67	41,62	DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Deerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pede Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Ranja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6*8		11=10/5*100%			
				K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Audit Maternal Perinatal	Terlaksananya layanan audit maternal perinatal	48	24.365.250			12	-			#DIV/0!	0	-	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN	
			Lomba senam lansia Tk. Kota	Jumlah lansia yang mengikuti lomba	36	166.533.003			9	-			#DIV/0!	0	-	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN	
			Lomba senam lansia Tk. Provinsi	Terlaksananya lomba senam lansia tingkat Provinsi	4	20.420.400			1	-			#DIV/0!	0	-	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN	
			Pelayanan kesehatan lansia	Terlasananya layanan kesehatan lansia	89512	257.307.199			17545	14.755.000	17545	14.755.000	100,00	100,00	17545	14.755.000	19,60	5,73	DINAS KESEHATAN
			Pelayanan Kesehatan Neonatus	terlaksananya pelayanan kesehatan neonatus	17824	361.626.720			4389	16.250.000	4389	9.685.000	100,00	59,60	4389	9.685.000	24,62	2,68	DINAS KESEHATAN
			Peringatan Hari Kesehatan Nasional (Penguatan GERMAS)	terlaksananya kegiatan hari kesehatan nasional	25	175.750.000			5	-			#DIV/0!	0	-	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN	
			Kegiatan lomba kesehatan institusi dan UKBM Tk. Kota	Terlaksananya kegiatan lomba kesehatan institusi dan UKBM tingka Kta	10	343.317.975	1	61.308.920,00	2	-			#DIV/0!	1	61.308.920	10,00	17,86	DINAS KESEHATAN	
			Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Terlaksanya layanan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	20	278.277.500	3	52.274.920,00	9	-			#DIV/0!	3	52.274.920	15,00	18,79	DINAS KESEHATAN	
			Pelaksanaan Pangkalpinang Sehat	Terlaksananya Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat	4	560.998.800			7	23.575.000	7	22.375.000	100,00	94,91	7	22.375.000	175,00	3,99	DINAS KESEHATAN
			Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Makanan dan minuman	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan kesehatan maskanan dan minuman	20	446.176.458	12	82.570.000,00	5	54.264.875	5	54.169.700	100,00	99,82	17	136.739.700	85,00	30,65	DINAS KESEHATAN
			Pembinaan dan pengawasan IRTP	Terlaksananya pembinaan dan pengawsan IRTP	240	169.452.192			60	23.200.000	60	21.856.000	100,00	94,21	60	21.856.000	25,00	12,90	DINAS KESEHATAN
			Penyemprotan fogging/sarang nyamuk	Terlaksananya layanan penyemprotan fogging/sarang nyamuk	188	696.150.000	32	217.894.100,00	32	145.670.000	32	111.979.740	100,00	76,87	64	329.873.840	34,04	47,39	DINAS KESEHATAN
			Sosialisasi triple eliminasi (HIV, Hepatitis, Siphilis) bagi petugas di Fasyankes Swasta	Terlaksananya kegiatan sosialisasi triple eliminasi(Hiv, Sflis dan Hepatitis) di layanan swasta	400	79.650.000			100	-			#DIV/0!	0	-	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN	
			sosialisasi tentang penyakit HIV AIDS dan penyakit menular lainnya disekolah.	Terlaksananya Sosialisasi tentang HIV dan AIDS dan penyakit menular menular di Sekolah	48	215.806.500			12	27.352.650	12	20.925.000	100,00	76,50	12	20.925.000	25,00	9,70	DINAS KESEHATAN
			workshop peningkatan petugas pnemonia balita dan diare	Terlaksananya layanan workshop peningkatan petugas pneumonia balita dan diare	160	74.256.000			40	3.000.000	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
			Sosialisasi Tuberkulosis bagi Kader Kesehatan	Terlaksananya sosialisasi Tuberkulosis bagi kader Kesehatan	400	122.814.783			100	25.425.000	100	25.425.000	100,00	100,00	100	25.425.000	25,00	20,70	DINAS KESEHATAN
			Konsultasi dr. spesialis jiwa	terlaksananya konsultasi dan pemeriksa penderita jiwa dengan dr jiwa	18	178.678.500	2	13.040.000,00	4	36.481.000	4	33.921.000	100,00	92,98	6	46.961.000	33,33	26,28	DINAS KESEHATAN
			skrining PTM di posbindu khusus	Terlaksananya layanan skrining PTM di Posbindu khusus	1200	69.615.000			300	2.250.000	300	2.250.000	100,00	100,00	300	2.250.000	25,00	3,23	DINAS KESEHATAN
			monitoring evaluasi PTM	Terlaksananya kegiatan monitoring evaluasi Penyakit Tidak Menular	4	86.200.000			1	37.705.500	1	25.605.500	100,00	67,91	1	25.605.500	25,00	29,70	DINAS KESEHATAN
			Lomba capaian program penyakit tidak menular	Terlaksananya kegiatan lomba capaian program penyakit tidak menular	12	162.435.000			3	-				0	-	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN	
			sosialisasi tentang bahaya penyakit tidak menular gangguan metabolik bagi lintas program dan lintas sektoral	Terlaksananya kegiatan sosilaisasi tentang bahaya penyakit tidak menular gangguan metabolik bagi intas program dan lintas sektoral	200	139.230.000			50	3.000.000	50	2.500.000	100,00	83,33	50	2.500.000	25,00	1,80	DINAS KESEHATAN
			Peningkatan surveilans Epidemiolgi dan Penanggulangan Wabah	Terlaksananya surveillance puskesmas, rumah sakit, klinik swasta lainnya dan pelayanan kesehatan lainnya	168	487.305.000	12	47.532.200,00	42	29.957.000	42	12.257.000	100,00	40,92	54	59.789.200	32,14	12,27	DINAS KESEHATAN
			Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Terlaksananya pelayanan vaksinasi bagi bayi, balita, ibu hamil , anak sekloah dan WUS	20660	317.908.500	12	17.337.000,00	4142	86.749.900	3758	72.444.200	90,73	83,51	3770	89.781.200	18,25	28,24	DINAS KESEHATAN
			Pelayanan Kesehatan Haji	Terlaksananya pelayanan kesehatan calon jemaah haji di kota pangkalpinang	1530	329.046.900	7	52.581.491,00	320	46.221.100	320	45.931.100	100,00	99,37	327	98.512.591	21,37	29,94	DINAS KESEHATAN
			Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Rumah Sakit Rujukan						10	4.325.327.814	10	3.420.755.636	100,00	79,09	10	3.420.755.636			DINAS KESEHATAN
			Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Pelayanan Dasar						3	15.471.766.250	3	14.401.188.508	100,00	93,08	3	14.401.188.508			DINAS KESEHATAN
			Pencegahan dan Penanggulangan Stunting	Terlaksananya penyediaan obat gizi	107115	1.328.648.220,90	12	258.140.820,00	3	261.054.000	3	120.654.340	100,00	46,22	15	378.795.160	0,01	28,51	DINAS KESEHATAN
			Peningkatan Pelayanan Jaminan Persalinan	Jumlah ibu dan bayi yang menggunakan Jampersal	46047	2.021.619.600	12	167.410.000,00	12	227.170.000	12	225.924.674	100,00	99,45	24	393.334.674	0,05	19,46	DINAS KESEHATAN
			Upaya Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya pelayanan upaya kesehatan masyarakat dari dana DAK NONFISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan PPKB Kota Pangkalpinang	60	404.271.000			12	3.071.771.000	12	2.782.464.250	100,00	90,58	12	2.782.464.250	20,00	688,27	DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6+8		11=10/5*100%			
					K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Upaya P2P	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dari Dana DAK NonFisik Dinas Kesehatan PPKB KELUARAN	60	304.820.000			12	304.820.000	12	235.580.000	100,00	77,28	12	235.580.000	20,00	77,28	DINAS KESEHATAN
			Kalibrasi Alkes Puskesmas	Terlaksananya Kalibrasi Alat Kesehatan di PuskesmasKELUARAN	100	83.342.000			100	83.342.000	100	81.269.900	100,00	97,51	100	81.269.900	100,00	97,51	DINAS KESEHATAN
			Dukungan Manajemen BOK dan Jampersal	Terlaksananya pelayanan dukungan manajemen BOK dan Jampersal dari dana DAK NONFISIK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	60	40.178.000			12	40.178.000	6	13.178.000	50,00	32,80	6	13.178.000	10,00	32,80	DINAS KESEHATAN
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																
			93,87 89,33																
			PREDIKAT KINERJA																
			ST T																
			SR SR																
			Program Peningkatan Mutu Bidang Kesehatan			327.547.726.130		16.848.843.759		28.252.238.681		24.868.373.539				40.946.720.871			DINAS KESEHATAN
			Peningkatan Potensi dan Realisasi PAD	Terlaksananya layanan peningkatan potensi dan realisasi PAD	31	10.030.000,00			31	10.030.000,00	31	9.130.000	100,00	91,03	31	9.130.000	100,00	91,03	DINAS KESEHATAN
			Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	Terlaksananya lomba pemulihan kesehatan secara mandiri di masyarakat	70	870.187.500	12	68.792.300,00	7	-					12	68.792.300	17,14	7,91	DINAS KESEHATAN
			Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Terlaksananya kegiatan peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	37	461.779.500	12	75.044.400,00	4	30.300.000,00	0	-	0,00	0,00	12	75.044.400	32,43	16,25	DINAS KESEHATAN
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan program upaya kesehatan	5	232.869.136,50			1	20.000.000,00	1	15.425.000	100,00	77,13	1	15.425.000	20,00	6,62	DINAS KESEHATAN
			Pelaksanaan dan Pembentukan Puskesmas BLUD	Terlaksananya Pelaksanaan dan pembentukan Puskesmas BLUD	12	1.392.300.000			3	31.000.000,00	3	20.300.000	100,00	65,48	3	20.300.000	25,00	1,46	DINAS KESEHATAN
			Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Keikutsertaan ASN dalam pendidikan dan pelatihan	26	546.400.594	6	25.787.400,00	5	11.800.000,00	3	11.800.000	60,00	100,00	9	37.587.400	34,62	6,88	DINAS KESEHATAN
			kegiatan lomba-lomba bidang kesehatan	Terlaksananya kegiatan lomba-lomba bidang kesehatan	41	294.924.179,55	1	50.370.500,00	8	-					1	50.370.500	2,44	17,08	DINAS KESEHATAN
			Kegiatan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	Terlaksananya layanan penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan	105	272.428.556,40			20	-					0	-	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
			Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	Terlaksananya layanan pengawasan dan pengendalian keamanan , kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	560	143.871.000	168	24.940.000,00	90	6.000.000,00	90	5.890.000	100,00	98,17	258	30.830.000	46,07	21,43	DINAS KESEHATAN
			Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Sarana Kefarmasian Swasta	Terlaksananya layanan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	4	408.408.000			1	18.772.500,00	1	16.697.500	100,00	88,95	1	16.697.500	25,00	4,09	DINAS KESEHATAN
			Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan (ALKES/PKRT)	Terlaksananya kegiatan peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan (ALKES/PKRT)	160	185.640.000	3	17.175.000,00	20	21.693.650,00	20	14.393.650	100,00	66,35	23	31.568.650	14,38	17,01	DINAS KESEHATAN
			Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Terlaksananya kegiatan peningkatan alat dan perbekalan kesehatan yang dikalibrasi	584	367.521.600	1	130.061.000,00	100	52.436.000	100	51.994.900	100,00	99,16	101	182.055.900	17,29	49,54	DINAS KESEHATAN
			Kegiatan Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Terlaksananya layanan kefarmasian dan alat kesehatan	60	1.331.640.677,37	12	266.681.152,00	12	183.042.500	12	181.868.000	100,00	99,36	24	448.549.152	40,00	33,68	DINAS KESEHATAN
			Pemusnahan Obat-obat, BHP dan Reagen rusak dan Kadaluarsa	Terlaksananya Pemusnahan Obat-obat, BHP dan Reagen rusak dan kadaluarsa (Pemilahan obat expired dan Rusak)	4	208.845.000			1	25.500.000	1	24.000.000	100,00	94,12	1	24.000.000	25,00	11,49	DINAS KESEHATAN
			Renovasi Puskesmas	Terlaksananya renovasi Puskesmas		51.997.300			1	51.997.300	1	51.859.000	100,00	99,73					DINAS KESEHATAN
			Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas	Terlaksananya pelaksanaan akreditasi puskesmas	17	2.753.000.000	9	413.758.500,00	9	838.948.000,00	9	429.269.000	100,00	51,17	18	843.027.500	105,88	30,62	DINAS KESEHATAN
			Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Terlaksananya pengadaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL)	15	3.480.750.000	5	1.199.845.947,00	2	911.892.000,00	2	882.940.000	100,00	96,83	7	2.082.785.947	46,67	59,84	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan alat kesehatan bagi puskesmas dan jaringan	Terlaksananya penyediaan alat kesehatan bagi puskesmas dan jaringan lainnya	45	156.146.395.500,00	3	1.147.694.462,00	8	5.716.680.840,00	8	5.230.664.289	100,00	91,50	11	6.378.358.751	24,44	4,08	DINAS KESEHATAN
			Pengadaan Alat-alat keehatan rumah sakit	Terlaksananya pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	5	128.313.030.575,18	1	11.727.742.237,00	132	6.838.961.573,00	106	5.734.195.360	80,30	83,85	107	17.461.937.597	2140,00	13,61	DINAS KESEHATAN
			Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Terlaksananya pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	5	17.635.800.000	10	1.609.985.861,00	9	591.669.962,00	9	507.484.486	100,00	85,77	19	2.117.470.347	380,00	12,01	DINAS KESEHATAN
			Manajemen Pelaksanaan Dana BOK Kefarmasian	Terlaksananya kegiatan manajemen pelaksanaan dana BOK kefarmasian	45	511.949.638,20	12	90.765.000,00	12	109.200.000	12	84.580.000	100,00	77,45	24	175.345.000	53,33	34,25	DINAS KESEHATAN
			Pengembangan PUSKESMAS (Penambahan Gedung/Ruang Baru Puskesmas) Pembangunan Puskesmas Girimaya dan Penambahan gedung UGD air Itam	Terlaksananya pengembangan Puskesmas (Penambahan gedung/ ruang baru Puskesmas)	2	6.407.678.560			2	6.507.678.560	2	6.237.083.860	100,00	95,84	2	6.237.083.860	100,00	97,34	DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pengkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6+8		11=10/5*100%		12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya rehabilitasi Labkesda	1	304.246.000			1	304.246.000	1	272.846.000	100,00	89,68	1	272.846.000	100,00	89,68	DINAS KESEHATAN
			Pengadaan Ambulan	Terlaksananya pengadaan ambulans	1	764.738.000			1	764.738.000	1	689.996.000	100,00	90,23	1	689.996.000	100,00	90,23	DINAS KESEHATAN
			Pengadaan Prasarana Air Bersih PUSKESMAS	Terlaksananya penyediaan prasarana air bersih Puskesmas	2	177.528.000			2	177.528.000	2	174.510.845	100,00	98,30	2	174.510.845	100,00	98,30	DINAS KESEHATAN
			Pengadaan Prasarana Listrik dan Limbah Labkesda (IPAL)	Terlaksananya pengadaan limbah Labkesda (IPAL)	4	565.200.000			1	565.200.000	1	557.342.000	100,00	98,61	1	557.342.000	25,00	98,61	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan alat Laboratorium (LABKESDA)	Terlaksananya pengadaan alat laboratorium Labkesda	1	314.792.000			4	314.792.000	4	256.092.000	100,00	81,35	4	256.092.000	400,00	81,35	DINAS KESEHATAN
			Pengadaan Perangkat SIKDA Dinas Kesehatan	Terlaksananya penyediaan Sistem Informasi Kesehatan di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	90.139.000			1	90.139.000	1	81.499.000	100,00	90,41	1	81.499.000	100,00	90,41	DINAS KESEHATAN
			Pengadaan Perangkat SIKDA GENERIK Puskesmas Selindung	Terlaksananya penyediaan Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas Selindung	2	104.128.600			1	104.128.600	1	103.829.000	100,00	99,71	1	103.829.000	50,00	99,71	DINAS KESEHATAN
			Pengadaan alat dan bahan pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan	Terlaksananya pengadaan alat pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan	9	236.370.500			2	236.370.500	2	227.460.179	100,00	96,23	2	227.460.179	22,22	96,23	DINAS KESEHATAN
			Pengadaan BMHP Puskesmas	Terlaksananya Pengadaan BMHP di Puskesmas	2	581.751.038			9	591.972.574	9	477.959.000	100,00	80,74	9	477.959.000	450,00	82,16	DINAS KESEHATAN
			Pengadaan Peralatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Terlaksananya Pengadaan peralatan pencegahan dan pengendalian penyakit	3	716.430.340			2	716.430.340	2	689.290.000	100,00	96,21	2	689.290.000	66,67	96,21	DINAS KESEHATAN
			Pengadaan Barang Medis Habis Pakai Peralatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Terlaksananya pengadaan barang medis habis pakai peralatan pencegahan dan pengendalian penyakit	15	825.648.335			3	825.648.335	3	296.950.000	100,00	35,97	3	296.950.000	20,00	35,97	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan Sarana Pendukung Pelayanan Kefarmasian	Terlaksananya Penyediaan Sarana Pendukung Pelayanan Kefarmasian	1	318.664.000			15	318.664.000	15	293.442.043	100,00	92,09	15	293.442.043	1500,00	92,09	DINAS KESEHATAN
			Pengadaan Perangkat SIKDA GENERIK di Puskesmas Pangkalbalam	Terlaksananya penyediaan Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas Pangkal Balam	1	104.128.600			1	104.128.600	1	103.829.000	100,00	99,71	1	103.829.000	100,00	99,71	DINAS KESEHATAN
			Pengadaan Perangkat SIKDA GENERIK di Puskesmas Girimaya	Terlaksananya penyediaan Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas Girimaya	1	104.128.600			1	104.128.600	1	103.829.000	100,00	99,71	1	103.829.000	100,00	99,71	DINAS KESEHATAN
			Pengadaan Perangkat SIKDA GENERIK di Puskesmas Pasir Putih	Terlaksananya penyediaan Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas Pasir Putih	1	104.128.600			1	104.128.600	1	103.829.000	100,00	99,71	1	103.829.000	100,00	99,71	DINAS KESEHATAN
			Pengadaan Perangkat SIKDA GENERIK di Puskesmas Air Itam	Terlaksananya penyediaan Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas Air Itam	1	104.128.600			1	104.128.600	1	103.829.000	100,00	99,71	1	103.829.000	100,00	99,71	DINAS KESEHATAN
			Pengadaan Perangkat SIKDA GENERIK di Puskesmas Melintang	Terlaksananya penyediaan Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas Melintang	1	104.128.600			1	104.128.600	1	103.829.000	100,00	99,71	1	103.829.000	100,00	99,71	DINAS KESEHATAN
			Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Isolasi COVID-19						1	744.135.427	1	716.437.427	100,00	96,28	1	716.437.427			DINAS KESEHATAN
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										95,56	88,02		175,88	54,89		
			PREDIKAT KINERJA										ST	T		ST	R		
			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			5.402.448.000		1.333.000.000		1.039.543.300		844.134.063				2.177.134.063			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Penyediaan Jasa Komunika, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	60	973.483.000	12	200.000.000	12	112.800.000	12	98.186.516	100,00	87,04	24	298.186.516	40,00	30,63	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	60	987.975.000	12	282.500.000	12	285.270.000	12	262.565.000	100,00	92,04	24	545.065.000	40,00	55,17	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jenis jasa kebersihan kantor	65	29.800.000	13	8.000.000	13	8.000.000	12	5.753.100	94,87	71,91	25,3333	13.753.100	38,97	46,15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jenis jasa perbaikan peralatan kerja	25	173.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	5	15.142.000	100,00	50,47	10	45.142.000	40,00	26,09	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	130	145.210.000	26	28.000.000	26	21.911.000	26	21.874.300	100,00	99,83	52	49.874.300	40,00	34,35	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	25	121.930.000	5	25.000.000	5	20.512.300	5	17.452.500	100,00	85,08	10	42.452.500	40,00	34,82	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6*8		11=10/5*100%		12
					K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20	12.320.000	4	16.000.000	4	4.950.000	4	3.600.000	100,00	72,73	8	19.600.000	40,00	159,09	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	15	739.000.000	3	143.500.000	3	217.500.000	3	195.118.000	100,00	89,71	6	338.618.000	40,00	45,82	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah waktu tersedianya makanan dan minuman	55	148.130.000	11	30.000.000	11	20.100.000	11	20.030.000	100,00	99,65	22	50.030.000	40,00	33,77	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60	1.650.000.000	12	350.000.000	12	200.000.000	12	96.937.647	100,00	48,47	24	446.937.647	40,00	27,09	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang administrasi perkantoran	60	421.600.000	12	220.000.000	12	118.500.000	12	107.475.000	100,00	90,70	24	327.475.000	40,00	77,67	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)													99,53	81,20			39,91	51,88	
PREDIKAT KINERJA													ST	T			SR	R	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			4.121.250.000		700.000.000		501.878.002		402.080.983				1.102.080.983			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	35	1.471.110.000	7	300.000.000	7	193.685.287	7	111.310.983	100,00	57,47	14	411.310.983	40,00	27,96	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi	10	1.850.140.000	4	200.000.000	1	200.000.000	1	199.850.000	100,00	99,93	5	399.850.000	50,00	21,61	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Inventarisasi Aset	Jumlah Kecamatan yang dilakukan inventarisasi	28	800.000.000		200.000.000	7	108.190.715	7	90.900.000	100,00	84,02	7	290.900.000	25,00	36,36	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)													100,00	80,11			38,33	28,64	
PREDIKAT KINERJA													ST	T			SR	SR	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			437.477.688		101.500.000		-		-				101.500.000			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapanny	680	437.477.688	136	101.500.000	150	-					136	101.500.000	20,00	23,20	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	20,00	23,20	
PREDIKAT KINERJA																	SR	SR	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			166.845.200		35.000.000		8.800.000		-				35.000.000			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan hasil capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	30	24.208.000	6	5.000.000	6	1.250.000	0	-	0,00	0,00	6	5.000.000	20,00	20,65	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semester yang disusun	30	23.094.500	6	5.000.000	6	1.250.000	0	-	0,00	0,00	6	5.000.000	20,00	21,65	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan pelaporan keuangan akhir tahun yang disusun	30	23.094.500	6	5.000.000	6	1.250.000	0	-	0,00	0,00	6	5.000.000	20,00	21,65	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)	Jumlah dokumen RENJA (RKT, RKA dan DPA) yang disusun	30	23.203.000	6	5.000.000	6	1.250.000	0	-	0,00	0,00	6	5.000.000	20,00	21,55	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Forum Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Jumlah laporan hasil pengendalian intern pemerintah yang disusun	5	73.245.200	1	15.000.000	1	3.800.000	0	-	0,00	0,00	1	15.000.000	20,00	20,48	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)													0,00	0,00			20,00	21,20	
PREDIKAT KINERJA													SR	SR			SR	SR	
			Program Pembangunan, Pengembangan, Penataan Infrastruktur dan sumber daya air			393.223.651.437		-		79.059.301.612		71.697.363.675				70.978.716.675			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Perencanaan Bidang Cipta Karya	jumlah dokumen yang dihasilkan	18	1.939.556.250	-	-	3	1.083.923.850	3	776.103.850	100,00	71,60	3	776.103.850	16,67	40,01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Pengawasan teknis bidang cipta karya	Jumlah dokumen pengawasan yang dihasilkan	36	4.611.833.750	-	-	21	270.000.000	21	225.705.000	100,00	83,59	21	225.705.000	58,33	4,89	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Pembangunan gedung kantor	jumlah unit gedung kantor yang dibangun	38	12.499.362.500	-	-	23	1.598.000.000	4	1.252.767.200	17,39	78,40	4	1.252.767.200	10,53	10,02	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	jumlah unit gedung kantor yang di rehabilitasi	150	3.152.500.000	-	-	90	761.638.300	2	653.258.400	2,22	85,77	2	653.258.400	1,33	20,72	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Ranja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6*8		11=10/5*100%					
				K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Penyusunan Rencana Program Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM)	Jumlah Dokumen RPJIM yang disusun	4	948.227.500	-	-	1	-						0	-	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			Operasional Stadion Depati Amir dan Pemeliharaan	Jumlah unit stadion yang dikelola	1	2.586.075.000	-	-	1	600.000.000	1	578.400.000	100,00	96,40	1	578.400.000	100,00	22,37	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
			Interkoneksi Pemasangan Pipa HDPE Kota Pangkalpinang	jumlah paket kegiatan koneksi pipa yang dilakukan	4	17.240.500.000	-	-	1	5.045.830.900	1	4.859.102.324	100,00	96,30	1	4.859.102.324	25,00	28,18	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
			Pengawasan Teknis Bidang Bina Marga	jumlah dokumen yang dihasilkan	76	1.163.733.750	-	-	1	270.000.000	1	268.741.000	100,00	99,53	1	268.741.000	1,32	23,09	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
			Pembangunan Jembatan	jumlah panjang jembatan yang dibangun	4	27.000.000.000	-	-	1	26.222.089.000	1	21.163.738.922	100,00	80,71	1	21.163.738.922	25,00	78,38	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
			Pembangunan Fasilitas Saluran Jalan	jumlah panjang saluran jalan yang dibangun	31	4.353.226.250	-	-	31	2.305.100.000	31	2.293.742.000	100,00	99,51	31	2.293.742.000	100,00	52,69	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
			Pembangunan Utilitas / Bangunan Pelengkap Saluran Jalan	jumlah unit utilitas bangunan yang dibangun	81	1.249.936.250	-	-	21	930.000.000	21	924.906.000	100,00	99,45	21	924.906.000	25,93	74,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
			Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	jumlah panjang jalan yang direhabilitasi	9	10.171.895.000	-	-	1	12.083.972.500	1	11.785.144.690	100,00	97,53	1	11.785.144.690	11,11	115,86	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
			Peningkatan Konstruksi Jalan	jumlah panjang jalan yang di lakukan peningkatan	164	174.099.140.920	-	-	78	16.696.832.012	78	16.359.050.538	100,00	97,98	78	16.359.050.538	47,56	9,40	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana SDA dan Penunjang Infrastruktur	jumlah jenis kebutuhan operasional alat berat SDA	5	15.085.437.500	-	-	2	-						0	-	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			Pemeliharaan Operasional Alat Berat	jumlah unit alat berat yang dipelihara	16	10.775.312.500	-	-	4	2.250.000.000	4	1.873.346.000	100,00	83,26	4	1.873.346.000	25,00	17,39	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
			Pembangunan Jalan	jumlah panjang jalan yang dibangun	34	6.422.086.250	-	-	9	6.490.963.800	9	6.358.632.000	100,00	97,96	9	6.358.632.000	26,47	99,01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
			Pengembangan fasilitas umum	jumlah unit bangunan fasilitas umum yang dikembangkan	58	92.043.578.017	-	-	43	1.192.758.751	43	1.187.792.751	100,00	99,58	43	1.187.792.751	74,14	1,29	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
			Perencanaan Bidang Bina Marga	jumlah dokumen yang dihasilkan	75	7.881.250.000	-	-	1	538.192.499	1	418.286.000	100,00	77,72	1	418.286.000	1,33	5,31	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
			Pembangunan Turap/Talud/Bronjong						1	600.000.000	1	598.813.000	100,00	99,80							
			Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas						1	120.000.000	1	119.834.000	100,00	99,86							
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												88,73	90,69			30,54	33,48	
			PREDIKAT KINERJA												T	T			SR	SR	
			Program Penganggulangan Banjir dan Genangan			112.973.925.000		-		11.879.642.000		11.686.803.000				9.846.345.000			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
			Penataan Kolong Kota Pangkalpinang	Jumlah Kolong yang Dilakukan Penataan	7	35.405.050.000	-	-	4	4.002.000	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
			Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	jumlah luas saluran yang dibangun	6300	57.182.500.000	0	-	6300	6.886.474.000	6300	6.845.152.000	100,00	99,40	6300	6.845.152.000	100,00	11,97	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
			Pemeliharaan Rutin Saluran 7 Kecamatan	Jumlah Kecamatan yang dilakukan pemelihara	7	20.386.375.000	-	-	7	3.140.666.000	7	3.001.193.000	100,00	95,56	7	3.001.193.000	100,00	14,72	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
			Rehabilitasi/Pemeliharaan normalisasi saluran sungai dan selokan jalan						1	1.848.500.000	1	1.840.458.000	100,00	99,56	1	1.840.458.000			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												75,00	98,38			66,67	8,90	
			PREDIKAT KINERJA												S	ST			S	SR	
			Program Tata Ruang			5.100.000.000		-		1.768.521.000		1.390.012.513				1.390.012.513			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
			Survey Pemanfaatan Ruang	Jumlah Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang yang di Survey	5	250.000.000	-	-	400	241.150.000	175	211.873.451	43,74	87,86	174,951	211.873.451	3499,03	84,75	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
			Audit tata ruang	jumlah dokumen (Perda/Perwako/Keputusan Walikota/Laporan/Peta) terkait audit tata ruang	2	600.000.000	-	-	1	220.600.000	1	161.599.584	100,00	73,25	1	161.599.584	50,00	26,93	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Ranja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9=8/7*100%		10=8*8		11=10/5*100%		12
					K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Pangkalpinang	jumlah dokumen (Perda/Perwako/Keputusan Walikota/Laporan/Peta) terkait penataan ruang	20,0	2.100.000.000	-	-	5,0	257.550.000	5	221.849.400	100,00	86,14	5	221.849.400	25,00	10,56	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Bimbingan Teknis Pemetaan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pemetaan	20,0	250.000.000	-	-	20,0	210.921.000	20	146.800.000	100,00	69,60	20	146.800.000	100,00	58,72	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Sosialisasi Rencana Tata Ruang	Jumlah Peserta Sosialisasi	6350,0	1.200.000.000	-	-	#####	201.500.000	1000	161.056.758	74,07	79,93	1000	161.056.758	15,75	13,42	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Pengaturan kebijakan Penataan Ruang	jumlah dokumen (Perda/Perwako/Keputusan Walikota/Laporan/Peta) terkait kebijakan tata ruang	1,0	700.000.000	-	-	1,0	394.900.000	1	307.033.736	100,00	77,75	1	307.033.736	100,00	43,86	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Pengawasan Teknis Penataan Ruang	Jumlah Peserta Bimbingan			-	-	1	231.900.000	1	179.799.584	100,00	77,53	1	179.799.584			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										88,28	79,04			631,63	39,71	
			PREDIKAT KINERJA										T	T			ST	SR	
			Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman																
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			9.578.178.800		1.321.301.037		1.397.320.000		1.152.172.512				2.473.473.549			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Penyediaan jasa surat menyurat		54	225.000.000	12		12	45.000.000	12	42.600.000	100,00	94,67	24	42.600.000	44,44	18,93	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		60	2.811.690.600	12	107.952.036	12	219.000.000	12	170.045.414	100,00	77,65	24	277.997.450	40,00	9,89	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Penyediaan jasa administrasi keuangan		60	1.250.000.000	12	227.010.000	12	261.550.000	12	243.667.000	100,00	93,16	24	470.677.000	40,00	37,65	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Penyediaan jasa kebersihan kantor		60	250.000.000	12	46.772.000	12	78.241.500	12	69.558.500	100,00	88,90	24	116.330.500	40,00	46,53	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		114	200.000.000	12	39.850.000	12	40.000.000	12	30.458.000	100,00	76,15	24	70.308.000	21,05	35,15	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Penyediaan alat tulis kantor		144	175.000.000	12	22.069.000	12	35.000.000	12	30.612.000	100,00	87,46	24	52.681.000	16,67	30,10	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		60	185.000.000	12	23.854.700	12	40.000.000	12	32.865.000	100,00	82,16	24	56.719.700	40,00	30,66	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		60	400.000.000	12	5.097.500	10	35.000.000	10	31.477.500	100,00	89,94	22	36.575.000	36,67	9,14	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		100	875.000.000	20	324.635.000	20	196.758.500	18	161.300.000	90,00	81,98	38	485.935.000	38,00	55,54	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Penyediaan peralatan rumah tangga		25	17.500.000	5	3.257.000	5	3.500.000	5	3.380.000	100,00	96,57	10	6.637.000	40,00	37,93	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		60	47.500.000	12	5.696.000	12	10.000.000	12	5.360.000	100,00	53,60	24	11.056.000	40,00	23,28	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Penyediaan makanan dan minuman		60	490.470.000	12	19.000.000	12	45.820.000	12	14.090.000	100,00	30,75	24	33.090.000	40,00	6,75	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		60	2.214.019.200	12	456.082.801	12	198.450.000	12	169.994.598	100,00	85,66	24	626.077.399	40,00	28,28	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Penyediaan Jasa Pengelolaan Arsiparis Kantor		54	205.000.000	6	6.525.000	6	31.500.000	6	30.214.500	100,00	95,92	12	36.739.500	22,22	17,92	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Penyediaan Jasa Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		54	230.000.000	6	33.500.000	6	157.500.000	6	116.550.000	100,00	74,00	12	150.050.000	22,22	65,24	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										99,33	82,46			34,75	30,20	
			PREDIKAT KINERJA										ST	T			SR	SR	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			5.268.000.000		602.339.724		1.104.000.000		916.722.805				1.422.290.529			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6*8		11=10/5*100%			
				K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor		136	995.000.000	25	172.602.000	25	24.500.000	25	24.400.000	100,00	99,59	50	197.002.000	36,76	19,80	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Pengadaan peralatan gedung kantor		130	798.000.000	0	-	25	267.128.000	25	253.426.000	100,00	94,87	25	253.426.000	19,23	31,76	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		60	975.000.000	1	170.404.000	1	198.800.000	1	197.880.000	100,00	99,54	2	368.284.000	3,33	37,77	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		60	2.500.000.000	12	259.333.724	15	500.000.000	12	344.244.805	80,00	68,85	24	603.578.529	40,00	24,14	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dibeli	1050	990.000.000			210	113.572.000	210	96.772.000	100,00	85,21	210	96.772.000	20,00	9,77	
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										95,00	83,04			23,87	24,65	
			PREDIKAT KINERJA										ST	T			SR	SR	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			1.108.680.000		164.063.805		208.000.000		177.875.000				341.938.805			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Pendidikan dan Pelatihan Formal		60	466.680.000	6	32.233.805	20	15.100.000	20	14.500.000	100,00	96,03	26	46.733.805	43,33	10,01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		420	300.000.000	100	64.960.000	100	103.700.000	100	96.350.000	100,00	92,91	200	161.310.000	47,62	53,77	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan		335	340.000.000	40	66.870.000	70	89.200.000	70	67.025.000	100,00	75,14	110	133.895.000	32,84	39,38	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	85,52			41,26	34,39	
			PREDIKAT KINERJA										ST	T			SR	SR	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			1.918.000.000		248.538.420		325.705.000		225.644.950				474.183.370			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		25	36.000.000	5	2.757.000	5	3.000.000	5	3.000.000	100,00	100,00	10	5.757.000	40,00	15,99	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Penyusunan pelaporan keuangan semesteran		40	36.000.000	8	2.920.450	8	3.000.000	8	3.000.000	100,00	100,00	16	5.920.450	40,00	16,45	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		40	36.000.000	8	2.472.100	8	3.000.000	8	3.000.000	100,00	100,00	16	5.472.100	40,00	15,20	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Penyusunan Renja (RKT, RKA dan DPA)		25	36.000.000	5	2.919.050	5	3.000.000	5	3.000.000	100,00	100,00	10	5.919.050	40,00	16,44	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal		5	315.000.000	1	34.657.184	1	51.775.000	1	32.620.000	100,00	63,00	2	67.277.184	40,00	21,36	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)		15	265.000.000	3	32.060.750	3	52.500.000	2	13.955.000	66,67	26,58	5	46.015.750	33,33	17,36	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIIP di Lingkungan OPD		5	110.000.000	1	12.221.750	1	25.000.000	1	12.700.000	100,00	50,80	2	24.921.750	40,00	22,66	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Pelaksanaan Evaluasi Renstra		5	36.000.000	1	2.757.000	1	3.000.000	1	2.999.950	100,00	100,00	2	5.756.950	40,00	15,99	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Pelaksanaan Evaluasi Renja		5	36.000.000	1	2.757.000	1	3.000.000	1	3.000.000	100,00	100,00	2	5.757.000	40,00	15,99	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Pelaksanaan Forum OPD		4	40.000.000	0	-	4	10.000.000	4	10.000.000	100,00	100,00	4	10.000.000	100,00	25,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Penyusunan Data dan Pengelolaan WebSite		60	625.000.000	12	116.093.700	12	125.000.000	9	118.500.000	75,00	94,80	21	234.593.700	35,00	37,53	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Penyusunan Data dan Inventarisasi Aset Disperkim		10	345.000.000	5	36.922.436	5	43.430.000	5	19.870.000	100,00	45,75	10	56.792.436	100,00	16,46	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										95,14	69,28			46,03	19,70	
			PREDIKAT KINERJA										ST	S			SR	SR	
			Program Lingkungan Sehat Perumahan			3.900.000.000		126.398.440		751.465.834		359.996.450				466.394.890			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Deerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kaglatan (output)	Target RPJMD Kota Pengkalpinang pede Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capalan Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun laku (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capalan Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capalan Kinerja dan Realisasi Anggaran Ranja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capalan Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6*8		11=10/5*100%		12	
				K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan	56	500.000.000	0	-	3	98.740.224	2	29.437.000	66,67	29,81	2	29.437.000	3,57	5,89	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Pemutakhiran Data Base Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang	4	400.000.000	1	7.888.000	1	95.805.578	1	24.474.700	100,00	25,55	2	32.362.700	50,00	8,09	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Peningkatan Kualitas PSU Lingkungan Perumahan	6050	1.200.000.000	0	8.910.000	11	300.230.776	11	199.995.400	100,00	66,61	11	208.905.400	0,18	17,41	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan	400	1.000.000.000	0	-	50	98.798.246	41	18.970.500	82,00	19,20	41	18.970.500	10,25	1,90	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Pengkajian dan Penyusunan Rumusan PSU Perumahan	4	400.000.000	1	109.600.440	12	157.891.010	12	87.118.850	100,00	55,18	13	196.719.290	325,00	49,18	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Pencegahan dan Pengendalian Kawasan kumuh Kota Pangkalpinang	48	400.000.000	0	-	1	-					0	-	0,00	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										89,73	47,91			84,83	13,74	
			PREDIKAT KINERJA										T	SR			R	SR	
			Program Pertamanan dan Perkuburan		34.240.000.000		5.403.864.229		5.181.708.943		4.833.260.567				10.143.124.796			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan areal pemakaman	1	420.000.000	1	56.834.300	2	101.708.943	0	21.120.600	0,00	20,77	1	77.954.900	100,00	18,56	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Pemeliharaan taman dan ruang terbuka hijau	60	6.000.000.000	12	1.302.286.680	12	1.850.000.000	12	1.808.988.837	100,00	97,78	24	3.111.275.517	40,00	51,85	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Penebangan dan Pemangkasan pohon	48	4.000.000.000	12	661.727.509	12	1.000.000.000	12	848.017.130	100,00	84,80	24	1.509.744.639	50,00	37,74	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Terbuka Hijau	22	12.200.000.000	2	2.743.767.000	12	1.800.000.000	12	1.799.916.000	100,00	100,00	14	4.543.683.000	63,64	37,24	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Pemeliharaan Alun-alun Taman Merdeka	48	1.000.000.000	12	244.545.500	12	225.000.000	12	224.561.000	100,00	99,80	24	469.106.500	50,00	46,91	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Pengumpulan dan analisis data base jumlah jiwa yang meninggal	48	420.000.000	12	147.957.240	12	105.000.000	12	36.857.000	100,00	35,10	24	184.814.240	50,00	44,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	2	9.600.000.000	2	246.546.000	1	-					2	246.546.000	100,00	2,57	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Pemutakhiran Data Pohon Milik Pemerintah	4	600.000.000									0	-	0,00	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Asuransi Akibat Pohon Tumbang (Milik Pemerintah)	400	800.000.000	0	-	1	-					0	-	0,00	0,00		
			Masterplan dan DED TPU					1	100.000.000	1	93.800.000	100,00	93,80	1	93.800.000				
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										83,33	93,28			50,40	26,54	
			PREDIKAT KINERJA										T	ST			SR	SR	
			Program Pengembangan Perumahan, dan Fasilitas Umum		112.080.000.000		25.034.455.528		15.141.865.985		13.343.110.805				35.050.733.289			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Pembangunan rumah layak huni bagi Masyarakat (PB)	200	17.080.000.000	8	3.509.747.700	50	2.066.508.509	43	1.904.273.933	86,00	92,15	51	5.414.021.633	25,50	31,70	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Peningkatan Kualitas rumah tidak layak huni bagi Masyarakat (PK)	400	13.360.000.000	3	2.424.649.800	50	1.565.000.000	39	1.372.622.000	78,00	87,71	42	3.797.271.800	10,50	28,42	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Site Plan	48	800.000.000	12	56.697.150	12	121.653.800	6	30.497.250	50,00	25,07	18	87.194.400	37,50	10,90	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Penyediaan Jasa Pengelolaan UPT Rusunawa	48	4.800.000.000	12	825.519.549	12	810.200.000	12	691.297.030	100,00	85,32	24	1.516.816.579	50,00	31,60	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Pemeliharaan Rutin RUSUNAWA	16	4.000.000.000	4	660.055.746	12	545.000.000	12	476.833.000	100,00	87,49	16	1.136.888.746	100,00	28,42	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang di Lingkungan RUSUNAWA	8	1.800.000.000	0	-	3	200.000.000	3	192.054.000	100,00	96,03	3	192.054.000	37,50	10,67	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Masterplan dan DED Sarana dan Prasarana Penunjang RUSUNAWA	4	420.000.000	0	-	1	45.000.000	1	44.600.000	100,00	99,11	1	44.600.000	25,00	10,62	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
1	2	3	4		5		6		7		8		9=8/7*100%		10=8*8		11=10/5*100%		12			
					K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Pemutakhiran Data Perumahan		4	400.000.000	1	74.774.331	1	73.153.310	1	33.081.250	100,00	45,22	2	107.855.581	50,00	26,96	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
			Penyediaan Rehab dan Pemberian Bantuan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana		200	6.920.000.000	0	-	30	50.000.000	0	21.185.050	0,00	42,37	0	21.185.050	0,00	0,31	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
			Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan		8	700.000.000	0	112.537.500	2	97.513.619	2	33.667.850	100,00	34,53	2	146.205.350	25,00	20,89	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
			Penyediaan Rehab dan Pemberian Bantuan Rumah Layak Huni bagi Korban Relokasi Program Pemerintah		700	4.800.000.000	0	-	60	57.772.767	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
			Pembangunan Jalan Setapak		20000	6.000.000.000	2000	2.629.400.000	2000	510.985.000	2000	510.322.000	100,00	99,87			0,00	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
			Pembangunan Drainase dan Talud		24000	40.000.000.000	1715	11.824.686.000	1715	5.684.092.000	1715	5.675.248.000	100,00	99,84	3430	17.499.934.000	14,29	43,75	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
			Pemeliharaan Rutin Jalan Setapak		48	3.000.000.000	12	1.030.008.600	12	900.000.000	12	863.784.000	100,00	95,98	24	1.893.792.600	50,00	63,13	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
			Pemeliharaan Rutin Drainase		48	4.000.000.000	12	963.546.500	12	1.000.000.000	12	993.592.000	100,00	99,36	24	1.957.138.500	50,00	48,93	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
			Pembangunan Plat duiker		168	1.600.000.000	28	670.212.000	16	104.923.000	16	104.852.000	100,00	99,93	44	775.064.000	26,19	48,44	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
			Pendampingan Program Nasional Kota Tanpa Kawasan Kumuh (KOTAKU)		48	400.000.000	12	79.522.800	12	70.000.000	12	69.652.000	100,00	99,50	24	149.174.800	50,00	37,29	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
			Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)		4	2.000.000.000	1	173.097.850	1	461.471.460	1	138.438.400	100,00	30,00	2	311.536.250	50,00	15,58	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
			Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Layak Huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)						1	778.392.500	1	187.111.042	100,00	24,04	1	187.111.042						
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)														84,11	88,12		33,42	25,42	
			PREDIKAT KINERJA														T	T		SR	SR	
																			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
			Keterlraman dan Keterliban Umum serta Perlindungan Masyarakat																			
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.813.457.460		-		317.795.292		306.041.344				288.291.344			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
		9	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	225.000.000			12	45.660.000	12	39.197.819	100,00	85,85	12	39.197.819	20,00	17,42	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	60	395.025.000			12	88.830.010	12	87.653.000	100,00	98,67	12	87.653.000	20,00	22,19	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	60	241.525.000			12	45.944.885	12	45.554.900	100,00	99,15	12	45.554.900	20,00	18,86	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang mendapat perbaikan	115	145.917.000			23	10.030.000	12	9.840.000	52,17	98,11	12	9.840.000	10,43	6,74	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah waktu penyediaan ATK	60	79.165.500			12	9.577.725	12	9.206.000	100,00	96,12	12	9.206.000	20,00	11,63	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60	56.321.960			12	8.766.760	12	6.848.175	100,00	78,12	12	6.848.175	20,00	12,16	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60	16.972.500			12	3.821.000	12	3.171.000	100,00	82,99	12	3.171.000	20,00	18,68	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman	60	136.000.000			12	5.810.000	12	5.680.000	100,00	97,76	12	5.680.000	20,00	4,18	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah waktu rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang diikuti	60	1.517.530.500			12	81.354.912	12	81.140.450	100,00	99,74	12	81.140.450	20,00	5,35	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
			penyedia peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah layanan peralatan kerja yang tertangani	5	60.000.000			3	18.000.000	3	17.750.000	100,00	98,61	3	17.750.000	60,00	29,58				
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)														94,69	96,30		23,04	14,68	
			PREDIKAT KINERJA														ST	ST		SR	SR	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.238.276.590		-		146.443.500		139.242.698				139.242.698			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
		2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin	5	356.801.560			1	14.450.000	1	13.924.000	100,00	96,36	1	13.924.000	20,00	3,90	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang mendapat pemeliharaan rutin	60	881.475.000			12	131.993.500	12	125.318.698	100,00	94,94	12	125.318.698	20,00	14,22	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)														100,00	95,08		20,00	9,06	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6+8		11=10/5*100%		12
					K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah layanan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang tertangani	66	995.000.000	15	349.756.444	12	60.352.200	12	60.352.200	100,00	100,00	27	410.108.644	40,91	41,22	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah layanan jasa perkantoran yang tertangani	38	201.000.000	9	29.200.000	12	42.600.000	12	42.600.000	100,00	100,00	21	71.800.000	55,26	35,72	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											100,00	98,18		49,66	38,41	
			PREDIKAT KINERJA											ST	ST		SR	SR	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			637.900.000		153.017.107		155.900.000		144.884.168				297.901.275			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	32	637.900.000	7	153.017.107	8	155.900.000	8	144.884.168	100,00	92,93	15	297.901.275	46,88	46,70	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											100,00	92,93		46,88	46,70	
			PREDIKAT KINERJA											ST	ST		SR	SR	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			215.067.500		-		257.600.280		233.836.500				27.911.500			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1	Pelatihan korps musik (korsik)	Jumlah waktu pelatihan korsik	48	215.067.500			12	29.067.500	12	27.911.500	100,00	96,02	12	27.911.500	25,00	12,98	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Pendidikan dan pelatihan polisi pamong praja	Jumlah peserta yang mendapat pendidikan dan pelatihan	200	1.000.000.000			220	228.532.780	220	205.927.000	100,00	90,11	220	205.927.000	110,00	20,59	
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											100,00	90,78		67,50	16,79	
			PREDIKAT KINERJA											ST	T		S	SR	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			114.163.500		6.885.000		4.473.500		3.796.500				10.683.500			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		5	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja& ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	8	35.000.000	2	2.210.000	2	-					2	2.210.000	25,00	6,31	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	4	9.172.500	3	2.240.000	1	2.227.500	1	1.552.500	100,00	69,70	4	3.792.500	100,00	41,35	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)	Jumlah laporan perencanaan jangka pendek yang tersusun	4	9.786.000	1	2.435.000	1	2.246.000	1	2.246.000	100,00	100,00	2	4.681.000	50,00	47,83	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD	Jumlah laporan penyelenggaraan SPIP di lingkungan OPD	4	42.205.000	0	-	1	-					0	-	0,00	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Forum Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan forum perangkat daerah	3	18.000.000				-					0	-	0,00	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											100,00	84,91		35,00	19,10	
			PREDIKAT KINERJA											ST	T		SR	SR	
			Program peningkatan Keselagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran			26.583.591.550		5.353.341.000		5.322.561.050		5.100.618.768				10.453.959.768			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		3	Sosialisasi Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah kegiatan Sosialisasi Pencegahan Bahaya Kebakaran pada masyarakat	48	553.908.900	2	24.100.000	12	-					2	24.100.000	4,17	4,35	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah waktu pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	48	24.690.067.050	12	5.329.241.000	12	5.322.561.050	12	5.100.618.768	100,00	95,83	24	10.429.859.768	50,00	42,24	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Pelatihan Pemadam Kebakaran Tingkat I	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	400	1.339.615.600			6	-					0	-	0,00	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											100,00	95,83		18,06	15,53	
			PREDIKAT KINERJA											ST	ST		SR	SR	
			Program Penegakan Perda, Perkade dan Pemeliharaan Trantibum			18.744.793.500		3.613.443.695		4.912.840.551		4.415.922.500				8.029.386.195			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		6	Pemantauan dan pengawasan pelanggaran atas peraturan daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah waktu pelaksanaan Pemantauan dan pengawasan pelanggaran atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	16	421.082.000	4	63.779.000	11	39.554.000	11	30.970.000	100,00	78,30	15	94.749.000	93,75	22,50	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah waktu pelaksanaan keamanan dan ketertiban masyarakat	48	13.432.728.000	12	3.322.495.000	12	3.774.230.220	12	3.536.881.000	100,00	93,71	24	6.859.376.000	50,00	51,06	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Pengamanan Aset Kota Pangkalpinang	Jumlah waktu pengamanan aset kota pangkalpinang	48	3.831.461.500			12	997.826.500	12	755.486.500	100,00	75,71	12	755.486.500	25,00	19,72	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Operasi penyakit masyarakat (pekat)	Jumlah operasi penyakit masyarakat (pekat)	192	375.363.000	4	29.785.000	48	45.459.831	48	41.455.000	100,00	91,19	52	71.240.000	27,08	18,98	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Operasi Penertiban Pelanggaran PERDA dan Pedagang Kaki Lima (PKL)	Jumlah waktu operasional penertiban pelanggaran perda dan pedagang kaki lima (PKL)	144	684.159.000	4	197.384.695	36	46.300.000	36	42.180.000	100,00	91,10	40	239.564.695	27,78	35,02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Patroli Kawasan Wilayah Kota Pangkalpinang						96	9.470.000	96	8.950.000	100,00	94,51	96	8.950.000			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Pelaksanaan peringatan HUT Pol PP						1	-					0	-	0,00	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											100,00	89,89		37,27	24,55	
			PREDIKAT KINERJA											ST	T		SR	SR	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3.827.442.870		568.662.032		369.997.000		356.654.295				925.316.327			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6*8		11=10/5*100%			
				K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		9	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tertangani	60	380.958.240	12	54.506.662	12	80.400.000	12	75.939.755	100,00	94,45	24	130.446.417	40,00	34,24	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah waktu layanan jasa administrasi keuangan yang tertangani (bulan)	60	887.376.285	12	137.130.000	12	140.890.000	12	135.890.000	100,00	96,45	24	273.020.000	40,00	30,77	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah waktu layanan jasa kebersihan kantor yang tertangani (bulan)	60	172.777.383	12	30.825.000	12	26.500.000	12	25.300.000	100,00	95,47	24	56.125.000	40,00	32,48	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah waktu layanan jasa perbaikan peralatan kerja yang tertangani (bulan)	60	74.482.220	12	10.000.000	12	8.800.000	12	8.795.000	100,00	99,94	24	18.795.000	40,00	25,23	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah waktu layanan penyediaan ATK yang tertangani (bulan)	60	74.940.103	12	12.500.000	12	5.303.000	12	5.303.000	100,00	100,00	24	17.803.000	40,00	23,76	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah waktu layanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tertangani (bulan)	60	50.367.075	12	7.999.700	12	3.460.000	12	3.460.000	100,00	100,00	24	11.459.700	40,00	22,75	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah waktu layanan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang tertangani (bulan)	60	28.388.715	12	2.450.000	12	2.144.000	12	2.107.000	100,00	98,27	24	4.557.000	40,00	16,05	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah waktu layanan penyediaan makanan dan minuman yang tertangani (bulan)	60	21.367.850	12	4.000.000	12	2.500.000	12	2.500.000	100,00	100,00	24	6.500.000	40,00	30,42	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah waktu layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (bulan)	60	2.136.785.000	12	309.250.670	12	100.000.000	12	97.359.540	100,00	97,36	24	406.610.210	40,00	19,03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	96,39		40,00	26,08		
			PREDIKAT KINERJA										ST	ST		SR	SR		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.203.925.720		130.309.865		180.750.000		96.679.744				228.989.609			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	5	227.109.720	12	29.940.400	1	10.000.000	1	9.900.000	100,00	99,00	13	39.840.400	260,00	17,54	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara (unit)	30	976.816.000	5	100.369.465	5	170.750.000	5	86.779.744	100,00	50,82	10	187.149.209	33,33	19,16	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	63,49		146,67	18,35		
			PREDIKAT KINERJA										ST	R		ST	SR		
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			204.837.700		10.204.000		22.216.000		16.959.000				27.163.000			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		7	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun (dokumen)	25	21.367.850	5	2.750.000	5	3.500.000	5	2.225.000	100,00	63,57	10	4.975.000	40,00	23,28	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun (dokumen)	25	21.367.850	5	2.589.000	5	3.500.000	5	3.200.000	100,00	91,43	10	5.789.000	40,00	27,09	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun (dokumen)	25	21.367.850	5	2.115.000	5	3.500.000	5	3.300.000	100,00	94,29	10	5.415.000	40,00	25,34	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)	Jumlah laporan Renja (RKT,RKA,DPA) yang disusun (dokumen)	25	21.367.850	5	2.750.000	5	3.500.000	5	3.200.000	100,00	91,43	10	5.950.000	40,00	27,85	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Penyusunan laporan SPM	Jumlah dokumen SPM yang disusun (dokumen)	25	30.525.500	0	-	5	4.892.000	5	3.560.000	100,00	72,77	5	3.560.000	20,00	11,66	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD	Jumlah laporan SPIP yang disusun (dokumen)	25	48.840.800	0	-	5	3.324.000	5	1.474.000	100,00	44,34	5	1.474.000	20,00	3,02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Forum Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan forum perangkat daerah (kali)	4	40.000.000	0	-	1	-					0	-	0,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	76,34		28,57	16,89		
			PREDIKAT KINERJA										ST	T		SR	SR		
			Program Penyelenggaraan Penanggulangan dan Mitigasi Bencana			27.538.003.765		-		4.396.103.400		3.964.817.000				3.964.817.000			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		9	Pemeliharaan Peralatan Penunjang Penanggulangan Bencana	Jumlah peralatan penunjang yang terpelihara	82	91.576.500	0	-	15	12.550.000	15	11.165.000	100,00	88,96	15	11.165.000	18,29	12,19	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rerja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6*8		11=10/5*100%				
				K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		79	Peningkatan kapasitas petugas logistik dan peralatan	Jumlah petugas logistik dan peralatan yang terlatih	200	824.188.500	0	-	40	122.922.400	27	110.483.000	67,50	89,88	27	110.483.000	13,50	13,41	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Dana Hibah Siap Pakai/Siap Siaga Bencana	Jumlah paket dana siap pakai / siap siaga bencana yang tersedia	5	2.620.500.000	0	-	1	70.000.000	1	69.900.000	100,00	99,86	1	69.900.000	20,00	2,67	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Tanggap darurat dan evakuasi korban penanggulangan bencana	Jumlah waktu terlaksananya operasional tanggap darurat dan evakuasi korban penanggulangan bencana (bulan)	48	19.724.250.000	0	-	12	3.930.630.000	12	3.584.228.000	100,00	91,19	12	3.584.228.000	25,00	18,17	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Penyusunan / Pendataan Laporan Barang Logistik	Jumlah dokumen pendataan barang logistik	8	39.448.500	0	-	2	5.334.000	2	5.334.000	100,00	100,00	2	5.334.000	25,00	13,52	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Pengumpulan, Pengelolaan dan Pelaporan Data	Jumlah data sebelum, saat dan setelah bencana yang tersedia	12	394.485.000	0	-	3	204.067.000	3	203.707.000	100,00	99,82	3	203.707.000	25,00	51,64	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Daerah Rawan Bencana	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan bencana (dokumen)	15	179.444.265	0	-	3	-					0	-	0,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Rapat Koordinasi Tentang Kebencanaan	Jumlah rapat koordinasi tentang kebencanaan yang terselenggara	4	306.306.000	0	-	1	-					0	-	0,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Siaga Bencana	Jumlah aparatur dan masyarakat yang kebutuhannya terpenuhi dalam penanganan bencana	3000	3.357.805.000	0	-	550	50.600.000	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										81,07	90,64			14,09	12,40		
			PREDIKAT KINERJA										T	T			SR	SR		
		Sosial																		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			4.574.473.660			822.483.973		1.114.319.543		948.551.983				1.674.945.780		DINAS SOSIAL	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan biaya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	60	392.227.250	12		74.992.348	12	79.400.000	12	56.836.459	100,00	71,58	24	131.828.807	40,00	33,61	DINAS SOSIAL
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						6	97.875.000	6	13.694.806	100,00	13,99					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	60	917.410.000	12		199.986.000	12	272.760.000	12	268.390.000	100,00	96,40	24	468.376.000	40,00	51,05	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi keuangan (Bulan)	6	18.075.000			6	75.665.000	6	59.245.000	100,00	78,30	6	59.245.000	100,00	327,77	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	60	308.120.000	12		76.699.000	12	51.067.000	12	51.067.000	100,00	100,00	24	127.766.000	40,00	41,47	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Bulan)	6	1.932.500			6	21.932.500	6	19.093.500	100,00	87,06	6	19.093.500	100,00	988,02	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah waktu penyediaan biaya jasa perbaikan peralatan kerja	60	223.677.000	12		34.005.000	12	9.900.000	12	9.900.000	100,00	100,00	24	43.905.000	40,00	19,63	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja						6	15.000.000	6	9.857.000	100,00	65,71					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah waktu penyediaan biaya pembelian ATK	60	176.000.000	12		29.102.000	12	15.942.300	12	15.942.300	100,00	100,00	24	45.044.300	40,00	25,59	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Biaya Pembelian atk (Bulan)	6	3.767.500			6	33.767.500	6	29.431.000	100,00	87,16	6	29.431.000	100,00	781,18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah waktu penyediaan biaya barang cetakan dan penggandaan	60	125.400.000	12		18.662.900	12	5.079.250	12	5.079.250	100,00	100,00	24	23.742.150	40,00	18,93	DINAS SOSIAL
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						6	20.000.000	6	12.939.650	100,00	64,70					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah waktu penyediaan biaya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60	56.000.000	12		10.000.000	12	4.985.000	12	4.985.000	100,00	100,00	24	14.985.000	40,00	26,76	DINAS SOSIAL

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6+8		11=10/5*100%				
				K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah waktu penyediaan biaya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Bulan)	6	4.100.000		6	19.100.000	6	14.416.800	100,00	75,48	6	14.416.800	100,00	351,63	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB		
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman	60	285.039.400	12	34.185.700	12	6.200.000	12	6.200.000	100,00	100,00	24	40.385.700	40,00	14,17	DINAS SOSIAL	
			penyediaan makanan dan minuman					6	15.000.000	6	10.620.000	100,00	70,80					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB		
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					6	50.000.000	6	48.978.720	100,00	97,96					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB		
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah waktu penyediaan biaya perjalanan dinas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60	2.000.000.000	12	344.851.025	12	95.805.993	12	95.660.498	100,00	99,85	24	440.511.523	40,00	22,03	DINAS SOSIAL	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (Unit, Buah)	30	25.200.000		30	136.500.000	30	134.500.000	100,00	98,53	30	134.500.000	100,00	533,73	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah layanan penyediaan peralatan rumah tangga yang tertangani (Bulan)	6	2.500.000		6	12.500.000	6	11.875.000	100,00	95,00	6	11.875.000	100,00	475,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB		
			Penyedia jasa perkantoran	Jumlah waktu penyediaan jasa perkantoran (Bulan)	6	29.625.000		6	70.440.000	6	64.440.000	100,00	91,48	6	64.440.000	100,00	217,52	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB		
			Mobilisasi pindah kantor	Frekuensi terlaksananya mobilisasi pindah kantor (Kali)	1	5.400.000		1	5.400.000	1	5.400.000	100,00	100,00	1	5.400.000	100,00	100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB		
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											100,00	85,12			88,24	236,95	
			PREDIKAT KINERJA											ST	T			S	ST	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			3.179.284.000		412.175.911			893.082.000		731.077.783				694.280.170			DINAS SOSIAL
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung/bangunan/prasarana kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	5	708.000.000	1	113.651.000	1	21.460.000	1	21.460.000	100,00	100,00	2	135.111.000	40,00	19,08	DINAS SOSIAL	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	50	2.284.164.000	8	298.524.911	10	347.422.000	10	260.624.259	100,00	75,02	18	559.149.170	36,00	24,48	DINAS SOSIAL	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang tersedia (Buah, Paket, Set)	75	43.300.000		75	-					0	-	0,00	0,00	DINAS SOSIAL		
			Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor					75	103.950.000	75	102.200.000	100,00	98,32					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB		
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan rutin, berkala (Unit)	3	13.200.000		3	46.100.000	3	19.748.524,00	100,00	42,84	3	19.748.524	100,00	149,61	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB		
			Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang tersedia (Buah, Set)	225	130.600.000		225	374.150.000	197	327.045.000,00	87,56	87,41	197	327.045.000	87,56	250,42	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB		
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											97,61	81,86			82,71	88,72	
			PREDIKAT KINERJA											ST	T			R	T	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			140.000.000		12.800.000		-		-			12.800.000			DINAS SOSIAL		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6*8		11=10/5*100%				
				K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparaturnya yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal	25	140.000.000	3	12.600.000	3	-						3	12.600.000	12,00	9,00	DINAS SOSIAL
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)														12,00	9,00		
			PREDIKAT KINERJA														SR	SR		
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			78.180.000		13.889.250		12.370.000		12.212.500				22.801.750			DINAS SOSIAL	
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun	5	20.520.000	1	3.580.000	1	3.960.000	1	3.960.000	100,00	100,00	2	7.540.000	40,00	36,74	DINAS SOSIAL	
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan yang disusun	5	18.560.000	1	3.280.000	1	-					1	3.280.000	20,00	17,67	DINAS SOSIAL	
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan yang disusun	5	18.560.000	1	3.280.000	1	1.450.000	1	1.450.000	100,00	100,00	2	4.730.000	40,00	25,48	DINAS SOSIAL	
			Penyusunan Renja (RKT, RKA, DPA)	Jumlah laporan yang disusun	15	20.520.000	3	3.549.250	3	3.960.000	3	3.802.500	100,00	96,02	6	7.351.750	40,00	35,83	DINAS SOSIAL	
			Penyusunan Renja (RKT, RKA, dan DPA)	Tersusunnya Penyusunan Renja (RKT, RKA dan DPA)	6	3000000			6	3.000.000	6	3.000.000	100,00	100,00	6	3.000.000	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											100,00	98,73		48,00	43,15		
			PREDIKAT KINERJA											ST	ST		SR	SR		
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			5.170.725.320		922.713.059		879.212.000		772.723.754				1.695.438.813			DINAS SOSIAL	
			Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	Jumlah personil TAGANA yang mendapatkan peningkatan kapasitas berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana	134	2.884.188.540	67	559.470.875	67	605.750.000	67	596.850.000	100,00	98,53	134	1.156.320.875	100,00	40,09	DINAS SOSIAL	
			Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) Skala Kota	Jumlah pendamping PKH Kota Pangkalpinang	100	561.207.080	25	109.162.096	25	13.200.000	25	13.200.000	100,00	100,00	50	122.362.096	50,00	21,80	DINAS SOSIAL	
			Pembinaan Kampung Siaga Bencana (KSB)	Jumlah KSB penerima bantuan/fasilitas	22	317.534.840	4	82.819.840	4	-					4	82.819.840	18,18	26,08	DINAS SOSIAL	
			Pemeliharaan barang logistik / evakuasi penanggulangan bencana	Jumlah paket barang logistik/evakuasi penanggulangan bencana	1000	377.185.180	200	57.409.180	200	43.080.000	200	43.080.000	100,00	100,00	400	100.489.180	40,00	26,64	DINAS SOSIAL	
			Penguatan Akses Jaminan Sosial Keluarga	Jumlah kk pekerja sektor Informal/ mandiri dan keluarga miskin penerima PKH yang memperoleh jaminan sosial	3100	812.113.840	300	79.754.940	500	117.822.000	500	91.356.680	100,00	77,54	800	171.111.620	25,81	21,07	DINAS SOSIAL	
			Pemulangan, Penjemputan dan Pemakaman orang terlantar	Jumlah orang terlantar/PMKS yang mendapatkan pelayanan pemulangan, penjemputan dan pemakaman	150	218.495.840	30	34.096.128	30	99.360.000	20	28.237.074	66,67	28,42	50	62.333.202	33,33	28,53	DINAS SOSIAL	
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											93,33	87,89		44,55	27,37		
			PREDIKAT KINERJA											ST	T		SR	SR		
			Program Rehabilitasi Sosial			3.303.835.500		386.255.289		233.849.300		228.458.900				612.714.189			DINAS SOSIAL	
			Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan dan pendampingan sosial	650	1.106.000.000	150	182.470.000	150	16.370.000	150	16.370.000	100,00	100,00	300	198.840.000	46,15	17,98	DINAS SOSIAL	
			Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	Jumlah lansia yang mendapatkan bantuan dan pendampingan sosial	340	479.868.000	50	87.481.096	50	-					50	87.481.096	14,71	18,23	DINAS SOSIAL	
			Pelayanan Pengangkatan Anak/Adopsi	Jumlah anak yang di adopsi	90	115.000.000	20	17.411.900	10	1.520.000	0	320.000	0,00	21,05	20	17.731.900	22,22	15,42	DINAS SOSIAL	
			Pelayanan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS	Jumlah tuna sosial dan korban NAPZA luar panti yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	320	269.000.000	80	29.549.234	80	-					80	29.549.234	25,00	10,98	DINAS SOSIAL	
			Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak	Jumlah anak luar panti yang mendapatkan bantuan dan pelayanan sosial	170	385.000.000	35	69.343.059	35	60.705.000	35	59.790.000	100,00	98,49	70	129.133.059	41,18	33,54	DINAS SOSIAL	
			Pelayanan Teknis Rumah Perlindungan Sosial (RPS)	Jumlah PMKS yang mendapatkan layanan RPS	260	418.167.500			70	101.208.000	70	97.446.400	100,00	96,28	70	97.446.400	26,92	23,30	DINAS SOSIAL	
			Pelaksanaan Patroli Sosial dan pelayanan Psikososial Bagi PMKS	Jumlah patroli sosial dan pelayanan psikososial bagi PMKS	168	480.800.000			36	54.046.300	36	52.532.500	100,00	97,20	36	52.532.500	21,43	10,93	DINAS SOSIAL	
			Penyusunan Raperda Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia	Jumlah Raperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia	1	50.000.000			1	-					0	-	0,00	0,00	DINAS SOSIAL	
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											80,00	96,84		24,70	16,30		
			PREDIKAT KINERJA											T	ST		SR	SR		
			Program Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial			6.142.383.400		-		1.075.321.400		1.023.517.704				1.023.517.704			DINAS SOSIAL	
			Monitoring dan Evaluasi Kualitas Pengembangan KUBE	Jumlah KUBE yang menjadi sasaran money di Kota Pangkalpinang	72	185.300.000	0	-	72	-					0	-	0,00	0,00	DINAS SOSIAL	
			Pemuktahiran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin / BDT	Jumlah Penduduk Miskin dan Rentan yang masuk Program BDT	13000	575.500.000	0	-	13000	140.854.000	13000	107.250.000	100,00	76,14	13000	107.250.000	100,00	18,64	DINAS SOSIAL	
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Jumlah Laporan Money BPNT	7	197.120.000	0	-	7	5.235.000	7	5.235.000	100,00	100,00	7	5.235.000	100,00	2,66	DINAS SOSIAL	
			Pelaksanaan Hari Pahlawan	Jumlah peserta Puncak Peringatan Hari Pahlawan di Kota Pangkalpinang	1800	401.759.400	0	-	100	57.831.500	100	42.321.500	100,00	73,18	100	42.321.500	5,56	10,53	DINAS SOSIAL	
			Pemberdayaan Kelembagaan Keluarga (LK3) Sakinah	Jumlah LK3 yang mendapatkan pembinaan	8	115.550.000	0	-	8	-					0	-	0,00	0,00	DINAS SOSIAL	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Ranja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6+8		11=10/6*100%		12
					K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)			4.294.070.000		381.524.117		176.481.644		92.006.644				473.530.761			DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
			penyusunan sistem,kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)	jumlah jenis peta kewaspadaan pangan	5	660.000.000	1	33.801.461	1	5.150.000	1	2.450.000	100,00	57,65	2	36.251.461	40,00	5,49	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
			Uji Mutu dan Keamanan Pangan	jumlah pelaksanaan uji mutu dan keamanan pangan	5	374.000.000	1	58.896.797	1	16.870.000	1	970.000	100,00	100,00	2	59.866.797	40,00	16,01	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
			Analisis Neraca Bahan Makan (NBM)	jumlah jenis laporan	5	162.070.000	1	23.030.143	1	2.320.000	1	520.000	100,00	22,41	2	23.550.143	40,00	14,53	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
			Lomba Cipta menu Pangan Bergizi dan Seimbang dan Pangan	jumlah pelaksanaan lomba cipta menu B2SA Berbasis Pangan Lokal	15	683.000.000	1	131.790.480	1	215.000	1	215.000	100,00	100,00	2	132.005.480	13,33	19,33	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
			Pengembangan Cadangan Pangan	Jumlah cadangan pangan yang disediakan	110	321.000.000			1	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
			Survei dan Analisis Harga,Pasokan dan Akses Pangan	Jumlah data hasil survei dan analisis Harga, Pasokan dan Akses Pangan	4	430.000.000			1	9.025.000	1	1.125.000	100,00	12,32	1	1.125.000	25,00	0,26	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
			Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi Pangan melalui pola Pangan Harapan (PPH)	jumlah jenis laporan yang tersusun	93	164.000.000	84	31.666.243	88	14.040.000	88	1.135.000	100,00	100,00	172	32.801.243	184,95	20,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
			Pelatihan Diversifikasi Pangan	Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan Diversifikasi Pangan	20	430.000.000	20	102.338.993	20	81.191.644	20	81.191.644	100,00	100,00	40	183.530.637	200,00	42,68	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
			Pembinaan dan Movev KRPL/P2KP	Jumlah kelompok yang dibina	9	321.000.000			1	25.700.000	1	400.000	100,00	100,00	1	400.000	11,11	0,12	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
			Pameran Ketahanan Pangan	Jumlah Pameran yang dilaksanakan	4	643.000.000			1	2.450.000	1	2.450.000	100,00	100,00	1	2.450.000	25,00	0,38	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
			Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	4	106.000.000		-	1	19.520.000	1	1.550.000	100,00	9,28	1	1.550.000	25,00	1,46	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											90,91	77,08		54,94	10,93	
			PREDIKAT KINERJA											T	T		R	SR	
			Pertanahan																
			Program Pertanahan			9.237.442.000		-		13.794.531.900		11.198.457.872				11.198.457.872			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Pengukuran dan pendataan tanah	Tersedianya data status kepemilikan tanah yang akurat	14	350.000.000	0	-	7	285.232.500	7	194.625.000	100,00	68,23	7	194.625.000	50,00	55,61	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Pembuatan Perda pendukung pertanahan						1	-					0	-	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Pembuatan database asset bidang tanah kota Pangkalpinang	terwujudnya akurasi data fisik dan data yuridis bidang tanah	1	250.000.000	0	-	1	46.000.000	1	1.770.000	100,00	3,85	1	1.770.000	100,00	0,71	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Pengadaan Alat Ukur	jenis alat ukur yang disediakan	0	850.000.000	-	-	4	797.000.000	4	771.037.059	100,00	96,74	4	771.037.059	0,00	90,71	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Pengadaan lahan untuk peningkatan sarana prasarana daerah	terdatanya persentase luasan tanah dan asset serta meningkatnya pengamanan terhadap asset tanah pemkot dengan pengukuran yang lebih detail	0	5.237.442.000	0	-	7	12.308.299.600	7	10.052.246.813	100,00	81,67	7	10.052.246.813	0,00	191,93	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Pembuatan alas hak dan dan Asset Bidang Pertanahan	luas lahan yang mempunyai alas hak / bersertifikat	0	100.000.000	0	-	7	92.000.000	7	17.720.000	100,00	19,26	7	17.720.000	0,00	17,72	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Pemeliharaan Asset Tanah Pemerintah Kota Pangkalpinang						1	-					0	-	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Monitoring pelaksanaan perizinan (IPPL dan Izin Lokasi)	terlaksananya pengawasan dalam hal perizinan	0	100.000.000	-	-	100	120.000.000	100	99.894.000	100,00	83,25	100	99.894.000	0,00	99,89	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	terselesaikannya konflik antara pemerintah kota dengan masyarakat	0	50.000.000	-	-	3	97.500.000	3	61.165.000	100,00	62,73	3	61.165.000	0,00	122,33	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Pengamanan Aset	terlaksananya pengamanan asset	0	2.300.000.000	-	-	15	48.499.800	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											87,50	81,18		15,00	57,89	
			PREDIKAT KINERJA											T	T		SR	R	
			Lingkungan Hidup																
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			8.864.424.605		931.335.548		746.438.598		697.984.109				1.629.319.657			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi dan listrik	60	1.453.656.015	12	114.194.194	12	111.000.000	12	96.134.800	100,00	86,61	24	210.328.994	40,00	14,47	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang tersedia	60	815.283.750	12	132.625.000	12	153.350.000	12	151.275.000	100,00	98,65	24	283.900.000	40,00	34,82	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	jumlah jasa kebersihan kantor	60	213.142.990	12	32.278.500	12	27.000.000	12	26.720.000	100,00	98,96	24	58.998.500	40,00	27,68	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=8*8		11=10/5*100%			
					K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Penyediaan jasa Perbaikan peralatan kerja	jumlah peralatan kerja yang mendapat perbaikan	60	503.650.000	12	39.660.000	12	30.000.000	12	9.919.000	100,00	33,06	24	49.579.000	40,00	9,84	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah jenis alat tulis yang tersedia	60	256.667.000	12	35.127.000	12	21.500.000	12	16.837.300	100,00	78,31	24	51.964.300	40,00	20,25	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah jenis barang cetakan dan jumlah penggandaan	60	210.999.850	12	22.938.700	12	9.705.000	12	9.239.100	100,00	95,20	24	32.177.800	40,00	15,25	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	jumlah jenis komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor	60	32.000.000	12	9.870.000	12	3.250.000	12	3.249.800	100,00	99,99	24	13.119.800	40,00	41,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah waktu tersedianya makan dan minum	60	83.500.000	12	13.500.000	12	7.140.000	12	7.140.000	100,00	100,00	24	20.640.000	40,00	24,72	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah pegawai yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	60	2.250.000.000	12	349.867.154	12	195.093.598	12	195.069.109	100,00	99,99	24	544.936.263	40,00	24,22	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Penyediaan jasa penunjang administrasi perkantoran	jumlah jasa penunjang administrasi perkantoran yang tersedia	60	1.045.525.000	12	181.275.000	12	188.400.000	12	182.400.000	100,00	96,82	24	363.675.000	40,00	34,78	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	93,51			40,00	24,70	
			PREDIKAT KINERJA										ST	ST			SR	SR	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			3.556.506.408		562.695.650		353.681.500		253.541.680				636.237.310			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur	5	88.000.000		21.872.000	1	30.000.000	1	19.250.000	100,00	64,17	1	41.122.000	20,00	46,73	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Pemeliharaan rutin/ berkala gedung Kantor	jumlah pemeliharaan gedung kantor	5	1.948.655.663		310.034.000	1	25.000.000	1	24.917.500	100,00	99,67	1	334.951.500	20,00	17,19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan	8	1.519.852.745	1	250.789.650	8	298.681.500	6	209.374.160	75,00	70,10	7	460.163.810	87,50	30,28	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Bank Sampah	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Bank Sampah					1	-					0	-			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										91,67	127,16			42,50	31,40	
			PREDIKAT KINERJA										ST	ST			SR	SR	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			1.223.200.000		49.796.721		34.694.400		18.549.400				68.346.121			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah pegawai/ASN yang mendapat pendidikan dan pelatihan formal	50	350.000.000	42	49.796.721	10	4.694.400	10	4.694.400	100,00	100,00	52	54.491.121	104,00	15,57	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Sosialisasi Penyuluhan Narkoba	Jumlah pegawai/ASN yang mengikuti Sosialisasi Penyuluhan Narkoba	48	325.000.000	48	-	10	-					48	-	100,00	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Peningkatan dan Pendataan Objek Retribusi Persampahan	Jumlah Objek Retribusi Persampahan yang didata	4	400.000.000	0	-	10	-					0	-	0,00	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Peningkatan Penerimaan PAD	Jumlah Peningkatan Penerimaan PAD yang diperoleh	5	148.200.000	0	-	1	30.000.000	0	13.855.000	0,00	46,18	0	13.855.000	0,00	9,35	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										50,00	63,47			51,00	6,23	
			PREDIKAT KINERJA										SR	R			R	SR	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			336.750.000		14.599.450		12.900.000		11.911.850				26.511.300			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja skpd	5	20.150.000	1	3.150.000	1	2.350.000	1	2.311.500	100,00	98,36	2	5.461.500	40,00	27,10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan semesteran	5	20.150.000	1	3.149.850	1	2.350.000	1	2.339.350	100,00	99,55	2	5.489.200	40,00	27,24	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun	5	20.150.000	1	3.150.000	1	2.350.000	1	2.340.200	100,00	99,58	2	5.490.200	40,00	27,25	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Penyusunan RENJA (RKT, RKA dan DPA)	jumlah dokumen kerja (RKT,RKA,DPA)	5	20.150.000	1	3.150.000	1	2.350.000	1	2.296.250	100,00	97,71	2	5.446.250	40,00	27,03	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal	jumlah laporan SPM	5	20.150.000	1	1.999.600	1	3.500.000	1	2.624.550	100,00	74,99	2	4.624.150	40,00	22,95	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Penyusunan Profil Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah buku profil DLH	20	135.000.000			1	-					0	-	0,00	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Forum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Forum Perangkat Darah	4	60.000.000			1	-					0	-	0,00	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		4	40.000.000			1	-					0	-	0,00	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	92,34			25,00	16,45	
			PREDIKAT KINERJA										ST	ST			SR	SR	
			Program Pengendalian Persampahan			75.480.000.000		-		16.781.826.155		15.372.638.734				15.232.111.234			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	75	960.000.000			3	169.900.000	3	169.536.500	100,00	99,79	3	169.536.500	4,00	17,66	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Peningkatan operasi dan Pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah prasarana dan sarana persampahan yang mendapatkan peningkatan operasi dan pemeliharaan	60	54.000.000.000			12	13.084.431.378	12	12.203.630.160	100,00	93,27	12	12.203.630.160	20,00	22,60	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6*8		11=10/5*100%			
				K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Pengendalian pencegahan pencemaran sampah liar	Jumlah pelaksanaan pengendalian pencegahan pencemaran sampah liar	16	260.000.000		16	-					0	-	0,00	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Operasional TPA Sistem Sanitari Landfil	Jumlah TPA yang beroperasi	1	15.000.000.000		1	3.247.494.777	1	2.759.007.470	100,00	84,96	1	2.759.007.470	100,00	18,39	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Rehabilitasi sarana dan prasarana persampahan	Jumlah sarana dan prasarana persampahan yang mendapatkan rehabilitasi	16	2.650.000.000		26	-					0	-	0,00	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Kerjasama penanganan kebersihan kota	Jumlah pelaksanaan kerjasama penanganan kebersihan kota	15	-		8	-					0	-	0,00	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Sosialisasi pemilihan dan pengolahan sampah masyarakat	Jumlah peserta Sosialisasi	400	-		100	-					0	-	0,00	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Lomba Kebersihan Tingkat Kelurahan	Jumlah pemenang lomba	24	610.000.000		1	-					0	-	0,00	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Penataan TPA	Jumlah pembangunan	4	2.000.000.000		1	100.000.000	1	99.937.104	100,00	99,94	1	99.937.104	25,00	5,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Penyelenggaraan TPS3R Kawa Begawe dan TPS3R Berkah					2	30.000.000	2	26.448.500	100,00	88,16	2	26.448.500			DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Penyusunan Review DED TPA					1	150.000.000	1	114.279.000	100,00	76,19	1	114.279.000			DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	91,80		16,56	7,07		
			PREDIKAT KINERJA										ST	ST		SR	SR		
			Program Penataan Lingkungan Hidup			13.184.110.000		-		1.635.112.688		1.421.364.428			1.421.364.428			DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura	Jumlah pelaksanaan koordinasi penilaian kota sehat/ adipura	16	2.000.000.000		4	75.000.000	2	49.631.000	50,00	66,17	2	49.631.000	12,50	2,48	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Jumlah perusahaan yang diawasi pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	180	255.255.000		45	19.601.149	31	13.794.500	68,89	70,38	31	13.794.500	17,22	5,40	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Terpeliharanya aset sumber daya alam	4	2.000.000.000		1	432.973.513	1	430.145.060	100,00	99,35	1	430.145.060	25,00	21,51	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Pemantauan Bahan perusak ozone	Teridentifikasinya potensi penggunaan bahan perusak ozone skala kota dan sebagai bahan pembuat kebijakan	80	180.000.000		20	3.225.000	20	3.150.000	100,00	97,67	20	3.150.000	25,00	1,75	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Pembinaan Program Adiwiyata	Jumlah sekolah yang mendapat pembinaan	40	520.000.000		10	-					0	-	0,00	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Penanganan kasus pengaduan masyarakat akibat pencemaran kerusakan lingkungan	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	20	255.255.000		5	25.100.000	5	21.836.718	100,00	87,00	5	21.836.718	25,00	8,55	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Akreditasi laboratorium	Jumlah peserta kompetensi analisis laboratorium	100	100.000.000		80	44.475.000	80	30.488.000	100,00	68,55	80	30.488.000	80,00	30,49	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Penyelenggaraan Sekretariat komisi AMDAL	Jumlah kegiatan/usaha yang melenkapi dokumen Amdal	8	455.690.000		2	50.100.000	2	50.006.500	100,00	99,81	2	50.006.500	25,00	10,97	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Akselerasi Laboratorium	Terbentuknya laboratorium yang terakreditasi dan pengawasan yang kontinyu oleh KAN	1	108.000.000		1	4.906.402	1	4.906.402	100,00	100,00	1	4.906.402	100,00	4,54	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah (IKPLHD)	4	500.510.000		1	37.900.000	1	35.458.000	100,00	93,56	1	35.458.000	25,00	7,08	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Jumlah dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)	4	1.350.000.000		1	200.000.000	1	162.612.000	100,00	81,31	1	162.612.000	25,00	12,05	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Pengawasan Limbah B3	Jumlah perusahaan yang diawasi dalam pengolahan limbah B3	40	200.000.000		10	36.300.000	10	30.300.000	100,00	83,47	10	30.300.000	25,00	15,15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Pendataan dan pemetaan penghasil limbah B3	Jumlah dokumen hasil pendataan dan pemetaan penghasil limbah B3	8	220.000.000		2	-					0	-	0,00	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Penyusunan Kebijakan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen penyusunan kebijakan lingkungan hidup	1	50.000.000		1	-					0	-	0,00	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan	Jumlah sarana dan prasarana laboratorium yang sesuai dengan standar akreditasi	4	150.000.000		1	19.851.000	1	19.851.000	100,00	100,00	1	19.851.000	25,00	13,23	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Pengadaan alat laboratorium lingkungan	Tersedianya Alat Laboratorium Lingkungan	1			1	-					0	-	0,00	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	Tersedianya data kualitas air dan udara lingkungan di Kota Pangkalpinang	4	120.000.000		1	-					0	-	0,00	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Kaji Ulang Dokumen Laboratorium	Tersusunya hasil kaji ualang dokumen lamoratorium mutu	4	60.000.000		1	-					0	-	0,00	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Kaji banding laboratorium terakreditasi	Tercapainya hasil kaji banding dengan laboratorium yang terakreditasi	4	160.000.000		1	31.192.200	1	30.378.529	100,00	97,39	1	30.378.529	25,00	18,99	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Koordinasi Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup	Jumlah koordinasi penilaian dokumen lingkungan hidup	400	340.000.000		100	26.299.000	100	26.243.000	100,00	99,79	100	26.243.000	25,00	7,72	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Teridentifikasinya GRK dan profil emisi GRK	200	220.000.000		100	4.687.500	100	3.787.500	100,00	80,80	100	3.787.500	50,00	1,72	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
1	2	3	4		5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6*8		11=10/5*100%		12					
					K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Pengendalian kerusakan hutan dan lahan	Teridentifikasinya potensi kerusakan tanah untuk produksi biomassa dalam bentuk peta status kerusakan tanah/lahan untuk produksi biomassa dan sebagai bahan penetapan kebijakan status kerusakan tanah/lahan untuk produksi biomassa	4	193.200.000			1	7.558.400	1	7.558.400	100,00	100,00	1	7.558.400	25,00	3,91	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan sumber pencemaran institusi dan non institusi	terpantaunya hasil evaluasi rekomendasi sumber pencemaran institusi dan non institusi	80	270.000.000			20	-					0	-	0,00	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
			Inventarisasi data base ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah Kota Pangkalpinang	Terhimpunnya data ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah Kota Pangkalpinang	5	230.000.000			1	41.994.251	1	36.295.200	100,00	86,43	1	36.295.200	20,00	15,78	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
			Penyusunan Rencana Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH)	5	928.200.000			5	-					0	-	0,00	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
			Pelayanan UPTD Laboratorium Lingkungan	Terpantaunya kualitas lingkungan berdasarkan status mutu	110	1.720.000.000			95	458.600.473	95	451.574.937	100,00	98,47	95	451.574.937	86,36	26,25	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
			Pengambilan Sampling Udara	Terpantaunya udara ambien di titik lokasi tertentu (Transportasi, Pemukiman, Industri dan Perkantoran)	16	120.000.000			16	3.807.800	16	3.807.800	100,00	100,00	16	3.807.800	100,00	3,17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
			Pengelolaan dan pengolahan data hasil uji kualitas air dan udara	teridentifikasinya indeks kualitas air (IKA) dan udara (IKU)	92	478.000.000			92	11.541.000	92	9.539.880	100,00	82,66	92	9.539.880	100,00	2,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																95,94	128,04		30,04	7,60	
			PREDIKAT KINERJA																ST	ST		SR	SR	
			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil																					
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3.416.882.700		570.170.487		700.387.926		674.299.256				952.117.843			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang tertangani	60	1.023.800.000	12	148.679.296	12	116.981.726	12	106.149.498	100,00	90,74	24	254.828.794	40,00	24,89	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi keuangan yang tertangani	60	219.832.000	12	38.420.000	12	35.863.000	12	34.850.000	100,00	97,18	24	73.270.000	40,00	33,33	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor yang tertangani	60	194.244.100	12	31.525.000	12	33.317.100	12	32.817.100	100,00	98,50	24	64.342.100	40,00	33,12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah waktu penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja yang tertangani	60	244.790.900	12	37.819.000	12	36.860.100	12	36.860.000	100,00	100,00	24	74.679.000	40,00	30,51	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
			Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	Jumlah waktu layanan penyediaan ATK yang tertangani	60	166.705.100	12	21.171.000	12	19.583.000	12	19.583.000	100,00	100,00	24	40.754.000	40,00	24,45	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
			Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah waktu barang cetakan dan penggandaan yang tertangani	60	124.024.000	12	19.179.000	12	18.788.000	12	18.788.000	100,00	100,00	24	37.967.000	40,00	30,61	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
			Penyediaan Komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	Jumlah waktu layanan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tertangani	60	70.103.600	12	9.716.900	12	11.486.000	12	11.486.000	100,00	100,00	24	21.202.900	40,00	30,25	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman yang tertangani	60	123.383.000	12	14.848.000	12	12.894.000	12	12.732.000	100,00	98,74	24	27.580.000	40,00	22,35	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	300	1.250.000.000	62	248.812.291	20	110.000.000	20	106.681.758	100,00	98,80	82	357.494.049	27,33	28,60	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	55	510.597.500	26	103.976.000	16	304.615.000	16	292.351.900	100,00	95,97	42	396.327.900	76,36	77,62	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																100,00	96,28		98,59	28,88	
			PREDIKAT KINERJA																ST	ST		SR	SR	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			907.704.000		120.527.330		431.487.421		428.133.872							DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
			Pemeliharaan Rutin/berkala gedung/kantor	Jumlah gedung yang mendapat pemeliharaan	5	233.975.000	1	22.500.000	1	21.300.000	1	21.300.000	100,00	100,00	2	43.800.000	40,00	18,72	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	15	573.729.000	3	98.027.330	3	93.692.500	3	92.338.872	100,00	98,56	6	190.366.202	40,00	33,18	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah jenis rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	2	100.000.000			2	202.080.000	2	201.870.000	100,00	99,90	2	201.870.000	100,00	201,87	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pengkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6+8		11=10/5*100%			
					K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah unit perlengkapan gedung kabtor yang tersedia	13	172.600.000	3	31.446.250	28	114.414.921	28	112.625.000	100,00	98,44	31	144.071.250	238,46	83,47	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)													100,00	99,22			104,62	84,31	
PREDIKAT KINERJA													ST	ST			ST	T	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			10.000.059		-		6.200.000		6.200.000				6.200.000			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba	Tersosialisasinya pencegahan penyalahgunaan narkoba	1	10.000.059			1	6.200.000	1	6.200.000	100,00	100,00	1	6.200.000	100,00	62,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)													100,00	100,00			100,00	62,00	
PREDIKAT KINERJA													ST	ST			ST	R	
			Program peningkatan pengembangan elstem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			236.356.150		20.135.250		20.499.800		18.599.600				38.734.850			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja	5	39.506.850	1	4.413.050	1	3.500.000	1	3.500.000	100,00	100,00	2	7.913.050	40,00	20,03	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	5	28.830.000	1	2.665.000	1	4.000.000	1	3.399.800	100,00	85,00	2	6.064.800	40,00	21,04	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	5	31.342.100	1	3.921.050	1	4.000.000	1	3.400.000	100,00	85,00	2	7.321.050	40,00	23,36	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Penyusunan RENJA (RKT, RKA dan DPA)	Jumlah dokumen perencanaan jangka pendek yang disusun	5	39.624.350	1	3.144.150	1	4.999.800	1	4.299.800	100,00	86,00	2	7.443.950	40,00	18,79	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD	Jumlah laporan hasil implementasi SPIP yang disusun	5	57.052.850	2	5.992.000	2	4.000.000	1	4.000.000	50,00	100,00	3	9.992.000	60,00	17,51	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Forum OPD	Tersosialisasinya rencana kerja dinas DUKCAPIL tahun N+1	4	40.000.000			1	-					0	-	0,00	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)													90,00	90,73			36,67	16,79	
PREDIKAT KINERJA													T	T			SR	SR	
			Program Penataan Administraiasi Kependudukan			15.850.277.420		2.707.474.786		2.698.030.020		2.438.641.911				4.911.083.897			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	Jumlah waktu pengoperasian SIAK	60	6.736.966.025	12	1.335.652.019	12	1.148.204.500	12	1.124.160.500	100,00	97,91	24	2.459.812.519	40,00	36,51	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Jumlah jenis laporan informasi kependudukan	6	356.920.895	2	80.070.045	2	-					2	80.070.045	33,33	22,43	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan Monev yang disusun	20	96.253.400	2	21.076.500	2	10.900.000	2	9.299.300	100,00	85,31	4	30.375.800	20,00	31,56	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Pemutakhiran dokumen catatan sipil	Jumlah data dokumen capil yang dimutakhirkan	16700	671.586.000	8072	189.256.550	350	-					8072	189.256.550	48,34	28,18	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah laporan IKM yang disusun	10	224.400.300	2	49.099.102	2	25.689.000	2	23.562.100	100,00	91,72	4	72.661.202	40,00	32,38	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Penyediaan sarana pelayanan publik bidang kependudukan	Jumlah jenis sarana pelayanan bidang kependudukan	16	787.827.350	5	527.039.020	2	68.279.220	2	68.278.920	100,00	100,00	7	595.317.940	43,75	75,56	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Penyediaan sarana pelayanan publik bidang capil	Jumlah jenis sarana pelayanan bidang capil	6	426.426.550	3	146.909.550	1	13.490.050	1	13.490.050	100,00	100,00	4	160.399.600	66,67	37,61	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan	Jumlah masyarakat yang mendapat layanan administrasi kependudukan diluar jam kerja	24500	2.122.438.600	5108	358.372.000	4850	162.482.250	3213	160.274.250	66,25	98,64	8321	518.646.250	33,96	24,44	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (DAK+APBD)	jumlah jenis pengelolaan SIAK	20	462.667.900			2	14.082.400	2	11.778.400	100,00	83,64	2	11.778.400	10,00	2,55	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Pelayanan dokumen kependudukan (DAK)	Jumlah jenis pelayanan keliling ke masyarakat	8	1.250.640.400			1	249.719.075	1	239.036.755	100,00	95,72	1	239.036.755	12,50	19,11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Penerbitan Dokumen Kependudukan dan identitas resmi anak (DAK)	Jumlah jenis sarana penerbitan dokumen kependudukan dan identitas resmi anak	8	2.114.150.000			2	502.599.000	2	500.413.800	100,00	99,57	2	500.413.800	25,00	23,67	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan (DAK)	Jumlah jenis agenda kegiatan tingkat pusat dan daerah	15	600.000.000			4	60.091.725	3	53.295.036	75,00	88,69	3	53.295.036	20,00	8,88	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capelan Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capelan Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capelan Kinerja dan Realisasi Anggaran Ranja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capelan Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4	6		6		7		8		9=8/7*100%		10=6*8		11=10/5*100%				
				K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Adminstrasi Kependudukan	Jumlah jenis pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan	12	369.056.200			3	38.192.800	3	38.192.800	100,00	100,00	3	38.192.800	25,00	10,35	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Penyediaan Peralatan Server						1	404.300.000	1	196.860.000	100,00	48,69	1	196.860.000			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											95,10	90,39		32,20	27,17		
			PREDIKAT KINERJA											ST	T			SR	SR	
			Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																	
			Program Keluarga Berencana			18.544.684.406		1.701.457.709		3.239.286.108		2.937.107.849				4.638.565.558			DINAS KESEHATAN	
			Penyebaran KIE-KKBPK Melalui Kemitraan Dengan Media Massa	Terlaksananya kegiatan penyebaran KIE-KKBPK	32	301.665.000			8	-					0	-	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN	
			Penyebaran KIE-KKBPK Melalui Kemitraan Dengan Media Massa	Jumlah KIE-KKBPK melalui media elektronik dan media cetak (Kali)	8	27.438.608			8	27.438.608	8	27.357.500	100,00	99,70	8	27.357.500	100,00	99,70	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	
			Orientasi Pendidik Sebaya Pusat Informasi Konseling-Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-R)	Terlaksananya layanan orientasi pendidik sebaya pusat informasi konseling kesehatan reproduksi remaja (PIK-R)	125	219.519.300,00	50	57.935.000	25	32.753.000	25	32.753.000	100,00	100,00	75	90.688.000	60,00	41,31	DINAS KESEHATAN	
			Lomba - lomba dalam rangka hari keluarga nasional	Terlaksananya lomba-lomba hari keluarga nasiona	24	232.050.000			6	-					0	-	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN	
			Pembinaan duta generasi berencana (genre)	terlaksananya pemilihan duta genre dan terpilihnya pemenang lomba	210	295.763.968,50	50	42.990.000	40	-					50	42.990.000	23,81	14,54	DINAS KESEHATAN	
			Temu Kader KB dalam rangka Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)	terlaksananya lomba dan temu kader tingkat provinsi serta acara jambore HARGANAS XXVI se-provinsi Kep. Babel	175	3.248.700.000	1	71.961.240	35	-					1	71.961.240	0,57	2,22	DINAS KESEHATAN	
			Kegiatan Bakti IBI, PKK, TNI, dan Bhayangkara	Terlaksananya kegiatan Bakti IBI, PKK dan Bhayangkara	3900	617.227.800			750	26.405.000	750	-	100,00	0,00	750	-	19,23	0,00	DINAS KESEHATAN	
			Pengukuran Analisis dampak kependudukan	Terlaksananya pengukuran analisis dampak kependudukan	60	120.000.000			15	-					0	-	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN	
			Penunjang Pelayanan Keluarga Berencana Balai Penyuluhan Lapangan	Terlaksananya kegiatan penunjang pelayanan keluarga berencana balai penyuluh lapangan	210	1.650.734.000	4	412.196.700	42	220.134.448	0	220.134.448	0,00	100,00	4	632.331.148	1,90	38,31	DINAS KESEHATAN	
			Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Terlaksananya kegiatan bantuan operasional berencana	24420	2.297.295.000	12	404.912.769	12	157.881.153	6	157.881.103	50,00	100,00	18	562.793.872	0,07	24,50	DINAS KESEHATAN	
			Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Jumlah waktu layanan yang diberikan bantuan operasional keluarga berencana (Bulan)	6	266.678.897			6	266.678.897	6	252.325.862	100,00	94,62	6	252.325.862	100,00	94,62	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	
			Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi	Terlaksananya distribusi alat dan obat kontrasepsi	60	102.000.000	12	25.392.000	18	14.610.000	18	14.610.000	100,00	100,00	30	40.002.000	50,00	39,22	DINAS KESEHATAN	
			Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi	Jumlah fasilitas kesehatan yang didistribusi alat dan obat kontrasepsi (Faskes)	18	28.086.000			18	28.086.000	18	24.698.031	100,00	87,94	18	24.698.031	100,00	87,94	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	
			Integrasi Kampung Keluarga Berencana	Terlaksananya Intergrasi di kampung KB di setiap Kecamatan	35	3.752.248.500	12	686.070.000	12	141.680.000	4	141.680.000	33,33	100,00	16	827.750.000	45,71	22,06	DINAS KESEHATAN	
			Integrasi Kampung Keluarga Berencana	Jumlah Kampung KB yang menjadi sasaran (Kampung KB)	12	425.390.000			12	425.390.000	12	374.745.000	100,00	88,09	12	374.745.000	100,00	88,09	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	
			Pembangunan/Alih Fungsi/Pengembangan Balai Penyuluh KB	Terlaksananya Pembangunan Balai Penyuluh KB baru	1	388.788.000			1	18.584.000	0	17.450.000	0,00	93,90	0	17.450.000	0,00	4,49	DINAS KESEHATAN	
			Pembangunan/ Alih Fungsi/Pengembangan Balai Penyuluh KB	Jumlah Balai Penyuluh KB yang Dibangun (Balai Penyuluh KB)	1	370.204.000			1	370.204.000	1	305.358.000	100,00	82,48	1	305.358.000	100,00	82,48	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	
			Orientasi Pendidik Sebaya Pusat Informasi Konseling-Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-R)	Jumlah Siswa SMA/SMK dan Mahasiswa yang menjadi Pendidik Sebaya PIK-R yang terlatih (Siswa/Mahasiswa)	25	1.000			25	1.000	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	
			Pembinaan program oleh kader	Terlaksananya kegiatan pembinaan program oleh kader	555	1.543.782.240			11	231.000.000	0	231.000.000	0,00	100,00	0	231.000.000	0,00	14,96	DINAS KESEHATAN	
			Pembinaan Program Oleh Kader	Jumlah waktu layanan pembinaan program oleh kader (Bulan)	6	21.000.000			6	21.000.000	6	21.000.000	100,00	100,00	6	21.000.000	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	
			Dukungan Media KIE dan Manajemen BOK	Terlaksananya Dukungan media KIE dan Manajemen BOK	35	805.697.092,20			9	25.470.000	0	25.470.000	0,00	100,00	0	25.470.000	0,00	3,16	DINAS KESEHATAN	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pengkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rerja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=8*8		11=10/5*100%			
				K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Dukungan Media KIE dan Manajemen BOK	Jumlah alat/ media KIE yang disediakan (Jenis)	9	112.840.000			9	112.840.000	9	34.371.500	100,00	30,46	9	34.371.500	100,00	30,46	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
			Penunjang Pelayanan Keluarga Berencana Balai Penyuluhan Lapangan	Jumlah kelurahan yang mendapat pelayanan KB (Kelurahan)	42	98.925.000			42	218.250.000	42	197.850.000	100,00	90,65	42	197.850.000	100,00	200,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
			Pembangunan/Alih Fungsi/Rehab/Pengembangan Penyuluh KB	Terlaksananya Rehab / Pengembangan Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi	1	278.197.000			1	13.043.000	0	12.500.000	0,00	95,84	0	12.500.000	0,00	4,49	DINAS KESEHATAN
			Pembangunan/ Alih Fungsi/ Rehab/Pengembangan Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi	Terlaksananya Rehab/ Pengembangan Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi (Paket)	1	265.154.000			1	265.154.000	1	233.350.555	100,00	88,01	1	233.350.555	100,00	88,01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
			Pengadaan Sarana KIE KIT dan Media Lini Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Sarana KIE KIT dan Media Lini Lapangan	15	78.196.000			15	-					0	-	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
			Pengadaan Sarana KIE KIT dan Media Lini Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Sarana KIE KIT dan Media Lini Lapangan (Paket)	15	78.196.000			15	78.196.000	15	76.416.900	100,00	97,72	15	76.416.900	100,00	97,72	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
			Pengadaan Media/Alat Pengolah Data	Terlaksananya pengadaan media /alat pengolah data	3	145.739.000			3	-					0	-	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
			Pengadaan Media/Alat Pengolah Data	Terlaksananya Pengadaan Media/ Alat Pengolah Data (Jenis)	3	145.739.000			3	145.739.000	3	145.022.000	100,00	99,51	3	145.022.000	100,00	99,51	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
			Pengembangan Balai Penyuluh KB	Terlaksananya Pengembangan Balai Penyuluh KB	5	229.858.000			5	145.496.000	4	145.496.000	80,00	100,00	4	145.496.000	80,00	63,30	DINAS KESEHATAN
			Pengembangan Balai Penyuluh KB	Terlaksananya pengembangan balai penyuluh kb (Jenis)	5	84.362.000			5	84.362.000	5	81.249.150	100,00	96,31	5	81.249.150	100,00	96,31	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
			Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB	Terlaksananya Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB	35	144.319.000			35	-					0	-	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
			Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB	Terlaksananya Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB (Unit)	35	144.319.000			35	144.319.000	35	142.647.000	100,00	98,84	35	142.647.000	100,00	98,84	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
			Pengadaan sarana dan prasarana rumah data kependudukan di kampung KB Percontohan	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan di Kampung KB	5	24.571.000			5	-					0	-	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan di kampung KB Percontohan	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan di Kampung KB (Jenis)	5	24.571.000			5	24.571.000	4	21.741.800	80,00	88,49	4	21.741.800	80,00	88,49	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										70,90	94,14			47,47	46,42	
			PREDIKAT KINERJA										S	ST			SR	SR	
			Perhubungan																
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			33.191.875.000		6.918.875.000		4.941.755.100		4.819.725.984				11.738.600.984			DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tertangani	60	30.300.000.000	12	6.500.000.000	12	4.343.410.000	12	4.234.899.532	100,00	97,50	24	10.734.899.532	40,00	35,43	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah waktu layanan jasa administrasi keuangan yang tertangani	60	664.525.000	12	120.525.000	12	293.215.000	12	291.330.000	100,00	99,36	24	411.855.000	40,00	61,98	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah waktu layanan jasa kebersihan kantor yang tertangani	60	285.350.000	12	48.350.000	12	52.645.100	12	52.040.500	100,00	98,85	24	100.390.500	40,00	35,18	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah waktu layanan jasa perbaikan peralatan kerja yang tertangani	60	130.000.000	12	15.000.000	12	12.000.000	12	9.568.600	100,00	79,74	24	24.568.600	40,00	18,90	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah waktu layanan penyediaan ATK yang tertangani	60	135.000.000	12	25.000.000	12	20.000.000	12	19.970.000	100,00	99,85	24	44.970.000	40,00	33,31	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah waktu layanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tertangani	60	155.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	19.999.800	100,00	100,00	24	39.999.800	40,00	25,81	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah waktu layanan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tertangani	60	25.000.000	12	5.000.000	12	1.770.000	12	1.770.000	100,00	100,00	24	6.770.000	40,00	27,08	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah waktu layanan penyediaan peralatan rumah tangga yang tertangani	60	55.000.000	12	15.000.000	12	4.800.000	12	4.800.000	100,00	100,00	24	19.800.000	40,00	36,00	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah waktu layanan penyediaan makanan dan minuman yang tertangani	60	52.000.000	12	5.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	100,00	100,00	24	15.000.000	40,00	28,85	DINAS PERHUBUNGAN
			Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah waktu layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang tertangani	60	1.250.000.000	12	150.000.000	12	160.155.000	12	155.842.532	100,00	97,31	24	305.842.532	40,00	24,47	DINAS PERHUBUNGAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Deerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6+8		11=10/5*100%		12
					K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penyediaan Jasa Perbaikan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu layanan jasa perbaikan perlengkapan kantor	60	140.000.000	12	15.000.000	12	23.760.000	12	19.505.000	100,00	82,09	24	34.505.000	40,00	24,65	DINAS PERHUBUNGAN
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											100,00	144,10		40,00	31,97	
			PREDIKAT KINERJA											ST	ST		SR	SR	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			2.975.000.000		535.000.000		1.069.755.000		1.034.483.911				1.149.778.911			DINAS PERHUBUNGAN
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	1	115.000.000	1	30.000.000	1	59.500.000	1	57.430.000	100,00	96,52	2	87.430.000	200,00	76,03	DINAS PERHUBUNGAN
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Jenis peralatan gedung kantor yang tersedia	4	130.000.000			2	25.000.000	2	25.000.000	100,00	100,00	2	25.000.000	50,00	19,23	DINAS PERHUBUNGAN
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	5	700.000.000	1	125.000.000	1	159.190.000	1	158.791.000	100,00	99,75	2	283.791.000	40,00	40,54	DINAS PERHUBUNGAN
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	75	1.760.000.000	13	335.000.000	14	328.800.000	14	312.666.511	100,00	95,09	27	647.666.511	36,00	36,80	DINAS PERHUBUNGAN
			Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dapat diperbaiki	11	270.000.000	3	45.000.000	2	77.265.000	2	60.891.400	100,00	78,81	5	105.891.400	45,45	39,22	DINAS PERHUBUNGAN
			Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor yang dibangun	1	200.000.000			1	200.000.000	1	199.912.000	100,00	99,96	1	199.912.000	100,00	99,96	DINAS PERHUBUNGAN
			Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dapat direhab/perbaiki	1	45.000.000			1	220.000.000	1	219.793.000	100,00	99,91	1	219.793.000	100,00	488,43	DINAS PERHUBUNGAN
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											100,00	96,70		81,64	114,31	
			PREDIKAT KINERJA											ST	ST		T	ST	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			795.000.000		130.000.000		-		-				130.000.000			DINAS PERHUBUNGAN
			Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	53	545.000.000	6	80.000.000	8	-		-			6	80.000.000	11,32	14,68	DINAS PERHUBUNGAN
			Monitoring dan Evaluasi di Bidang Perhubungan	Jumlah Laporan Monitoring / Evaluasi di bidang Perhubungan	15	250.000.000	3	50.000.000	3	-		-			3	50.000.000	20,00	20,00	DINAS PERHUBUNGAN
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)														15,66	17,34	
			PREDIKAT KINERJA														SR	SR	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			146.000.000		10.000.000		17.500.000		12.397.500				22.397.500			DINAS PERHUBUNGAN
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	15	16.500.000	3	2.500.000	1	3.500.000	1	2.980.000	100,00	85,14	4	5.480.000	26,67	33,21	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	15	16.500.000	3	2.500.000	1	3.500.000	1	3.155.000	100,00	90,14	4	5.655.000	26,67	34,27	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	15	16.500.000	3	2.500.000	1	2.000.000	1	2.000.000	100,00	100,00	4	4.500.000	26,67	27,27	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyusunan RENJA (RKT, RKA dan DPA)	Jumlah laporan Renja (RKT,RKA,DPA) yang disusun	15	56.500.000	3	2.500.000	1	5.000.000	1	4.262.500	100,00	85,25	4	6.762.500	26,67	11,97	DINAS PERHUBUNGAN
			Pelaksanaan Forum Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Jumlah laporan SPIP yang disusun	4	40.000.000			1	3.500.000	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											80,00	70,84		21,33	21,35	
			PREDIKAT KINERJA											T	S		SR	SR	
			Program Pelayanan Perhubungan			69.254.460.000		9.339.014.712		7.807.782.420		7.505.168.150				16.844.172.862			DINAS PERHUBUNGAN
			Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	4	730.000.000	1	80.000.000	1	600.000.000	1	587.752.500	100,00	97,96	2	667.752.500	50,00	91,47	DINAS PERHUBUNGAN
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	8	1.300.000.000			2	2.336.915.000	2	2.257.558.895	100,00	96,60	2	2.257.558.895	25,00	173,66	DINAS PERHUBUNGAN
			Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light	Jumlah Traffic Light dan warning light yang dilakukan pemeliharaan	60	775.000.000	12	50.000.000	12	99.514.000	9	98.059.500	75,00	98,54	21	148.059.500	35,00	19,10	DINAS PERHUBUNGAN
			Perawatan/Pergantian Rambu-Rambu jalan	Jumlah perawatan/penggantian rambu-rambu lalu lintas	410	525.000.000	50	75.000.000	50	53.174.000	0	1.160.000	0,00	2,18	50	76.160.000	12,20	14,51	DINAS PERHUBUNGAN
			Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana UPTD.PPTP	Jumlah jenis prasarana UPTD PPTP yang dapat dilakukan rehabilitasi/pemeliharaan	35	877.500.000	7	85.000.000	7	212.046.500	7	190.210.000	100,00	89,70	14	275.210.000	40,00	31,36	DINAS PERHUBUNGAN
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung kantor UPTD.PPTP	Jumlah gedung kantor UPTD PPTP yang dapat dilakukan rehabilitasi/pemeliharaan	5	730.000.000	1	110.000.000	1	124.022.000	1	123.947.000	100,00	99,94	2	233.947.000	40,00	32,05	DINAS PERHUBUNGAN
			Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	Jumlah pelayanan pelaksanaan pendapatan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal (loked)	15	330.000.000	3	50.000.000	3	54.279.573	2	53.290.000	66,67	98,18	5	103.290.000	33,33	31,30	DINAS PERHUBUNGAN
			Penertiban Angkutan Kota	Jumlah waktu pelaksanaan penertiban angkutan kota	60	240.000.000	12	30.000.000	12	46.800.000	12	46.800.000	100,00	100,00	24	76.800.000	40,00	32,00	DINAS PERHUBUNGAN
			Pengawasan dan Pengendalian Parkir	Jumlah titik/zona pengawasan dan pengendalian parkir	1250	200.000.000	250	20.000.000	250	40.000.000	250	39.900.000	100,00	99,75	500	59.900.000	40,00	29,95	DINAS PERHUBUNGAN
			Pemilihan Awak Teladan	Jumlah peserta pemilihan awak teladan	200	190.000.000	40	30.000.000	40	-		-			40	30.000.000	20,00	15,79	DINAS PERHUBUNGAN
			Pemilihan Pelajar Disiplin Lalu Lintas	jumlah peserta yang mengikuti pemilihanpelajar disiplin lalu lintas	250	255.000.000	50	28.400.000	50	-		-			50	28.400.000	20,00	11,14	DINAS PERHUBUNGAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pengkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Reraja PD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=8*6		11=10/5*100%		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Pengawasan dan Penertiban Parkir	Jumlah titik/zona pengawasan dan penertiban parkir	1250	190.000.000	250	197.444.850	250	349.199.850	250	338.374.850	100,00	96,90	500	535.819.700	40,00	282,01	DINAS PERHUBUNGAN
			Penertiban Angkutan Lebaran (H-7 dan H+7)	Jumlah titik/zona pengawasan penertiban angkutan (H-7+H+7)	50	200.000.000	10	35.000.000	10	-				10	35.000.000	20,00	17,50	DINAS PERHUBUNGAN	
			Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Jumlah pengadaan rambu-rambu lalu lintas	350	850.000.000	40	96.950.996	60	96.950.996	60	95.757.500	100,00	98,77	100	192.708.496	28,57	22,67	DINAS PERHUBUNGAN
			Pengadaan marka jalan	Jumlah Pengadaan Marka Jalan	850	975.000.000	100	100.000.000	125	100.000.000	125	99.434.000	100,00	99,43	225	199.434.000	26,47	20,45	DINAS PERHUBUNGAN
			Pengadaan Speedbump	Jumlah pengadaan speedbumb	725	850.000.000		84.595.000	150	84.595.000	150	83.726.500	100,00	98,97	150	168.321.500	20,69	19,80	DINAS PERHUBUNGAN
			Pengadaan pagar pengaman jalan	Jumlah Pengadaan Pagar pengaman jalan	985	1.800.000.000	185	192.075.866	200	-				185	192.075.866	18,78	10,67	DINAS PERHUBUNGAN	
			Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yang tersedia	60	1.615.000.000		580.260.500	1	12.000.000	1	9.133.000	100,00	76,11	1	589.393.500	1,67	36,49	DINAS PERHUBUNGAN
			Pengadaan Traffic Light dan Warning Light	Jumlah pengadaan traffic light dan warning light	8	650.000.000		100.000.000	4	83.661.810	4	83.400.320	100,00	99,69	4	183.400.320	50,00	28,22	DINAS PERHUBUNGAN
			Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	jumlah waktu penyajian jasa pendukung pengendalian dan pengamanan lalu lintas	60	2.831.360.000	12	640.340.000	12	696.105.000	12	670.155.000	100,00	96,27	24	1.310.495.000	40,00	46,29	DINAS PERHUBUNGAN
			Pengoperasian Kendaraan BUS RAPID TRANSIT (BRT)	jumlah waktu pelaksanaan pengoperasian kendaraan BUS RAPID TRANSIT (BRT)	48	720.000.000		101.865.000	12	-				0	101.865.000	0,00	14,15	DINAS PERHUBUNGAN	
			Pelayanan Forum Lalu Lintas	Jumlah Peserta/forum masyarakat mengikuti kegiatan pelayanan forum lalu lintas	250	250.000.000	30	40.000.000	30	29.150.000	0	-	0,00	0,00	30	40.000.000	12,00	16,00	DINAS PERHUBUNGAN
			Operasi Lalu Lintas Gabungan (TNI, POLRI, LLAJ)	Jumlah waktu Pelaksanaan Operasi lalu lintas gabungan (TNI, POLRI,LLAJ)	60	410.000.000	12	47.782.500	12	47.782.500	12	47.537.500	100,00	99,49	24	95.320.000	40,00	23,25	DINAS PERHUBUNGAN
			Pemeliharaan dan Perbaikan Lampu Penerangan Jalan Umum	Jumlah waktu pelaksanaan pemeliharaan penerangan jalan umum	60	3.970.000.000	12	730.700.000	12	1.214.600.000	12	1.180.506.785	100,00	97,19	24	1.911.206.785	40,00	48,14	DINAS PERHUBUNGAN
			Pengadaan Kendaraan Operasional Skylift/Crane	Jumlah kendaraan operasional skylift/crane yang dapat disediakan	1	1.500.000.000			1	1.618.314	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
			Pengadaan Perlengkapan kerja lapangan/Perlengkapan keselamatan kerja penerangan jalan umum	Jumlah jenis perlengkapan kerja lapangan/perlengkapan keselamatan kerja penerangan jalan umum yang dapat tersedia	34	425.000.000	8	100.000.000	4	49.458.377	4	37.318.800	100,00	75,45	12	137.318.800	35,29	32,31	DINAS PERHUBUNGAN
			Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Jumlah pengadaan pembangunan lampu penerangan jalan umum	3810	31.000.000.000	695	5.000.000.000	695	200.000.000	695	199.955.000	100,00	99,98	1390	5.199.955.000	36,48	16,77	DINAS PERHUBUNGAN
			Analisa dan Kebutuhan Lampu Penerangan Jalan Umum	Jumlah dokumen analisis dan kebutuhan penerangan jalan umum	2	125.000.000			1	50.000.000	1	49.195.000	100,00	98,39	1	49.195.000	50,00	39,36	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyelenggaraan Perparkiran	Jumlah waktu penyediaan Jasa Pendukung Penyelenggaraan Perparkiran	60	2.015.000.000	12	335.000.000	12	669.503.500	12	665.958.000	100,00	99,47	24	1.000.958.000	40,00	49,68	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyelenggaraan Terminal	Jumlah waktu penyediaan jasa pendukung penyelenggaraanTerminal	60	400.000.000	12	70.000.000	12	117.135.000	12	114.052.000	100,00	97,37	24	184.052.000	40,00	46,01	DINAS PERHUBUNGAN
			Peningkatan Penerimaan PAD Dinas Perhubungan	Jumlah waktu penyediaan Jasa Pendukung Peningkatan Penerimaan PAD	60	670.600.000	12	98.600.000	12	142.026.000	12	138.241.000	100,00	97,33	24	236.841.000	40,00	35,32	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyelenggaraan UPTD.PPTP	Jumlah Kendaraan Angkutan Umum dan Barang yang Laik Jalan	40000	1.655.000.000	8000	230.000.000	8000	297.245.000	8000	293.735.000	100,00	98,82	16000	523.735.000	40,00	31,65	DINAS PERHUBUNGAN
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										86,73	96,12			30,48	41,22	
			PREDIKAT KINERJA										T	ST			SR	SR	
			Komunikasi dan Informatika																
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.928.155.788		483.182.388		423.370.516		406.694.502				889.876.890			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	15	459.485.000	2,8	89.192.273	3	101.660.291	3	92.130.622	100,00	90,63	5,75	181.322.895	38,33	39,46	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa administrasi keuangan	15	328.460.000	3	74.818.000	2	96.480.000	2	93.790.000	100,00	97,21	5	168.608.000	33,33	51,33	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa kebersihan kantor	15	244.204.000	2,5	32.060.000	3	45.671.000	3	45.654.000	100,00	99,96	5,5	77.714.000	36,67	31,82	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jasa perbaikan peralatan kerja	12	122.102.000	0	-	3	-				0	-	0,00	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	5	122.669.286	0,9	13.182.000	2	14.740.791	2	14.054.700	100,00	95,35	2,85	27.236.700	57,00	22,20	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	15	91.576.500	2,3	10.315.000	1	11.346.000	1	7.599.400	100,00	66,98	3,25	17.914.400	21,67	19,56	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5	30.525.500	0,8	3.862.000	3	-				0,75	3.862.000	15,00	12,65	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10	91.576.500	1,8	6.000.000	1	2.022.528	1	2.016.000	100,00	99,68	2,75	8.016.000	27,50	8,75	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman	5	122.102.000	1	7.600.000	1	3.890.000	1	3.890.000	100,00	100,00	2	11.490.000	40,00	9,41	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan Dinas	5	1.169.225.000	1	238.195.115	1	115.909.906	1	115.909.780	100,00	100,00	2	354.104.895	40,00	30,29	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pengkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPd Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6*8		11=10/5*100%		12
					K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penataan Arsip Perkantoran	Arsip Perkantoran	55	144.230.000	1	7.958.000	1	31.650.000	1	31.650.000	100,00	100,00	2	39.608.000	3,64	27,46	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	96,06		28,47	23,00		
			PREDIKAT KINERJA										ST	ST		SR	SR		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.016.846.500		115.289.216		162.473.988		154.042.371			215.803.787			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Pembangunan Gedung Kantor	Gedung Kantor	5	437.690.000			1	41.245.000	1	41.245.000	100,00	100,00	1	41.245.000	20,00	9,42	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan Gedung Kantor	5	244.204.000			1	13.000.000	1	12.262.800	100,00	94,33	1	12.262.800	20,00	5,02	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan dan perbaikan bagian unit gedung kantor	5	192.435.000	1	34.333.000	1	21.300.000	1	21.300.000	100,00	100,00	2	55.633.000	40,00	28,91	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/operasional	20	711.591.500	4	76.426.216	4	86.928.988	4	79.234.571	100,00	91,15	8	155.660.787	40,00	21,88	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan dan perbaikan bagian pelengkap gedung kantor	5	112.820.000	0,3	4.510.000	1	-				0,25	4.510.000	5,00	4,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	94,81		25,00	13,85		
			PREDIKAT KINERJA										ST	ST		SR	SR		
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			728.535.000		147.976.260		-		-			147.976.260			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Pendidikan dan pelatihan formal	SDM yang mengikuti diklat	45	539.100.000	5	125.176.260	100	-				5	125.176.260	11,11	23,22	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian Dinas	200	187.435.000	40	22.800.000	100	-				40	22.800.000	20,00	12,16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Sosialisasi dan Tes Narkoba		0	-	-	-	100	-								DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)													15,56	17,89		
			PREDIKAT KINERJA													SR	SR		
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			391.831.500		44.550.000		25.122.252		21.600.700			66.150.700			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Lakip OPD	5	28.205.000	0,5	2.270.000	1	4.150.000	1	3.013.500	100,00	72,61	1,45	5.283.500	29,00	18,73	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Laporan keuangan semesteran	5	28.205.000	0,5	2.935.000	1	3.900.000	1	3.564.100	100,00	91,39	1,5	6.499.100	30,00	23,04	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Laporan prognosis realisasi anggaran	5	28.205.000	0,6	3.050.000	1	3.900.000	1	3.541.900	100,00	90,82	1,6	6.591.900	32,00	23,37	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan akhir tahun	5	28.205.000	0,6	3.050.000	1	3.900.000	1	3.675.000	100,00	94,23	1,6	6.725.000	32,00	23,84	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)	Dokumen RENJA, RKA dan DPA	15	28.205.000	0,6	2.920.000	1	4.999.680	1	3.757.500	100,00	75,15	1,58	6.677.500	10,53	23,67	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Pelaksanaan Evaluasi RENJA	Laporan Evaluasi Renja	5	28.205.000	0,8	4.150.000	1	4.272.572	1	4.048.700	100,00	94,76	1,83	8.198.700	36,60	29,07	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas dan Kinerja	Instrumen dan Laporan Movev	5	131.025.000	1	13.210.000	1	-				1	13.210.000	20,00	10,08	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Forum Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Laporan Rekomendasi Tindak Lanjut SPIP	5	91.576.500	0,9	12.965.000	1	-				0,85	12.965.000	17,00	14,16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	85,98		25,89	20,75		
			PREDIKAT KINERJA										ST	T		SR	SR		
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika			8.701.875.000		-		481.525.251		471.096.451			471.096.451			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di lingkungan pemerintah daerah.	Jumlah domain/sub domain lingkup pemkot daerah.	30	1.276.275.000	0	-	4	22.275.000	4	19.625.000	100,00	88,10	4	19.625.000	13,33	1,54	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Peningkatan SDM Pemerintah Daerah dalam penggunaan aplikasi elektronik.	Jumlah SDM bidang	280	1.392.300.000	0	-	70	-				0	-	0,00	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Penyelenggaraan ekosistem TIK dan kerjasama Smart City	Jumlah dokumen perencanaan TIK	4	928.200.000	0	-	1	103.266.251	1	102.866.251	100,00	99,61	1	102.866.251	25,00	11,08	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Penyusunan kebijakan dalam penyelenggaraan nama domain dan e-Government (SPBE).	Jumlah laporan pemerintahan berbasis elektronik	4	1.392.300.000	0	-	1	-				0	-	0,00	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Layanan akses internet, intranet, dan komunikasi intra pemerintah daerah.	Jumlah paket bandwidth jaringan internet	4	1.160.250.000	0	-	1	149.700.000	1	147.596.000	100,00	98,59	1	147.596.000	25,00	12,72	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Layanan manajemen data dan informasi elektronik pemerintah daerah	Jumlah aplikasi sistem informasi dan telematika yang diimplementasikan	12	1.160.250.000	0	-	3	48.600.000	3	46.925.000	100,00	96,55	3	46.925.000	25,00	4,04	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK	Jumlah sarana sistem informasi dan komunikasi	16	1.392.300.000	0	-	4	157.684.000	4	154.084.200	100,00	97,72	4	154.084.200	25,00	11,07	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	97,83		16,19	5,78		
			PREDIKAT KINERJA										ST	ST		SR	SR		
			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik			5.477.795.000		788.988.364		700.513.683		448.019.183			1.237.007.547			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Penyusunan dan Pengelolaan Data Informasi Publik	Dokumen Data Informasi Publik	6	1.072.175.000	1	257.057.500	1	72.904.303	1	65.904.303	100,00	90,40	2	322.961.803	33,33	30,12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6+8		11=10/6*100%			
				K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Sosialisasi dan pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Kelompok Informasi Masyarakat	6	469.485.000	7	67.182.620	1	6.250.000	0	-	0,00	0,00	7	67.182.620	116,67	14,31	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui media	Informasi peyelenggaraan pemerintahan daerah melalui media elektronik	6	771.150.000	1,3	67.412.000	1	62.375.000	1	49.678.000	100,00	79,64	2,25	117.090.000	37,50	15,18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Pengelolaan konten website pemerintah	Jumlah Informasi Konten website	6	1.128.200.000	1	185.861.244	1	91.475.000	1	83.725.000	100,00	91,53	2	269.586.244	33,33	23,90	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Pengelolaan layanan aduan masyarakat Kota Pangkalpinang	Laporan Tindak Lanjut Aduan Masyarakat	6	962.175.000	0,8	143.331.000	1	62.834.380	1	60.234.380	100,00	95,86	1,84	203.565.380	30,67	21,16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui media cetak	Informasi peyelenggaraan pemerintahan daerah melalui media cetak	6	610.510.000	0,7	68.144.000	1	400.375.000	1	188.477.500	100,00	47,08	1,68	256.621.500	28,00	42,03	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Penyelnggaran hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	Jumlah media untuk melaksanakan hubungan masyarakat, media, dan kemitraan komunitas	4	464.100.000	0	-	1	4.300.000	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										71,43	63,96			39,93	20,96	
			PREDIKAT KINERJA										S	R			SR	SR	
			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																
			Program Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Koperasi		1.039.375.000		173.830.000		342.134.000		321.509.000				207.805.000				DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
			Penilaian koperasi berprestasi	Meningkatnya koperasi berprestasi Tingkat nasional	5	319.375.000	1	24.802.000	1	-					1	24.802.000	20,00	7,77	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
			Pelatihan manajemen KSP/USP koperasi	Jumlah koperasi yang memiliki SOM, SOP	10	270.000.000	2	103.678.000	2	-					2	103.678.000	20,00	38,40	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
			Penilaian kesehatan KPS/USP Koperasi	Meningkatnya jumlah KSP/USP sehat	10	86.500.000	2	10.000.000	2	-					2	10.000.000	20,00	11,56	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
			Pembinaan kelembagaan, usaha dam Permodalan Koperasi	Jumlah kelembagaan koperasi yang terbina	328	174.500.000	60	35.350.000	64	33.975.000	64	33.975.000	100,00	100,00	124	69.325.000	37,80	39,73	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
			Penyuluhan kelompok ekonomi produktif masyarakat	Penyuluhan Pokmas pra koperasi	5	189.000.000	0	-	1	-					0	-	0,00	0,00	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
			Pelatihan Penyusunan Laporan pertanggungjawaban pengurus	Terlaksananya pelatihan Penyusunan Laporan pengurus	120	84.000.000	40	43.749.460	60	124.987.000	60	108.627.000	100,00	86,91	100	152.376.460	83,33	181,40	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
			Bimbingan teknis perubahan anggaran dasar koperasi	Jumlah koperasi yang melakukan perubahan AD	55	211.000.000	45	43.560.000	5	105.695.000	5	102.280.000	100,00	96,77	50	145.840.000	90,91	69,12	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
			Pelatihan Pengawas Koperasi	Meningkatnya SHU koperasi	195	270.000.000	40	59.656.800	40	77.477.000	40	76.627.000	100,00	98,90	80	136.283.800	41,03	50,48	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	95,37			39,13	49,81	
			PREDIKAT KINERJA										ST	ST			SR	SR	
			Program Pertumbuhan dan Peningkatan Kualitas UMKM		444.000.000		33.160.000		277.467.620		271.204.000				59.230.000				DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
			Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah penumbuhan UMKM baru	285	244.000.000	45	33.160.000	60	-					45	33.160.000	15,79	13,59	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
			Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha UMKM (2 Angkatan)	Jumlah UMKM yang bermitra dengan LK/LKMB	500	200.000.000	0	-	100	31.320.000	100	26.070.000	100,00	83,24	100	26.070.000	20,00	13,04	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
			Pelatihan Manajemen pengelolaan keuangan bagi UMKM	Jumlah UMKM yang terlatih	160	205.000.000	40	71.545.000	40	109.199.000	40	108.349.000	100,00	99,22	80	179.894.000	50,00	87,75	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
			fasilitasi Pengembangan UMKM	Jumlah UMK yang di fasilitasi Halal, SNI, HAKI, Dll	175	50.000.000	35	10.000.000	35	136.948.520	35	136.785.000	100,00	99,88	70	146.785.000	40,00	293,57	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	97,74			31,45	101,99	
			PREDIKAT KINERJA										ST	ST			SR	ST	
			Penanaman Modal																
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		906.372.883		661.492.249		591.298.694		483.149.882					1.144.642.131			DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	100.000.000	12	43.828.635,00	12	102.300.000	12	52.418.664	100,00	51,24	24	96.247.299	40,00	96,25	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rerja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=8*8		11=10/5*100%		12	
				K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	60	40.000.000	12	28.710.000,00	12	52.296.000	12	49.640.000	100,00	94,92	24	78.350.000	40,00	195,88	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	60	55.000.000	12	51.395.500,00	12	48.288.000	12	45.885.500	100,00	95,02	24	97.281.000	40,00	176,87	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki	20	37.000.000	4	21.840.000,00	7	25.250.000	4	24.730.000	57,14	97,94	8	46.570.000	40,00	125,86	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
			Penyediaan alat tulis kantor	jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	28	27.000.000	29	13.380.500,00	26	14.000.000	26	13.983.500	100,00	99,88	55	27.364.000	196,43	101,35	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60	20.000.000	12	16.268.000,00	12	5.437.250	12	5.390.000	100,00	99,13	24	21.658.000	40,00	108,29	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	8	7.000.000	8	5.736.000,00	11	6.280.870	11	6.274.000	100,00	99,89	19	12.010.000	237,50	171,57	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	20	300.000.000	9	204.070.000,00	3	172.811.432	4	162.956.500	133,33	94,30	13	367.026.500	65,00	122,34	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
			Penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	5	9.000.000	2	6.960.000,00	2	26.022.000	2	4.447.000	100,00	17,09	4	11.407.000	80,00	126,74	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
			Penyediaan makanan dan minuman	jumlah jenis rapat yang dilaksanakan	20	7.000.000	4	3.471.000,00	5	20.158.000	2	6.652.000	40,00	33,00	6	10.123.000	30,00	144,61	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah waktu penyediaan rakor dan konsultasi	60	304.372.683	11	265.832.614,00	12	118.455.142	12	110.772.718	100,00	93,51	23	376.605.332	38,33	123,73	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										93,68	81,71			77,02	135,77	
			PREDIKAT KINERJA										ST	T			T	ST	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			180.000.000		163.797.769		271.361.940		239.967.990				301.054.569			DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara	2	90.000.000	1	84.500.000,00	2	50.000.000	2	47.600.000	100,00	95,20	3	132.100.000	150,00	146,78	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah waktu pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	12	90.000.000	12	79.297.769,00	12	117.043.000	12	89.656.800	100,00	76,60	24	168.954.569	200,00	187,73	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
			pengadaan Mebeleur						2	4.318.940	2	4.318.940	100,00	100,00	2	4.318.940	0,00	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
			Studi kelayakan pendirian balai latihan kerja						1	100.000.000	1	98.392.250	100,00	98,39	1	98.392.250	0,00	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	86,43			87,50	83,63	
			PREDIKAT KINERJA										ST	T			T	T	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			300.000.000		-		3.640.000		3.640.000				3.640.000			DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
			Penyusunan analisa jabatan	Jumlah jenis diklat yang diikuti	1	100.000.000	0	0,00	1	-					0	-	0,00	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
			Pengadaan tanda pengenalan pegawai	Jumlah jenis diklat yang diikuti	1	100.000.000	0	0,00	1	3.640.000	1	3.640.000	100,00	100,00	1	3.640.000	100,00	3,64	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pengkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6*8		11=10/5*100%			
				K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Sosialisasi P4GN	Jumlah jenis diklat yang diikuti	1	100.000.000	0	0,00	1	-				0	-	0,00	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											100,00	100,00		33,33	1,21	
			PREDIKAT KINERJA											ST	ST		SR	SR	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			50.000.000		16.866.420		13.899.194		13.262.200			28.928.620			DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jenis laporan yang disusun	15	10.000.000,00	3	4.630.050,00	3	3.495.000	3	3.185.200	100,00	91,14	6	7.815.250	40,00	78,15	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
			Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	jenis laporan yang disusun	5	10.000.000,00	1	2.546.150,00	1	1.786.000	1	1.671.000	100,00	93,56	2	4.217.150	40,00	42,17	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
			penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jenis laporan yang disusun	5	10.000.000,00	1	2.667.500,00	1	2.448.694	1	2.447.000	100,00	99,93	2	5.114.500	40,00	51,15	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
			Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)	jenis dokumen yang disusun	15	10.000.000,00	3	3.802.000,00	3	4.669.500	3	4.669.500	100,00	100,00	6	8.471.500	40,00	84,72	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
			Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD	jenis laporan yang disusun	1	10.000.000,00	1	3.020.720,00	1	1.300.000	1	1.289.500	100,00	99,19	1	4.310.220	100,00	43,10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											100,00	96,81		52,00	59,86	
			PREDIKAT KINERJA											ST	ST		R	R	
			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi			1.452.000.000		76.779.180		100.500.000		97.485.900			104.079.180			DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
			Promosi investasi daerah	Jumlah bahan promosi investasi	6	436.000.000	1	76.779.180,00	3	-				0	76.779.180	0,00	17,61	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
			rapat koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Terlaksananya rakor perencanaan dan pengembangan penanaman modal	3	255.000.000	0	0,00	1	-				0	-	0,00	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
			kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi	Tersedianya dokumen yang berkaitan dengan investasi	4	305.000.000	0	0,00	1	28.500.000	1	27.300.000	100,00	95,79	1	27.300.000	25,00	8,95	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
			penyelenggaraan pameran investasi	Pameran investasi yang diselenggarakan/ yang diikuti	4	456.000.000	0	0,00	1	-				0	-	0,00	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
			Sosialisasi Peraturan Daerah Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal	jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1	30.000.000	0	0,00	1	72.000.000	1	70.185.900	100,00	97,48	1	70.185.900	100,00	233,95	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											100,00	97,00		25,00	52,10	
			PREDIKAT KINERJA											ST	ST		SR	R	
			Program peningkatan pelayanan perijinan			2.062.898.000		562.720.915		1.942.899.382		1.194.465.928			1.647.472.533			DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
			survey lapangan perizinan	Jumlah izin yang disurvei	150	200.000.000	3002	31.600.000,00	160	925.872.835	448	299.125.000	280,00	32,31	448	330.725.000	298,67	165,36	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
			penyelenggaraan pelayanan perizinan lingkup perizinan I	Jumlah izin yang diterbitkan	2600	200.000.000	3111	158.245.820,00	2610	269.132.557	2.964	220.588.154	113,56	81,96	2.964	378.833.974	114,00	189,42	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
			penyelenggaraan pelayanan perizinan lingkup perizinan II	Jumlah izin yang diterbitkan	500	200.000.000	859	134.322.680,00	510	176.071.381	703	151.793.764	137,84	86,21	703	286.116.444	140,60	143,06	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6+8		11=10/5*100%		12
					K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			penyelenggaraan pelayanan perizinan lingkup perizinan III	Jumlah izin yang diterbitkan	730	200.000.000	670	131.829.548,00	740	175.028.609	659	160.402.000	89,05	91,64	659	292.231.548	90,27	146,12	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
			Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	Jumlah unit usaha yang di pantau	280	255.000.000	0	0,00	70	220.199.000	2.013	202.797.700	2875,71	92,10	2.013	202.797.700	718,93	79,53	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
			promosi pelayanan perizinan	jumlah informasi yang disebar melalui publikasi	4	300.000.000	0	0,00	1	-					0	-	0,00	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
			Survey indeks pelayanan perizinan	Tersedianya data IKM Perizinan	100	202.696.000	85,15	35.728.867,00	93,00	15.000.000	87	14.972.000	93,23	99,81	87	50.700.867	86,70	25,01	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
			penyusunan raperda perubahan tentang retribusi perizinan tertentu	Perda perubahan tentang retribusi perizinan tertentu	1	70.000.000	1	70.994.000,00	1	36.323.000	1	35.073.000	100,00	96,56	1	106.067.000	100,00	151,52	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
			pengadaan sistem pelayanan perizinan	Tersedianya sistem informasi perizinan	1	220.000.000	0	0,00	1	-					0	-	0,00	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
			updating website perizinan	terupdatenya portal dpmptspnaker.pangkalpinangkota.go.id	4	215.000.000	0	0,00	1	-					0	-	0,00	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
			Evaluasi Penerapan ISO 9001	Penerapan ISO 9001	4	100.000.000			1	125.272.000	1	109.714.310	100,00	87,58	1	109.714.310	25,00	109,71	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										527,06	61,48			143,11	91,79	
			PREDIKAT KINERJA										ST	R			ST	ST	
			Kepemudaan dan Olah Raga																
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							341.803.000		301.062.725							
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	60	835.481.600			6	23.650.000	6	16.307.225	100,00	68,95	6	16.307.225	10,00	1,95	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jenis jasa administrasi keuangan yang tersedia	30	319.676.000			6	47.824.000	3	33.300.000	50,00	69,63	3	33.300.000	10,00	10,42	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia	5	142.500.000			1	13.551.000	1	11.876.000	100,00	87,64	1	11.876.000	20,00	8,33	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	444	237.690.000			47	2.050.000	0	0	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang dibeli	176	80.000.000			65	9.748.000	30	9.748.000	46,15	100,00	30	9.748.000	17,05	12,19	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan/ jumlah lembar penggandaan	55	79.720.000			16	18.355.000	11	11.455.000	68,75	62,41	11	11.455.000	20,00	14,37	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
			Penyediaan Komponen Instalasi / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli	45	14.000.000			19	5.625.000	19	3.955.000	100,00	70,31	19	3.955.000	42,22	28,25	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di beli	63	645.000.000			25	96.645.000	25	94.172.500	100,00	97,44	25	94.172.500	39,68	14,60	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dibeli	50	200.000.000			10	4.640.000	10	3.930.000	100,00	84,70	10	3.930.000	20,00	1,97	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman	55	27.500.000			3	4.300.000	3	1.000.000	100,00	23,26	3	1.000.000	5,45	3,64	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah waktu rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang diikuti	5	1.100.000.000			1	36.615.000	1	36.519.000	100,00	99,74	1	36.519.000	20,00	3,32	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
			Belanja Mobilisasi	Jumlah Barang dan Jasa yang dipindahkan	1	78.800.000			1	78.800.000	1	78.800.000	100,00	100,00	1	78.800.000	100,00	100,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										80,41	88,08			25,37	16,59	
			PREDIKAT KINERJA										T	T			SR	SR	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							245.686.000		112.085.000							
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang mendapat pemeliharaan rutin	10	474.881.500			2	20.322.500	1	6.940.000	50,00	34,15	1	6.940.000	10,00	1,46	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin	5	750.450.000			1	15.025.000	1	3.350.000	100,00	22,30	1	3.350.000	20,00	0,45	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	1	240.000.000			37	119.420.000	0	63.300.000	0,00	53,01	0	63.300.000	0,00	26,38	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=8*6		11=10/5*100%			
				K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Pengadaan Meubelair	Jumlah mebeleur yang dibeli	63	130.000.000		4	77.645.000	0	38.495.000	0,00	49,58	0	38.495.000	0,00	29,61	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Pembuatan dan Pengelolaan Website	Tersedianya Informasi Publik	1	100.000.000		1	13.273.500	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										50,00	45,62		6,00	11,56		
			PREDIKAT KINERJA										SR	SR		SR	SR		
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						10.000.000										
			Pendidikan dan Pelatihan Formal					1	10.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Dinas Pemuda dan Olahraga	
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										0,00	0,00		0,00	0,00		
			PREDIKAT KINERJA										SR	SR		SR	SR		
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						14.000.500		9.143.000								
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	5	15.000.000		1	3.487.500	0	-	0,00	0,00	0	0	0,00%	0,00%	Dinas Pemuda dan Olahraga	
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah jenis laporan keuangan semesteran	5	15.000.000		1	3.045.000	1	3.045.000	100,00	100,00	1	3.045.000	20,00%	20,30%	Dinas Pemuda dan Olahraga	
			Penyusunan Renja (RKT,RKA,Dan DPA)	Jumlah jenis laporan perencanaan jangka pendek yang tersusun	5	75.000.000		1	3.590.000	1	3.120.000	100,00	86,91	1	3.120.000	20,00%	4,16%	Dinas Pemuda dan Olahraga	
			Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD	Jumlah jenis laporan SPIP	5	90.000.000		1	3.878.000	1	2.978.000	100,00	76,79	1	2.978.000	20,00%	3,31%	Dinas Pemuda dan Olahraga	
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										75,00	65,30		0,15	0,07		
			PREDIKAT KINERJA										S	R		SR	SR		
			Program Peningkatan Kepemudaan dan Olahraga			7.157.708.500		-	1.005.783.600		836.316.661				397.321.600			DINAS PARIWISATA	
			Pelatihan dan pelaksanaan paskibraka	Jumlah Paskibraka Kota Pangkalpinang	144	2.097.955.000		36	28.564.000	36	28.564.000	100,00	100,00	36	28.564.000	25,00	1,36	DINAS PARIWISATA	
			Pelatihan dan pelaksanaan paskibraka	Jumlah Paskibraka Kota Pangkalpinang	36	530.780.000		1	49.340.000	1	49.300.000	100,00	99,92	1	49.300.000	2,78	9,29	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti fasilitasi	98	938.420.000		22	30.640.000	22	30.640.000	100,00	100,00	22	30.640.000	22,45	3,27	DINAS PARIWISATA	
			Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti fasilitasi	20	126.940.000		1	16.309.000	1	14.634.000	100,00	89,73	1	14.634.000	5,00	11,53	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPPA)	Jumlah atlet yang berprestasi	268	833.263.000		134	-					0	-	0,00	0,00	DINAS PARIWISATA	
			Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPPA)	Jumlah atlet yang berprestasi				1	370.541.000	1	365.772.061	100,00	98,71						
			Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)	Jumlah atlet yang berprestasi	105	227.070.000		105	-					0	-	0,00	0,00	DINAS PARIWISATA	
			Festival Olahraga Tradisional (FOT)	Jumlah atlet yang berprestasi	50	261.165.000		25	94.022.600	25	94.022.600	100,00	100,00	25	94.022.600	50,00	36,00	DINAS PARIWISATA	
			Pengembangan olahraga rekreasi	Jumlah penyelenggaraan pengembangan olahraga rekreasi	356	1.199.023.000		89	65.791.000	19	65.791.000	21,35	100,00	19	65.791.000	5,34	5,49	DINAS PARIWISATA	
			Pengembangan olahraga rekreasi	Jumlah pelaksanaan olahraga rekreasi	40	148.292.500		1	119.433.000	1	30.150.000	100,00	25,24	1	30.150.000	2,50	20,33	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Penyediaan Jasa Penunjang Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah petugas jasa penunjang sarana dan prasarana olahraga	40	794.800.000		10	84.220.000	10	84.220.000	100,00	100,00	10	84.220.000	25,00	10,60	DINAS PARIWISATA	
			Penyediaan Jasa Penunjang Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah atlet yang berprestasi yang di kirim ke tingkat propinsi	134	397.963.000		1	86.543.000	1	73.223.000	100,00	84,61	1	73.223.000	0,75	18,40	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Pembinaan Manajemen Organisasi Olahraga (Pembentukan BAPOPSI Kota Pangkalpinang)					1	60.360.000	0	-	0,00	0,00						
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										92,13	83,15		12,62	10,57		
			PREDIKAT KINERJA										ST	T		SR	SR		
			Statistik																
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral			1.038.380.000		158.706.985	140.806.488		135.634.680				292.341.645			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Pengumpul dan Pengolahan data statistik sektoral	Dokumen induk data statistik Kota Pangkalpinang	1	200.000.000	1	156.706.985	1	100.000.000	1	94.828.172	100,00	94,83	2	251.535.157	200,00	125,77	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Diseminasi data statistik sektoral	Jenis data statistik sektoral	1	371.280.000	0	-	1	-				0	-	0,00	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Koordinasi statistik sektoral	Laporan rekomendasi dan tindak lanjut statistik	1	464.100.000	0	-	1	40.806.488	1	40.806.488	100,00	100,00	1	40.806.488	100,00	8,79	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	96,33		100,00	44,85		
			PREDIKAT KINERJA										ST	ST		ST	SR		
			Persandian																
			Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah			277.050.000		49.289.400	31.009.000		31.009.000				80.298.400			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Pengelolaan Berita Sandi dan Berita Lainnya	Berita sandi dan berita lainnya	10	45.000.000	2	49.289.400	2	31.009.000	2	31.009.000	100,00	100,00	4	80.298.400	40,00	178,44	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Penyusunan kebijakan tata kelola keamanan informasi	Dokumen peraturan perundang-undangan tentang tata kelola keamanan informasi	1	232.050.000	0	-	100	-				0	-	0,00	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	100,00		20,00	89,22		

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Ranja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6*8		11=10/5*100%					
				K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
				PREDIKAT KINERJA																	
				ST		ST										SR	T				
			Kebudayaan																		
			Program Pengembangan, Pelestarian dan Perlindungan Budaya Benda dan Tak Benda			2.509.886.000		-		2.173.814.000		1.964.712.610				1.964.712.610			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
			Pengembangan, Pelestarian dan Perlindungan Cagar Budaya dan Permuseuman	Jumlah jenis upaya Pengembangan, Pelestarian dan Perlindungan Cagar Budaya dan Permuseuman	4	72.000.000	0	0	4	297.600.000,00	0	269.490.600	100,00	90,55	0	269.490.600	0,00	374,29	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
				Jumlah jenis cagar budaya yang terpelihara					4										DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
				Komunitas Pecinta Cagar Budaya yang Terbentuk					1										DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
				Tim Ahli Cagar Budaya					4										DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
				Lestari Kota Pusaka					1										DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
			Pengembangan, Pelestarian dan Perlindungan Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Jenis Upaya Pengembangan, pelestarian dan Perlindungan Seni dan Budaya Daerah	4	2.037.886.000			4	991.600.000,00	0	934.176.000	100,00	94,21	0	934.176.000	0,00	45,84	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
				Jumlah festival budaya daerah yang diselenggarakan					1										DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
				Jumlah gelar seni budaya yang diselenggarakan					1										DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
				Jumlah pentas seni untuk menyambut tamu negara					10										DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
				Terseleksinya group lomba seni suara tingkat nasional					3										DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
				Jumlah peserta yang mengikuti pawai budaya dan gelar seni APEKSI					30										DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
				Jumlah kreasi seni daerah yang dihasilkan melalui seniman masuk sekolah (SMS)					2										DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
				Terbentuknya dewan kesenian kota pangkalpinang					1										DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
				terseleksinya group lomba seni musik tingkat nasional					1										DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
				Terseleksinya group seni tari tradisional ke tingkat nasional					1										DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
				Pembinaan sanggar seni					24										DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
			Pelestarian Nilai Sejarah dan Tradisi	Jumlah jenis Upaya Pelestarian Nilai Sejarah dan Tradisi	10	400.000.000	0	0	10	884.614.000,00	0	761.046.010	100,00	86,03	0	761.046.010	0,00	190,26	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
				Terselenggaranya pekan budaya nasional tingkat kota					6										DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
				Jumlah karya tulis hasil lawatan sejarah					60										DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
				Jumlah penyelenggaraan pelestarian adat dan tradisi masyarakat pangkalpinang					1										DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
				Terbentuknya lembaga adat melayu kota pangkalpinang					1										DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												100,00	90,38		0,00	203,46	
				PREDIKAT KINERJA												ST	T		SR	ST	
			Perpustakaan																		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			4.102.388.900		-		529.494.218		505.219.278				505.219.278			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jangka waktu ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	60	712.600.000			12	123.242.000	12	110.042.997	100,00	89,29	12	110.042.997	20,00	15,44	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jenis jasa administrasi keuangan yang tersedia	29	940.865.000			6	176.889.000	6	173.049.000	100,00	97,83	6	173.049.000	20,69	18,39	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	15	422.088.000			3	75.514.000	3	75.494.500	100,00	99,97	3	75.494.500	20,00	17,89	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jenis peralatan kerja yang diperbaiki	24	120.300.000			4	17.651.000	4	17.449.000	100,00	98,86	4	17.449.000	16,67	14,50	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor yang tersedia	263	129.369.500			50	17.908.750	50	17.901.750	100,00	99,96	50	17.901.750	19,01	13,84	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pengkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9=8/7*100%		10=8*6		11=10/6*100%		12
					K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan	75	81.191.000			13	9.278.700	13	8.928.800	100,00	96,23	13	8.928.800	17,33	11,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik	49	54.354.000			10	5.000.000	10	4.988.000	100,00	99,76	10	4.988.000	20,41	9,18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	11	26.550.000			2	860.000	2	800.000	100,00	93,02	2	800.000	18,18	3,01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jangka waktu ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60	77.884.000			12	883.000	12	883.000	100,00	100,00	12	883.000	20,00	1,13	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Penyediaan makanan dan minuman	Jangka waktu ketersediaan makanan dan minuman	55	126.678.000			11	16.208.000	11	15.148.000	100,00	93,46	11	15.148.000	20,00	11,96	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah orang yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah untuk rapat koordinasi dan konsultasi	170	1.378.509.400			30	83.659.768	30	78.134.231	100,00	93,40	30	78.134.231	17,65	5,67	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Pengembangan dan Pemeliharaaa Sistem/Website	Jangka waktu pengembangan dan pemeliharaan sistem / web	48	32.000.000			12	2.400.000	12	2.400.000	100,00	100,00	12	2.400.000	25,00	7,50	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	95,42			19,58	10,79	
			PREDIKAT KINERJA										ST	ST			SR	SR	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.280.481.875		-		171.740.300		108.623.510				108.623.510			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	5	365.000.000			1	21.300.000	1	21.300.000	100,00	100,00	1	21.300.000	20,00	5,84	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	30	915.461.875			6	150.440.300	6	87.323.510	100,00	58,05	6	87.323.510	20,00	9,54	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	63,25			20,00	7,89	
			PREDIKAT KINERJA										ST	R			SR	SR	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			300.834.200		-		62.292.000		61.539.000				23.003.000			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis/ fungsional	26	300.834.200			5	23.003.000	5	23.003.000	100,00	100,00	5	23.003.000	19,23	7,65	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya						54	39.289.000	54	38.536.000	100,00	98,08					
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	98,79			19,23	7,85	
			PREDIKAT KINERJA										ST	ST			SR	SR	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			275.638.000		-		30.440.000		27.840.000				27.840.000			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis laporan capaian kinerja yang disusun	15	54.425.000			3	3.500.000	3	3.320.000	100,00	94,86	3	3.320.000	20,00	6,10	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	5	53.949.000			1	2.860.000	1	2.700.000	100,00	94,41	1	2.700.000	20,00	5,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	5	61.949.000			1	8.910.000	1	7.900.000	100,00	88,66	1	7.900.000	20,00	12,75	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)	Jenis dokumen perencanaan jangka pendek yang disusun	15	57.965.000			3	5.700.000	3	4.450.000	100,00	78,07	3	4.450.000	20,00	7,68	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD	Jenis dokumen pelaporan SPIP di lingkungan OPD yang disusun	5	47.350.000			1	9.470.000	1	9.470.000	100,00	100,00	1	9.470.000	20,00	20,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	91,46			20,00	10,31	
			PREDIKAT KINERJA										ST	ST			SR	SR	
			Program Pelayanan Perpustakaan dan Peningkatan Budaya Baca			1.680.370.000		-		388.402.200		379.662.200				379.662.200			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat	Jumlah perpustakaan umum/sekolah/khusus/masyarakat yang terbina	87	105.370.000			17	-					0	-	0,00	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Pemeliharaan dan Pengolahan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang terpelihara	4800	285.000.000			1300	53.977.200	1300	53.977.200	100,00	100,00	1300	53.977.200	27,08	18,94	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Ranja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9=8/7*100%		10=8*6		11=10/5*100%		12
					K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Promosi dan Publikasi Perpustakaan	Jumlah media promosi perpustakaan	12	160.000.000			3	72.518.000	3	72.378.000	100,00	99,81	3	72.378.000	25,00	45,24	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Pengembangan Layanan Perpustakaan Keliling	Jumlah kunjungan perpustakaan keliling	2370	385.000.000			600	81.000.000	275	77.400.000	45,83	95,56	275	77.400.000	11,60	20,10	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Pengembangan Layanan Perpustakaan Umum	Jenis layanan perpustakaan	16	615.000.000			4	88.290.000	4	82.290.000	100,00	93,20	4	82.290.000	25,00	13,38	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Penyusunan Kebijakan dan Produk Hukum Lingkup Perpustakaan	Jumlah peraturan lingkup perpustakaan yang disusun	1	10.000.000			1	-					0	-	0,00	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			DED Perluasan Gedung Perpustakaan	Jumlah dokumen DED perluasan Gedung perpustakaan yang disusun	1	100.000.000			1	93.617.000	1	93.617.000	100,00	100,00	1	93.617.000	100,00	93,62	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											89,17	97,50		26,98	27,33	
			PREDIKAT KINERJA											T	ST		SR	SR	
			Kearsipan																
			Program Penyelenggaraan Kearsipan			1.462.000.000		-		285.981.124		261.517.324				234.702.324			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah meter linear box arsip yang dikelola	400	405.000.000			100	81.850.000	100	78.540.000	100,00	95,96	100	78.540.000	25,00	19,39	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Rapat Koordinasi Peningkatan Pelayanan Informasi Kearsipan	Jumlah peserta rapat koordinasi	260	195.000.000			75	10.996.124	0	10.996.124	0,00	100,00	0	10.996.124	0,00	5,64	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Penelusuran Arsip	Jumlah arsip tokoh/ peristiwa sejarah yang tersimpan	12	230.000.000			3	27.585.000	3	23.636.200	100,00	85,68	3	23.636.200	25,00	10,28	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Lomba Pengelola Kearsipan	Jumlah unit kearsipan terbaik	24	207.000.000			6	40.770.000	6	40.220.000	100,00	98,65	6	40.220.000	25,00	19,43	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Akuisisi/Penyusutan/Pemusnahan Arsip	Jumlah meter linear arsip yang didata dalam JRA	192	185.000.000			50	-					0	-	0,00	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Bimbingan dan Supervisi Penataan Arsip di Unit Pencipta Arsip Binaan	Jumlah unit kearsipan yang dibimbing penataan arsip dinamisnya	22	190.000.000			5	47.500.000	5	47.500.000	100,00	100,00	5	47.500.000	22,73	25,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Penyusunan Kebijakan dan Produk Hukum Penyelenggaraan Kearsipan	Jumlah produk hukum kearsipan yang disusun	2	50.000.000			1	50.370.000	1	33.810.000	100,00	67,12	1	33.810.000	50,00	67,62	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Pemeliharaan rutin Berkala sarana pengelolaan dan penyimpanan arsip						1	26.910.000	1	26.815.000	100,00	99,65					
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											85,71	91,45		21,10	21,05	
			PREDIKAT KINERJA											T	ST		SR	SR	
			Layanan Urusan Pilihan																
			Kelautan dan Perikanan																
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							240.641.350		141.215.149				105.516.000			
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang tersedia	6	24.600.000	0	-	6	85.485.000	6	83.705.000	100,00	97,92	6	83.705.000	100,00	340,26	DINAS KELAUTAN PERIKANAN
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia	6	10.050.000	0	-	6	21.811.000	6	21.811.000	100,00	100,00	6	21.811.000	100,00	217,02	DINAS KELAUTAN PERIKANAN
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tertangani	6	11.250.000			6	11.250.000	6	4.186.499	100,00	37,21	6	4.186.499	100,00	37,21	DINAS KELAUTAN PERIKANAN
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah waktu layanan jasa perbaikan peralatan kerja yang tertangani	6	1.950.000			6	1.950.000	6	1.935.000	100,00	99,23	6	1.935.000	100,00	99,23	DINAS KELAUTAN PERIKANAN
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah waktu layanan penyediaan ATK yang tertangani	6	3.658.000			6	3.658.000	6	3.658.000	100,00	100,00	6	3.658.000	100,00	100,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah waktu layanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tertangani	6	4.625.000			6	4.625.000	6	4.625.000	100,00	100,00	6	4.625.000	100,00	100,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah waktu layanan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tertangani	6	2.190.000			6	2.190.000	6	2.190.000	100,00	100,00	6	2.190.000	100,00	100,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah waktu layanan penyediaan makanan dan minuman yang tertangani	6	3.000.000			6	3.000.000	6	3.000.000	100,00	100,00	6	3.000.000	100,00	100,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah waktu layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang tertangani	6	102.772.350			6	102.772.350	6	12.204.650	100,00	11,88	6	12.204.650	100,00	11,88	DINAS KELAUTAN PERIKANAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100%	10=8*6	11=10/6*100%	12								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Kegiatan Mobilisasi Pindah Kantor	Jumlah waktu terlaksananya perpindahan kantor	6	3.900.000		6	3.900.000	6	3.900.000	100,00	100,00	6	3.900.000	100,00	100,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN	
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)								100,00	58,68			100,00	120,56			
			PREDIKAT KINERJA								ST	R			ST	ST			
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						658.122.850		603.483.749								
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah jasa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1	5.025.000	0	0	160.700.000	1	137.240.000	100,00	85,40	1	137.240.000	100,00	2731,14	DINAS KELAUTAN PERIKANAN	
			Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	1	323.225.000		1	323.225.000	1	319.244.949	100,00	98,77	1	319.244.949	100,00	98,77	DINAS KELAUTAN PERIKANAN	
			Pengadaan Meubelair	Jumlah jenis Mebeleur yang diadakan	3	113.725.000		3	113.725.000	3	108.166.500	100,00	95,11	3	108.166.500	100,00	95,11	DINAS KELAUTAN PERIKANAN	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan	3	15.802.650	0	0	60.472.650	3	38.832.300	100,00	64,21	3	38.832.300	100,00	245,73	DINAS KELAUTAN PERIKANAN	
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)								100,00	91,70			100,00	792,69			
			PREDIKAT KINERJA								ST	ST			ST	ST			
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						10.199.000		10.199.000								
			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun					5	1.887.000	5	1.887.000	100,00	100,00	5	1.887.000	0,00	0,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN	
			Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP dilingkungan OPD					3	8.312.000	3	8.312.000	100,00	100,00	3	8.312.000	0,00	0,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN	
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)								100,00	100,00			0,00	0,00			
			PREDIKAT KINERJA								ST	ST			SR	SR			
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Budidaya, Pemasaran dan Konsumsi			4.415.510.218			44.998.500		1.446.114.819				760.232.583			DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	
			Perencanaan Sarana dan Prasarana Perikanan					5	600.000.000	5	574.534.000	100,00	95,76						
			Validasi Data Statistik Perikanan	jumlah dokumen yang tervalidasi	5	128.000.000		1	10.738.000	1	10.738.000	100,00	100,00	1	10.738.000	20,00	8,39	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	
			Validasi Data Statistik Perikanan	jumlah dokumen yang tervalidasi	1	14.750.000	-	-	14.750.000	1	14.750.000	100,00	100,00	1	14.750.000	100,00	100,00	DINAS KELAUTAN PERIKANAN	
			Pengembangan Balai Benih Ikan Lokal	Jumlah unit UPT BBIL yang beroperasi	1	2.244.636.000		3	319.640.134	1	315.669.282	33,33	98,76	1	315.669.282	100,00	14,06	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	
			Pengembangan Balai Benih Ikan Lokal	Jumlah unit UPT BBIL yang beroperasi	2,5E+08	150.124.218	-	-	369.310.000	1445000	349.320.116	1,62	94,59	1445000	349.320.116	0,58	232,69	DINAS KELAUTAN PERIKANAN	
			Fasilitasi peningkatan kelembagaan serta Bimtek terhadap pelaku usaha di bidang Perikanan Tangkap	Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Yang terfasilitasi	12	215.000.000	3	44.998.500	3	2.343.000	3	2.343.000	100,00	100,00	6	47.341.500	50,00	22,02	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
			Pemagangan Pelaku Usaha dan Tenaga Teknis Bidang perikanan Tangkap, budidaya dan Pengolahan	Jumlah Peserta yang mengikuti pemagangan	75	285.000.000		3						0	-	0,00	0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	
			Bimtek Pelatihan Perawatan dan Perbaikan Mesin kapal	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan	30	90.000.000		30	2.836.000	30	2.836.000	100,00	100,00	30	2.836.000	100,00	3,15	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	
			Kegiatan Gemar Ikan dan Lomba Masak	Angka Konsumsi Ikan	55,38	838.000.000		52						0	-	0,00	0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	
			Rehap Kios P2HP Kota Pangkalpinang	Jumlah Kios Yang direhab	1	300.000.000		1						0	-	0,00	0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	
			Pembinaan kelompok budidaya ikan	Jumlah kelompok yang dibina	114	150.000.000		10	19.577.685	10	19.577.685	100,00	100,00	10	19.577.685	8,77	13,05	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	
			Pembinaan kelompok budidaya ikan	Jumlah kelompok yang dibina	10	9.450.000	-	-	106.920.000	10	106.583.150	100,00	99,68	10	106.583.150	100,00	1127,86	DINAS KELAUTAN PERIKANAN	
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)								81,66	96,56			37,93	39,34			
			PREDIKAT KINERJA								T	ST			SR	SR			
			Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD) Kabupaten/Kota			200.000.000		-	553.997.138		546.255.500				546.255.500			DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	
			Penyediaan calon induk unggul beserta pakan calon induk unggul	jumlah paket calon indukan yang dibeli	7	200.000.000		3	357.000	1	357.000	33,33	100,00	1	357.000	14,29	0,18	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	
			Rehabilitasi kolam atau bak induk/calon induk	luas kolam yang di bangun	16	553.640.136	0	0	553.640.136	16	545.898.500	100,00	98,60	16	545.898.500	100,00	98,60	DINAS KELAUTAN PERIKANAN	
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)								66,67	98,60			14,29	0,18			
			PREDIKAT KINERJA								S	ST			SR	SR			
			Pariwisata																
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.774.329.881			510.599.190		491.453.450				934.344.642			DINAS PARIWISATA	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tertangani	60	808.232.300	12	103.847.422	12	108.206.000	12	98.869.002	100,00	91,37	24	202.716.424	40,00	25,08	DINAS PARIWISATA
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah waktu layanan jasa administrasi keuangan yang tertangani	60	435.223.081	12	79.086.000	12	142.849.000	12	140.869.000	100,00	98,61	24	219.955.000	40,00	50,54	DINAS PARIWISATA
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah waktu layanan jasa kebersihan kantor yang tertangani	60	180.537.500	12	26.514.500	12	37.337.500	12	37.337.500	100,00	100,00	24	63.852.000	40,00	35,37	DINAS PARIWISATA
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah waktu layanan jasa perbaikan peralatan kerja vano tertangoani	60	184.190.000	12	33.541.000	12	18.662.000	12	18.662.000	100,00	100,00	24	52.203.000	40,00	28,34	DINAS PARIWISATA

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencan PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6*8		11=10/5*100%		12							
					K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
					PREDIKAT KINERJA																				
													T	R			SR	SR							
			Pertanian																						
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			6.385.389.500		1.264.005.476		981.101.357		687.350.876				1.951.956.352			DINAS PANGAN DAN PERTANIAN						
			Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan komunikasi suber daya air dan listrik yang tersedia	24	632.021.000	12	113.164.778	12	110.408.345	9	73.915.938	75,00	74,75	21	187.080.716	87,50	29,60	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN						
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang tersedia	38	2.590.477.000	19	501.985.000	19	483.051.000	18	330.607.000	94,74	91,73	37	832.592.000	97,37	32,14	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN						
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia	18	1.116.083.500	9	217.937.000	9	185.258.000	9	144.266.000	100,00	102,38	18	362.203.000	100,00	32,45	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN						
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	jumlah jenis peralatan kerja yang mendapat perbaikan	10	88.400.000	4	20.195.000	5	15.620.000	3	7.399.000	60,00	100,00	7	27.594.000	70,00	31,21	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN						
			Penyediaan alat tulis kantor	jumlah jenis alat tulis kantor yang di beli	90	158.000.000	40	24.150.000	44	18.612.500	36	7.686.000	81,82	100,00	76	31.836.000	84,44	20,15	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN						
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah lembar dokumen yang di cetak dan di fotokopi	90000	114.728.000	48600	22.463.400	48600	13.500.000	15000	5.760.000	30,86	100,00	63600	28.223.400	70,67	24,60	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN						
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	10	15.850.000	5	2.780.000	6	1.549.000	2	549.000	33,33	100,00	7	3.329.000	70,00	21,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN						
			Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	24	104.830.000	10	17.433.000	11	9.500.000	9	4.500.000	81,82	100,00	19	21.933.000	79,17	20,92	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN						
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi	150	1.565.000.000	57	344.497.298	57	143.602.512	38	112.667.938	66,67	78,97	95	457.165.236	63,33	29,21	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN						
					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)															69,36	89,41		80,28	26,81	
					PREDIKAT KINERJA															S	T		T	SR	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.886.732.500		360.672.775		207.896.000		113.838.932				474.511.707			DINAS PANGAN DAN PERTANIAN						
			Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli	1	56.000.000,00	1	70.310.000	1	-					1	70.310.000	100,00	125,55	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN						
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah jasa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10	830.000.000,00	2	118.075.700	2	44.650.000	2	24.175.000	100,00	87,83	4	142.250.700	40,00	17,14	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN						
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan	35	1.000.732.500,00	7	172.287.075	7	163.046.000	7	89.663.932	100,00	74,62	14	261.951.007	40,00	26,18	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN						
					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)															100,00	77,08		60,00	56,29	
					PREDIKAT KINERJA															ST	T		R	R	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			336.500.000		54.171.900		-		-				54.171.900			DINAS PANGAN DAN PERTANIAN						
			Pendidikan dan pelatihan formal	jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	45	268.500.000	8	54.171.900	30	-					8	54.171.900	17,78	20,18	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN						
			Tes Urine bagi Pegawai ASN dan PHL di lingkungan OPD	jumlah pegawai ASN dan PHL yang mengikuti tes urine	135	70.000.000,00			135	-					0	-	0,00	0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN						
					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		6,89	10,09	
					PREDIKAT KINERJA																		SR	SR	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			145.290.000		26.325.880		21.529.000		6.141.000				32.468.880			DINAS PANGAN DAN PERTANIAN						
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah jenis dokumen laoproan kinerja dan iktisar realisasi kinerja yang tersusun	25	13.500.000	5	2.476.000	5	3.541.000	5	3.541.000	100,00	100,00	10	6.017.000	40,00	44,57	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN						
			Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun	25	11.000.000	5	2.000.000	5	1.300.000	5	1.300.000	100,00	100,00	10	3.300.000	40,00	30,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN						
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	25	11.000.000	5	2.000.000	5	3.210.000	0	-	0,00	0,00	5	2.000.000	20,00	18,18	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN						
			Penyusunan RENJA (RKT, RKA dan DPA)	jumlah jenis dokumen perencanaan jangka pendek yang tersusun	25	50.000.000	1	9.987.000	1	3.865.000	1	1.300.000	100,00	100,00	2	11.287.000	8,00	22,57	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN						
			Penyusunan Pelaporan PenyelenggaraanSPIP di Lingkungan OPD	jumlah jenis laporan SPIP yang tersusun	5	50.000.000	1	9.862.880	1	9.613.000	0	-	0,00	0,00	1	9.862.880	20,00	19,73	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN						
			Forum perangkat Daerah	jumlah pelaksanaan kegiatan forum perangkat daerah	1	9.790.000			1	-					0	-	0,00	0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN						
					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)															60,00	40,83		21,33	22,51	
					PREDIKAT KINERJA															R	SR		SR	SR	
			Program Pengembangan Pertanian dan Peternakan			5.595.258.000		-		628.458.480		304.895.550				304.895.550			DINAS PANGAN DAN PERTANIAN						
			Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	jumlah peserta yang mengikuti pelatihan agribisnis	30	99.000.000			25	-					0	-	0,00	0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN						
			Pelatihan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan TABULAPOT - TABULAKAR	jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan banyaknya tanaman dalam polybag	35	129.000.000			220	-					0	-	0,00	0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN						
			Pengembangan Pembenihan/Perbibitan	terpeliharanya dan terawatnya bibit tanaman dan pohon induk	700	243.000.000			550	52.426.000	250	24.718.000	45,45	67,97	250	24.718.000	35,71	10,17	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Ranja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9=8/7*100%		10=8*8		11=10/5*100%		12
					K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian	jumlah laporan hasil monitoring evaluasi pelaporan kebijakan subsidi pertanian	5	106.000.000			1	-					0	-	0,00	0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan data statistik pertanian/perkebunan	jumlah laporan data statistik yang tersusun	5	98.000.000			1	15.002.500	1	2.100.000	100,00	28,57	1	2.100.000	20,00	2,14	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
			Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	tersedianya bibit tanaman yang berlabel	700	310.500.000			210	-					0	-	0,00	0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
			Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	jumlah THL/TBPP yang mendapat peningkatan kesejahteraan	9	180.608.000			9	153.175.000	9	72.150.000	100,00	61,34	9	72.150.000	100,00	39,95	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
			Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang dipelihara	9	128.000.000			9	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
			Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam	Jumlah petani yang mengikuti pelatihan	40	98.000.000			30	-					0	-	0,00	0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
			Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (Penas KTNA)	Jumlah peserta yang mengikuti KTNA	25	400.000.000			25	5.207.000					0	-	0,00	0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
			Peningkatan Kompetensi Petugas dan Penangkar	Jumlah Petugas dan Penangkar yang Kompeten	5	86.000.000			5	-					0	-	0,00	0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
			Pengawasan dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						7	19.128.706		-	0,00	0,00			0,00	0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
			Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	jumlah pelayanan kesehatan hewan yang diberikan	900	238.500.000			100	23.968.500	50	9.598.500	50,00	50,66	50	9.598.500	5,56	4,02	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
			Pengawasan dan pembinaan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet)	jumlah pelayanan kesehatan masyarakat veteriner yang diberikan	700	106.000.000			550	19.575.000	150	3.305.000	27,27	27,76	150	3.305.000	21,43	3,12	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
			Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan penyakit menular ternak	jumlah jenis sarana dan prasarana pencegahan penyakit menular ternak yang di beli	2	441.000.000			1	43.513.800	1	41.543.800	100,00	94,09	1	41.543.800	50,00	9,42	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
			Pembibitan dan perawatan ternak	jumlah populasi ternak di UPTD	80	1.119.000.000			60	128.063.974	30	62.988.250	50,00	66,49	30	62.988.250	37,50	5,63	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
			Pembinaan dan pengawasan pemotongan ternak (operasional RPH)	jumlah pemotongan ternak yang dilakukan	8800	1.696.650.000			100	167.322.000	50	87.416.000	50,00	71,23	50	87.416.000	0,57	5,15	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
			Pendataan masalah peternakan	Jumlah dokumen data statistik peternakan dan data Produksi peteranakan	8	66.000.000			2	1.076.000	0	1.076.000	0,00	10,08	0	1.076.000	0,00	1,63	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
			Penyusunan atau revisi perda	Jumlah PERDA tersusun/terrevisi	1	50.000.000			10	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											43,56	62,45		14,25	4,28	
			PREDIKAT KINERJA											SR	R		SR	SR	
			Kehutanan																
			Energi dan Sumber Daya Mineral																
			Perdagangan																
			Program Peningkatan Kualitas Perdagangan			21.003.552.500		1.995.944.529		3.075.049.020		2.958.304.531				4.659.911.810			DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
			Monitoring dan Evaluasi stok dan harga bahan pokok serta bahan strategis lainnya	Jumlah waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi	46	657.000.000	12	147.182.700	12	102.709.000	12	96.784.000	100,00	94,23	24	243.966.700	52,17	37,13	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
			Promosi komoditas perdagangan kota pangkalpinang	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	13	536.452.500	1	297.236.420	4	15.272.000	0	15.272.000	0,00	100,00	1	312.508.420	7,69	58,25	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
			Pengawasan bahan Berbahaya (B2) di Kota Pangkalpinang	Jumlah usaha perdagangan yang diawasi	55	276.000.000	0	-	10	-					0	-	0,00	0,00	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
			Penyusunan Perangkat Peraturan Lingkup Perdagangan	Jumlah peraturan yang disusun	8	644.000.000	5	115.078.500	2	20.803.070	0	20.641.900	0,00	99,23	5	135.720.400	62,50	21,07	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
			Pengembangan/Rehabilitasi/Renovasi Ruko Milik Pemerintah Kota	Jumlah ruko yang direnovasi	14	2.500.000.000	0	-	14	-					0	-	0,00	0,00	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
			Operasionalisasi dan Peningkatan Pelayanan UPT Pasar	Tersedianya jasa operasional pelayanan pasar	60	4.300.000.000	12	1.018.020.708	12	1.080.211.700	12	1.041.914.381	100,00	96,45	24	2.059.935.089	40,00	47,91	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
			Revitalisasi/Renovasi Pasar Kota Pangkalpinang	Jumlah pasar yang direvitalisasi/ direnovasi	3	3.150.000.000	0	-	2	-					0	-	0,00	0,00	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
			Operasionalisasi Pengembangan Kemetrolagian	Jumlah Alat UTTP yang Di Tera/Tera Ulang	3170	4.500.000.000	5544	418.426.201	200	400.000.000	200	367.395.000	100,00	91,85	5744	785.821.201	181,20	17,46	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
			Pengawasan UTTP	Jumlah Pemilik UTTP Yang Diawasi	940	500.000.000	0	-	160	31.834.000	160	31.584.000	100,00	99,21	160	31.584.000	17,02	6,32	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
			Peningkatan Potensi dan Realisasi PAD	Terlaksananya Jumlah waktu peningkatan potensi dan realisasi PAD	48	1.100.000.000	0	-	12	-					0	-	0,00	0,00	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6+8		11=10/5*100%			
				K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Supervisi Pengawasan Pengembangan/Rehabilitasi Ruko Milik Pemerintah Kota	Jumlah dokumen pengawasan	1	109.550.000	0	-	1	-					0	-	0,00	0,00	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
			Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Ruko Milik Pemkot	Jumlah dokumen lingkungan hidup	1	100.000.000	0	-	1	85.860.000	1	84.800.000	100,00	98,77	1	84.800.000	100,00	84,80	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
			Penyusunan Andalalin Ruko Milik Pemerintah Kota	Jumlah dokumen analisa	1	100.000.000	0	-	1	117.430.000	1	116.980.000	100,00	99,62	1	116.980.000	100,00	116,98	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
			Penyusunan DED Revitalisasi Pasar Kota Pangkalpinang	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan	1	123.900.000	0	-	1	102.915.000	1	102.459.000	100,00	99,56	1	102.459.000	100,00	82,69	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
			Penyusunan DED Pengembangan/Rehabilitasi Ruko Milik Pemerintah Kota menjadi Pujasera Senyum	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan	1	175.050.000	0	-	1	103.500.000	1	102.962.000	100,00	99,48	1	102.962.000	100,00	58,82	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Pasar Kota Pangkalpinang	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan	8	1.600.000.000	0	-	2	614.483.000	2	595.553.000	100,00	96,92	2	595.553.000	25,00	37,22	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
			Supervisi dan Pengawasan Revitalisasi/Renovasi Pasar Kota Pangkalpinang	Jumlah dokumen pengawasan	3	231.600.000	0	-	1	-					0	-	0,00	0,00	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
			Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Revitalisasi/Renovasi Pasar Kota Pangkalpinang	Jumlah dokumen lingkungan hidup	4	400.000.000	0	-	2	87.960.000	1	87.622.000	50,00	99,62	1	87.622.000	25,00	21,91	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
			Pasar Murah	Jumlah Lokasi Pasar Murah	25	300.500.000	4	65.000.000	7	112.071.250	7	106.121.250	100,00	94,69	11	171.121.250	44,00	56,95	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
			Pasar Tertib Ukur	Jumlah Pasar Tertib Ukur	8	836.000.000			1	200.000.000	1	188.216.000	100,00	94,11	1	188.216.000	12,50	22,51	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										79,17	96,20			43,35	33,50	
			PREDIKAT KINERJA										T	ST			SR	SR	
		Perindustrian																	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			4.982.500.000		720.867.768		713.290.800		640.337.294				1.361.005.062			DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
			Penyediaan Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik dan internet	Terlaksananya waktu penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik dan internet.	60	640.000.000	12	68.080.694	12	87.000.000	12	62.831.083	100,00	72,22	24	130.911.777	40,00	20,45	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya waktu penyediaan jasa administrasi perkantoran.	60	855.000.000	12	113.691.000	12	250.000.000	12	226.470.000	100,00	90,59	24	340.161.000	40,00	39,78	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya waktu penyediaan jasa kebersihan kantor.	60	235.000.000	12	39.675.000	12	53.302.000	12	53.302.000	100,00	100,00	24	92.977.000	40,00	39,56	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya waktu penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja.	60	560.000.000	12	39.676.000	12	47.550.000	12	46.772.000	100,00	98,36	24	86.448.000	40,00	15,44	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya waktu penyediaan alat tulis kantor.	60	254.500.000	12	27.047.000	12	36.501.800	12	36.501.800	100,00	100,00	24	63.548.800	40,00	24,97	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya waktu penyediaan Barang cetakan dan penggandaan.	60	281.000.000	12	42.524.300	12	49.387.000	12	43.635.950	100,00	88,36	24	86.160.250	40,00	30,66	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60	112.000.000	12	14.655.000	12	13.700.000	12	13.700.000	100,00	100,00	24	28.355.000	40,00	25,32	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
			Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya waktu penyediaan makan minum pegawai.	60	470.000.000	12	25.353.000	12	50.850.000	12	32.158.000	100,00	63,24	24	57.511.000	40,00	12,24	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya waktu bagi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.	60	1.575.000.000	12	349.965.774	12	125.000.000	12	124.966.461	100,00	99,97	24	474.932.235	40,00	30,15	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	89,77			40,00	26,51	
			PREDIKAT KINERJA										ST	T			SR	SR	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			2.650.000.000		281.169.014		296.811.700		272.471.578				563.640.592			DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Jumlah Peralatan Gedung kantor	122	1.125.000.000		-	6	37.850.000	6	37.650.000	100,00	99,47	6	37.650.000	4,92	3,35	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya waktu penyediaan jasa pemeliharaan gedung kantor.	60	665.000.000	12	179.240.500	12	130.000.000	12	129.988.000	100,00	99,99	24	309.228.500	40,00	46,50	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pengkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capelan Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capelan Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capelan Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capelan Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=8+8		11=10/5*100%		12	
				K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Layanan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60	1.340.921.300	12	246.410.200	12	259.543.000	12	248.193.000	100,00	95,63	24	494.603.200	40,00	36,89	SEKRETARIAT DAERAH
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Layanan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	60	2.350.000.000	12	36.417.000	12	66.616.000	12	39.995.000	100,00	60,04	24	76.412.000	40,00	3,25	SEKRETARIAT DAERAH
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Layanan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60	57.960.000	0	-	12	4.500.000	12	620.000	100,00	13,78	12	620.000	20,00	1,07	SEKRETARIAT DAERAH
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Layanan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60	1.402.572.500	12	178.744.100	12	306.381.500	12	212.429.950	100,00	69,34	24	391.174.050	40,00	27,89	SEKRETARIAT DAERAH
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Layanan Penyediaan Makanan dan Minuman	60	4.653.771.000	12	873.837.800	12	978.651.000	12	857.970.327	100,00	87,67	24	1.731.808.127	40,00	37,21	SEKRETARIAT DAERAH
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Layanan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	60	6.461.975.000	12	1.648.213.566	12	600.000.000	12	411.718.520	100,00	68,62	24	2.059.932.086	40,00	31,88	SEKRETARIAT DAERAH
			Penyediaan jasa perkantoran	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Perkantoran	60	239.675.000	12	46.060.000	12	58.408.000	12	37.000.000	100,00	63,35	24	83.060.000	40,00	34,66	SEKRETARIAT DAERAH
			Penyediaan jasa asuransi gedung kantor	Penyediaan Jasa Asuransi Gedung Kantor	60	1.000.000.000	0	-	12	165.726.013	12	165.726.013	100,00	100,00	12	165.726.013	20,00	16,57	SEKRETARIAT DAERAH
			Penyedian jasa perbaikan perlengkapan kantor	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Perbaikan Perlengkapan Kantor	60	1.224.460.000	12	248.158.200	12	288.110.000	12	230.863.200	100,00	80,13	24	479.021.400	40,00	39,12	SEKRETARIAT DAERAH
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)													100,00	85,50			37,33	31,29	
PREDIKAT KINERJA													ST	T			SR	SR	
			Program Peningkatan Sarana dan Praserana Aperatur			50.993.393.100		9.047.340.788		12.853.457.300		11.696.758.592			20.027.148.360			SEKRETARIAT DAERAH	
			Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional Yang Dibeli	17	11.340.520.000	2	1.437.045.845	6	5.178.729.300	6	5.116.659.600	100,00	98,80	8	6.553.705.445	47,06	57,79	SEKRETARIAT DAERAH
			Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Yang Tersedia	5	3.210.757.500	1	1.294.919.665	1	618.517.500	1	529.744.500	100,00	85,65	2	1.824.664.165	40,00	56,83	SEKRETARIAT DAERAH
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Tersedia	5	3.767.000.000	1	1.159.835.040	1	444.746.500	1	421.460.040	100,00	94,76	2	1.581.295.080	40,00	41,98	SEKRETARIAT DAERAH
			Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Yang Tersedia	5	2.352.772.000	1	779.805.800	1	345.650.000	1	280.983.750	100,00	81,29	2	1.060.789.550	40,00	45,09	SEKRETARIAT DAERAH
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Tersedia	5	1.300.000.000	1	386.296.700	1	151.950.000	1	151.375.000	100,00	99,62	2	537.671.700	40,00	41,36	SEKRETARIAT DAERAH
			Pengadaan Meubelair	Jumlah Meubelair Yang Dibeli	5	1.320.000.000	1	82.461.640	1	150.000.000	1	148.936.000	100,00	99,29	2	231.397.640	40,00	17,53	SEKRETARIAT DAERAH
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah waktu pemeliharaan Rumah Jabatan	60	4.340.260.000	12	698.779.547	12	986.160.000	12	814.667.123	100,00	82,61	24	1.513.446.670	40,00	34,87	SEKRETARIAT DAERAH
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah waktu pemeliharaan Rumah Dinas	60	1.027.500.000	12	76.480.420	12	150.000.000	12	103.075.000	100,00	68,72	24	179.555.420	40,00	17,47	SEKRETARIAT DAERAH
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah waktu pemeliharaan gedung kantor	60	3.249.441.850	12	578.589.798	12	914.861.000	12	809.807.000	100,00	88,52	24	1.388.396.798	40,00	42,73	SEKRETARIAT DAERAH
			Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah waktu pemeliharaan mobil jabatan	60	2.152.750.000	12	283.439.250	12	368.600.000	12	151.183.292	100,00	41,02	24	434.622.542	40,00	20,19	SEKRETARIAT DAERAH
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah waktu pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	60	7.977.551.750	12	1.424.119.963	12	1.706.005.000	12	1.587.703.787	100,00	93,07	24	3.011.823.750	40,00	37,75	SEKRETARIAT DAERAH
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah waktu pemeliharaan peralatan rumah jabatan/dinas	60	2.235.000.000	12	304.145.900	12	271.910.000	12	224.131.500	100,00	82,43	24	528.277.400	40,00	23,64	SEKRETARIAT DAERAH
			Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang direhab	6	3.700.000.000	1	197.000.000	1	-					1	197.000.000	16,67	5,32	SEKRETARIAT DAERAH
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	5	1.176.472.000	1	197.435.400	1	2.000.000	0	-	0,00	0,00	1	197.435.400	20,00	16,78	SEKRETARIAT DAERAH
			Pengadaan makan dan minum rumah dinas/jabatan	Jumlah waktu penyediaan makan dan minum harian rumah jabatan	48	1.053.368.000	1	146.985.800	12	93.368.000	12	91.914.000	100,00	98,44	13	238.899.800	27,08	22,68	SEKRETARIAT DAERAH
			Pembuatan Taman Rumah Jabatan	Jumlah taman rumah jabatan yang dibangun	1	200.000.000		-	1	200.000.000	1	198.998.000	100,00	99,50	1	198.998.000	100,00	99,50	SEKRETARIAT DAERAH
			Pembangunan Pagar Besi	Jumlah pagar besi yang dibangun	2	150.000.000		-	1	150.000.000	1	149.936.000	100,00	99,96	1	149.936.000	50,00	99,96	SEKRETARIAT DAERAH
			Pembangunan Garasi Rumah Jabatan	Jumlah garasi rumah jabatan yang dibangun	1	340.000.000		-	1	-					0	-	0,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
			Pengadaan Kolam Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah kegiatan pengadaan kolam rumah jabatan/dinas yang dibangun	1	100.000.000		-	1	200.000.000	1	199.233.000	100,00	99,62	1	199.233.000	100,00	199,23	SEKRETARIAT DAERAH
			Rehabilitasi sedang/berat pgar rumah jabatan						1	150.000.000	1	149.756.000	100,00	99,84	1	149.756.000	0,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
			Pembangunan Pagar rumah Jabatan						1	200.000.000	1	199.301.000	100,00	99,65	1	199.301.000	0,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
			Pengadaan Partisi Ruang Rapat dan Ruang kerja	Jumlah kegiatan Pengadaan Partisi Ruang Rapat dan Ruang Kerja Sekda yang dibangun	1	185.480.000			1	185.480.000	1	183.894.000	100,00	99,14	1	183.894.000	100,00	99,14	SEKRETARIAT DAERAH

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6/8		11=10/5*100%		12
					K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pengadaan Partisi ruangan UKPBJ dan LPSE	Jumlah kegiatan Pengadaan Partisi Ruang UKPBJ dan LPSE yang dibangun	1	185.480.000			1	185.480.000	1	184.000.000	100,00	99,20	1	184.000.000	100,00	99,20	SEKRETARIAT DAERAH
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)													94,12	92,44			43,51	46,92	
PREDIKAT KINERJA													ST	ST			SR	SR	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			2.591.589.420		202.650.448		381.672.000		250.167.160				398.797.598			SEKRETARIAT DAERAH
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah waktu Pendidikan dan Pelatihan Formal yang dilaksanakan	48	440.000.000,00	12	36.555.900	12	37.500.000	9	37.500.000	75,00	100,00	21	74.055.900	43,75	16,83	SEKRETARIAT DAERAH
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	5	275.007.500,00	1	37.890.000	1	-					1	37.890.000	20,00	13,78	SEKRETARIAT DAERAH
			Pendayagunaan Aparatur Dalam Peningkatan Kinerja Organisasi	Jumlah Pendayagunaan Aparatur Dalam Peningkatan Kinerja Organisasi yang dilaksanakan	5	276.299.880,00	1	57.639.748	1	-					1	57.639.748	20,00	20,86	SEKRETARIAT DAERAH
			Rapat Koordinasi Kerjasama Daerah	Jumlah waktu Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kerjasama Daerah	60	158.182.040,00	12	20.580.700	12	-					12	20.580.700	20,00	13,01	SEKRETARIAT DAERAH
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	8	1.202.100.000,00	0	-	2	182.100.000	2	158.647.150	100,00	87,12	2	158.647.150	25,00	13,20	SEKRETARIAT DAERAH
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Humas dan Protokol	Jumlah yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Humas dan Protokol	20	240.000.000,00	5	49.984.100	5	15.000.000	0	-	0,00	0,00	5	49.984.100	25,00	20,83	SEKRETARIAT DAERAH
			pengadaan pakaian khusus dan hari-hari tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-Hari tertentu yang disediakan	12	612.000.000,00			3	147.072.000	2	54.040.000	66,67	36,74	2	54.040.000	16,67	8,83	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)													60,42	65,55			24,35	15,33	
PREDIKAT KINERJA													R	R			SR	SR	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			1.168.777.876		-		45.627.000		17.977.000				17.977.000			SEKRETARIAT DAERAH
			Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	5	33.846.000,00	0	-	5	-					0	-	0,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	5	33.846.000,00	0	-	10	6.000.000	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
			Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)	Jumlah laporan Renja (RKT, RKA dan DPA) yang disusun	5	33.846.000,00	0	-	4	6.000.000	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
			Penyusunan Laporan Umum Tahunan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	Jumlah Laporan Umum Tahunan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Yang Disusun	5	340.117.600,00	0	-	1	13.340.000	1	13.340.000	100,00	100,00	1	13.340.000	20,00	3,92	SEKRETARIAT DAERAH
			Penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang	Jumlah dokumen LAKIP Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang yang disusun	5	267.122.276,00	0	-	1	4.637.000	1	4.637.000	100,00	100,00	1	4.637.000	20,00	1,74	SEKRETARIAT DAERAH
			Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Yang Disusun	5	460.000.000,00	0	-	1	15.550.000	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)													40,00	39,49			6,67	0,94	
PREDIKAT KINERJA													SR	SR			SR	SR	
			Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah			11.013.388.656		-		3.856.487.169		2.886.330.087				2.886.330.087			SEKRETARIAT DAERAH
			Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan / anggota organisasi sosial dan masyarakat	Tersedianya makan dan minum dialog/audiensi	60	6.365.050.000,00			12	1.163.023.000	12	811.784.600	100,00	69,80	12	811.784.600	20,00	12,75	SEKRETARIAT DAERAH
			Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Jumlah kunjungan yang difasilitasi	60	4.088.660.000,00			12	765.523.000	12	411.447.100	100,00	53,75	12	411.447.100	20,00	10,06	SEKRETARIAT DAERAH
			Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Tersedianya koordinasi yang diselenggarakan lainnya	60	469.678.656,00			12	1.097.941.159	12	857.623.387	100,00	78,11	12	857.623.387	20,00	182,60	SEKRETARIAT DAERAH
			Penyediaan makanan dan minuman harian rumah jabatan	Tersedianya makan dan minum harian rumah jabatan KDH/WKDH	60	90.000.000,00			12	830.000.000	12	805.475.000	100,00	97,05	12	805.475.000	20,00	894,97	SEKRETARIAT DAERAH
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)													100,00	74,84			20,00	275,10	
PREDIKAT KINERJA													ST	S			SR	ST	
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			677.630.000		-		78.170.000		-				-			SEKRETARIAT DAERAH
			Penyusunan Standar Satuan Harga	Perwako Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Pangkalpinang	400	677.630.000,00			80	76.170.000	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)													0,00	0,00			0,00	0,00	
PREDIKAT KINERJA													SR	SR			SR	SR	
			Program Peningkatan Kerjasama Daerah			4.098.423.355		-		353.700.000		289.472.830				289.472.830			SEKRETARIAT DAERAH
			Penyelenggaraan Rakorwil APEKSI se- Sumbagsel	Jumlah Penyelenggaraan Rakorwil APEKSI Su	1	945.446.000,00			1	102.280.000	1	102.280.000	100,00	100,00	1	102.280.000	100,00	10,82	SEKRETARIAT DAERAH
			Tata Laksana Kerjasama daerah	Jumlah kerjasama daerah yang difasilitasi	30	535.353.200,00			10	73.560.000	8	57.520.000	80,00	78,19	8	57.520.000	26,67	10,74	SEKRETARIAT DAERAH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Ranja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6*8		11=10/5*100%			
				K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			APEKSI	Jumlah Keikutsertaan Pemerintah Daerah Dalam	25	1.690.098.150,00		5	38.000.000	3	37.658.500	60,00	99,10	3	37.658.500	12,00	2,23	SEKRETARIAT DAERAH	
			Pengelolaan izin PDLN	Jumlah izin PDLN yang difasilitasi	15	272.050.000,00		3	-					0	-	0,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
			UCLG dan City Net	Jumlah Keikutsertaan Pemerintah Daerah Dalam	8	653.476.005,00		2	139.860.000	1	92.014.330	50,00	65,79	1	92.014.330	12,50	14,08	SEKRETARIAT DAERAH	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												72,50	81,84			30,23	7,57		
PREDIKAT KINERJA												S	T			SR	SR		
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan					6.189.847.613		-		967.561.422		885.688.450				885.688.450			SEKRETARIAT DAERAH	
			Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	Terselenggaranya fasilitasi aksi Ham	20	178.428.320,00		4	45.488.000	4	43.755.000	100,00	96,19	4	43.755.000	20,00	24,52	SEKRETARIAT DAERAH	
			Penyusunan Pedoman dan Ketentuan Pelaksanaan dari peraturan undang-undang bidang organisasi	Jumlah Pedoman dan Ketentuan Pelaksanaan dari Peraturan undang-undang bidang organisasi yang disusun	5	331.537.875,00		1	16.600.000	1	14.750.000	100,00	88,86	1	14.750.000	20,00	4,45	SEKRETARIAT DAERAH	
			Bantuan Penyelesaian Kasus Kasus Hukum	Terlaksananya Mediasi Kasus-kasus Hukum	15	1.538.450.000,00		3	291.338.622	3	267.615.000	100,00	91,86	3	267.615.000	20,00	17,40	SEKRETARIAT DAERAH	
			Penyusunan dan Pengelolaan Peraturan / Keputusan Walikota	Tersusunnya produk hukum daerah berupa SK dan Perwako	2.250	545.867.950,00		450	162.853.000	450	142.845.500	100,00	87,71	450	142.845.500	20,00	26,17	SEKRETARIAT DAERAH	
			Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Daerah	Tersusunnya produk hukum daerah berupa Perda	50	1.451.800.000,00		10	200.645.800	10	186.970.800	100,00	93,18	10	186.970.800	20,00	12,88	SEKRETARIAT DAERAH	
			Penyusunan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang	Tersusunnya perwako tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah	11	386.794.188,00		2	30.750.000	2	30.160.000	100,00	98,08	2	30.160.000	18,18	7,80	SEKRETARIAT DAERAH	
			Publikasi produk hukum daerah	Terselenggaranya dokumentasi produk hukum berupa cetak buku	500	222.190.000,00		100	15.011.000	30	13.660.150	30,00	91,00	30	13.660.150	6,00	6,15	SEKRETARIAT DAERAH	
			Penyuluhan hukum bagi pelajar	Terselenggaranya pemberi informasi hukum kepada pelajar sekolah	50	228.088.000,00		10	-					0	-	0,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
			Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Tersedianya Informasi hukum melalui website JDIH	1	962.350.000,00		1	174.895.500	1	157.770.500	100,00	90,21	1	157.770.500	100,00	16,39	SEKRETARIAT DAERAH	
			Penyusunan Sambutan Walikota	tersedianya sambutan Walikota Penyampaian Perda	50	109.391.280,00		10	29.979.500	10	28.161.500	100,00	93,94	10	28.161.500	20,00	25,74	SEKRETARIAT DAERAH	
			Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum (KADARKUM)		25	234.950.000,00		5	-					0	-	0,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												92,22	91,54			22,20	12,86		
PREDIKAT KINERJA												ST	ST			SR	SR		
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan					7.427.857.902		-		689.247.830		522.678.000				421.078.000			SEKRETARIAT DAERAH	
			Penyusunan LKPJ Akhir Tahun Anggaran	Jumlah dokumen LKPJ yang tersusun	10	497.690.000,00		2	53.760.000	2	53.660.000	100,00	99,81	2	53.660.000	20,00	10,78	SEKRETARIAT DAERAH	
			Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja	Tersusunnya dokumen analisa jabatan dan analisa beban kerja	10	690.703.906,00		2	119.482.500	2	108.976.000	100,00	91,21	2	108.976.000	20,00	15,78	SEKRETARIAT DAERAH	
			Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	Meningkatnya inovasi unit pelayanan publik dalam memberikan pelayanan	16	414.422.344,00		2	43.445.000	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
			Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pangkalpinang	tersusunnya laporan kegiatan reformasi birokrasi kota pangkalpinang	95	897.696.688,00		1	74.800.000	1	69.950.000	100,00	93,52	1	69.950.000	1,05	7,79	SEKRETARIAT DAERAH	
			Evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah	tersusunnya hasil kajian pemberdayaan kapasitas kelembagaan mengenai susunan dan bentuk organisasi unit pelaksana	6	690.703.906,00		1	50.200.000	1	48.350.000	100,00	96,31	1	48.350.000	16,67	7,00	SEKRETARIAT DAERAH	
			Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	tersedianya data survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah kota pangkalpinang	97	414.422.344,00		1	15.650.000	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
			Inventarisasi Unsur Rupabumi	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Unsur Rupabumi	5	690.125.000,00		1	-					0	-	0,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
			Rapat koordinasi pemerintahan	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemerintahan	38	1.621.021.360,00		6	104.163.180	6	55.080.000	100,00	52,88	6	55.080.000	15,79	3,40	SEKRETARIAT DAERAH	
			Penyusunan LPPD dan IPPD Akhir Tahun Anggaran	Jumlah dokumen LPPD yang disusun dan IPPD yang dipublikasikan	10	967.175.000,00		2	42.498.000	2	42.323.000	100,00	99,59	2	42.323.000	20,00	4,38	SEKRETARIAT DAERAH	
			Rapat koordinasi Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi kecamatan dan kelurahan	28	28.426.125		7	13.375.000	5	3.675.000	71,43	27,48	5	3.675.000	0,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
			Penataan Administrasi Kewilayahan	Jumlah laporan penataan administrasi kewilayahan	4	410.728.500		1	54.855.150	1	32.105.000	100,00	58,53	1	32.105.000	0,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
			Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan kecamatan dan kelurahan	4	104.742.729		4	8.769.000	4	6.959.000	100,00	79,36	4	6.959.000	0,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
			Penyusunan kebijakan dan kajian pengelolaan persampahan	Jumlah dokumen kebijakan dan kajian pengelolaan persampahan yang disusun				1	-					0	-	0,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
			Penyusunan kebijakan dan kajian pengembangan pariwisata kota pangkalpinang (evaluasi komprehensif) RIP Kota pangkalpinang						-					0	-	0,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rerja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6*8		11=10/5*100%		12
					K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Rapat koordinasi hubungan kerja staf ahli walikota dengan lintas sektor						1	47.050.000	1	43.350.000	100,00	92,14	1	43.350.000	0,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
			Sistem Monitoring Analisa Jabatan (SIMONA)						1	45.200.000	1	43.350.000	100,00	95,91	1	43.350.000	0,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
			Aplikasi E-Formasi						1	16.000.000	1	14.900.000	100,00	93,13	1	14.900.000	0,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
			Penyusunan LAKIP kota Pangkalpinang						1										SEKRETARIAT DAERAH
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											79,22	75,83		6,23	3,28	
			PREDIKAT KINERJA											T	S		SR	SR	
			Program Peningkatan Kualitas Pemahaman, Pengamalan Agama dan Kerukunan Beragama			51.757.853.780		-		11.291.285.300		10.161.889.100				10.066.039.100			SEKRETARIAT DAERAH
			Pelaksanaan Urusan Haji	Terselenggaranya fasilitas Urusan Haji	10	748.727.100,00			2	-					0	-	0,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
			Peningkatan Pemahaman Bacaan Al-Qur'an	Jumlah Santri TPA/TKA yang di Wisuda	12.500	26.692.747.983,00			2.462	7.246.575.000	2300	6.657.068.000	93,42	91,87	2300	6.657.068.000	18,40	24,94	SEKRETARIAT DAERAH
			Penyelenggaraan Lomba dan Pembinaan MTQ/STQ	Presentase Jumlah Cabang/Golongan yang juara yang diperlombakan ditingkat Provinsi	15	11.089.419.381,00			3	1.521.777.300	3	1.448.846.100	100,00	95,21	3	1.448.846.100	20,00	13,07	SEKRETARIAT DAERAH
			Kajian Agama dalam Kehidupan Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Kegiatan	60	5.572.599.351,00			12	1.972.175.000	12	1.878.300.000	100,00	95,24	12	1.878.300.000	20,00	33,71	SEKRETARIAT DAERAH
			Pembinaan Pengembangan manajemen Masjid	Jumlah Manajemen Masjid yang dibina	200	853.200.000,00			50	-					0	-	0,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
			Peringatan dan Perayaan Isra' dan Mikraj Nabi Muhammad SAW	Jumlah Peserta Kegiatan	17.500	617.129.534,00			2.500	-					0	-	0,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
			Pawai Ta'aruf dan Safari Ramadhan	Jumlah Masjid Yang dikunjungi/ disantuni	10	774.665.607,00			2	-					0	-	0,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
			Kajian Ramadhan	Jumlah Kajian Ramadhan yang dilaksanakan	4	131.550.000,00			1	-					0	-	0,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
			Nuzulul Qur'an	Jumlah pelaksanaan Nuzulul Qur'an	4	670.545.000,00			1	-					0	-	0,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
			Perayaan Tahun Baru Hijriyah	Terlaksananya Perayaan Tahun Baru Hijriyah	10	1.268.017.836,00			2	-					0	-	0,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
			Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW	Jumlah Peserta Kegiatan	1	1.474.306.720,00			3.000	137.988.000	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
			Tadarusan Al-Qur'an dan Ceramah Agama Islam Bulanan	Terlaksananya Tadarusan Al Quran dan Ceramah Agama Islam Bulanan	10	932.372.634,00			2	116.475.000	1	17.500.000	50,00	15,02	1	17.500.000	10,00	1,88	SEKRETARIAT DAERAH
			Pelaksanaan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha	Terlaksananya Perayaan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha	10	932.372.634,00			2	72.325.000	2	64.325.000	100,00	88,94	2	64.325.000	20,00	6,90	SEKRETARIAT DAERAH
			Dukungan penangnaan dan Pencegahan Covid-19 pada rumah ibadah	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1	161.850.000,00			1	161.850.000	1	95.850.000	100,00	59,22	1	95.850.000	100,00	59,22	SEKRETARIAT DAERAH
			Pembentukan tim Seleksi pemilihan calon Pimpinan BAZNAS kota Pangkalpinang	Jumlah Kegiatan Seleksi Pimpinan BAZNAS Kota Pangkalpinang	1	50.000.000,00			1	62.120.000	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											67,93	90,00		6,80	6,19	
			PREDIKAT KINERJA											S	T		SR	SR	
			Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi Serta Media Massa dan Protokol			16.801.532.995		-		4.386.630.000		3.820.399.203				3.820.399.203			SEKRETARIAT DAERAH
			Protokol dan Acara	Jumlah Acara/Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota yang difasilitasi oleh Protokol	3.750	5.727.751.995,00			750	1.024.026.000	750	956.650.866	100,00	93,42	750	956.650.866	20,00	16,70	SEKRETARIAT DAERAH
			Penyediaan Jasa Dokumentasi Kegiatan Pemerintahan Daerah	Jumlah Acara/Kegiatan Pemkot Pangkalpinang yang didokumentasikan	2.500	1.359.270.000,00			500	345.373.000	500	318.927.751	100,00	92,34	500	318.927.751	20,00	23,46	SEKRETARIAT DAERAH
			Penyedia Jasa Komunikasi dan Informasi Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang	Tersedianya Jasa Komunikasi dan Informasi	60	1.971.140.000,00			12	224.911.000	12	147.520.786	100,00	65,59	12	147.520.786	20,00	7,48	SEKRETARIAT DAERAH
			Peliputan dan Pemberitaan Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Peliputan dan Pemberitaan	2.500	1.290.650.000,00			500	140.940.000	500	96.417.700	100,00	68,41	500	96.417.700	20,00	7,47	SEKRETARIAT DAERAH
			Publikasi Informasi kegiatan kepala daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang Melalui Media Massa Cetak	Jumlah Waktu Publikasi Informasi Kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang Melalui Media Massa Cetak	48	4.135.920.000,00			12	1.403.642.000	12	1.313.842.100	100,00	93,60	12	1.313.842.100	25,00	31,77	SEKRETARIAT DAERAH
			Publikasi Informasi kegiatan kepala daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang Melalui Media elektronik	Jumlah Waktu Publikasi Informasi Kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang Melalui Media Media Elektronik	48	1.110.476.000,00			12	448.240.000	12	356.185.000	100,00	79,46	12	356.185.000	25,00	32,07	SEKRETARIAT DAERAH
			Publikasi Informasi Kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang Melalui Media Daring	Jumlah Waktu Publikasi Informasi Kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang Melalui Media Media Daring	48	1.206.325.000,00			12	799.498.000	12	630.855.000	100,00	78,91	12	630.855.000	25,00	52,30	SEKRETARIAT DAERAH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Ranja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100%	10=8*8	11=10/5*100%	12								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Monitoring,Evaluasi dan pelaporan kegiatan PKK Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah pelaksanaan monitoring,evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan yang terkait dengan PKK	50	202.110.130,00		10	38.250.000	5	38.250.000	50,00	100,00	5	38.250.000	10,00	18,93	SEKRETARIAT DAERAH	
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan PKK Kecamatan dan kelurahan	Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan PKK Kecamatan dan Kelurahan (Kali)	6	17.325.000		6	38.250.000	6	34.650.000	100,00	200,00	6	34.650.000	100,00	200,00	DINAS SOSIAL	
			Lomba Administrasi PKK	Jumlah Pelaksanaan lomba administrasi PKK				1	26.048.000	1	26.048.000	100,00	100,00	1	26.048.000	0,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
			Lomba UP2K	Jumlah Pelaksanaan Lomba UP2K				1	31.512.000	1	31.512.000	100,00	100,00	1	31.512.000	0,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
			Pelaksanaan hari kesatuan gerak PKK	Jumlah Pelaksanaan kegiatan HUT HKG Kota Pangkalpinang dan Jambore PKK Tingkat Nasional				-						0	-	0,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
			Lomba Dasawisma	Jumlah Pelaksanaan Lomba Dasawisma				1	26.939.000	1	26.939.000	100,00	100,00	1	26.939.000	0,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
			Lomba HATINYA PKK	Jumlah pelaksanaan lomba HATINYA PKK				1	27.797.000	1	27.797.000	100,00	100,00	1	27.797.000	0,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
			Evaluasi perkembangan kelurahan melalui lomba kelurahan	Jumlah lomba kelurahan yang dilaksanakan				2	17.999.000	1	17.999.000	50,00	100,00	1	17.999.000	0,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
			Evaluasi Perkembangan Kelurahan melalui lomba kelurahan	Jumlah lomba kelurahan yang dilaksanakan (Jenis)	2	1.000		2	1.000	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DINAS SOSIAL	
			Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan PKK	Jumlah pembinaan rutin dan sosialisasi tentang isu-isu yang berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat				12	11.520.000	6	11.520.000	50,00	100,00	6	11.520.000	0,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
			Peningkatan Kapasitas dan pembinaan PKK	Jumlah Pembinaan Rutin dan sosialisasi tentang isu-isu yang berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat (Kali)	6	5.400.000		6	49.400.000	6	49.399.700	100,00	914,81	6	49.399.700	100,00	914,81	DINAS SOSIAL	
			Penyelenggaraan Rakon PKK	Jumlah penyelenggaraan Rakon PKK di Pangkalpinang				-										SEKRETARIAT DAERAH	
			Pendampingan pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan	Jumlah Pendampingan Evaluasi Pada Desa dan Kelurahan				-										SEKRETARIAT DAERAH	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												78,13	119,68			20,56	70,07		
PREDIKAT KINERJA												T	ST			SR	S		
			Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan			2.665.937.000		-	377.509.000		327.960.500				327.960.500			SEKRETARIAT DAERAH	
			Kebijakan penanggulangan dampak inflasi dan deflasi	Terlaksananya kebijakan pemerintah dalam menanggulangi inflasi dan deflasi Kota Pangkalpinang	20	2.665.937.000,00		4	377.509.000	4	327.960.500	100,00	86,87	4	327.960.500	20,00	12,30	SEKRETARIAT DAERAH	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												100,00	86,87			20,00	12,30		
PREDIKAT KINERJA												ST	T			SR	SR		
			Program Peningkatan Pengembangan BUMD, Perencanaan, Pengkajian, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi			1.410.278.100		-	58.684.600		39.674.600				39.674.600			SEKRETARIAT DAERAH	
			Regulasi/kebijakan umum dalam Pengelolaan BUMD	Tersedianya Regulasi/kebijakan umum dalam Pengelolaan BUMD	10	738.717.100,00		1	50.000.000	1	32.140.000	100,00	64,28	1	32.140.000	10,00	4,35	SEKRETARIAT DAERAH	
			Pengawasan dan Pengendalian BUMD	Tersedianya laporan pengawasan dan pengendalian BUMD	20	671.561.000,00		4	8.684.600	4	7.534.600	100,00	86,76	4	7.534.600	20,00	1,12	SEKRETARIAT DAERAH	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												100,00	67,61			15,00	2,74		
PREDIKAT KINERJA												ST	S			SR	SR		
			Program Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan			278.460.000		-			-				-			SEKRETARIAT DAERAH	
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Pangkalpinang	4	278.460.000,00		1	-					0	-	0,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																0,00	0,00		
PREDIKAT KINERJA																SR	SR		
			Program pengembangan pemanfaatan teknologi Informasi			787.119.152		-	61.440.000		58.602.000				58.602.000			SEKRETARIAT DAERAH	
			Pengelolaan Website Bagian Humas dan Protokol sekretariat Daerah	Tersedianya website	1	787.119.152,00		1	61.440.000	1	58.602.000	100,00	95,38	1	58.602.000	100,00	7,45	SEKRETARIAT DAERAH	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												100,00	95,38			100,00	7,45		
PREDIKAT KINERJA												ST	ST			ST	SR		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			9.670.873.250		2.018.672.361	2.044.756.883		1.494.747.991				3.613.420.362			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pengkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Ranja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=8*8		11=10/5*100%			
				K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik (bulan)	60	1.654.428.500	12	242.043.711	12	266.168.520	12	219.793.541	100,00	82,58	24	461.837.252	40,00	27,92	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya administrasi keuangan yang tertib (bulan)	60	1.271.479.750	12	252.500.000	12	267.500.000	12	230.225.000	100,00	86,07	24	482.725.000	40,00	37,97	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tesedianya jasa kebersihan kantor (bulan)	60	1.288.976.000	12	254.395.000	12	277.100.000	12	255.969.000	100,00	92,37	24	510.364.000	40,00	39,59	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja (unit)	875	584.501.000	175	76.657.000	225	82.602.000	117	78.562.000	52,00	95,11	292	155.219.000	33,37	26,56	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
			Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor (jenis)	230	345.420.000	42	70.417.000	47	85.531.870	45	79.178.000	95,74	92,57	87	149.595.000	37,83	43,31	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (jenis)	100	514.314.000	20	160.120.500	20	121.081.334	15	50.290.150	75,00	41,53	35	210.410.650	35,00	40,91	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Listrik (jenis)	80	124.534.000	16	15.752.000	16	37.660.959	12	34.133.000	74,27	90,63	28	49.885.000	34,85	40,06	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (unit)	42	755.000.000	6	397.940.940	9	251.500.000	9	229.500.000	100,00	91,25	15	627.440.940	35,71	83,10	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga (jenis)	30	660.950.000	6	126.493.240	6	171.500.000	4	145.491.200	66,67	84,83	10	271.984.440	33,33	41,15	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Jenis bacaan dan UU yang tersedia	10	308.610.000	2	42.563.000	2	21.440.000	2	19.980.000	100,00	93,19	4	62.543.000	40,00	20,27	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
			Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum	60	1.347.320.000	12	132.975.000	12	249.680.000	12	112.720.000	100,00	45,15	24	245.695.000	40,00	18,24	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang diikuti (tahun)	60	770.340.000	1	239.205.470	12	202.992.200	12	34.071.100	100,00	16,78	13	273.276.570	21,67	35,47	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
			Penyediaan Jasa Dokumentasi	Tersedianya dokumentasi kegiatan (tahun)	60	45.000.000	1	7.609.500	12	10.000.000	12	4.835.000	100,00	48,35	13	12.444.500	21,67	27,65	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										89,51	73,10		34,88	37,09		
			PREDIKAT KINERJA										T	S		SR	SR		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			6.671.640.400		643.434.567		1.179.781.785		681.700.736				1.325.135.323			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
			Pengadaan mebeleur	Jumlah meubealair kantor	7	-	0	-	7	187.500.000	7	149.000.000	100,00	79,47	7	149.000.000	100,00	0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin dan berkala	20	657.964.000	4	157.979.000	4	150.000.000	4	148.000.000	100,00	98,67	8	305.979.000	40,00	46,50	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	70	3.174.073.850	14	380.210.417	4	669.263.785	4	361.812.243	100,00	54,06	18	742.022.660	25,71	23,38	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	44	288.050.000	3	29.475.170	4	71.400.000	4	22.888.493	100,00	32,06	7	52.363.663	15,91	18,18	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	18	2.551.552.550	1	75.770.000	1	101.618.000	0	-	0,00	0,00	1	75.770.000	5,56	2,97	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	57,78		37,44	16,21		
			PREDIKAT KINERJA										ST	R		SR	SR		
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			2.724.360.360		2.350.888.839		485.000.000		230.469.200				2.681.368.039			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
			Pendidikan dan pelatihan formal	Diklat formal yang dilaksanakan /dikuti (frekuensi)	80	700.000.000	13	1.280.143.339	12	125.000.000	12	54.669.200	100,00	43,74	25	1.334.812.539	31,25	190,69	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
			Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya (orang)	800	2.024.360.360	160	1.070.745.500	160	360.000.000	78	175.800.000	48,75	48,83	238	1.246.545.500	29,75	61,58	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										74,36	47,52		30,50	126,13		
			PREDIKAT KINERJA										S	SR		SR	ST		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6*8		11=10/5*100%		12	
				K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		90.925.775		71.899.150		20.000.000		15.348.400				87.047.550			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah jenis laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	15	21.905.775	3	17.451.900	3	5.000.000	1	1.800.250	33,33	36,01	4	19.252.150	26,67	87,89	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
			Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah jenis laporan keuangan semesteran	5	21.850.000	1	17.515.250	1	5.000.000	1	4.854.800	100,00	97,10	2	22.370.050	40,00	102,38	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
			penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah jenis laporan keuangan akhir tahun	10	21.550.000	2	17.260.000	2	5.000.000	2	4.917.750	100,00	98,36	4	22.177.750	40,00	102,91	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
			Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)	Jumlah jenis dokumen perencanaan kerja	15	25.620.000	3	19.472.000	3	5.000.000	3	3.775.600	100,00	75,51	6	23.247.600	40,00	90,74	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										83,33	76,74		36,67	95,98		
			PREDIKAT KINERJA										T	T		SR	ST		
			Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		160.103.168.728		30.283.445.238		38.730.738.614		38.251.722.499				88.475.167.737			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
			Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang dibahas (Perda)	100	35.778.105.918	14	6.352.972.469,70	20	5.991.717.810	20	5.463.738.317	100,00	91,19	34	11.816.710.787	34,00	33,03	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
			Kegiatan Reses	Jumlah kegiatan reses yang diselenggarakan (kali)	15	429.057.570	3	40.010.000	3	109.200.000	2	32.790.000	66,67	30,03	5	72.800.000	33,33	16,97	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
			Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah orientasi pendalaman tugas yang diikuti (kali)	40	27.928.599.251	6	4.842.971.682	6	4.639.229.066	5	4.305.431.672	83,33	92,80	11	9.148.403.354	27,50	32,76	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
			Pelayanan Tenaga Ahli	Jumlah laporan analisis kelompok tim ahli/tenaga ahli yang disusun (laporan)	540	5.222.795.250	108	965.500.000	108	1.238.600.000	108	1.193.975.000	100,00	96,40	216	2.159.475.000	40,00	41,35	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
			Publikasi DPRD	Tersedianya Publikasi Kegiatan DPRD (bulan)	15	2.389.517.600	3	532.480.000	3	966.470.000	3	886.235.000	100,00	91,70	6	1.418.715.000	40,00	59,37	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
			Rapat-rapat dan konsultasi Keluar daerah	Jumlah rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah yang diikuti (kali)	300	78.897.617.487	60	15.978.436.596	60	23.925.514.838	60	23.450.022.510	100,00	98,01	120	39.428.459.106	40,00	49,97	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
			Peningkatan Kualitas Jasmani pimpinan dan Anggota DPRD	Terjaganya kualitas kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD (orang)	5	2.929.066.200	1	485.064.890	1	650.000.000	0	-	0,00	0,00	1	485.064.890	20,00	16,56	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
			Pelaporan Alat Kelengkapan DPRD	Jumlah jenis laporan alat kelengkapan DPRD (Jenis)	5	2.902.013.838	1	587.525.000	1	639.536.900	1	605.475.000	100,00	94,67	2	1.193.000.000	40,00	41,11	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
			Pengamanan Penyaluran Aspirasi	Jumlah penyaluran aspirasi masyarakat yang mendapat pengamanan (kali)	10	51.000.000	0	-	2	10.000.000	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
			Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD	Jumlah pergantian antar waktu(PAW) anggota DPRD yang di laksanakan (kali)	5	255.752.640	0	-	1	141.450.000	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
			Raperda Inisiatif DPRD	Jumlah raperda inisiatif yang disahkan (Raperda)	12	665.000.000	2	41.484.600	2	4.150.000	0	-	0,00	0,00	2	41.484.600	16,67	6,24	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
			Rapat-rapat paripurna istimewa	Jumlah rapat-rapat paripurna yang diselenggarakan (kali)	11	2.504.642.974	3	457.000.000	2	202.370.000	2	150.905.000	100,00	74,57	5	607.905.000	45,45	24,27	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
			Penyusunan website DPRD	Tersedianya website DPRD	5	75.000.000	0	-	1	56.250.000	1	53.650.000	100,00	95,38	1	53.650.000	20,00	71,53	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
			Penyusunan sistem E-Reses	Tersedianya sistem E-Reses	5	75.000.000	0	-	1	56.250.000	1	49.500.000	100,00	88,00	1	49.500.000	20,00	66,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
			penyusunan kajian akademik						100	100.000.000	60	60.000.000	60,00	60,00					SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										87,86	93,80		26,93	32,80		
			PREDIKAT KINERJA										S	ST		SR	SR		
			KECAMATAN BUKIT INTAN																
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		6.002.132.400		-		622.408.075		598.962.398				598.962.398			KECAMATAN BUKIT INTAN	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tertangani	60	441.500.000	-	-	12	60.000.000	12	45.433.777	100,00	75,72	12	45.433.777	20,00	10,29	KECAMATAN BUKIT INTAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pengkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6*8		11=10/5*100%		12
					K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah waktu layanan jasa administrasi keuangan yang tertangani	60	2.152.000.000	-	-	12	344.525.000	12	339.803.200	100,00	98,63	12	339.803.200	20,00	15,79	KECAMATAN BUKIT INTAN
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah waktu layanan jasa kebersihan kantor yang tertangani	60	230.000.000	-	-	12	42.000.000	12	41.778.000	100,00	99,47	12	41.778.000	20,00	18,16	KECAMATAN BUKIT INTAN
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah waktu layanan jasa perbaikan peralatan kerja yang tertangani	60	285.500.000	-	-	12	20.000.000	12	19.990.000	100,00	99,95	12	19.990.000	20,00	7,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah waktu layanan penyediaan ATK yang tertangani	60	66.500.000	-	-	12	16.822.000	12	15.234.000	100,00	90,56	12	15.234.000	20,00	22,91	KECAMATAN BUKIT INTAN
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah waktu layanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tertangani	60	194.500.000	-	-	12	27.600.000	12	27.450.000	100,00	99,46	12	27.450.000	20,00	14,11	KECAMATAN BUKIT INTAN
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tertangani	60	75.000.000	-	-	12	3.000.000	12	3.000.000	100,00	100,00	12	3.000.000	20,00	4,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah waktu layanan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang tertangani	16	1.216.805.200	-	-	6	28.000.000	6	25.900.000	100,00	92,50	6	25.900.000	37,50	2,13	KECAMATAN BUKIT INTAN
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah waktu layanan penyediaan makanan dan minuman yang tertangani	60	177.000.000	-	-	12	4.876.000	12	4.876.000	100,00	100,00	12	4.876.000	20,00	2,75	KECAMATAN BUKIT INTAN
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah waktu layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang tertangani	60	978.327.200	-	-	12	28.586.075	12	28.497.421	100,00	99,69	12	28.497.421	20,00	2,91	KECAMATAN BUKIT INTAN
			Penyediaan Sarana Pelayanan administrasi Perkantoran	Jumlah layanan jasa penunjang administrasi perkantoran yang tertangani	36	185.000.000	-	-	12	47.000.000	12	47.000.000	100,00	100,00	12	47.000.000	33,33	25,41	KECAMATAN BUKIT INTAN
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	98,23		22,80	11,41		
			PREDIKAT KINERJA										ST	ST		SR	SR		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			659.280.000	-	-	173.420.000		159.915.236				159.915.236			KECAMATAN BUKIT INTAN	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah waktu pemeliharaan gedung kantor	60	495.780.000	-	-	12	102.550.000	12	101.786.000	100,00	99,25	12	101.786.000	20,00	20,53	KECAMATAN BUKIT INTAN
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	60	63.500.000	-	-	12	66.870.000	12	56.129.236	100,00	83,94	12	56.129.236	20,00	88,39	KECAMATAN BUKIT INTAN
			Pemeliharaan Aplikasi E-Monitoring dan Pelayanan	jumlah waktu Pemeliharaan Aplikasi E-Monitoring dan Pelayanan	5	100.000.000	-	-	1	4.000.000	1	2.000.000	100,00	50,00	1	2.000.000	20,00	2,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	92,21		20,00	36,97		
			PREDIKAT KINERJA										ST	ST		SR	SR		
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			225.000.000	-	-	45.565.500		40.565.500				40.565.500			KECAMATAN BUKIT INTAN	
			Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50	200.000.000	-	-	8	35.000.000	4	30.000.000	50,00	85,71	4	30.000.000	8,00	15,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
			Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	1	25.000.000	-	-	1	10.565.500	1	10.565.500	100,00	100,00	1	10.565.500	100,00	42,26	KECAMATAN BUKIT INTAN
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										75,00	89,03		54,00	28,63		
			PREDIKAT KINERJA										S	T		R	SR		
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			140.000.000	-	-	8.913.000		8.889.000				8.889.000			KECAMATAN BUKIT INTAN	
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	5	20.000.000	-	-	1	2.413.000	1	2.413.000	100,00	100,00	1	2.413.000	20,00	12,07	KECAMATAN BUKIT INTAN
			Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	5	20.000.000	-	-	1	-					0	-	0,00	0,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
			penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	5	20.000.000	-	-	1	3.500.000	1	3.460.000	100,00	98,86	1	3.460.000	20,00	17,30	KECAMATAN BUKIT INTAN
			Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)	Jumlah laporan Renja (RKT,RKA,DPA) yang disusun	15	24.000.000	-	-	3	3.000.000	3	2.996.000	100,00	99,87	3	2.996.000	20,00	12,48	KECAMATAN BUKIT INTAN
			Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD	Jumlah laporan SPIP yang disusun	5	56.000.000	-	-	1	-					0	-	0,00	0,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	99,51		12,00	6,37		
			PREDIKAT KINERJA										ST	ST		SR	SR		
			Program Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan			35.390.890.000	-	-	7.238.738.000		6.026.920.412				5.828.615.412			KECAMATAN BUKIT INTAN	
			Penyelenggaraan administrasi pelayanan terpadu (PATEN)	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi pelayanan terpadu (PATEN)	48	135.500.000	-	-	12	15.686.000	12	14.786.000	100,00	94,26	12	14.786.000	25,00	10,91	KECAMATAN BUKIT INTAN
			Rapat Koordinasi lembaga kemasyarakatan						1	30.000.000	1	30.000.000	100,00	100,00					
			Pembinaan PKK	Jumlah waktu pelaksanaan Kegiatan Pembinaan PKK	60	250.000.000	-	-	12	33.327.000	12	32.127.000	100,00	96,40	12	32.127.000	20,00	12,85	KECAMATAN BUKIT INTAN
			Pembinaan UKS	Jumlah kegiatan Pembinaan UKS	1	8.860.000	-	-	12	-					0	-	0,00	0,00	KECAMATAN BUKIT INTAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6*8		11=10/5*100%			
				K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Pelaksanaan KSI	Jumlah Kegiatan Kecamatan Sayang Ibu	8	25.500.000	-	-	2	-						0	-	0,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
			Pemberdayaan Kapasitas kelembagaan	Jumlah waktu pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas kelembagaan	48	85.000.000	-	-	2	-						0	-	0,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
			Pelaksanaan Musrenbang	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan	5	150.000.000	-	-	1	32.238.000	1	32.238.000	100,00	100,00	1	32.238.000	20,00	21,49	KECAMATAN BUKIT INTAN
			Pelaksanaan Gotong Royong	Jumlah waktu pelaksanaan Kegiatan Gotong Royong	60	148.000.000	-	-	12	25.000.000	12	22.827.000	100,00	91,31	12	22.827.000	20,00	15,42	KECAMATAN BUKIT INTAN
			Peningkatan Pelayanan Hubungan Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Hubungan Kemasyarakatan	5	520.000.000	-	-	1	-					0	-	0,00	0,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
			Hari Jadi Kota Pangkalpinang	Jumlah Kegiatan Peringatan Hari Jadi Kota Pangkapinang	5	220.000.000	-	-	1	-					0	-	0,00	0,00	KECAMATAN BUKIT INTAN
			Pelaksanaan STQ/MTQ	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan STQ/MTQ	5	1.150.000.000		-	1	196.294.000	1	190.394.000	100,00	96,99	1	190.394.000	20,00	16,56	KECAMATAN BUKIT INTAN
			Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	1	148.000.000	-	-	1	5.000.000	1	4.900.000	100,00	98,00	1	4.900.000	100,00	3,31	KECAMATAN BUKIT INTAN
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Pasir Putih	Jumlah Waktu Peningkatan pelayanan administrasi kelurahan Pasir Putih	60	850.000.000	-	-	12	810.578.000	6	100.750.377	50,00	12,43	6	100.750.377	10,00	11,85	KECAMATAN BUKIT INTAN
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Sinar Bulan	Jumlah Waktu Peningkatan pelayanan administrasi kelurahan Sinar Bulan	60	850.000.000	-	-	12	110.578.000	12	92.298.300	100,00	83,47	12	92.298.300	20,00	10,86	KECAMATAN BUKIT INTAN
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Temberan	Jumlah Waktu Peningkatan pelayanan administrasi kelurahan Temberan	60	850.000.000	-	-	12	108.850.000	12	101.616.795	100,00	93,35	12	101.616.795	20,00	11,95	KECAMATAN BUKIT INTAN
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Semabung lama	Jumlah Waktu Peningkatan pelayanan administrasi kelurahan Semabung Lama	60	850.000.000	-	-	12	120.525.000	12	99.518.692	100,00	82,57	12	99.518.692	20,00	11,71	KECAMATAN BUKIT INTAN
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Air Mawar	Jumlah Waktu Peningkatan pelayanan administrasi kelurahan Air Mawar	60	850.000.000	-	-	12	122.500.000	12	113.706.745	100,00	92,82	12	113.706.745	20,00	13,38	KECAMATAN BUKIT INTAN
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Bacang	Jumlah Waktu Peningkatan pelayanan administrasi kelurahan Bacang	60	850.000.000	-	-	12	110.578.000	12	96.652.252	100,00	87,41	12	96.652.252	20,00	11,37	KECAMATAN BUKIT INTAN
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Air Itam	Jumlah Waktu Peningkatan pelayanan administrasi kelurahan Air Itam	60	850.000.000	-	-	12	110.578.000	12	95.506.433	100,00	86,37	12	95.506.433	20,00	11,24	KECAMATAN BUKIT INTAN
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pasir Putih	Jumlah waktu pemberdayaan Masyarakat kelurahan	60	1.950.000.000	-	-	12	364.500.000	12	352.457.000	100,00	96,70	12	352.457.000	20,00	18,07	KECAMATAN BUKIT INTAN
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sinar Bulan	Jumlah waktu pemberdayaan Masyarakat kelurahan	60	1.950.000.000	-	-	12	364.500.000	12	328.764.500	100,00	90,20	12	328.764.500	20,00	16,86	KECAMATAN BUKIT INTAN
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Temberan	Jumlah waktu pemberdayaan Masyarakat kelurahan	60	1.950.000.000	-	-	12	360.500.000	12	321.425.014	100,00	89,16	12	321.425.014	20,00	16,48	KECAMATAN BUKIT INTAN
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan semabung lama	Jumlah waktu pemberdayaan Masyarakat kelurahan	60	1.950.000.000	-	-	12	427.790.000	12	412.831.500	100,00	96,50	12	412.831.500	20,00	21,17	KECAMATAN BUKIT INTAN
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan air mawar	Jumlah waktu pemberdayaan Masyarakat kelurahan	60	1.950.000.000	-	-	12	360.500.000	12	334.080.937	100,00	92,67	12	334.080.937	20,00	17,13	KECAMATAN BUKIT INTAN
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bacang	Jumlah waktu pemberdayaan Masyarakat kelurahan	60	1.950.000.000	-	-	12	364.500.000	12	337.458.979	100,00	92,58	12	337.458.979	20,00	17,31	KECAMATAN BUKIT INTAN
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Air Itam	Jumlah waktu pemberdayaan Masyarakat kelurahan	60	1.950.000.000	-	-	12	364.500.000	12	323.644.288	100,00	88,79	12	323.644.288	20,00	16,80	KECAMATAN BUKIT INTAN
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasir Putih	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana	8	1.850.000.000	-	-	4	373.838.000	4	278.392.000	100,00	74,47	4	278.392.000	50,00	15,05	KECAMATAN BUKIT INTAN
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sinar Bulan	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana	8	1.850.000.000	-	-	4	373.838.000	4	357.915.000	100,00	95,74	4	357.915.000	50,00	19,35	KECAMATAN BUKIT INTAN
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Temberan	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana	8	1.850.000.000	-	-	4	373.838.000	4	346.187.000	100,00	92,60	4	346.187.000	50,00	18,71	KECAMATAN BUKIT INTAN
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Semabung Lama	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana	8	1.850.000.000	-	-	4	373.838.000	4	369.245.000	100,00	98,77	4	369.245.000	50,00	19,96	KECAMATAN BUKIT INTAN
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Mawar	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana	8	1.850.000.000	-	-	4	373.838.000	4	350.632.600	100,00	93,79	4	350.632.600	50,00	18,95	KECAMATAN BUKIT INTAN
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bacang	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana	8	1.850.000.000	-	-	4	373.838.000	4	350.709.000	100,00	93,81	4	350.709.000	50,00	18,96	KECAMATAN BUKIT INTAN
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Itam	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana	8	1.850.000.000	-	-	4	373.838.000	4	365.551.000	100,00	97,78	4	365.551.000	50,00	19,76	KECAMATAN BUKIT INTAN
			Pendukung Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)	Jumlah kegiatan Pendukung pencegahan dan penanganan Corona virus disease (COVID 19)	1	1.850.000.000			1	183.350.000	1	170.305.000	100,00	92,89	1	170.305.000	100,00	9,21	KECAMATAN BUKIT INTAN
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										96,28	83,28			28,03	12,82	
			PREDIKAT KINERJA										ST	T			SR	SR	
			KECAMATAN RANGKUI																
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			5.522.500.000		-		597.048.000		563.220.107				563.220.107			KECAMATAN RANGKUI
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah waktu penyediaan surat menyurat	48	305.000.000			12	65.148.500	12	65.148.500	100,00	100,00	12	65.148.500	25,00	21,36	KECAMATAN RANGKUI
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyedia jasa komunikasi, SDA dan listrik	60	610.000.000			12	79.890.000	12	58.561.107	100,00	73,30	12	58.561.107	20,00	9,60	KECAMATAN RANGKUI
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah waktu penyedia jasa keuangan	60	2.050.000.000			12	282.513.000	12	274.963.000	100,00	97,33	12	274.963.000	20,00	13,41	KECAMATAN RANGKUI

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4		5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6+8		11=10/5*100%		12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah waktu jasa kebersihan kantor	60	400.000.000			12	61.343.500	12	59.667.000	100,00	97,27	12	59.667.000	20,00	14,92	KECAMATAN RANGKUI
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah waktu penyediaan jasa perbaikan Peralatan kerja	60	167.500.000			12	20.750.000	12	20.750.000	100,00	100,00	12	20.750.000	20,00	12,39	KECAMATAN RANGKUI
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Waktu Penyediaan ATK	60	200.000.000			12	9.474.000	12	9.463.000	100,00	99,88	12	9.463.000	20,00	4,73	KECAMATAN RANGKUI
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Waktu Penyediaan barang cetak dan penggandaan	60	140.000.000			12	5.745.000	12	5.743.000	100,00	99,97	12	5.743.000	20,00	4,10	KECAMATAN RANGKUI
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah waktu Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60	120.000.000			12	10.000.000	12	10.000.000	100,00	100,00	12	10.000.000	20,00	8,33	KECAMATAN RANGKUI
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Waktu Penyediaan makan dan minum	60	300.000.000			12	11.700.000	12	8.992.500	100,00	76,86	12	8.992.500	20,00	3,00	KECAMATAN RANGKUI
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah yang mengikuti rapat-rapat koordinasi kelurahan daerah yg dilaksanakan	60	1.230.000.000			12	50.482.000	12	49.932.000	100,00	98,91	12	49.932.000	20,00	4,06	KECAMATAN RANGKUI
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	94,33			20,50	9,59	
			PREDIKAT KINERJA										ST	ST			SR	SR	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.700.000.000		-		189.027.700		186.022.464				156.102.464			KECAMATAN RANGKUI
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah waktu pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	60	1.250.000.000			12	92.600.000	12	90.840.000	100,00	98,10	12	90.840.000	20,00	7,27	KECAMATAN RANGKUI
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60	450.000.000			12	66.427.700	12	65.262.464	100,00	98,25	12	65.262.464	20,00	14,50	KECAMATAN RANGKUI
			Pengadaan Website	Jumah paket pengadaan	1	150.000.000			1	30.000.000	1	29.920.000	100,00	99,73	1	29.920.000	100,00	19,95	KECAMATAN RANGKUI
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	98,41			46,67	13,91	
			PREDIKAT KINERJA										ST	ST			SR	SR	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			420.000.000		-		6.750.000		6.750.000				-			KECAMATAN RANGKUI
			Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN mengikuti Pelatihan	10	250.000.000			10	-					0	-	0,00	0,00	KECAMATAN RANGKUI
			Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Jumlah Peserta Sosialisasi	100	170.000.000			100	-					0	-	0,00	0,00	KECAMATAN RANGKUI
			Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	30	14.000.000			2	6.750.000	2	6.750.000	100,00	100,00	2	6.750.000	6,67	48,21	
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	100,00			2,22	16,07	
			PREDIKAT KINERJA										ST	ST			SR	SR	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			348.000.000		-		12.500.000		12.500.000				12.500.000			KECAMATAN RANGKUI
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar rea	1	49.000.000			1	3.500.000	1	3.500.000	100,00	100,00	1	3.500.000	100,00	7,14	KECAMATAN RANGKUI
			Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	1	49.000.000			1	-					0	-	0,00	0,00	KECAMATAN RANGKUI
			penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	3	49.000.000			1	4.000.000	1	4.000.000	100,00	100,00	1	4.000.000	33,33	8,16	KECAMATAN RANGKUI
			Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)	Jumlah Laporan Renja (RKT,RKA dan DPA)	3	49.000.000			3	5.000.000	3	5.000.000	100,00	100,00	3	5.000.000	100,00	10,20	
			Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD	Jumlah LAporan SPIP	1	150.000.000			1	-					0	-	0,00	0,00	KECAMATAN RANGKUI
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	100,00			46,67	5,10	
			PREDIKAT KINERJA										ST	ST			SR	SR	
			Program Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan			60.375.000.000		-		7.936.929.082		6.957.134.506				6.731.619.506			KECAMATAN RANGKUI
			Lomba Kelurahan	jumlah peserta lomba	8	25.000.000			8	10.000.000	8	10.000.000	100,00	100,00	8	10.000.000	100,00	40,00	KECAMATAN RANGKUI
			Pembinaan Kelurahan Terbaik	jumlah kelurahan terbaik	1	25.000.000			1	10.000.000	1	10.000.000	100,00	100,00	1	10.000.000	100,00	40,00	KECAMATAN RANGKUI
			Rapat Koordinasi lembaga kemasyarakatan						1	30.000.000	1	30.000.000	100,00	100,00					
			Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu		12	295.000.000			12	29.105.000	12	27.605.000	100,00	94,85	12	27.605.000	100,00	9,36	KECAMATAN RANGKUI
			Penyusunan dan Implementasi SOP		2	90.000.000			2	-					0	-	0,00	0,00	KECAMATAN RANGKUI
			Pembinaan PKK	Jumlah waktu pelaksanaan Kegiatan Pembinaan PKK	12	560.000.000			12	58.470.000	9	57.640.000	75,00	98,58	9	57.640.000	75,00	10,29	KECAMATAN RANGKUI
			Pembinaan UKS	Jumlah peserta UKS	30	345.000.000			30	10.900.000	30	10.900.000	100,00	100,00	30	10.900.000	100,00	3,16	KECAMATAN RANGKUI
			Kecamatan Sayang Ibu (KSI)	jumlah org mengikuti KSI	60	340.000.000			60	8.775.000	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	KECAMATAN RANGKUI
			Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kota di Kecamatan	Jumlah peserta Musrenbang	150	275.000.000			150	17.996.500	150	17.996.500	100,00	100,00	150	17.996.500	100,00	6,54	KECAMATAN RANGKUI
			Pelaksanaan Gotong Royong	Jumlah pelaksanaan gotong royong	12	240.000.000			12	15.000.000	12	23.749.000	100,00	158,33	12	23.749.000	100,00	9,90	KECAMATAN RANGKUI
			Peningkatan pelayanan hubungan kemasyarakatan	Jumlah lomba yg ada di pelayanan hubungan kemasyarakatan	3	745.000.000			3	7.225.000	3	7.225.000	100,00	100,00	3	7.225.000	100,00	0,97	KECAMATAN RANGKUI
			Peringatan Hari Jadi Kota Pangkalpinang	Jumlah Lomba di peringatan hari jadi kota pangkalpinang	3	775.000.000			3	600.000	0	600.000	0,00	100,00	0	600.000	0,00	0,08	KECAMATAN RANGKUI
			Pelaksanaan MTQ/ STQ Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan MTQ	1	1.280.000.000			1	191.505.000	1	191.505.000	100,00	100,00	1	191.505.000	100,00	14,96	KECAMATAN RANGKUI
			Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah waktu Pembinaan keamanan dan ketertiban Masvarakat	12	220.000.000			12	-					0	-	0,00	0,00	KECAMATAN RANGKUI

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pengkalang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=8*8		11=10/6*100%				
				K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Tingkat Kecamatan		2	160.000.000		2	-							0	-	0,00	0,00	KECAMATAN RANGKUI
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Pintu Air	Jumlah Waktu peningkatan Pelayanan ADM Kelurahan Pintu Air	12	3.200.000.000		12	827.921.100	12	125.311.430	100,00	15,14	12	125.311.430	100,00	3,92		KECAMATAN RANGKUI	
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Bintang	Jumlah Waktu Peningkatan Pelayanan ADM Kelurahan Bintang	12	3.200.000.000		12	88.276.800	12	85.205.111	100,00	96,52	12	85.205.111	100,00	2,66		KECAMATAN RANGKUI	
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Gajah Mada	Jumlah Waktu Peningkatan Pelayanan ADM Kelurahan gajah mada	12	3.200.000.000		12	103.442.600	12	97.277.801	100,00	94,04	12	97.277.801	100,00	3,04		KECAMATAN RANGKUI	
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Masjid Jamik	Jumlah Waktu Peningkatan Pelayanan ADM Kelurahan Masjid Jamik	12	3.200.000.000		12	99.001.322	12	94.047.774	100,00	95,00	12	94.047.774	100,00	2,94		KECAMATAN RANGKUI	
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Asam	Jumlah Waktu Peningkatan Pelayanan ADM Kelurahan Asam	12	3.200.000.000		12	150.713.880	12	142.050.023	100,00	94,25	12	142.050.023	100,00	4,44		KECAMATAN RANGKUI	
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Melintang	Jumlah Waktu Peningkatan Pelayanan ADM Kelurahan Melintang	12	3.200.000.000		12	127.230.550	12	118.402.960	100,00	93,06	12	118.402.960	100,00	3,70		KECAMATAN RANGKUI	
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Parit Lalang	Jumlah Waktu Peningkatan Pelayanan ADM Kelurahan Parit Lalang	12	3.200.000.000		12	139.905.000	12	122.750.134	100,00	87,74	12	122.750.134	100,00	3,84		KECAMATAN RANGKUI	
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Keramat	Jumlah Waktu Peningkatan Pelayanan ADM Kelurahan Keramat	12	3.200.000.000		12	129.957.900	12	125.293.764	100,00	96,41	12	125.293.764	100,00	3,92		KECAMATAN RANGKUI	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Pintu Air	Jumlah Waktu Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan	12	1.875.000.000		12	342.783.202	12	341.016.488	100,00	99,48	12	341.016.488	100,00	18,19		KECAMATAN RANGKUI	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Bintang	Jumlah Waktu Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan	12	1.875.000.000		12	334.259.500	12	291.086.058	100,00	87,08	12	291.086.058	100,00	15,52		KECAMATAN RANGKUI	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Gajah Mada	Jumlah Waktu Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan	12	1.875.000.000		12	335.793.000	12	316.085.055	100,00	94,13	12	316.085.055	100,00	16,86		KECAMATAN RANGKUI	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Masjid Jamik	Jumlah Waktu Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan	12	1.875.000.000		12	310.121.600	12	301.928.550	100,00	97,36	12	301.928.550	100,00	16,10		KECAMATAN RANGKUI	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Asam	Jumlah Waktu Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan	12	1.875.000.000		12	315.533.100	12	289.232.100	100,00	91,66	12	289.232.100	100,00	15,43		KECAMATAN RANGKUI	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Melintang	Jumlah Waktu Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan	12	1.875.000.000		12	344.346.114	12	334.346.114	100,00	97,10	12	334.346.114	100,00	17,83		KECAMATAN RANGKUI	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Parit Lalang	Jumlah Waktu Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan	12	1.875.000.000		12	359.710.000	12	316.522.842	100,00	87,99	12	316.522.842	100,00	16,88		KECAMATAN RANGKUI	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Keramat	Jumlah Waktu Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan	12	1.875.000.000		12	344.302.914	12	333.079.802	100,00	96,74	12	333.079.802	100,00	17,76		KECAMATAN RANGKUI	
			Pembanguna Sarana dan Prasarana Kelurahan Pintu Air	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan prasarana	1	1.800.000.000		1	373.838.000	1	370.887.000	100,00	99,21	1	370.887.000	100,00	20,60		KECAMATAN RANGKUI	
			Pembanguna Sarana dan Prasarana Kelurahan Bintang	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan prasarana	1	1.800.000.000		1	373.838.000	1	369.980.000	100,00	98,97	1	369.980.000	100,00	20,55		KECAMATAN RANGKUI	
			Pembanguna Sarana dan Prasarana Kelurahan Gajah Mada	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan prasarana	1	1.800.000.000		1	373.838.000	1	373.283.000	100,00	99,85	1	373.283.000	100,00	20,74		KECAMATAN RANGKUI	
			Pembanguna Sarana dan Prasarana Kelurahan Masjid Jamik	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan prasarana	1	1.800.000.000		1	373.838.000	1	373.538.000	100,00	99,92	1	373.538.000	100,00	20,75		KECAMATAN RANGKUI	
			Pembanguna Sarana dan Prasarana Kelurahan Asam	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan prasarana	1	1.800.000.000		1	373.838.000	1	373.438.000	100,00	99,89	1	373.438.000	100,00	20,75		KECAMATAN RANGKUI	
			Pembanguna Sarana dan Prasarana Kelurahan Melintang	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan prasarana	1	1.800.000.000		1	373.838.000	1	372.188.000	100,00	99,56	1	372.188.000	100,00	20,68		KECAMATAN RANGKUI	
			Pembanguna Sarana dan Prasarana Kelurahan P. Lalang	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan prasarana	1	1.800.000.000		1	373.838.000	1	353.205.000	100,00	94,48	1	353.205.000	100,00	19,62		KECAMATAN RANGKUI	
			Pembanguna Sarana dan Prasarana Kelurahan Keramat	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan prasarana	1	1.800.000.000		1	373.838.000	1	354.144.000	100,00	94,73	1	354.144.000	100,00	19,67		KECAMATAN RANGKUI	
			Pendukung Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)					1	203.350.000	1	195.615.000	100,00	96,20	1						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9=8/7*100%		10=8*6		11=10/5*100%		12
					K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jenis peralatan kebersihan dan bahan p	60	184.916.500	48	53.088.000	12	60.451.000	12	60.451.000	100,00	100,00	60	113.539.000	100,00	61,40	KECAMATAN GERUNGANG
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yan	60	130.650.000	48	20.275.100	12	19.000.000	12	18.997.100	100,00	99,98	60	39.272.200	100,00	30,06	KECAMATAN GERUNGANG
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	60	175.349.000	48	11.200.000	12	20.443.500	12	20.290.500	100,00	99,25	60	31.490.500	100,00	17,96	KECAMATAN GERUNGANG
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis belanja cetak dan penggandaan (	60	112.295.000	48	22.075.000	12	11.165.000	12	11.134.900	100,00	99,73	60	33.209.900	100,00	29,57	KECAMATAN GERUNGANG
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik, elektronik dan penerangan k	60	34.685.000	48	8.620.000	12	7.000.000	12	7.000.000	100,00	100,00	60	15.620.000	100,00	45,03	KECAMATAN GERUNGANG
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket pengadaan	60	489.869.500	16	10.160.000	12	2.160.000	12	1.800.000	100,00	83,33	28	11.960.000	46,67	2,44	KECAMATAN GERUNGANG
			Penyediaan makanan dan minuman	Persentase makanan dan minuman pegawai ya	60	75.000.000	48	29.040.000	12	7.040.000	12	3.440.000	100,00	48,86	60	32.480.000	100,00	43,31	KECAMATAN GERUNGANG
			Rapat-rapat Koordinasi Keluar Daerah	Jumlah pegawai yang berangkat	60	1.000.000.000	48	150.000.000	12	76.860.000	12	76.810.008	100,00	99,93	60	226.810.008	100,00	22,68	KECAMATAN GERUNGANG
			Pemasangan baru/penambahan daya listrik		60	25.000.000	48	-	12	9.960.500	12	9.960.500	100,00	100,00	60	9.960.500	100,00	39,84	KECAMATAN GERUNGANG
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)													100,00	97,90			93,89	35,25	
PREDIKAT KINERJA													ST	ST			ST	SR	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.750.000.000		326.282.000		173.424.217		134.403.658				460.665.658			KECAMATAN GERUNGANG
			Pembangunan gedung kantor	Jumlah paket pengerjaan pengadaan peralatan	10	350.000.000	9	-	1	-					9	-	90,00	0,00	KECAMATAN GERUNGANG
			Pengadaan meubelair	Jumlah paket pengerjaan pengadaan Meubelair	10	350.000.000	7	142.100.000	5	-					7	142.100.000	70,00	40,60	KECAMATAN GERUNGANG
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		60	500.000.000,00	48	100.000.000	12	87.205.717,00	12	87.095.000	100,00	99,87	60	187.095.000	100,00	37,42	KECAMATAN GERUNGANG
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dilakukan pemeliharaan	60	550.000.000,00	48	84.162.000	12	86.218.500,00	12	47.308.658	100,00	54,87	60	131.470.658	100,00	23,90	KECAMATAN GERUNGANG
			Pengadaan website		1	-	1	-	1	-					1	-	100,00	0,00	KECAMATAN GERUNGANG
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)													100,00	77,50			92,00	20,38	
PREDIKAT KINERJA													ST	T			ST	SR	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			168.520.000		100.000.000		17.500.000		15.750.000				115.750.000			KECAMATAN GERUNGANG
			Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah kegiatan pengadaan pakaian dinas	3	-	2	75.000.000	1	-					2	75.000.000	66,67	0,00	KECAMATAN GERUNGANG
			Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	Jumlah kegiatan pengadaan pakaian dinas	10	168.520.000			5	17.500.000	5	15.750.000	100,00	90,00	5	15.750.000	50,00	9,35	KECAMATAN GERUNGANG
			Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Jumlah kegiatan pengadaan pakaian dinas	3	-	2	25.000.000	1	-					2	25.000.000	66,67	0,00	KECAMATAN GERUNGANG
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)													100,00	90,00			81,11	3,12	
PREDIKAT KINERJA													ST	T			R	SR	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			-		22.800.000		16.495.800		13.968.050				36.568.050			KECAMATAN GERUNGANG
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan/dokumen Capaian Kinerja dan	5	-	4	3.150.000	1	3.495.800,00	1	3.495.800	100,00	100,00	5	6.645.800	100,00	0,00	KECAMATAN GERUNGANG
			Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan/dokumen Keuangan Semester	5	-	4	3.150.000	1	4.000.000,00	1	3.977.500	100,00	99,44	5	7.127.500	100,00	0,00	KECAMATAN GERUNGANG
			penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan/dokumen Keuangan Akhir Tah	5	-	4	3.150.000	1	4.000.000,00	1	4.000.000	100,00	100,00	5	7.150.000	100,00	0,00	KECAMATAN GERUNGANG
			Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)	Jumlah laporan/dokumen Renja	20	-	16	3.150.000	4	5.000.000,00	4	2.494.750	100,00	49,90	20	5.644.750	100,00	0,00	KECAMATAN GERUNGANG
			Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIIP di Lingkungan OPD	Jumlah laporan/dokumen Renja	20	-	16	10.000.000	4	-					16	10.000.000	80,00	0,00	KECAMATAN GERUNGANG
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)													100,00	84,68			96,00	0,00	
PREDIKAT KINERJA													ST	T			ST	SR	
			Program Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan			50.131.000		4.225.335.000		6.486.854.642		5.324.059.156				9.392.644.156			KECAMATAN GERUNGANG
			Lomba Kelurahan	Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba	30	50.131.000	6	9.760.000	6	8.829.000	6	8.829.000	100,00	100,00	12	18.589.000	40,00	37,08	KECAMATAN GERUNGANG
			Pembinaan Kelurahan Terbaik		30	-	6	-	6	8.219.000	6	8.210.450	100,00	99,90	12	8.210.450	40,00	0,00	KECAMATAN GERUNGANG
			Rapat Koordinasi lembaga kemasyarakatan		60		12	8.800.000	1	35.500.000	1	35.480.000	100,00	99,94	13	44.280.000	21,67	0,00	KECAMATAN GERUNGANG
			Penyelenggaraan administrasi pelayanan terpadu (PATEN)		60		12	-	12	15.025.000	9	15.025.000	75,00	100,00	21	15.025.000	35,00	0,00	KECAMATAN GERUNGANG
			Pembinaan PKK		60		12	145.000.000	12	21.000.000	12	20.582.500	100,00	98,01	24	165.582.500	40,00	0,00	KECAMATAN GERUNGANG
			Pelaksanaan KSI		60		12	11.940.000	12	-					12	11.940.000	20,00	0,00	KECAMATAN GERUNGANG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4		5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6+8		11=10/6*100%		12	
					K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Pemberdayaan Kapasitas kelembagaan		20		4	-	4	-					4	-	20,00	0,00	KECAMATAN GERUNGANG	
			Sosialisasi Forum Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak		60		12	-	12	-					12	-	20,00	0,00	KECAMATAN GERUNGANG	
			Pelaksanaan Musrenbang		60		12	28.401.000	12	26.031.500	12	26.031.500	100,00	100,00	24	54.432.500	40,00	0,00	KECAMATAN GERUNGANG	
			Pelaksanaan Gotong Royong		60		12	8.528.000	12	3.000.000	12	2.988.000	100,00	99,60	24	11.516.000	40,00	0,00	KECAMATAN GERUNGANG	
			Peningkatan Pelayanan Hubungan Kemasyarakatan		60		12	93.347.800	12	-					12	93.347.800	20,00	0,00	KECAMATAN GERUNGANG	
			Hari Jadi Kota Pangkalpinang		60		12	22.900.000	12	600.000	0	-	0,00	0,00	12	22.900.000	20,00	0,00	KECAMATAN GERUNGANG	
			Pelaksanaan STQ/MTQ		60		12	100.000.000	12	192.350.000	6	190.900.000	50,00	99,25	18	290.900.000	30,00	0,00	KECAMATAN GERUNGANG	
			Pembinaan Keamanan dan ketertiban umum		60		12	15.406.000	12	-					12	15.406.000	20,00	0,00	KECAMATAN GERUNGANG	
			Monitoring UKS		60	-	12	-	12	-					12	-	20,00	0,00	KECAMATAN GERUNGANG	
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Taman Bunga		60		12	919.998.000	12	802.102.300,00	12	101.277.697	100,00	12,63	24	1.021.275.697	40,00	0,00	KECAMATAN GERUNGANG	
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Bukit Merapi		60		12	200.741.000	12	102.585.000	12	69.603.016	100,00	67,85	24	270.344.016	40,00	0,00	KECAMATAN GERUNGANG	
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Air Kepala Tujuh		60		12	199.341.000	12	93.586.516	12	73.314.255	100,00	78,34	24	272.655.255	40,00	0,00	KECAMATAN GERUNGANG	
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Bukit Sari		60		12	219.998.000	12	107.806.000	12	101.135.592	100,00	93,81	24	321.133.592	40,00	0,00	KECAMATAN GERUNGANG	
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Tua Tunu Indah		60		12	221.751.000	12	112.958.100	12	103.654.560	100,00	91,76	24	325.405.560	40,00	0,00	KECAMATAN GERUNGANG	
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Kacang Pedang		60		12	219.998.000	12	112.242.584	12	107.907.834	100,00	96,14	24	327.905.834	40,00	0,00	KECAMATAN GERUNGANG	
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Taman Bunga		60		12	295.000.400	12	407.010.214	12	354.866.785	100,00	87,19	24	649.867.185	40,00	0,00	KECAMATAN GERUNGANG	
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bukit Merapi		60		12	323.458.800	12	426.076.214	12	366.725.073	100,00	86,07	24	690.183.873	40,00	0,00	KECAMATAN GERUNGANG	
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Air Kepala Tujuh		60		12	279.871.600	12	399.709.000	12	311.409.570	100,00	77,91	24	591.281.170	40,00	0,00	KECAMATAN GERUNGANG	
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bukit Sari		60		12	291.921.600	12	397.830.500	12	336.467.274	100,00	84,58	24	628.388.874	40,00	0,00	KECAMATAN GERUNGANG	
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tua Tunu Indah		60		12	300.050.400	12	396.960.214	12	334.209.300	100,00	84,19	24	634.259.700	40,00	0,00	KECAMATAN GERUNGANG	
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kacang Pedang		60	-	12	309.122.400	12	411.055.500	12	382.909.650	100,00	93,15	24	692.032.050	40,00	0,00	KECAMATAN GERUNGANG	
			Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Taman Bunga		60		12	-	12	373.838.000	12	372.465.000	100,00	99,63	24	372.465.000	40,00	0,00	KECAMATAN GERUNGANG	
			Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Bukit Merapi		60		12	-	12	373.838.000	12	368.457.000	100,00	98,56	24	368.457.000	40,00	0,00	KECAMATAN GERUNGANG	
			Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Air Kepala Tujuh		60		12	-	12	373.838.000	12	368.258.000	100,00	98,51	24	368.258.000	40,00	0,00	KECAMATAN GERUNGANG	
			Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Bukit Sari		60		12	-	12	373.838.000	12	366.843.000	100,00	98,13	24	366.843.000	40,00	0,00	KECAMATAN GERUNGANG	
			Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Tua Tunu Indah		60		12	-	12	373.838.000	12	370.905.100	100,00	99,22	24	370.905.100	40,00	0,00	KECAMATAN GERUNGANG	
			Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Kacang Pedang		60	-	12	-	12	373.838.000	12	368.854.000	100,00	98,67	24	368.854.000	40,00	0,00	KECAMATAN GERUNGANG	
			Pendukung Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)						1	163.350.000	1	156.750.000	100,00	95,96						
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										93,75	82,07		34,75	1,12			
			PREDIKAT KINERJA										ST	T		SR	SR			
			KECAMATAN TAMAN SARI																	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			4.720.817.620		788.019.600				530.865.281					1.257.474.822			KECAMATAN TAMAN SARI
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi sum	48	504.715.100	12	96.307.100	12	106.314.780	12	57.150.722	100,00	53,76	24	153.457.822	50,00	30,40	KECAMATAN TAMAN SARI	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah jasa administrasi keuangan yang tersed	70	1.977.667.779	14	323.937.000	14	315.370.000	10	309.790.000	71,43	98,23	24	633.727.000	34,29	32,04	KECAMATAN TAMAN SARI	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah jasa kantor	10	343.231.600	1	57.346.000	1	42.600.000	1	42.600.000	100,00	100,00	2	99.946.000	20,00	29,12	KECAMATAN TAMAN SARI	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	jumlah peralatan kerja yang mendapat perbaik	25	236.389.472	5	38.720.000	5	16.250.000	4	16.250.000	80,00	100,00	9	54.970.000	36,00	23,25	KECAMATAN TAMAN SARI	
			Penyediaan alat tulis kantor	jumlah waktu ATK yang dibeli	60	58.608.960	12	9.600.000	12	15.962.500	9	15.945.500	75,00	99,89	21	25.545.500	35,00	43,59	KECAMATAN TAMAN SARI	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah jenis cetakan dan penggandaan	10	185.283.680	2	30.349.000	2	16.267.500	1	9.979.000	50,00	61,34	3	40.328.000	30,00	21,77	KECAMATAN TAMAN SARI	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6+8		11=10/5*100%		12		
					K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah jenis komponen instalasi dan listrik/pene	90	74.604.322	18	12.220.000	18	-					18	12.220.000	20,00	16,38	KECAMATAN TAMAN SARI	
			Penyediaan makanan dan minuman	jumlah waktu penyediaan makanan dan minum	60	308.918.060	12	50.600.000	12	2.290.000	9	2.290.000	75,00	100,00	21	52.890.000	35,00	17,12	KECAMATAN TAMAN SARI	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah rapat-rapat koordinasi keluar daerah ya	60	1.031.398.647	12	168.940.500	12	15.810.501	9	15.450.000	75,00	97,72	21	184.390.500	35,00	17,88	KECAMATAN TAMAN SARI	
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												78,30	88,43		32,81	25,73	
			PREDIKAT KINERJA												T	T		SR	SR	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			931.165.115		152.522.500		78.278.600		66.154.806				218.677.306			KECAMATAN TAMAN SARI	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala	5	503.670.750	1	82.500.000	1	21.300.000	1	21.300.000	100,00	100,00	2	103.800.000	40,00	20,61	KECAMATAN TAMAN SARI	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemel	-	427.494.365	3	70.022.500	3	56.978.600	2	44.854.806	66,67	78,72	5	114.877.306	0	26,87	KECAMATAN TAMAN SARI	
			Pemeliharaan website	jumlah waktu pemeliharaan website	60		12	-	12	-					12	-	20,00	0,00	KECAMATAN TAMAN SARI	
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												83,33	84,51		20,00	15,83	
			PREDIKAT KINERJA												T	T		SR	SR	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			92.820.000		-		-		-				-			KECAMATAN TAMAN SARI	
			Sosialisasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah Peserta	280	92.820.000	4	-	4	-					4	-	1,43	0,00	KECAMATAN TAMAN SARI	
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)															1,43	0,00	
			PREDIKAT KINERJA															SR	SR	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			210.281.000		20.000.000		16.500.000		12.500.000				32.500.000			KECAMATAN TAMAN SARI	
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah jenis laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	37.307.500	1	2.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	100,00	100,00	2	6.000.000	40,00	16,08	KECAMATAN TAMAN SARI	
			Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah jenis laporan keuangan akhir tahun	5	37.307.500	1	2.500.000	1	4.000.000	1	4.000.000	100,00	100,00	2	6.500.000	40,00	17,42	KECAMATAN TAMAN SARI	
			penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah jenis laporan keuangan akhir tahun	5	37.307.500	1	2.500.000	1	4.000.000	1	2.500.000	100,00	62,50	2	5.000.000	40,00	13,40	KECAMATAN TAMAN SARI	
			Penyusunan RENJA (RKT,RKA,DPA)	Jumlah jenis penyusunan renja (RKT,RKA,DPA)	5	37.307.500	1	2.500.000	1	5.000.000	1	2.500.000	100,00	50,00	2	5.000.000	40,00	13,40	KECAMATAN TAMAN SARI	
			Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD	Jumlah Laporan SPIP	5	61.051.000	1	10.000.000	1	-					1	10.000.000	20,00	16,38	KECAMATAN TAMAN SARI	
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												100,00	75,76		36,00	15,34	
			PREDIKAT KINERJA												ST	S		SR	SR	
			Program Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan			37.276.525.675		2.157.853.000		5.373.039.699		4.344.964.635				6.373.067.635			KECAMATAN TAMAN SARI	
			Rapat koordinasi lembaga kemasyarakatan	jumlah waktu rapat koordinasi lembaga kemasyarakatan	15	396.805.500	3	45.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	100,00	100,00	6	75.000.000	40,00	18,90	KECAMATAN TAMAN SARI	
			Pemilihan RT/RW	Terlaksananya Pemilihan RT/RW	2	94.500.000	1	-	1	20.000.000	1	20.000.000	100,00	100,00	2	20.000.000	100,00	21,16	KECAMATAN TAMAN SARI	
			Pembinaan PKK	Jumlah Kelompok PKK yang mendapat pembinaan	60	612.365.950	12	100.304.000	12	97.246.000	12	66.746.000	100,00	68,64	24	167.050.000	40,00	27,28	KECAMATAN TAMAN SARI	
			Kecamatan Sayang Ibu (KSI)	Jumlah Pelaksanaan Acara Kecamatan Sayang Ibu(KSI)	5	91.576.500	1	15.000.000	1	-					1	15.000.000	20,00	16,38	KECAMATAN TAMAN SARI	
			Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kota di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan	500	189.936.000	1	27.501.000	1	18.835.000	1	18.835.000	100,00	100,00	2	46.336.000	0,40	24,40	KECAMATAN TAMAN SARI	
			Pelaksanaan Gotong Royong	Jumlah Pelaksanaan Gotong -royong	240	122.102.000	48	20.000.000	48	3.750.000	0	3.750.000	0,00	100,00	48	23.750.000	20,00	19,45	KECAMATAN TAMAN SARI	
			Peningkatan pelayanan hubungan kemasyarakatan	Jumlah jenis kegiatan peningkatan pelayanan hubungan kemasyarakatan	10	885.761.486	2	145.085.500	2	-					2	145.085.500	20,00	16,38	KECAMATAN TAMAN SARI	
			Peringatan Hari Jadi Kota Pangkalpinang	Jumlah pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Kota Pangkalpinang	5	122.102.000	1	20.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	100,00	100,00	2	22.000.000	40,00	18,02	KECAMATAN TAMAN SARI	
			Pelaksanaan MTQ/ STQ Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan STQ/MTQ	5	1.389.480.000	1	90.000.000	1	178.619.199	1	178.619.199	100,00	100,00	2	268.619.199	40,00	19,33	KECAMATAN TAMAN SARI	
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Opas Indah	Jumlah waktu peningkatan pelayanan administrasi Kelurahan Opas Indah	60	901.081.500	12	135.316.500	12	814.426.000	12	95.943.270	100,00	11,78	24	231.259.770	40,00	25,66	KECAMATAN TAMAN SARI	
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Gedung Nasional	Jumlah waktu peningkatan pelayanan administrasi Kelurahan Gedung Nasional	60	901.081.500	12	135.316.500	12	117.383.500	12	106.420.387	100,00	90,66	24	241.736.887	40,00	26,83	KECAMATAN TAMAN SARI	
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Batin Tikal	Jumlah waktu peningkatan pelayanan administrasi Kelurahan Batin Tikal	60	901.081.500	12	135.316.500	12	118.194.500	12	110.785.500	100,00	93,73	24	246.102.000	40,00	27,31	KECAMATAN TAMAN SARI	
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Rawa Bangun	Jumlah waktu peningkatan pelayanan administrasi Kelurahan Rawa Bangun	60	901.081.500	12	135.316.500	12	111.012.000	12	98.828.576	100,00	89,03	24	234.145.076	40,00	25,98	KECAMATAN TAMAN SARI	
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Kejaksaan	Jumlah waktu peningkatan pelayanan administrasi Kelurahan Kejaksaan	60	901.081.500	12	135.316.500	12	94.783.500	12	81.860.483	100,00	86,37	24	217.176.983	40,00	24,10	KECAMATAN TAMAN SARI	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Opas Indah	Jumlah waktu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan organisasi tingkat Kelurahan Opas Indah	60	1.091.506.409	12	178.786.000	12	328.025.000	12	297.038.133	100,00	90,55	24	475.824.133	40,00	43,59	KECAMATAN TAMAN SARI	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4		5		6		7		8		9=8/7*100%		10=8*8		11=10/5*100%		12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Program peningkatan pengembangan alstem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			104.320.000		-		8.520.000		8.470.000				8.470.000			KECAMATAN PANGKALBALAM	
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumah dokumen lakip	5	26.080.000	-		1	2.840.000	1	2.815.000	100,00	99,12	1	2.815.000	20,00	10,79	KECAMATAN PANGKALBALAM	
			Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	5	26.080.000	-		1	-					0	-	0,00	0,00	KECAMATAN PANGKALBALAM	
			penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	5	26.080.000	-		1	2.840.000	1	2.840.000	100,00	100,00	1	2.840.000	20,00	10,89	KECAMATAN PANGKALBALAM	
			Penyusunan Renja (RKT, RKA dan DPA)	Jumlah dokumen RENJA	15	26.080.000	-		3	2.840.000	3	2.815.000	100,00	99,12	3	2.815.000	20,00	10,79	KECAMATAN PANGKALBALAM	
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											100,00	99,41			15,00	8,12	
			PREDIKAT KINERJA											ST	ST			SR	SR	
			Program Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan			33.698.699.536		-		5.554.180.538		4.232.641.401				4.178.511.401			KECAMATAN PANGKALBALAM	
			Pembinaan Kelurahan Terbaik	Keikutsertaan kelurahan dalam lomba administrasi	48	50.000.000		-	12	14.600.000	12	14.600.000	100,00	100,00	12	14.600.000	25,00	29,20	KECAMATAN PANGKALBALAM	
			Rapat Koordinasi lembaga kemasyarakatan						143	30.000.000	143	29.960.000	100,00	99,87						
			Penyelenggaraan administrasi pelayanan terpadu (PATEN)	Jumlah waktu pelayanan PATEN yang di selenggarakan	60	232.000.000	-	-	12	4.700.000	12	3.400.000	100,00	72,34	12	3.400.000	20,00	1,47	KECAMATAN PANGKALBALAM	
			Penyusunan dan Implementasi SOP Pelayanan	jumlah SOP yang tersusun dan dilaksanakan	1	84.000.000	-	-	12	-					0	-	0,00	0,00	KECAMATAN PANGKALBALAM	
			Pembinaan PKK	Jumlah PKK yang dibina	8	512.061.950	-	-	2	110.000.000	2	92.454.500	100,00	84,05	2	92.454.500	25,00	18,06	KECAMATAN PANGKALBALAM	
			Pembinaan UKS	Jumlah UKS yang dibina	48	81.681.600	-	-	2	-					0	-	0,00	0,00	KECAMATAN PANGKALBALAM	
			Pelaksanaan KSI	Terlaksananya KSI	5	76.576.500	-	-	1	-						0	-	0,00	0,00	KECAMATAN PANGKALBALAM
			Pemberdayaan Kapasitas kelembagaan	Jumlah waktu pemberdayaan kapasitas kelembagaan	60	215.500.000	-	-	12	-					0	-	0,00	0,00	KECAMATAN PANGKALBALAM	
			Pelaksanaan Musrenbang	Jumlah kehadiran masyarakat yang diundang dalam musrenbang	5	162.435.000	-	-	1	24.695.000	1	24.695.000	100,00	100,00	1	24.695.000	20,00	15,20	KECAMATAN PANGKALBALAM	
			Pelaksanaan Gotong Royong	Jumlah masyarakat yang ikut gotong royong	10.000	220.000.000	-	-	####	30.000.000	500	20.976.000	25,00	69,92	500	20.976.000	5,00	9,53	KECAMATAN PANGKALBALAM	
			Peningkatan Pelayanan Hubungan Kemasyarakatan	Terlaksananya pelayanan hubungan kemasyarakatan	5	740.675.986		-	1	-					0	-	0,00	0,00	KECAMATAN PANGKALBALAM	
			Hari Jadi Kota Pangkalpinang	Pelaksanaan hari jadi kota Pangkalpinang	1.900	148.512.000	-	-	300	53.756.176	76	2.100.000	25,33	3,91	76	2.100.000	4,00	1,41	KECAMATAN PANGKALBALAM	
			Pelaksanaan STQ/MTQ	Jumlah peserta STQ/MTQ	1.350	1.299.480.000	-	-	300	177.580.000	240	177.580.000	80,00	100,00	240	177.580.000	17,78	13,67	KECAMATAN PANGKALBALAM	
			Pembinaan Keamanan dan ketertiban umum	Jumlah Kelurahan yang mengadakan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat	60	76.576.500	-	-	12	17.500.000	12	17.500.000	100,00	100,00	12	17.500.000	20,00	22,85	KECAMATAN PANGKALBALAM	
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Pasir Garam	Jumlah waktu pelayanan administrasi Kelurahan	60	600.765.000	-	-	12	802.328.005	12	101.331.994	100,00	12,63	12	101.331.994	20,00	16,87	KECAMATAN PANGKALBALAM	
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Lontong Pancur	Jumlah waktu pelayanan administrasi Kelurahan	60	600.765.000	-	-	12	108.808.473	12	99.744.826	100,00	91,67	12	99.744.826	20,00	16,60	KECAMATAN PANGKALBALAM	
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Ketapang	Jumlah waktu pelayanan administrasi Kelurahan	60	600.765.000	-	-	12	101.754.162	12	89.072.782	100,00	87,54	12	89.072.782	20,00	14,83	KECAMATAN PANGKALBALAM	
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Ampui	Jumlah waktu pelayanan administrasi Kelurahan	60	600.765.000	-	-	12	116.412.484	12	108.278.674	100,00	93,01	12	108.278.674	20,00	18,02	KECAMATAN PANGKALBALAM	
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Rejosari	Jumlah waktu pelayanan administrasi Kelurahan	60	600.765.000	-	-	12	127.000.000	12	116.751.020	100,00	91,93	12	116.751.020	20,00	19,43	KECAMATAN PANGKALBALAM	
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pasir Garam	Jumlah waktu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	60	1.276.275.000	-	-	12	317.321.246	12	317.048.908	100,00	99,91	12	317.048.908	20,00	24,84	KECAMATAN PANGKALBALAM	
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ampui	Jumlah waktu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	60	1.276.275.000	-	-	12	330.321.248	12	308.436.250	100,00	93,37	12	308.436.250	20,00	24,17	KECAMATAN PANGKALBALAM	
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ketapang	Jumlah waktu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	60	1.276.275.000	-	-	12	368.221.248	12	329.072.000	100,00	89,37	12	329.072.000	20,00	25,78	KECAMATAN PANGKALBALAM	
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lontong Pancur	Jumlah waktu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	60	1.276.275.000	-	-	12	367.321.248	12	332.526.409	100,00	90,53	12	332.526.409	20,00	26,05	KECAMATAN PANGKALBALAM	
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rejosari	Jumlah waktu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	60	1.276.275.000	-	-	12	439.321.248	12	407.226.488	100,00	92,69	12	407.226.488	20,00	31,91	KECAMATAN PANGKALBALAM	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasir Garam	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	60	4.641.000.000	-	-	12	373.838.000	12	367.646.700	100,00	98,34	12	367.646.700	20,00	7,92	KECAMATAN PANGKALBALAM	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ampui	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	60	1.850.000.000	-	-	12	373.838.000	12	372.308.250	100,00	99,59	12	372.308.250	20,00	20,12	KECAMATAN PANGKALBALAM	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lontong Pancur	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	60	4.641.000.000	-	-	12	373.838.000	12	368.485.700	100,00	98,57	12	368.485.700	20,00	7,94	KECAMATAN PANGKALBALAM	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ketapang	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	60	4.641.000.000	-	-	12	373.838.000	12	138.140.000	100,00	36,95	12	138.140.000	20,00	2,98	KECAMATAN PANGKALBALAM	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rejosari	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	60	4.641.000.000			12	373.838.000	12	369.135.900	100,00	98,74	12	369.135.900	20,00	7,95	KECAMATAN PANGKALBALAM	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pengkajenean pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6*8		11=10/5*100%		12
					K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pendukung Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)						10	143.350.000	3	24.170.000	30,00	16,86					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)													90,41	76,21			15,60	13,46	
PREDIKAT KINERJA													T	T			SR	SR	
KECAMATAN GIRIMAYA																			
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			5.105.102.500		1.929.585.200		550.086.380		543.441.838				2.473.027.047			KECAMATAN GIRIMAYA
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Pelaksanaan tertib penatausahaan surat menyurat yang tertangani	48	240.000.000	12	-	12	49.203.250	12	49.203.250	100,00	100,00	24	49.203.250	50,00	20,50	KECAMATAN GIRIMAYA
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tertangani	60	470.000.000	12	155.395.680	12	54.510.000	12	50.604.598	100,00	92,84	24	206.000.278	40,00	43,83	KECAMATAN GIRIMAYA
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah layanan jasa administrasi keuangan yang tertangani	60	1.700.000.000	12	651.195.766	12	305.996.000	12	303.436.000	100,00	99,16	24	954.631.766	40,00	56,15	KECAMATAN GIRIMAYA
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah layanan jasa kebersihan kantor yang tertangani	60	460.000.000	12	146.754.336	12	51.782.500	12	51.779.000	100,00	99,99	24	198.533.336	40,00	43,16	KECAMATAN GIRIMAYA
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah layanan Jasa perbaikan peralatan kerja yang tertangani	60	175.000.000	12	60.635.000	12	17.650.000	12	17.650.000	100,00	100,00	24	78.285.000	40,00	44,73	KECAMATAN GIRIMAYA
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah layanan penyediaan alat tulis kantor yang tertangani	60	70.000.000	12	52.190.370	12	16.606.240	12	16.606.240	100,00	100,00	24	68.796.610	40,00	98,28	KECAMATAN GIRIMAYA
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah layanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tertangani	60	137.500.000	12	52.955.000	12	20.020.750	12	20.020.750	100,00	100,00	24	72.975.750	40,00	53,07	KECAMATAN GIRIMAYA
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah layanan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tertangani	60	62.500.000	12	16.651.000	12	8.617.000	12	8.617.000	100,00	100,00	24	25.268.000	40,00	40,43	KECAMATAN GIRIMAYA
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah layanan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang tertangani	25	275.000.000	12	261.130.000	8	-					12	261.130.000	48,00	94,96	KECAMATAN GIRIMAYA
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah layanan penyediaan peralatan rumah tangga yang tertangani	60	80.500.000	0	-	8	5.000.000	8	5.000.000	100,00	100,00	8	5.000.000	13,33	6,21	KECAMATAN GIRIMAYA
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah layanan Penyediaan makanan dan minuman yang tertangani	60	191.390.000	12	39.880.000	12	4.300.000	12	4.300.000	100,00	100,00	24	44.180.000	40,00	23,08	KECAMATAN GIRIMAYA
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah layanan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang tertangani	60	1.243.212.500	12	492.798.057	12	16.400.620	12	16.225.000	100,00	98,93	24	509.023.057	40,00	40,94	KECAMATAN GIRIMAYA
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)													100,00	98,79			39,28	47,11	
PREDIKAT KINERJA													ST	ST			SR	SR	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.100.599.000		403.742.168		100.662.631		84.649.200				488.391.388			KECAMATAN GIRIMAYA
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	60	462.450.000		247.449.268	12	21.300.000	12	21.300.000	100,00	100,00	12	268.749.268	20,00	58,11	KECAMATAN GIRIMAYA
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	60	438.149.000		156.292.900	12	64.362.531	12	48.389.200	100,00	75,18	12	204.682.100	20,00	46,72	KECAMATAN GIRIMAYA
			Pemeliharaan website	Jumlah website yang tersedia	24	200.000.000		-	1	15.000.000	1	14.960.000	100,00	99,73	1	14.960.000	4,17	7,48	KECAMATAN GIRIMAYA
			Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik, air					-	1	-					0	-	0,00	0,00	KECAMATAN GIRIMAYA
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)													100,00	84,09			11,04	28,08	
PREDIKAT KINERJA													ST	T			SR	SR	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			615.000.000		-		-		-				-			KECAMATAN GIRIMAYA
			Pendidikan dan pelatihan formal		50	405.000.000		-	10	-					0	-	0,00	0,00	KECAMATAN GIRIMAYA
			Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)			110.000.000		-	60	-					0	-	0,00	0,00	KECAMATAN GIRIMAYA
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	0,00	0,00	
PREDIKAT KINERJA																	SR	SR	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			251.875.000		35.136.280		14.998.700		14.998.700				50.134.980			KECAMATAN GIRIMAYA
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD yang disusun	5	32.875.000	1	7.253.700	1	3.499.450	1	3.499.450	100,00	100,00	2	10.753.150	40,00	32,71	KECAMATAN GIRIMAYA
			Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	5	32.875.000	1	5.053.700	1	3.250.000	1	3.250.000	100,00	100,00	2	8.303.700	40,00	25,26	KECAMATAN GIRIMAYA
			penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	15	32.875.000	15	5.053.000	1	3.250.000	1	3.250.000	100,00	100,00	16	8.303.000	106,67	25,26	KECAMATAN GIRIMAYA
			Penyusunan Renja (RKT, RKA, dan DPA)	Jumlah laporan Renja (RKT, RKA, DPA) yang disusun	5	32.875.000	1	5.053.000	4	4.999.250	4	4.999.250	100,00	100,00	5	10.052.250	100,00	30,58	KECAMATAN GIRIMAYA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6*8		11=10/5*100%			
				K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Penyusunan RENSTRA	Jumlah laporan Renstra yang disusun	5	32.875.000	1	2.860.000	1	-				1	2.860.000	20,00	8,70	KECAMATAN GIRIMAYA	
			Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD	Jumlah laporan penyelenggaraan SPIP yang disusun	5	87.500.000	1	9.862.880	1	-				1	9.862.880	20,00	11,27	KECAMATAN GIRIMAYA	
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	100,00		54,44	22,30		
			PREDIKAT KINERJA										ST	ST		R	SR		
			Program Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan			33.462.000.000		-		5.478.005.473		4.520.618.758			4.382.024.756			KECAMATAN GIRIMAYA	
			Lomba Kelurahan	Keikutsertaan Kelurahan dalam lomba administrasi	25	130.000.000		-	5	9.996.000	5	9.996.000	100,00	100,00	5	9.996.000	20,00	7,69	KECAMATAN GIRIMAYA
			Pembinaan Kelurahan Terbaik	Terbinanya Kelurahan terbaik	5	115.000.000		-	1	14.916.000	1	14.916.000	100,00	100,00	1	14.916.000	20,00	12,97	KECAMATAN GIRIMAYA
			Rapat Koordinasi lembaga kemasyarakatan	Jumlah waktu rapat koordinasi lembaga kemasyarakatan	600	170.000.000		-	12	25.954.680	12	25.940.000	100,00	99,94	12	25.940.000	2,00	15,26	KECAMATAN GIRIMAYA
			Penyelenggaraan administrasi pelayanan terpadu (PATEN)	Terlaksananya Pelayanan administrasi terpadu	48	90.000.000		-	12	7.154.450	12	7.154.450	100,00	100,00	12	7.154.450	25,00	7,95	KECAMATAN GIRIMAYA
			Penyusunan dan Implementasi SOP Pelayanan	Tersusunnya dan terlaksananya SOP Pelayanan	4	100.000.000		-	1	21.731.500	1	21.731.500	100,00	100,00	1	21.731.500	25,00	21,73	KECAMATAN GIRIMAYA
			Pembinaan PKK	Jumlah PKK yang dibina	5	665.000.000		-	3	92.524.800	3	87.724.800	100,00	94,81	3	87.724.800	60,00	13,19	KECAMATAN GIRIMAYA
			Pembinaan UKS	Jumlah UKS yang dibina	38	230.000.000		-	3	-					0	-	0,00	0,00	KECAMATAN GIRIMAYA
			Pelaksanaan KSI	Terlaksananya kegiatan KSI	400	290.000.000		-	1	-					0	-	0,00	0,00	KECAMATAN GIRIMAYA
			Pemberdayaan Kapasitas kelembagaan	Jumlah waktu pemberdayan kapasitas kelembagaan	7	260.000.000		-	5	-					0	-	0,00	0,00	KECAMATAN GIRIMAYA
			Pelaksanaan Musrenbang	Jumlah kehadiran masyarakat yang diundang dalam musrenbang	650	142.000.000		-	1	21.020.000	1	21.020.000	100,00	100,00	1	21.020.000	0,15	14,80	KECAMATAN GIRIMAYA
			Pelaksanaan Gotong Royong	Jumlah masyarakat yang ikut gotong royong	10000	180.000.000		-	12	5.242.419	12	5.242.419	100,00	100,00	12	5.242.419	0,12	2,91	KECAMATAN GIRIMAYA
			Peningkatan Pelayanan Hubungan Kemasyarakatan	Terlaksnanaya pelayananan hubungan kemasyarakatan	18500	515.000.000		-	2	-					0	-	0,00	0,00	KECAMATAN GIRIMAYA
			Hari Jadi Kota Pangkalpinang	Pelaksanaan Hari Jadi Kota Pangkalpinang	1900	300.000.000		-	1	-					0	-	0,00	0,00	KECAMATAN GIRIMAYA
			Pelaksanaan STQ/MTQ	Jumlah peserta STQ/MTQ	1350	800.000.000		-	1	195.444.010	1	195.194.010	100,00	99,87	1	195.194.010	0,07	24,40	KECAMATAN GIRIMAYA
			Pembinaan Keamanan dan ketertiban umum	Persentase peningkatan keamanan dan ketertiban umum	60	130.000.000		-	120	-					0	-	0,00	0,00	KECAMATAN GIRIMAYA
			Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Tingkat Kecamatan	Jumlah waktu rapat koordinasi forum komunikasi Pimpinan Tingkat Kecamatan	8	160.000.000		-	5	-					0	-	0,00	0,00	KECAMATAN GIRIMAYA
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Batu Intan	Jumlah waktu pelayanan administrasi kelurahan	60	1.020.000.000		-	12	801.237.000	12	94.070.302	100,00	11,74	12	94.070.302	20,00	9,22	KECAMATAN GIRIMAYA
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Bukit Besar	Jumlah waktu pelayanan administrasi kelurahan	60	1.020.000.000		-	12	99.761.916	12	93.872.554	100,00	94,10	12	93.872.554	20,00	9,20	KECAMATAN GIRIMAYA
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Semabung Baru	Jumlah waktu pelayanan administrasi kelurahan	60	1.020.000.000		-	12	100.210.500	12	90.873.750	100,00	90,68	12	90.873.750	20,00	8,91	KECAMATAN GIRIMAYA
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Sriwijaya	Jumlah waktu pelayanan administrasi kelurahan	60	1.020.000.000		-	12	93.569.684	12	89.221.180	100,00	95,35	12	89.221.180	20,00	8,75	KECAMATAN GIRIMAYA
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Pasar Padi	Jumlah waktu pelayanan administrasi kelurahan	60	1.020.000.000		-	12	99.375.433	12	96.258.343	100,00	96,86	12	96.258.343	20,00	9,44	KECAMATAN GIRIMAYA
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Batu Intan	Jumlah waktu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	60	1.840.000.000		-	12	393.358.418	12	356.920.462	100,00	90,74	12	356.920.462	20,00	19,40	KECAMATAN GIRIMAYA
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bukit Besar	Jumlah waktu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	60	1.840.000.000		-	12	376.512.650	12	336.171.400	100,00	89,29	12	336.171.400	20,00	18,27	KECAMATAN GIRIMAYA
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semabung Baru	Jumlah waktu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	60	1.840.000.000		-	12	395.004.350	12	347.708.111	100,00	88,03	12	347.708.111	20,00	18,90	KECAMATAN GIRIMAYA
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sriwijaya	Jumlah waktu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	60	1.840.000.000		-	12	365.335.550	12	328.488.030	100,00	89,91	12	328.488.030	20,00	17,85	KECAMATAN GIRIMAYA
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pasar Padi	Jumlah waktu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	60	1.800.000.000		-	12	345.116.113	12	307.203.682	100,00	89,01	12	307.203.682	20,00	17,07	KECAMATAN GIRIMAYA
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Batu Intan	Jumlah waktu pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat	12	2.985.000.000		-	1	373.838.000	1	372.833.000	100,00	99,73	1	372.833.000	8,33	12,49	KECAMATAN GIRIMAYA
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Besar	Jumlah waktu pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat	12	2.985.000.000		-	1	373.838.000	1	373.613.793	100,00	99,94	1	373.613.793	8,33	12,52	KECAMATAN GIRIMAYA
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Semabung Baru	Jumlah waktu pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat	12	2.985.000.000		-	1	373.838.000	1	370.758.970	100,00	99,18	1	370.758.970	8,33	12,42	KECAMATAN GIRIMAYA
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sriwijaya	Jumlah waktu pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masvarakat	12	2.985.000.000		-	1	373.838.000	1	367.581.000	100,00	98,33	1	367.581.000	8,33	12,31	KECAMATAN GIRIMAYA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pengskipnang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6*8		11=10/5*100%		12
					K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasar Padi	Jumlah waktu pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat	12	2.985.000.000	-	-	1	373.838.000	1	367.531.000	100,00	98,31	1	367.531.000	8,33	12,31	KECAMATAN GIRIMAYA
			Pendukung Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)						10	143.350.000	3	138.595.000	30,00	96,68					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)													97,20	82,55			12,71	10,32	
PREDIKAT KINERJA													ST	T					
KECAMATAN GABEK																			
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			5.070.312.400		865.175.634		731.266.485		702.788.533				1.567.964.167			KECAMATAN GABEK
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	510.216.400	12	45.794.134	12	70.017.431	12	51.139.339	100,00	73,04	24	96.933.473	40,00	19,00	KECAMATAN GABEK
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	60	2.431.250.000	12	433.997.100	12	473.189.054	12	466.830.200	100,00	98,66	24	900.827.300	40,00	37,05	KECAMATAN GABEK
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	60	369.866.000	12	60.889.000	12	71.560.000	12	70.920.000	100,00	99,11	24	131.809.000	40,00	35,64	KECAMATAN GABEK
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah unit peralatan kerja yang mendapatkan perbaikan	60	167.500.000	12	28.650.000	12	10.000.000	12	10.000.000	100,00	100,00	24	38.650.000	40,00	23,07	KECAMATAN GABEK
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah waktu penyediaan alat tulis kantor yang dibeli	60	73.350.000	12	10.589.500	12	6.000.000	12	6.000.000	100,00	100,00	24	16.589.500	40,00	22,62	KECAMATAN GABEK
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah waktu dokumen yang difotocopy dan dicetak	60	103.010.000	12	14.819.300	12	7.500.000	12	7.500.000	100,00	100,00	24	22.319.300	40,00	21,67	KECAMATAN GABEK
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60	54.500.000	12	7.296.000	12	3.000.000	12	3.000.000	100,00	100,00	24	10.296.000	40,00	18,89	KECAMATAN GABEK
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah waktu penyediaan peralatan rumah tangga	48	20.000.000	-	-	12	1.000.000	12	447.994	100,00	44,80	12	447.994	25,00	2,24	KECAMATAN GABEK
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman	60	105.620.000	12	13.289.000	12	4.000.000	12	2.800.000	100,00	70,00	24	16.089.000	40,00	15,23	KECAMATAN GABEK
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah waktu rapat-rapat koordinasi	60	1.185.000.000	12	249.851.600	12	50.000.000	12	49.701.000	100,00	99,40	24	299.552.600	40,00	25,28	KECAMATAN GABEK
			Pemasangan Baru/Penambahan Daya Listrik		1	50.000.000			1	35.000.000	1	34.450.000	100,00	98,43	1	34.450.000	100,00	68,90	KECAMATAN GABEK
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)													100,00	98,11			44,09	26,33	
PREDIKAT KINERJA													ST	ST			SR	SR	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			838.521.000		129.048.896		138.542.000		120.676.974				248.725.870			KECAMATAN GABEK
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala	60	445.000.000	12	78.157.000	12	42.600.000	12	42.600.000	100,00	100,00	24	120.757.000	40,00	27,14	KECAMATAN GABEK
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala	60	353.521.000	12	50.891.896	12	65.942.000	12	48.156.974	100,00	73,03	24	99.048.870	40,00	28,02	KECAMATAN GABEK
			Pemeliharaan website		48	40.000.000	0		12	30.000.000	12	29.920.000	100,00	99,73	12	29.920.000	25,00	74,80	KECAMATAN GABEK
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)													100,00	87,10			35,00	43,32	
PREDIKAT KINERJA													ST	T			SR	SR	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			501.000.000		53.846.840		-		-				53.846.840			KECAMATAN GABEK
			Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan	60	406.000.000	12	53.846.640	4	-		-			12	53.846.640	20,00	13,26	KECAMATAN GABEK
			Fasilitasi Penyuluhan Bahaya Narkoba		580	95.000.000			1	-		-			0	-	0,00	0,00	KECAMATAN GABEK
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	10,00	6,63	
PREDIKAT KINERJA																	SR	SR	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			216.000.000		22.717.276		12.475.000		8.535.000				31.252.276			KECAMATAN GABEK
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	5	39.000.000	1	3.727.276	1	3.625.000	1	2.805.000	100,00	77,38	2	6.532.276	40,00	16,75	KECAMATAN GABEK
			Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen pelaporan keuangan semester yang disusun	5	39.000.000	1	4.000.000	1	2.950.000	1	1.910.000	100,00	64,75	2	5.910.000	40,00	15,15	KECAMATAN GABEK
			penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun yang disusun	5	39.000.000	1	7.500.000	1	2.950.000	1	1.910.000	100,00	64,75	2	9.410.000	40,00	24,13	KECAMATAN GABEK
			Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)	Jumlah dokumen RENJA (RKT, RKA, dan DPA) yang disusun	20	39.000.000	4	7.490.000	4	2.950.000	4	1.910.000	100,00	64,75	8	9.400.000	40,00	24,10	KECAMATAN GABEK
			Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD	Jumlah dokumen SPIP	5	60.000.000	0	-	1	-		-			0	-	0,00	0,00	KECAMATAN GABEK
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)													100,00	68,42			32,00	16,03	
PREDIKAT KINERJA													ST	S			SR	SR	
			Program Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan			32.074.500.000		-		6.086.498.840		5.040.353.988				4.980.278.988			KECAMATAN GABEK

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6+8		11=10/5*100%		12
					K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Lomba Kelurahan	Keikutsertaan Kelurahan dalam lomba administrasi	24	30.000.000			6	2.300.000	6	2.300.000	100,00	100,00	6	2.300.000	25,00	7,67	KECAMATAN GABEK
			Pembinaan Kelurahan Terbaik	Terbinanya kelurahan terbaik	4	25.500.000			1	5.880.000	1	5.010.000	100,00	85,20	1	5.010.000	25,00	19,65	KECAMATAN GABEK
			Rapat Koordinasi lembaga kemasyarakatan						1	30.000.000	1	29.960.000	100,00	99,87					
			Penyelenggaraan administrasi pelayanan terpadu (PATEN)	Terlaksananya pelayanan administrasi terpadu	48	110.000.000			12	6.500.000	9	3.257.000	75,00	50,11	9	3.257.000	18,75	2,96	KECAMATAN GABEK
			Penyusunan dan Implementasi SOP Pelayanan	Tersusunnya dan terlaksananya SOP Pelayanan	8	160.000.000			2	-					0	-	0,00	0,00	KECAMATAN GABEK
			Pembinaan PKK	Jumlah PKK yang terbina	24	660.000.000			6	45.000.000	6	42.862.000	100,00	95,25	6	42.862.000	25,00	6,49	KECAMATAN GABEK
			Pembinaan UKS	Jumlah UKS yang terbina	168	215.000.000			42	-					0	-	0,00	0,00	KECAMATAN GABEK
			Pelaksanaan KSI	Terlaksananya KSI	4				1	-					0	-	0,00	0,00	KECAMATAN GABEK
			Pemberdayaan Kapasitas kelembagaan	Jumlah waktu pemberdayaan kapasitas kelembagaan	32	200.000.000			8	-					0	-	0,00	0,00	KECAMATAN GABEK
			Pelaksanaan Musrenbang	Jumlah kehadiran masyarakat yang diundang dalam musrenbang	520	107.500.000			75	15.092.500	75	15.092.500	100,00	100,00	75	15.092.500	14,42	14,04	KECAMATAN GABEK
			Pelaksanaan Gotong Royong	Jumlah masyarakat yang ikut gotong royong	96	160.000.000			24	2.220.000	8	2.220.000	33,33	100,00	8	2.220.000	8,33	1,39	KECAMATAN GABEK
			Peningkatan Pelayanan Hubungan Kemasyarakatan	Terlaksananya pelayanan hubungan kemasyarakatan	18000	450.000.000			4000	-					0	-	0,00	0,00	KECAMATAN GABEK
			Hari Jadi Kota Pangkalpinang	Pelaksanaan Hari Jadi Kota Pangkalpinang	1200	360.000.000			300	-					0	-	0,00	0,00	KECAMATAN GABEK
			Pelaksanaan STQ/MTQ	Jumlah peserta STQ/MTQ	570	800.000.000			120	151.085.000	120	151.085.000	100,00	100,00	120	151.085.000	21,05	18,89	KECAMATAN GABEK
			Penyuluhan Keamanan dan ketertiban umum		520	112.000.000			50	-					0	-	0,00	0,00	KECAMATAN GABEK
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Gabek Satu	Jumlah waktu pelayanan administrasi Kelurahan	48	1.000.000.000			12	813.289.410	12	108.954.157	100,00	13,40	12	108.954.157	25,00	10,90	KECAMATAN GABEK
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Gabek Dua	Jumlah waktu pelayanan administrasi Kelurahan	48	1.000.000.000			12	113.980.460	12	109.331.960	100,00	95,92	12	109.331.960	25,00	10,93	KECAMATAN GABEK
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Selindung Baru	Jumlah waktu pelayanan administrasi Kelurahan	48	1.000.000.000			12	114.037.150	12	110.413.100	100,00	96,82	12	110.413.100	25,00	11,04	KECAMATAN GABEK
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Air Salemba	Jumlah waktu pelayanan administrasi Kelurahan	48	1.000.000.000			12	115.794.960	12	108.825.467	100,00	93,98	12	108.825.467	25,00	10,88	KECAMATAN GABEK
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Selindung	Jumlah waktu pelayanan administrasi Kelurahan	48	1.000.000.000			12	109.524.900	12	105.705.936	100,00	96,51	12	105.705.936	25,00	10,57	KECAMATAN GABEK
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Jerambah Gantung	Jumlah waktu pelayanan administrasi Kelurahan	48	1.000.000.000			12	109.619.760	12	101.246.300	100,00	92,36	12	101.246.300	25,00	10,12	KECAMATAN GABEK
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gabek Satu	Jumlah waktu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	48	1.905.750.000			12	360.772.000	12	305.800.835	100,00	84,76	12	305.800.835	25,00	16,05	KECAMATAN GABEK
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gabek Dua	Jumlah waktu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	48	1.905.750.000			12	345.282.200	12	316.554.405	100,00	91,68	12	316.554.405	25,00	16,61	KECAMATAN GABEK
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Selindung Baru	Jumlah waktu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	48	1.905.750.000			12	331.880.500	12	313.784.348	100,00	94,55	12	313.784.348	25,00	16,47	KECAMATAN GABEK
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Air Salemba	Jumlah waktu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	48	1.905.750.000			12	344.238.000	12	328.379.078	100,00	95,39	12	328.379.078	25,00	17,23	KECAMATAN GABEK
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Selindung	Jumlah waktu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	48	1.905.750.000			12	339.310.000	12	335.953.057	100,00	99,01	12	335.953.057	25,00	17,63	KECAMATAN GABEK
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jerambah Gantung	Jumlah waktu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	48	1.905.750.000			12	324.314.000	12	303.795.845	100,00	93,67	12	303.795.845	25,00	15,94	KECAMATAN GABEK
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gabek Satu	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan	4	1.875.000.000			1	373.838.000	1	371.877.000	100,00	99,48	1	371.877.000	25,00	19,83	KECAMATAN GABEK
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gabek Dua	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan	4	1.875.000.000			1	373.838.000	1	367.389.000	100,00	98,27	1	367.389.000	25,00	19,59	KECAMATAN GABEK
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Selindung Baru	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan	4	1.875.000.000			1	373.838.000	1	368.432.000	100,00	98,55	1	368.432.000	25,00	19,65	KECAMATAN GABEK
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Salemba	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan	4	1.875.000.000			1	373.838.000	1	368.458.000	100,00	98,56	1	368.458.000	25,00	19,65	KECAMATAN GABEK
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Selindung	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan	4	1.875.000.000			1	373.838.000	1	365.445.000	100,00	97,75	1	365.445.000	25,00	19,49	KECAMATAN GABEK
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jerambah Gantung	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan	4	1.875.000.000			1	373.838.000	1	368.107.000	100,00	98,47	1	368.107.000	25,00	19,63	KECAMATAN GABEK
			Pendukung Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)						9	163.350.000	9	30.115.000	100,00	18,44					
														</					

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pengkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6*8		11=10/5*100%		12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	5	266.994.338	1	130.912.847	1	30.763.500	1	30.444.000	100,00	98,96	2	161.356.847	40,00	60,43	INSPEKTORAT DAERAH
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	6	184.984.530	1	151.375.000	1	25.450.000	1	24.855.000	100,00	97,66	2	176.230.000	33,33	95,27	INSPEKTORAT DAERAH
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang dibeli	7	307.420.773	1	210.883.000	1	30.150.500	1	29.337.750	100,00	97,30	2	240.220.750	28,57	78,14	INSPEKTORAT DAERAH
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang dibeli	8	282.365.442	1	193.948.050	1	41.426.400	1	36.553.700	100,00	88,24	2	230.501.750	25,00	81,63	INSPEKTORAT DAERAH
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9	38.156.875	1	27.011.000	1	6.875.000	1	6.338.000	100,00	92,19	2	33.349.000	22,22	87,40	INSPEKTORAT DAERAH
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan perlengkapan kantor	10	296.003.640			1	95.800.000,00	1	95.400.000	100,00	99,58	1	95.400.000	10,00	32,23	INSPEKTORAT DAERAH
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Waktu Penyediaan makanan dan minuman	60	249.288.010	12	162.142.000	12	23.850.000	12	23.266.000	100,00	97,55	24	185.408.000	40,00	74,38	INSPEKTORAT DAERAH
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi keluar daerah yang diikuti	20	1.626.275.000	4	1.540.563.838	4	96.850.000	4	84.718.483	100,00	87,47	8	1.625.282.321	40,00	99,94	INSPEKTORAT DAERAH
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	93,20			31,91	80,02	
			PREDIKAT KINERJA										ST	ST			SR	T	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			2.803.243.651		1.596.652.728		443.108.500		409.819.913				2.008.472.641			INSPEKTORAT DAERAH
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang dibeli	5	283.684.144	1	244.010.000	1	38.225.000	1	38.212.500	100,00	99,97	2	282.222.500	40,00	99,48	INSPEKTORAT DAERAH
			Pengadaan mebeleur	Jumlah jenis mebeleur yang dibeli	5	87.608.185	1	57.570.977	1	15.500.000	1	15.167.500	100,00	97,85	2	72.738.477	40,00	83,03	INSPEKTORAT DAERAH
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	60	555.869.355	12	265.504.847	12	78.516.000	10	78.386.000	83,33	99,83	22	343.890.847	36,67	61,87	INSPEKTORAT DAERAH
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan	50	1.562.035.623	10	1.029.566.904	10	234.367.500	10	201.683.913	100,00	86,05	20	1.231.250.817	40,00	78,82	INSPEKTORAT DAERAH
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang mendapat Rehabilitasi sedang/berat	1	314.046.344	0	-	1	76.500.000	1	76.370.000	100,00	99,83	1	76.370.000	100,00	24,32	INSPEKTORAT DAERAH
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										96,67	92,49			51,33	69,50	
			PREDIKAT KINERJA										ST	ST			R	S	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparat			321.576.500		57.861.608		8.700.000		8.350.000				66.211.608			INSPEKTORAT DAERAH
			Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Orang yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	5	91.576.500	1	57.861.608	1	-					1	57.861.608	20,00	63,18	INSPEKTORAT DAERAH
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas beserta kelengkapannya yang diadakan	55	180.000.000			1	8.700.000	1	8.350.000	100,00	95,98	1	8.350.000	1,82	4,64	
			Sosialisasi Gerakan Anti Narkoba	Jumlah Pegawai yang mengikuti Sosialisasi	51	50.000.000	51		51	-					51	-	100,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	95,98			40,61	22,61	
			PREDIKAT KINERJA										ST	ST			SR	SR	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			256.414.200		74.880.374		20.175.000		18.195.000				93.055.374			INSPEKTORAT DAERAH
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah jenis laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	18.315.300	1	14.001.240	1	3.265.000	1	3.265.000	100,00	100,00	2	17.266.240	40,00	94,27	INSPEKTORAT DAERAH
			Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah jenis Laporan Keuangan Semesteran	5	18.315.300	1	13.764.240	1	2.625.000	1	2.170.000	100,00	82,67	2	15.934.240	40,00	87,00	INSPEKTORAT DAERAH
			penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	18.315.300	1	13.322.240	1	2.975.000	1	2.970.000	100,00	99,83	2	16.292.240	40,00	88,95	INSPEKTORAT DAERAH
			Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)	Jumlah jenis Dokumen Perencanaan Kinerja	6	18.315.300	1	14.440.740	1	3.265.000	1	3.265.000	100,00	100,00	2	17.705.740	33,33	96,67	INSPEKTORAT DAERAH
			Penyusunan RENSTRA	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Menengah	7	122.102.000			1	3.265.000	1	3.125.000	100,00	95,71	1	3.125.000	14,29	2,56	
			Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD	Jumlah Jenis Dokumen Laporan Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	8	61.051.000	1	19.331.914	1	4.780.000	1	3.400.000	100,00	71,13	2	22.731.914	25,00	37,23	INSPEKTORAT DAERAH
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	90,19			32,10	67,78	
			PREDIKAT KINERJA										ST	T			SR	S	
			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			15.410.136.356		9.045.578.936		2.014.146.082		1.824.820.753				10.870.399.689			INSPEKTORAT DAERAH
			Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal Berkala	155	5.674.304.150	31	4.644.549.568	31	720.100.000	31	647.510.000	100,00	89,92	62	5.292.059.568	40,00	93,26	INSPEKTORAT DAERAH
			Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah Jenis Laporan Tindak lanjut Hasil Pengawasan	5	2.074.992.160	1	1.474.180.913	1	270.029.017	1	267.105.000	100,00	98,92	2	1.741.285.913	40,00	83,92	INSPEKTORAT DAERAH
			Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Jumlah Jenis Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif	6	610.510.000	1	384.923.333	1	14.784.343	1	14.784.343	100,00	100,00	2	399.707.676	33,33	65,47	INSPEKTORAT DAERAH
			Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan Eksternal	Jumlah Jenis Laporan Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan Eksternal	7	343.595.028	1	63.935.200	1	54.040.000	1	54.017.000	100,00	99,96	2	117.952.200	28,57	34,33	INSPEKTORAT DAERAH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6*8		11=10/5*100%			
				K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Pemantauan Kegiatan Pengawasan terhadap Evaluasi Periodik dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Jenis Laporan Hasil Pemantauan Kegiatan Pengawasan terhadap Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	8	610.510.000	0	-	1	51.050.000	1	38.824.110	100,00	76,05	1	38.824.110	12,50	6,36	INSPEKTORAT DAERAH
			Penyelesaian TPTGR Oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)	Jumlah Pelaksanaan Penyelesaian TPTGR oleh Majelis Pertimbangan dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah	20	976.236.016	4	887.510.149	4	153.585.000	4	84.241.300	100,00	54,85	8	971.751.449	40,00	99,54	INSPEKTORAT DAERAH
			Monitoring Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	20	201.101.994	4	152.455.128	4	28.050.000	4	27.275.000	100,00	97,24	8	179.730.128	40,00	89,37	INSPEKTORAT DAERAH
			Unit Pemberantasan / Pengendalian Pungutan Liar Pemerintah Kota Pangkalpinang	Jumlah Jenis Laporan hasil unit pemberantasan/pengendalian pungutan liar	5	3.332.850.000	1	1.113.336.663	1	493.599.000	1	489.559.000	100,00	99,18	2	1.602.895.663	40,00	48,09	INSPEKTORAT DAERAH
			Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang	Jumlah Jenis Laporan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Daerah	5	353.729.494	1	284.943.182	1	77.618.732	1	51.915.000	100,00	66,88	2	336.858.182	40,00	95,23	INSPEKTORAT DAERAH
			Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan Internal	Jumlah Jenis Laporan Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan Internal	5	171.797.514	1	39.744.800	1	54.040.000	1	52.915.000	100,00	97,92	2	92.659.800	40,00	53,94	INSPEKTORAT DAERAH
			Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan pemerintah Kota Pangkalpinang	Jumlah Jenis Laporan UPG	5	150.000.000	1		1	89.250.000	1	88.725.000	100,00	99,41	2	88.725.000	40,00	59,15	INSPEKTORAT DAERAH
			Survei Penilaian Integritas	Jumlah Jenis Laporan SPI	5	300.000.000	1		1	-					1	-	20,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
			Klinik Konsultasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kota Pangkalpinang	Jumlah Jenis Laporan Sosialisasi Klinik Konsultasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kota Pangkalpinang	5	610.510.000			1	8.000.000	1	7.950.000	100,00	99,38	1	7.950.000	20,00	1,30	INSPEKTORAT DAERAH
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	90,80			33,42	56,15	
			PREDIKAT KINERJA										ST	T			SR	R	
			Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan			4.302.160.048		2.043.120.382		120.385.008		84.129.000				2.127.249.382			INSPEKTORAT DAERAH
			Diklat Sertifikat JFA dan P2UPD	Jumlah orang yang mengikuti Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional (JFA) dan P2UPD	15	751.750.000	3	561.164.547	3	45.500.000	3	14.499.000	100,00	31,87	6	575.663.547	40,00	76,58	INSPEKTORAT DAERAH
			Peningkatan Kompetensi APIP	Jumlah orang yang mengikuti Peningkatan Kompetensi APIP	200	3.052.550.000	40	1.374.339.835	40	40.805.008	40	36.150.000	100,00	88,59	80	1.410.489.835	40,00	46,21	INSPEKTORAT DAERAH
			Pelatihan Substantif SDM Pengawasan/Aparatur	Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Substantif	4	247.050.000	1	107.616.000	1	2.280.000	1	2.280.000	100,00	100,00	2	109.896.000	50,00	44,48	INSPEKTORAT DAERAH
			Evaluasi Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah Laporan Evaluasi Angka Kredit JFT	10	250.810.048	2		2	31.800.000	2	31.200.000	100,00	98,11	4	31.200.000	40,00	12,44	INSPEKTORAT DAERAH
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	69,88			42,50	44,93	
			PREDIKAT KINERJA										ST	S			SR	SR	
			Perencanaan Pembangunan																
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			6.028.875.160		1.479.909.088		1.250.407.969		1.179.197.471				2.859.106.557			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Berfungsinya jaringan komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	1.276.659.000	12	123.172.654	12	134.595.000	12	120.634.947	100,00	89,63	24	243.807.601	40,00	19,10	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pelayanan jasa administrasi keuangan	60	582.720.000	12	159.240.000	12	253.805.000	12	233.980.000	100,00	92,19	24	393.220.000	40,00	67,48	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	60	185.920.000	12	29.499.600	12	53.744.000	12	50.521.600	100,00	94,00	24	80.021.200	40,00	43,04	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja	60	268.845.000	12	40.752.700	12	51.600.000	12	42.370.780	100,00	82,11	24	83.123.480	40,00	30,92	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Deerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kaglatan (output)	Target RPJMD Kota Pengkalpnang pede Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capalan Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun laku (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Reallsai Capalan Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capalan Kinerja dan Reallsai Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Reallsai Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capalan Kinerja dan Reallsai Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6*8		11=10/6*100%					
				K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya jumlah alat tulis kantor	210	148.695.000	42	15.357.500	60	19.607.000	48	19.607.000	80,00	100,00	90	34.964.500	42,86	23,51	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH		
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya jumlah barang cetakan dan penggandaan	40	207.550.000	8	31.796.000	8	21.225.000	8	20.117.000	100,00	94,78	16	51.913.000	40,00	25,01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpeliharanya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5	60.400.000	1	7.135.000	1	10.000.000	1	7.471.000	100,00	74,71	2	14.606.000	40,00	24,18	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	10	775.000.000	2	398.818.000	5	392.406.969	5	388.189.500	100,00	98,93	7	787.007.500	70,00	101,55	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	10	65.100.000	2	6.140.000	2	2.200.000	2	1.070.000	100,00	48,64	4	7.210.000	40,00	11,08	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH		
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	55	379.000.000	11	11.975.000	11	17.750.000	11	7.970.000	100,00	44,90	22	19.945.000	40,00	5,26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH		
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60	2.076.986.160	12	656.022.632	12	293.475.000	12	287.265.644	100,00	97,88	24	943.288.276	40,00	45,42	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH		
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)													96,18	94,31		42,99	36,05	
			PREDIKAT KINERJA													ST	ST		SR	SR	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.324.410.000		308.742.165		438.017.500		387.622.480				673.034.845			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH		
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin /berkala	5	302.000.000	1	228.870.000	1	224.565.000	1	223.062.000	100,00	99,33	2	451.932.000	40,00	149,65	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	kendaraan yang mendapatkan perawatan rutin/berkala	25	910.740.000	5	57.372.165	5	163.102.500	5	117.646.480	100,00	72,13	10	175.018.645	40,00	19,22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH		
			Pemeliharaan Taman Kantor	waktu penyediaan jasa pemeliharaan taman kantor	60	111.670.000	12	22.500.000	12	25.350.000	12	23.584.000	100,00	93,03	24	46.084.000	40,00	41,27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH		
			Pemeliharaan Instalasi Listrik						1	25.000.000	1	23.230.000	100,00	92,92							
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)													100,00	88,47		40,00	70,04	
			PREDIKAT KINERJA													ST	T		SR	S	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			250.000.000		142.508.850		80.000.000		53.362.600				165.945.450			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH		
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	PNS yang mengikuti diklat/bintek/sosialisasi/ diklat dalam satu (1) tahun	50	250.000.000	10	142.508.850	8	50.000.000	2	23.436.600	25,00	46,87	12	165.945.450	24,00	66,38	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya						60	30.000.000	59	29.926.000	98,33	99,75							
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)													61,67	66,70		24,00	66,38	
			PREDIKAT KINERJA													R	S		SR	S	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6*8		11=10/5*100%			
				K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		379.100.000		36.170.700		10.156.000		10.156.000				46.326.700			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD yang tersedia	15	91.650.000	3	6.774.000	3	2.010.000	3	2.010.000	100,00	100,00	6	8.784.000	40,00	9,58	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Penyusuna Laporan Keuangan Semesteran	Laporan Keuangan Semesteran yang tersedia	5	68.800.000	1	7.249.000	1	2.010.000	1	2.010.000	100,00	100,00	2	9.259.000	40,00	13,46	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersedia	20	72.700.000	4	7.253.500	1	2.550.000	1	2.550.000	100,00	100,00	5	9.803.500	25,00	13,48	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Penyusunan Renja (RKT, RKA, dan DPA)	Laporan Renja, RKA, dan DPA	15	77.150.000	3	6.853.500	3	2.486.000	3	2.486.000	100,00	100,00	6	9.339.500	40,00	12,11	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Penyusunan laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	laporan SPIP yang tersedia	5	68.800.000	1	8.040.700	1	1.100.000	1	1.100.000	100,00	100,00	2	9.140.700	40,00	13,29	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	100,00		37,00	12,36		
			PREDIKAT KINERJA										ST	ST		SR	SR		
			Program Penelitian dan Pengembangan		1.440.000.000		405.614.484		63.800.000		51.032.952				456.647.436			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen jurnal penelitian daerah yang tersusun	5	1.440.000.000	1	405.614.484	1	63.600.000	1	51.032.952	100,00	80,24	2	456.647.436	40,00	31,71	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	80,24		40,00	31,71		
			PREDIKAT KINERJA										ST	T		SR	SR		
			Program Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Data/Informasi Daerah		21.515.614.000		-		2.799.919.946		2.569.494.022				2.047.133.781			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Penyusunan RKPD	dokumen perencanaan jangka pendek yang tersusun	4	1.264.800.000	0	-	1	204.400.000	1	204.200.000	100,00	99,90	1	204.200.000	25,00	16,14	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD tingkat Kota	4	1.264.800.000	0	-	1	74.211.351	1	74.211.351	100,00	100,00	1	74.211.351	25,00	5,87	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Koordinasi Forum Kota Sehat Pangkalpinang	dokumen koordinasi forum Kota sehat pangkalpinang	4	663.450.000	0	-	1	81.867.000	1	71.042.000	100,00	86,78	1	71.042.000	25,00	10,71	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Pangkalpinang	laporan hasil koordinasi penanggulangan kemiskinan	4	380.050.000	0	-	1	7.025.000	0	6.900.000	0,00	98,22	0	6.900.000	0,00	1,82	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Survey Perencanaan Pembangunan Daerah	dokumen perencanaan pembangunan yang tersedia	4	1.088.050.000	0	-	1	59.499.000	1	56.263.850	100,00	94,56	1	56.263.850	25,00	5,17	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6+8		11=10/5*100%		12	
				K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Penyusunan LAKIP Kota Pangkalpinang	dokumen LAKIP Kota Pangkalpinang	4	1.088.050.000	0	-	1	51.773.900	1	51.773.900	100,00	100,00	1	51.773.900	25,00	4,76	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Dokumen Laporan hasil Monev, Pengendalian dan Pelaporan Renbang Daerah yang tersedia	4	910.300.000	0	-	1	94.900.000	1	92.480.000	100,00	97,45	1	92.480.000	25,00	10,16	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Laporan Monev, Pengendalian dan Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	4	308.950.000	0	-	1	19.498.500	1	17.488.500	100,00	89,69	1	17.488.500	25,00	5,66	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Workshop perencanaan pembangunan daerah	aparatur yang mengikuti workshop perencanaan pembangunan daerah	248	557.550.000	0	-	70	30.184.000	70	30.184.000	100,00	100,00	70	30.184.000	28,23	5,41	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kota Pangkalpinang	dokumen hasil laporan Sistem informasi pembangunan Daerah (SIPD) Kota Pangkalpinang	4	873.750.000	0	-	1	62.734.500	1	60.710.680	100,00	96,77	1	60.710.680	25,00	6,95	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Penyusunan data / informasi Sosial Budaya	Jenis data/informasi elektronik sosial budaya yang tersedia	4	450.150.000	0	-	1	25.835.000	1	24.835.000	100,00	96,13	1	24.835.000	25,00	5,52	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Pemuktahiran Data Infrastruktur daerah	dokumen data infrastruktur secara akurat yang tersedia	4	733.550.000	0	-	1	112.801.000	1	101.906.958	100,00	90,34	1	101.906.958	25,00	13,89	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Pengolahan data SDA dan LH	dokumen data set Lingkup SDA dan Lingkungan Hidup secara akurat yang tersedia	4	910.300.000	0	-	1	59.750.000	1	55.074.000	100,00	92,17	1	55.074.000	25,00	6,05	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Kelompok Kerja Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka(Pokja P2KP)	dokumen hasil koordinasi dan fasilitasi pokja P2KP yang tersedia	4	923.575.000	0	-	1	3.750.000	0	2.850.000	0,00	76,00	0	2.850.000	0,00	0,31	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Kelompok Kerja Perumahan dan Permukiman (Pokja PKP)	jumlah dokumen laporan hasil terlaksananya pendampingan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	4	727.550.000	0	-	1	65.264.650	1	56.290.650	100,00	86,25	1	56.290.650	25,00	7,74	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Pengelolaan Sistem E-Planning	jenis data elektronik perencanaan jangka pendek yang tersedia	4	554.800.000	0	-	1	390.908.000	1	352.550.995	100,00	90,19	1	352.550.995	25,00	63,55	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Penyusunan RKPD Perubahan	dokumen perubahan perencanaan jangka pendek yang tersusun	4	556.800.000	0	-	1	235.215.000	1	212.507.162	100,00	90,35	1	212.507.162	25,00	38,17	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL)	dokumen hasil Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) yang tersedia	4	727.550.000	0	-	1	17.972.950	0	1.979.950	0,00	11,02	0	1.979.950	0,00	0,27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Pengembangan Website	media elektronik perangkat daerah yang dikelola	4	238.850.000	0	-	1	11.330.500	1	11.330.500	100,00	100,00	1	11.330.500	25,00	4,74	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Pelaksanaan Pengusulan DAK	dokumen Pelaksanaan Pengusulan Dana DAK	4	663.450.000	0	-	1	62.847.500	1	62.773.132	100,00	99,88	1	62.773.132	25,00	9,46	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Ranja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4		5		6		7		8		9=8/7*100%		10=8*8		11=10/5*100%		12	
					K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Koordinasi Kota Layak Anak Kota Pangkalpinang	dokumen Koordinasi Kota Layak Anak Kota pangkalpinang	4	308.950.000	0	-	1	63.000.000	1	50.054.000	100,00	79,45	1	50.054.000	25,00	16,20	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Koordinasi Pengarustamaan Gender Kota Pangkalpinang	dokumen Koordinasi Pengarustamaan Gender Kota Pangkalpinang	4	380.050.000	0	-	1	350.000	0	350.000	0,00	100,00	0	350.000	0,00	0,09	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Penyusunan Data/Informasi Pemerintahan	Laporan Data/Informasi Pemerintah	4	727.550.000	0	-	1	41.300.000	0	39.300.000	0,00	95,16	0	39.300.000	0,00	5,40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Evaluasi Rencana Kerja OPD	Dokumen Laporan Evaluasi Rencana Kerja OPD Dalam Setiap Trwulan	4	840.200.000	0	-	1	175.539.482	1	169.739.500	100,00	96,70	1	169.739.500	25,00	20,20	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Infrastruktur Kota	dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi serta fasilitasi pembangunan infrastruktur	4	727.550.000	0	-	1	110.115.500	1	98.200.696	100,00	89,18	1	98.200.696	25,00	13,50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Penyusunan data perencanaan pembangunan bidang ekonomi	dokumen data perencanaan pembangunan bidang ekonomi	4	405.750.000	0	-	1	96.450.000	1	85.521.449	100,00	88,67	1	85.521.449	25,00	21,08	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Koordinasi stunting Kota Pangkalpinang	dokumen hasil koordinasi stunting Kota Pangkalpinang	4	308.950.000	0	-	1	66.857.000	1	56.615.508	100,00	84,68	1	56.615.508	25,00	18,33	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Statistik Strategis Infrastruktur Daerah	dokumen statistik strategis infrastruktur daerah yang dipublikasikan	4	745.250.000	0	-	1	-					0	-	0,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			kajian Insfrastruktur Kota Pangkalpinang	Jumlah dokumen hasil kajian infrastruktur Kota Pangkalpinang	4	2.185.039.000			2	-					0	-	0,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Evaluasi RPJMD 2018-2023	dokumen laporan RPJMD 2018-2023	4	556.800.000			1	48.586.000	1	48.584.041	100,00	100,00	1	48.584.041	25,00	8,73	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Penyusunan masterplan kawasan						1	105.548.642	1	101.475.000	100,00	96,14	1	101.475.000			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Penyusunan Perubahan RPJMD 2018-2023	dokumen Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang yang tersedia	1	398.250.000			1	360.655.471	1	318.387.200	100,00	88,28	1	318.387.200	100,00	79,95	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Koordinasi Aksi Penurunan Gas Rumah Kaca	dokumen masterplan kawasan	4	823.050.000			1	59.750.000	1	53.914.000	100,00	90,23	1	53.914.000	25,00	6,55	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											81,48	91,77			19,08	10,94	
			PREDIKAT KINERJA											T	ST			SR	SR	
		Keuangan																		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			8.751.248.003		1.894.626.654		2.341.348.217		2.137.808.322					2.214.084.093			BADAN KEUANGAN DAERAH	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik	jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	2.789.849.721	24	437.372.432	12	604.000.000	12	579.793.869	100,00	95,99	36	514.535.854	60,00	18,44	BADAN KEUANGAN DAERAH		
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah waktu jasa administrasi keuangan	60	366.686.000	24	102.700.000	12	279.970.000	12	226.310.000	100,00	80,83	36	138.150.000	60,00	37,68	BADAN KEUANGAN DAERAH		
		Penyediaan jasa kebersihan	jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	60	367.297.000	24	114.198.400	12	148.000.000	12	147.184.000	100,00	99,45	36	144.348.400	60,00	39,30	BADAN KEUANGAN DAERAH		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pengkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Ranja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=8*6		11=10/5*100%			
					K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki	60	632.443.461	24	60.395.000	12	118.150.000	12	70.965.300	100,00	60,06	36	60.395.000	60,00	9,55	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Penyediaan alat tulis kantor	jumlah jenis alat tulis kantor yang dibeli	60	283.575.000	24	46.760.000	12	196.834.000	12	194.983.200	100,00	99,06	36	46.760.000	60,00	16,49	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah jenis barang cetakan dan pengadaan yang dibeli	60	411.275.000	24	59.560.000	12	78.195.200	12	63.710.000	100,00	81,48	36	59.560.000	60,00	14,48	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah jenis alat listrik yang dibeli	60	46.720.000	24	7.000.000	12	16.000.000	12	13.855.000	100,00	86,59	36	7.000.000	60,00	14,98	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	60	877.678.000	24	272.585.800	12	401.620.000	12	394.787.500	100,00	98,30	36	272.585.800	60,00	31,06	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	60	29.326.000	24	2.580.000	12	4.850.000	12	3.850.000	100,00	79,38	36	2.580.000	60,00	8,80	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Penyediaan makanan dan minuman	jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman	60	135.310.000	24	33.554.000	12	64.360.000	12	34.470.000	100,00	53,56	36	33.554.000	60,00	24,80	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60	1.976.128.821	24	566.803.867	12	294.569.017	12	285.450.453	100,00	96,90	36	718.897.884	60,00	36,38	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Penataan arsip perkantoran	jumlah jasa penataan arsip perkantoran	50	552.318.000	10	106.158.800	10	134.800.000	10	122.450.000	100,00	90,84	20	130.758.800	40,00	23,67	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Penataan Inventarisasi Aset SKPD	jumlah jasa penataan inventarisasi aset skpd	2	282.641.000	2	84.958.355	3	-					2	84.958.355	100,00	30,06	BADAN KEUANGAN DAERAH
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	91,31			61,54	23,51	
			PREDIKAT KINERJA										ST	ST			R	SR	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			2.680.436.000		878.397.163		2.023.216.800		1.202.840.536				1.848.834.699			BADAN KEUANGAN DAERAH
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang di beli	50	805.822.500	10	260.254.250	4	316.552.000	4	289.949.700	100,00	91,60	14	550.203.950	28,00	68,28	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dibeli	30	162.040.000	10	192.945.000	1	43.863.800	1	43.803.800	100,00	99,86	11	236.748.800	36,67	146,11	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Pengadaan Mebeleur	jumlah jenis mebeleur yang dibeli	52	-	10	67.900.000	52	105.935.000	52	104.080.000	100,00	98,25	62	171.980.000	119,23	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin	10	214.400.000	5	169.769.000	1	345.860.000	1	337.390.000	100,00	97,55	6	507.159.000	60,00	236,55	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan operasional yang mendapat pemeliharaan rutin	50	1.169.156.500	10	157.846.913	8	304.937.000	8	154.494.036	100,00	50,66	18	312.340.949	36,00	26,72	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah jenis peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin	15	309.017.000	5	29.682.000	3	54.325.000	2	38.720.000	66,67	71,27	7	68.402.000	46,67	22,14	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		1				1	-					0	-	0,00	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional						1	530.000.000	0	-	0,00	0,00		-			BADAN KEUANGAN DAERAH
			Pembangunan Tempat parkir	Jumlah Tempat Parkir yang dibangun	1	150.000.000			1	150.000.000	1	120.546.000	100,00	80,36	1	120.546.000	100,00	80,36	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Belanja Modal DED Perencanaan Pembangunan Gedung arsip dan DED perencanaan rehab gedung	Jumlah Dokumen DED Perencanaan Gedung Arsip dan DED Perencanaan Rehab Gedung	2	81.744.000			2	81.744.000	2	55.000.000	100,00	67,28	2	55.000.000	100,00	67,28	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Pembangunan ruang tunggu tamu							-									BADAN KEUANGAN DAERAH
			Pembangunan Gudang Peralatan	Jumlah gudang Peralatan yang dibuat	1	90.000.000			1	90.000.000	1	58.857.000	100,00	65,40	1	58.857.000	100,00	65,40	BADAN KEUANGAN DAERAH
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										86,67	59,45			62,66	71,28	
			PREDIKAT KINERJA										T	R			R	S	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			-		130.703.200		51.140.000		6.750.000				130.703.200			BADAN KEUANGAN DAERAH
			Pendidikan dan pelatihan formal	jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	25	-	5	130.703.200	10	12.140.000	0	-	0,00	0,00	5	130.703.200	20,00	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Pengaan Pakaian dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang dibuat	750	875.000.000			7	39.000.000	7	6.750.000	100,00	17,31	7	6.750.000	0,93	0,77	
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										50,00	13,20			10,47	0,39	
			PREDIKAT KINERJA										SR	SR			SR	SR	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			3.123.870.217		587.106.729		378.427.300		346.935.600				938.042.329			BADAN KEUANGAN DAERAH
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisaasi kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja skpd yang disusun	5	55.757.900	1	2.878.460	1	10.763.800	1	9.539.400	100,00	88,62	2	12.417.860	40,00	22,27	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	5	36.015.000	1	2.944.000	1	7.484.700	1	4.335.000	100,00	57,92	2	7.279.000	40,00	20,21	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	jumlah laporan prognosirrealisasi anggaran yang disusun	5	1.366.975.812	1	179.983.850	1	131.491.200	1	124.124.100	100,00	94,40	2	304.107.950	40,00	22,25	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunan	jumlah laporan keuangan akhir tahunan yang disusun	5	79.290.100	1	3.380.000	1	7.484.700	1	4.440.000	100,00	59,32	2	7.820.000	40,00	9,86	BADAN KEUANGAN DAERAH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6*8		11=10/5*100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Penyusunan RENJA (RKT,RKA dan DPA)	jumlah dokumen renja yang disusun	5	55.777.800	1	8.056.360	1	11.912.100	1	7.455.000	100,00	62,58	2	15.511.360	40,00	27,81	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Penatausahaan buku kas umum daerah	jumlah buku kas daerah yang disusun	5	1.530.053.605	1	379.802.639	1	194.124.000	1	184.324.000	100,00	94,95	2	564.126.639	40,00	36,87	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Penyusunan SOP	jumlah dokumen sopyang disusun	5	-		5.022.180	1	8.179.500	1	7.855.000	100,00	96,03	1	12.877.180	20,00	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Penyusunan SPIP	jumlah spip yang disusun	5			5.039.240	1	6.987.300	1	6.863.100	100,00	98,22	1	11.902.340	20,00	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	92,21			35,00	17,41	
			PREDIKAT KINERJA										ST	ST			SR	SR	
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			29.614.639.726		7.452.445.487		15.866.861.821		10.244.152.519				15.184.048.640			BADAN KEUANGAN DAERAH
			Penyusunan analisa standar belanja	jumlah perwako analisa standart belanja yang disusun	5		1	3.380.000	1	44.775.000	0	-	0,00	0,00	1	3.380.000	20,00	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Penyusunan rancangan perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang disusun	jumlah perda tentang pajak dan retribusi daerah yang disusun	5	385.000.000	1	34.675.237	1	2.960.000	0	-	0,00	0,00	1	34.675.237	20,00	9,01	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	jumlah perda tentang apbd yang disusu	5	2.416.594.000	1	471.294.901	1	606.087.581	1	359.703.849	100,00	59,35	2	830.998.750	40,00	34,39	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	jumlah perwako tentang penjabaran apbd yang disusun	5	1.681.085.000	1	344.101.477	1	740.021.780	1	583.625.950	100,00	78,87	2	927.727.427	40,00	55,19	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Penyusunan rancangan perda tentang perubahan APBD	jumlah perda tentang perubahan apbd yang disusun	5	2.034.530.000	1	361.261.900	1	599.532.530	1	371.664.876	100,00	61,99	2	732.926.776	40,00	36,02	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Penyusunan rancangan peraturan KDH penjabaran perubahan APBD	jumlah perwako tentang penjabaran perubahan apbd yang disusun	5	1.276.712.000	1	347.514.827	1	765.865.190	1	611.844.150	100,00	79,89	2	959.358.977	40,00	75,14	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Penyusunan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	jumlah erda tentang pelaksanaan pertanggungjawab	5	4.362.347.015	1	670.535.068	1	594.800.630	1	570.576.530	100,00	95,93	2	1.241.111.598	40,00	28,45	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	jumlah perwako tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd	5	759.354.676	1	437.698.379	1	465.255.880	1	442.019.700	100,00	95,01	2	879.718.079	40,00	115,85	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	jumlah waktu intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendaptan daerah	60	1.908.000.000	12	544.113.299	12	606.298.000	12	508.874.800	100,00	83,93	24	1.052.988.099	40,00	55,19	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Penyelesaian dokumen SPP dan SPM	jumlah dokumen spp dan ppas yang disusun	10648	765.869.435	9000	207.907.580	9000	101.028.700	9000	94.454.700	100,00	93,49	18000	302.362.280	169,05	39,48	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Penyusunan KUA dan PPAS	jumlah laporan kua dan pas yang diselesaikan	5	1.982.192.500	1	596.756.167	1	820.000.000	1	757.373.600	100,00	92,36	2	1.354.129.767	40,00	68,31	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Pengembangan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	jumlah tapd yang studi pembelajaran	50	810.184.000		154.818.377	25	34.550.000	25	30.656.000	100,00	88,73	25	185.474.377	50,00	22,89	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Update komputerisasi gaji	jumlah data gaji pegawai yang terupdate	3195	1.564.104.000	90	228.084.668	4000	198.410.266	4000	180.731.457	100,00	91,09	4090	408.816.125	128,01	26,14	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Penyusunan profil pendapatan	jumlah profil pendapatan yang disusun	5				1	-				0	-	0,00	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
			Sosialisasi Pajak Daerah	jumlah pelaksanaan sosialisasi pajak daerah	450	960.000.000		13.365.000	1	-				0	13.365.000	0,00	1,39	BADAN KEUANGAN DAERAH	
			Penyusunan peraturan kebijakan perumusan dan perencanaan anggaran	jumlah perwako perumusan dan perencanaan anggaran disusun	5	1.223.601.000	1	415.484.556	1	1.225.560.580	1	1.177.066.217	100,00	96,04	2	1.592.550.773	40,00	130,15	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Implementasi penatausahaan belanja daerah	jumlah sp2d yang dicetak	10648	1.100.922.100	900	294.822.280	900	216.562.033	900	194.562.033	100,00	89,84	1800	489.384.313	16,90	44,45	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah	jumlah waktu pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah	60	3.098.865.000	12	733.472.411	12	1.101.560.146	9	976.573.100	75,00	88,65	21	1.710.045.511	35,00	55,18	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Pemeliharaan sarana dan prasarana sitem informasi keungan daerah	jumlah waktu pemeliharaan sarana dan prasarana sisd	60	591.279.000	12	30.702.000	12	35.000.000	12	33.825.000	100,00	96,64	24	64.527.000	40,00	10,91	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Peningkatan SDM Sistem Informasi Keuangan Daerah	jumlah sdm sistem informasi keuangan daerah yang dilatih	30	649.000.000	10	104.534.300	5	75.000.000	5	62.884.912	100,00	83,85	15	167.419.212	50,00	25,80	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Percetakan Massal, Penyerahan SPPT PBB dan Pelaksanaan Pekan Panutan PBB	jumlah sppt pbb yang tercetak	100000	1.345.000.000	50000	207.008.550	50000	253.410.000	50000	214.391.000	100,00	84,60	100000	421.399.550	100,00	31,33	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Update pajak daerah	jumlah update pajak daerah	4400	400.000.000	1	132.600.000	4200	34.265.000	4200	29.975.000	100,00	87,48	4201	162.575.000	95,48	40,64	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Pemeliharaan sistem pajak daerah	jumlah waktu pemeliharaan sistem pajak daerah	60	300.000.000	12	409.937.543	12	119.300.000	12	97.300.000	100,00	81,56	24	507.237.543	40,00	169,08	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Pengembangan aplikasi PPAS dan draf RKA	jumlah jenis aplikasi ppas dan draf rka	1			155.535.450	1	4.284.579	1	4.284.579	100,00	100,00	1	159.820.029	100,00	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah		1				1	-				0	-	0,00	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
			Penyusunan Laporan Konsolidasi		1				1	41.985.000	0	41.795.000	0,00	99,55	0	41.795.000	0,00	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Peningkatan Potensi dan Realisasi Dana Transfer Pusat ke Daerah	Jumlah persentase peningkatan potensi dan realisasi dana transfer pusat ke daerah	100			235.689.898	100	100.000.000	100	22.896.200	100,00	22,90	100	258.586.098	100,00	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Pendataan dan penatausahaan piutang pajak daerah	Jumlah data piutang pajak daerah yang disusun	100			84.936.619	1	193.740.000	1	125.199.900	100,00	64,62	1	210.136.519	1,00	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Peningkatan Potensi dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Jumlah persentase peningkatan potensi dan realisasi PAD	5			232.215.000	1	185.200.000	1	131.600.000	100,00	71,06	1	363.815.000	20,00	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=8*8		11=10/5*100%		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Penyusunan RAPERDA Tentang Penyertaan Modal		5			1	153.509.560	1	107.724.600	100,00	70,17	1	107.724.600	20,00	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
			Penyusunan RAPERDA Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah		1			1	-					0	-	0,00	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
			pembayaran kewajiban atas Putusan Pengadilan yang inkracht		1	2.537.899.366		1	2.537.899.366	1	2.512.549.366	100,00	99,00	1	2.512.549.366	100,00	99,00		
			Iuran Asuransi Kesehatan (Bagi PHL)		1			1	4.000.000.000	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										85,34	64,80			44,41	34,68	
			PREDIKAT KINERJA										T	R			SR	SR	
			Program Peningkatan Manajemen Aset dan Investasi Daerah			6.717.329.664			1.507.229.717		1.818.186.960				3.121.011.800			BADAN KEUANGAN DAERAH	
			Entry data barang inventaris/barang milik daerah untuk buku besar aset	jumlah dokumen barang inventaris/barang daerah dalam buku besar	5	421.468.000	1	84.640.600	1	83.391.300	1	79.516.300	100,00	95,35	2	164.156.900	40,00	38,95	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Penghapusan dan pelelangan barang milik daerah	jmlah dokumen penghapusan barang milik daerah	5	1.334.081.000	1	398.072.767	1	439.162.500	1	381.745.585	100,00	86,93	2	779.818.352	40,00	58,45	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Penilaian aset daerah	jumlah dokumen penilaian aset daerah	5	729.916.000	1	97.500.000	1	169.456.250	1	118.616.250	100,00	70,00	2	216.116.250	40,00	29,61	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Inventarisasi barang milik daerah	jumlah dokumen inventarisasi barang milik daerah	1080	831.120.000	216	223.209.700	216	90.369.660	216	81.162.500	100,00	89,81	432	304.372.200	40,00	36,62	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Percepatan persertifikatan tanah milik daerah	jumlah sertifikat tanah yang diterbitkan	250	1.819.230.000	50	232.910.643	50	258.925.000	10	202.464.196	20,00	78,19	60	435.374.839	24,00	23,93	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Pengamanan aset milik daerah	jumlah aset daerah persil bidang tanah yang diamankan	200	879.914.664	60	358.509.071	60	501.144.750	10	487.614.752	16,67	97,30	70	846.123.823	35,00	96,16	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Pengaplikasian dan pendampingan SIMDA aset	jumlah upb yang didampingi dalam mengaplikasikan simda aset	1080	701.600.000	216	112.386.936	216	275.737.500	216	262.662.500	100,00	95,26	432	375.049.436	40,00	53,46	BADAN KEUANGAN DAERAH
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										76,67	68,76			37,00	48,17	
			PREDIKAT KINERJA										T	T			SR	SR	
			Kepegawalan serta pendidikan dan pelatihan																
			Program Pelayanan Administrai Perkantoran			3.008.435.350			613.312.089		334.623.141				940.005.751			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Pengadaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	60	621.304.950	12	43.572.467	12	47.500.000	12	43.244.120	100,00	91,04	24	86.816.587	40,00	13,97	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang tersedia (jasa)	60	449.870.000	12	99.790.000	12	131.840.000	12	131.240.000	100,00	99,54	24	231.030.000	40,00	51,35	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (bulan)	60	270.050.000	12	50.515.000	12	46.860.000	12	46.860.000	100,00	100,00	24	97.375.000	40,00	36,06	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki (unit/tahun)	60	150.000.000	32	29.335.000	12	10.000.000	12	9.940.000	100,00	99,40	44	39.275.000	73,33	26,18	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang dibeli (jenis)	60	74.700.000	36	14.700.000	12	10.000.000	12	10.000.000	100,00	100,00	48	24.700.000	80,00	33,07	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang dibeli (Jenis) dan Jumlah lembar fotocopy (Eksemplar)	60	102.704.500	12	20.412.850	12	4.550.000	12	4.550.000	100,00	100,00	24	24.962.850	40,00	24,31	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli (jenis)	60	30.000.000	11	5.990.000	12	2.233.000	12	1.953.000	100,00	87,46	23	7.943.000	38,33	26,48	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dibeli (jenis)	60	20.000.000	1	3.680.000	12	2.560.000	12	2.500.000	100,00	97,66	13	6.180.000	21,67	30,90	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman (bulan)	60	94.670.000	12	9.910.000	12	4.440.000	12	2.940.000	100,00	66,22	24	12.850.000	40,00	13,57	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti (kali)	60	1.195.135.900	12	335.406.772	12	74.640.141	12	73.466.542	100,00	98,43	24	408.873.314	40,00	34,21	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	97,63			45,33	29,01	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pengkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6*8		11=10/5*100%			
				K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			PREDIKAT KINERJA																
												ST	ST			SR	SR		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.033.200.000		168.045.264		140.289.000	6	136.527.798			12	304.573.062			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli (unit)	5	133.200.000	-	-	1	-					0	-	0,00	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara (unit)	25	700.000.000	5	124.695.264	5	118.989.000	5	115.227.798	100,00	96,84	10	239.923.062	40,00	34,27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (Kali)	5	200.000.000	1	43.350.000	1	21.300.000	1	21.300.000	100,00	100,00	2	64.650.000	40,00	32,33	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																
												100,00	97,32			28,67	22,20		
			PREDIKAT KINERJA																
												ST	ST			SR	SR		
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			428.943.000		72.803.167		28.850.000		27.961.000				100.564.167			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah PNS yang mengikuti diklat formal (Orang)	100	225.000.000	20	39.089.667	10	9.400.000	7	9.400.000	70,00	100,00	27	48.489.667	27,00	21,55	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Peninjauan masa kerja dan Peningkatan Pendidikan PNS	Jumlah ASN yang mendapat tambahan masa kerja dan peningkatan pendidikan(orang)	150	161.943.000	50	33.513.500	25	19.250.000	25	18.561.000	100,00	96,42	75	52.074.500	50,00	32,16	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Sosialisasi Anti Narkoba	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi P4GN	172	40.000.000	-	-	46	-					0	-	0,00	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																
												85,00	97,80			25,67	17,90		
			PREDIKAT KINERJA																
												T	ST			SR	SR		
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			178.000.000		16.804.000		22.730.000		22.500.000				39.104.000			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah jenis laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dibuat (Jenis)	15	22.000.000	3	2.000.000	3	4.940.000	3	4.940.000	100,00	100,00	6	6.940.000	40,00	31,55	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Penyusunan pelaporan keuangan semesteran/ prognosis keuangan	Jumlah jenis laporan semesteran/ prognosis keuangan yang dibuat (Jenis)	5	22.000.000	1	2.000.000	1	4.290.000	1	4.060.000	100,00	94,64	2	6.060.000	40,00	27,55	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah jenis laporan keuangan akhir tahun yang dibuat (Jenis)	5	22.000.000	1	2.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	100,00	100,00	2	7.000.000	40,00	31,82	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Penyusunan Rencana kerja, RKA, dan DPA	Jumlah jenis Renja, RKA dan DPA yang dibuat (Jenis)	15	22.000.000	3	2.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	100,00	100,00	6	7.000.000	40,00	31,82	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Forum Perangkat Daerah	Jumlah pemangku kepentingan yang hadir	120	40.000.000	-	-	30	3.500.000	30	3.500.000	100,00	100,00	30	3.500.000	25,00	8,75	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Forum Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Jumlah dokumen hasil pengendalian intern OPD	5	50.000.000	1	8.604.000	1	-					1	8.604.000	20,00	17,21	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																
												100,00	98,99			34,17	24,78		
			PREDIKAT KINERJA																
												ST	ST			SR	SR		
			Program Kepegawaian Daerah			16.448.200.000		-		1.841.982.453		1.661.765.602				1.661.765.602			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Pendidikan dan penjenjangan struktural bagi PNS	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan penjenjangan struktural	287	6.228.200.000	-	-	5	6.118.800	1	6.118.800	20,00	100,00	1	6.118.800	0,35	0,10	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kinerja dan Realisasi Anggaran Ranja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9=8/7*100%		10=8*8		11=10/5*100%		12
					K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Proses Penyelesaian cuti bagi PNS Kota Pangkalpinang	Jumlah penyelesaian Cuti ASN Kota Pangkalpinang	46	125.000.000			10	27.350.000	10	24.400.000	100,00	89,21	10	24.400.000	21,74	19,52	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Pelatihan Dasar Bagi CASN Daerah	Jumlah CASN yang mengikuti Pelatihan Dasar	200	1.700.000.000			50	-					0	-	0,00	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Uji Kompetensi bagi ASN Kota Pangkalpinang	Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi	112	351.000.000			18	113.900.600	17	113.900.600	94,44	100,00	17	113.900.600	15,18	32,45	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Pelatihan Pengukuran Indeks Profesional ASN	Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan Pengukuran Indeks Profesional ASN	62	50.000.000			70	-					0	-	0,00	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Workshop Pengembangan Kompetensi PNS	Jumlah ASN yang mengikuti workshop Pengembangan Kompetensi	242	270.000.000			70	-					0	-	0,00	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Jumlah pelaksanaan pembinaan karir ASN	24	540.000.000			6	106.500.000	6	96.025.000	100,00	90,16	6	96.025.000	25,00	17,78	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Peningkatan dan Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah penyelesaian kasus ASN yang indisipliner	80	160.000.000			5	24.600.000	5	24.452.800	100,00	99,40	5	24.452.800	6,25	15,28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Seleksi penerimaan CASN dari pelamar umum	Jumlah peserta seleksi CASN yang lulus sesuai dengan formasi yang diajukan	1.000	200.000.000			250	431.578.762	250	401.176.161	100,00	92,96	250	401.176.161	25,00	200,59	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Pengelolaan administrasi CASN menjadi ASN	Jumlah CASN yang diangkat menjadi ASN	1.000	160.000.000			250	19.600.000	250	18.900.000	100,00	96,43	250	18.900.000	25,00	11,81	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Pengelolaan administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Jumlah SK pangkat ASN yang diterbitkan	2.400	680.000.000			600	125.239.500	701	112.412.227	116,83	89,76	701	112.412.227	29,21	16,53	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Pengelolaan Data ASN Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	Jumlah data pelayanan kepegawaian yang dikelola	12.000	960.000.000			3000	246.389.194	3000	246.289.194	100,00	99,96	3000	246.289.194	25,00	25,66	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Penyusunan formasi pegawai	Jumlah formasi yang diusulkan	1.000	100.000.000			250	9.193.500	250	9.193.500	100,00	100,00	250	9.193.500	25,00	9,19	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Memiliki Masa Kerja 10, 20, 30 Tahun	Jumlah ASN yang menerima penghargaan	800	160.000.000			200	15.866.000	200	13.150.000	100,00	82,88	200	13.150.000	25,00	8,22	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Pengelolaan Administrasi Pensiun PNS	Jumlah SK pensiun yg diterbitkan	400	340.000.000			100	65.500.000	76	59.199.000	76,00	90,38	76	59.199.000	19,00	17,41	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS	Jumlah ASN Pemkot Pangkalpinang yang menerima bantuan biaya tugas belajar	21	700.000.000			7	43.010.600	7	28.610.600	100,00	66,52	7	28.610.600	33,33	4,09	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Penyelesaian Administrasi Karpeg, Karis/ Karsu, Askes, Taperum, dan Taspen	Jumlah Karpeg, Karis/Karsu, Taperum, Askes dan Taspen yg diterbitkan	600	140.000.000			150	11.750.000	150	9.950.000	100,00	84,68	150	9.950.000	25,00	7,11	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Pengelolaan dan Pengembangan Website Kepegawaian	Jumlah website yang dikelola dan dikembangkan	8	220.000.000			2	24.425.000	2	24.175.000	100,00	98,98	2	24.175.000	25,00	10,99	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Penataan Arsip Kepegawaian	Jumlah arsip kepegawaian yang ditata	200	80.000.000			50	-					0	-	0,00	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Pengelolaan Administrasi Dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang diangkat dalam jabatan fungsional	120	160.000.000			30	40.000.000	30	39.143.000	100,00	97,86	30	39.143.000	25,00	24,46	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capelan Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capelan Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capelan Kinerja dan Realisasi Anggaran Rerja PD yang di evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capelan Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
1	2	3	4	6		6		7		8		9=8/7*100%		10=6+8		11=10/5*100%							
				K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jumlah pelaksanaan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi yang terfasilitasi	4	640.000.000			3	245.224.159	3	163.615.142	100,00	66,72	3	163.615.142	75,00	25,56	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
			Seleksi Mutasi PNS (Mutasi Masuk dan Mutasi Keluar)	Jumlah PNS yang mengikuti seleksi mutasi masuk dan keluar	120	200.000.000	-	-	30	6.811.238	0	6.811.238	0,00	100,00	0	6.811.238	0,00	3,41	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
			Pengelolaan dan Pengembangan Elektronik Sistem Management Informasi Layanan Kepegawaian Daerah (E-SMILE)	Jumlah jenis data yang tersusun	4	500.000.000	-	-	1	118.300.000	1	116.200.000	100,00	98,22	1	116.200.000	25,00	23,24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
			Pembinaan pegawai KORPRI	Jumlah pelaksanaan HUT KORPRI	4	360.000.000	-	-	1	-					0	-	0,00	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
			Penyelenggaraan dan Pembinaan Kafilah MTQ Korpri	Jumlah cabang yang dilombakan	17	465.000.000	-	-	5	-					0	-	0,00	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
			Ujian Dinas dan ujian penyesuaian ijazah	Jumlah ASN yang mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah	400	400.000.000	-	-	100	113.000.000	100	102.418.240	100,00	90,64	100	102.418.240	25,00	25,60	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
			Pengelolaan E-LHKPN	Jumlah Kepatuhan pelaporan LHKPN secara elektronik	172	560.000.000	-	-	43	47.625.100	43	45.625.100	100,00	95,80	43	45.625.100	25,00	8,15	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				
			PREDIKAT KINERJA																				
			2.881.533.080.882					247.324.080.102			572.195.978.080			503.147.286.788			90,82	90,22			18,52	18,78	
			Rata-rata capaian Kinerja (%)																				
			Predikat Kinerja																				
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja : 1. Pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, 2. etos kerja yang tinggi dari PD dalam menyelesaikan program dan kegiatan yang diampu oleh mereka, 3. Indikator yang jelas, dan target yang terukur																							
Faktor Penghambat pencapaian kinerja : 1. Pandemi COVID-19 mengakibatkan adanya perubahan arah kebijakan dan program prioritas baik pemerintah pusat maupun daerah, 2. adanya pemangkasan anggaran akibat kebijakan refocusing																							
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Pelaporan hasil evaluasi sesuai dengan apa yang ada dalam dokumen perencanaan, indikator, anggaran dan target diisi secara jelas																							
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Program prioritas, indikator SDG's, dan Indikator SPM dimasukkan dalam setiap dokumen RKPD untuk memudahkan pengevaluasian																							

Disetujui,
, tanggal,
WALIKOTA PANGKALPINANG

H. MAULAN AKLIL



2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Pada tahun 2022, isu strategis yang menjadi permasalahan utama Pemerintah Kota Pangkalpinang yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah antara lain sebagai berikut.

- 1) Peningkatan kualitas SDM melalui pemerataan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan
- 2) Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat
- 3) Perwujudan Sustainable Development Goals (SDGs)
- 4) Pembangunan perekonomian berkelanjutan melalui optimalisasi sektor unggulan
- 5) Perwujudan Good Governance melalui Reformasi Birokrasi
- 6) Infrastruktur publik berbasis Rencana Tata Ruang Wilayah
- 7) Penanganan dan Pemulihan Pandemi COVID-19 di Kota Pangkalpinang

Dengan mempedomani Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 171 (ayat 4) “Strategi RPJMD merupakan prioritas pembangunan Daerah 5 (lima) tahunan yang dijabarkan ke dalam kebijakan tahunan yang harus dipedomani dalam menentukan prioritas pembangunan RKPD periode berkenaan, maka Prioritas Pembangunan Kota Pangkalpinang adalah:



1. Peningkatan nilai tambah sektor unggulan melalui penguatan sektor industri pengolahan dan UMKM;
2. Pengembangan potensi wisata daerah;
3. Perwujudan kemudahan investasi untuk pengembangan sektor pariwisata, industri dan perdagangan;
4. Percepatan pengentasan kemiskinan;
5. Peningkatan kualitas angkatan kerja lokal;
6. Penanggulangan bencana alam;
7. Optimalisasi perlindungan keamanan dan kenyamanan masyarakat;
8. Pemantapan Reformasi Birokrasi;
9. Peningkatan pelayanan publik;
10. Perwujudan kualitas pendidikan berbasis karakter;
11. Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan masyarakat;
12. Peningkatan kesejahteraan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak;
13. Peningkatan kualitas organisasi kepemudaan dan olahraga;
14. Peningkatan pengelolaan tata kota wilayah;
15. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas; dan
16. Rehabilitasi kerusakan lingkungan hidup

- 1. Prioritas Pembangunan 1:** Peningkatan nilai tambah sektor unggulan melalui penguatan sektor industri pengolahan dan



UMKM, mendukung pencapaian **Sasaran** Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan, dengan arah kebijakan yaitu:

- 1) Peningkatan ekspor dan penguatan pasar dalam negeri;
- 2) Pengembangan IKM (Industri Kecil dan Menengah) sebagai penggerak ekonomi berbasis kerakyatan;
- 3) Pemberian bantuan modal kepada pelaku UMKM.

2. Prioritas Pembangunan 2: Pengembangan potensi wisata daerah, mendukung pencapaian **Sasaran** Meningkatnya penggalan, pemanfaatan dan pengembangan potensi sektor pariwisata daerah, dengan arah kebijakan yaitu:

- 1) Optimalisasi kawasan kampung wisata dan pengembangan destinasi wisata baru;
- 2) Peningkatan implementasi protokol kesehatan pada aktivitas ekonomi sektor pariwisata

3. Prioritas Pembangunan 3 : Perwujudan kemudahan investasi untuk pengembangan sektor pariwisata, industri dan perdagangan, mendukung pencapaian **Sasaran** Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah, dengan arah kebijakan Pengembangan kondusivitas penanaman modal wilayah untuk pengembangan sektor ekonomi unggulan



4. Prioritas Pembangunan 4 : Percepatan pengentasan kemiskinan, mendukung pencapaian **Sasaran** Menurunnya tingkat kemiskinan. dengan arah kebijakan yaitu:

- 1) Peningkatan kapasitas produksi dan hasil pengolahan perikanan;
- 2) Peningkatan kesejahteraan petani;
- 3) Diversifikasi konsumsi pangan pokok berbasis potensi lokal;
- 4) Pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran, warga lanjut usia dan masyarakat terdampak bencana.

5. Prioritas Pembangunan 5: Peningkatan kualitas angkatan kerja lokal, mendukung pencapaian **Sasaran** Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat, dengan arah kebijakan yaitu :

- 1) Peningkatan jiwa kewirausahaan masyarakat;
- 2) peningkatan harmonisasi kebijakan kinerja perusahaan dan tenaga kerja

6. Prioritas Pembangunan 6 : Penanggulangan bencana alam, mendukung pencapaian **Sasaran** Meningkatnya keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana, dengan arah kebijakan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana

7. Prioritas Pembangunan 7: Optimalisasi perlindungan keamanan dan kenyamanan masyarakat, mendukung pencapaian **Sasaran** meningkatnya kondisi keamanan daerah, dengan arah kebijakan:

- 1) Peningkatan penegakan hukum dan perundang-undangan;



- 2) Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- 3) Pembinaan Pembangunan Politik daerah

8. Prioritas Pembangunan 8 : Pemantapan Reformasi Birokrasi, mendukung pencapaian **Sasaran** Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah, dengan arah kebijakan:

- 1) Pengembangan sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu;
- 2) Peningkatan kualitas koordinasi, fasilitasi kinerja pemerintah daerah, bina mental spiritual serta perekonomian dan pembangunan daerah;
- 3) Optimalisasi BUMD Pangkalpinang;
- 4) Optimalisasi pengelolaan Keuangan, pendapatan dan barang milik daerah;
- 5) Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan.

9. Prioritas Pembangunan 9 : Peningkatan pelayanan publik, mendukung pencapaian **Sasaran** Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik berbasis sistem informasi dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan arah kebijakan:

- 1) Optimalisasi pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- 2) Peningkatan kapasitas dan kinerja ASN.



10. Prioritas Pembangunan 10 : Perwujudan kualitas pendidikan berbasis karakter, mendukung pencapaian **Sasaran** Meningkatnya kualitas pendidikan, dengan arah kebijakan:

- 1) Peningkatan kualitas tata kelola/manajemen pendidikan;
- 2) Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik;
- 3) Pengembangan sistem pendidikan berbasis budaya;
- 4) Peningkatan minat baca masyarakat.

11. Prioritas Pembangunan 11 : Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan masyarakat, mendukung pencapaian **Sasaran** Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan arah kebijakan:

- 1) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak;
- 2) Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
- 3) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menciptakan gerakan masyarakat hidup sehat;
- 4) Standarisasi pelayanan kesehatan;
- 5) Pengendalian dan pengawasan produksi alat kesehatan dan produk makanan yang higienis.

12. Prioritas Pembangunan 12 : Peningkatan kesejahteraan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak, mendukung pencapaian **Sasaran** Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan, dengan arah kebijakan:



- 1) Pendidikan dan penguatan tentang hak-hak kaum perempuan dan anak;
- 2) Pemberdayaan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- 3) Peningkatan partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan daerah;
- 4) Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan.

13. Prioritas Pembangunan 13 : Peningkatan kualitas organisasi kepemudaan dan olahraga, mendukung pencapaian **Sasaran** Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga, dengan arah kebijakan optimalisasi pembinaan pemuda dan olahraga

14. Prioritas Pembangunan 14 : Peningkatan pengelolaan tata kota wilayah, mendukung pencapaian **Sasaran** Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman layak huni, dengan arah kebijakan:

- 1) Penataan prasarana, sarana dan utilitas umum;
- 2) Penataan kawasan kumuh perkotaan;
- 3) Peningkatan kapasitas rumah layak huni;
- 4) Pemenuhan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program

15. Prioritas Pembangunan 15 : Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas, mendukung pencapaian **Sasaran**



Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum, dengan arah kebijakan:

- 1) Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar kehidupan masyarakat;
- 2) Peningkatan kualitas tata ruang wilayah;
- 3) Penataan dan Penyediaan tanah untuk pembangunan daerah.

16. Prioritas Pembangunan 16: Rehabilitasi kerusakan lingkungan hidup, mendukung pencapaian **Sasaran** Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dengan arah kebijakan peningkatan pengawasan dan pengendalian kegiatan yang berpotensi merusak kualitas lingkungan hidup.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah daerah

2.3.2.1 Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

- a. Masih adanya fasilitas pendidikan seperti ruang kelas yang kondisinya tidak baik, baik kerusakan berat maupun ringan;
- b. Masih ditemukannya kasus anak tidak melanjutkan sekolah karena putus di masa studi, hal ini dilihat dari masih adanya angka putus sekolah di jenjang pendidikan dasar. Angka Putus Sekolah (APS) pada akhir 2020 pada semua jenjang masih cukup



tinggi, yaitu sebesar 0,08% untuk jenjang SD/MI, sebesar 0,26% untuk jenjang SMP/MTs;

c. Persentase lulusan SD/MI yang melanjutkan ke SMP/MTs mengalami penurunan selama kurun waktu 2016-2020, dari 100% di tahun 2016 menjadi 103,33% di tahun 2020;

d. Masih adanya pendidik yang belum memenuhi kualifikasi S1/D4. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2019 pada jenjang pendidikan TK/PAUD sebesar 51,74%, sedang pada jenjang SD/SMP sebesar 89,86%. Kualifikasi guru tampaknya masih sulit untuk bisa mencapai 100%, sebab masih ada guru yang belum memiliki motivasi ataupun kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1

2. Kesehatan

a. Berfluktuasinya kasus Covid 19 di Kota Pangkalpinang memerlukan perhatian dan penanganan kesehatan yang serius dan sungguh-sungguh agar kasus penularannya tidak mengalami kenaikan dan tingkat kesembuhan dapat meningkat;

b. Masih ditemukannya kasus kematian ibu melahirkan bayi dan balita;

c. Masih adanya Prevalensi balita pendek dan sangat pendek (stunting). Prevalensi stunting mengalami kecenderungan penurunan dari 12,70% pada tahun 2017 menurun menjadi 0,92% pada tahun 2020;



- d. Masih berfluktuasinya Angka kesakitan dan Angka kematian DBD dikarenakan kasus DBD sangat dipengaruhi oleh iklim/cuaca, kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) mandiri oleh masyarakat belum optimal/belum jadi budaya, indikator tata laksana di rumah sakit terhadap penderita DBD yang belum merata, serta ada keterlambatan rujukan masyarakat, sudah fase kritis baru dirujuk;
- e. Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), hal ini dapat dilihat dari rumah tangga ber PHBS, dan rumah sehat. Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada tahun 2018 sebesar 69,1 % meningkat menjadi 71,5 % pada tahun 2020;
- f. Masih belum semua penduduk memiliki akses sanitasi dasar (Jamban keluarga, penyediaan air bersih, SPAL dan penanganan sampah) baik pada tatanan rumah tangga maupun tempat-tempat umum. Hal ini dapat dilihat dari cakupan Desa ODF masih kurang pada tahun 2018 sebesar 38 persen dan sebesar 59,52 % pada tahun 2020.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (perpipaan PDAM, PAMSIMAS dan DAK) masih rendah;



- b. Secara umum ruas jalan di Kota Pangkalpinang sudah dalam kondisi baik dan mantap, namun masih terdapat ruas jalan di Kota Pangkal Pinang dalam kondisi rusak;
- c. Masih terdapat jembatan di Kota Pangkal Pinang dalam kondisi yang memerlukan peningkatan;
- d. Belum adanya rencana tata ruang wilayah Kota Pangkalpinang yang *up to date* yang sesuai dengan kondisi perkembangan kota saat ini.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a. Masih terbatasnya lahan yang tersedia untuk pemakaman. Pada tahun 2018 rasio pemakaman penduduk per satuan penduduk sebesar 0,44 % menurun menjadi 0,43 % pada tahun 2019;
- b. Belum optimalnya pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) perumahan dan permukiman;
- c. Belum seluruh rumah tinggal memiliki sanitasi yang layak, pada tahun 2020 sebesar 97,91%, hal ini berarti masih ada 2,09% yang belum bersanitasi;
- d. Masih ada rumah tidak layak huni (RTLH) yang belum mendapatkan penanganan;
- e. Belum semua wilayah permukiman memiliki PSU (Prasarana Sarana Utilitas) (cakupan tahun 2019 sebesar 80%).



5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- a. Masih tingginya pelanggaran terhadap peraturan daerah. Pada tahun 2018 jumlah penyelesaian penegakan perda sebesar 83 tindakan meningkat menjadi sebanyak 118 tindakan pada tahun 2019. Sedangkan jumlah pelanggaran terhadap peraturan daerah pada tahun 2018 sebanyak 83 kasus meningkat menjadi 120 kasus pada tahun 2019;
- b. Perlunya perhatian yang serius terhadap bencana yang terjadi di Kota Pangkalpinang. Jumlah kejadian bencana banjir pada tahun 2020 sebesar 18 kejadian menurun dari tahun 2019 sebesar 18 kejadian. Sedangkan kejadian bencana angin puting beliung meningkat dari tahun 2019 sebesar 1 kejadian menjadi sebesar 7 kejadian pada tahun 2020. Kejadian bencana kebakaran di Kota Pangkalpinang terdata pada tahun 2020 sebesar 1 kejadian.

6. Sosial

- a. Tingginya PMKS Kota Pangkalpinang sebanyak 12.270 orang pada tahun 2020;
- b. Meningkatnya angka kemiskinan Kota Pangkalpinang karena terjadinya Covid-19. Berdasarkan rilis dari Dinas Sosial Kota Pangkalpinang, jumlah warga miskin di Kota Pangkalpinang meningkat sekitar 0,40 persen sejak pandemi Covid 19. Angka tersebut berdasarkan data pengajuan warga yang mengajukan keterangan tidak mampu di kelurahan;



- c. Masih ada keluarga miskin di Kota Pangkalpinang yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Berdasarkan data DTKS jumlah keluarga miskin dan kurang mampu di Kota Pangkalpinang kurang lebih berjumlah 9.400 keluarga.

2.3.2.2 Urusan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

7. Tenaga Kerja

- a. Meningkatnya tingkat pengangguran di Kota Pangkalpinang. Meskipun mengalami peningkatan namun data tingkat pengangguran di tahun 2016 hingga 2020 juga menunjukkan adanya peningkatan maupun penurunan. Pada tahun 2017 tingkat pengangguran di Kota Pangkalpinang mencapai 5,80 % kemudian pada tahun 2018 menurun menjadi 4,70%, dan kemudian mengalami peningkatan sebesar 6,93 % pada tahun 2020;
- b. Cakupan pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan berfluktuatif dari 1,17 pada tahun 2016 menjadi 36,57% pada tahun 2017 namun kembali turun di tahun 2020 menjadi 153,82%;
- c. Tingginya kasus konflik industrial yang terjadi di Kota Pangkalpinang mencapai 53 kasus pada tahun 2020;
- d. Masih minimnya anggaran untuk pelatihan tenaga kerja yang berbasis kompetensi maupun kewirausahaan.



8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Belum semua perangkat daerah menyusun program dan kegiatan responsive gender sebagai bentuk implementasi PUG di daerah;
- b. Rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislative, yakni hanya 10 % atau 3 orang dari 30 anggota legislative yang ada di Kota Pangkalpinang periode 2019-2024;
- c. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Rasio KDRT tahun 2017 masih 0,012 per 1.000 rumah tangga, sedangkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak periode Januari s/d Juli 2020 sebanyak 23 kasus;
- d. Kota Pangkalpinang belum mencapai predikat Kota Layak Anak, namun tahun 2019 telah mencapai predikat Kota Layak Anak Tingkat Pratama Tahun 2019.

9. Pangan

Belum optimalnya penganekaragaman pangan masyarakat Kota Pangkalpinang, hal ini terlihat dari skor pola pangan harapan (PPH) di Kota Pangkalpinang menunjukkan tren naik turun dari tahun ke tahun. Tahun 2017 tercatat skor PPH sebesar 87,3% menurun menjadi 84,1% pada tahun 2018, dan meningkat kembali menjadi 86,6% pada tahun 2020.

10. Pertanian

Masih banyak lahan milik Pemkot Pangkalpinang yang belum bersertifikat, pada awal pendataan tahun 2020 jumlahnya



mencapai lebih dari 378 bidang lahan, yang sudah disertifikasi sebanyak 278 aset.

11. Lingkungan Hidup

- a. Pengurangan sampah perkotaan di Kota Pangkalpinang menunjukkan kinerja yang mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2019 persentase pengurangan sampah perkotaan hanya menunjukkan nilai 22,11%, dimana nilai tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 sebesar 21,76%;
- b. Presentase luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik kawasan perkotaan di Kota Pangkalpinang masih rendah. Hingga tahun 2020 mencapai 21,30% meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya mencapai 18%. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah sebesar 30% dari seluruh luas wilayah perkotaan yang terdiri dari 20% peruntukan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang bersifat publik dan 10% di antaranya bersifat privat;
- c. Tingginya volume sampah yang menyebabkan TPA di Kota Pangkalpinang tidak dapat lagi menampung sampah dari masyarakat.



12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus KTP, hal tersebut dibuktikan dengan adanya penurunan rasio penduduk yang ber-KTP pada tahun 2019 ke 2020 dari 100% menjadi 97,8%. Hal ini juga ditunjukkan oleh kepemilikan KTP yang juga mengalami penurunan dari 140,8% di tahun 2019 menjadi 97,81% pada tahun 2020;
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus akta kelahiran yang dibuktikan dengan angka rasio kepemilikan akta kelahiran yang masih mencapai 8.633/10.000 penduduk;
- c. Masih minimnya penduduk yang mengurus akta kematian dimana cakupannya hanya mencapai 57,26% pada tahun 2017;
- d. Masih minimnya penduduk yang mengurus akta perkawinan dimana cakupannya pada tahun 2020 hanya mencapai 68,11%

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Jumlah Posyandu aktif belum optimal yaitu 144 unit pada tahun 2020;
- b. Tingkat prestasi LPM di Kota Pangkalpinang yang masih tergolong rendah yaitu 15,17% pada tahun 2019;
- c. Jumlah kelompok binaan LPM yang masih mencapai angka 64,5% pada tahun 2019;



- d. Tingkat swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat masih belum mencapai angka yang optimal yaitu sebesar 58 % pada tahun 2019;
- e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat yaitu sebesar 34%.

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam rangka mengendalikan kelahiran dilihat dari tingginya *unmetneed* (tahun 2020 sebesar 10,35), persentase peserta KB baru sebesar 28,50, cakupan KB Pria masih rendah yaitu 6,18%, penggunaan alat Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) relatif rendah yaitu 13,69 pada tahun 2020;
- b. Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB sampai dengan tahun 2020 sebesar 84,92%, diatas target nasional yaitu 80%;
- c. Belum tersusunnya Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga;
- d. Masih kurangnya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKL dan BKR)

15. Perhubungan

- a. Masih adanya kondisi fasilitas perlengkapan jalan yang dalam kondisi rusak, tahun 2020 sebesar 0,79% ;



- b. Masih ada jaringan jalan yang belum terlayani angkutan umum tahun 2019 sebesar 20%;
- c. Kondisi angkutan umum (angkot) di Kota Pangkalpinang sebagian besar sudah terlalu lama dan memerlukan peremajaan;
- d. Menurunnya jumlah angkutan umum, dikarenakan perkembangan angkutan online seperti *Grab*. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang, jumlah angkutan umum (angkot) yang masih beroperasi sebanyak 73 unit angkot;
- e. Masih banyak lampu penerangan jalan di Kota Pangkalpinang yang belum terpasang. Saat ini baru ada 2.650 titik (24,2%) yang terpasang lampu jalan, sedangkan target keseluruhan sebanyak 10.961 titik;
- f. Tidak berfungsinya terminal antar kota seperti di terminal Selindung, akibatnya para sopir angkutan umum tidak masuk terminal dan lebih memilih menunggu penumpang di tepi jalan.

16. Komunikasi dan Informatika

- a. Belum terkelola dan terpadunya sistem informasi pemerintahan daerah berbasis elektronik di Kota Pangkalpinang'
- b. Belum semua OPD di Kota Pangkalpinang yang memiliki website aktif dan update. Dari 33 OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, baru 18 OPD (54,5 %) yang memiliki website yang aktif di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;



- c. Kurangnya koordinasi antar OPD dalam pembangunan website di masing-masing OPD;
- d. Aplikasi pengaduan informasi publik yang dibuat oleh pemerintah pusat (*lapor.id*) masih belum dapat beroperasi secara optimal.

17. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- a. Masih rendahnya koperasi simpan pinjam (KSP) yang masuk dalam kategori sehat, yakni hanya 3 ijin di tahun 2020;
- b. Lambatnya peningkatan status usaha mikro ke posisi usaha kecil.

18. Penanaman Modal

- a. Masih rendahnya promosi investasi di Kota Pangkalpinang, kegiatan promosi investasi hanya dilakukan 1 tahun sekali;
- b. Belum optimalnya kerjasama penanaman modal, sampai dengan tahun 2019 baru ada 1 MoU dengan kemitraan usaha besar dan UMKM.

19. Kepemudaan dan Olah Raga

- a. Belum optimalnya pembinaan kepemudaan dan prestasi olahraga;
- b. Kurangnya minat pemuda dalam mengikuti kompetisi, hal ini terlihat rendahnya kepesertaan pemuda dalam kegiatan-kegiatan kompetensi.



20. Statistik

Ketidaklengkapan data dan informasi yang akurat. Hal tersebut menjadikan kesulitan dalam mempertajam isu strategis, perhitungan dan prediksi perubahan lima atau sepuluh tahun mendatang, karena perubahan lingkungan strategis dan kebijakan nasional yang dinamis.

21. Persandian

- a. Mekanisme persandian yang belum berjalan secara optimal;
- b. Pemanfaatan persandian dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal, hal ini selain karena masalah internal, secara eksternal banyak OPD yang belum memahami manfaat persandian;

22. Kebudayaan

- a. Minimnya gelaran festival seni dan budaya yang diselenggarakan dimana pada tahun 2020 diselenggarakan 4 kegiatan;
- b. Minimnya jumlah misi kesenian pada tahun 2020 sebanyak 1 kegiatan

23. Perpustakaan

- a. Belum optimalnya peningkatan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah, data tahun 2019 menunjukkan peningkatan hanya 9,6 %;



- b. Koleksi buku yang dimiliki perpustakaan masih terbatas belum 100% mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Rasio koleksi buku yang tersedia hanya 0,40 %;
- c. Rasio perpustakaan persatuan penduduk masih 1:1.736

24. Kearsipan.

- a. Kurangnya perangkat daerah yang melakukan pengelolaan arsip secara baku. Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar hanya 87,10 % namun belum mencakup keseluruhan;
- b. Jumlah arsip in aktif yang berhasil dikelola mengalami penurunan, pada tahun 2020 sebanyak 3.277 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebanyak 4.826 cenderung mengalami penurunan;
- c. Ketersediaan SDM arsiparis yang masih sangat terbatas. Pada tahun 2019 menurun menjadi 90 orang.

2.3.2.3 Urusan Pilihan

25. Kelautan dan Perikanan

- a. Menurunnya produksi perikanan tangkap, dari 930,08 ton pada tahun 2019 menjadi 1.099,30 ton per tahun pada tahun 2020;
- b. Menurunnya produksi perikanan budidaya, dari 5.795,21 ton pada tahun 2018 menjadi 1.575,95 ton pada tahun 2020;



- c. Belum optimalnya pembinaan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di bidang perikanan. Cakupan pembinaan kepada kelompok pembudidaya ikan pada tahun 2020 sebesar 22%.

26. Pariwisata

- a. Terbatasnya daya tarik wisata dan kurangnya daya saing kepariwisataan, kondisi ini terlihat dari menurunnya kontribusi pariwisata terhadap PDRB dari 1,33% di tahun 2017 menjadi 4,90% di Tahun 2020;
- b. Menurunnya kunjungan wisatawan mancanegara dari 1.755 orang pada tahun 2019 menjadi 283 orang pada tahun 2020;
- c. Belum optimalnya kualitas infrastruktur pendukung pariwisata, sampai dengan tahun 2020 potensi wisata belum banyak dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai;
- d. Belum optimalnya koordinasi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

27. Pertanian

- a. Menurunnya produksi beberapa komoditas pertanian dan peternakan. Pada tahun 2019 produksi ketela pohon sebesar 293 ton, menurun menjadi 190,07 ton pada tahun 2020. Produksi mangga, rambutan, durian, pisang, salak dan manggis pada tahun 2020 juga mengalami penurunan. Jumlah babi dari 1.832 ekor di tahun 2019 menurun menjadi 1500 ekor di tahun 2020.



Begitu juga dengan produksi unggas seperti itik, ayam petelur dan ayam kampung mengalami penurunan pada tahun 2020;

- b. Berkurangnya lahan pertanian sebagai dampak dari peralihan fungsi lahan pertanian menjadi permukiman.

28. Perdagangan

- a. Menurunnya kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB yang dapat dilihat dari capaian kinerja dari tahun 2016 sebesar 4,58% dan di tahun 2020 menurun menjadi -6,28 hal ini merupakan dampak dari *Pandemic Covid-19*;
- b. Belum semua pasar memenuhi syarat, terdapat 10% dari total pasar yang ada belum memenuhi syarat.

29. Perindustrian

- a. Belum optimalnya pembinaan terhadap pelaku industri kecil. Pada tahun 2020 hanya sebesar 3,77% pengusaha industri kecil yang telah mengikuti pelatihan;
- b. Pertumbuhan jumlah industri di Kota Pangkalpinang selama 5 tahun terakhir belum optimal, pada tahun 2020 sebesar 21,56%;
- c. Belum optimalnya fasilitas pemerintah kota dalam peningkatan pembinaan IKM, terlihat dari jumlah IKM yang dikembangkan melalui Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri pada tahun 2017 hanya sebesar 94 unit dari total 1770 unit.



2.3.2.4 Urusan Pendukung Urusan Pemerintah

30. Sekretariat Daerah

- a. Kurang akuratnya data dalam penyusunan laporan kinerja pemerintahan daerah;
- b. Belum ditindaklanjutnya MOU dengan Perjanjian Kerja Sama;
- c. Belum existengnya tenaga fungsional UKPBJ;
- d. Ketidaksesuaian aturan/payung hukum tentang pengadaan barang dan jasa dengan aturan lainnya;
- e. Belum optimalnya koordinasi dengan OPD terkait;
- f. Belum ada tenaga teknis untuk publikasi produk hukum;
- g. Kurangnya tenaga penyusun produk hukum (*legal drafting*);
- h. Jumlah dan Kualitas Sumber Daya Aparatur bidang organisasi, ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja yang belum memadai;
- i. Kurangnya pengetahuan dan rendahnya komitmen OPD akan arti penting organisasi, ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja bagi masing-masing OPD;
- j. Kurangnya SDM pengolah data dan analisis perekonomian daerah;
- k. Belum adanya pedoman dan SOP pembinaan BUMD;
- l. Belum optimal dan terkoordinirnya pengelolaan anggaran pemerintah daerah yang bersumber dari *Corporate Social Responsibility* (CSR).



31. Sekretariat DPRD

- a. Belum optimalnya ranperda yang disiapkan OPD sehingga memperlambat pembahasan;
- b. Belum semua agenda terjadwal secara resmi dalam pembahasan Bamus;
- c. Beberapa penyelenggaraan rapat-rapat dewan belum tepat waktu;
- d. Belum pernah dilakukan penilaian pelayanan setwan terhadap DPRD.

2.3.2.5 Urusan Penunjang Urusan Pemerintah

32. Perencanaan

- a. Masih adanya ketidak sinkronan antara kegiatan di dalam dokumen APBD dan kegiatan dalam RKPD, tahun 2020 masih ditemukan 9,63% kegiatan APBD yang tidak sesuai dengan RKPD;
- b. Belum optimalnya sinkronisasi usulan kegiatan musrenbang tingkat kota yang diakomodir ke dalam dokumen RKPD.

33. Keuangan Daerah

- a. Belum optimalnya kontribusi PAD terhadap APBD Kota Pangkalpinang, tahun 2020 capaiannya sebesar 16,7%;
- b. Anggaran belanja APBD belum terserap secara optimal, rata-rata realisasi anggaran belanja periode 2016-2020 sebesar 87%.



34. Kepegawaian

- a. Belum optimalnya penyimpanan arsip digital pegawai, dikarenakan belum lengkapnya data pegawai yang masuk dari ASN, tahun 2020 baru mencapai 80,6%;
- b. Masih rendahnya SDM ASN yang menempati jabatan sesuai dengan kompetensi, tahun 2020 baru mencapai 65,41%.

35. Pendidikan dan Pelatihan

- a. Masih rendahnya jumlah ASN yang mengikuti diklat (struktural dan managerial) peningkatan kompetensi, tahun 2020 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sampai baru mencapai 0,23 %;
- b. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural sebesar 0% di tahun 2020.

36. Penelitian dan Pengembangan

- a. Minimnya inovasi di Kota Pangkalpinang dikarenakan tidak terdata dan terdokumentasinya inovasi yang ada di OPD;
- b. Belum optimalnya penerapan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

2.3.2.6 Unsur Pengawasan

37. Pengawasan

- a. Respon OPD terhadap Rekomendasi BPK kurang Optimal;



- b. Respon OPD terhadap hasil revidi yang dilakukan inspektorat kurang optimal;
- c. OPD kurang kooperatif dalam merespon kelengkapan dokumen yang berhubungan dengan pengendalian internal;
- d. Perubahan ketentuan untuk evaluasi, sehingga menyulitkan melakukan penyesuaian.

2.3.2.7 Unsur Kewilayahan

38. Kecamatan

- a. Rendahnya kompetensi SDM dalam bidang perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan penguasaan teknologi informasi;
- b. Belum optimalnya fungsi koordinasi antara kasie dalam penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan kelurahan;
- c. Belum optimalnya koordinasi dengan stake holder terkait dalam penyelesaian permasalahan di kecamatan dan kelurahan;
- d. Tingkat partisipasi masyarakat serta peran kelembagaan kelurahan yang masih rendah sehingga pemahaman masyarakat tentang standar operasional pelayanan, pentingnya kepemilikan IMB, kewajiban membayar pajak dan kesadaran masyarakat tentang hukum yang dapat mengakibatkan sering terjadinya pelanggaran atas peraturan daerah, tingginya kejadian penyakit masyarakat dan kenakalan remaja



2.3.2.8 Unsur Pemerintahan Umum

39. Kesatuan Bangsa dan Politik

Masih tingginya kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Pangkalpinang. Rilis Badan Narkotika Nasional Kota Pangkalpinang yang dilaksanakan pada tahun 2019, Badan Narkotika Kota Pangkalpinang dari 3 pengungkapan kasus, berhasil mengamankan sebanyak 7.999,39 gram narkoba.

Tabel 2.56

**Identifikasi Permasalahan Pembangunan Kebijakan Nasional,
Provinsi Bangka Belitung dan Kota Pangkalpinang**

Isu Strategis		
Tema RKP 2022	Provinsi	Kota
(1)	(2)	(3)
Industri	Belum maksimalnya sarana prasarana produksi pertanian	Pembangunan perekonomian berkelanjutan melalui optimalisasi sektor unggulan
	Belum maksimalnya Produksi dan Pengolahan Hasil Produksi Pertanian	
	Belum maksimalnya produktivitas dan Pengolahan Hasil Produksi Perikanan	
	Belum maksimalnya sarana prasarana produksi perikanan	
Pariwisata	Belum maksimalnya infrastruktur sarana dan prasarana destinasi pariwisata	
	Masih rendahnya Kualitas Sumber daya Manusia pariwisata	
Infrastruktur	Belum maksimalnya infrastruktur sarana dan prasarana destinasi pariwisata	Infrastruktur publik berbasis Rencana Tata Ruang Wilayah
Transformasi Digital		



Ketahanan Pangan	Belum maksimalnya Produksi dan Pengolahan Hasil Produksi Pertanian	Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat
	Belum maksimalnya produktivitas dan Pengolahan Hasil Produksi Perikanan	
Reformasi Kesehatan	Kualitas kesehatan masyarakat yang masih rendah	Peningkatan kualitas SDM melalui pemerataan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan
	Korban pandemic virus corona yang terus meningkat	Penanganan dan Pemulihan Pandemi COVID-19 di Kota Pangkalpinang
Reformasi Perlindungan Sosial	Pelaksanaan jaring pengaman social yang belum merata	Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat
	Meningkatnya jumlah masyarakat miskin	
UMKM	Peningkatan kesempatan kerja yang masih rendah	Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat
	Belum maksimalnya peran KUKM dalam meningkatkan kesempatan kerja	
	Kesempatan kerja yang masih rendah/ pengangguran meningkat	
Pembangunan Rendah Karbon		Perwujudan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)
Reformasi Pendidikan dan Keterampilan	Mutu layanan pendidikan yang masih rendah	Peningkatan kualitas SDM melalui pemerataan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan
		Perwujudan <i>Good Governance</i> melalui Reformasi Birokrasi

2.4 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan masukan yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang terkait dengan permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh pada saat Paripurna Penyampaian Hasil Reses Anggota



DPRD yang dilaksanakan oleh masing-masing Anggota DPRD sesuai dengan Daerah Pemilihannya, yang kemudian diinput dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri. Pokok pikiran tersebut selanjutnya dilakukan verifikasi untuk di selaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran setelah melakukan koordinasi dengan perangkat daerah. Adapun pokok-pokok pikiran DPRD ini sebagaimana yang tersaji pada Tabel 2.58 berikut.



Tabel 2.58

**Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD dan Validasi
Kota Pangkalpinang**

No.	Pengusul/ Fraksi	Bidang Urusan/Isu	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PERHUBUNGAN							
1	Bangun Jaya (GERINDRA)	Pemasangan Cermin Cembung di tikungan	Pemasangan cermin Cembung di tikungan Gg.Batu Rubi RT.02 RW.01	DINAS PERHUBUNGAN	Gg.Batu Rubi RT.02 RW.01, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar	3 m	√		Diakomodir di tahun 2021
2	Endang Kristiani (PDI Perjuangan)	Pemasangan Cermin Cembung di tikungan	sering terjadi kecelakaan	DINAS PERHUBUNGAN	Jl. Permata, RT. 06, RW. 03, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Pasar Padi	1 buah	√		Diakomodir di tahun 2021
3	Zainuri (GOLKAR)	Pemasangan Cermin Cembung di tikungan	Belum ada Cermin Cembung untuk keselamatan para Pemakai Jalan	DINAS PERHUBUNGAN	Jl. Bedukang II RT 002 RW. 001, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Pasir Garam	1 unit	√		Diakomodir di tahun 2021
4	H. Zeki Yamani, S.H.,M.H. (Demokrat)	Pemasangan Cermin Cembung di tikungan	PEMASANGAN SPION JALAN - KEAMANAN PENGGUNA JALAN	DINAS PERHUBUNGAN	JL. SALAK I RT. 003, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Asam	1 UNIT	√		Diakomodir di tahun 2021



No.	Pengusul/ Fraksi	Bidang Urusan/Isu	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	H. Ermawi, S.E. (GOLKAR)	Pemasangan Cermin Cembung di tikungan	Belum ada Cermin Cembung untuk Keamanan Pengguna Jalan	DINAS PERHUBUNGAN	Jl. Usada RT. 002 RW. 001, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	1 unit	√		Diakomodir di tahun 2021
6	H. Ermawi, S.E. (GOLKAR)	Pemasangan Cermin Cembung di tikungan	Belum ada Cermin untuk Keselamatan para Pengguna jalan	DINAS PERHUBUNGAN	Jl. Salak I RT. 003 RW. 001, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	1 unit	√		Diakomodir di tahun 2021
7	Hibir (NASDEM)	Pemasangan Cermin Cembung di tikungan	Pemasangan cermin cembung 2 buah di Jalan Kenali Asam Masjid Baiturrahman Kelurahan Pintu Air Kecamatan Rangkui	DINAS PERHUBUNGAN	Jalan Kenali Asam Masjid Baiturrahman Kelurahan Pintu Air Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan	2 buah	√		Diakomodir di tahun 2021
8	Pribadi Muslim (PKB)	Pemasangan Cermin Cembung di tikungan	Sering tercadi kecelakaan	DINAS PERHUBUNGAN	kelurahan Gedung Nasional, RT 04 RW 01, Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Gedung Nasional	2 buah	√		Diakomodir di tahun 2021
9	H. Zeki Yamani, S.H.,M.H. (Demokrat)	Pemasangan Cermin Cembung di tikungan	Pemasangan kaca spion ajaln - keamanan pengguna jalan	DINAS PERHUBUNGAN	JL. USADA RT. 002, Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Kejaksaan	1 UNIT	√		Diakomodir di tahun 2021



No.	Pengusul/ Fraksi	Bidang Urusan/Isu	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Rano (Demokrat)	Pemasangan Lampu Jalan	Pemasangan lampu jalan di Jalan Depati Hamzah dan Jalan Bedade Kelurahan Sinar Bulan sebanyak 80 titik	DINAS PERHUBUNGAN	Jl. Depati Amir dan Jl. Badede, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Sinar Bulan	80	√		Diakomodir di tahun 2021
11	Rano (Demokrat)	Pemasangan Lampu Jalan	Pemasangan Lampu Jalan di Sepanjang Pinggiran Saluran Dam (Sungai)	DINAS PERHUBUNGAN	Semabung Lama, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semabung Lama	10		√	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
12	Andi (PAN)	Pemasangan Lampu Jalan	Pemasangan lampu jalan di jl ratna semabung	DINAS PERHUBUNGAN	jl.ratna, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semabung Lama	5 buah		√	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
13	Bangun Jaya (GERINDRA)	Pemasangan Lampu Jalan	Pemasangan lampu jalan Gg.Mutiara 1	DINAS PERHUBUNGAN	Gg.Mutiara 1 Rt.08.RW.03 Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar	50 m		√	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
14	Bangun Jaya (GERINDRA)	Pemasangan Lampu Jalan	Pemasangan Lampu jalan sepanjang aliran sungai Semabung lama	DINAS PERHUBUNGAN	Semabung lama, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semabung Lama	500 m		√	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023



No.	Pengusul/ Fraksi	Bidang Urusan/Isu	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Syahrudhon (PKS)	Pemasangan Lampu Jalan	Pemasangan Lampu Jalan Tanjung Bunga	DINAS PERHUBUNGAN	JL. TANJUNG BUNGA RT 01, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Temberan	5 unit	√		Diakomodir di tahun 2023
16	Nursamsi, S.E. (GOLKAR)	Pemasangan Lampu Jalan	Pemasangan Lampu Jalan Bedade	DINAS PERHUBUNGAN	Jalan Bedade RT. 06 RW. 02, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Sinar Bulan	20 unit		√	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
17	Nursamsi, S.E. (GOLKAR)	Pemasangan Lampu Jalan	Pemasangan Lampu Jalan di S sepanjang Jalan Sinar Bulan	DINAS PERHUBUNGAN	Jl. Sinar Bulan RT. 05 RW. 02, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Sinar Bulan	30 unit		√	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
18	Nursamsi, S.E. (GOLKAR)	Pemasangan Lampu Jalan	Pemasangan Lampu Jalan pada Kampung Samak, sebanyak 20 Unit	DINAS PERHUBUNGAN	Jl. Kampung Samak, RT. 03 RW. 01, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Sinar Bulan	20 unit		√	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
19	Nursamsi, S.E. (GOLKAR)	Pemasangan Lampu Jalan	Pemasangan Lampu Jalan di Jalan Eks Tambang 25 RT. 03 RW. 01 Kel. Sinar Bulan Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang sebanyak 13 Unit	DINAS PERHUBUNGAN	Jalan Eks Tambang 25 RT. 03 RW. 01 Kel. Sinar Bulan Kec. Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Sinar Bulan	13 unit		√	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023



No.	Pengusul/ Fraksi	Bidang Urusan/Isu	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Nursamsi, S.E. (GOLKAR)	Pemasangan Lampu Jalan	Pemasangan Lampu Jalan di Gg. Thai Pak Men RT. 03 RW. 01 Kel. Sinar Bulan Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang	DINAS PERHUBUNGAN	Jl. Depati Hamzah Gg. Thai Pak Men RT. 03 RW. 01, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Sinar Bulan	3 unit		√	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
21	Rudi Kurniawan,S.E. (Demokrat)	Pemasangan Lampu Jalan	Kurangnya Lampu Penerangan Jalan	DINAS PERHUBUNGAN	Jl Rustam Effendi RT 006 RW 002 Gang Tembusan, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Selindung Baru	3 titik		√	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
22	Djubaidah (GERINDRA)	Pemasangan Lampu Jalan	Pemasangan lampu jalan samping kelurahan selindung	DINAS PERHUBUNGAN	Samping Kelurahan Selindung RT.01RW.01, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Selindung	50 m	√		Diakomodir di tahun 2022
23	Rudi Kurniawan,S.E. (Demokrat)	Pemasangan Lampu Jalan	Perlunya Lampu Jalan	DINAS PERHUBUNGAN	Jl M.Saleh Zainudin, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Air Salembe	3 titik		√	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
24	Rudi Kurniawan,S.E. (Demokrat)	Pemasangan Lampu Jalan	Perlunya Lampu Jalan	DINAS PERHUBUNGAN	Jl Sekolah, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Selindung	3 titik	√		Diakomodir di tahun 2022



No.	Pengusul/ Fraksi	Bidang Urusan/Isu	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	H. Arnadi,S.TP (PKS)	Pemasangan Lampu Jalan	Pemasangan Lampu Jalan Sepanjang Jalan Sekolah Selindung	DINAS PERHUBUNGAN	JL.SEKOLAH SELINDUNG RT 01 RW 01, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Selindung	15 unit	√		Diakomodir di tahun 2022
26	Rio Setiady, S.T. (PKS)	Pemasangan Lampu Jalan	Pemasangan Lampu Jalan	DINAS PERHUBUNGAN	Gg. GURAMI 2 RT 07, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Gabek Satu	3 buah		√	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
27	Panji Akbar, S.IP (Nasdem)	Pemasangan Lampu Jalan	Pemasangan lampu jalan di Jln. MZ. Zainudin	DINAS PERHUBUNGAN	Jln. MZ. Zainudin Kelurahan Air Salemba Kecamatan Gabek, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Air Salemba	4 titik		√	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
28	Panji Akbar, S.IP (Nasdem)	Pemasangan Lampu Jalan	Pemasangan Lampu yang ada di jalan Sekolah tepatnya disamping Kelurahan Selindung	DINAS PERHUBUNGAN	Jln. Sekolah Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Selindung	4 titik	√		Diakomodir di tahun 2022
29	Pribadi Muslim (PKB)	Pemasangan Lampu Jalan	Kurangnya lampu jalan di kelurahan Taman Bunga	DINAS PERHUBUNGAN	Kelurahan Taman Bunga, RT 09, RW 03, Kota Pangkal Pinang, Gerunggung,	10 titik		√	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023



No.	Pengusul/ Fraksi	Bidang Urusan/Isu	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Muhammad Rusdi, S.E.,M.H. (PAN)	Pemasangan Lampu Jalan	Pemasangan Lampu Jalan Simpang Empat Perumnas Kampung Melayu	DINAS PERHUBUNGAN	Perumnas Kampung Melayu, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Bukitmerapin	20 buah	√		Diakomodir di tahun 2023
31	Muhammad Rusdi, S.E.,M.H. (PAN)	Pemasangan Lampu Jalan	Pemasangan Lampu Jalan	DINAS PERHUBUNGAN	jl.pemancingan kampak serasi, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Tua Tunu	500 meter	√		Diakomodir di tahun 2023
32	Rio Setiady, S.T. (PKS)	Pemasangan Lampu Jalan	Pemasangan Lampu Jalan	DINAS PERHUBUNGAN	DI SIMPANG 4 JALAN STANIA, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Taman Bunga	100 meter	√		Diakomodir di tahun 2022
33	Dr. Zufriady, S.E,M.M. (GOLKAR)	Pemasangan Lampu Jalan	Pemasangan Lampu Jalan di Sepanjang Jalan Masjid Al Mizan karena jika malam hari sangatlah Gelap	DINAS PERHUBUNGAN	Jl. Masjid AL MIZAN, Kampak RT. 10 RW. 03, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Tua Tunu	20 Titik		√	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
34	Dr. Zufriady, S.E,M.M. (GOLKAR)	Pemasangan Lampu Jalan	di Karenakan jalan Gelap pada malam hari di sepanjang Jalan Damai Kampak	DINAS PERHUBUNGAN	Jl. Damai, Kampak RT. 10 RW. 03, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Tua Tunu	15 Titik		√	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023



No.	Pengusul/ Fraksi	Bidang Urusan/Isu	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	Rudi Hentoni, S.T. (PDI Perjuangan)	Pemasangan Lampu Jalan	Penerangan jalan bagi masyarakat, karena dikhawatirkan terjadi tindak kriminal.	DINAS PERHUBUNGAN	Jl. Kampung Melayu, Gg. Sukun (SD Negeri 32 Pangkalpinang), Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Bukitsari	6 titik	√		Diakomodir di tahun 2023
36	Bangun Jaya (GERINDRA)	Pemasangan Lampu Jalan	Pemasangan Lampu Jalan Gg.Batu Giok I emapt Titik	DINAS PERHUBUNGAN	Gg.Batu Giok I Kel.Batu Intan, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	200 m	√		Diakomodir di tahun 2023
37	Bangun Jaya (GERINDRA)	Pemasangan Lampu Jalan	Pemasnagan Lampu Jalan 9 titik Jl.basuki Rahmad Ujung Rt.09 RW.03	DINAS PERHUBUNGAN	Jl.basuki Rahmad Ujung Rt.09 RW.03 Sriwijaya, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	225 m		√	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
38	Endang Kristiani (PDI Perjuangan)	Pemasangan Lampu Jalan	Kondisi jalan yang gelap, dikhawatirkan rawan kejahatan dan kecelakaan.	DINAS PERHUBUNGAN	Gang Batu Giok, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	4 titik	√		Diakomodir di tahun 2023
39	Endang Kristiani (PDI Perjuangan)	Pemasangan Lampu Jalan	kondisi yang gelap, dikhawatirkan rawan kejahatan.	DINAS PERHUBUNGAN	Gang Anggur I, RT. 06, RW 03, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Pasar Padi	4 titik		√	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023



No.	Pengusul/ Fraksi	Bidang Urusan/Isu	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Rudi Kurniawan, S.E. (Demokrat)	Pemasangan Lampu Jalan	Kekurangan Lampu Penerangan Perkuburan Ampui	DINAS PERHUBUNGAN	Jl Kakap 2 RT 004 RW 002, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Ampui	3 titik		√	Belum diakomodir di tahun 2021, 2022, 2023
41	Rudi Kurniawan, S.E. (Demokrat)	Pemasangan Lampu Jalan	Kurangnya Penerangan Lampu Jalan	DINAS PERHUBUNGAN	Jl Tiram Raya, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Pasir Garam	3 titik		√	Belum diakomodir di tahun 2021, 2022, 2023
42	Rudi Kurniawan, S.E. (Demokrat)	Pemasangan Lampu Jalan	Kurangnya Penerangan Lampu Jalan	DINAS PERHUBUNGAN	Jl Bedukang Raya, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Pasir Garam	3 titik		√	Belum diakomodir di tahun 2021, 2022, 2023
43	Djubaidah (GERINDRA)	Pemasangan Lampu Jalan	Pemasangan Lampu Jalan Pekuburan Ampui	DINAS PERHUBUNGAN	Jalan Kakap 2 RT.04 RW.02, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Ampui	50 m		√	Belum diakomodir di tahun 2021, 2022, 2023
44	Djubaidah (GERINDRA)	Pemasangan Lampu Jalan	Pemasangan lampu jalan Jalan Bedukang 2	DINAS PERHUBUNGAN	Jalan Bedukang 2 Pasir Garam, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Pasir Garam	50 m		√	Belum diakomodir di tahun 2021, 2022, 2023
45	Zainuri (GOLKAR)	Pemasangan Lampu Jalan	Pemasangan Lampu Jalan di Sekitar Perkuburan Ampui untuk Penerangan areal tersebut	DINAS PERHUBUNGAN	Jl. Kakap II RT 002 RW. 001, Kota Pangkal Pinang, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	24 titik		√	Belum diakomodir di tahun 2021, 2022, 2023



No.	Pengusul/ Fraksi	Bidang Urusan/Isu	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Ahmad Amir (PDI Perjuangan)	Pemasangan Lampu Jalan	Jalanan gelap dan ditakutkan terjadi kriminal serta kecelakaan.	DINAS PERHUBUNGAN	Jln. Kakap 2 RT. 04 RW. 02, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Ampui	12 titik		√	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
47	Ahmad Amir (PDI Perjuangan)	Pemasangan Lampu Jalan	Jalanan gelap dan rawan kejahatan.	DINAS PERHUBUNGAN	Jl. Bawal III, RT. 06., Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Pasir Garam	5 titik		√	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
48	Kalok (GERINDRA)	Pemasangan Lampu Jalan	Pemasangan lampu jalan 4 titik di RW.01,2 titik di RW.02 dan 4 titik di RW 03 RT.03	DINAS PERHUBUNGAN	RW.01, RW.02 , RW 03 RT.03 Parit Lalang, Kota Pangkal Pinang, Rangkui,	600 m		√	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
49	Pribadi Muslim (PKB)	Pemasangan Lampu Jalan	Jalanan gelap dan ditakutkan rawan bahaya.	DINAS PERHUBUNGAN	JLN Teratai RT. 08 RW. 02, Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Gedung Nasional	10 titik		√	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
50	Rudi Kurniawan,S.E. (Demokrat)	Penataan jalan yang belum jelas penggunaannya	Penataan Jalan	DINAS PERHUBUNGAN	Kelurahan Air Salemba, Kota Pangkal Pinang, Gabek	100 meter		√	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
51	Panji Akbar, S.IP (Nasdem)	Penataan jalan yang belum jelas penggunaannya	Penataan Jalan tidak jelas penggunaannya atau tidak jelas jalannya	DINAS PERHUBUNGAN	Kelurahan Air Salemba Kecamatan Gabek, Kota Pangkal Pinang,	150 meter		√	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023



No.		Pengusul/ Fraksi	Bidang Urusan/Isu	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
								Diakomodir	Tidak Diakomodir	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
52		Djubaidah (GERINDRA)	Penertiban Parkir Liar	Penertiban Parkir Pool Tronton tanpa izin	DINAS PERHUBUNGAN	Pangkalbalam, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Ampui	200 m		√	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
			PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
53	1	Rano (Demokrat)	Pembangunan Rumah Layak Huni	Pembangunan Rumah Layak Huni Atas Nama Mauliyana Sari RT 07 RW 03 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Air itam, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	1 unit		√	diakomodir dinas perkim PB APBD tahun 2022 Rp.84,500,00 0,00.-
54	2	Syahrumadhon (PKS)	Pembangunan Rumah Layak Huni	Pembangunan Rumah Layak Huni Di Rt 02	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	RT 02, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Bukitintan, Seluruh Kelurahan/Desa	1 unit		√	BNBA tidak tertera
55	3	Nursamsi, S.E. (GOLKAR)	Pembangunan Rumah Layak Huni	Pembangunan Rumah Layak Huni a.n. Mauliyaba Sari	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl. Batako Robi RT. 07 RW. 03, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	30 Meter Persegi	√		diakomodir dinas perkim PB APBD tahun 2022 Rp.84,500,000
56	4	Nursamsi, S.E. GOLKAR	Pembangunan Rumah Layak Huni	Pembangunan Rumah Layak Huni an. ROYADI Warga RT. 09 RW. 03	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jalan Depati Hamzah Gg. Pelita RT. 09 RW. 03, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Sinar Bulan	30 Meter Persegi	√		diakomodir dinas perkim PB APBD tahun 2022 Rp.84,500,000



No.		Pengusul/ Fraksi	Bidang Urusan/Isu	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
								Diakomodir	Tidak Diakomodir	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	5	Endang Kristiani (PDI Perjuangan)	Pembangunan Rumah Layak Huni	kondisi rumah yang sudah tidak layak huni lagi.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	RT. 07, RW. 03, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	1 unit	√		diakomodir dinas perkim PB APBD tahun 2022 Rp.84,500,000
58	6	Bangun Jaya (GERINDRA)	Pembangunan Rumah Layak Huni	Pembangunan Rumah Layak Huni a.n Fauziah,a.n.Suh aikah,a.n .Tini	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rt.03 Rw.03 Sriwijaya, Kota Pangkal Pinang, Girimaya	1 unit	√	√	Fauziah : Sudah pernah diakomodir tahun 2020, Suhaikah : diakomodir dinas perkim PK APBD tahun 2022 Rp.59,435,00 0,00.-, Tini : Rumah masih layak huni
59	7	Bangun Jaya (GERINDRA)	Pembangunan Rumah Layak Huni	Pembangunan Rumah layak huni a.n Zulkipli Jl.Berlian IV RT.006 RW.003	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl.Berlian IV RT.006 RW.003, Kota Pangkal Pinang, Girimaya	1 unit	√		diakomodir dinas perkim PB APBD tahun 2022 Rp.84,500,000



No.		Pengusul/ Fraksi	Bidang Urusan/Isu	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
								Diakomodir	Tidak Diakomodir	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	8	Bangun Jaya (GERINDRA)	Pembangunan Rumah Layak Huni	Rehab Rumah Layak huni a.n.M.Hendra Jl.Basuki Rachmad Rt.006.RW.003. A.n.Rohati Jl.Berlian V.a.n.Mattari Jl.Perbakin dalam.an.Saturi. Jl.Perbakin Dalam ,a.n.Martawan Jl.Perbakin Dalam	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl.Basuki Rachmad , Jl.Berlian V RT.006 RW.003.Jl.Perba kin Dalam RT.007 RW.002 Sriwijaya, Kota Pangkal Pinang, Girimaya	1 unit	√	√	Hendra : diakomodir dinas perkim PK APBD tahun 2022 Rp.59,435,00 0,00.- , Rohati : diakomodir dinas perkim PB APBD tahun 2022 Rp.84,500,00 0,00.- , Mattari : diakomodir dinas perkim PK APBD tahun 2022 Rp.59,435,00 0,00.-, Saturi : Sudah diakomodir tahun 2020, Martawan : diakomodir dinas perkim PB APBD tahun 2022 Rp.84,500,000



No.		Pengusul/ Fraksi	Bidang Urusan/Isu	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
								Diakomodir	Tidak Diakomodir	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	9	Bangun Jaya (GERINDRA)	Pembangunan Rumah Layak Huni	Pembangunan Rumah Layak Huni a.n.Li Hon Jan dan Misilyeh	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl.Bukit Tunggal RT.II RT.008 RW.003 Sriwijaya, Kota Pangkal Pinang, Girimaya	1 unit	√	√	Li Hon Jan : diakomodir dinas perkim PB APBD tahun 2022 Rp.84,500,00 0,00.-, Misliyeh : Bisa diakomodir apabila kelengkapan administrasi dilengkapi (Surat Tanah a.n. suami)
62	10	Bangun Jaya (GERINDRA)	Pembangunan Rumah Layak Huni	Pembangunan Rumah Layak Huni a.n Nirah dan Airan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl.Basuki Rachmad Ujung II RT.008 RW.003 dan JL.Perbakin Gg.Metro RT.009 Rw.003, Kota Pangkal Pinang, Girimaya	1 unit	√	√	Niran : Bisa diakomodir apabila kelengkapan administrasi dilengkapi (Surat Tanah a.n. anak), Airan : Sudah diakomodir tahun 2020
63	11	Bangun Jaya (GERINDRA)	Pembangunan Rumah Layak Huni	Pembangunan Rumah Layak Huni a.n.Maryemah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl.Perbakin Rt.09 RW.03 Sriwijaya, Kota Pangkal Pinang, Girimaya	1 unit	√		diakomodir dinas perkim PB APBD tahun 2022 Rp.84,500,000



No.		Pengusul/ Fraksi	Bidang Urusan/Isu	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
								Diakomodir	Tidak Diakomodir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
64	12	H. Arnadi,S.TP (PKS)	Pembangunan Rumah Layak Huni	Pembangunan rumah layak huni rumah Bapak Tohar	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	RT 06, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Rejo Sari	1 UNIT	√		Diakomodir dinas perkim PB APBD tahun 2022 Rp.84,500,00 0,00.-
65	13	Syahrudhoh (PKS)	Pembangunan Rumah Layak Huni	Pembangunan Rumah Layak Huni di Gg.Sempayo 1 RT 03	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Gg. sempayo 1 RT 03, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Asam	1 UNIT	√		Diakomodir dinas perkim PB APBD tahun 2022 Rp.84,500,00 0,00.-
66	14	H. Zeki Yamani, S.H.,M.H. (Demokrat)	Pembangunan Rumah Layak Huni	Kelayakan tempat tinggal	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	JL. DEWI SARTIKA RT. 003, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	1 UNIT		√	Sudah disurvei tetapi informasi dari RT tidak ada di lokasi tersebut
67	15	H. Zeki Yamani, S.H.,M.H. (Demokrat)	Pembangunan Rumah Layak Huni	Kelayakan tempat tinggal	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	JL. DEWI SARTIKA RT. 008, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	1 UNIT		√	Sudah disurvei tetapi informasi dari RT tidak ada di lokasi tersebut
68	16	H. Ermawi, S.E.(GOLKAR)	Pembangunan Rumah Layak Huni	belum memenuhi Standarisasi Kelayakan Tempat Tinggal (an. ZULKIPLI)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl. Pahlawan 12 RT. 003 RW. 001, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	1 unit	√		Diakomodir dinas perkim PB ABT tahun 2021 Rp.69,500,000



No.	Pengusul/ Fraksi	Bidang Urusan/Isu	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	17	H. Ermawi, S.E. (GOLKAR)	Pembangunan Rumah Layak Huni	Belum memenuhi standar tempat Tinggal (a.n SAMSIAH)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl. Pahlawan 12, RT. 003 RW. 001 Belakang Kantor Perdagangan atau Belakang SDN 19, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	1 unit	√	Diakomodir dinas perkim PB ABT tahun 2021 Rp.69,500,000
70	18	H. Ermawi, S.E. (GOLKAR)	Pembangunan Rumah Layak Huni	Belum memenuhi Standar Tempat Tinggal (A.n ROZIAN TI)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl. K.H. Ahmad Dahlan RT. 008 RW. 003, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	1 unit	√	Diakomodir dinas perkim PB ABT tahun 2021 Rp.69,500,000
71	19	H. Ermawi, S.E. (GOLKAR)	Pembangunan Rumah Layak Huni	Belum Memenuhi Standart Kelayakan tempat tinggal (A.N. HARIPAH)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl. Pahlawan 12 RT. 009 RW. 003 (Belakang Kantor Lurah), Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	1 unit	√	Diakomodir dinas perkim PB APBD tahun 2022 Rp.84,500,000
72	20	H. Ermawi, S.E. (GOLKAR)	Pembangunan Rumah Layak Huni	Belum Memenuhi Standart Kelayakan Tempat Tinggal (an. HARY AR SUHAILI)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl .K.H. Ahmad Dahlan RT. 008 RW. 003, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	1 unit	√	Diakomodir dinas perkim PB APBD tahun 2022 Rp.84,500,000



No.		Pengusul/ Fraksi	Bidang Urusan/Isu	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
								Diakomodir	Tidak Diakomodir	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	21	Rudi Hentoni, S.T. (PDI Perjuangan)	Pembangunan Rumah Layak Huni	Rumah yang sudah tidak layak dihuni dan ditakutkan akan menciderai pemiliki rumah karena bangunan hampir roboh.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl. Depati Bahrin, RT.07, RW. 02. (Hilda Rahayu), Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Opas Indah	1 buah			
74	22	Rudi Hentoni, S.T. (PDI Perjuangan)	Pembangunan Rumah Layak Huni	Rumah yang sudah tidak layak huni dan hampir roboh.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Gang Mawar 7, RT. 03 (Wati), Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Opas Indah	1 Buah			
75	23	Rosdiansyah Rasyid (Demokrat)	Pembangunan/ Perbaikan Saluran Rumah Tangga	PERBAIKAN SERING DI JALAN BELAKANG MASJID RAYA KELURAHAN TUA TUNU	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	tua tunu indah, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Tua Tunu	1 set		√	Diakomodir dinas PUPR karena diluar wilayah kumuh
76	24	Bangun Jaya (GERINDRA)	Pembangunan/ Perbaikan Saluran Rumah Tangga	Drainase Rumah tangga Jl.berlian V RT.006 RW.003	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl.Berlian V RT.006 RW.003 Sriwijaya, Kota Pangkal Pinang, Girimaya	12 m3			Menunggu Konfirmasi
77	25	Bangun Jaya (GERINDRA)	Pembangunan/ Perbaikan Saluran Rumah Tangga	Pembuatan Drainase Rumah Tangga Jl.Berlian IV	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl.Berlian IV Rt.006.RW.003 sriwijaya, Kota Pangkal Pinang, Girimaya	72 m3			Menunggu Konfirmasi



No.		Pengusul/ Fraksi	Bidang Urusan/Isu	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
								Diakomodir	Tidak Diakomodir	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
78	26	Bangun Jaya (GERINDRA)	Pembangunan/ Perbaikan Saluran Rumah Tangga	Pembuatan Drainase Pemukiman Jl.Perbakin Gg.Salam	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl.Perbakin Gg.Salam Rt.009 Rw.003, Kota Pangkal Pinang, Girimaya	31 m3			Menunggu Konfirmasi
79	27	Bangun Jaya (GERINDRA)	Pembuatan Bandar/ Drainase	Pembuatan bandar/drainase RT.04 RW.02	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rt.04 RT.02 Kel Air Itam, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	200 m		√	Diakomodir Dinas PUPR karena diluar wilayah kumuh
80	28	Syahrumadhon (PKS)	Pembuatan Bandar/ Drainase	Pembuatan drainase	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	JL H.SULAITA belakang rumah jai RT 02, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	260 meter		√	Diakomodir Dinas PUPR karena diluar wilayah kumuh
81	29	Endang Kristiani (PDI Perjuangan)	Pembuatan Bandar/ Drainase	tidak ada tempat aliran air	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl. Tambang, RT. 03, RW. 01, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Sinar Bulan	25 M		√	Diakomodir Dinas PUPR karena diluar wilayah kumuh
82	30	Djubaidah (GERINDRA)	Pembuatan Bandar/ Drainase	Pembangunan drainase sepanjang jalan protokol dari rumah Bahrain sampai kantor lurah RT.01 RW.03	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rumah Bahrain Rt.01 RW.01 Selindung, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Selindung	500 m		√	Diakomodir Dinas PUPR karena diluar wilayah kumuh
83	31	Rudi Kurniawan,S.E. (Demokrat)	Pembuatan Bandar/ Drainase	Perlunya Pembuatan Drainase	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl Selangat RT 006 RW 002, Kota Pangkal Pinang, Gabek,	100 meter		√	Diakomodir Dinas PUPR karena diluar wilayah



No.		Pengusul/ Fraksi	Bidang Urusan/Isu	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
								Diakomodir	Tidak Diakomodir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
						Selindung Baru				kumuh
84	32	Rudi Kurniawan,S.E. (Demokrat)	Pembuatan Bandar/ Drainase	Perlunya Pembuatan Drainase	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Wilayah Selindung Baru dan Wilayah Gabek, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Selindung Baru	100 meter		√	Diakomodir Dinas PUPR karena diluar wilayah kumuh
85	33	Rudi Kurniawan,S.E. (Demokrat)	Pembuatan Bandar/ Drainase	Pembangunan Drainase	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl Sekolah RT 004 dan RT 007, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Selindung	400 meter		√	Diakomodir Dinas PUPR karena diluar wilayah kumuh
86	34	Panji Akbar, S.IP (Nasdem)	Pembuatan Bandar/ Drainase	Pembangunan drainase sepanjang 400 m dikiri dan 400m di sebelah kanan di jalan sekolah rt 04 rw 07 kelurahan selindung	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jalan Sekolah RT04 RW 07, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Selindung	400 meter		√	Diakomodir Dinas PUPR karena diluar wilayah kumuh
87	35	Bangun Jaya (GERINDRA)	Pembuatan Bandar/ Drainase	Pembangunan Drainase Jalan Delima Siam VIII	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl.Delima Siam VIII RT.04 RW.02 Batu Intan, Kota Pangkal Pinang, Girimaya	250 m			Menunggu Konfirmasi



No.		Pengusul/ Fraksi	Bidang Urusan/Isu	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
								Diakomodir	Tidak Diakomodir	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
88	36	Bangun Jaya (GERINDRA)	Pembuatan Bandar/ Drainase	Pembuatan DrainaseJl.Batu Rubi XI	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl.Batu Rubi XI Bukit Besar, Kota Pangkal Pinang, Girimaya	130 m2			Menunggu Konfirmasi
89	37	Bangun Jaya (GERINDRA)	Pembuatan Bandar/ Drainase	Pembuatan Drainase Batu Rubi XI Bukit Besar	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl.Batu Rubi XI Bukit Besar, Kota Pangkal Pinang, Girimaya	70 m2			Menunggu Konfirmasi
90	38	Bangun Jaya (GERINDRA)	Pembuatan Bandar/ Drainase	Pembangunan Drainase Jl.Delima III	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl.Delima III Bukit Besar, Kota Pangkal Pinang, Girimaya	45 m2			Menunggu Konfirmasi
91	39	Bangun Jaya (GERINDRA)	Pembuatan Bandar/ Drainase	Pembangunan Drainase Jl.Batu Akik VI Bukit Besar	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl.Batu Akik VI Bukit Besar, Kota Pangkal Pinang, Girimaya	50 m2			Menunggu Konfirmasi
92	40	Bangun Jaya (GERINDRA)	Pembuatan Bandar/ Drainase	Pembuatan Drainase Perbatasan RT.007 dan RT.005 (Belakang rumah bpk.Akong)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Perbatasan RT.007 dan RT.005 (Belakang rumah bpk.Akong) Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang	300 m2			Menunggu Konfirmasi
93	41	Bangun Jaya (GERINDRA)	Pembuatan Bandar/ Drainase	Pembuatan Drainase Jl.Delima Siam II.Gg.Rahwana	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl.Delima Siam II.Gg.Rahwana Ghg.Rahwana Rt.002 Rw.001	144 m3			Menunggu Konfirmasi



No.		Pengusul/ Fraksi	Bidang Urusan/Isu	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
								Diakomodir	Tidak Diakomodir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
						Sriwijaya, Kota Pangkal Pinang				
94	42	Bangun Jaya (GERINDRA)	Pembuatan Bandar/ Drainase	Pembangunan Drainase Jl.Bukit Tunggul II	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl.Bukit Tunggul II RT.08 Rw.03 Sriwijaya, Kota Pangkal Pinang, Girimaya	1000 m3			Menunggu Konfirmasi
95	43	Bangun Jaya (GERINDRA)	Pembuatan Bandar/ Drainase	Pembuatan Drainase Gg.Salam RT.09 RW.03 Sriwijaya	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Gg.Salam RT.09 RW.03 Sriwijaya, Kota Pangkal Pinang, Girimaya	25 m3			Menunggu Konfirmasi
96	44	Bangun Jaya (GERINDRA)	Pembuatan Bandar/ Drainase	Jl.Delima Siuam VI Rt.002 RW.001 (belakang Rumdin Pemkot)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl.Delima Siuam VI Rt.002 RW.001 (belakang Rumdin Pemkot) Sriwijaya, Kota Pangkal Pinang, Girimaya	72 m3			Menunggu Konfirmasi
97	45	Bangun Jaya (GERINDRA)	Pembuatan Bandar/ Drainase	Pembangunan Drainase Kiri dan Kanan Jl.Basuki Rahmad Ujung II RT.008 RW.003	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl.Basuki Rahmad Ujung II RT.008 RW.003, Kota Pangkal Pinang, Girimaya	330 m3			Menunggu Konfirmasi
98	46	Bangun Jaya (GERINDRA)	Pembuatan Bandar/ Drainase	Pembangunan Drainase Jl.Sosial II Sriwijaya	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl.Sosial II Rt.009 RW.003 (samping gedung futsal)Sriwijaya, Kota Pangkal	17 m3			Menunggu Konfirmasi



No.		Pengusul/ Fraksi	Bidang Urusan/Isu	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
								Diakomodir	Tidak Diakomodir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
						Pinang, Girimaya				
99	47	Bangun Jaya (GERINDRA)	Pembuatan Bandar/ Drainase	Pembuatan Drainase jalan Basuki Rachmad	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl.Basuki Rachmad Ujung Rt.008 Rw.003 Sriwijaya, Kota Pangkal Pinang, Girimaya	1500 m3			Menunggu Konfirmasi
100	48	Bangun Jaya (GERINDRA)	Pembuatan Bandar/ Drainase	Pembuatan Drainase Jl.Basuki Rachmad	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl.Basuki Rachmad Ujung II Rt.006 RW.003 Sriwijaya, Kota Pangkal Pinang, Girimaya	45 m3			Menunggu Konfirmasi
101	49	Bangun Jaya (GERINDRA)	Pembuatan Bandar/ Drainase	Pembuatan Drainase	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl.Basuki Rachmad Rt.006 RW.003, Kota Pangkal Pinang, Girimaya	225 m3			Menunggu Konfirmasi
102	50	Bangun Jaya (GERINDRA)	Pembuatan Bandar/ Drainase	Pembuatan Drainase (belakang rumah warga) Jl.Delia Siam VIII	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl.Delima Siam VIII RT.003 RW.001, Kota Pangkal Pinang, Girimaya	72 m3			Menunggu Konfirmasi
103	51	Bangun Jaya (GERINDRA)	Pembuatan Bandar/ Drainase	Pembuatan Drainase Jl.Basuki Rahmad Ujung II	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl.Basuki Rahmad Ujung II Rt.008 RW.003, Kota Pangkal Pinang, Girimaya	31.5 m3			Menunggu Konfirmasi



No.		Pengusul/ Fraksi	Bidang Urusan/Isu	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
								Diakomodir	Tidak Diakomodir	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
104	52	Bangun Jaya (GERINDRA)	Pembuatan Bandar/ Drainase	Pembuatan Drainase Pemukiman Jl.Perbakin	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl.Perbakin RT.009 RW.003 Sriwijaya, Kota Pangkal Pinang, Girimaya	27 m3			Menunggu Konfirmasi
105	53	Bangun Jaya (GERINDRA)	Pembuatan Bandar/ Drainase	Pembuatan Drainase Jl.Perbakin Dalam Gg.Salam	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl.Perbakin Dalam Gg.Salam Rt.009 Rw.003 Sriwijaya, Kota Pangkal Pinang, Girimaya	77 m3			Menunggu Konfirmasi
106	54	Bangun Jaya (GERINDRA)	Pembuatan Bandar/ Drainase	Penyambungan Drainase Jl.basuki Rachmad Ujung	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl.Basuki Rachmad Ujung Rt.006 Rw.003 Sriwijaya, Kota Pangkal Pinang, Girimaya	817 m3			Menunggu Konfirmasi
107	55	Bangun Jaya (GERINDRA)	Pembuatan Bandar/ Drainase	Tidak adanya aliran pembuangan air.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl. Delima, RT. 04, RW.02, Kota Pangkal Pinang, Girimaya	50 M			diakomodir dinas PUPR
108	56	Bangun Jaya (GERINDRA)	Pembuatan Bandar/ Drainase	Pembangunan jalan setapak Gg. Permata	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Gg. Permata RT. 05 Kel. Semabung Baru	129 m			Menunggu Konfirmasi
109	57	Rudi Kurniawan,S.E. (Demokrat)	Pembuatan Bandar/ Drainase	Pembangunan Bandar di Jalan Bedukang 1 Menuju Bandar Besar	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl Bedukang 1, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Pasir Garam	100 meter		√	Diakomodir Dinas PUPR karena diluar wilayah kumuh



No.		Pengusul/ Fraksi	Bidang Urusan/Isu	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
								Diakomodir	Tidak Diakomodir	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
110	58	Rudi Kurniawan,S.E. (Demokrat)	Pembuatan Bandar/ Drainase	Perlunya Pembuatan Drainase	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl Kerisi RT 004 RW 002, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Lontong Pancur	100 meter		√	Diakomodir Dinas perkim tahun 2022 Rp.74 Juta
111	59	Zainuri (GOLKAR)	Pembuatan Bandar/ Drainase	Pembangunan Drainase (Baru) Untuk Memperlancar Aliran Air	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl. Kakap 1 RT. 003 RW. 001, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Ampui	150 Meter		√	Diakomodir Dinas PUPR karena diluar wilayah kumuh
112	60	Zainuri (GOLKAR)	Pembuatan Bandar/ Drainase	Pembangunan Bandar / Drainase Baru Memperlancar Aliran Air	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl. Bawal RT.002 RW. 001, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Ampui	40 Meter		√	Diakomodir Dinas PUPR karena diluar wilayah kumuh
113	61	Ahmad Amir (PDI Perjuangan)	Pembuatan Bandar/ Drainase	Tidak ada saluran air.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl. Patin 8, RT. 06, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Ampui	25 M		√	Diakomodir Dinas PUPR karena diluar wilayah kumuh
114	62	H. Ermawi, S.E. (GOLKAR)	Pembuatan Bandar/ Drainase	Pembangunan Bandar untuk memperlancar aliran air pembuangan rumah tangga	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl. Duku II RT 002 RW. 001, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	45 Meter	√		Diakomodir Dinas perkim tahun 2022 Rp.24 juta
115	63	H. Ermawi, S.E. (GOLKAR)	Pembuatan Bandar/ Drainase	untuk memperlancar aliran air pembuangan rumah tangga	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl. Trem RT. 007 RW. 003, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	30 Meter		√	tidak bisa dibangun karena kondisi lapangan tidak memenuhi



No.		Pengusul/ Fraksi	Bidang Urusan/Isu	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
								Diakomodir	Tidak Diakomodir	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
										syarat teknis
116	64	H. Ermawi, S.E. (GOLKAR)	Pembuatan Bandar/ Drainase	Untuk Memperlancar Aliran Pembuangan Rumah Tangga	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl. Trem RT. 007 RW. 003, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	20 Meter			
117	65	H. Ermawi, S.E. (GOLKAR)	Pembuatan Bandar/ Drainase	Untuk Memperlancar Aliran Pembuangan Rumah Tangga	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Gg. Jambu RT 008 RW. 003, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	150 Meter			
118	66	H. Ermawi, S.E. (GOLKAR)	Pembuatan Bandar/ Drainase	Pembuatan Bandar Sebelah Kanan Jalan Untuk Memperlancar aliran air	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl, Air Nangka II RT. 001 RW. 001, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	150 Meter	√		Diakomodir oleh program KOTAKU 2021
119	67	Bangun Jaya (GERINDRA)	Pembuatan Jalan Setapak	Pembangunan jalan setapak di RT.04 RW.02.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jalan setapak di RT.04 RW.02.Air Itam, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	200 m		√	Diakomodir Dinas PUPR karena diluar wilayah kumuh
120	68	Endang Kristiani (PDI Perjuangan)	Pembuatan Jalan Setapak	Jalan masih tanah kuning dan sering tergenang air ketika hujan.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl. Ratna, RT. 01, RW. 01. (Dekat gudang amuk), Kota Pangkal Pinang,	50 M	√		Diakomodir dinas perkim tahun 2021 ABT Rp.40,000,00



No.		Pengusul/ Fraksi	Bidang Urusan/Isu	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
								Diakomodir	Tidak Diakomodir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
						Bukitintan, Pasir Putih				0,00.-
121	69	Rudi Kurniawan,S.E. (Demokrat)	Pembuatan Jalan Setapak	Perlunya Jalan Setapak	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl Fatmawati Gang Kelapa RT 001 RW 001, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Selindung Baru	100 meter		√	Diakomodir Dinas PUPR karena diluar wilayah kumuh
122	70	Rosdiansyah Rasyid (Demokrat)	Pembuatan Jalan Setapak	Pembangunan Jalan Setapak di Samping Rumah H. Husin Kelurahan Tua Tunu	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl. raya tua tunu, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Tua Tunu	1 set		√	Diakomodir Dinas PUPR karena diluar wilayah kumuh
123	71	Jamaludin (GERINDRA)	Pembuatan Jalan Setapak	Pembangunan jalan setapak jalan dekat rumah Sadam RT.02 RW.01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jalan dekat rumah Sadam Rt.02Rw.01 Tuatunu, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Tua Tunu	250 m		√	Diakomodir Dinas PUPR karena diluar wilayah kumuh
124	72	Muhammad Rusdi, S.E.,M.H. (PAN)	Pembuatan Jalan Setapak	Pembangunan jalan setapak di RT.03 RW.01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rt.03 rw.01, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Bukitmerapin	300 meter		√	Diakomodir Dinas PUPR karena diluar wilayah kumuh



No.		Pengusul/ Fraksi	Bidang Urusan/Isu	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
								Diakomodir	Tidak Diakomodir	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
125	73	Bangun Jaya (GERINDRA)	Pembuatan Jalan Setapak	Pembangunan jalan setapak belakang mushola.Gg. Batu Akik I	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jalan Setapak Belakang Mushola.Gg. Batu Akik I, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar	200 m			Menunggu Konfirmasi
126	74	Bangun Jaya (GERINDRA)	Pembuatan Jalan Setapak	Pembuatan jalan setapak dar isamping Kantor DPD tembus terminal Girimaya	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Kantor DPD Jl.Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar	350 m			Menunggu Konfirmasi
127	75	Bangun Jaya (GERINDRA)	Pembuatan Jalan Setapak	Pembangunan Jalan setapak Jal II	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl.Tapak Jalk II RT.004, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar	80 m2			Menunggu Konfirmasi
128	76	Bangun Jaya (GERINDRA)	Pembuatan Jalan Setapak	Pembuatan jalan setapak.Jl. terminal Dalam RT.05	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jalan Terminal Dalam Rt.05, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar	70 m2			Menunggu Konfirmasi
129	77	Bangun Jaya (GERINDRA)	Pembuatan Jalan Setapak	Pembangunan Jalan Setapak RT 05 Girimaya	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl.Girimaya Rt.05, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar	100 m2			Menunggu Konfirmasi



No.		Pengusul/ Fraksi	Bidang Urusan/Isu	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
								Diakomodir	Tidak Diakomodir	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
130	78	Bangun Jaya (GERINDRA)	Pembuatan Jalan Setapak	Pembuatan jalan Setapak Jl.Mutiara IV RT.005	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl.Mutiara IV RT.007 Bukit Besar, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar	60 m2			Menunggu Konfirmasi
131	79	Bangun Jaya (GERINDRA)	Pembuatan Jalan Setapak	Pembangunan jalan setapak Jl.Basuki Rachmad	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl.Basuki Rachmad RT.006 RW.003 Sriwijaya, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	45 m			Menunggu Konfirmasi
132	80	Bangun Jaya (GERINDRA)	Pembuatan Jalan Setapak	Pembuatan Jalan Setapak RT 07 RW 03 Gang Satam IV ke Gang Satam V Kel. Semabung Baru Kec. Grimaya	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jalan Setapak RT 07 RW 03 Gang Satam IV ke Gang Satam V Kel. Semabung Baru Kec. Grimaya, Kota Pangkal Pinang	250 Meter	√		Diakomodir Dinas perkim tahun 2022 Rp.25,juta
133	81	Endang Kristiani (PDI Perjuangan)	Pembuatan Jalan Setapak	jalan masih tanah kuning. Sering tergenang air dan becek ketika hujan.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl. Basuki Rahmat (Samping sekolah kalam kudus), Kota Pangkal Pinang, Girimaya	50 M		√	Diakomodir Dinas PUPR
134	82	Rudi Kurniawan,S.E. (Demokrat)	Pembuatan Jalan Setapak	Pembangunan Jalan Setapak	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl Kerisi RT 004 RW 002 Gg.Kami Kawa, , Pk.balam Lontong Pancur	100 meter		√	Diakomodir Dinas perkim tahun 2022 Rp.44,juta



No.		Pengusul/ Fraksi	Bidang Urusan/Isu	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
								Diakomodir	Tidak Diakomodir	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
135	83	Zainuri (GOLKAR)	Pembuatan Jalan Setapak	Pembuatan Jalan Setapak untuk keselamatan warga Pengguna Jalan Setapak tersebut	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl. Patin I RT. 005 RW. 002, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Ampui	400 Meter		√	Diakomodir Dinas PUPR karena diluar wilayah kumuh
136	84	Zainuri (GOLKAR)	Pembuatan Jalan Setapak	Pembuatan jalan Setapak untuk keselamatan dan kenyamanan warga Pengguna Jalan Setapak tersebut	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Gg. Kakap III RT. 004 RW. 002, Kota Pangkal Pinang, Ampui	100 Meter		√	Diakomodir Dinas PUPR karena diluar wilayah kumuh
137	85	Zainuri (GOLKAR)	Pembuatan Jalan Setapak	Pembuatan jalan Setapak untuk Keselamatan Kenyamanan Pengguna Jalan Setapak tersebut	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Gg. Kakap 5 RT. 004 RW. 002, Kota Pangkal Pinang, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	162 Meter		√	Diakomodir Dinas PUPR karena diluar wilayah kumuh
138	86	H. Zeki Yamani, S.H.,M.H. (Demokrat)	Pembuatan Jalan Setapak	Pembuatan plat duiker - kelancaran dan kenyamanan penggunaan jalan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DEPAN RUMAH KA. RT 007, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Pintu Air	14 meter		√	Diakomodir Dinas PUPR karena diluar wilayah kumuh
139	87	H. Zeki Yamani, S.H.,M.H. (Demokrat)	Pembuatan Jalan Setapak	Pembuatran jalan setapak - kelancaran dan kenyamanan pengguna jalan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	JL. K.H AHMAD DALAN RT. 008, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Masjid Jamik	130 METER		√	Diakomodir Dinas PUPR karena diluar wilayah kumuh



No.		Pengusul/ Fraksi	Bidang Urusan/Isu	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
								Diakomodir	Tidak Diakomodir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
140	88	H. Ermawi, S.E. (GOLKAR)	Pembuatan Jalan Setapak	Untuk Kelancaran dan Kenyamanan Pengguna Jalan karena belum ada Jalan Setapak	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl. Trem Dalam RT. 007 RW. 003, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	20 Meter			
141	89	H. Ermawi, S.E. (GOLKAR)	Pembuatan Jalan Setapak	Untuk Kelancaran dan Kenyamanan Pengguna Jalan yang belum ada jalan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl. K.H. Ahmad Dahlan RT. 008 RW. 003, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	325 Meter			
142	90	Bangun Jaya (GERINDRA)	Pembuatan saluran rumah tangga	Pembuatan Drainase Ruma Jl.Basuki Rachmad Ujung Ih Tangga	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl.Basuki Rachmad Ujung I RT.006 RW.003, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	43 m3			Menunggu Konfirmasi
143	91	Bangun Jaya (GERINDRA)	Pembuatan saluran rumah tangga	Pembangunan Drainase Pemukiman Jl.Perbakin Gg.Salam	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl.Perbakin Gg.Salam RT.009 RW.003, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	13 m3			Menunggu Konfirmasi
144	92	H. Zeki Yamani, S.H.,M.H. (Demokrat)	Pembuatan saluran rumah tangga	MEMPERLANCA R ALIRAN AIR PEMBUANGAN RUMAH TANGGA	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl. DUKU II RT. 002, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Pintu Air	45 Meter		√	diakomodir Dinas PUPR karena diluar wilayah kumuh



No.		Pengusul/ Fraksi	Bidang Urusan/Isu	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
								Diakomodir	Tidak Diakomodir	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
145	93	H. Ermawi, S.E. (GOLKAR)	Pembuatan saluran rumah tangga	Memperlancar air Pembuangan Rumah Tangga	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl. Trem RT. 006 RW. 002, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	14 Meter	√		Diakomodir dinas perkim tahun 2021 Rp.27,000,00 0,00.-
146	94	Endang Kristiani (PDI Perjuangan)	Perbaikan Sumur Umum	masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl. Teluk Bayur, RT. 09, RW. 03., Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Pasir Putih	1 titik		√	Diakomodir dinas PUPR
147	95	Dr. Zufriady, S.E,M.M. (GOLKAR)	Perbaikan Tempat Ibadah	Pembangunan sarana Parkir Masjid Hakimah Arif, Milik Masyarakat di Jl. Pahlawan 12 RT. 12 RW. 10 Kel. Kacang Pedang - Gerunggang(yang mana user memilih Menu Usulan pada Perbaikan Tempat Ibadah dikarenakan Menu Usulan Penambahan/Pem bangunan Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah tidak ada dalam menu Usulan tersebut.)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl, Pahlawan 12 RT. 10 RW. 03, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Kacang Pedang	90 Meter Persegi		√	Diakomodir dinas PUPR karena diluar wilayah kumuh



No.		Pengusul/ Fraksi	Bidang Urusan/Isu	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
								Diakomodir	Tidak Diakomodir	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
148	96	Jamaludin (GERINDRA)	Perbaikan Tempat Ibadah	Rehab masjid Alhijrah Air Geligit Tuatunu	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl.Air Geligit RT.01 RW.01 Tutunu Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Tua Tunu	196 m2		√	Diakomodir Dinas PUPR karena diluar wilayah kumuh
149	97	Djubaidah (GERINDRA)	Rehabilitasi Jalan Setapak	Perbaikan jalan setapak RT.01,RT.02,RT. 03 Gabek I	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	RT.01,RT02,RT. 03 RW.01 Gabek I, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Gabek Satu	600 m		√	Diakomodir Dinas PUPR karena diluar wilayah kumuh
150	98	Ahmad Amir (PDI Perjuangan)	Rehabilitasi Jalan Setapak	perbaikan jalan untuk akses masyarakat. karena sudah rusak dan sempit.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	GANG SELUANG 1 RT.07 RW.02, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Gabek Dua	110 M		√	Diakomodir Dinas PUPR karena diluar wilayah kumuh
151	99	Panji Akbar, S.IP (Nasdem)	Rehabilitasi Jalan Setapak	Rehabilitasi Jln. Pikas IV mulai dari M.Z Zainudin sampai dengan Fatmawati	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jln. Pikas IV Kelurahan Air Salemba Kecamatan Gabek, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Air Salemba	100 meter		√	Diakomodir Dinas PUPR karena diluar wilayah kumuh
152	100	Jamaludin (GERINDRA)	Rehabilitasi Jalan Setapak	Peningkayan Jalan Paving Block dekat Rumah Nul Jum RT.02.RW.01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rumah Nul Jum RT.02.RW.01 Tuatunu, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Tua Tunu	300 m		√	Diakomodir Dinas PUPR karena diluar wilayah kumuh



No.		Pengusul/ Fraksi	Bidang Urusan/Isu	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
								Diakomodir	Tidak Diakomodir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
153	101	Jamaludin (GERINDRA)	Rehabilitasi Jalan Setapak	Pelebaran jalan Setapak Gg.Air dalam RT.01 RW.01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl.air Dalam Rt.01 RW.01 Tuatunu, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Tua Tunu	250 m		√	Diakomodir Dinas PUPR karena diluar wilayah kumuh
154	102	Bangun Jaya (GERINDRA)	Rehabilitasi Jalan Setapak	Rehab jalan setapak Jl.Batu Akik VI	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl.Batu Akik VI RT.006 Bukit Besar, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar	150 m2			Menunggu Konfirmasi
155	103	Bangun Jaya (GERINDRA)	Rehabilitasi Jalan Setapak	Rehab jalan setapak jl.Batin Ketapik RT.009	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl.Batin Ketapik Rt.009 Bukit Besar, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar	125 m2			Menunggu Konfirmasi
156	104	Bangun Jaya (GERINDRA)	Rehabilitasi Jalan Setapak	Pemasnagan conblock Gg.Salam Rt.09 RW.03 Sriwijaya	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Gg.Salam Rt.09 RW.03 Sriwijaya, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	132 m2			Menunggu Konfirmasi
157	105	Bangun Jaya (GERINDRA)	Rehabilitasi Jalan Setapak	Rehab Jalan Setapak Depan Masjid Baitul Rachman RT.005 RW.002	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Depan Masjid Baitul Rachman RT.005 RW.002 Sriwijaya, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	105 m2			Menunggu Konfirmasi



No.		Pengusul/ Fraksi	Bidang Urusan/Isu	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
								Diakomodir	Tidak Diakomodir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
158	106	Bangun Jaya (GERINDRA)	Rehabilitasi Jalan Setapak	Rehab jalan Setapak Delima VII	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl.Delima Siam VII RT.003 RW.001 Sriwijaya, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	300 m			Menunggu Konfirmasi
159	107	Bangun Jaya (GERINDRA)	Rehabilitasi Jalan Setapak	Rehab Jalan setapak (conblok),Jl.Perb akin Gg.salam	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl.Perbakin Gg.salam Rt.009 Rw.003 Sriwijaya, Kota Pangkal Pinang, Girimaya	66 m			Menunggu Konfirmasi
160	108	Bangun Jaya (GERINDRA)	Rehabilitasi Jalan Setapak	Rehab Jalan Setapak 9 (conblock)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl.Berlian IV RT.004 RW.001 Sriwijaya, Kota Pangkal Pinang, Girimaya	84 m			Menunggu Konfirmasi
161	109	Bangun Jaya (GERINDRA)	Rehabilitasi Jalan Setapak	Rehab Jalan setapak (conblok)..Perba kin GJlg.Salam	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Perbakin GJlg.Salam Rt.009 RW.003, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	73 m			Menunggu Konfirmasi
162	110	Andi (PAN)	Rehabilitasi Jalan Setapak	Rehab jalan setapak	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Gang batu akik V sebelah advent, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar	300 meter	√		Diakomodir Dinas perkim tahun 2022 Rp.50,000,00 0,00.-



No.	Pengusul/ Fraksi	Bidang Urusan/Isu	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
163	111	Rudi Kurniawan, S.E. (Demokrat)	Rehabilitasi Jalan Setapak	Perbaikan Jalan Setapak Sekitar ±50M+100M (2 Jalan Setapak)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	RT 009 RW 003, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Rejo Sari	100 meter	√	Diakomodir oleh program KOTAKU 2021
164	112	H. Arnadi, S.TP (PKS)	Rehabilitasi Jalan Setapak	Rehabilitasi jalan setapak	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	JL.NILA RT 08, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Rejo Sari	275 meter	√	Diakomodir oleh program KOTAKU 2021
165	113	Ahmad Amir (PDI Perjuangan)	Rehabilitasi Jalan Setapak	Jalan setapak yang sudah rusak dan membahayakan masyarakat.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl. Patin 8 (Gang SD N 48), Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Ampui	70 M		Diakomodir dinas PUPR karena diluar wilayah kumuh
166	114	Panji Akbar, S.IP (Nasdem)	Rehabilitasi Jalan Setapak	Perbaikan jalan setapak yang ada di RT 09/03 kelurahan Rejosari, sekitar 50M+100M (2 Jalan setapak)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	RT 09/03 kelurahan Rejosari kecamatan pangkal balam, Kota Pangkal Pinang	150 meter	√	Diakomodir oleh program KOTAKU 2021
167	115	H. Ermawi, S.E. (GOLKAR)	Rehabilitasi Jalan Setapak	Kelancaran dan Kenyamanan Pengguna Jalan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jl. Duku II RT. 002 RW. 001, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	200 Meter	√	Swakelola Dinas perkim 2022 Rp.30,000,00 0,00.-



2.5 Capaian Inovasi Daerah

Pertumbuhan pembangunan perlu digerakkan oleh strategi yang tidak saja semakin efisien, namun mengedepankan inovasi dengan mendayagunakan Iptekin, inovasi daerah pun bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi menjadi salah satu *tool* dalam mengakselerasi peningkatan daya saing Indonesia. Setiap elemen negara yang meliputi pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil harus melakukan inovasi. Inovasi pada lingkungan instansi pemerintah meliputi antara lain kementerian, lembaga pemerintah non kementerian (LPNK), pemerintah daerah, sangat penting karena dapat mengakselerasi inovasi swasta dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik. Inovasi, selain diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, pada dasarnya juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari reformasi birokrasi. Sesuai dengan pesan Presiden Republik Indonesia saat ini bahwa harusnya inovasi bukan hanya sebagai pengetahuan, namun inovasi adalah budaya. Reformasi birokrasi dicanangkan untuk memperbaiki “penyakit-penyakit” di sektor publik melalui pembaruan di 8 area sasaran (organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan,



akuntabilitas, pelayanan publik, dan *mindset* serta *cultural set* aparatur).

Inovasi menjadi katalisator untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, dimana banyak program inovasi merupakan pengejawantahan dari upaya perubahan di area-area tersebut. Lebih jauh lagi, inovasi sesungguhnya dapat dimaknai sebagai reformasi birokrasi kontekstual, artinya pelaksanaan reformasi birokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan daerah setempat. Kesadaran pentingnya inovasi saat ini ditandai dengan telah diterbitkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi. Tepatnya pada Pasal 386 yang menyatakan bahwa "dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi", selain itu dasar hukum terkait inovasi juga terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah serta Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Daerah. Inovasi yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip sebagai berikut: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara



terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Beberapa inovasi yang dikembangkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pangkalpinang

**Tabel 2.59****Inovasi Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020**

NO	OPD	INOVASI		DESKRIPSI
1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1	ADEK RAISYA	ADEK RAISYA (Aplikasi Data Ekonomi dan Rangkuman Informasi Sosial Budaya) ini termasuk klasifikasi Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah dengan 3 urusan yaitu; sosial, kebudayaan dan perencanaan
2	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA PANGKALPINANG	2	E-SMILE	E-SMILE (Elektronik Sistem Manajemen Informasi Layanan Kepegawaian) dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan manajemen kepegawaian yang profesional dan berkualitas serta untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian terhadap ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang. Output dari E-SMILE ini tersusunnya database kepegawaian ASN
3	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PANGKALPINANG	3	KAK OPUS (Kartu Anggota Otomatis Perpustakaan)	“KAK OPUS” merupakan suatu produk inovasi pelayanan publik. Dengan output yang dihasilkan berupa 1) sistem keanggotaan yang semula dilaksanakan secara manual menjadi komputerisasi, 2) waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan setelah adanya inovasi ini lebih efektif dan efisien, 3) Data anggota perpustakaan menjadi akurat



NO	OPD	INOVASI		DESKRIPSI
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4	SIPP (Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman)	SIPP merupakan suatu bentuk produk inovasi berupa tata kelola pemerintah yang dapat menampilkan data secara online, dengan data yang lebih terbaru, mutakhir, menarik, informatif dan mudah diakses
5	DINAS SOSIAL	5	SI PMKS (Sistem Informasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	Merupakan upaya peningkatan pelayanan publik berupa sarana penyediaan data dan penyajian data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Kota Pangkalpinang
		6	SLRT RENYAH Kota Pangkalpinang	SLRT RENYAH Kota Pangkalpinang (Sistem Layanan Rujukan Terpadu Ramah Enak Nyaman Aman Happy) merupakan bentuk peningkatan pelayanan publik yang menanggapi keluhan terkait kesejahteraan sosial di Kota Pangkalpinang
6	KECAMATAN BUKIT INTAN	7	AKAR BAMBU	AKAR BAMBU “Ajak Karang Taruna Membangun Berbasis Usaha” merupakan layanan terhadap kelompok pemuda dilingkungan kecamatan bukit intan dengan manfaat lurah dan karang taruna dapat membuat kerjasama dengan pengusaha di bidang perkebunan
		8	ANJALI (Antar Jemput Akta Kelahiran)	ANJALI merupakan aplikasi inovasi non digital untuk mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan akta



NO	OPD	INOVASI		DESKRIPSI
		9	APEM MANIS (Aktivitas Pembangunan Melalui Masyarakat dan Swasta)	Merupakan aplikasi inovasi non digital dan termasuk kedalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		10	CABIK (Cepat Atasi Bidang Kependudukan)	Aplikasi ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat mengurus administrasi kependudukan di Kelurahan Pasir Putih, sehingga masyarakat dalam mengaksesnya hanya dari rumah
		11	IKAN PINDANG (Implementasi Kebijakan Pindah Warga dan Pendetang)	Inovasi ini dimaksudkan untuk mempercepat proses pelayanan administrasi masyarakat dengan cepat dan tepat serta kemudahan
		12	Jumat Bekais (Bantuan Sedekah Warga Miskin)	Jumat Bekais merupakan inovasi yang bergerak pada bidang sosial yang digunakan untuk memfasilitasi sedekah bagi warga miskin yang berada di lingkungan Kecamatan Bukit Intan, hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa kepedulian dan kebersamaan antar warga
		13	Karina Manja (Kartu Identitas Anak Antar Jemput)	Karina Manja (Kartu Identitas Anak Antar Jemput) merupakan inovasi non digital sebagai pembaruan terhadap mekanisme dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di lingkup Kecamatan Bukit Intan terhadap pengurusan Kartu Identitas Anak



NO	OPD	INOVASI		DESKRIPSI
		14	KELATU (Kebijakan layanan administrasi tanpa tunggu)	Inovasi ini dimaksudkan untuk mempercepat proses pelayanan administrasi masyarakat
		15	KELEKAK (Komunitas Petani Peduli Lingkungan Kelurahan)	KELEKAK (Komunitas Petani Peduli Lingkungan Kelurahan) merupakan inovasi penanganan sampah oleh Kelompok Wanita tani di lingkungan kecamatan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan
		16	KELIPAN (Kelurahan Peduli Anak)	KELIPAN (Kelurahan Peduli Anak) merupakan inovasi sebagai bentuk layanan perlindungan terhadap hak-hak anak di lingkup Kecamatan Bukit Intan
		17	KERANAS (Kreativitas Aneka Pembangunan Masyarakat)	KERANAS (Kreativitas Aneka Pembangunan Masyarakat) merupakan inovasi nondigital sebagai pembaruan terhadap mekanisme dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah khususnya di lingkup Kecamatan Bukit Intan
		18	KERETAK (Kreasi Terpadu Kelompok Industri Kecil Menengah)	KERETAK (Kreasi Terpadu Kelompok Industri Kecil Menengah) merupakan inovasi non digital sebagai bentuk pelayanan terhadap UMKM dilingkup Kecamatan Bukit Intan
		19	LAKSO (Layanan Konsultasi Secara Online)	Layanan Konsultasi Secara Online merupakan inovasi digital yang dibuat dalam rangka memudahkan dan mengotimalkan layanan Konsultasi Sosial Lingkup Kecamatan Bukit Intan



2.6 Capaian TPB/SDGs

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pembangunan berkelanjutan adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong



perubahan-perubahan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target. Berikut ini merupakan capaian dan target TPB/SDGs Kota Pangkalpinang :



Tabel 2.60

Capaian dan Target Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	REALISASI	TARGET PEMBANGUNAN				
				2019	2020	2021	2022	2023	
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS : (Survei Sosial Ekonomi) Kor	Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% (2015: 11,13%).	4,25%	3,86%	3,47%	3,09%	2,7%	
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	BPS dan BPJS Ketenagakerjaan	Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan menjadi minimal 95% pada tahun 2019	72,38%	83,17%	92,98%	100%	100%	
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan, BPS (Sakernas)	Meningkatnya Kepesertaan Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Ketenagakerjaan pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta pekerja formal dan 3,5 juta pekerja informal (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta).	65%	73,75%	82,50%	91,25%	100%	



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	REALISASI	TARGET PEMBANGUNAN				
				2019	2020	2021	2022	2023	
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Dinas Sosial, BPS : Pemuktahiran Data Terpadu Sinergi dengan data PMKS	Meningkatnya persentase penyandang difabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2019 menjadi 17,12% (2015: 14,84%).	14%	16,67%	20,67%	24,67%	28,76%	
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Dinas Sosial BPS : (Susenas) Kor	Menurunnya jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat menjadi 2,8 juta pada tahun 2019 (2015: 3 juta).	3230 PKH; 5678 bnpt	4215 PKH	4874 PKH	5533 PKH	6192 PKH	
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan	Meningkatnya cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 70%	96%	97%	98%	99%	100%	
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang	Dinas Kesehatan	Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada	98%	98,5	99	99,5	100	



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	REALISASI	TARGET PEMBANGUNAN				
				2019	2020	2021	2022	2023	
	menerima imunisasi dasar lengkap.		anak usia 12-23 bulan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 63%.						
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas Perlindungan Perempuan & Anak & Keluarga Berencana	Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%.	78%	83,5	89	94,5	100	
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Kesehatan	Meningkatnya akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	96,6%	97,45%	98,30%	99,15%	100%	
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Kesehatan	Meningkatnya akses sanitasi layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	98,7%	100%	100%	100%	100%	



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	REALISASI	TARGET PEMBANGUNAN				
				2019	2020	2021	2022	2023	
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Dinas Perumahan dan Pemukiman	Meningkatnya jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang dapat mengakses hunian layak pada tahun 2019 menjadi 18,6 juta untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah.	na	94%	100%	100%	100%	
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 94,78% (2015: 91,23%).	100%	100%	100%	100%	100%	
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 82,2% (2015: 79,97%).	95%	96,25	97,5	98,75	100	
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	BPS, Dinas Dukcapil, BPS : Data Susenas (Kor)	Kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 77,4%.	80%	81,49%	83,89%	85,83%	92%	



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	REALISASI	TARGET PEMBANGUNAN			
				2019	2020	2021	2022	2023
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	PLN BPS : Data Susenas (Kor)	Meningkatnya akses penerangan untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 100% pada tahun 2019.	100%	100%	100%	100%	100%
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Tidak ada korban	Tidak ada korban	Tidak ada korban	Tidak ada korban	Tidak ada korban
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah	Meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah pada tahun 2019 menjadi 39 daerah (2015: 35 daerah).	1 kecamatan Rangkui (8 kelurahan)	2	2	3	3
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 151 ribu (2015: 43 ribu).	Ada kejadian ada korban luka, tidak pemenuhan kebutuhan dasar bencana	100%	100%	100%	100%



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	REALISASI	TARGET PEMBANGUNAN				
				2019	2020	2021	2022	2023	
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah, Dinas Sosial	Terlaksananya pendampingan psikososial korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 81,5 ribu (2015: 21,5 ribu).	Tidak ada pendampin gan	Ada Pendampi ngan	Ada Pendampi ngan	Ada Pendampi ngan	Ada Pendampi ngan	
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah	Meningkatnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus pada tahun 2019 menjadi 450 (2015: 100).	Tidak ada kejadian	0	0	0	0	
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah	Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi dari 58 menjadi 118,6 di 133 Kabupaten/Kota (2014:169,4).	Tidak ada data	120,3	120,1	120	120	
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Tidak ada data	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	REALISASI	TARGET PEMBANGUNAN				
				2019	2020	2021	2022	2023	
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Dinas Sosial	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	0,16%	0,18%	0,20%	0,22%	0,24%	
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Dinas Sosial	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	23,98	40%	56%	72%	88%	
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Dinas Pangan & Pertanian	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	0%	0%	0%	0%	0%	
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Dinas Kesehatan	Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita pada tahun 2019 menjadi 17% (2013: 19,6 %).	3%	3%	3%	3%	3%	



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	REALISASI	TARGET PEMBANGUNAN				
				2019	2020	2021	2022	2023	
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Dinas Pangan & Pertanian	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	0%	0%	0%	0%	0%	
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Dinas Pangan & Pertanian	Menurunnya proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari pada tahun 2019 menjadi 8,5 % (2015: 17,4%).	0%	0%	0%	0%	0%	
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Dinas Kesehatan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	1%	0,75%	0,5%	0,25%	0%	
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada	Dinas Kesehatan	Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di	1%	0,75%	0,5%	0,25%	0%	



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	REALISASI	TARGET PEMBANGUNAN				
				2019	2020	2021	2022	2023	
	anak di bawah dua tahun/baduta.		bawah dua tahun/baduta pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 32,9%).						
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Dinas Kesehatan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	0,90%	0,65%	0,4%	0,15%	0%	
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Dinas Kesehatan	Menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 37,1%).	17,69%	15,77%	13,85%	10,50%	8,58%	
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Dinas Kesehatan	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif menjadi 50% pada tahun (2013: 38%).	67%	70%	75%	80%	85%	
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Dinas Pangan & Pertanian	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 92,5 (2014: 81,8), dan tingkat konsumsi ikan menjadi 54,5 kg/kapita/tahun pada tahun 2019 (2015: 40,9 kg/kapita/tahun).	*Skor PPH : 86 *Tingkat konsumsi ikan : 44,72 kg/kapita/tahun	*Skor PPH : 88 *Tingkat konsumsi ikan : 47,99 kg/kapita/tahun	*Skor PPH : 90 *Tingkat konsumsi ikan : 50,28 kg/kapita/tahun	*Skor PPH : 92 *Tingkat konsumsi ikan : 53,17 kg/kapita/tahun	*Skor PPH : 94 *Tingkat konsumsi ikan : 56,06 kg/kapita/tahun	



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	REALISASI	TARGET PEMBANGUNAN				
				2019	2020	2021	2022	2023	
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Dinas Pangan & Pertanian	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	30,71%	41,43%	52,40%	62,85%	62,85%	
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinas Kesehatan	Menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 306 (2010: 346).	22/100.000	20/100.000	18/100.000	16/100.000	14/100.000	
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Dinas Kesehatan	Meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2019 menjadi 95 % (2015: 91,51%).	96,10%	96,9%	97,7%	98,5%	100%	
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan	Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 85 % (2015: 75%).	96,10%	96,9%	97,7%	98,5%	100%	



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	REALISASI	TARGET PEMBANGUNAN				
				2019	2020	2021	2022	2023	
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	3,20%	3%	2,8%	2,6%	2,5%	
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	2,8%	2,8%	2,75%	2,7%	2,63%	
3.2.2 (a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 24 (2012-2013: 32).	3,2%	3%	2,8%	2,6%	2,5%	
3.2.2 (b)	Presentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	Dinas Kesehatan	Meningkatnya persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi pada tahun 2019 menjadi 95% (2015: 71,2%).	100%	100%	100%	100%	100%	
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Dinas Kesehatan	Menurunnya prevalensi HIV pada populasi dewasa tahun 2019 menjadi <0,5% (2014: 0,46%).	0,05%	0,04%	0,04%	0,03%	0,03%	



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	REALISASI	TARGET PEMBANGUNAN				
				2019	2020	2021	2022	2023	
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinas Kesehatan	Menurunnya prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 245 (2013: 297).	0,23%	0,23%	0,22%	0,21%	0,20%	
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinas Kesehatan (Laporan Tahunan)	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	<1	<1	<1	<1	<1	
3.3.3 (a)	Jumlah kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi malaria	Dinas Kesehatan	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria pada tahun 2019 menjadi 300 (2013: 212).	1	1	1	1	1	
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Dinas Kesehatan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100%	100%	100%	100%	100%	
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Dinas Kesehatan (Survei Mikro Filaria Rata MFR), BPS (Data Proyeksi Penduduk)	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	0%	0%	0%	0%	0%	



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	REALISASI	TARGET PEMBANGUNAN				
				2019	2020	2021	2022	2023	
3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Dinas Kesehatan	Meningkatnya jumlah provinsi dengan eliminasi kusta sebanyak 34 provinsi pada tahun 2019 (2013:20).	0	0	0	0	0	
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Dinas Kesehatan	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis pada tahun 2019 menjadi 35.	0 kasus (lolos)	0	0	0	0	
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk ≤18 tahun.	Dinas Kesehatan (Riset Kesehatan Tahunan)	Menurunnya persentase merokok pada penduduk usia ≤18 tahun pada tahun 2019 menjadi 5,4% (2013: 7,2%).	0.3%	0,2	0,2	0,15	0,15	
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinas Kesehatan (Riset Kesehatan Tahunan)	Menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi pada tahun 2019 menjadi 24,3% (2013: 25,8%).	22%	20	18	16	15	
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk ≥18 tahun.	Dinas Kesehatan (Riset Kesehatan Tahunan)	Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 tahun ke atas pada tahun 2019 menjadi 15,4% (2013: 15,4%).	0,50%	0,5	0,4	0,4	0,3	



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	REALISASI	TARGET PEMBANGUNAN				
				2019	2020	2021	2022	2023	
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Dinas Kesehatan	Meningkatnya jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa pada tahun 2019 menjadi 280 (2015: 80).	9 puskesmas	9 puskesmas	9 puskesmas	10 puskesmas	10 puskesmas	
3.5.1 (e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	BNN Kota	Terkendalnya laju prevalensi penyalahgunaan narkoba pada akhir tahun 2019 menjadi angka 0,02% (2015: 0,05%).	2,69%	2,33%	1,98%	1,63%	1,26%	
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	BNN Kota, Kepolisian	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Tidak ada data	na	na	na	na	
3.7.1	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Dinas PPPA dan KB	Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi suatu cara pada tahun 2019 menjadi 66% (2012-2013 :61,9%).	95,61%	96,7075	97,805	98,9025	100	



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	REALISASI	TARGET PEMBANGUNAN			
				2019	2020	2021	2022	2023
3.7.1 (a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas PPPA dan KB	Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%.	78,48%	80,11	81,74	83,37	85
3.7.1 (b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Dinas PPPA dan KB	Meningkatnya angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern pada tahun 2019 menjadi 23,5% (2012-2013:18,3%).	62,61%	63,49%	64,27%	64,95%	65,5%
3.7.2	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Dinas PPPA dan KB	Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) pada tahun 2019 menjadi 38 (2012-2013: 48).	12,50%	11,25	10,00	8,75	7,5
3.7.2 (a)	Total Fertility Rate (TFR).	Dinas PPPA dan KB	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 2019 menjadi 2,28 (2012:2,6).	2,52%	0%	0%	0%	0%



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	REALISASI	TARGET PEMBANGUNAN				
				2019	2020	2021	2022	2023	
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Dinas PPPA dan KB, BPS (Survei Susenas)	Menurunnya unmeet need pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 9,91% (2012-2013:11,4%).	8,25%	3,95%	0%	0%	0%	
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	BPJS Ketenagakerjaan; Bappeda Litbang, BPS (survei Susenas)	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	84,9%	87,36%	91,08%	93,80%	96,52%	
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	BPJS Ketenagakerjaan; Dinas Kesehatan	Meningkatnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2019 minimal 95% (2015:60%).	84,92%	88,50%	91,23%	93,96%	96,96%	
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Dinas Kesehatan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	0	0	0	0	0	
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Kesehatan, BPS (Survei Susenas)	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	0.3%	0,25	0,2	0,15	0,1	
3.b.1 (a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Dinas Kesehatan, BPS (Survei Susenas)	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	78%	80	85	90	100,00%	



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	REALISASI	TARGET PEMBANGUNAN				
				2019	2020	2021	2022	2023	
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Dinas Kesehatan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	0,6	0,59%	0,58%	0,58%	0,57%	
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100%	100%	100%	100%	100%	
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatnya persentase SD/MI berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 84,2% (2015:68,7%).	91,30%	92,5	93	94	95	
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatnya persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 81% (2015:62,5%).	92,59%	93	94	95	96	



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	REALISASI	TARGET PEMBANGUNAN			
				2019	2020	2021	2022	2023
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 114,09% (2015: 108%).	108,80%	106	104	102	100
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sedera jat.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatnya APK SMP/MTs/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 106,94% (2015: 100,7%).	79,90%	85	90	95	100%
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,8 tahun (2015: 8,25 tahun).	0,098	10	10,2	10,6	11
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatnya APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2019 menjadi 77,2% (2015: 70,06%).	24,10%	37,33%	50,56%	63,79%	77,02%
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Dinas Komunikasi dan Informatika	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Tidak ada data	na	na	na	na



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	REALISASI	TARGET PEMBANGUNAN			
				2019	2020	2021	2022	2023
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat;	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.1. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/paket A yang setara gender pada tahun 2019. 4.2 Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket B yang setara gender pada tahun 2019. 4.3 Rasio APK perempuan/laki-laki di SMA/SMK/MA yang setara gender pada tahun 2019. 4.4 Rasio APK perempuan/laki-laki pada PT dan PTA yang setara gender pada tahun 2019.	99,60%	85,85%	85,85%	85,85%	85,85%
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (2) SMP/MTS/ sederajat;	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.1. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/paket A yang setara gender pada tahun 2019. 4.2 Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket B yang setara gender pada tahun 2019. 4.3 Rasio APK perempuan/laki-laki di SMA/SMK/MA yang setara gender pada tahun 2019. 4.4 Rasio APK perempuan/laki-laki pada PT dan PTA yang setara gender pada tahun 2019.	75%	77%	80%	81%	82%



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	REALISASI	TARGET PEMBANGUNAN			
				2019	2020	2021	2022	2023
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatnya persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun pada tahun 2019.	99,80%	100	100	100	100
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatnya persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun pada tahun 2019.	99,80%	100	100	100	100
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100%	100	100	100	100



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	REALISASI	TARGET PEMBANGUNAN				
				2019	2020	2021	2022	2023	
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	32,6%	37%	43%	48,3%	47,92%	
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Dinas PPPA dan KB	Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan pada tahun 2019 bertambah sebanyak 16 (2015: 19).	1 kebijakan	1 kebijakan	1 kebijakan	1 kebijakan	1 kebijakan	
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Dinas PPPA dan KB	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	32,86 (target 70 kasus)	5,81%	0%	0%	0%	



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	REALISASI	TARGET PEMBANGUNAN				
				2019	2020	2021	2022	2023	
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Dinas PPPA dan KB	Menurunnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada tahun 2019 (2013: 20,48 %).	24,28%	21	18	14	10	
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Dinas PPPA dan KB	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	32,86 (target 70 kasus)	5,81%	0%	0%	0%	
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Dinas PPPA dan KB	Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2019 menjadi 70% (2015: 50%).	100%	100%	100%	100%	100%	
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun	Dinas PPPA dan KB	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	1	1	1	1	1	



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	REALISASI	TARGET PEMBANGUNAN				
				2019	2020	2021	2022	2023	
	yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.								
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Dinas PPPA dan KB	Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) pada tahun 2019 menjadi 21 tahun (2012: 20,1 tahun).	tidak ada data	2,10%	2,10%	2,22%	2,22%	
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Dinas Kesehatan	Menurunnya ASFR 15-19 tahun pada tahun 2019 menjadi 38 tahun (2012: 48 tahun).	6,59%	6	5,5	5	4,5	
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	DPRI	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR (Hasil Pemilu 2014: 16,6%).	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	REALISASI	TARGET PEMBANGUNAN			
				2019	2020	2021	2022	2023
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	BKPSDMS dan BPS (Sakernas)	Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).	10%	11,11%	12,78%	14,44%	16,11%
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Dinas Kesehatan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	95,61%	96	96,5	97	97,5
5.6.1 (a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Dinas Perlindungan Perempuan & Anak & Keluarga Berencana	Menurunnya unmeet need kebutuhan ber-KB pada tahun 2019 menjadi 9,9% (2012-2013: 11,4 %).	8,50%	8	7,5	7	6,5



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	REALISASI	TARGET PEMBANGUNAN			
				2019	2020	2021	2022	2023
5.6.1 (b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Dinas PPPA dan KB	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis pada tahun 2019 menjadi 85% (2012: 79,8 %).	96%	97	98	99	100
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Kominfo	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	77,71%	80,19%	82,68%	85,16%	87,64%
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Dinas Kesehatan	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).	96,40%	97	97,5	98	98,5
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	PDAM	Meningkatnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri pada tahun 2019 menjadi 118,6 m3/detik (2015: 51,44 m3/detik) dan penyediaan air baku untuk 60 pulau.	114,08 L/detik	114,5 L/detik	115 L/detik	115,5 L/detik	116 L/detik



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	REALISASI	TARGET PEMBANGUNAN				
				2019	2020	2021	2022	2023	
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	PDAM	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).	14,73%	28,53%	42,5%	56,46%	70,43%	
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Dinas Kesehatan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	25,60%	43,77%	61,93%	80,10%	80,10%	
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Dinas Kesehatan	Meningkatnya akses terhadap sanitasi yang layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 60,9%).	98,72%	100%	100%	100%	100,00%	
6.2.1 (c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dinas Kesehatan	Meningkatnya jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menjadi 45.000 pada tahun 2019 (2015: 25.000).	42 kelurahan	42 kelurahan	42 kelurahan	42 kelurahan	42 kelurahan	
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Dinas Kesehatan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	57,14%	65,71%	71,28%	82,86%	91,43%	



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	REALISASI	TARGET PEMBANGUNAN				
				2019	2020	2021	2022	2023	
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Dinas Lingkungan Hidup, PUPR	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	-	-	-	-		Penambahan program dan kegiatan di OPD terkait. Target RPJMN = 509.492 KK
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Dinas Lingkungan Hidup, PUPR	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	
6.3.2 (a)	Kualitas air danau.	Dinas Lingkungan Hidup	Pengelolaan kualitas air, baik di sungai, waduk, danau, situ, muara sungai, pantai termasuk perbaikan sistem monitoring hidrologis dan kualitas air dengan indikator membaiknya kualitas air di 15 danau, 5 wilayah sungai.	2	2	2	2	2	
6.3.2 (b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	Dinas Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas air sungai sebagai sumber air baku menuju baku mutu rata-rata air sungai kelas II diwakili parameter BOD dengan baku 3 mg/l	8,08	6,81%	5,54%	4,27%	3%	



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	REALISASI	TARGET PEMBANGUNAN			
				2019	2020	2021	2022	2023
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Dinas Lingkungan Hidup	Pemberian insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri termasuk penerapan prinsip reduce, mengembangkan reuse dan recycle, serta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (safe use of astewater in agriculture).	tidak ada data	na	na	na	na
6.5.1 (a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Internalisasi 108 Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disusun ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Tidak ada data	na	na	na	na
6.5.1 (c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembentukan jaringan informasi sumber daya air di 8 Wilayah Sungai.	Tidak ada data	na	na	na	na
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang	Dinas Pekerjaan	Peningkatan partisipasi masyarakat	Tidak ada data	na	na	na	na



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	REALISASI	TARGET PEMBANGUNAN				
				2019	2020	2021	2022	2023	
	memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Umum dan Penataan Ruang	dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau di 10 Wilayah Sungai						
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Melanjutkan penataan kelembagaan sumber daya air, antara lain dengan: Mensinergikan pengaturan kewenangan dan tanggung jawab di semua tingkat pemerintahan beserta seluruh pemang-ku kepentingan serta menjalankannya secara konsisten; Meningkatkan ke-mampuan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antarlembaga serta antar-wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; dan Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air.	Tidak ada data	na	na	na	na	



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	REALISASI	TARGET PEMBANGUNAN				
				2019	2020	2021	2022	2023	
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Dinas Koperasi dan UMKM	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	3,34%	3,06%	2,78%	2,5%	2,5%	
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Sekretariat Daerah Bagian Adm. Perekonomian, Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, Bappeda dan Litbang, BPS (Publikasi PDB Triwulanan dan Pendapatan Nasional Indonesia sesuai tahun berjalan)	Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita per tahun menjadi lebih dari Rp 50 juta pada tahun 2019 (2015: Rp 45,2 juta).	9.076.276	9.452.021,65	9.816.089,26	10.180.156,87	10.544.224	
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Sekretariat Daerah Bagian Adm. Perekonomian, Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, Bappeda dan Litbang	Pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja meningkat hingga tahun 2019.	tidak ada data	na	na	na	na	



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	REALISASI	TARGET PEMBANGUNAN				
				2019	2020	2021	2022	2023	
8.3.1 (a)	Persentase tenaga kerja formal.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja formal mencapai 51% pada tahun 2019 (2015: 42,2%).	69%	70	70	71	71	
8.3.1 (b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	2,17%	20,02%	37,86%	55,71%	73,5%	
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan	Akses Layanan Keuangan formal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 25% pada tahun 2019 (2014: 17,8%).	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	17510	18808	18506	19502	20.000	



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	REALISASI	TARGET PEMBANGUNAN				
				2019	2020	2021	2022	2023	
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	9,13%	8,17%	7,22%	6,26%	5,3%	
8.5.2 (a)	Tingkat setengah pengangguran.	BPS	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	5,01%	4,38%	3,98%	3,59%	3,19%	
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Meningkatnya keterampilan pekerja rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja.		na	na	na	23,05%	
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Dinas Pariwisata	Meningkatnya kontribusi pariwisata menjadi 8% terhadap PDB pada tahun 2019 (2014: 4,2%).	4,8%	5%	5,2%	5,35%	5,5%	
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Dinas Pariwisata	Meningkatnya kontribusi pariwisata menjadi 8% terhadap PDB pada tahun 2019 (2014: 4,2%).	3376	4517	5426	6334	7242	



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	REALISASI	TARGET PEMBANGUNAN			
				2019	2020	2021	2022	2023
8.9.1 (b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Dinas Pariwisata	Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 20 juta pada tahun 2019 (2014: 9 juta).	864.496	875.000	890.000	905.000	920.000
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Dinas Pariwisata	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)		na	na	na	na
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	8,69%	9,64%	10,58%	11,53%	12,47%
8.10.1*	Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa	BPS/BI	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	48	na	na	na	na
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Sekretariat Daerah Bagian Adm. Perekonomian, Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, Bappeda dan Litbang	Meningkatnya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan hingga tahun 2019.	19 unit	na	na	na	na



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	REALISASI	TARGET PEMBANGUNAN				
				2019	2020	2021	2022	2023	
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Sekretariat Daerah Bagian Adm. Perekonomian, Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, Bappeda dan Litbang	Meningkatnya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan hingga tahun 2019.	na	na	na	na	na	
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Sekretariat Daerah Bagian Adm. Perekonomian, Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, Bappeda dan Litbang	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	12,43%	18,94%	24%	29,06%	34,12%	
9.1.2 (b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Bappeda dan Litbang	Meningkatnya jumlah dermaga penyeberangan menjadi 275 pada tahun 2019 (2014: 954 km).	1	1	1	1	1	
9.1.2 (c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Bappeda dan Litbang	Terbangunnya pelabuhan strategis untuk menunjang tol laut pada 24 pelabuhan pada tahun 2019.	1	1	1	1	1	



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	REALISASI	TARGET PEMBANGUNAN				
				2019	2020	2021	2022	2023	
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	18,65%	20,30%	21,95%	23,6%	23,6%	
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan	Meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur sehingga lebih tinggi dari pertumbuhan PDB (2015: 4,3%).	0,09%	0,2%	0,3%	0,4%	0,5%	
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	0,96%	30,45%	40,58%	50,71%	60,84%	
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	0,47%	0,75	1	1,25	1,5	
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	3,72 %	2,06 %	1,27 %	0,48 %	0,00%	
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Bappeda dan Litbang	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Tidak ada	na	na	na	na	



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	REALISASI	TARGET PEMBANGUNAN				
				2019	2020	2021	2022	2023	
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Kominfo	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Tidak ada data	na	na	na	na	
9.c.1 (a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Kominfo	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	77,70%	80,19%	82,68%	85,16%	87,64%	
9.c.1 (b)	Proporsi induvidu yang menggunakan internet	Kominfo	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	62,10%	65	67,5	70	72,5	
10.1.1*	Koefisien Gini.	Bappeda dan Litbang	Koefisien Gini pada tahun 2019 menjadi 0,36 (2014: 0,41).	0,26	0,32	0,31	0,305	0,3	
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Badan Pusat Statistik	Tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% dari jumlah penduduk (2015:11,13%).	4,25%	3,86%	3,48%	3,09%	2,7%	
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	BPS, Biro Kesra, Dinas Sosial	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)		na	na	na	na	



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	REALISASI	TARGET PEMBANGUNAN			
				2019	2020	2021	2022	2023
10.3.1 (a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Komnas Perempuan, Dinas Pemberdayaan an Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	Meningkatnya Indeks Kebebasan Sipil menjadi 87 pada tahun 2019 (2015: 80,3).		na	na	na	87
10.3.1 (d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Dinas Sosial	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	tidak ada data	1 kebijakan	1 kebijakan	1 kebijakan	1 kebijakan
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	BPS, BPJS	Meningkatnya kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang ketenagakerjaan untuk tenaga kerja formal pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta dan tenaga kerja informal pada tahun 2019 menjadi 3,5 juta (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta).	65%	73,75%	82,5%	91,25%	100%



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	REALISASI	TARGET PEMBANGUNAN				
				2019	2020	2021	2022	2023	
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	BPS, Perkim	Tersedianya akses bagi 3,7 juta rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau hingga tahun 2019	76%	82%	88%	94%	100%	
11.1.1 (c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Dinas Perkim	Terwujudnya pemenuhan standar pelayanan perkotaan kota yang aman, nyaman dan layak huni pada aspek permukiman paling sedikit di 12 Kawasan Perkotaan Metropolitan hingga tahun 2019.	provinsi	na	na	na	na	
11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Dishub	Meningkatnya pangsa pengguna moda transportasi umum di perkotaan menjadi 32% hingga tahun 2019 (2014: 23%).	0	na	na	na	2,17%	
11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Bappeda dan Litbang	Meningkatnya peran swasta, organisasi masyarakat dan organisasi profesi secara aktif, dalam Forum Dialog Perencanaan dan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	100 institusi	100 institusi	100 institusi	100 institusi	100 institusi	



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	REALISASI	TARGET PEMBANGUNAN				
				2019	2020	2021	2022	2023	
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Perkim	Tersedianya lembaga pembiayaan infrastruktur.	4 lembaga	4 lembaga	4 lembaga	4 lembaga	4 lembaga	
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	1,82%	1,7%	1,6%	1,5%	1,4%	
11.5.1 (a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia	BPBD	Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB) mencapai 30% hingga tahun 2019.	124	120,3	120,1	120	120	
11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	BPBD	Meningkatnya kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam membangun ketahanan kota terhadap perubahan iklim dan bencana (urban resilience).	provinsi	na	na	na	na	
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	BPBD	Tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	0	na	na	na	29 Titik	
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	tidak tersedia	na	na	na	na	



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	REALISASI	TARGET PEMBANGUNAN				
				2019	2020	2021	2022	2023	
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 46%).	93%	94	95	96	97	
11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	BPBD	Terwujudnya kota hijau yang berketahanan iklim, melalui penyediaan ruang terbuka hijau, paling sedikit di 12 kawasan perkotaan metropolitan dan 20 kota sedang, hingga tahun 2019.	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah	BPBD	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatnya pengelolaan limbah B3 menjadi 150 juta ton pada tahun 2019 (2015: 100 juta ton).	0,094%	0%	0%	0%	0%	



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	REALISASI	TARGET PEMBANGUNAN				
				2019	2020	2021	2022	2023	
12.5.1.(a)	Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang	Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu (reduce, reuse, and recycle/3R) melalui beroperasinya 115 unit recycle center skala kota dengan kapasitas 20 ton per hari hingga tahun 2019 (2015: 1 unit).	0,10%	6,33%	12,55%	18,78%	25%	
12.6.1 (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatnya jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan/SML) hingga tahun 2019.	1 Perusahaan	1 Perusahaan	1 Perusahaan	1 Perusahaan	1 Perusahaan	
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Dinas Lingkungan Hidup, ULP	Dikembangkannya produk ramah lingkungan berupa kategori/kriteria produk yang teregister dalam pengadaan publik (Green Public Procurement, GPP) hingga tahun 2019.	menunggu	na	na	na	na	
12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Dinas Lingkungan Hidup	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	menunggu	na	na	na	na	



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	REALISASI	TARGET PEMBANGUNAN				
				2019	2020	2021	2022	2023	
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	Menurunnya Indeks Risiko Bencana melalui strategi pengurangan risiko bencana tingkat nasional dan daerah hingga tahun 2019.	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	1,82%	1,7%	1,6%	1,5%	1,4%	
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas Lingkungan Hidup	Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi seluas 5,5 juta hektar di dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas hingga tahun 2019 (2015: 1,25 juta hektar).	Na	0	0	0	0	
15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Dinas Lingkungan Hidup	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	na	na	na	na	na	



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	REALISASI	TARGET PEMBANGUNAN			
				2019	2020	2021	2022	2023
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Kepolisian	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	1 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Kepolisian	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Kepolisian	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	47 Kasus (47 orang)	40 Kasus	35 Kasus	30 Kasus	25 Kasus
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	BPS	Meningkatnya upaya keberlanjutan pembangunan sosial yang ditandai dengan terkendalinya kekerasan terhadap anak, perkelahian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan meningkatnya keamanan yang tercermin dalam rendahnya konflik horizontal dan rendahnya tingkat kriminalitas.	Tidak ada data	na	na	na	48,7



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	REALISASI	TARGET PEMBANGUNAN				
				2019	2020	2021	2022	2023	
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	BPS	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)		na	na	na	na	
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	BPS	Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 (2013: 38,62% untuk anak laki-laki dan 20,48% untuk anak perempuan).		na	na	na	na	
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	BPS	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)		na	na	na	na	
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	BPS	Meningkatnya Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menjadi 4,0 pada tahun 2019 (2015: 3,6).	3,7	3,8	3,9	3,95	4,00%	



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	REALISASI	TARGET PEMBANGUNAN				
				2019	2020	2021	2022	2023	
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Bakeuda	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	89,11%	90	91	93	95	
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupa ten/Kota).	Bakeuda	Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga : 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65% (2015 untuk K/L: 74%, Provinsi: 52%, Kabupaten: 30%, Kota:41%).	100%	100%	100%	100%	100%	
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lemb aga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Bakeuda, Bagian Organisasi	Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019 (2015: K/L: 60,24%, Provinsi: 30,30%, Kabupaten/Kota: 2,38%).	60,72 (B)	63,29 (B)	65,86 (B)	68,43 (B)	71,00 (BB)	



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	REALISASI	TARGET PEMBANGUNAN			
				2019	2020	2021	2022	2023
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	ULP	Meningkatnya penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 30%).	7,31%	10,3%	13,6%	17%	20%
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	BPS, Bagian Organisasi, Inspektorat Daerah, BKD	Meningkatnya persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik untuk Kementerian/Lembaga menjadi 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45% pada tahun 2019 (2015: untuk K/L: 47%, Provinsi: NA, Kabupaten/Kota: NA).	61,39%	62,11%	63,22%	64,33%	65,44%
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	BPS, Bagian Hukum, Ombudsman	Meningkatnya persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik untuk Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80% pada tahun 2019.	na	na	na	na	na



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	REALISASI	TARGET PEMBANGUNAN				
				2019	2020	2021	2022	2023	
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	BPS, Setwan	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD (Hasil Pemilu 2014 untuk DPR: 16,6%).	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BPS, Setwan	Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).	10%	11,11%	12,78%	14,44%	16,11%	
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	BPS, Dinas Dukcapil	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	86,73%	100%	100%	100%	100%	
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk	BPS, Dinas Dukcapil	Meningkatnya cakupan pelayanan dasar kepemilikan akte	0	na	na	na	na	



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	REALISASI	TARGET PEMBANGUNAN				
				2019	2020	2021	2022	2023	
	penduduk 40% berpendapatan bawah.		lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 77,4% pada tahun 2019.						
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	BPS, Dinas Dukcapil	Meningkatnya persentase anak yang memiliki akte kelahiran menjadi 85% pada tahun 2019 (2015: 75%).	80,46%	83,35%	86,23%	89,12%	92%	
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	BPS, Diskominfo	Meningkatnya kualitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan adanya sertifikasi PPID.	0	0	0	0	0	



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	REALISASI	TARGET PEMBANGUNAN				
				2019	2020	2021	2022	2023	
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Bagian Hukum	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	tidak ada	1 kebijakan	1 kebijakan	1 kebijakan	1 kebijakan	
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BPS, Bakeuda	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	6,69%	7,52%	8,35%	9,17%	10%	
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	BPS, Bakeuda	Tercapainya rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB di atas 12% per tahun (2015: 10,7%).	0,66%	0,81%	0,95%	1,10%	1,24%	
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	BPS, Bakeuda	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	8,18%	9,89%	11,59%	13,30%	15%	
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Kominfo	Meningkatnya penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) pada	Tidak ada data	na	na	na	na	



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	REALISASI	TARGET PEMBANGUNAN				
				2019	2020	2021	2022	2023	
			tahun 2019 di: - Perkotaan (20 Mbps) menjangkau 71% rumah tangga (2015: 38%) dan 30% populasi (2015: 16%). - Perdesaan (10 Mbps) menjangkau 49% rumah tangga (2015: 26%) dan 6% populasi (2015: 3%).						
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Kominfo	Meningkatnya penetrasi akses bergerak pita lebar (mobile broadband) dengan kecepatan 1 Megabyte per second (Mbps) pada tahun 2019 di: - Perkotaan menjangkau 100% populasi. - Perdesaan menjangkau 52% populasi.	Tidak ada data	na	na	na	na	
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Kominfo	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	62,10%	65%	67,15%	70%	72,5%	
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk	Bappeda dan Litbang	Tersedianya alternatif pembiayaan untuk pembangunan melalui	118 proyek	120	124	129	130	



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	REALISASI	TARGET PEMBANGUNAN				
				2019	2020	2021	2022	2023	
	dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).		skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)/Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU).						
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Bappeda dan Litbang	Tersedianya alokasi dana APBN untuk penyiapan, transaksi dan dukungan Pemerintah bagi proyek KPS/KPBU.	Tidak ada	na	na	na	na	
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	BPS	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	75%	78,75%	82,50%	86,25%	90,00%	
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	BPS	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	93,33%	94,79%	96,26%	97,72%	99,18%	



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	REALISASI	TARGET PEMBANGUNAN			
				2019	2020	2021	2022	2023
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Bappeda	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	40%	42%	44%	47%	50%
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	BPS	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	na	na	na	na	na
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	BPS, Kominfo	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	9149	9500	10000	11000	12500



2.7 Capaian Standar Pelayanan Minimal

2.7.1 Urusan Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM Pendidikan) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal. Pelayanan dasar dalam hal ini adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar peserta didik, yang dibagi ke dalam beberapa jenis pelayanan dasar. Pelayanan dasar dimaksud harus diberikan sesuai dengan mutu yang telah ditentukan, dimana mutu tersebut terkait ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/ atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar Pendidikan sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.

Penerapan SPM Pendidikan sebagaimana diuraikan di atas bertujuan agar seluruh penduduk Kota Pangkalpinang dapat mengikuti pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar atau Pendidikan Kesetaraan. Perhitungan realisasi capaian SPM Pendidikan berdasarkan target jumlah penduduk yang harus dilayani adalah sebagai berikut.

Tabel 2.61

Pencapaian Penerapan Standar Minimal Urusan Pendidikan Tahun 2020

No	Jenis Layanan	Indikator	Capaian	Target (%)	Realisasi (%)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 – 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD dibagi jumlah anak usia 5-6 Tahun	$\frac{6.081}{8.617}$	100	70,57



2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dibagi jumlah penduduk usia 7-15 tahun	$\frac{40.930}{36.857}$	100	111
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dibagi penduduk usia 7-18 tahun	$\frac{1.066}{688}$	100	154,94

- Pada layanan pendidikan dasar terdapat kelebihan penduduk 7-15 tahun yang dilayani sejumlah 4.073 yang merupakan penduduk dari kabupaten lain dan mendapat layanan pendidikan dasar yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang
- Pada layanan pendidikan kesetaraan terdapat kelebihan penduduk 7-18 tahun yang dilayani sejumlah 378 yang merupakan penduduk dari kabupaten lain dan mendapat layanan pendidikan kesetaraan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang
- Capaian SPM layanan pendidikan PAUD di Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 belum mencapai target, yaitu terdapat 2.536 penduduk 56 tahun yang belum dilayani pada jenjang pendidikan anak usia dini. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid-19, banyak orang tua yang memilih untuk tidak memasukkan anaknya ke jenjang pendidikan PAUD, sehingga capaian SPM nya tidak bisa mencapai target 100%.



2.7.2 Urusan Kesehatan

Pada urusan kesehatan terdapat 12 (dua belas) jenis layanan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah kabupaten/kota, yaitu:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus
10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
12. Pelayanan Kesehatan Orang Yang Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh

Berikut ini merupakan pencapaian SPM Kesehatan Tahun 2020:

Tabel 2.62
Pencapaian Penerapan SPM Kesehatan Tahun 2020

No	Jenis Layanan	Indikator	Capaian	Target (%)	Realisasi (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil dibagi jumlah ibu hamil di Kota	$\frac{4.283}{4.689}$	100	91,34
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan dibagi Jumlah ibu bersalin di kota	$\frac{4.244}{4.475}$	100	94,84



No	Jenis Layanan	Indikator	Capaian	Target (%)	Realisasi (%)
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah bayi baru lahir di Kota	$\frac{4.177}{4.361}$	100	95,78
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah balita di Kota	$\frac{14.827}{16.123}$	100	91,96
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak pada usia sekolah dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah anak usia pendidikan dasar di kota	$\frac{14.776}{36.930}$	100	40,01
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah orang usia 15 – 59 tahundi Kota	$\frac{119.391}{136.578}$	100	87,42
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah orang usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah orang usia 60 tahun keatas di Kota	$\frac{11.916}{15.683}$	100	75,98
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah penderita hipertensi	$\frac{28.171}{39.565}$	100	71,20
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah penderita DM	$\frac{4.898}{5.078}$	100	96,46
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah penderita ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dibagi Jumlah penderita ODGJ Berat	$\frac{323}{366}$	100	88,25
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	Jumlah penderita TBC mendapatkan pelayananTBC sesuai standar dibagi Jumlah penderita TBC di Kota	$\frac{3018}{4234}$	100	71,28



No	Jenis Layanan	Indikator	Capaian	Target (%)	Realisasi (%)
12	Pelayanan Kesehatan Orang yang terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIVmendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar dibagi Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV	$\frac{4.674}{6.010}$	100	77,77

2.7.3 Urusan Pekerjaan Umum

Terdapat 2 jenis pelayanan dasar dalam penyelenggaraan urusan ini, sebagai berikut:

- Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- Penyediaan layanan pengolahan air limbah

Tabel 2.63

Pencapaian Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2020

No	Jenis Layanan	Indikator	Capaian	Target (%)	Realisasi (%)
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga yang memperoleh kebutuhan air minum dibagi jumlah warga yang seharusnya memperoleh airminum	$\frac{21.875}{215.378}$	100	10,16
2	Penyediaan layanan pengolahan air limbah	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik dibagi jumlah warga yang seharusnya memperoleh layanan limbah domestik	0	100	0

Pada penyelenggaraan SPM di Bidang Urusan Pekerjaan Umum terdapat 1 jenis layanan yang tidak dapat disediakan pada tahun 2020, yaitu Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik, hal ini disebabkan karena belum ada sarana dan prasarana pengolahan limbah domestik. Selain itu terdapat beberapa permasalahan lain sebagai berikut:



1. Belum maksimalnya pemanfaatan air baku (sungai, kolong) perkotaan untuk kebutuhan pengembangan SPAM (sistem penyediaan air minum). Solusi yang bisa diambil untuk menyelesaikan masalah ini adalah menyusun strategi pengembangan SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan terlindungi.
2. Perlu koordinasi antar dinas terkait PDAM setempat guna mewujudkan SPAM secara optimal. Solusi untuk masalah ini adalah sosialisasi terkait pencapaian target SPM dan pembagian tanggung jawab dalam rangka mencapai target SPM.
3. Perlu peningkatan pelayanan SPAM secara optimal sesuai SPM Permen PU Nomor 1 tahun 2014 tentang Penyediaan Air Wilayah Kab/Kota, target capaian 100% untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapat kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Solusi dari permasalahan ini adalah perencanaan dan pembangunan SPAM di kota dan daerah yang merupakan satu kesatuan system fisik (teknik) dan non fisik dari sarana dan prasarana; dan perlunya sarana air minum yang unit distribusinya melalui perpipaan dan unit pelayanan menggunakan sambungan rumah/sambungan pekarangan, hidran umum dan hidran kebakaran.

2.7.4 Urusan Perumahan Rakyat

Jenis pelayanan yang harus dilaksanakan pada urusan ini ada 2 (dua) sebagai berikut:



1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota

Tabel 2.64

Pencapaian Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2020

No	Jenis Layanan	Indikator	Capaian	Target (%)	Realisasi (%)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi Korban bencana daerah kabupaten/ kota	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	$\frac{0}{30} \times 100\%$	100	0
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni dibagi Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan	$\frac{0}{30} \times 100\%$	100	0

Semua layanan dasar pada Urusan Perumahan tidak ada yang bisa dicapai pada tahun 2020, hal itu disebabkan karena adanya beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Tidak ada penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/ Kota disebabkan karena di Kota Pangkalpinang Tahun 2020 tidak terjadi bencana yang ditetapkan



melalui SK Walikota. Relokasi perumahan daerah rawan bencana dalam hal ini dapat dilakukan apabila ada Surat Penetapan Bupati/Walikota bahwa daerah tersebut tidak layak untuk perumahan.

2. Sementara capaian untuk fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena dampak relokasi program pemerintah daerah Kabupaten Kota tidak tercapai karena tidak ada Program Pemerintah Daerah yang mengharuskan untuk melakukan relokasi.

2.7.5 Urusan Trantibumlinmas

Dalam penyelenggaraan urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat terdapat 5 (lima) jenis layanan dasar, sebagai berikut:

1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Pelayanan Reformasi Rawan Bencana
3. Pelayanan pencegahan kesiapsiagaan terhadap bencana
4. Pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Tabel 2.65

Pencapaian Penerapan SPM Trantibumlinmas Tahun 2020

No	Jenis Layanan	Indikator	Capaian	Target (%)	Realisasi (%)
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara dibagi jumlah warga negara yang seharusnya memperoleh layanan	$\frac{0}{10} \times 100\%$	100	0
2	Pelayanan Informasi	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi	$\frac{200.304}{200.304} \times 100\%$	100	100



No	Jenis Layanan	Indikator	Capaian	Target (%)	Realisasi (%)
	Rawan Bencana	rawan bencana dibagi jumlah warga negara yang seharusnya menerima layanan			
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi jumlah warga negara yang seharusnya menerima layanan	$\frac{55.688}{92.814} \times 100\%$	100	60
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi jumlah warga negara yang seharusnya menerima layanan	$\frac{469}{469} \times 100\%$	100	100
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada tahun x dalam tingkat waktu tanggap (response time) Oleh Dinas Pemadam Kebakaran/Perangkat daerah dibagi jumlah kejadian kebakaran	$\frac{34}{34} \times 100\%$	100	100

2.7.6 Urusan Sosial

Terdapat 5 jenis layanan dasar yang harus diterapkan pada penyelenggaraan urusan Sosial, sebagai berikut:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;



5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten/ Kota.

Tabel 2.66
Pencapaian Penerapan SPM Sosial Tahun 2020

No	Jenis Layanan	Indikator	Capaian	Target (%)	Realisasi (%)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara yang terlayani dibagi jumlah warga negara yang harus dilayani	$\frac{150}{150} \times 100\%$	100	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara yang terlayani dibagi jumlah warga negara yang harus dilayani	$\frac{40}{40} \times 100\%$	100	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara yang terlayani dibagi jumlah warga negara yang harus dilayani	$\frac{20}{20} \times 100\%$	100	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara yang terlayani dibagi jumlah warga negara yang harus dilayani	$\frac{13}{13} \times 100\%$	100	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kab/ Kota	Jumlah Warga Negara yang terlayani dibagi jumlah warga negara yang harus dilayani	$\frac{54}{55} \times 100\%$	100	98,18



- BAB III-

KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Pandemi COVID-19 menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan terutama bagi upaya pencegahan penularan dan menekan kematian. Berdasarkan pola penyebaran COVID-19 saat ini, identifikasi kerentanan dan terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal non pertanian relatif besar, dan daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Tekanan besar pada sistem kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (*health security*), dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan. Penanganan pandemi dan upaya pencegahan dan kuratif COVID-19 menyebabkan pencapaian target-target pembangunan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit terhambat.



Dari sisi ekonomi, COVID-19 memberikan tekanan yang besar terhadap hampir semua aspek kehidupan. Berbeda dengan pengalaman saat SARS dan MERS yang dampaknya singkat dan hanya berpengaruh pada beberapa negara (membentuk pola pemulihan berbentuk huruf V), dampak COVID-19 diperkirakan akan lebih besar dan lama, membentuk huruf U bahkan huruf L atau M. Per tanggal 23 Juni 2021 berdasarkan data Satgas Nasional Covid 19 ada sebanyak 2.033.421 orang yang terinfeksi corona di Indonesia. Tidak berbeda dengan ekonomi dunia, ekonomi Indonesia juga terkena dampak negatif COVID-19. Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (*physical distancing*). Investasi diperkirakan terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Perdagangan internasional terdampak akibat rendahnya aktivitas perdagangan ditingkat global yang juga menyebabkan turunnya harga komoditas. Tidak hanya itu, kesehatan sektor keuangan juga diperkirakan menurun, seiring dengan kemungkinan meningkatnya *non performing loan* (NPL) dan *volatilitas* di pasar keuangan. Berbagai gangguan tersebut berdampak pada sasaran makro dan pembangunan



Bank Dunia (World Bank) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan kembali ke zona positif pada tahun 2021, setelah terkontraksi 2,07% yoy. Dalam laporannya, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh 4,4%. Pertumbuhan kembali berlanjut pada tahun depan dan diperkirakan angka pertumbuhan tahun 2022 bisa menyentuh 5,0%. Perkiraan ini meningkat 0,2% dari prediksi Bank Dunia sebelumnya pada bulan Januari 2021 yang sebesar 4,8%. Meski angkanya meningkat, Bank Dunia memberi catatan bahwa peningkatan angka pertumbuhan ekonomi tak serta merta membuka lapangan pekerjaan bagi sektor-sektor tertentu. Sektor-sektor jasa yang tidak bernilai tambah (*low value-added services*) seperti perdagangan, transportasi, dan di bidang jasa ramah tamah (*hospitality*), akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk pulih. Bank Dunia juga menyarankan Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya tetap waspada tentang adanya ketidakpastian yang membayangi, terutama masih dari kasus Covid-19 yang diperkirakan meningkat di sejumlah wilayah. Pemulihan ekonomi nantinya masih akan sangat bergantung dari kapabilitas masing-masing negara, termasuk Indonesia dalam menjalankan komitmen vaksinasi, besarnya ketergantungan dari perekonomian negara lain, juga kondisi dalam negeri.



3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk tahun 2022 tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2020. Pada awal tahun 2020, pandemi COVID-19 membuat kondisi ekonomi global memburuk yang memberikan dampak juga pada terkontraksinya kondisi ekonomi di Kota Pangkalpinang. Implikasi pandemi COVID-19 di seluruh dunia telah merenggut korban jiwa serta kerugian material sehingga berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut tentunya mengharuskan pemerintah melakukan berbagai upaya untuk melakukan penyelamatan baik dari aspek kesehatan maupun ekonomi yang berfokus pada belanja di sektor kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*) serta penanganan dampak ekonomi yang didalamnya termasuk dunia usaha dan masyarakat terdampak. Pada tahun 2022 kondisi kesehatan masyarakat akibat pandemi COVID-19 diprediksi membaik sehingga perekonomian Kota Pangkalpinang diperkirakan sudah mulai bangkit. Prediksi perbaikan kondisi perekonomian berdasarkan kepada asumsi meningkatnya aktivitas di beberapa sektor lapangan usaha, semakin meluasnya program vaksinasi nasional, dan dimulainya kembali pembangunan proyek-proyek infrastruktur. Hal tersebut menjadi dasar pemulihan ekonomi sebagai salah satu kebijakan prioritas pembangunan ekonomi Kota Pangkalpinang Tahun 2022.



3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. PDRB digunakan sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Selain itu juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai indikator tingkat kesejahteraan masyarakat dan disparitas sosial. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya, sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah/wilayah tersebut.

PDRB Kota Pangkalpinang merupakan gambaran kemampuan Kota Pangkalpinang dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.

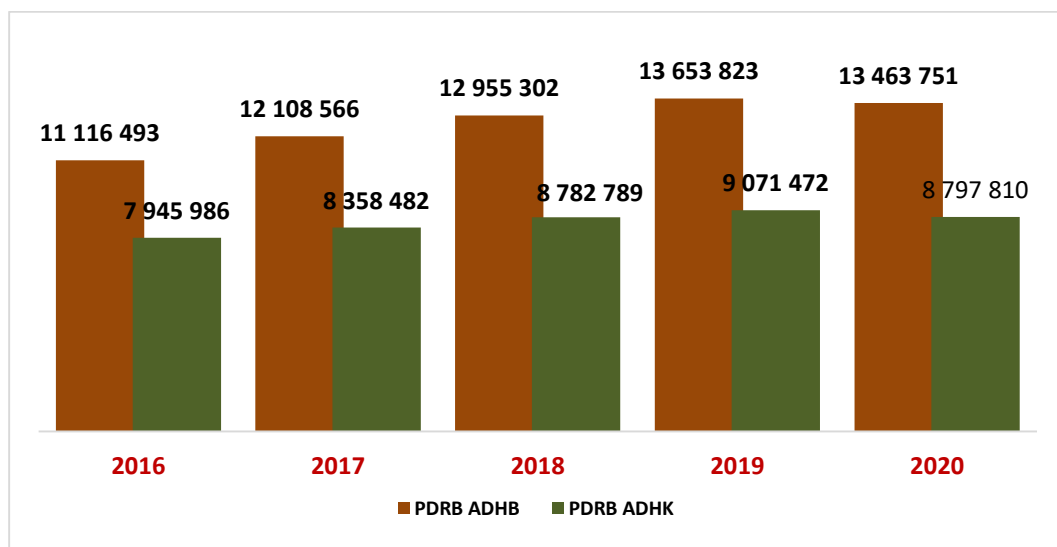
Perkembangan nilai PDRB di Kota Pangkalpinang pada tahun 2019 dan 2020 atas dasar harga berlaku untuk tahun 2020 mencapai 13,46 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini hanya sedikit mengalami kenaikan sebesar 0,24 persen dibanding tahun 2019 yang



mencapai 13,70 triliun rupiah. Rendahnya kenaikan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh dampak pandemic Covid-19 yang melanda dunia sehingga seluruh lapangan usaha perekonomian mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Gambar 3.1

Perkembangan Nilai PDRB Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2020



Sumber : BPS, Pangkalpinang Dalam Angka 2021

Sementara itu, nilai tambah yang mampu diciptakan oleh seluruh lapangan usaha di Kota Pangkalpinang, yang dihitung dengan harga konstan (PDRB ADHK), tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,29 persen atau sebesar 8,79 triliun rupiah dibanding tahun 2019. Pertumbuhan PDRB ADHK biasa disebut dengan pertumbuhan ekonomi, yang menggambarkan kenaikan produksi riil tanpa dipengaruhi inflasi Kota Pangkalpinang. Selama dua tahun terakhir yakni tahun dari 2019 dan 2020, perekonomian Kota Pangkalpinang



mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya.

Struktur perekonomian selain mencerminkan peranan lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB, juga dapat menggambarkan lapangan usaha unggulan yang menggerakkan perekonomian dalam satu wilayah. Peranan setiap lapangan usaha terhadap PDRB dapat dilihat dari sumbangan yang diberikan oleh lapangan usaha tersebut terhadap pembentukan PDRB setiap tahunnya.

Selama lima tahun terakhir (2016-2020) struktur perekonomian Kota Pangkalpinang didominasi oleh 5 (lima) sektor kategori menurut lapangan usaha, diantaranya: lapangan usaha Industri Pengolahan; lapangan usaha Konstruksi; lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan; serta lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Pangkalpinang.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha masih didominasi oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yaitu mencapai 26,04 persen. Selanjutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 12,77 persen, disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 12,19 persen. Berikutnya lapangan usaha



Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 7,44 persen dan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,27 persen.

Gambar 3.2

Kontribusi Terbesar Berdasarkan Lapangan Usaha, 2020



Sumber : BPS, Pangkalpinang Dalam Angka 2021

Selama periode 2016-2020, peranan lapangan usaha Industri Pengolahan mengalami penurunan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2016 kontribusinya mencapai 17,85 persen dan terus turun hingga pada tahun 2019 kontribusinya hanya sebesar 13,17 persen. Pada tahun 2020 peranan lapangan usaha Industri Pengolahan mengalami penurunan yang cukup tajam yakni menjadi 12,77 persen.

**Gambar 3.3****Kontribusi Terbesar Berdasarkan Pengeluaran, 2019**

Sumber : BPS, Pangkalpinang Dalam Angka 2021

Sementara itu, kondisi yang terjadi pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; selama tahun 2016 hingga 2020 peranannya setiap tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016, peranan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; terhadap total PDRB Kota Pangkalpinang sebesar 27,02 persen, kemudian sedikit meningkat 27,54 pada tahun 2017 kemudian mengalami penurunan kemabali 27,32 tahun 2019 dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2020 menjadi sebesar 26,04 persen. Sebagai ibukota provinsi, Pangkalpinang menjadi pusat perdagangan di pulau Bangka. Sebagian besar kantor pusat penjualan mobil dan motor berlokasi di Kota Pangkalpinang. Begitu juga dengan toko grosir berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari serta outlet produk utama lainnya berada di Kota Pangkalpinang. Demikian halnya dengan kegiatan ekspor barang juga dilakukan di Kota Pangkalpinang.



Struktur ekonomi Kota Pangkalpinang dari tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.1. pada tabel tersebut menyajikan 17 kategori lapangan usaha yang memiliki Kontribusi terhadap pembentukan PDRB. Besar kecilnya kontribusi lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB dapat dilihat dari distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB ADHB.

Tabel 3.1.

**Distribusi Persentase PDRB Kota Pangkalpinang Atas Dasar Harga
Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2016-2020**

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,99	4,62	4,91	4,94	5.48
B. Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Industri Pengolahan	17,85	17,23	15,99	13,17	12.77
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,08	0,08	0,11	0.11
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0.03
F. Konstruksi	10,78	11,01	11,3	12,25	12.19
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	27,02	27,54	27,32	27,14	26.04
H. Transportasi dan Pergudangan	6,16	6,29	6,27	6,54	6.27
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,46	3,45	3,48	3,90	4.10
J. Informasi dan Komunikasi	2,84	2,87	3,03	3,35	4.16
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,65	4,56	4,83	4,89	4.65
L. Real Estate	5,28	5,29	5,5	5,43	5.84
M, N. Jasa Perusahaan	0,49	0,50	0,51	0,52	0.47



O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,07	7,12	7,18	7,56	7.44
P.	Jasa Pendidikan	5,54	5,52	5,63	5,91	6.14
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,91	1,92	1,92	2,06	2.14
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,86	1,97	2,02	2,20	2.17
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber: Pangkalpinang Dalam Angka, BPS Kota Pangkalpinang, 2021

Berdasarkan Tabel 3.1 selama periode 2016 – 2020, terdapat 17 lapangan usaha yang menyusun perekonomian Kota Pangkalpinang. Dilihat dari kontribusi lapangan usaha tersebut, sebanyak 12 kategori lapangan usaha yang mempunyai kontribusi terhadap penyusun perekonomian yang meningkat, 2 kategori lapangan usaha yang mempunyai kontribusi yang konstan, yaitu Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan Jasa Perusahaan; dan 1 lapangan usaha yang tidak mempunyai kontribusi terhadap penyusun perekonomian di Kota Pangkalpinang, yaitu Pertambangan dan Penggalan.

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi

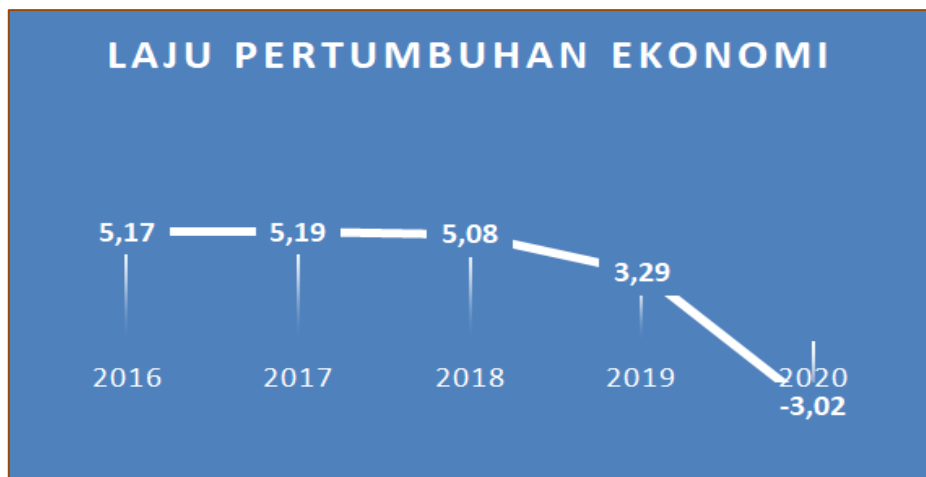
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua



lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan yang positif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya, sebaliknya pertumbuhan yang negatif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar 3.4

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2020



Sumber: Pangkalpinang Dalam Angka, BPS Kota Pangkalpinang, 2021

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 mengalami kontraksi ekonomi Tahun sebelumnya sebesar 3,29%, menjadi -3,02% pada tahun 2020 atau -0,27%. Kontraksi ekonomi ini terjadi di hampir semua kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kontraksi yang cukup tinggi diraih oleh Kabupaten Bangka Barat sebesar -5,43%. Kinerja perekonomian di Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan kabupaten/Kota lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berada di posisi kedua terendah



dari 7 kabupaten/kota. Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode tahun 2017-2020, disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2017-2020

Kabupaten/Kota	Produk Domestik Regional Bruto (Tahun)			
	2017	2018	2019	2020
Bangka Barat	5,26	5,19	7,13	-5,43
Belitung	5,30	5,37	3,42	-2,31
Belitung Timur	4,85	4,21	3,35	-0,66
Pangkalpinang	5,19	5,07	3,34	-3,02
Bangka	5,04	4,51	2,93	-0,73
Bangka Selatan	4,57	4,52	2,61	-1,99
Bangka Tengah	3,46	3,41	1,25	-2,87

Sumber: Pangkalpinang Dalam Angka, BPS Kota Pangkalpinang, 2021 (data diolah)

Selama beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang menunjukkan tren yang cenderung melambat. Namun apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang relatif lebih tinggi. Secara grafis, tren pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2017 sampai dengan 2020 disajikan pada Gambar 3.2. Dalam gambar tersebut menunjukkan bahwa perlambatan pertumbuhan ekonomi, baik di Kota Pangkalpinang maupun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terjadi selama dua tahun terakhir, yaitu Tahun 2019 dan 2020.



Tabel 3.3.

**Laju Pertumbuhan PDRB Kota Pangkalpinang Menurut Lapangan Usaha
(persen), ADHK 2016-2020**

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,13	-5,00	8,83	3,22	5,68
B.	Pertambangan dan Penggalian					
C.	Industri Pengolahan	3,95	3,47	-3,45	-10,74	-4,52
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	13,74	4,88	6,46	31,21	0,92
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,07	7,61	-5,45	2,03	5,60
F.	Konstruksi	6,86	6,71	6,34	10,09	-1,46
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,58	6,62	4,78	2,61	-6,28
H.	Transportasi dan Pergudangan	5,08	8,54	7,28	4,80	-9,32
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,74	6,30	4,33	12,54	-4,75
J.	Informasi dan Komunikasi	9,14	9,11	14,89	17,58	18,38
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,54	2,59	9,96	5,26	-6,72
L.	Real Estate	3,36	4,70	9,41	2,16	4,10
M, N.	Jasa Perusahaan	0,08	2,08	6,94	2,20	-17,70
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,48	4,98	9,88	9,90	-6,77
P.	Jasa Pendidikan	7,67	4,57	9,50	8,71	-0,90
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,65	8,08	4,65	10,76	1,16
R,S,T,U	Jasa Lainnya	9,99	9,46	8,09	11,03	-5,94
	PDRB	5,17	5,19	5,08	3,29	-3,02

Sumber: Pangkalpinang Dalam Angka, BPS Kota Pangkalpinang, 2021



Tingkat Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan pertumbuhan PDRB ADHK dari waktu ke waktu. Apabila kontribusi masing-masing lapangan usaha dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada satu waktu, maka dapat diketahui lapangan usaha mana saja yang menjadi sumber pertumbuhan suatu wilayah. Kondisi ini digambarkan pada Tabel 3.3 diatas yang memperlihatkan bahwa sumber pertumbuhan PDRB Kota Pangkalpinang menurut lapangan usaha selama periode 2017-2020. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa dari tahun 2017 sampai tahun 2020 lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor selalu menjadi sumber pertumbuhan utama PDRB Kota Pangkalpinang meskipun pada tahun 2020 sedikit mengalami penurunan sebesar 0,89 persen.

Pada tahun 2020 empat kategori lapangan usaha yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi berangka positif yaitu lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 0,87 persen kemudian diikuti oleh lapangan usaha real estate 0,21 persen kemudian lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 0,26 persen dan lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,02 persen. Sementara itu terdapat 11 jenis lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif, dan hanya dua lapangan usaha yang tidak berpengaruh terhadap pembentukan PDRB.



c. PDRB Perkapita

PDRB ADHB Kota Pangkalpinang tahun 2020 adalah Rp. 13.463.751 juta, menurun dibandingkan tahun 2019 yang nilainya Rp.13.653.255 juta. Demikian juga dengan PDRB ADHK juga mengalami penurunan dari Rp. 9.071.472 juta di tahun 2019, menjadi Rp. 8.797.810 juta di tahun 2020. Laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -3,02 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena di tahun 2020 terjadi pandemi covid-19 yang berimbas pada hampir seluruh lapangan usaha perekonomian sehingga mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Data statistik ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Pada tahun 2017, PDRB perkapita sebesar Rp. 48,90,- juta meningkat menjadi sebesar Rp.50,05,- juta pada tahun 2018 dan meningkat menjadi sebesar Rp.50,93 juta pada tahun 2019 dan sejalan dengan melemahnya perkembangan perekonomian daerah yang tumbuh negatif, PDRB perkapita pada tahun 2020 turun menjadi Rp.49,77



juta,- hal ini dikarenakan penurunan daya beli masyarakat dampak dari akibat Covid-19.

d. Tingkat Inflasi

Pada tahun 2020, Kota Pangkalpinang mengalami inflasi ringan sebesar 0,52%. Kondisi ini tidak begitu mengganggu keadaan perekonomian karena harga-harga hanya mengalami kenaikan secara umum. Inflasi di Kota Pangkalpinang cenderung terjadi pada bulan Januari, Juni dan Desember sedangkan Deflasi cenderung terjadi pada bulan Februari dan Agustus sebesar 0,19 persen *year on year* (Desember 2016 terhadap Desember 2020). Gambar 3.5 dan 3.6 mengenai Laju Inflasi dan Deflasi Kota Pangkalpinang.

Gambar 3.5

Laju Inflasi di Kota Pangkalpinang (persen) 2016-2020



Sumber: Data Strategis Kota Pangkalpinang 2016-2020, BPS Kota Pangkalpinang



Gambar 3.6

Laju Deflasi di Kota Pangkalpinang (persen) 2016-2020

Sumber: Data Strategis Kota Pangkalpinang 2016-2020, BPS Kota Pangkalpinang

e. Tingkat Investasi

Secara umum perkembangan investasi di Kota Pangkalpinang cukup baik yang ditandai dengan berkembangnya pembangunan yang bernilai investasi dan memberikan dampak baik terhadap perkembangan perekonomian daerah maupun kemudahan-kemudahan bagi masyarakat. Pada tahun 2020 nilai investasi yang masuk ke Kota Pangkalpinang sampai dengan bulan Oktober mencapai sebesar Rp1.656.440.123.552,00. yang masih didominasi investor lokal. Berdasarkan Laporan Kinerja Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 2020, menunjukkan bahwa realisasi investasi PMA dan PMDN



pada tahun 2017 sebesar Rp.880.241.353.176. Sedangkan realisasi investasi periode 2018-2019 secara berturut-turut adalah sebesar Rp259.289.557.336; dan Rp368.638.115.109. Nilai ini jauh di atas target yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023. Dalam RPJMD ditetapkan target investasi Tahun 2018 sebesar Rp1.900.000.000,00 dan Rp.30.000.000.000 di tahun 2019.

Masuknya perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang ritel, real estate dan telekomunikasi menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan peluang kesempatan kerja. Namun demikian masih perlu upaya-upaya percepatan yang lebih terarah, terukur, dan berkesinambungan melalui kebijakan daerah yang mendukung masuknya para investor. Salah satu kebijakan yang telah dirumuskan adalah Rencana Umum Penanaman Modal yang menjadi salah satu panduan terhadap arah pembangunan dan pengembangan investasi di Kota Pangkalpinang serta adanya Peraturan Daerah mengenai Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal. Di sisi lain pelayanan perizinan penanaman modal perlu terus ditingkatkan dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sederhana. Oleh karenanya beberapa langkah strategis yang masih diperlukan antara lain meningkatkan kegiatan kemitraan antara pemerintah dan swasta melalui peningkatan kerjasama promosi investasi serta memberikan kemudahan pelayanan bagi pengembangan



kegiatan usaha melalui penyederhanaan pelayanan perizinan. Di sisi lain pembangunan infrastruktur menjadi sangat penting untuk dikedepankan dalam rangka optimalisasi dan integrasi pembangunan di berbagai sektor yang mendukung kegiatan usaha.

f. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Di Kota Pangkalpinang, secara umum lebih banyak usaha mikro yang berkembang dibandingkan usaha kecil maupun menengah. Persentase usaha mikro pada tahun 2019 sebanyak 66,40 persen, usaha kecil sebanyak 31,77 persen dan usaha menengah hanya 1,83 persen.

Tabel 3.4

Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kota Pangkalpinang

JENIS SARANA PERDAGANGAN	2019	2020
Pasar Tradisional	4	5
Pasar swalayan/supermarket/ toserba	20	56
Hypermarket	1	1
Mall/Plaza/Dept. Store	3	4
Pasar hewan	0	0
JUMLAH	27	69

Sumber: Pangkalpinang Dalam Angka, BPS Kota Pangkalpinang, 2021

Tabel 3.5

Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Menurut Jenisnya di Kota Pangkalpinang, 2019–2020

JENIS SARANA PERDAGANGAN	2019	2020
Mikro	16.219	16.428
Kecil	10.986	11.051
Menengah	719	719
JUMLAH	27.924	28.198

Sumber: Pangkalpinang Dalam Angka, BPS Kota Pangkalpinang, 2021



g. Ekspor dan Impor

Komoditas ekspor dilakukan melalui pelabuhan laut Pangkalbalam. Nilai ekspor pada bulan Mei 2021 bernilai US\$196,91 juta, naik sebesar 157,40 persen dibandingkan nilai ekspor Mei 2020. Nilai ekspor timah naik 177,71 persen, dan nontimah naik 96,85 persen (y-on-y). Dibandingkan dengan bulan sebelumnya (m-to-m), nilai ekspor turun 11,81 persen. Ekspor timah turun 17,06 persen dan ekspor nontimah naik 20,19 persen. Selama Januari-Mei 2021, Korea Selatan menyerap 14,80 persen (US\$100,89 juta) ekspor timah, sedangkan Malaysia menyerap 28,34 persen (US\$41,94 juta) ekspor nontimah. Nilai ekspor lemak dan minyak hewan/nabati (HS 15) pada Januari-Mei 2021 mendominasi sebesar US\$106,07 juta atau 71,66 persen dari jumlah ekspor non timah.

Nilai impor pada bulan Mei 2021 sebesar US\$2,36 juta. Nilai impor tersebut naik 10,86 persen dibanding Mei 2020. Jumlah nilai impor selama Januari-Mei 2021 adalah sebesar US\$5,53 juta. Nilai impor tersebut turun 11,25 persen dibanding Januari-Mei 2021. Impor Januari-Mei 2021 hanya berasal dari impor nonmigas (100 %). Dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, impor Januari-Mei 2020 berasal dari migas dan nonmigas, dimana impor nonmigas meningkat 19,93 persen, sedangkan impor migas turun 100 persen.



Tabel 3.6
Total Ekspor dan Impor Melalui Pelabuhan Pangkalbalam
di Kota Pangkalpinang (Juta US\$)

No	Jenis Data	Bulan/Tahun	
		Januari -Mei 2020	Januari -Mei 2021
1	Ekspor	505,19	829,79
2	Impor	6,23	5,53

Sumber: BPS Kota Pangkalpinang

h. Pengangguran

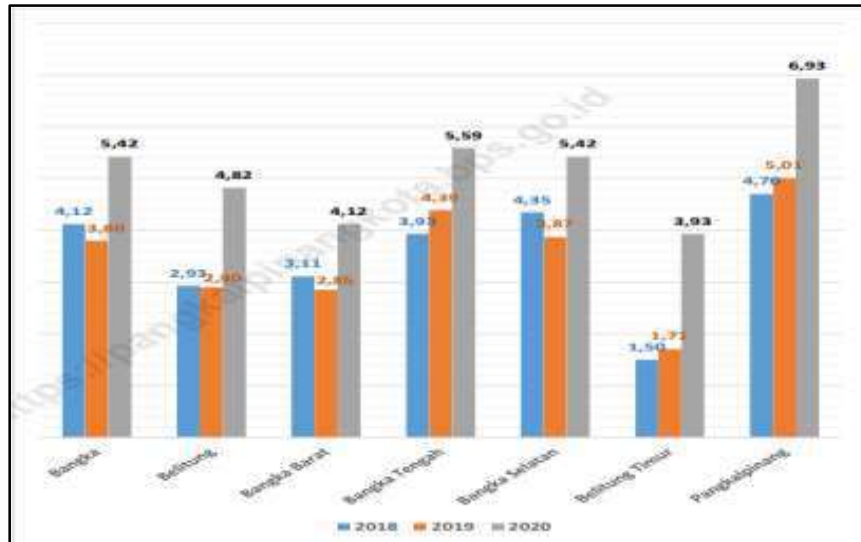
Persentase pengangguran terbuka (TPT) di Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 meningkat dibanding tahun 2019. TPT pada 2019 sebesar 5,01 persen naik menjadi sebesar 6,93 persen pada 2020. Kenaikan angka pengangguran ini disebabkan oleh banyaknya penduduk usia kerja yang bekerja pada beberapa sektor perdagangan dan jasa di Kota Pangkalpinang banyak yang dirumahkan hal ini disebabkan karena di tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang berimbas pada hampir seluruh lapangan usaha.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung (persen), 2018-2020.



Gambar 3.7

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung (persen), 2018-2020



Sumber: Pangkalpinang Dalam Angka, BPS Kota Pangkalpinang, 2021

Proyeksi Bappelitbangda Pada tahun 2019 dan 2020, angka pengangguran diperkirakan dapat ditekan seiring dengan semakin tumbuhnya sektor Perdagangan di Kota Pangkalpinang. Tingginya nilai investasi yang masuk ke Pangkalpinang akan menyebabkan semakin tumbuh dan berkembang sektor perdagangan yang akhirnya akan berdampak terhadap penciptaan lapangan pekerjaan baru.

i. Tingkat Kemiskinan

Dalam mengukur kemiskinan, menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan



adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GK adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari ditambah kebutuhan minimum non makanan yang mencakup perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Dengan pendekatan ini dapat dihitung penduduk yang hidup di bawah Garis Kemiskinan dinyatakan sebagai penduduk miskin atau persentase penduduk yang berada di bawah GK. GK Kota Pangkalpinang cenderung Meningkat. Begitu juga jumlah Penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di Kota Pangkalpinang tahun 2020 meningkat dibandingkan tahun 2019 seperti gambar berikut:



Gambar 3.8

Data Kemiskinan di Kota Pangkalpinang Tahun 2020



Sumber: Data Strategis Kota Pangkalpinang 2016-2020, BPS Kota Pangkalpinang

j. Gini Ratio

Koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Bila Koefisien Gini mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila Koefisien Gini mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Pada prakteknya, angka ketimpangan untuk daerah-daerah yang ketimpangan distribusi pendapatannya tajam berkisar antara 0,50 hingga 0,70. Sedangkan untuk daerah-daerah yang

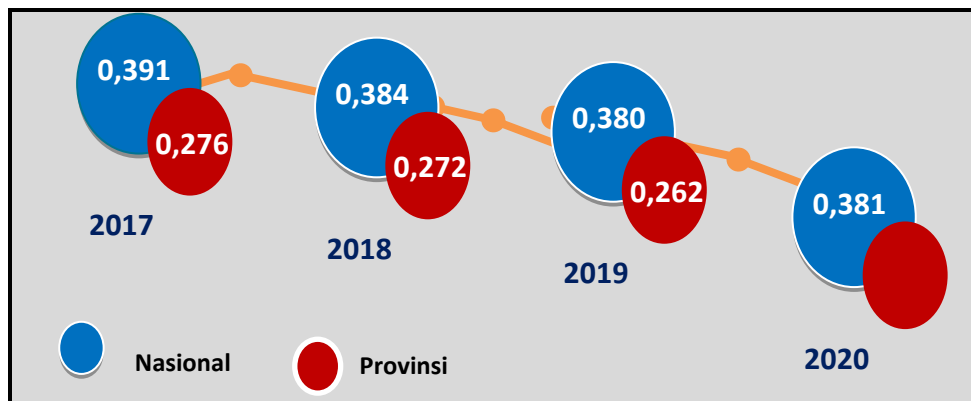


distribusi pendapatannya relatif paling merata berkisar antara 0,20 sampai 0,35.

Koefisien Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 tercatat memiliki nilai Gini Ratio terendah se-Indonesia yaitu sebesar 0,262.

Gambar 3.9

Koefisien Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 - 2020

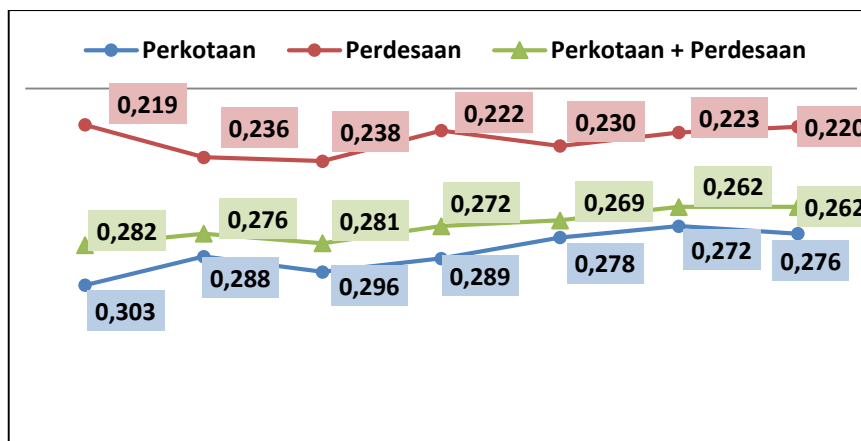


Sumber : BPS Provinsi Kep. Babel

Indeks Gini menurut perkotaan dan perdesaan tahun 2017-2020 sebagaimana yang ditampilkan pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.10

Indeks Gini Menurut Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2017-2020



Sumber : BPS Provinsi Kep. Babel



Koefisien Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun per September 2017-2020 dapat dijelaskan pada tahun 2017 adalah sebesar 0,276, namun mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 0,272. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif rendah. Namun demikian, adanya peningkatan koefisien gini pada tahun 2019 perlu disikapi dengan bijak oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar semakin meratakan distribusi pendapatan masyarakat. Pada tahun 2019 koefisien gini provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,262, angka tersebut merupakan paling rendah dan pada tahun 2020 per Maret masih diangka 0,262 yang artinya pendapatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan semakin merata.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian

3.1.2.1 Tantangan Perekonomian Regional dan Nasional Tahun 2022

Bank Dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2021 ini sebesar 4%. Angka tersebut menguat bila dibandingkan dengan laju perekonomian global pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 4,3%.

Namun demikian, di dalam laporan Proyeksi Ekonomi Global edisi Januari 2021 tersebut, Bank Dunia menilai kinerja perekonomian



tahun ini masih lebih rendah bila dibandingkan dengan proyeksi sebelum pandemi Covid-19 yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi bakal di kisaran 5%. Pandemi kemungkinan akan memperparah perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa dekade ke depan yang sebelumnya telah diperkirakan, hal tersebut juga bakal merusak prospek pengurangan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi pun diperkirakan akan melambat pada tahun 2022 mendatang, yakni menjadi sebesar 3,8%. Bank Dunia menyatakan, meski mengalami pemulihan, prospek perekonomian global ke depan masih diliputi ketidakpastian. Namun, proses vaksinasi serta pengelolaan pandemi yang efektif menjadi kunci utama dalam pemulihan ekonomi ke depan. Menurut lembaga internasional tersebut, negara maju diproyeksi bakal pulih dan tumbuh di kisaran 3,3% pada tahun 2021 dan sebesar 3,5% di tahun 2022.

Hal itu didukung oleh penanganan pandemi dan vaksinasi yang meluas bersamaan dengan kebijakan moneter yang akomodatif, mengimbangi kebijakan fiskal yang diproyeksi akan berkurang. Adapun untuk negara dan perekonomian berkembang, pertumbuhan ekonomi diperkirakan bakal mencapai 5% di 2021 dan melemah menjadi 4,2% di 2020. Pemulihan pun sebagian besar didukung oleh pertumbuhan ekonomi China yang bakal mengalami *rebound* pada tahun ini. Bila tidak menghitung pemulihan China, pertumbuhan ekonomi negara berkembang tahun ini diperkirakan bakal lebih moderat, yakni sebesar



3,5% baik di tahun 2021 maupun 2022. Meski mengalami pemulihan, output agregat dari kinerja perekonomian negara berkembang pada tahun 2022 mendatang masih berada di bawah level 6% yang merupakan proyeksi sebelum Covid-19.

3.1.2.2 Tantangan Perekonomian Kota Pangkalpinang Tahun 2022

Tantangan yang terberat yang dihadapi hampir semua daerah bahkan negara di seluruh dunia pada tahun 2020 lalu adalah wabah pandemi Covid-19. Semua level pemerintahan berupaya untuk mencurahkan energi dan sumberdayanya untuk mengatasi wabah pandemi Covid-19. Faktor yang membuat kita berada dalam kesulitan dan tekanan berat adalah kecepatan penyebaran penyakit menular ini, sementara kita semua belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai perilaku virus penyebabnya. Secara nasional, sampai dengan tanggal 22 Juni 2021 jumlah total kasus infeksi Covid-19 di Indonesia telah mencapai 2.004.445 kasus dengan grafik jumlah kasus harian yang masih menanjak. Penyebaran Covid-19 telah menjangkau semua di 34 provinsi.

Kondisi terkini terkait perkembangan Kasus Covid-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum menunjukkan perkembangan yang membaik, dimana masih terdapat penambahan kasus yang terkonfirmasi positif. Adapun jumlah kasus di Bangka Belitung sampai dengan tanggal 21 Juni 2021 terdapat 20.247 terkonfirmasi positif, 319 orang meninggal dan 19.222 orang sembuh. Dengan demikian, masih



terdapat 706 orang pasien yang masih menjalani perawatan. Kondisi di Kota Pangkalpinang sendiri berdasarkan update per 19 Juni 2021 terdapat 5.694 kasus positif dengan 5.371 diantaranya sudah dinyatakan sembuh, dan 73 orang pasien yang meninggal, dan 209 orang masih menjalani perawatan.

Maka tantangan saat ini adalah mempercepat penyembuhan/penanganan pasien positif dan percepatan vaksinasi secara merata guna mencegah terjadinya kasus positif baru. Adapun upaya dan langkah terbaik adalah memutus rantai penularan dan penyebaran penyakit ini dengan membatasi kontak fisik dan pergerakan penduduk. Namun demikian, permasalahannya tidak hanya selesai pada tahap pencegahan dan penanganan pandeminya saja. Aspek sosial ekonomi masyarakat merupakan dampak jangka panjang yang diakibatkan oleh pandemi ini yang perlu segera diantisipasi.

Berdasarkan kondisi ekonomi global, nasional dan regional yang berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi Kota Pangkalpinang dapat dirumuskan tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan kebijakan ekonomi diantaranya :

Pertama, menghadapi kondisi ekonomi dan sosial yang berubah-ubah, pada umumnya para pelaku usaha lebih cenderung “*wait and see*” dan lebih fokus pada konsolidasi bisnis bertahan dibanding ekspansi, kondisi ini sudah berlangsung dari sejak awal pertengahan tahun 2020



Kedua, angka kemiskinan diupayakan dapat ditekan di bawah angka 4 persen. Untuk itu diperlukan percepatan pengentasan kemiskinan melalui optimalisasi program terkait upaya penanggulangan kemiskinan

Ketiga, reformulasi regulasi terkait perizinan investasi. Kepastian dan kemudahan regulasi akan memberikan keyakinan dan dampak signifikan pada minat berinvestasi.

Keempat, penyederhanaan prosedur perizinan serta optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pelayan perizinan

Kelima, optimalisasi peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah sektor pariwisata, industri dan perdagangan

Keenam, meningkatkan ketahanan pangan dengan menjaga ketersediaan komoditas utama masyarakat serta kestabilan harga bahan tersebut agar lebih terjangkau oleh masyarakat.

Ketujuh, peningkatan peran Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM), sentra industri potensial dan industri kreatif yang berwawasan lingkungan, dengan meningkatkan jumlah komunitas dan klaster IKM berbasis industri kreatif dan pelaku usaha kreatif

Kedelapan, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan membangun sistem pengawasan pajak sebagai sistem pengendalian internal yang handal, meningkatkan kompetensi dan integritas petugas pelayanan pajak, menyediakan sistem informasi pelayanan pajak daerah yang terintegrasi dan mengembangkan sistem informasi manajemen pajak



daerah online, serta Intensifikasi penerimaan retribusi daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pencatatan dan pengelolaan retribusi daerah;

Kesembilan, peningkatan kesempatan kerja, dengan pemberian kesempatan memperoleh pelatihan peningkatan kompetensi kerja dan produktivitas kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja, mengupayakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja

Kesepuluh, peningkatan kualitas, ketersediaan dan pemerataan infrastruktur dasar masyarakat

Kesebelas, kestabilan kondisi keamanan daerah guna memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat

Tabel 3.7

Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kota Pangkalpinang Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022
1	IPM	Nilai	78,22	79,17	79,51
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-3,02	0,83	1,67
3	PDRB Per kapita	Juta/ kapita	61,60	62,42	63,67
4	Indeks Gini		0,277	0,272	0,267
5	Angka Kemiskinan		4,36	4,24	4,12
6	Tingkat Pengangguran Terbuka		6,93	6,74	6,45
7	LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	-6,28	0,50	1,65
8	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	-4,52	0,50	1
9	Nilai Investasi	Rp. M	500	550	600



No	Indikator	Satuan	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022
10	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,92	9,94	9,96
11	Harapan Usia Lama Sekolah	Tahun	13,15	13,31	13,47
12	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,30	73,86	74,17
13	Pengeluaran Perkapita disesuaikan	Ribu Rp/org/tahun	15.663	15.443	15.543

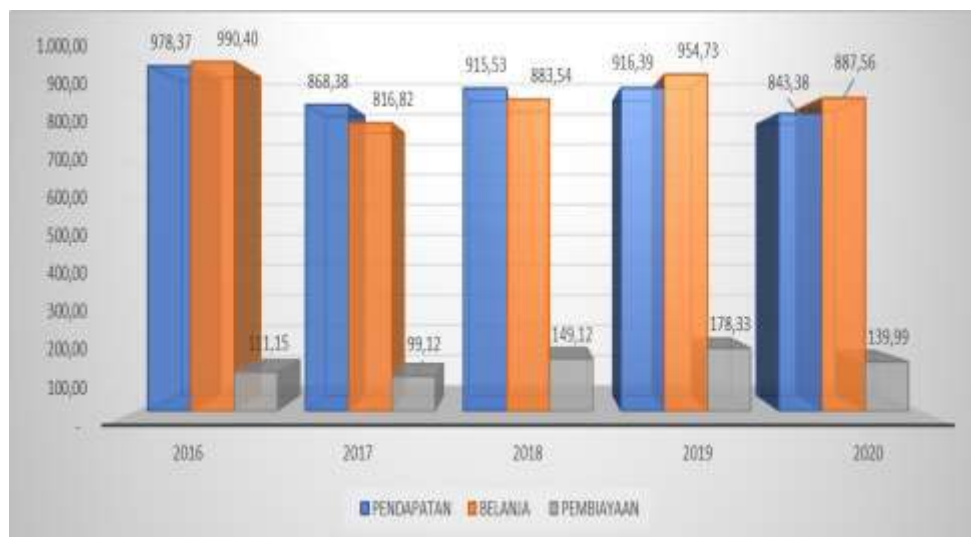
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Secara umum perkembangan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kota Pangkalpinang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 3.11

Perkembangan Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2020 (dalam miliar)



Sumber: Bakuda Kota Pangkalpinang, 2021 (diolah)

Perkembangan pendapatan dan belanja daerah Kota Pangkalpinang mengalami tren relatif menurun dimana pendapatan daerah pada tahun 2016 sebesar Rp.978,371 Miliar menjadi Rp. 843,38 Miliar pada tahun 2020. Penurunan pendapatan ini juga berdampak



pada penurunan kemampuan belanja daerah dari Rp. 990,40 Miliar pada tahun 2016 menjadi Rp.887,56 Miliar pada tahun 2020. Meskipun begitu pembiayaan (netto) daerah justru mengalami tren naik turun akibat dinamika SiLPA yang cukup signifikan. Pada Tahun 2020, pendapatan daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan hampir pada semua pos pendapatan karena adanya pandemi global Covid-19, sehingga dilakukan penyesuaian (*refocusing*) belanja atas pendapatan daerah pada tahun 2020.

Kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Sosial Responsibility (CSR).

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Untuk pendapatan daerah bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah;



3. Transfer Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, dan Bantuan Keuangan;
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Lainnya.

Untuk belanja daerah dialokasikan untuk;

1. Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial;
2. Belanja Modal (BM) yang terdiri dari BM Tanah, BM Peralatan dan Mesin, BM Gedung dan Bangunan, BM Jalan, BM Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya;
3. Belanja Tak Terduga.

Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA), Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan kembali investasi pemerintah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri.

Pendapatan daerah Kota Pangkalpinang dalam 5 (lima) tahun terakhir (2016-2020) mengalami penurunan dari Rp. 978,371 miliar di tahun 2016 menjadi Rp 843,378 miliar di tahun 2020 (rata-rata penurunan sebesar -3,42 % per tahun). Jika dilihat dari komponen Pendapatan Daerah dalam kurun waktu 2016-2020 hampir semua sumber pendapatan daerah mengalami penurunan kecuali PAD.



PAD mengalami kenaikan 1,86 % per tahun dari Rp. 136,257 miliar di tahun 2016 menjadi Rp. 140,964 miliar di tahun 2020. Jika dilihat dari komponen PAD dalam kurun waktu 2016-2020 terlihat bahwa seluruh sumber PAD mengalami tren menurun kecuali Pendapatan Pajak daerah yang mengalami pertumbuhan 5,31 % per tahun dari Rp. 65,954 miliar di tahun 2016 menjadi Rp. 78,015 miliar di tahun 2020. Untuk Pendapatan Retribusi Daerah menurun -2,75 % per tahun dari Rp. 14,369 miliar di tahun 2016 menjadi Rp. 12,755 miliar di tahun 2020. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan menurun -3,03 % per tahun dari Rp. 6,08 miliar di tahun 2016 menjadi Rp. 5,33 miliar di tahun 2020. Sedangkan lain-lain PAD setiap tahun cenderung mengalami penurunan dari Rp. 49,855 miliar di tahun 2016 menjadi Rp. 44,857 miliar di tahun 2020 atau 0,22 % per tahun.

Pendapatan transfer mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar -2,93 % per tahun dari Rp. 777,85 Miliar di tahun 2016 menjadi Rp. 677,13 Miliar di tahun 2020. Penurunan pendapatan transfer tersebut sangat dipengaruhi oleh penurunan transfer pemerintah pusat yang sangat signifikan yang mencapai -4,39 % per tahun dari Rp. 741,811 miliar tahun 2016 menjadi Rp. 594,117 Miliar di tahun 2020. Jika dilihat lebih rinci pada komponen transfer pemerintah pusat, kontribusi terbesar penyumbang terbesar berasal dari dana perimbangan dengan kontribusi rata-rata mencapai 99%. Adapun Dana perimbangan itu sendiri secara agregat dari tahun 2016-



2020 mengalami rata-rata penurunan sebesar -5,52 % per tahun. Semua sumber dana perimbangan mengalami penurunan antara lain Dana Alokasi Umum rata-rata menurun sebesar -0,88 % per tahun dan Dana Alokasi Khusus mengalami rata-rata penurunan sebesar -6,93 % per tahun, kecuali Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak secara rata-rata mengalami kenaikan sebesar 2,89 % per tahun.

Untuk Pendapatan transfer antar daerah dalam kurun waktu 2016-2020 mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 35,4 % per tahun dari Rp. 36,044 miliar di tahun 2016 menjadi Rp. 83,014 miliar di tahun 2020. Adapun kontribusi terbesar pendapatan transfer antar daerah berasal dari Pendapatan Bagi Hasil. Pendapatan Bagi Hasil selama 5 (lima) tahun (2016-2020) meningkat 34,32 % per tahun dari Rp. 36,044 miliar di tahun 2016 menjadi Rp. 79,346 miliar di tahun 2020. Sedangkan pendapatan transfer antar daerah dari bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi mengalami peningkatan sebesar 100% per tahun, dari sebelumnya di tahun 2016-2019 tidak ada penerimaan menjadi Rp. 3,668 miliar di tahun 2020 yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi.

Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah secara agregat dari tahun 2016-2020 juga turun dengan rata-rata penurunan sebesar -7,81 % per tahun dari Rp. 64,258 miliar di tahun 2016 menjadi Rp. 25,28 miliar di tahun 2020. Secara lebih rinci rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.8
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2020 (juta)

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	PENDAPATAN	978.371	868.376	915.529	916.390	843.378	-3,42
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	136.257	173.947	167.132	155.116	140.964	1,86
1.1.1	Pajak Daerah	65.954	84.002	85.749	90.644	78.015	5,31
1.1.2	Retribusi Daerah	14.369	13.297	13.217	12.022	12.755	-2,75
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.080	6.176	5.727	5.933	5.338	-3,03
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	49.855	70.472	62.438	46.517	44.857	0,22
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	777.855	654.409	725.406	717.216	677.131	-2,93
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	741.811	571.589	665.150	631.623	594.117	-4,39
1.2.1.1	Dana Perimbangan	741.811	571.589	665.150	631.623	565.472	-5,52
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	49.745	39.676	64.727	67.239	43.545	2,89
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	451.407	443.477	442.797	476.257	432.562	-0,08
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	240.659	88.436	157.627	88.127	89.365	-6,93
1.2.1.3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	-	28.645	100,00
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	0
1.2.1.3.2	Dana Insentif Daerah	-	-	-	-	28.645	100
1.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	36.044	82.820	60.256	85.593	83.014	35,39
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	36.044	82.820	60.256	85.593	79.346	34,32



No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	3.668	100,00
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	-	-	3.668	100,00
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	-	-	-	-	0
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	64.258	40.020	22.991	44.058	25.282	-7,81
1.3.1	Pendapatan Hibah	23.956	-	-	22.510	25.282	-21,92
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	0
1.3.3	Pendapatan Lainnya	40.302	40.020	22.991	21.548	-	-12,38

Sumber: Bakuda Kota Pangkalpinang (data diolah)



Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir tahun 2016-2020 realisasi belanja daerah mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan mencapai -2,08 % per tahun dari Rp. 990,40 miliar di tahun 2016 turun menjadi Rp. 887,56 miliar di tahun 2020. Penurunan belanja tersebut seirama dengan menurunnya pendapatan daerah pada kurun waktu yang sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Jika dilihat lebih rinci, meskipun belanja mengalami penurunan namun pos belanja operasi dan belanja tak terduga mengalami tren peningkatan. Belanja Operasi pada kurun waktu tersebut mengalami fluktuasi meningkat dengan rata-rata peningkatan mencapai 2,7% per tahun dari Rp. 653,095 miliar di tahun 2016 menjadi Rp.709,045 miliar di tahun 2020. Kontribusi penyumbang terbesar belanja operasi berasal dari belanja pegawai yang rata-rata mencapai 64,95% dari total belanja operasi yang ada. Berikutnya adalah belanja barang dan jasa yang rata-rata berkontribusi sebesar 31,70% dari total belanja operasi yang ada. Sisanya yang rata-rata berkisar 3% merupakan kontribusi dari belanja hibah dan bantuan sosial.

Adapun pos di Belanja Operasi yang meningkat signifikan meskipun secara nominal tidak terlalu signifikan ialah Belanja Bantuan Sosial. Belanja Bantuan Sosial di tahun 2016 sebesar Rp. 424 juta meningkat menjadi Rp 3,559 miliar di tahun 2020 (406,6%). Belanja Hibah mempunyai trend meningkat namun berfluktuatif dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 25 %. Yang secara nominal naik signifikan adalah belanja barang dan jasa dimana



mengalami peningkatan dari Rp. 180,32 miliar di Tahun 2016 menjadi Rp. 279,57 miliar di Tahun 2020. Adapun belanja pegawai justru mengalami penurunan sebesar -2,15 % per tahun dengan tujuan untuk bisa meningkatkan proporsi belanja publik kepentingan masyarakat.

Berbeda dengan Belanja Operasi, Belanja Modal mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar -14,8 % miliar per tahun dari Rp. 336,343 miliar (2016) menjadi Rp. 162,795 miliar (2020). Adapun belanja modal terbesar digunakan untuk belanja jalan, irigasi dan jaringan yang pada tahun 2020 mencapai Rp. 74,86 miliar atau setara dengan 45,9 % dari keseluruhan belanja modal yang ada di Tahun 2020.

Selain belanja operasi dan belanja modal, terdapat belanja tak terduga dan belanja transfer yang relative mengalami peningkatan. Belanja transfer hanya muncul di tahun 2020 sebesar Rp. 1,349 miliar. Sedangkan belanja tak terduga meningkat cukup signifikan mencapai rata-rata 96,58% per tahun dari Rp. 962 juta di tahun 2016 menjadi Rp. 14,370 miliar di tahun 2020. Peningkatan belanja tak terduga di tahun 2020 tersebut sangat dipengaruhi oleh kebijakan belanja penanganan Covid-19 di tahun 2020 yang masuk dalam pos belanja tak terduga.

Keseluruhan realisasi belanja daerah Kota Pangkalpinang tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.9
Realisasi Penggunaan Anggaran Belanja Daerah
Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2020 (Juta rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
2	BELANJA	990.401	816.820	883.544	954.727	887.560	-2,08
2.1	BELANJA OPERASI	653.095	565.138	655.716	703.611	709.045	2,7
2.1.1	Belanja Pegawai	453.096	399.627	419.713	464.715	406.485	-2,15
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	180.321	149.001	199.467	224.402	279.570	13,4
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	18.491	15.603	33.606	11.759	19.429	25
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	424	119	2.047	1.938	3.559	406,6
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	764	787	883	798	-	1,4
2.2	BELANJA MODAL	336.343	251.134	227.829	251.116	162.795	-14,89
2.2.1	Belanja Modal (Tanah)	6	797	6.511	9.023	9.881	3.487,1
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	20.001	24.757	31.392	58.137	46.277	28,8
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	55.783	167.947	17.880	28.130	17.053	166,4
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	243.602	45.278	152.314	133.813	74.861	24,7
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	16.951	3.931	19.732	12.289	14.720	76,8
2.2.6	Belanja Modal BLUD	-	2.633	-	798	-	-
2.2.7	Belanja Modal Bersumber dari Dana KAPITASI	-	1.471	-	1.307	-	-
2.2.8	Belanja Modal BOS	-	4.320	-	7.619	-	-



NO	URAIAN	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	962	549	-	1	14.370	96,58
2.3.1	Belanja Tak Terduga	962	549	-	1	14.370	96,58
2.4	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-	1.349	100,00
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	-	-	-	-	-	
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-	-	0,00
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-	-	0,00
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	-	-	-	-	1.349	100,00
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	-	-	-	-	-	0,00
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	-	-	-	-	1.349	100,00
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.030)	51.556	31.985	(38.337)	(44.182)	-192,7

Sumber : Bakeuda Tahun 2021 (diolah)



Dalam lima tahun terakhir dari tahun 2016-2020 perkembangan pembiayaan (netto) daerah Kota Pangkalpinang trennya relatif meningkat. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh meningkatnya penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA tahun sebelumnya. Adapun pengeluaran pembiayaan mengalami penurunan hingga -100%.

Penerimaan pembiayaan naik dengan rata-rata 1,85% pertahun (2016-2020) yang seluruhnya dari SiLPA dimana SiLPA tahun 2016 sebesar Rp. 130,10 miliar menjadi Rp. 139,995 miliar di Tahun 2020. SiLPA terbesar terjadi di Tahun 2019 mencapai Rp. 179,832 miliar. Secara keseluruhan SiLPA masih perlu ditekan sekecil mungkin hingga SiLPA yang tersisa berupa SiLPA hasil penghematan belanja. Untuk penurunan pengeluaran pembiayaan dipengaruhi oleh menurunnya penyertaan modal pemerintah.

Secara lebih rinci, perkembangan Pembiayaan Daerah dan rata-rata pertumbuhan APBD Kota Pangkalpinang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 3.10
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2020 (Juta rupiah)

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	PENDAPATAN	978.371	868.376	915.529	916.390	843.378	-3,42
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	136.257	173.947	167.132	155.116	140.964	1,86
1.1.1	Pajak Daerah	65.954	84.002	85.749	90.644	78.015	5,31
1.1.2	Retribusi Daerah	14.369	13.297	13.217	12.022	12.755	-2,75
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.080	6.176	5.727	5.933	5.338	-3,03
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	49.855	70.472	62.438	46.517	44.857	0,22
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	777.855	654.409	725.406	717.216	677.131	-2,93
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	741.811	571.589	665.150	631.623	594.117	-4,39
1.2.1.1	Dana Perimbangan	741.811	571.589	665.150	631.623	565.472	-5,52
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	49.745	39.676	64.727	67.239	43.545	2,89
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	451.407	443.477	442.797	476.257	432.562	-0,08
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	240.659	88.436	157.627	88.127	89.365	-6,93
1.2.1.3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	-	28.645	100,00
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	0
1.2.1.3.2	Dana Insentif Daerah	-	-	-	-	28.645	100
1.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	36.044	82.820	60.256	85.593	83.014	35,39



No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	36.044	82.820	60.256	85.593	79.346	34,32
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	3.668	100,00
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	-	-	3.668	100,00
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	-	-	-	-	0
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	64.258	40.020	22.991	44.058	25.282	-7,81
1.3.1	Pendapatan Hibah	23.956	-	-	22.510	25.282	-21,92
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	0
1.3.3	Pendapatan Lainnya	40.302	40.020	22.991	21.548	-	-12,38
2	BELANJA	990.401	816.820	883.544	954.727	887.560	-2,08
2.1	BELANJA OPERASI	653.095	565.138	655.716	703.611	709.045	2,6
2.1.1	Belanja Pegawai	453.096	399.627	419.713	464.715	406.485	-2,15
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	180.321	149.001	199.467	224.402	279.570	13,40
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	0
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	0
2.1.5	Belanja Hibah	18.491	15.603	33.606	11.759	19.429	25
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	424	119	2.047	1.938	3.559	406,6
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	764	787	883	798	-	1,40
2.2	BELANJA MODAL	336.343	251.134	227.829	251.116	162.795	-14,8
2.2.1	Belanja Modal (Tanah)	6	797	6.511	9.023	9.881	3.487,1
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	20.001	24.757	31.392	58.137	46.277	28,8
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	55.783	167.947	17.880	28.130	17.053	166,4



No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	243.602	45.278	152.314	133.813	74.861	24,7
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	16.951	3.931	19.732	12.289	14.720	76,80
2.2.6	Belanja Modal BLUD	-	2.633	-	798	-	-
2.2.7	Belanja Modal Bersumber dari Dana KAPITASI	-	1.471	-	1.307	-	-
2.2.8	Belanja Modal BOS	-	4.320	-	7.619	-	-
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	962	549	-	1	14.370	-
2.3.1	Belanja Tak Terduga	962	549	-	1	14.370	-
2.4	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-	1.349	100
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	-	-	-	-	-	
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-	-	0
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-	-	0
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	0
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	-	-	-	-	1.349	100
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	-	-	-	-	-	-
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	0
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	-	-	-	-	1.349	100
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-	0
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.030)	51.556	31.985	(38.337)	(44.182)	-
3	PEMBIAYAAN	111.145	99.115	149.118	178.332	139.995	9,43
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	130.101	99.115	150.618	179.832	139.995	6,35
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	130.101	99.115	150.618	179.832	139.995	6,35



No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	0
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	-	-	-	-	-	0
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-	0
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	0
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-	-	-	-	0
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	18.956	-	1.500	1.500	-	-
3.2.1	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	-	-	-	-	-	0
3.2.2	Penyertaan modal daerah;	18.956	-	1.500	1.500	-	-
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan;	-	-	-	-	-	0
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-	0
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	0
	PEMBIAYAAN NETTO	111.145	99.115	149.118	178.332	139.995	9,43

Sumber: Bakuda Kota Pangkalpinang, 2021 (diolah)



Dalam melakukan proyeksi pendapatan Kota Pangkalpinang dilakukan dengan menggunakan pendekatan angka rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan tahun 2016 hingga 2020 (APBD) yang disesuaikan dengan mempertimbangkan target APBD yang termuat dalam RKPD 2021 Kota Pangkalpinang. Selain itu proyeksi dari sumber DAK di tahun 2022 dan 2023 dikeluarkan dari analisis. Hal ini dilakukan agar proyeksi pendapatan Kota Pangkalpinang ini sinkron dengan RKPD 2021 dan tidak bias serta mendekati proyeksi yang logis dengan melihat target-target pendapatan yang mampu dicapai. Hasil analisis dan prakiraan sumber-sumber pendapatan daerah, pagu serta proyeksi pendapatan daerah tahun 2022 sampai dengan 2022 disajikan dalam tabel berikut :



Tabel 3.11

Proyeksi Pendapatan Kota Pangkalpinang Tahun 2021-2023 (dalam jutaan)

No	Uraian	Realisasi		Proyeksi Pertumbuhan (%)	Proyeksi		
		2019	2020		2021	2022	2023
1	PENDAPATAN	916.390,34	843.377,90	1,43	890.703,39	801.360,50	880.200,04
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	155.116,32	140.964,40	10,14	137.417,68	161.724,33	188.365,78
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	90.644,30	78.015,23	15,00	79.350,00	91.252,50	104.940,38
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	12.021,71	12.754,65	20,00	13.879,99	16.655,99	19.987,19
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.932,83	5.337,81	15,00	6.018,00	6.920,70	7.958,81
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	46.517,48	44.856,71	15,00	38.169,69	46.895,14	55.479,41
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	717.215,74	677.131,30	0,72	753.285,70	639.636,16	691.834,25
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	631.622,88	594.117,13	0,44	691.735,70	563.821,76	602.066,25
1.2.1.1	Dana Perimbangan	631.622,88	565.471,97	-0,08	653.855,25	525.941,30	564.185,80
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	67.239,49	43.544,54	20,00	49.067,36	62.880,83	75.656,99
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	476.256,56	432.562,50	5,50	438.919,88	463.060,48	488.528,80
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	88.126,84	89.364,93	0,00	165.868,01	-	-
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	-	-	0,00	37.880,46	37.880,46	37.880,46
1.2.1.3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	28.645,16	-100,00	-	-	-
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	0,00	-	-	-



No	Uraian	Realisasi		Proyeksi Pertumbuhan (%)	Proyeksi		
		2019	2020		2021	2022	2023
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	-	28.645,16	10,00	-	-	-
1.2.1.4	Dana Desa	-	-	0,00	-	-	-
1.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	85.592,85	83.014,17	2,64	61.550,00	75.814,40	89.768,00
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	85.592,85	79.346,17	4,20	61.550,00	75.814,40	89.768,00
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	-	3.668,00	-100,00	-	-	-
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	3.668,00	-100,00	-	-	-
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	-	0,00	-	-	-
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	44.058,29	25.282,20	0,00	-	-	-
1.3.1	Pendapatan Hibah	22.509,84	25.282,20	0,00	-	-	-
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	0,00	-	-	-
1.3.3	Pendapatan Lainnya	21.548,45	-	0,00	-	-	-

Sumber: Bakuda Kota Pangkalpinang, 2021 (diolah)



Penerimaan pendapatan daerah pada tahun 2022-2023 ditargetkan naik $\pm 1,43\%$ pertahun dari tahun dasar 2020. Jika dilihat pada seluruh komponen pendapatan daerah, hampir seluruhnya ditargetkan meningkat. Seluruh komponen pendapatan umumnya mulai membaik mendekati atau sedikit melebihi kondisi 2019 pada tahun 2022. Oleh karena itu umumnya kondisi 2021 relatif lebih rendah dibanding tahun 2019 dan mulai positif di tahun 2022.

PAD diproyeksi naik 10,14% per tahun dari tahun dasar 2020 dimana pada realisasi tahun 2020 hasil refocusing sebesar Rp. 140,964 miliar meningkat hingga Rp. 188,36 miliar ditahun 2023. Adapun realisasi tahun 2019 mencapai Rp. 155,116 miliar. Target pertumbuhan PAD tersebut didasarkan asumsi bahwa Pendapatan Pajak Daerah naik 15 % per tahun, Pendapatan Retribusi Daerah naik 20 % per tahun, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan naik 15 % per tahun dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan naik 15 % per tahun.

Target peningkatan pajak daerah ditentukan dengan asumsi bahwa seluruh potensi-potensi pajak yang hilang dapat dipungut. Selain itu dengan adanya potensi investasi yang cukup besar dengan diimplementasikannya sistem OSS yang memudahkan proses perizinan, maka efek turunan dari investasi tersebut sedikit banyak akan meningkatkan potensi pendapatan pajak daerah yang bisa dipungut. Dengan mendasarkan hal tersebut maka pendapatan pajak daerah ditargetkan sebesar Rp. 79,350 miliar di tahun 2021 meningkat



menjadi Rp. 104,9 miliar di Tahun 2023. Adapun realisasi Tahun 2019 mencapai Rp. 90,644 miliar dan realisasi Tahun 2020 turun menjadi sebesar Rp. 78,015 miliar.

Sumber PAD lainnya yaitu pendapatan retribusi diproyeksikan naik sebesar $\pm 20\%$ per tahun, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diproyeksikan naik sebesar $\pm 15\%$ per tahun, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah juga ditargetkan meningkat dengan rata-rata peningkatan $\pm 15\%$ per tahun. Adapun target pendapatan retribusi daerah Tahun 2021 sebesar Rp. 13,879 miliar dan menjadi Rp. 19,987 miliar di Tahun 2023, target pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2021 sebesar Rp. 6,018 miliar di Tahun 2021 dan menjadi Rp. 7,959 miliar di Tahun 2023, dan target lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di Tahun 2021 sebesar Rp. 38,169 miliar dan meningkat menjadi Rp. 55,479 miliar di Tahun 2023.

Proyeksi pendapatan transfer diperkirakan akan relatif tetap namun cenderung sedikit meningkat sebesar 0,72% per tahun dari Rp. 753,286 miliar di Tahun 2021 menjadi Rp. 691,834 miliar di Tahun 2023. Sebagai catatan proyeksi pendapatan transfer dilakukan dengan mengeluarkan DAK dan bantuan keuangan provinsi di Tahun 2022 dan 2023.

Oleh karena adanya Pandemi Covid-19 yang berefek pada lesunya perekonomian nasional dan global yang diperkirakan masih akan berlangsung hingga beberapa tahun kedepan, dan kemungkinan akan



mulai normal ditahun 2023 maka skema proyeksi pendapatan transfer pemerintah pusat yaitu:

a. Dana Perimbangan:

- 1) Nilai Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak berfluktuatif dengan pertumbuhan $\pm 20\%$ dari tahun dasar 2020. Adapun dana bagi hasil tahun 2021 diperkirakan akan sedikit meningkat dibandingkan realisasi 2020, kemudian meningkat menjadi Rp. 75,657 miliar pada Tahun 2023;
- 2) Nilai Dana Alokasi Umum diproyeksikan akan meningkat 5,5 % per tahun dari tahun dasar 2020, dimana target DAU di Tahun 2021 mencapai Rp. 438,92 miliar dan terus meningkat hingga Rp. 488,53 miliar di Tahun 2023.
- 3) Dana Alokasi Khusus di Tahun 2021 dikeluarkan dari proyeksi Tahun 2022 hingga 2023.

b. Dana Insentif Daerah diproyeksikan nilainya tetap dari tahun 2021 hingga tahun 2023 yang sebesar Rp. 37,880 miliar;

c. Dana Penyesuaian, dikeluarkan dari proyeksi;

Pendapatan transfer antar daerah tahun 2021-2023 diproyeksikan mengalami sedikit peningkatan sebesar 2,64% per tahun dari tahun dasar 2020, dimana Tahun 2021 sebesar Rp. 61,55 miliar menjadi Rp. 89,768 miliar di Tahun 2023. Peningkatan tersebut dipengaruhi mulai normalnya perekonomian baik skala lokal maupun nasional yang dapat mengerakkan ekonomi wilayah sehingga pendapatan bagi hasil dapat meningkat pula.



3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan hasil analisa terhadap tantangan dan prospek perekonomian untuk meningkatkan pendapatan daerah diperlukan upaya optimalisasi pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik daerah serta optimalisasi BUMD. Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kota Pangkalpinang masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD.

Dari hasil evaluasi selama ini terjadi beberapa kendala yang dialami dalam meningkatkan pendapatan khususnya dikomponen pendapatan asli daerah yaitu:

- a. Belum sepenuhnya sumber-sumber pendapatan daerah memiliki buku potensi sehingga dalam penetapan target pendapatan masih bersifat *line item budgeting*;
- b. Terbatasnya sumber-sumber pendapatan asli daerah;
- c. Belum optimalnya manajemen pendapatan asli daerah;
- d. Kurangnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi;
- e. Belum optimalnya pemberdayaan aset daerah;



- f. Belum optimalnya koordinasi internal maupun eksternal dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 diarahkan pada :

- a. Melanjutkan dan memperbaiki program inovasi yang telah dilakukan serta menggali inovasi baru dalam intensifikasi Pajak Daerah
- b. Melakukan penyusunan kajian potensi pajak dan retribusi daerah
- c. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien yang pada akhirnya akan mendatangkan Pendapatan Daerah melalui Retribusi Daerah atau Pendapatan Sewa;
- d. Meningkatkan koordinasi antara OPD yang mengelola pendapatan, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terkait bidang pendapatan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan dana transfer dari Pusat dan Provinsi kepada Kota Pangkalpinang
- e. Mengoptimalkan kesiapan dan kelengkapan data dan informasi pendukung yang diperlukan yang menjadi penentu dalam penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
- f. Pemberian *Reward* dan *Punishment* dengan menerapkan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak dan memberikan *reward* kepada wajib pajak maupun petugas pajak yang telah melaksanakan kewajibannya tepat waktu dan melampaui target



- g. Memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- h. Melakukan peningkatan kompetensi aparatur pemungut Pajak/Retribusi Daerah
- i. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah
- j. Mengevaluasi dan meninjau kembali Perda-perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan kondisi dan perubahan peraturan perundangan
- k. Meningkatkan kerjasama dan sinergi dengan berbagai pihak yang terkait seperti POLRI, Kejaksaan, dan pihak terkait lainnya dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Daerah

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Paradigma dalam prinsip penggunaan anggaran belanja adalah mengubah prinsip dari *money follow function* menjadi *money follow program* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang. Artinya, program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran. Hal ini juga yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan pembangunan tahun 2022. Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, belanja operasi dan belanja tidak terduga tidak berbanding lurus dengan peningkatan



pendapatan daerah. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah Kota Pangkalpinang yang berfluktuatif dan cenderung menurun setiap tahun

Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2022, sebagai berikut

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat. Komponen belanja langsung wajib dan mengikat meliputi honorarium pegawai honorer/tidak tetap; belanja jasa kantor listrik, air, BBM, telepon/internet; belanja premi asuransi; belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir; dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor
2. Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar :
 - a. Pelaksanaan 9 prioritas pembangunan utama Kota Pangkalpinang tahun 2022, yaitu 1) Pemantapan Reformasi Birokrasi; 2) Peningkatan pelayanan publik; 3) Perwujudan kualitas pendidikan berbasis karakter; 4) Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan masyarakat; 5) Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas; 6) Rehabilitasi kerusakan lingkungan hidup; 7) Perwujudan kemudahan investasi untuk pengembangan sektor pariwisata, industri dan perdagangan; 8)



Percepatan pengentasan kemiskinan; dan 9) Peningkatan kualitas angkatan kerja lokal

- b. Pelaksanaan 7 prioritas pembangunan penunjang Kota Pangkalpinang tahun 2022 yaitu 1) Peningkatan nilai tambah sektor unggulan melalui penguatan sektor industri pengolahan dan UMKM; 2) Pengembangan potensi wisata daerah; 3) Peningkatan pengelolaan tata kota wilayah; 4) Peningkatan kesejahteraan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak; 5) Peningkatan kualitas organisasi kepemudaan dan olahraga; 6) Penanggulangan bencana alam; dan 7) Optimalisasi perlindungan keamanan dan kenyamanan masyarakat
- c. Pemenuhan sasaran pembangunan dalam rangka perwujudan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018-2023
- d. Pemenuhan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) kewenangan kota meliputi 29 jenis SPM yang mencakup pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis, dan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,



pendidikan kesetaraan, pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik, penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota, pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar diluar panti, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota.

3. Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari total belanja APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan
4. Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD
5. Mengakomodir hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil penyerapan aspirasi melalui reses



6. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.
7. Penggunaan belanja operasi seperti belanja hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
8. Belanja daerah berupa belanja operasi setiap Perangkat Daerah (PD) diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023
9. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.

Proyeksi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas dilakukan untuk mengetahui estimasi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama yang harus dianggarkan. Oleh karena itu tidak semua jenis belanja merupakan Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas.



Dalam melakukan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka yang harus dihitung diawal ialah proyeksi besaran beberapa belanja operasi (belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial), belanja transfer (belanja transfer bagi hasil dan belanja transfer bantuan keuangan), dan belanja tak terduga serta pengeluaran pembiayaan yang ada.

Berdasarkan hasil analisis, proyeksi Belanja Operasi khususnya belanja pegawai ditargetkan naik $\pm 2,5\%$ per tahun. Kenaikan belanja pegawai tersebut bertujuan untuk mengakomodir kenaikan gaji berkala dan penambahan jumlah pegawai tiap tahunnya. Untuk belanja hibah diproyeksikan turun sebesar -10% pertahun dari realisasi 2020 dimana proyeksi di Tahun 2021 sebesar Rp. 7,882 miliar menjadi Rp. 6,384 miliar di Tahun 2023. Belanja tak terduga dialokasikan pada tahun 2021 saja, sedangkan tahun 2022 dan 2023 tidak terdapat lokasi belanja tak terduga. Dari pos pengeluaran pembiayaan, dialokasikan Rp. 4 miliar dari tahun 2021-2023 untuk penyertaan modal daerah.

Berdasarkan beberapa hal di atas maka total Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Kota Pangkalpinang tahun 2021-2023 secara berturut-turut sebesar Rp. 402,938 miliar, Rp. 403,148 miliar, dan Rp. 410,732 miliar. Adapun rincian proyeksi Proyeksi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Kota Pangkalpinang tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 3.12
Proyeksi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib
dan Mengikat Serta Prioritas Kota Pangkalpinang
Tahun 2021-2023 (dalam Jutaan)

No	Uraian	Realisasi		Proyeksi Pertumbuhan (%)	Proyeksi		
		2019	2020		2021	2022	2023
1	Belanja Operasi	477.272,01	425.915,17		388.938,89	399.147,94	406.732,28
1.1	Belanja Pegawai	464.715,14	406.485,69	2,50	381.056,74	390.583,16	400.347,74
1.2	Belanja Bunga						
1.3	Belanja Subsidi			-			
1.4	Belanja Hibah	11.759,16	19.429,48	(10,00)	7.882,15	8.564,78	6.384,54
1.5	Belanja Bantuan Sosial	797,71	-	(100,00)	-	-	-
2	Belanja Transfer	-	1.349,45	-	-	-	-
2.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-
2.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	-	1.349,45	-	-	-	-
3	Belanja Tak Terduga	1	14.370,05	-	10.000,00	-	-
2.3.1	Belanja Tak Terduga	1	14.370,05	(100,00)	10.000,00	-	-
4	Pengeluaran Pembiayaan	1.500,00	-	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4.1.	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	-	-	-	-	-	-
4.2	Penyertaan modal daerah;	1.500,00	-	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4.3.	Pembentukan Dana Cadangan;	-	-	-	-	-	-
4.4	Pemberian Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-	-



No	Uraian	Realisasi		Proyeksi Pertumbuhan (%)	Proyeksi		
		2019	2020		2021	2022	2023
4.5.	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-
	Total Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas	478.773,01	441.634,67	-	402.938,89	403.147,94	410.732,28

Sumber: Bakuda Kota Pangkalpinang, 2021 (diolah)



Tabel 3.13
Proyeksi Anggaran Belanja Belanja Daerah
Tahun 2022-2023 Kota Pangkalpinang (dalam jutaan)

No	Uraian	Realisasi		Proyeksi Pertumbuhan (%)	Proyeksi		
		2019	2020		2021	2022	2023
2	BELANJA	954.727,42	887.559,91	1,38	935.086,61	892.028,10	906.108,35
2.1	BELANJA OPERASI	703.611,29	708.990,01	-0,53	721.963,45	700.917,76	679.156,23
2.1.1	Belanja Pegawai	464.715,14	397.339,71	2,50	381.056,74	390.583,16	400.347,74
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	224.401,57	288.661,50	0,26	332.894,38	301.769,82	272.423,95
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	0,00	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	0,00	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	11.759,16	19.429,48	-10,00	7.882,15	8.564,78	6.384,54
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.938	-	-100,00	-	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	797,71	-	-	-	-	-
2.2	BELANJA MODAL	251.115,59	162.850,40	11,70	203.123,16	191.110,34	226.952,12
2.2.1	Belanja Modal (Tanah)	9.022,73	9.682,39	10,48	13.807,80	12.627,98	13.057,80
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	58.137,02	36.752,43	-2,02	37.482,20	32.564,54	34.565,54
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	28.130,47	20.244,58	46,97	85.351,58	52.053,16	64.274,54
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	133.812,88	81.763,14	6,66	55.177,63	78.029,40	99.218,96
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	12.288,58	12.417,29	8,44	11.303,95	15.835,26	15.835,26
2.2.6	Belanja Aset Lainnya (Belanja Modal BLUD)	7.618,91	-	0,00	-	-	-
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	1	14.370,05	-100,00	10.000,00	-	-
2.3.1	Belanja Tak Terduga	1	14.370,05	-100,00	10.000,00	-	-
2.4	BELANJA TRANSFER	-	1.349,45	-100,00	-	-	-



No	Uraian	Realisasi		Proyeksi Pertumbuhan (%)	Proyeksi		
		2019	2020		2021	2022	2023
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	-	-	0,00	-	-	-
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	-	-	0,00	-	-	-
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	-	-	0,00	-	-	-
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	0,00	-	-	-
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	-	1.349,45	0,00	-	-	-
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	-	-	0,00	-	-	-
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	-	-	0,00	-	-	-
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	-	1.349,45	0,00	-	-	-
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	0,00	-	-	-

Sumber: Bakuda Kota Pangkalpinang, 2021 (diolah)



3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut diantaranya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Kebijakan umum pembiayaan daerah Kota Pangkalpinang pada tahun 2022 diarahkan pada :

- 1) Penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah.
- 2) Upaya untuk menutup defisit anggaran diutamakan berasal dari sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah yang tidak akan



menjadi beban bagi daerah di masa mendatang, misalnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;

- 3) Mengoptimalkan jenis-jenis penerimaan pembiayaan menjadi piutang daerah dan sedapat mungkin menghindari sumber penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari pinjaman daerah;
- 4) Sumber pengeluaran pembiayaan daerah sedapat mungkin hanya dialokasikan untuk menutup keperluan yang menjadi kewajiban daerah dan tidak dapat ditunda pengeluarannya.

Pemerintah Kota Pangkalpinang mengasumsikan SiLPA menurun dari 2022 ke tahun 2023, begitu pun dengan proporsi SiLPA terhadap total belanja daerah. Hal ini bertujuan agar alokasi belanja daerah ditutupi oleh total pendapatan daerah. Apabila melihat target SiLPA pada APBD tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 48.383,22 juta sedangkan total belanja daerah sebesar Rp. 935.086,61 juta dengan proporsi SiLPA terhadap total belanja daerah sebesar 4,74 persen. Adapun untuk proyeksi pendanaan tahun 2022, proporsi SiLPA diasumsikan sebesar 10,6 persen dari total belanja daerah dan pada proyeksi tahun 2023 proporsinya sebesar 3,30 persen.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun, maka dapat dihasilkan proyeksi/target tahun rencana dan perkiraan



maju. Pada tahun 2022 pembiayaan netto diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar 17,7 persen dan pada tahun 2023 terjadi penurunan sebesar -71,4 persen. Rumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut.



Tabel 3.14

**Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran
Tahun 2021-2023 Kota Pangkalpinang (dalam jutaan)**

No	Uraian	Realisasi		Proyeksi Pertumbuhan (%)	Proyeksi		
		2019	2020		2021	2022	2023
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	179.832,04	139.994,96	-29,73	48.383,22	94.667,61	29.908,31
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	179.832,04	139.994,96	-25,00	48.383,22	94.667,61	29.908,31
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	0,00	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	-	-	0,00	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah;	-	-	0,00	-	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	0,00	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-	0,00	-	-	-
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500,00	-	100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.2.1	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	-	-	0,00	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal daerah;	1.500,00	-	100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan;	-	-	0,00	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah;	-	-	0,00	-	-	-
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	0,00	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	178.332,04	139.994,96	-31,72	44.383,22	90.667,61	25.908,31

Sumber: Bakuda Kota Pangkalpinang, 2021 (diolah)



- BAB IV -

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun perencanaan pembangunan Kota Pangkalpinang pada tahun 2022 adalah pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Pendekatan tersebut diimplementasikan dengan: (1) menjaga kesinambungan melalui penyesuaian 16 (enam belas) prioritas pembangunan daerah dengan 6 (enam) tujuan dan 22 sasaran pembangunan daerah yang ada di dalam perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023; (2) memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran Prioritas dan Sasaran Prioritas Pembangunan Kota dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*), serta Program Prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2022; (3) kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan untuk membiayai belanja setiap perangkat daerah; (4) melibatkan secara aktif *stakeholder* di luar pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan penerapan konsep spasial di dalam penjabaran prioritas pembangunan daerah.

Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Pangkalpinang tahun 2022 mengacu dan memperhatikan: (1) Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
(2) Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota (RTRWK) Tahun 2011-2030;
(3) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022; (4) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P- RPJMD) Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023; (5) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022; dan (6) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan pembangunan tahun 2022.

Prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang pada tahun 2022 merupakan prioritas pembangunan pada tahun keempat Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi capaian kinerja pembangunan dan analisa lebih lanjut terhadap permasalahan pembangunan daerah terkait, dihubungkan dengan program pembangunan daerah yang tercantum dalam Perubahan RPJMD, dengan penjabaran sebagai berikut.

Misi 1 Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, dengan sasaran :

- 1) Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan;



- 2) Meningkatnya penggalian, pemanfaatan dan pengembangan potensi sektor pariwisata daerah;
- 3) Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah;
- 4) Menurunnya tingkat kemiskinan;
- 5) Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat.

Misi 2 Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, dengan sasaran :

- 1) Meningkatnya keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana;
- 2) Meningkatnya kondisi keamanan daerah.

Misi 3 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya *Good Governance*, dengan sasaran :

- 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah;
- 2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Misi 4 Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan, dengan sasaran :

- 1) Meningkatnya kualitas pendidikan;
- 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
- 3) Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan;



- 4) Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga

Misi 5 Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan sasaran :

- 1) Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman layak huni;
- 2) Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum;
- 3) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Dalam upaya mencapai visi misi pembangunan jangka panjang, jangka menengah serta dengan memperhatikan evaluasi kinerja pencapaian pembangunan sampai dengan tahun 2021, maka tema pembangunan yang diusung pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**“Penguatan Pembangunan Ekonomi dan Kesehatan Masyarakat
Menuju Daya Saing Daerah”**

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 diturunkan berdasarkan misi pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kota



Pangkalpinang Tahun 2018-2023. Selain itu perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pangkalpinang memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan nasional serta tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka mewujudkan keselarasan sasaran pembangunan antar tingkatan pemerintahan

4.1.1 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020- 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir yaitu Pilar Pertama Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; Pilar Kedua Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; Pilar Ketiga Struktural ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan Pilar Keempat Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda



pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas.

Visi pembangunan RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Tema tersebut dilengkapi dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 yang telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Target-target dari 17 tujuan dalam TPB beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan sebagai berikut:

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.

Peningkatan dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.



b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- 1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- 2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- 3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- 4) Memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
- 5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter, melalui:



- 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 6) Pengentasan kemiskinan; dan
- 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

d. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa. Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:

- 1) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa;
- 2) Memajukan kebudayaan;
- 3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;



4) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga; dan

5) Meningkatkan budaya literasi.

e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;

2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;

3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;

4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan

5) Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur.

f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:



- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan
 - 3) Pembangunan Rendah Karbon.
- g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- 2) Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
- 3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- 4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- 5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Gambar 4.1

7 Agenda pembangunan RPJMN 2020-2024



Berdasarkan RKP Tahun 2022, perencanaan pembangunan nasional mengusung tema **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”** dengan sepuluh fokus pembangunan, yakni Industri, Pariwisata, Ketahanan Pangan, UMKM, Infrastruktur, Transformasi Digital, Pembangunan Rendah Karbon, Reformasi Kesehatan, Reformasi Perlindungan Sosial, serta Reformasi Pendidikan dan Pelatihan. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama yang mulai lepas dari tekanan covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Disamping itu Tahun 2022 merupakan tahun kunci meletakkan kembali landasan untuk keluar dari *Middle Income Trap*. Oleh sebab itu, pemerintah harus melakukan transformasi ekonomi untuk membawa Indonesia menjadi negara maju sebelum 2045 dengan mengusung 6 (enam) strategi transformasi ekonomi Indonesia yaitu :



Strategi Pertama: SDM Berdaya Saing yang meliputi sistem kesehatan, pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter), serta riset dan inovasi.

Strategi Kedua: Produktivitas Sektor Ekonomi mencakup Industrialisasi, Produktivitas UMKM, dan Modernisasi Pertanian. Strategi Ketiga: Ekonomi Hijau meliputi Ekonomi rendah karbon, blue economy, dan Transisi energi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi yang meningkat, membuka kesempatan kerja hijau yang lebih berkelanjutan, dan mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca.

Strategi Keempat: Transformasi Digital terdiri atas, infrastruktur digital, pemanfaatan digital, dan penguatan enabler.

Strategi Kelima: integrasi ekonomi domestik meliputi economic powerhouse dengan fokus pada infrastruktur konektivitas: superhub, hub laut, hub udara, serta domestic value chain.

Strategi Keenam: Pemindahan Ibu Kota Negara sebagai sumber pertumbuhan baru dan penyeimbang ekonomi antar wilayah.

Target utama dari pembangunan nasional tahun 2022 dijabarkan dalam 5 target utama pembangunan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1

Indikator Pembangunan Nasional Tahun 2022

No	Indikator Pembangunan	Target 2022
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,4 –6,0%



2	Tingkat Pengangguran Terbuka	6.24 -5.52%
3	Rasio Gini sebesar	0,376 -0,378
4	Tingkat Kemiskinan	8,5 -9,0 %
5	Indeks Pembangunan Manusia	73,44 -73,48

Sumber : Permendagri No. 17 Tahun 2021

4.1.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

Pelaksanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memasuki babak baru pada tahun 2017 lalu dimana Gubernur terpilih memiliki visi pembangunan lima tahun ke depan, yakni :

“Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”.

Misi yang diemban untuk mewujudkan visi yang dirumuskan oleh gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Bangka Belitung adalah:

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah.

Misi pembangunan ini diimplementasikan melalui tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, yang memiliki sasaran pembangunan sebagai berikut:
 - 1) Meningkatkan PDRB Sub Sektor Pertanian;
 - 2) Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan;
 - 3) Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB;
 - 4) Meningkatkan PDRB Sektor Pertambangan dan Energi;



5) Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan.

b. Meningkatnya pemerataan pendapatan, memiliki sasaran pembangunan

- 1) Menurunkan tingkat Pengangguran ;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja;
- 3) Menurunkan tingkat kemiskinan;
- 4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

2. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas.

Misi pembangunan ini diimplementasikan melalui tujuan dan sasaran sebagai berikut:

a. Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur, yang memiliki sasaran pembangunan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pekerjaan umum;
- 2) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar;
- 3) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur perhubungan.

3. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal.

Misi pembangunan ini diimplementasikan melalui tujuan dan sasaran sebagai berikut:

a. Meningkatnya Pendidikan Masyarakat, yang memiliki sasaran pembangunan:

- 1) Meningkatkan kesempatan pendidikan;
- 2) Meningkatkan kualitas pendidikan.



b. Meningkatnya pembangunan sosial masyarakat, yang memiliki sasaran pembangunan yakni:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan anak;
- 2) Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk;
- 3) Meningkatkan pembangunan responsif gender;
- 4) Meningkatkan kualitas pemuda;
- 5) Meningkatkan pembangunan olahraga;
- 6) Meningkatkan kesejahteraan sosial.

4. Meningkatkan kesehatan masyarakat.

Misi pembangunan ini diimplementasikan melalui tujuan dan sasaran sebagai berikut:

a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yang memiliki sasaran pembangunan “Meningkatkan kesehatan masyarakat”.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi.

Misi pembangunan ini diimplementasikan melalui tujuan dan sasaran sebagai berikut:

a. Terwujudnya reformasi birokrasi, yang memiliki sasaran pembangunan “Meningkatkan tata kelola pemerintahan”

b. Meningkatnya demokrasi, yang memiliki sasaran pembangunan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kebebasan sipil;
- 2) Meningkatkan hak-hak politik;



3) Meningkatkan peran lembaga demokrasi.

6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup.

Misi pembangunan ini diimplementasikan melalui tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- a. Menurunnya Resiko Bencana, yang memiliki sasaran pembangunan “Meningkatkan kapasitas daerah terhadap penanggulangan bencana”.
- b. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang memiliki sasaran pembangunan “Meningkatkan pengendalian lingkungan hidup”

Tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 adalah **“Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Masyarakat Menuju Sumber Daya Manusia Yang Unggul”** dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

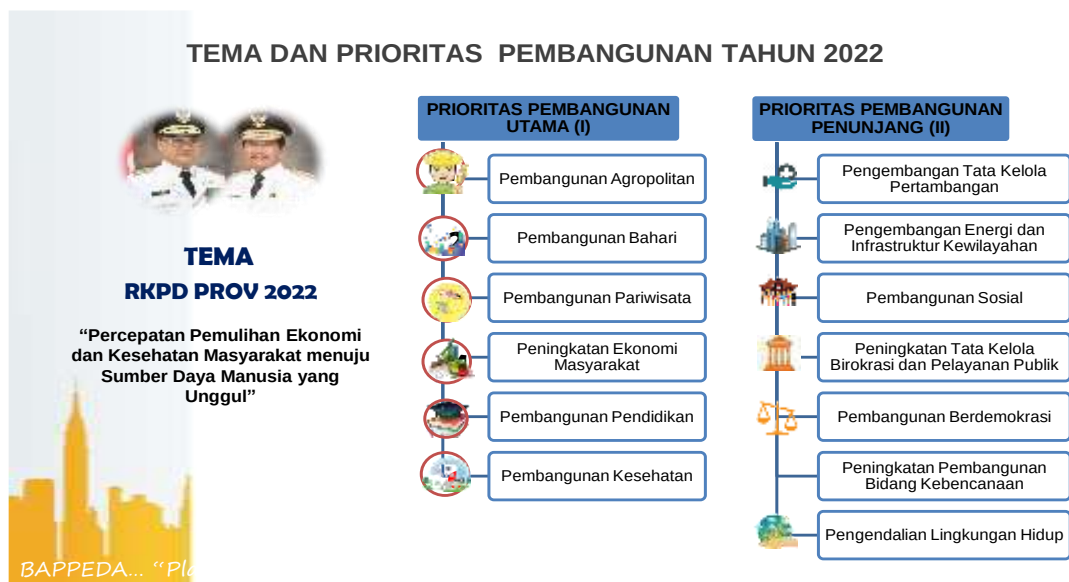
- a. Prioritas Pembangunan Utama yaitu :
 1. Pembangunan agropolitan;
 2. Pembangunan bahari;
 3. Pembangunan Pariwisata;
 4. Peningkatan Ekonomi Masyarakat;
 5. Pembangunan Pendidikan;
 6. Pembangunan Kesehatan;
- b. Prioritas Pembangunan Penunjang yaitu :
 1. Pengembangan Tata Kelola Pertambangan;



2. Pembangunan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan;
3. Pembangunan Sosial;
4. Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik;
5. Pembangunan Demokrasi;
6. Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan;
7. Pengendalian Lingkungan Hidup

Gambar 4.2

**Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022**



Target utama dari pembangunan Provinsi tahun 2022 dijabarkan dalam 5 target utama pembangunan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.



Tabel 4.2

Indikator Pembangunan Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2022

No	Indikator Pembangunan	Target 2022
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	4,5 %
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,4 %
3	Rasio Gini sebesar	0,255
4	Tingkat Kemiskinan	5,0 %
5	Indeks Pembangunan Manusia	71,70

Sumber : RKPD Provinsi Babel Tahun 2022

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Pangkalpinang

Berpedoman kepada tujuan dan sasaran pembangunan nasional, tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta berpedoman terhadap Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023, berikut merupakan penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022 sebagai berikut :



Tabel 4.3

Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/Daerah	Satuan	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	OPD Pengampu
Visi: "Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM" (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)								
Misi 1 : Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan								
Tujuan 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah	1.Laju Pertumbuhan Ekonomi			%	-3,02	0,83	1,67	
		1.Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan						
			1. LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	-6,28	0,50	1,65	Dinas Koperasi,UMKM dan Perdagangan
			2. LPE Kategori Industri Pengolahan	%	-4,52	0,50	1,00	Dinas Koperasi,UMKM dan Perdagangan
	2.PDRB Per kapita			Juta per Kapita	61,60	62,42	63,67	
		2. Meningkatnya penggalian, pemanfaatan dan pengembangan potensi sektor pariwisata daerah	3.PAD Sektor Pariwisata	Rp.	14.036.203.600	15.439.823.960	16.983.806.356	Dinas Pariwisata



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/Daerah	Satuan	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	OPD Pengampu
		3. Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	4. Nilai investasi	Milyar Rp	500	550	600	Dinas PMPTSP dan Naker
Tujuan 2. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	2. Indeks gini			%	0,277	0,272	0,267	
		4. Menurunnya tingkat kemiskinan	5. Angka Kemiskinan	%	4,36	4,24	4,12	Dinas Pangan Pertanian/Dinas Kelautan dan Perikanan/Dinas Sosial
		5. Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat	6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,93	6,74	6,45	Dinas PMPTSP dan Naker
Misi 2. Meningkatkan Kualitas Keamanan Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Peningkatan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana								
Tujuan 3. Meningkatkan kualitas perlindungan masyarakat untuk ketentraman dan kenyamanan lingkungan	4. Indeks Ketertiban dan Ketentraman Kota				8,35	7,65	7,20	
		6. Meningkatnya keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana	7. Indeks Risiko Bencana (IRB)	-	82.5	80.85	79.23	BPBD
		7. Meningkatnya kondisi keamanan daerah	8. Angka Kriminalitas	-	175	150	125	Satpol PP



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/Daerah	Satuan	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	OPD Pengampu
Misi 3 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Menuju Tercapainya Good Governance.								
Tujuan 4. Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan daerah	5. Indeks Reformasi Birokrasi				61,71	63,50	64,50	
		8. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	9. Nilai LPPD		3,2721	3,2722	3,2723	Setda Kota/Seluruh OPD
			10. Nilai AKIP		61,77	63,30	65,50	Setda Kota/Seluruh OPD
			11. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		WTP	WTP	WTP	Bakuda
		9. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas ASN	12. Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		82	84	86	Setda Kota/Dinas Dukcapil/Dinas PMPTSP dan Naker/Kecamatan
			13. Indeks Profesionalitas ASN		77,2	77,6	78,0	BKPSDMD



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/Daerah	Satuan	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	OPD Pengampu
Misi 4 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumberdaya Manusia Yang Berkeadilan								
Tujuan 5. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender	6. IPM				78,22	79,17	79,51	
		10.Meningkatnya kualitas pendidikan	14. Indeks Pendidikan	-	69,59	69,79	69,97	Dinas Pendidikan
		11.Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	15.Indeks Kesehatan	-	82,00	82,14	82,39	Dinas Kesehatan
		12.Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan	16.Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	93,12	93,16	93,21	Dinas PPPA dan KB
		13.Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	17.Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	%	71,25	72,50	73,75	Dinas Pemuda dan Olahraga
Misi 5 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup								
Tujuan 6. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar pembangunan melalui pengelolaan lingkungan hidup yang handal Indeks Ketersediaan Infrastruktur	7. Indeks Kualitas Infra-struktur					72,48	74,10	



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/Daerah	Satuan	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	OPD Pengampu
		14.Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman layak huni	18.Rasio rumah layak huni		89,00	90,00	91,00	Dinas Perkim
		15.Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum	19.Indeks Ketersediaan Infrastruktur		-	54,96 %	57,20 %	Dinas PU
	8.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				63,00	62,44	62,97	
		16.Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	20. Indeks kualitas udara		96,20	88,72	88,82	Dinas LH
			21.Indeks kualitas air		70,70	50,93	51,03	Dinas LH
			22.Indeks Tutupan Lahan		42,75	33,62	35,65	Dinas LH



4.2 Prioritas Pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2022

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan cara mengevaluasi permasalahan pembangunan daerah, dihubungkan dengan program pembangunan daerah sebagaimana termuat Perubahan RPJMD pada tahun rencana.

Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD. Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program program unggulan perangkat daerah yang paling tinggi realisasinya bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya.

Prioritas pembangunan daerah tahun 2022 disusun dengan memperhatikan:

Prioritas I:

Prioritas I merupakan prioritas pembangunan daerah tahun rencana dengan tema atau program unggulan Kepala Daerah sebagaimana



diamanatkan dalam Perubahan RPJMD yang terangkum dalam prioritas dan sasaran pembangunan tahunan. Suatu prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prioritas II:

Prioritas II merupakan prioritas program di tingkat Perangkat Daerah yang berhubungan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Prioritas II berhubungan dengan tema/program/kegiatan/sub kegiatan unggulan Perangkat Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani.

Prioritas III:

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja operasi, seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial, serta belanja tidak terduga. Selain berpedoman pada pencapaian target kinerja pada RPJPD Kota Pangkalpinang, kinerja RPJMD periode 2018-2023 yang belum mencapai target, evaluasi kinerja sampai dengan Tahun 2021, permasalahan



pembangunan Kota Pangkalpinang yang belum tertangani, serta memperhatikan kebijakan nasional dan provinsi

Proses Penentuan Prioritas dilakukan dengan pembobotan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dilakukan pembobotan terhadap prioritas pembangunan turunan dari sasaran yang merepresentasikan penyelenggaraan urusan, kemudian dihitung skalanya dengan membandingkan terhadap 8 (delapan) indikator yang digunakan yaitu:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola;
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan;



7. Hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan;
8. Pencapaian SDGs dan SPM.

Berdasarkan hasil pembobotan tersebut, ditentukan prioritas dengan melihat sasaran daerah yang memiliki skor tertinggi, untuk kinerja yang sejenis dikelompokkan dalam satu pernyataan prioritas, proses pembobotan disajikan pada tabel berikut.



Tabel 4.4
Skoring Prioritas Pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2022

No	Prioritas Pembangunan Turunan dari Sasaran yang merepresentasikan Penyelenggaraan Urusan	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	Luasnya dampak yang ditimbulkan nya terhadap daerah dan masyarakat;	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;	Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	Hasil Evaluasi dan Identifikasi Permasalahan	Pencapaian SDGS dan SPM	Total
		15	10	15	15	10	10	15	10	100
1	Peningkatan nilai tambah sektor unggulan melalui penguatan sektor industri pengolahan dan UMKM	3	3	3	3	2	2	3	3	2,75
2	Pengembangan potensi wisata daerah	3	3	3	3	2	2	3	2	2,63
3	Perwujudan kemudahan investasi untuk pengembangan sektor pariwisata, industri dan perdagangan	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
4	Percepatan pengentasan kemiskinan	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
5	Peningkatan kualitas angkatan kerja lokal	3	3	3	3	2	3	3	3	2,88
6	Penanggulangan bencana alam	2	2	2	1	2	2	3	3	2,13
7	Optimalisasi perlindungan keamanan dan kenyamanan masyarakat	2	3	3	3	2	3	3	3	2,75



No	Prioritas Pembangunan Turunan dari Sasaran yang merepresentasikan Penyelenggaraan Urusan	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	Luasnya dampak yang ditimbulkan nya terhadap daerah dan masyarakat;	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;	Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	Evaluasi dan Identifikasi Permasalahan	Pencapaian SDGS dan SPM	Total
8	Pemantapan Reformasi Birokrasi	3	3	3	3	2	3	3	3	2,88
9	Peningkatan pelayanan publik	3	3	3	3	2	3	3	3	2,88
10	Perwujudan kualitas pendidikan berbasis karakter	3	3	3	3	2	3	3	3	2,88
11	Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan masyarakat	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
12	Peningkatan kesejahteraan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak	2	3	3	1	2	1	1	3	2
13	Peningkatan kualitas organisasi kepemudaan dan olahraga	2	2	2	1	2	1	1	1	1,5
14	Peningkatan pengelolaan tata kota wilayah	2	2	2	2	2	3	3	3	2,38
15	Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas	3	3	3	3	2	3	3	3	2,88
16	Rehabilitasi kerusakan lingkungan hidup	3	3	3	3	2	3	3	3	2,88



Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh faktor yang mempengaruhi kinerja pembangunan di Kota Pangkalpinang, maka ditetapkan prioritas pembangunan utama dan prioritas penunjang RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022. Prioritas Pembangunan Penunjang merupakan berisi program-program unggulan yang tidak berkorelasi secara langsung dengan tema pembangunan, namun mendukung tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun 2022. Adapun prioritas pembangunan utama RKPD Kota Pangkalpinang tahun 2022 adalah :

1. Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan masyarakat

Pandemi COVID-19 yang belum usai mempunyai dampak yang sangat besar terhadap derajat kesehatan masyarakat. Data Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang per tanggal 29 Juni 2021 terdapat 6.130 orang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan rincian 395 orang dirawat, 5.660 orang sembuh dan 75 orang meninggal dunia.

Dengan upaya preventif, promotive dan kuratif serta kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat diharapkan pandemi COVID-19 dapat dikendalikan. Pelaksanaan Program Vaksinasi Covid-19 di Kota Pangkalpinang terus diberikan kepada masyarakat Kota Pangkalpinang guna mencapai *herd immunity*. Saat ini Pemerintah Kota Pangkalpinang, telah melakukan vaksinasi Covid-19 sebanyak 83 persen dari sasaran nasional. Vaksin tersebut diterima oleh



Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, pelayanan publik dan lanjut usia (lansia), dengan perincian SDM kesehatan 99,6 persen atau 2.626 orang, pelayanan publik 100,5 persen atau 13.152 orang dan lansia 57,94 persen atau 12.658 orang. Untuk mencapai target hingga 100 persen, Pemerintah Kota Pangkalpinang melakukan sistem jemput bola, seperti menggelar vaksinasi di tempat keramaian, masjid, gereja hotel dan tempat lainnya.

Selain itu dalam jangka panjang diperlukan juga partisipasi masyarakat untuk mengubah dan kebiasaan hidup sehat melalui gerakan masyarakat hidup sehat. Pola hidup bersih dan sehat menjadi kunci menekan penyebaran COVID-19 mengingat Pandemi Covid -19 belum dapat diproyeksikan kapan akan berakhir serta Program Vaksinasi belum semua dapat terdistribusikan. Ada tiga poin penting dalam Germas terkait pencegahan penularan COVID-19, yakni peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan pangan sehat dan perbaikan gizi, serta peningkatan edukasi hidup sehat.

2. Perwujudan kemudahan investasi untuk pengembangan sektor pariwisata, industri dan perdagangan

Dampak pandemi COVID-19 tidak hanya disektor kesehatan, kebijakan untuk membatasi mobilitas masyarakat juga mempunyai dampak pada sektor ekonomi. BPS Kota Pangkalpinagn merelease pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang tahun 2020 berkontraksi



sebesar -3,02 %. Hal ini cukup besar kontraksinya jika dibandingkan dengan kontraksi perekonomian yang berada di level nasional (2,07%) dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (-2,3 %). Dengan adanya kebijakan vaksinasi massal dan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat diharapkan dapat membuka kembali sektor unggulan daerah dan pariwisata di Kota Pangkalpinang serta menciptakan kondusivitas iklim investasi. Investasi perlu digenjot karena investasi berimbas pada adanya aliran dana segar terhadap perekonomian yang diharapkan juga mampu memberikan dampak pada sektor lain terutama penciptaan kesempatan kerja yang berakhir pada pemulihan daya beli masyarakat,

3. Percepatan pengentasan kemiskinan

Data BPS Kota Pangkalpinang yang telah dipublikasikan pada awal tahun 2021 menunjukkan kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kota Pangkalpinang naik. Hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin sulit masyarakat miskin Kota Pangkalpinang untuk dapat terlepas dari belenggu kemiskinan. Salah satu strategi untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan pemberian bantuan sosial dan bantuan modal usaha guna pemenuhan *basic life access* dengan tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran serta strategi *sustainable livelihood* dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin maupun masyarakat rentan miskin agar tidak terjerumus pada kemiskinan. Sedangkan untuk



pengangguran diarahkan pada peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja

4. Peningkatan kualitas angkatan kerja lokal

Pengangguran menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah kota Pangkalpinang di era pandemi ini. Namun di era yang serba terbatas ini fokus yang dijalani adalah menyiapkan angkatan kerja yang unggul dan berdaya saing. Peningkatan kualitas dari SDM siap kerja dan berdaya saing ini merupakan upaya kedepan agar ketika lapangan kerja sudah mulai bermunculan, angkatan kerja tersebut sudah siap. Selain mental siap kerja, kualitas angkatan kerja ini juga diharapkan dapat berdaya upaya sendiri untuk menciptakan lapangan kerja sendiri (berwirausaha). Tentunya peran Pemerintah daerah adalah menciptakan iklim wirausaha yang baik bagi masyarakat dengan memberikan pelatihan serta bantuan modal.

5. Pemantapan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 oleh Kementerian PAN dan RB, Pemerintah Kota Pangkalpinang memperoleh nilai 61,77 atau Predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil sudah



menunjukkan hasil yang baik, namun masih memerlukan perbaikan. Sedangkan untuk penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2020, Pemerintah Kota Pangkalpinang memperoleh nilai 61,71 dengan kategori B.

Untuk meningkatkan nilai tersebut menjadi BB perlu adanya perubahan yang dimulai dari manajemen perubahan, penataan hukum, penataan SDM, organisasi, akuntabilitas, pengawasan, tata laksana, hingga pelayanan publik. Pemantapan reformasi birokrasi merupakan strategi lanjutan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah Kota Pangkalpinang agar bisa mempertahankan dan juga meningkatkan kinerjanya.

6. Peningkatan pelayanan publik

Dengan adanya pandemi COVID-19 pemerintah dituntut untuk dapat beradaptasi dengan pandemi, tetap melayani masyarakat melalui cara yang berbeda dengan memanfaatkan teknologi informasi. Perubahan ini tentu saja tidak hanya saat ada pandemi, manakala pandemi telah mereda inovasi-inovasi pelayanan publik tetap bisa digunakan agar masyarakat tidak terbatas untuk keperluan aktifitasnya terutama menyangkut administrasi kependudukan. Melalui optimalisasi pelayanan publik, diharapkan dapat membangun tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat Kota Pangkalpinang.

7. Perwujudan kualitas pendidikan berbasis karakter



Pemerintah telah menggalakkan pentingnya pendidikan karakter bagi siswa di sekolah. Berbagai program dicanangkan oleh pemerintah dalam upaya mengimplementasikan pendidikan karakter untuk semua tingkat pendidikan. Nilai-nilai pendidikan karakter seperti religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.

Salah satu strategi dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter bagi siswa Sekolah dasar dan menengah yaitu dengan memasukkan pendidikan karakter ke dalam semua mata pelajaran di sekolah, membuat slogan-slogan atau yel-yel yang dapat menumbuhkan kebiasaan semua masyarakat sekolah untuk bertingkah laku yang baik, membiasakan perilaku yang positif di kalangan warga sekolah, melakukan pemantauan secara kontinyu, memberikan hadiah (*reward*) kepada siswa yang selalu berakhlak baik.

Peran seorang kepala sekolah dan guru dalam menanamkan nilai karakter ke siswa di sekolah sangatlah penting. Demikian pula dengan proses pembelajaran guru tidak hanya fokus pada materi-materi yang bersifat kognitif, akan tetapi bagaimana nilai-nilai karakter yang harus ditanamkan pada siswa sekolah dasar .

8. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas



Pemerataan dan konektifitas infrastruktur di suatu daerah merupakan faktor penting untuk dapat mengurangi harga suatu produk dan melancarkan perekonomian wilayah sehingga diharapkan ekonomi daerah menjadi tumbuh secara positif dan kesenjangan antar wilayah menjadi turun. Tidak hanya infrastruktur jalan dan jembatan, pembangunan drainase, penyediaan air minum layak, akses sanitasi lingkungan, penataan dan pengurangan kawasan kumuh perkotaan merupakan faktor untuk meningkatkan produktifitas dan derajat kesejahteraan masyarakat

9. Rehabilitasi kerusakan lingkungan hidup

Kelestarian dan keberlanjutan alam wajib diperhatikan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar kelestarian dan keseimbangan lingkungan tetap terjaga hingga waktu yang lama agar generasi penerus dapat pula menikmatinya. Terjadinya banjir, krisis air bersih, kekeringan, dan pencemaran merupakan indikasi bahwa alam memerlukan keseimbangan baru sebagai dampak dari eksploitasi berlebihan manusia terhadap sumber daya alam. Namun demikian, hal ini tentu mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan untuk dapat didorong agar kelestarian alam dapat dicapai.

Prioritas yang telah disusun pada implementasinya dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah, program/kegiatan tersebut



menjadi bagian dari Perubahan RPJMD pada periode 2018-2023 pada tahun keempat. Secara lebih lengkap prioritas, sasaran, program dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 4.5

Sasaran, Prioritas Pembangunan, Arah Kebijakan dan Program Kota Pangkalpinang Tahun 2022

VISI/MISI/ TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA	PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	OPD PENGAMPU
VISI : MEWUJUDKAN PANGKALPINANG SEBAGAI KOTA "SENYUM" (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)						
Misi 1: Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan						
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah	Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan		Peningkatan nilai tambah sektor unggulan melalui penguatan Sektor Industri Pengolahan dan UMKM	Peningkatan ekspor dan penguatan pasar dalam negeri	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan
					Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan
					Program Pengembangan Ekspor	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan
					Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan
					Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan



VISI/MISI/ TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA	PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	OPD PENGAMPU
				Pengembangan IKM (Industri Kecil dan Menengah) sebagai penggerak ekonomi berbasis kerakyatan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan
					Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan
					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan
				Pemberian bantuan modal kepada pelaku UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan
					Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan
					Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan
					Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan
					Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan



VISI/MISI/ TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA	PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	OPD PENGAMPU
					Program Diklat Perkoperasian	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan
					Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan
	Meningkatnya penggalan, pemanfaatan dan pengembangan potensi sektor pariwisata daerah		Pengembangan potensi wisata daerah	Optimalisasi Kawasan Kampung Wisata dan Pengembangan Destinasi Wisata Baru	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
					Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAKI	Dinas Pariwisata
					Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	Perwujudan kemudahan investasi untuk pengembangan sektor pariwisata, industri dan perdagangan		Pengembangan kondusivitas penanaman modal wilayah untuk pengembangan sektor ekonomi unggulan	Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP & TENAGA KERJA
					Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP & TENAGA KERJA



VISI/MISI/ TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA	PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	OPD PENGAMPU
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP & TENAGA KERJA
					Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP & TENAGA KERJA
					Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPMPTSP & TENAGA KERJA
Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	Menurunnya tingkat kemiskinan	Percepatan pengentasan kemiskinan		Peningkatan kapasitas produksi dan pengolahan perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Peningkatan kesejahteraan petani	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian
					Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian



VISI/MISI/ TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA	PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	OPD PENGAMPU
					Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian
					Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian
					Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pangan dan Pertanian
				Diversifikasi konsumsi pangan pokok berbasis potensi lokal	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Pangan dan Pertanian
					Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Pangan dan Pertanian
					Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pangan dan Pertanian
				Pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran, warga lanjut usia dan masyarakat terdampak bencana	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
					Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
					Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial



VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA	PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	OPD PENGAMPU
					Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Dinas Sosial
					Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
	Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat	Peningkatan kualitas angkatan kerja lokal		Peningkatan jiwa kewirausahaan masyarakat	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	DPMPTSP & TENAGA KERJA
				Peningkatan harmonisasi kebijakan kinerja perusahaan dan tenaga kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	DPMPTSP & TENAGA KERJA
					Program Hubungan Industrial	DPMPTSP & TENAGA KERJA
					Program Perencanaan Tenaga Kerja	DPMPTSP & TENAGA KERJA
	Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Keamanan Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Peningkatan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana					
Meningkatkan kualitas perlindungan masyarakat untuk ketentraman dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana		Penanggulangan bencana alam	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
	Meningkatnya kondisi keamanan daerah		Optimalisasi perlindungan keamanan dan kenyamanan masyarakat	Peningkatan penegakan hukum dan perundang-undangan	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP dan Damkar



VISI/MISI/ TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA	PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	OPD PENGAMPU
					Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP dan Damkar
				Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kesbangpol
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Kesbangpol
					Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kesbangpol
				Pembinaan Pembangunan Politik daerah	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Kesbangpol



VISI/MISI/ TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA	PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	OPD PENGAMPU
					Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kesbangpol
Misi 3: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya Good Governance						
Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	Pemantapan Reformasi Birokrasi		Pengembangan sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappelitbangda
					Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappelitbangda
					Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappelitbangda
				Peningkatan kualitas koordinasi, fasilitasi kinerja pemerintah daerah, bina mental spiritual serta perekonomian dan pembangunan daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
					Program Administrasi Umum Setda	Sekretariat Daerah
				Optimalisasi BUMD Pangkalpinang	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah



VISI/MISI/ TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA	PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	OPD PENGAMPU
				Optimalisasi pengelolaan Keuangan, pendapatan dan barang daerah milik	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah
					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan Daerah
					Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Keuangan Daerah
				Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Peningkatan pelayanan publik		Optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Diskominfo
					Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Diskominfo
					Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Diskominfo
					Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Diskominfo



VISI/MISI/ TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA	PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	OPD PENGAMPU
					Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
					Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kab/Kota	Sekretariat DPRD
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan



VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA	PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	OPD PENGAMPU
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan
					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan
					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan
				Peningkatan kapasitas kinerja ASN dan	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDMD
					Program Pengembangan SDM	BKPSDMD
Misi 4: Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berkeadilan						
Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender	Meningkatnya Kualitas pendidikan	Perwujudan kualitas pendidikan berbasis karakter		Peningkatan kualitas tata kelola /manajemen pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengembangan sistem pendidikan berbasis budaya	Program Pembinaan Sejarah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



VISI/MISI/ TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA	PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	OPD PENGAMPU
				Peningkatan minat baca masyarakat	Program Pengembangan kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan masyarakat		Peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
				Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular		Dinas Kesehatan
				Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menciptakan gerakan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan



VISI/MISI/ TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA	PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	OPD PENGAMPU
				masyarakat hidup sehat		
				Standarisasi pelayanan kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Pengendalian dan pengawasan produksi alat kesehatan dan produk makanan yang higienis	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan		Peningkatan kesejahteraan perempuan dan pemenuhan hak- hak anak	Pendidikan, penguatan dan perlindungan hak- hak kaum perempuan dan anak	Program Perlindungan Perempuan	DPPPA&KB
					Program Perlindungan Khusus Anak	DPPPA&KB
					Program Pemenuhan Hak Anak	DPPPA&KB
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DPPPA&KB
				Pemberdayaan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Program Pengendalian Penduduk	DPPPA&KB
					Program Pembinaan KB	DPPPA&KB



VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA	PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	OPD PENGAMPU
				Peningkatan partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan daerah	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	DPPPA&KB
				Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	DPPPA&KB
					Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DPPPA&KB
	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga		Peningkatan kualitas organisasi kepemudaan dan olahraga	Optimalisasi pembinaan pemuda dan olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda dan Olah Raga
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
					Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	
	Misi 5: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					
Peningkatan kualitas infrastruktur dasar pembangunan melalui pengelolaan lingkungan hidup yang handal	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman layak huni		Peningkatan pengelolaan tata kota wilayah	Penataan prasarana, sarana dan utilitas umum	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perkim



VISI/MISI/ TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA	PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	OPD PENGAMPU
					Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perkim
				Penataan kawasan kumuh perkotaan	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perkim
				Peningkatan kapasitas rumah layak huni	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perkim
				Pemenuhan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perkim
	Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum	Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas		Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar kehidupan masyarakat	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUPR
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PUPR



VISI/MISI/ TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA	PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	OPD PENGAMPU
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas PUPR
					Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUPR
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PUPR
					Program Pengembangan Permukiman	Dinas PUPR
					Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas PUPR
				Peningkatan kualitas tata ruang wilayah	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas PUPR
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUPR
				Penataan dan Penyediaan tanah untuk pembangunan daerah	Program Penatagunaan Tanah	Dinas PUPR
					Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinas PUPR
					Program Pengelolaan Izin Lokasi	Dinas PUPR



VISI/MISI/ TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA	PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	OPD PENGAMPU
					Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Dinas PUPR
					Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Dinas PUPR
					Program Pengelolaan Tanah Kosong	Dinas PUPR
					Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Dinas PUPR
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Rehabilitasi kerusakan lingkungan hidup		Peningkatan pengawasan dan pengendalian kegiatan yang berpotensi merusak kualitas lingkungan hidup	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup



VISI/MISI/ TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA	PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	OPD PENGAMPU
					Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup



4.2.1 Sinkronisasi Prioritas Daerah Dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi

4.2.1.1 Sinkronisasi Prioritas Daerah Dengan Prioritas Nasional

Penyusunan sasaran dan prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022 harus diselaraskan untuk mendukung pencapaian 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dantalanta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa



modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan dengan sasaran antara lain:
 - a. meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi;
 - b. meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan antara lain:
 - a. meningkatnya pemerataan antar wilayah (antara KBI – KTI dan jawa dan luar jawa);
 - b. meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah;
 - c. meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah;
 - d. meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang dan wilayah;
3. meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing dengan sasaran pembangunan antara lain:
 - a. pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b. perlindungan sosial bagi seluruh penduduk;



- c. pemenuhan layanan dasar;
 - d. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda;
 - e. pengentasan kemiskinan;
 - f. peningkatan produktivitas dan daya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan sasaran pembangunan antara lain:
- a. menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
 - b. meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan ;
 - c. meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
 - d. menguatnya modernisasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
 - e. meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa;
 - f. meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif.
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dengan sasaran pembangunan antara lain:
- a. meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
 - b. meningkatnya konektivitas wilayah;



- c. meningkatnya layanan angkutan umum masal di 6(enam) kota metropolitan;
 - d. meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal dan efisien;
 - f. meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi.
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dengan sasaran pembangunan antara lain:
- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim;
 - c. pembangunan rendah karbon.
7. memperkuat stabilitas politik, hukum dan transformasi pelayanan publik, dengan sasaran pembangunan antara lain:
- a. konsolidasi demokrasi;
 - b. optimalisasi kebijakan luar negeri;
 - c. penegakan hukum nasional yang mantap;
 - d. reformasi birokrasi dan tata kelola;
 - e. menjaga stabilitas keamanan nasional.

Sinkronisasi serta keterkaitan prioritas pembangunan daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 dengan prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 4.6

Keselarasan Prioritas Nasional, Arah Kebijakan Nasional dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2022

No	RKP 2022		RKPD 2022				Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah			
				Nama Program	Indikator Kinerja (out come)	Target	
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.	Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	Pengembangan IKM (Industri Kecil dan Menengah) sebagai penggerak ekonomi berbasis kerakyatan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIK	22 %	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
					Proporsi Nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita	23.6 %	
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	5 %	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
					Laju pertumbuhan PDRB Industri manufaktur	0.4 %	
					Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	50.71 %	
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	1.25 %	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan



			Pemberian bantuan modal kepada pelaku UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha mikro yang menjadi wirausaha	2.2 %	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
				Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha mikro menjadi usaha kecil	1 %	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
					Persentase akses UMKM (Usaha Mikro Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	30.25 %	
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase peningkatan volume usaha, RAT Koperasi	14 %	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP koperasi yang dinilai kesehatannya	20 %	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi,	Peningkatan ekspor dan penguatan pasar dalam negeri	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	42 %	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
				Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Bersih	Rp. US \$ 665,000,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah upaya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	2 upaya	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan



			Pengembangan kondusivitas penanaman modal wilayah untuk pengembangan sektor ekonomi unggulan	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kota	40 %	Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah investor	40 %	Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	90 %	Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase jenis izin yang diterbitkan secara online	79.66 %	Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja
		Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Peningkatan kapasitas produksi dan hasil pengolahan perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan dan usaha pengolahan hasil perikanan	54.6 kg/kapita/ tahun	Dinas Kelautan Perikanan
			Diversifikasi konsumsi pangan pokok berbasis potensi lokal	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH) mencapai; dan tingkat tingkat konsumsi ikan	88 %	Dinas Pangan dan Pertanian
				Program	Persentase pengadaan	100 %	Dinas



				Penanganan Kerawanan Pangan	cadangan pangan		Pangan dan Pertanian
2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Mengurangi ketimpangan antarwilayah	Peningkatan kualitas tata ruang wilayah	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan IMB kab/Kota	67.5 %	Dinas PUPR
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Terpenuhinya peran tata ruang dan pertanahan	100 %	Dinas PUPR
3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan	Pemberdayaan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Program Pengendalian Penduduk	TFR (Total Fertility Rate)	1.9 (rata-rata anak per wanita)	Dinas PPPA dan KB
				Program Pembinaan KB	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 Tahun yang berstatus kawin	81 %	Dinas PPPA dan KB
					Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode mode	79.84 %	
			Optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	670	Dinas Dukcapil
					Cakupan Kemilikan Kartu keluarga	96 %	
					Cakupan Pernerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	99.6 %	
					Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	100 %	
					Perakaman KTP elektronik	98 %	



					Persentase anak usia 0-7 tahun kurang 1 (satu) hari yg memiliki KIA	70 %	
				Program Pencatatan Sipil	Rasio Bayi Berakte Kelahiran penduduk per1000	920	Dinas Dukcapil
					Kepemilikan Akte Kelahiran	88 %	
					Rasio Perkawinan yang tercatat di catatan sipil per 1000 penduduk	88 %	
					Cakupan Kepemilikan Akte Kematian	31 %	
					Peningkatan cakupan akta kelahiran yang diterbitkan	3.5	
					Persentase anak (0-18) tahun yang memiliki akta kelahiran	92 %	
					Peningkatan cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan	65 %	
					Peningkatan cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang perceraian nya tercatat	72 %	
					Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	88 %	



				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	2.1	
				Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase keserasian database kependudukan	96 %	
					Persentase tersajinya data kependudukan yang akurat	50 %	
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemasyarakatan	80 %	
		Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	Pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran, warga lanjut usia dan masyarakat terdampak bencana	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 %	Dinas Kesehatan
		Penguatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak				
			Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 %	
					Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 %	
					Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	
					Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	100 %	



					Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	100 %	
					Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 %	
					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	
					Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standar	100 %	
					Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standar	100 %	
					Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	
					Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %	
					Prevalensi anemia pada ibu hamil	10.5 %	
					Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	98.5 %	



					Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	98.5 %	
					Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ ASFR</i>)	5 %	
					Prevalensi tekanan darah tinggi	16 %	
					Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	9 puskesmas	
					Insiden Tuberculosis (ITB) per 100.000 penduduk	0.21 %	
					Prevalensi HIV pada populasi dewasa	0.03 %	
					Proporsi kematian akibat keracunan	0	
					Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	99.5 %	
					Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	100 %	
					Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B	100 %	



					Kejadian malaria per 1.000 orang	<1	
					Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	1	
					Jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	0	
					Jumlah kota dengan eliminasi kusta	0	
					Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)	0	
					Persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun	0.15 %	
					Persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun	0.15 %	
					Prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun	0.4 %	
					Prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun	0.4 %	
					Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	80 %	



					Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	2.6 %	
					Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	2.6 %	
					Prevalensi Kekurangan Gizi (<i>underweight</i>) pada Balita	7.5 %	
					Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun/Balita	0.25 %	
					Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta	0.25 %	
					Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	0.15 %	
					Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	65 %	
					Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu	95 %	
					Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	90 %	
					Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	100 %	



					Proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	80.1 %	
					Jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan	0	
			Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menciptakan gerakan masyarakat hidup sehat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 %	Dinas Kesehatan
					Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda	85 (per 100 rb penduduk)	
					Cakupan Kota yang memberikan pelayanan kesehatan	100 %	
					Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan	100 %	
					Cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN)	93.96 %	
					Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan.	91 %	
					Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	93.8 %	
					Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	0.57 %	



			Standarisasi pelayanan kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	Cakupan SDM kesehatan sesuai standar	100 %	Dinas Kesehatan
			Pengendalian dan pengawasan produksi alat kesehatan dan produk makanan yang higienis	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase PIRT yang memiliki izin edar	41 %	Dinas Kesehatan
		Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	Peningkatan kualitas tata kelola /manajemen pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Capaian SPM PAUD	100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					APK SMP	103,5 %	
					APK SD	102,5 %	
					APK PAUD	36,20 %	
					Capaian SPM Pendidikan Kesetaraan	100 %	
					Capaian SPM Pendidikan Dasar	100 %	
				Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin Operasional	100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF yang Berkualifikasi S1/DIV	74 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Peningkatan minat baca masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pelaksanaan pembinaan perpustakaan	36 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda	Pendidikan, penguatan dan perlindungan hak-hak kaum perempuan dan anak	Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase Pengembangan Forum Anak Skala Kota	100 %	Dinas PPPA dan KB



				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Kader yang aktif melaksanakan KIE kepada masyarakat	100 %	Dinas PPPA dan KB
			Peningkatan partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan daerah	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kab/kota dalam pembangunan	100 %	Dinas PPPA dan KB
			Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung	0.85 %	Dinas PPPA dan KB
			Optimalisasi pembinaan pemuda dan olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	85 %	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase pengembangan kapasitas kepramukaan	1 %	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan kapasitas produksi dan pengolahan hasil perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	1239.161 ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan Budidaya	2,475 ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Peningkatan kesejahteraan petani	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktifitas pertanian per hektar per tahun	90 %	Dinas Pangan dan Pertanian



				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja disektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	62.85 %	Dinas Pangan dan Pertanian
					Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana Pertanian	65 %	
				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian	100 %	Dinas Pangan dan Pertanian
				Program Penyuluhan Pertanian	Persentase penyuluhan Pertanian	100 %	Dinas Pangan dan Pertanian
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pelayanan kesehatan hewan	100 %	Dinas Pangan dan Pertanian
		Pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran, warga lanjut usia dan masyarakat terdampak bencana		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemasyarakatan	80 %	Dinas Sosial
				Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	85 %	Dinas Sosial
					Persentase PMKS lainnya bukan Korban Penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS yang	80 %	



					mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi diluar panti sosial		
				Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	90 %	Dinas Sosial
		Peningkatan produktifitas dan daya saing	Peningkatan jiwa kewirausahaan masyarakat	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	6.23 &	Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja
					Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan	0	
			Peningkatan harmonisasi kebijakan kinerja perusahaan dan tenaga kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kota	60 %	Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja
				Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	60.56 %	Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja
					Upah rata-rata per jam pekerja	19,502 rb	
					Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	91.25 %	



				Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja formal	71 %	Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja
					Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	6.26 %	
					Tingkat setengah pengangguran	4 %	
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	Pengembangan sistem pendidikan berbasis budaya	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Jumlah Aset Sejarah Daerah yang di Lestarkan	75 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pengembangan kebudayaan	Persentase Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang di Lestarkan	93 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya (CB) yang di Lestarkan	84 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial	Peningkatan kualitas koordinasi, fasilitasi kinerja pemerintah daerah, bina mental spiritual serta perekonomian dan pembangunan daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	100 %	Setda



		Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter,	Peningkatan minat baca masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pelaksanaan pembinaan perpustakaan	36 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Penataan prasarana, sarana dan utilitas umum	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase peningkatan PSU Perumahan	75 %	Dinas Perkim
			Penataan kawasan kumuh perkotaan	Program Kawasan Permukiman	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh	90 %	Dinas Perkim
					Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	5.23 %	
			Peningkatan kapasitas rumah layak huni	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman di kota	85 %	Dinas Perkim
					Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	94 %	
			Pemenuhan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	Program Pengembangan Perumahan	Persentase peningkatan kualitas perumahan	80 %	Dinas Perkim



			Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar kehidupan masyarakat	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	98 %	Dinas PUPR
					Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (6.1.1.(a))	98 %	
					Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau (6.1.1.(b))	115.5 liter/detik	
					Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan (6.1.1.(c))	56.46 %	
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota		Dinas PUPR
					Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan		



					pantai di WS kewenangan kab /kota		
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Tingkat Kemantapan Sistem Drainase		Dinas PUPR
				Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	94.9 %	Dinas PUPR
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		Dinas PUPR
					Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.(6.2.1.(b))	100 %	
					Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). (6.2.1 (c))	100 %	
				Program Pengembangan Permukiman	Persentase kawasan pemukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	55 %	Dinas PUPR
		Infrastruktur Perkotaan	Optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah	100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika



				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet dan Pelayanan Publik yang terhubung Secara Online dan Terintegritas yang di fasilitasi Dinas Kominfo	69 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase tingkat keselamatan lalu lintas dan layanan angkutan jalan	70 %	Dinas Perhubungan
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan pengawasan dan pengendalian kegiatan yang berpotensi merusak kualitas lingkungan hidup	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase terkendalinya B3 dan Limbah B3	70 %	Dinas Lingkungan Hidup
		Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kualitas air danau	2 Mg/I	Dinas Lingkungan Hidup
		Pembangunan Rendah Karbon			Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	3 %	
					Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	4.27 mg/I	
				Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	88 %	Dinas Lingkungan Hidup
					Persentase Timbulan Sampah yang di Daur Ulang	12 %	



				Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 penghargaan	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersusun	80 &	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah perusahaan yang menerapkan SNI ISO 14001	1 perusahaan	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	80 &	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Terbangun dan Terpeliharanya Sumber Daya Keanekaragaman Hayati Kota Pangkalpinang	21.3 %	Dinas Lingkungan Hidup
				Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	200304 orang
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			500 orang	
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			500 orang	



7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola	Pengembangan sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan	65 %	Bappeda dan Litbang
					Persentase Kesesuaian Program di APBD dengan Program di RKPD tahunan	100 %	
					Persentase program dalam dokumen perencanaan yang mencapai target	80 %	
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Prog. bid. PPM /bid. perekonomian dan SDA /bid. I % kewilayahan di RKPD tahunan dengan Prog. Bid. P dan PM/bid. perekonomian dan SDA/bid.infrastruktur dan kewilayahan di RPJMD	100 %	Bappeda dan Litbang
					Persentase Kesesuaian Prog.bid pemerintahan dan pembangunan manusia/bid. perekonomian dan SDA/bid.infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Prog. bid pemerintahan dan pembangunan manusia/bid.perekonomian dan SDA / bid. infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan	100 %	



					Persentase Prog bid. pemerintahan dan pembangunan manusia /bid. perekonomian dan SDA/ bid. infrastruktur dan kewilayahan yang mencapai target	80 %	
			Peningkatan kualitas koordinasi, fasilitasi kinerja pemerintah daerah, bina mental spiritual serta perekonomian dan pembangunan daerah	Program Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	65,50 (B)	Setda Kota
			Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase OPD dengan tingkat akuntabilitas Minimal BB	85 %	Inspektorat
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD dengan tingkat Index Reformasi Birokraksi Minimal B	85 %	Inspektorat
			Pengembangan kondusivitas penanaman modal wilayah untuk pengembangan sektor ekonomi unggulan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja



			Optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tertangani	100 %	Kecamatan
					Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 %	
			Peningkatan kapasitas dan kinerja ASN	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	Kecamatan
					Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	78%	
		Konsolidasi Demokrasi	Pembinaan Pembangunan Politik daerah	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik	30 %	Badan Kesbangpol
		Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Peningkatan penegakan hukum dan perundang-undangan	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Pelanggaran Trantibum yang Ditindaklanjuti	100 %	Satpol PP
					Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	100 %	



4.2.1.2 Penyeragaman Prioritas Pembangunan Daerah dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan



perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals/MDGs*) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, TPB/SDGs menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Pangkalpinang dengan Tujuan *SDGs* dilihat pada tabel berikut:



Tabel 4.7

Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Pangkalpinang Dengan Tujuan SDGs

No	Tujuan SDGs	Prioritas Pembangunan Kota Pangkalpinang	RKPD 2022				Perangkat Daerah
			Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		
					Indikator (outcome)	Target	
1	Tanpa Kemiskinan;	Percepatan pengentasan kemiskinan	Pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran, warga lanjut usia dan masyarakat terdampak bencana	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase peningkatan kapasitas PSKS dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial	75 %	Dinas Sosial
2	Tanpa Kelaparan;			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	85 %	Dinas Sosial
10	Berkurangnya Kesenjangan		Peningkatan kesejahteraan petani	Program Penyediaan dan Pengembangan	Nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja disektor	62.85 %	Dinas Pangan dan Pertanian



				Prasarana Pertanian	pertanian (rupiah per tenaga kerja)		
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktifitas pertanian per hektar per tahun	90 %	Dinas Pangan dan Pertanian
				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian	100 %	Dinas Pangan dan Pertanian
			Peningkatan kapasitas produksi dan hasil pengolahan perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	1239.161 ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan Budidaya	2,475 ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan dan usaha pengolahan hasil perikanan	54.6 kg/kapita/th	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Diversifikasi konsumsi	Program Pengawasan	Persentase pangan yang	85 %	Dinas Pangan dan



			pangan pokok berbasis potensi lokal	Keamanan Pangan	aman dikonsumsi		Pertanian
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase pengadaan cadangan pangan	100 %	Dinas Pangan dan Pertanian
				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH) mencapai; dan tingkat tingkat konsumsi ikan	88 %	Dinas Pangan dan Pertanian
		Peningkatan nilai tambah sektor unggulan melalui penguatan sektor industri pengolahan dan UMKM	Pemberian bantuan modal kepada pelaku UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha mikro yang menjadi wirausaha	2,2 %	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
				Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Usaha Simpan Pinjam yang memiliki Izin	43.75 %	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
				Program Pengembangan UMKM	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro	30.25 %	Dinas Koperasi, UKM dan



					Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan		Perdagangan
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan masyarakat	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 %	Dinas Kesehatan
			Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 %	
					Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 %	
					Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan	100 %	



					kesehatan ibu hamil		
					Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	100 %	
					Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	100 %	
					Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 %	
					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	



					Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standar	100 %	
					Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standar	100 %	
					Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	
					Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %	
					Prevalensi anemia pada ibu hamil	10.5 %	



					Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	98.5 %	
					Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	98.5 %	
					Angka kelahiran padaperempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ ASFR</i>)	5 %	
					Prevalensi tekanan darah tinggi	16 %	
					Jumlah kabupaten /kota yang memiliki	9 puskesmas	



					puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa		
					Insiden Tuberculosis (ITB) per 100.000 penduduk	0.21 %	
					Prevalensi HIV pada populasi dewasa	0.03 %	
					Proporsi kematian akibat keracunan	0	
					Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	99.5 %	
					Persentase kabupaten/ Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	100 %	
					Persentase	100 %	



					kabupaten/ kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B		
					Kejadian malaria per 1.000 orang	<1	
					Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria	1	
					Jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	0	
					Jumlah kota dengan eliminasi kusta	0	
					Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi filariasis	0	



					(berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)		
					Persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun	0.15 %	
					Persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun	0.15 %	
					Prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun	0.4 %	
					Prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun	0.4 %	
					Persentase bayi usia kurang dari 6	80 %	



					bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	
					Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	2.6 %
					Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	2.6 %
					Prevalensi Kekurangan Gizi (<i>underweight</i>) pada Balita	7.5 %
					Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun/Balita	0.25 %
					Prevalensi Stunting (pendek dan sangat	0.25 %



					pendek) dibawah 2 tahun/ Baduta		
					Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	0.15 %	
					Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	65 %	
					Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu	95 %	
					Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	90 %	
					Persentase puskesmas yang	100 %	



					melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga		
					Proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	80.1 %	
					Jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan	0	
			Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menciptakan gerakan masyarakat hidup sehat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 %	
					Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda	85 (per 100 rb penduduk)	
					Cakupan Kota yang memberikan	100 %	



					pelayanan kesehatan		
					Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan	100 %	
					Cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN)	93.96 %	
					Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenaga kerjaan.	91 %	
					Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	93.8 %	
					Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	0.57 %	



			Standarisasi pelayanan kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	Cakupan SDM kesehatan sesuai standar	100 %	
			Pengendalian dan pengawasan produksi alat kesehatan dan produk makanan yang higienis	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase PIRT yang memiliki izin edar	41 %	
4	Pendidikan Berkualitas	Perwujudan kualitas pendidikan berbasis karakter	Peningkatan kualitas tata kelola /manajemen pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Capaian SPM PAUD	100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					APK SMP	103,5 %	
					APK SD	102,5 %	
					APK PAUD	36,20 %	
					Capaian SPM Pendidikan Kesetaraan	100 %	
					Capaian SPM Pendidikan Dasar	100 %	
				Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin Operasional	100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Pendidikan Dasar, PAUD	74 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



				kan	dan PNF yang Berkualifikasi S1/DIV		
			Peningkatan minat baca masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pelaksanaan pembinaan perpustakaan	36 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5	Kesetaraan Gender	Peningkatan kesejahteraan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak	Pendidikan, penguatan dan perlindungan hak-hak kaum perempuan dan anak	Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase Pengembangan Forum Anak Skala Kota	100 %	Dinas PPPA dan KB
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Kader yang aktif melaksanakan KIE kepada masyarakat	100 %	Dinas PPPA dan KB
			Peningkatan partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan daerah	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kab/kota dalam pembangunan	100 %	Dinas PPPA dan KB
			Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung	0.85 %	Dinas PPPA dan KB
6	Air Bersih dan	Peningkatan	Peningkatan	Program	Persentase	98 %	Dinas PUPR



Sanitasi Layak	ketersediaan infrastruktur yang berkualitas	pelayanan infrastruktur dasar kehidupan masyarakat	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi		
				Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (6.1.1.(a))	98 %	
				Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau (6.1.1.(b))	115.5 liter/detik	
				Proporsi populasi yang	56.46 %	



					memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan (6.1.1.(c))		
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. (6.2.1.(b))	100 %	
					Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). (6.2.1 (c))	100 %	
7	Energi Bersih dan Terjangkau						
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan nilai tambah sektor unggulan melalui penguatan Sektor Industri Pengolahan dan UMKM	Peningkatan ekspor dan penguatan pasar dalam negeri	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Bersih	Rp. US\$ 665,000,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
				Program Penggunaan dan Pemasaran	Jumlah upaya penggunaan dan pemasaran	2 upaya	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan



				Produk Dalam Negeri	produk dalam negeri		
			Pengembangan IKM (Industri Kecil dan Menengah) sebagai penggerak ekonomi berbasis kerakyatan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIK	22 %	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
					Proporsi Nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita	23.6 %	
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	5 %	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
					Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Ijin	5 %	



					Usaha Industri(IUI) dan Ijin Usaha Perluasan Industri(IPUI) Kecil dan Industri		
					Laju pertumbuhan PDRB Industri manufaktur	0,4 %	
					Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	50.71 %	
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Data Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Perusahaan Kawasan industri di Kabupaten/Kota yang Masuk SIINas Terhadap Total Populasi Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Perusahaan	75 %	



					Kawasan Industri di Kabupaten/ Kota		
					Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	1.25 %	
		Perwujudan kemudahan investasi untuk pengembangan sektor pariwisata, industri dan perdagangan	Pengembangan kondusivitas penanaman modal wilayah untuk pengembangan sektor ekonomi unggulan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah investor	40 %	Dinas PMPSTP dan Tenaga Kerja
				Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kota	40 %	Dinas PMPSTP dan Tenaga Kerja
		Peningkatan kualitas angkatan kerja lokal	Peningkatan jiwa kewirausahaan masyarakat	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	6.23 %	Dinas PMPSTP dan Tenaga Kerja
					Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan		
			Peningkatan harmonisasi	Program Penempatan	Persentase tenaga kerja	60 %	Dinas PMPSTP dan



			kebijakan kinerja perusahaan dan tenaga kerja	Tenaga Kerja	yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kota		Tenaga Kerja
				Program Hubungan Industrial	Upah rata-rata per jam pekerja	19,502 rb	Dinas PMPSTP dan Tenaga Kerja
					Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenaga-kerjaan	91.25 %	
				Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja formal	71 %	Dinas PMPSTP dan Tenaga Kerja
					Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	6.26 %	
					Tingkat setengah pengangguran	4 %	
9	Industri, Inovasi	Peningkatan	Penataan	Program	Persentase	75 %	Dinas Perkim



	dan Infrastruktur	pengelolaan tata kota wilayah	prasarana, sarana dan utilitas umum	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	peningkatan PSU Perumahan		
			Penataan kawasan kumuh perkotaan	Program Kawasan Permukiman	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh	90 %	Dinas Perkim
					Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	5.23 %	
			Peningkatan kapasitas rumah layak huni	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman di kota	85 %	Dinas Perkim
					Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	94 %	
			Pemenuhan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau	Program Pengembangan Perumahan	Persentase peningkatan kualitas perumahan	80 %	Dinas Perkim



			relokasi program				
		Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas	Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar kehidupan masyarakat	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota		Dinas Perkim
					Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab /kota		
				Program Pengelolaan dan Pengemba- ngan Sistem Drainase	Tingkat Kemantapan Sistem Drainase		Dinas PUPR



				Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten /Kota	94.9 %	Dinas PUPR
				Program Pengembangan Permukiman	Persentase kawasan pemukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	55 %	Dinas PUPR
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	Optimalisasi perlindungan keamanan dan kenyamanan masyarakat	Peningkatan penegakan hukum dan perundang-undangan	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Pelanggaran Trantibum yang Ditindaklanjuti	100 %	Satpol PP
					Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100 %	
			Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas	Persentase konflik sosial yang dapat diselesaikan	80 %	Badan Kesbangpol



				Penanganan Konflik Sosial			
				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	12 %	Badan Kesbangpol
12	Konsumsi dan yang Bertanggung Jawab	Percepatan pengentasan kemiskinan	Diversifikasi konsumsi pangan pokok berbasis potensi lokal	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	85 %	Dinas Pangan dan Pertanian
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase pengadaan cadangan pangan	100 %	Dinas Pangan dan Pertanian
				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH) mencapai; dan tingkat tingkat konsumsi ikan	88 %	Dinas Pangan dan Pertanian



13	Penanganan Perubahan Iklim	Rehabilitasi kerusakan lingkungan hidup	Peningkatan pengawasan dan pengendalian kegiatan yang berpotensi merusak kualitas lingkungan hidup	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase terkendalinya B3 dan Limbah B3	70 %	Dinas Lingkungan Hidup
14	Ekosistem Lautan			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kualitas air danau	2 Mg/I	Dinas Lingkungan Hidup
15	Ekosistem Daratan				Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	3 %	
					Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	4.27 mg/I	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	88 %			



					Persentase Timbunan Sampah yang di Daur Ulang	12 %	
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1 penghargaan	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersusun	80 &	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah perusahaan yang menerapkan SNI ISO 14001	1 perusahaan	Dinas Lingkungan Hidup



				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	80 &	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Terbangun dan Terpeliharanya Sumber Daya Keanekaragaman Hayati Kota Pangkalpinang	21.3 %	Dinas Lingkungan Hidup
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	200304 orang	BPBD
					Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	500 orang	
					Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	500 orang	



16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	Peningkatan kesejahteraan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak	Pendidikan, penguatan dan perlindungan hak-hak kaum perempuan dan anak	Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase Pengembangan Forum Anak Skala Kota	100 %	Dinas PPPA dan KB
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Kader yang aktif melaksanakan KIE kepada masyarakat	100 %	Dinas PPPA dan KB
				Program Perlindungan Perempuan	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 Tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	0.028 %	Dinas PPPA dan KB



			Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung	0.85 %	Dinas PPPA dan KB
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan						



4.2.1.3 Sinkronisasi Prioritas Daerah Dengan Prioritas Provinsi

Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk tahun 2022 terdiri dari 2 kriteria yaitu:

1. Prioritas Pembangunan Daerah I (Utama); berisi program-program unggulan yang berkorelasi dan sesuai tema pembangunan tahun 2022;
2. Prioritas Pembangunan daerah II (Penunjang) berisi program-program unggulan yang tidak berkorelasi secara langsung dengan tema pembangunan, namun mendukung tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun 2022.

Prioritas pembangunan daerah I (Utama) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022, sebagai berikut:

1. Pengembangan Pembangunan Agropolitan

Fokus kegiatan pada: 1). memperluas lahan produksi lada di Bangka Belitung dalam rangka mengembalikan lada sebagai produk agrobisnis andalan Bangka Belitung sehingga kejayaan Babel sebagai Provinsi Lada bisa dicapai kembali; 2). membangun pusat penelitian dan pengembangan rekayasa lada maupun produk perkebunan lainnya seperti karet dan sawit di Provinsi Bangka Belitung; 3). Memberikan pelatihan agrobisnis profesional kepada petani-petani di Bangka Belitung sehingga petani mampu memproduksi produk pertanian (khususnya lada) dengan kualitas unggul; 4). memberikan bantuan bibit dan



sarana pendukung pengembangan agrobisnis lainnya agar petani memperoleh hasil optimal

2. Pembangunan Bahari

Fokus kegiatan pada: 1). Memberikan dukungan berupa pemberian alat-alat yang modern dan pendampingan proses hilir hasil perikanan terhadap nelayan-nelayan Babel, demi peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk; 2). mendukung pelaku usaha sektor bahari untuk mengembangkan sektor usaha yang ramah lingkungan.

3. Pengembangan Pariwisata

Fokus kegiatan pada: 1). menjadikan Bangka Belitung sebagai destinasi pariwisata bertaraf internasional melalui event-event seni - budaya atau olahraga bernuansa bahari level nasional/internasional seperti, Festival Budaya Melayu, Festival Kuliner Bangka-Belitung, Karnaval Budaya serumpun Sebalai, Triathlon, Maraton, dll; 2). rebranding pantai-pantai di Babel melalui desain PR yang menarik seperti cerita atau sejarah keunggulan pantai tersebut disbanding lainnya; 3). memberikan insentif kepada investor pariwisata untuk membangun bisnis pariwisatanya di Bangka Belitung melalui pembangunan infrastruktur (jalan, listrik, air, internet, dll) secara memadai demi pengembangan konsep *waterfront city*.

4. Peningkatan Ekonomi Masyarakat



Fokus kegiatan pada: 1). mengembangkan bisnis UMKM di Bangka Belitung agar tetap kompetitif di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) melalui bantuan promosi (Gelar Pameran UMKM), temu investor atau buyer (*Business Gathering*), dan pendampingan pelatihan kapasitas UMKM (*Training*); 2). memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mengakses kredit pengembanganusaha; 3). melakukan revitalisasi pasar-pasar tradisional di Bangka Belitung menjadi pasar yang bersih sehingga bisa bersaing dengan pasar swalayan modern; 4). pendirian dan optimalisasi peran koperasi untuk membantu para petani dan pedagang kecil untuk mencegah penghisapan para tengkulak dan rentenir.

5. Pembangunan Kesehatan

Pembangunan kesehatan difokuskan pada upaya untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat, dan meningkatnya daya tanggap dan perlindungan masyarakat terhadap resiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (*life cycle*), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, hingga lansia. Target sasaran yang telah dilaksanakan antara lain upaya peningkatan dan pemenuhan terhadap: percepatan penurunan *stunting* melalui status kesehatan dan gizi ibu dan anak; pengendalian penyakit; akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil/pedesaan/pulau-pulau;



cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan; kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta responsivitas sistem kesehatan.

6. Pembangunan Pendidikan

Pembangunan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini masih difokuskan kepada pemerataan pendidikan melalui peningkatan akses, peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, untuk meningkatkan cakupan pendidikan sampai pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mulai dari pendidikan anak usia dini, penuntasan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah, hingga memberikan kesempatan pendidikan tinggi bagi masyarakat. Pemenuhan akses layanan pendidikan berkualitas ini juga diharapkan dapat menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan antar kelompok masyarakat, antarwilayah, dan antarjenis kelamin (gender). Sementara itu, khusus pembangunan pendidikan menengah difokuskan pada dua hal yaitu meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas dan meningkatkan relevansi lulusan pendidikan menengah (vokasi) terhadap dunia kerja, terutama dalam upaya mendukung capaian prioritas unggulan daerah.

7. Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik



Fokus kegiatan Reformasi birokrasi berbasis kompetensi (*meritokrasi*) yaitu dengan proses promosi jabatan di Pemprov melalui *fit and proper test* dengan lelang jabatan.

Keterkaitan dan persandingan antara Prioritas Pembangunan Kota Pangkalpinang dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:



Tabel 4.8

**Keselarasan antara Prioritas Pembangunan Utama Provinsi dengan Prioritas Pembangunan
Kota Pangkalpinang Tahun 2022**

No	RKPD Provinsi Tahun 2022		RKPD Kota Tahun 2022					Perangkat Daerah
	Prioritas Provinsi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah			
					Nama Program	Indikator Kinerja (out come)	Target	
1	Pembangunan Agropolitan	Peningkatan Produksi dan Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Percepatan pengentasan kemiskinan	Peningkatan kesejahteraan petani	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktifitas pertanian per hektar per tahun	90 %	Dinas Pangan dan Pertanian
					Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja disektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	62.85 %	Dinas Pangan dan Pertanian
						Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana Pertanian	65 %	
					Program Pengendalian dan Penanggula-ngan Bencana	Persentase pengendalian dan penanggula-ngan bencana	100 %	Dinas Pangan dan Pertanian



					Pertanian	Pertanian		
					Program Penyuluhan Pertanian	Persentase penyuluhan Pertanian	100 %	Dinas Pangan dan Pertanian
					Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pelayanan kesehatan hewan	100 %	Dinas Pangan dan Pertanian
2	Pembangunan Bahari	Peningkatan produksi dan Pengelolaan Hasil Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	Percepatan pengentasan kemiskinan	Peningkatan kapasitas produksi dan hasil pengolahan perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	1239.161 ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan Budidaya	2,475 ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan dan usaha pengolahan hasil perikanan	54.6 kg/kapita/th	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	Pengembangan Pembangunan Pariwisata	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Kelembagaan Pariwisata Serta	Pengembangan potensi wisata daerah	Optimalisasi Kawasan Kampung Wisata dan Pengembangan Destinasi Wisata Baru	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	(8.9.1*) Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (PDRB selaku kewenangan Kota	5.35 %	Dinas Pariwisata



		Pengembangan Ekonomi Kreatif				Pangkalpinang) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	10 %	Dinas Pariwisata
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase jumlah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf	35 %	
						(8.9.2*) Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	11.59 %	
					Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAKI	Persentase jumlah pengembangan ekonomi kreatif	35 %	
				Peningkatan implementasi protokol kesehatan pada aktivitas ekonomi sektor pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	10 %	
						Tingkat hunian akomodasi	50 %	
						(8.9.1.(a))	343	



						Jumlah wisatawan mancanegara	orang	
						(8.9.1.(b)) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	161370 orang	
			Perwujudan kualitas pendidikan berbasis karakter	Pengembangan sistem pendidikan berbasis budaya	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Jumlah Aset Sejarah Daerah yang di Lestarkan	75 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Program Pengembangan kebudayaan	Persentase Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang di Lestarkan	93 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya (CB) yang di Lestarkan	84 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Peningkatan kesempatan kerja	Peningkatan kualitas angkatan kerja lokal	Peningkatan jiwa kewirausahaan masyarakat	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	6.23 %	Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja
						Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak		



						sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan		
				Peningkatan harmonisasi kebijakan kinerja perusahaan dan tenaga kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kota	60 %	Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja
					Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	60.56 %	Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja
						Upah rata-rata per jam pekerja	19,502 rb	
						Proporsi peserta	91.25 %	



						program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan		
					Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	80 %	Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja
						Persentase tenaga kerja formal	71 %	
						Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	6.26 %	
						Tingkat setengah pengangguran	4 %	
		Meningkatkan peran KUKM dalam meningkatkan kesempatan kerja	Peningkatan nilai tambah sektor unggulan melalui penguatan sektor industri pengolahan dan UMKM	Pemberian bantuan modal kepada pelaku UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha mikro yang menjadi wirausaha	2.2 %	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
					Program	Persentase	43.75 %	Dinas Koperasi,



				Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Usaha Simpan Pinjam yang memiliki Izin		UMKM dan Perdagangan
				Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha mikro menjadi usaha kecil	1 %	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
					Persentase akses UMKM (Usaha Mikro Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	30.25 %	
				Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	26.67 %	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP koperasi yang dinilai kesehatannya	20 %	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
				Program Diklat Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan	55 %	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
				Program Pemberdayaan dan	Persentase peningkatan volume usaha,	14 %	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan



					Perlindungan Koperasi	RAT Koperasi		
		Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan lapangan pekerjaan	Perwujudan kemudahan investasi untuk pengembangan sektor pariwisata, industri dan perdagangan	Pengembangan kondusivitas penanaman modal wilayah untuk pengembangan sektor ekonomi unggulan	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kota	40 %	Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja
					Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah investor	40 %	Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM	8.09 %	Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja
					Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	90 %	Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja
					Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase jenis izin yang diterbitkan secara online	79.66 %	Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja
		Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	Percepatan pengentasan kemiskinan	Pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran, warga lanjut usia dan masyarakat	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemasyara- katan	80 %	Dinas Sosial



				terdampak bencana				
5	Pembangunan Kesehatan	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan masyarakat	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 %	
		Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan masyarakat	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 %	
						Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 %	
						Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	
						Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan	100 %	



						Skrining Kesehatan Sesuai Standar		
						Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	100 %	
						Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 %	
						Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	
						Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standar	100 %	
						Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan	100 %	



						HIV Sesuai Standar		
						Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	
						Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %	
						Prevalensi anemia pada ibu hamil	10.5 %	
						Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	98.5 %	
						Persentase perempuan pernah kawin	98.5 %	



						umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan		
						Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ ASFR</i>)	5 %	
						Prevalensi tekanan darah tinggi	16 %	
						Jumlah kabupaten/ kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	9 puskesmas	
						Insiden Tuberculosis (ITB) per 100.000 penduduk	0.21 %	
						Prevalensi HIV pada populasi dewasa	0.03 %	



						Proporsi kematian akibat keracunan	0	
						Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	99.5 %	
						Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	100 %	
						Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B	100 %	
						Kejadian malaria per 1.000 orang	<1	
						Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	1	
						Jumlah orang memerlukan	0	



						intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan		
						Jumlah kota dengan eliminasi kusta	0	
						Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)	0	
						Persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun	0.15 %	
						Persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun	0.15 %	
						Prevalensi obesitas pada penduduk	0.4 %	



						umur lebih besar sama dengan 18 tahun		
						Prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun	0.4 %	
						Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	80 %	
						Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	2.6 %	
						Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	2.6 %	
						Prevalensi Kekurangan Gizi (<i>underweight</i>) pada Balita	7.5 %	
						Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5	0.25 %	



						tahun/Balita		
						Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta	0.25 %	
						Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	0.15 %	
						Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	65 %	
						Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu	95 %	
						Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	90 %	
						Persentase puskesmas yang	100 %	



						melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga		
						Proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	80.1 %	
						Jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan	0	
				Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menciptakan gerakan masyarakat hidup sehat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 %	
						Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda	85 (per 100 rb penduduk)	
						Cakupan Kota yang memberikan pelayanan kesehatan	100 %	
						Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN	100 %	



					bidang kesehatan		
					Cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN)	93.96 %	
					Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenaga-kerjaan.	91 %	
					Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	93.8 %	
					Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	0.57 %	
				Standarisasi pelayanan kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	Cakupan SDM kesehatan sesuai standar	100 % Dinas Kesehatan
				Pengendalian dan pengawasan produksi alat	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan	Persentase PIRT yang memiliki izin edar	41 % Dinas Kesehatan



				kesehatan dan produk makanan yang higienis	Makanan Minuman			
6	Pembangunan Pendidikan	Peningkatan akses pelayanan pendidikan	Perwujudan kualitas pendidikan berbasis karakter	Peningkatan kualitas tata kelola /manajemen pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Capaian SPM PAUD	100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						APK SMP	103,5 %	
						APK SD	102,5 %	
						APK PAUD	36,20 %	
						Capaian SPM Pendidikan Kesetaraan	100 %	
						Capaian SPM Pendidikan Dasar	100 %	
					Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin Operasional	100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Peningkatan Mutu Layanan Pendidika	Perwujudan kualitas pendidikan berbasis karakter	Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF yang Berkualifikasi S1/DIV	74 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan	Peningkatan kompetensi dan profesional ASN	Peningkatan pelayanan publik	Peningkatan kapasitas dan kinerja ASN	Program Kepegawaian Daerah	Rasio pegawai fungsional	7.5 %	BKPSDMD
						Rasio pegawai pendidikan tinggi dan	100 %	



	Publik					menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		
						Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	100 %	
						Program Pengembangan SDM	Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	78% BKPSDMD



Tabel 4.9

**Keselarasan antara Prioritas Pembangunan Penunjang Provinsi dengan Prioritas Pembangunan
Kota Pangkalpinang Tahun 2022**

No	RKPD Provinsi Tahun 2022		RKPD Kota Tahun 2022					Perangkat Daerah
	Prioritas Provinsi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah			
					Nama Program	Indikator Kinerja (out come)	Target	
1	Pengembangan Tata Kelola Pertambangan							
2	Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum	Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas	Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar kehidupan masyarakat	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/ Kota	94.9 %	Dinas PUPR
		Peningkatan ketersediaan dan kapasitas SDM Konstruksi	Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas	Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar kehidupan masyarakat	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		Dinas PUPR
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi		Dinas PUPR



						yang terindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab /kota		
						Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota		
						Peningkatan kualitas tata ruang wilayah	100 %	Dinas PUPR
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangu-nan infrastruktur perumahan dan permukiman	Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas	Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar kehidupan masyarakat	Program Penyelengga-raan Penataan Ruang	Persentase Terpenuhi-nya peran tata ruang dan pertanahan	98 %	Dinas PUPR



						Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (6.1.1.(a))	98 %	
						Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau (6.1.1.(b))	115.5 liter/detik	
						Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan (6.1.1.(c))	56.46 %	
					Program Pengelolaan	Persentase jumlah rumah		Dinas PUPR



					dan Pengembangan Sistem Air Limbah	tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		
						Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.(6.2.1.(b))	100 %	
						Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). (6.2.1 (c))	100 %	
				Peningkatan kualitas tata ruang wilayah	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan IMB kab/Kota	67,5 %	Dinas PUPR
			Peningkatan pengelolaan tata kota wilayah	Pemenuhan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi	Program Pengembangan Perumahan	Persentase peningkatan kualitas perumahan	80 %	Dinas Perkim



				program				
				Penataan prasarana, sarana dan utilitas umum	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase peningkatan PSU Perumahan	75 %	Dinas Perkim
		Peningkatan, Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan	Peningkatan pelayanan publik	Optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase tingkat keselamatan lalulintas dan layanan angkutan jalan	70 %	Dinas Perhubungan
3	Pembangunan Sosial	Peningkatan keadilan dan kesetaraan gender	Peningkatan kesejahteraan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak	Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung	0.85 %	Dinas PPPA dan KB
		Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	Peningkatan kesejahteraan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak	Pendidikan, penguatan dan perlindungan hak-hak kaum perempuan dan anak	Program Perlindungan Perempuan	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 Tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual atau emosional) oleh pasangan atau	0.028 %	Dinas PPPA dan KB



						mantan pasangan selain pasangan dalam 12 bulan terakhir		
					Program Perlindungan Khusus Anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	0.055 %	Dinas PPPA dan KB
					Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	12 %	Dinas PPPA dan KB
		Peningkatan pelayanan terhadap pemberian hak-hak anak	Peningkatan kesejahteraan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak	Pendidikan, penguatan dan perlindungan hak-hak kaum perempuan dan anak	Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase Pengembangan Forum Anak Skala Kota	100 %	Dinas PPPA dan KB
		Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh	Peningkatan pelayanan publik	Optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	670	Dinas Dukcapil
						Cakupan Kememilikan Kartu keluarga	96 %	
						Cakupan Penerbitan	99.6 %	



		seimbang				Kartu Tanda Penduduk (KTP)		
						Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	100 %	
						Perakaman KTP elektronik	98 %	
						Persentase anak usia 0-7 tahun kurang 1 (satu) hari yg memiliki KIA	70 %	
					Program Pencatatan Sipil	Rasio Bayi Berakte Kelahiran per1000 penduduk	920	Dinas Dukcapil
						Kepemilikan Akte Kelahiran	88 %	
						Rasio Perkawinan yang tercatat di catatan sipil per 1000 penduduk	88 %	
						Cakupan Kepemilikan Akte Kematian	31 %	
						Peningkatan cakupan akta kelahiran yang diterbitkan	3,5 %	
						Persentase anak (0-18) tahun yang	92 %	



						memiliki akta kelahiran		
						Peningkatan cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan	65 %	
						Peningkatan cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang perceraianya tercatat	72 %	
						Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	88 %	
					Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan	2,1 %	Dinas Dukcapil



						perjanjian kerja sama		
					Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase keserasian database kependudukan	96 %	Dinas Dukcapil
						Persentase tersajinya data kependudukan yang akurat	50 %	
			Peningkatan kesejahteraan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak	Pemberdayaan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Program Pengendalian Penduduk	TFR (Total Fertility Rate)	1.9 Rata-rata anak per wanita	Dinas PPPA dan KB
					Program Pembinaan KB	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 Tahun yang berstatus kawin	81 %	Dinas PPPA dan KB
						Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan	79.84 %	



						menggunakan alat kontrasepsi metode mode		
				Peningkatan partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan daerah	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)	8.2 Kelahiran per 1000 WUS	Dinas PPPA dan KB
		Peningkatan Insan pemuda yang mandiri dan berprestasi	Peningkatan kualitas organisasi kepemudaan dan olahraga	Optimalisasi pembinaan pemuda dan olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan		Dinas Pemuda dan Olahraga
					Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase pengembangan kapasitas kepramukaan	1 %	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Peningkatan prestasi dan peran serta masyarakat dalam berolahraga	Peningkatan kualitas organisasi kepemudaan dan olahraga	Optimalisasi pembinaan pemuda dan olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Prestasi Olahraga		Dinas Pemuda dan Olahraga
		Peningkatan pemberdayaan,	Percepatan pengentasan kemiskinan	Pemberian bantuan kepada	Program Penanganan Warga Negara	Persentase penanganan warga negara	60 %	Dinas Sosial



		rehabilitasi, jaminan dan perlindungan sosial		rumah tangga sasaran, warga lanjut usia dan masyarakat terdampak bencana	Migran Korban Tindak Kekerasan	migran korban tindak kekerasan		
					Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	85 %	Dinas Sosial
						Persentase PMKS lainnya bukan Korban Penyalahgu- naan NAPZA, HIV/AIDS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi diluar panti sosial	80 %	
					Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	90 %	Dinas Sosial



						bencana daerah Kabupaten/ Kota		
4	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata kelola pengawasan	Pemantapan Reformasi Birokrasi	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase OPD dengan tingkat akuntabilitas Minimal BB	85 %	Inspektorat
					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD dengan tingkat Index Reformasi Birokrasi Minimal B	85 %	Inspektorat
		Peningkatan keselarasan antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan	Pemantapan Reformasi Birokrasi	Pengembangan sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan	65 %	Bappeda dan Litbang
						Persentase Kesesuaian Program di APBD dengan Program di RKPD tahunan	100 %	
						Persentase program dalam dokumen perencanaan yang mencapai target	80 %	
					Program	Persentase	100 %	Bappeda dan



					Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kesesuaian Prog. bid. PPM /bid. perekonomian dan SDA /bid. I % kewilayahan di RKPD tahunan dengan Prog. Bid. P dan PM/bid. perekonomian dan SDA/bid.infrast ruktur dan kewilayahan di RPJMD		Litbang
						Persentase Kesesuaian Prog.bid pemerintahan dan pembangunan manusia/bid. perekonomian dan SDA/bid.infrast ruktur dan kewilayahan di APBD dengan Prog. bid pemerintahan dan pembangunan manusia/	100 %	



						bid.perekonomi an dan SDA / bid. infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan		
						Persentase Prog bid. pemerintahan dan pembangunan manusia /bid. perekonomian dan SDA/ bid. infrastruktur dan kewilayahan yang mencapai target	80 %	
					Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	100 %	Bappeda dan Litbang



				Peningkatan kualitas koordinasi, fasilitasi kinerja pemerintah daerah, bina mental spiritual serta perekonomian dan pembangunan daerah	Program Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	65,50 (B)	Sekretariat Daerah
					Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	Sekretariat Daerah
		Peningkatan penataan peraturan perundangan dan kebijakan daerah	Pemantapan Reformasi Birokrasi	Peningkatan kualitas koordinasi, fasilitasi kinerja pemerintah daerah, bina mental spiritual serta perekonomian dan pembangunan daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase fasilitasi hukum yang dilaksanakan	100 %	Sekretariat Daerah
						Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	1 kebijakan	



		Peningkatan tata laksana dan kinerja pemerintah daerah	Pemantapan Reformasi Birokrasi	Peningkatan kualitas koordinasi, fasilitasi kinerja pemerintah daerah, bina mental spiritual serta perekonomian dan pembangunan daerah	Program Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Persentase kinerja organisasi yang ditingkatkan	100 %	Sekretariat Daerah
				Optimalisasi BUMD Pangkalpinang	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pengadaan barang yang dilaksanakan	100 %	Sekretariat Daerah
						Persentase kegiatan pembangunan yang dilaksanakan	100 %	
						Persentase terpenuhinya pelaksanaan kebijakan perekonomian	100 %	
						Persentase kebijakan terkait sumber daya alam yang dilaksanakan	100 %	



		Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Peningkatan pelayanan publik	Optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah	100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet dan Pelayanan Publik yang terhubung Secara Online dan Terintegritas yang di fasilitasi Dinas Kominfo	69 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	90 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Program	Tingkat	100 %	Dinas



					Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Keamanan Informasi Pemerintah		Komunikasi dan Informatika
5	Pembangunan Demokrasi	Peningkatan peran serta masyarakat dalam berdemokrasi	Optimalisasi perlindungan keamanan dan kenyamanan masyarakat	Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan	80 %	Badan Kesbangpol
					Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	12 %	Badan Kesbangpol
		Peningkatan pelayanan terhadap Hak-hak politik masyarakat	Optimalisasi perlindungan keamanan dan kenyamanan masyarakat	Pembinaan Pembangunan Politik daerah	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik	30 %	Badan Kesbangpol
					Program Pemberdayaan dan	Jumlah ORMAS yang terdata	1 data	Badan Kesbangpol



					Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			
		Peningkatan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)	Optimalisasi perlindungan keamanan dan kenyamanan masyarakat	Peningkatan penegakan hukum dan perundang-undangan	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Pelanggaran Trantibum yang Ditindaklanjuti	100 %	Satpol PP dan Damkar
						Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	100 %	
				Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik sosial yang dapat diselesaikan	80 %	Badan Kesbangpol
6	Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan	Peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	Penanggulangan bencana alam	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	200304 orang	BPBD
						Jumlah warga negara yang memperoleh	500 orang	



						layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
						Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	500 orang	
						Cakupan penanganan bencana kebakaran kota	100 %	
						Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	
7	Pengendalian	Peningkatan	Rehabilitasi	Peningkatan	Program	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 menit	Dinas
						Persentase	70 %	



	Lingkungan Hidup	pengendalian terhadap kualitas air sungai	kerusakan lingkungan hidup	pengawasan dan pengendalian kegiatan yang berpotensi merusak kualitas lingkungan hidup	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	terkendalinya B3 dan Limbah B3		Lingkungan Hidup
		Peningkatan pengendalian terhadap kualitas udara			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kualitas air danau	2 Mg/I	Dinas Lingkungan Hidup
		Peningkatan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan				Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	3 %	
						Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	4.27 mg/I	
		Program Pengelolaan Persampahan			Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	88 %	Dinas Lingkungan Hidup	
					Persentase Timbulan Sampah yang di	12 %		



					Daur Ulang		
					Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1 penghargaan Dinas Lingkungan Hidup
					Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersusun	80 % Dinas Lingkungan Hidup
					Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah perusahaan yang menerapkan SNI ISO 14001	1 perusahaan Dinas Lingkungan Hidup
					Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	80 % Dinas Lingkungan Hidup
					Program Pengelolaan Keanekar-	Persentase Terbangun dan Terpeliharanya	21.3 % Dinas Lingkungan Hidup



					gaman Hayati (Kehati)	Sumber Daya Keanekara- gaman Hayati Kota Pangkalpinang		



4.2.1.4 Penyeragaman Permasalahan Pembangunan, Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 4.10

**Keselarasan Antara Permasalahan, Isu Strategis dan Prioritas Daerah
Kota Pangkalpinang Tahun 2022**

No	Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Daerah
1	Masih adanya fasilitas pendidikan seperti ruang kelas yang kondisinya tidak baik, baik kerusakan berat maupun ringan	Peningkatan kualitas SDM melalui pemerataan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan	Perwujudan kualitas pendidikan berbasis karakter;
2	Masih ditemukannya kasus anak tidak melanjutkan sekolah karena putus di masa studi		
3	Persentase lulusan SD/MI yang melanjutkan ke SMP/MTs mengalami penurunan selama kurun waktu 2016-2020,		
4	Masih adanya pendidik yang belum memenuhi kualifikasi S1/D4		
5	Berfluktuasinya kasus Covid 19 di Kota Pangkalpinang memerlukan perhatian dan penanganan kesehatan yang serius	Penanganan dan Pemulihan Pandemi COVID-19 di Kota Pangkalpinang	Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan masyarakat
6	Masih ditemukannya kasus kematian ibu melahirkan bayi dan balita		
7	Jumlah Posyandu aktif belum ideal		
8	Masih adanya Prevalensi balita pendek dan sangat pendek		
9	Masih berfluktuasinya Angka kesakitan dan Angka kematian DBD		
10	Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)		
11	Tingginya PMKS Kota Pangkalpinang		
12	Meningkatnya angka		



**RKPD KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2022**

	kemiskinan Kota Pangkalpinang karena terjadinya Covid-19		
13	Masih ada keluarga miskin di Kota Pangkalpinang yang belum mendapatkan bantuan		
14	Berfluktuatifnya skor skor pola pangan harapan (PPH) menunjukkan belum optimalnya penganekaragaman pangan masyarakat Kota Pangkalpinang		
15	Pengurangan sampah perkotaan di Kota Pangkalpinang menunjukkan kinerja yang mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun.	Perwujudan Sustainable Development Goals (SDGs)	Rehabilitasi kerusakan lingkungan hidup
16	Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik kawasan perkotaan di Kota Pangkalpinang masih rendah.		
17	Masih belum semua penduduk memiliki akses sanitasi dasar		
18	Tingginya volume sampah yang menyebabkan TPA di Kota Pangkalpinang tidak dapat lagi menampung sampah dari masyarakat.		
19	Menurunnya kualitas air karena pencemaran		
20	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (perpipaan PDAM, PAMSIMAS dan DAK) masih rendah		
21	Menurunnya kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB dampak dari <i>Pandemic Covid-19</i> ;	Pembangunan perekonomian berkelanjutan melalui optimalisasi sektor unggulan	Peningkatan nilai tambah sektor unggulan melalui penguatan sektor industri pengolahan dan UMKM
22	Belum optimalnya pembinaan terhadap pelaku industri kecil.		
23	Pertumbuhan jumlah industri di Kota Pangkalpinang selama 5 tahun terakhir belum optimal		



24	Menurunnya produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya		
25	Belum optimalnya pembinaan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di bidang perikanan		
26	Belum optimalnya fasilitas pemerintah kota dalam peningkatan pembinaan IKM		
27	Menurunnya produksi beberapa komoditas pertanian dan peternakan		
28	Masih rendahnya koperasi simpan pinjam (KSP) yang masuk dalam kategori sehat,		
29	Lambatnya peningkatan status usaha mikro ke posisi usaha kecil		
30	Belum adanya pedoman dan SOP pembinaan BUMD;		
31	Kurang akuratnya data dan informasi statistik dalam penyusunan laporan kinerja pemerintahan daerah;		
32	Belum existingnya tenaga fungsional UKPBJ;		
33	Respon OPD terhadap Rekomendasi BPK kurang Optimal		
34	Respon OPD terhadap hasil reviu yang dilakukan inspektorat kurang optimal		
35	Masih rendahnya SDM ASN yang menempati jabatan sesuai dengan kompetensi	Perwujudan Good Governance melalui Reformasi Birokrasi	Pemantapan Reformasi Birokrasi
36	Masih rendahnya jumlah ASN yang mengikuti diklat (struktural dan managerial)		
37	OPD kurang kooperatif dalam merespon kelengkapan dokumen yang berhubungan dengan pengendalian internal		
38	Ketidaksesuaian aturan hukum tentang pengadaan barang dan jasa dengan aturan lainnya		
39	Belum optimalnya koordinasi dengan OPD terkait;		
40	Minimnya inovasi di Kota Pangkalpinang		
41	Kurangnya tenaga penyusun		



	produk hukum (<i>legal drafting</i>)		
42	Belum optimalnya kontribusi PAD terhadap APBD Kota Pangkalpinang,		
43	Anggaran belanja APBD belum terserap secara optimal		
44	Jumlah dan Kualitas Sumber Daya Aparatur bidang organisasi, ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja yang belum memadai;		
45	Kurangnya pengetahuan dan rendahnya komitmen OPD akan arti penting organisasi, ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja		
46	Belum optimal dan terkoordinirnya pengelolaan anggaran pemerintah daerah yang bersumber dari <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).		
47	Belum optimalnya sinkronisasi usulan kegiatan musrenbang tingkat kota yang diakomodir ke dalam dokumen RKPD.		
48	Masih adanya ketidak sinkronan antara kegiatan di dalam dokumen APBD dan kegiatan dalam RKPD,		
49	Masih terdapat ruas jalan di Kota Pangkal Pinang dalam kondisi rusak		
50	Masih terdapat jembatan di Kota Pangkal Pinang dalam kondisi yang memerlukan peningkatan		
51	Belum optimalnya pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) perumahan dan permukiman	Infrastruktur publik berbasis Rencana Tata Ruang Wilayah	Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas
52	Masih ada rumah tidak layak huni (RTLH) yang belum mendapatkan penanganan		
53	Belum semua wilayah permukiman memiliki PSU		
54	Masih adanya kondisi fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi rusak		
55	Masih ada jaringan jalan yang belum terlayani		



**RKPD KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2022**

	angkutan umum		
56	Kondisi angkutan umum (angkot) di Kota Pangkalpinang sebagian besar sudah terlalu lama dan memerlukan peremajaan		
57	Terbatasnya daya tarik wisata dan kurangnya daya saing kepariwisataan,	Pembangunan perekonomian berkelanjutan optimalisasi unggulan melalui sektor	Pengembangan potensi wisata daerah
58	Menurunnya kunjungan wisatawan mancanegara		
59	Belum optimalnya kualitas infrastruktur pendukung pariwisata		
60	Belum optimalnya koordinasi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata		
61	Minimnya gelaran festival seni dan budaya yang diselenggarakan		
62	Minimnya jumlah misi kesenian		
63	Masih rendahnya promosi investasi di Kota	Pembangunan perekonomian berkelanjutan optimalisasi unggulan melalui sektor	Perwujudan kemudahan investasi untuk pengembangan sektor pariwisata, industri dan perdagangan
64	Pangkalpinang Belum optimalnya kerjasama penanaman modal		
65	Meningkatnya pengangguran di Kota Pangkalpinang karena dampak Covid-19	Peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan	Peningkatan kualitas angkatan kerja lokal
66	Cakupan pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan berfluktuatif		
67	Tingginya kasus konflik industrial yang terjadi di Kota Pangkalpinang		
68	Minimnya anggaran untuk pelatihan tenaga kerja yang berbasis kompetensi maupun kewirausahaan		
69	Masih terjadinya bencana di Kota Pangkalpinang	Infrastruktur publik berbasis Rencana Tata Ruang Wilayah	Penanggulangan bencana alam
70	Masih tingginya pelanggaran terhadap peraturan daerah	Peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan	Optimalisasi perlindungan keamanan dan kenyamanan masyarakat
71	Masih tingginya kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Pangkalpinang.		
72	Menurunnya kesadaran masyarakat untuk mengurus		



RKPD KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2022

	KTP		
73	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus akta kelahiran	Perwujudan Good Governance melalui Reformasi Birokrasi	Peningkatan pelayanan publik
74	Masih minimnya penduduk yang mengurus akta kematian		
75	Masih minimnya penduduk yang mengurus akta perkawinan		
76	Mekanisme persandian belum berjalan secara optimal		
77	Pemanfaatan persandian dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal,		
78	Tingkat swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat masih belum optimal		
79	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat		
80	Koleksi buku yang dimiliki perpustakaan masih terbatas belum 100% mampu memenuhi kebutuhan masyarakat		
81	Rasio perpustakaan persatuan penduduk masih		
82	Kurangnya perangkat daerah yang melakukan pengelolaan arsip secara baku		
83	Jumlah arsip in aktif yang berhasil dikelola mengalami penurunan		
84	Ketersediaan SDM arsiparis yang masih sangat terbatas		
85	Belum terkelola dan terpadunya sistem informasi pemerintahan daerah berbasis elektronik di Kota Pangkalpinang'		
86	Belum semua OPD di Kota Pangkalpinang yang memiliki website aktif dan update.		
87	Kurangnya koordinasi antar OPD dalam pembangunan website di masing-masing		



**RKPD KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2022**

	OPD		
88	Aplikasi pengaduan informasi publik yang dibuat oleh pemerintah pusat (<i>lapor.id</i>) masih belum dapat beroperasi secara optimal.		
89	Belum semua perangkat daerah menyusun program dan kegiatan responsive gender sebagai bentuk implementasi PUG di daerah	Peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Peningkatan kesejahteraan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak;
90	Rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislative		
91	Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak		
92	Kota Pangkalpinang belum mencapai predikat Kota Layak Anak		
93	Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam rangka mengendalikan kelahiran		
94	Belum tersusunnya Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga		
95	Masih kurangnya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKL dan BKR)		
96	Belum optimalnya pembinaan kepemudaan dan prestasi olahraga	Peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Peningkatan kualitas organisasi kepemudaan dan olahraga
97	Kurangnya minat pemuda dalam mengikuti kompetisi		
98	Belum adanya rencana tata ruang wilayah Kota Pangkalpinang yang <i>up to date</i> .	Infrastruktur publik berbasis Rencana Tata Ruang Wilayah	Peningkatan pengelolaan tata kota wilayah
99	Masih terbatasnya lahan yang tersedia untuk pemakaman.		
100	Masih banyak lahan milik Pemkot Pangkalpinang yang belum bersertifikat		
101	Berkurangnya lahan pertanian sebagai dampak dari peralihan fungsi lahan pertanian menjadi permukiman		
102	Tidak berfungsinya terminal antar kota		



4.2.1.5 Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022 disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18, salah satu pedoman arah kebijakan pembangunan daerah adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pasal 4 Ayat 1 terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yakni pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum; perumahan rakyat; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Dalam rangka memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, maka dalam menyelenggarakan pelayanan dasar Pemerintah Kota Pangkalpinang menyusun program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dari Standar Pelayanan Minimal tersebut. Strategi,



program prioritas dan kegiatan yang mendukung SPM disajikan pada Tabel berikut.



Tabel 4.11

**Arah Kebijakan dan Program Prioritas RKPD 2022 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian
SPM 2020 Bidang Pendidikan**

No	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	RKPD 2022					Perangkat Daerah
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program			
				Indikator (outcome)	Target	Pagu (Rp)	
1	Pendidikan anak usia dini	Peningkatan kualitas tata kelola/manajemen pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Capaian SPM PAUD	100 %	32.010.187.750	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				APK PAUD	36.20 %		
2	Pendidikan dasar			Capaian SPM Pendidikan Dasar	100 %		
				APK SD	102.5 %		
				APK SMP	103.5 %		
3	Pendidikan kesetaraan;			Capaian SPM Pendidikan Kesetaraan	100 %		



Tabel 4.12

**Arah Kebijakan dan Program Prioritas RKPD 2022 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian
SPM 2020 Bidang Kesehatan**

No	Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	RKPD 2022					Perangkat Daerah
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program			
				Indikator (outcome)	Target	Pagu (Rp)	
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil;	Standarisasi pelayanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	13,685,392,200	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin			Persentase ibu bersalinmendapatkan pelayanan persalinan	100 %		
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir			Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %		
4	Pelayanan kesehatan balita			Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %		
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard	100 %		
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif			Persentase Orang Usia15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard	100 %		



No	Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	RKPD 2022					Perangkat Daerah
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program			
				Indikator (outcome)	Target	Pagu (Rp)	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Standarisasi pelayanan kesehatan,pengendalian dan pengawasan produksi alat kesehatan dan produk makanan yang higienis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Dan Perorangan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard	100 %		Dinas Kesehatan
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi			Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard	100 %		
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus			Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard	100 %		
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat			Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard	100 %		
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis			Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard	100 %		
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)			Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard	100 %		



Tabel 4.13

**Arah Kebijakan dan Program Prioritas RKPD 2022 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian
SPM 2020 Bidang Pekerjaan Umum**

No	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum	RKPD 2022					Perangkat Daerah
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program			
				Indikator (outcome)	Target	Pagu (Rp)	
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar kehidupan masyarakat	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	100 %	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (6.1.1.(a))	98 %		
				Kapasitas prasarana airbaku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri,serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau (6.1.1.(b))	115,5 liter/ detik		
				Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan (6.1.1.(c))	56,46 %		
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar kehidupan masyarakat	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limban	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.(6.2.1. (b))	100 %	900,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Tabel 4.14

**Arah Kebijakan dan Program Prioritas RKPD 2022 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian
SPM 2020 Bidang Perumahan Rakyat**

No	Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat	RKPD 2022					Perangkat Daerah
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program			
				Indikator (outcome)	Target	Pagu (Rp)	
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Pemenuhan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	Program Pengembangan Perumahan	Persentase peningkatan kualitas perumahan	80 %	2,459,443,780	Dinas Perumahan dan Permukiman
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;						



Tabel 4.15

**Arah Kebijakan dan Program Prioritas RKPD 2022 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian
SPM 2020 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

No	Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	RKPD 2022					Perangkat Daerah
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program			
				Indikator (outcome)	Target	Pagu (Rp)	
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Peningkatan penegakan hukum dan perundang-undangan	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	100 %	5,976,947,613	Satpol PP dan Damkar
				Cakupan Pelanggaran Trantibum Yang Ditindaklanjuti	100 %		
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	100 %	5.092.447.400	Satpol PP dan Damkar
				Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %		
3	Pelayanan informasi rawan bencana;	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana	Program penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	200304 orang	4,936,575,000	BPBD
4	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	500 orang		



Tabel 4.16

**Arah Kebijakan dan Program Prioritas RKPD 2022 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian
SPM 2020 Bidang Sosial**

No	Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial	RKPD 2022					Perangkat Daerah
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program			
				Indikator (outcome)	Target	Pagu (Rp)	
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;	Pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran, warga lanjut usia dan masyarakat terdampak bencana	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang disabilitas terlantar,Anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	85 %	621.827.257	Dinas Sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti						
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti						
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti						
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran, warga lanjut usia dan masyarakat terdampak bencana	Program penanganan bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	90 %	680.527.000	Dinas Sosial



4.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan Pembangunan Lintas Bidang Melalui Pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial

Dalam menyusun RKPD digunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan yang meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.



Dalam hal mengimplementasikan pendekatan holistik-tematik, Pemerintah Kota Pangkalpinang menjadikan 8 prioritas lintas bidang kota menjadi fokus. Sementara itu, pada pendekatan integratif, telah dilakukan proses identifikasi sasaran dan indikator sasaran pembangunan yang mendukung setiap prioritas tersebut yang diikuti dengan proses identifikasi dan inventarisasi program dan perangkat daerah penanggung jawab program sebagai fokus pendekatan. Selanjutnya pada pendekatan spasial, telah dilakukan identifikasi terhadap lokasi dari pelaksanaan aktivitas/kegiatan dari program yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah guna mencapai sasaran pembangunan sebagaimana dimaksud.

Adapun poses dan tahapan implementasi pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial yang dilakukan didalam perumusan RKPD Kota Pangkalpinang tahun 2022, adalah sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut :

4.3.1 Peningkatan Nilai Tambah Sektor Unggulan Melalui Penguatan Sektor Industri Pengolahan dan UMKM

Sasaran yang ingin diwujudkan pada prioritas ini adalah Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan. Selanjutnya sasaran, target sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan pada Tabel 4.17 berikut.



Tabel 4.17
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang
Peningkatan Nilai Tambah Sektor Unggulan Melalui Penguatan Sektor
Industri Pengolahan dan UMKM

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022	Strategi dan Arah Kebijakan
Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,65 %	Peningkatan nilai tambah sektor unggulan melalui penguatan sektor industri pengolahan dan UMKM dengan arah kebijakan : 1. Peningkatan ekspor dan penguatan pasar dalam negeri 2. Pengembangan IKM (Industri Kecil dan Menengah) sebagai penggerak ekonomi berbasis kerakyatan 3. Pemberian bantuan modal kepada pelaku UMKM
	LPE Kategori Industri Pengolahan	1 %	
Meningkatnya penggalan, pemanfaatan dan pengembangan potensi sektor pariwisata daerah	PAD Sektor Pariwisata	Rp. 16.983.806.356	Pengembangan potensi wisata daerah dengan arah kebijakan Optimalisasi Kawasan Kampung Wisata dan Pengembangan Destinasi Wisata Baru
Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	Nilai Investasi	Rp. 600 M	Perwujudan kemudahan investasi untuk pengembangan sektor pariwisata, industri dan perdagangan dengan arah kebijakan Pengembangan kondusivitas penanaman modal wilayah untuk pengembangan sektor ekonomi unggulan
Menurunnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan	4,12 %	Percepatan pengentasan kemiskinan dengan arah kebijakan : 1. Peningkatan kapasitas produksi dan hasil pengolahan perikanan 2. Diversifikasi konsumsi pangan pokok berbasis potensi lokal
Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum	Persentase panjang jalan kondisi mantap	94,90 %	Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dengan arah kebijakan : 1. Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar



			kehidupan masyarakat
			2. Peningkatan kualitas tata ruang wilayah
			3. Penataan dan Penyediaan tanah untuk pembangunan daerah

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2022 untuk prioritas ini dilakukan melalui koordinasi beberapa perangkat daerah secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dengan rencana program pembangunan dan target indikator kinerja program baik yang prioritas maupun program pendukung sebagaimana disajikan pada Tabel 4.18 berikut.

Tabel 4.18

Program Pembangunan Perangkat Daerah Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang Peningkatan Nilai Tambah Sektor Unggulan Melalui Penguatan Sektor Industri Pengolahan dan UMKM

No	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (Outcome)	Target 2022	
1	Peningkatan ekspor dan penguatan pasar dalam negeri	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	42 %	Dinas Koperasi,UMKM dan Perdagangan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi /dibangun	1	Dinas Koperasi,UMKM dan Perdagangan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase kinerja realisasi pupuk	94.5 %	Dinas Koperasi,UMKM dan Perdagangan
		Program Pengembangan	Nilai Ekspor Bersih	Rp. US/\$ 665,000,000	Dinas Koperasi,UMKM



**RKPD KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2022**

		Ekspor			dan Perdagangan
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat- alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan (UTTP) yang ditera/teralng dalam tahun berjalan	80 %	Dinas Koperasi,UMKM dan Perdagangan
			Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	80 %	
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah upaya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	2 upaya	Dinas Koperasi,UMKM dan Perdagangan
2	Pengembangan IKM (Industri Kecil dan Menengah) sebagai penggerak ekonomi berbasis kerakyatan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIK	22 %	Dinas Koperasi,UMKM dan Perdagangan
			Proporsi Nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita	23.6 %	
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	5 %	Dinas Koperasi,UMKM dan Perdagangan
			Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Ijin Usaha Industri(IUI) dan Ijin Usaha Perluasan Industri(IPUI) Kecil dan Industri	85 %	
			Laju pertumbuhan PDRB Industri manufaktur	0.4 %	
			Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	50.71 %	
		Program	Persentase Data	75 %	Dinas



**RKPD KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2022**

		Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Perusahaan Kawasan industri di Kabupaten/Kota yang Masuk SIINas Terhadap Total Populasi Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota		Koperasi,UMKM dan Perdagangan
			Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	1.25 %	
3	Pemberian bantuan modal kepada pelaku UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha mikro yang menjadi wirausaha	2.2 %	Dinas Koperasi,UMKM dan Perdagangan
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Usaha Simpan Pinjam yang memiliki Izin	43.75 %	Dinas Koperasi,UMKM dan Perdagangan
		Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha mikro menjadi usaha kecil	1 %	Dinas Koperasi,UMKM dan Perdagangan
			Persentase akses UMKM (Usaha Mikro Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	30.25 %	
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	26.67 %	Dinas Koperasi,UMKM dan Perdagangan
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP koperasi yang dinilai kesehatannya	20 %	Dinas Koperasi,UMKM dan Perdagangan
		Program Diklat Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan	55 %	Dinas Koperasi,UMKM dan Perdagangan
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase peningkatan volume usaha, RAT Koperasi	14 %	Dinas Koperasi,UMKM dan Perdagangan
4	Optimalisasi Kawasan Kampung Wisata dan Pengembangan Detinasi Wisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	(8.9.1*) Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (PDRB selaku kewenangan Kota	5.35 %	Dinas Pariwisata



**RKPD KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2022**

	Baru		Pangkalpinang)		
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	10 %	
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase jumlah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf	35 %	Dinas Pariwisata
			(8.9.2*) Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	11.59 %	
5	Pengembangan kondusivitas penanaman modal wilayah untuk pengembangan sektor ekonomi unggulan	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kota	40	Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah investor	40 %	Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja
6	Peningkatan kapasitas produksi dan hasil pengolahan perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan dan usaha pengolahan hasil perikanan	54.6 kg/kapita/tahun	Dinas Kelautan dan Perikanan
7	Diversifikasi konsumsi pangan pokok berbasis potensi lokal	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH) mencapai; dan tingkat tingkat konsumsi ikan	88 %	Dinas Pangan dan Pertanian
8	Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar kehidupan masyarakat	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	94.9 %	Dinas PUPR
9	Peningkatan kualitas tata ruang wilayah	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Terpenuhinya peran tata ruang dan pertanahan	100 %	Dinas PUPR
10	Penataan dan Penyediaan tanah untuk pembangunan daerah	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100 %	Dinas PUPR

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2022 untuk prioritas ini dilakukan juga melalui intervensi lintas sektor melibatkan



para *stakeholder* secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat sebagaimana disajikan pada Tabel 4.19 berikut.

Tabel 4.19

Stakeholder yang Mendukung Prioritas Peningkatan Nilai Tambah Sektor Unggulan Melalui Penguatan Sektor Industri Pengolahan dan UMKM

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2022	Strategi Yang Perlu Dukungan Stakeholder	Stakeholder
Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,65 %	Peningkatan nilai tambah sektor unggulan melalui penguatan sektor industri pengolahan dan UMKM	1. CSR Perusahaan 2. Perbankan 3. HKTI 4. HNSI 5. KADIN 6. HIPMI
	LPE Kategori Industri Pengolahan	1 %		

4.3.2 Perwujudan Kemudahan Investasi Untuk Pengembangan Sektor Pariwisata, Industri dan Perdagangan

Sasaran yang ingin diwujudkan pada prioritas ini adalah Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah. Selanjutnya sasaran, target sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan pada Tabel 4.20 berikut.



Tabel 4.20

**Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang
Perwujudan Kemudahan Investasi Untuk Pengembangan Sektor
Pariwisata, Industri dan Perdagangan**

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022	Strategi dan Arah Kebijakan
Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	Nilai Investasi	Rp. 600 M	Perwujudan kemudahan investasi untuk pengembangan sektor pariwisata, industri dan perdagangan dengan arah kebijakan Pengembangan kondusivitas penanaman modal wilayah untuk pengembangan sektor ekonomi unggulan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	Nilai LPPD	3,2723	Pemantapan Reformasi Birokrasi dengan arah kebijakan 1. Pengembangan sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu 2. Optimalisasi BUMD Pangkalpinang 3. Optimalisasi pengelolaan Keuangan, pendapatan dan barang milik daerah
	Nilai AKIP	65,50	
	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	
Meningkatnya kondisi keamanan daerah	Angka Kriminalitas	125	Optimalisasi perlindungan keamanan dan kenyamanan masyarakat dengan arah kebijakan Peningkatan penegakan hukum dan perundang-undangan
Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum	Persentase panjang jalan kondisi mantap	94,90 %	Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dengan arah kebijakan : 1. Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar kehidupan masyarakat 2. Peningkatan kualitas tata ruang wilayah 3. Penataan dan Penyediaan tanah untuk pembangunan daerah



Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas ASN	Rata-rata Nilai IKM	86	Peningkatan pelayanan publik dengan arah kebijakan : 1. Optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi 2. Peningkatan kapasitas dan kinerja ASN
	Indeks Profesionalitas ASN	78	

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2022 untuk prioritas ini dilakukan melalui koordinasi beberapa perangkat daerah secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dengan rencana program pembangunan dan target indikator kinerja program baik yang prioritas maupun program pendukung sebagaimana disajikan pada Tabel 4.21 berikut.

Tabel 4.21

**Program Pembangunan Perangkat Daerah Yang Mendukung Pembangunan
Lintas Bidang Perwujudan Kemudahan Investasi Untuk Pengembangan
Sektor Pariwisata, Industri dan Perdagangan**

No	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (Outcome)	Target 2022	
1	Pengembangan kondusivitas penanaman modal wilayah untuk pengembangan sektor ekonomi unggulan	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kota	40 %	Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah investor	40 %	Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	90 %	Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja
2	Pengembangan sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	100 %	Bappeda dan Litbang
3	Optimalisasi	Program	Persentase	100 %	Setda Kota



**RKPD KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2022**

	BUMD Pangkalpinang	Perekonomian dan Pembangunan	terpenuhinya pelaksanaan kebijakan perekonomian		
			Persentase kebijakan terkait sumber daya alam yang dilaksanakan	100 %	
4	Optimalisasi pengelolaan Keuangan, pendapatan dan barang milik daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketersediaan manajemen aset/BMD	100 %	Bakuda
5	Peningkatan penegakan hukum dan perundang-undangan	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Pelanggaran Trantibum yang Ditindaklanjuti	100 %	Satpol PP dan Damkar
			Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100 %	
6	Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	12 %	Badan Kesbangpol
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik sosial yang dapat diselesaikan	80 %	Badan Kesbangpol
7	Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar kehidupan masyarakat	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	94.9 %	Dinas PUPR
8	Peningkatan kualitas tata ruang wilayah	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Terpenuhinya peran tata ruang dan pertanahan	100 %	Dinas PUPR
9	Penataan dan Penyediaan tanah untuk pembangunan daerah	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100 %	Dinas PUPR
10	Optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, mengetahui	100 %	Dinas Kominfo



			Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah		
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase tingkat keselamatan lalu lintas dan layanan angkutan jalan	70 %	Dinas Perhubungan
11	Peningkatan kapasitas dan kinerja ASN	Program Pengembangan SDM	Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	78 %	BKPSDMD

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2022 untuk prioritas ini dilakukan juga melalui intervensi lintas sektor melibatkan para *stakeholder* secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat sebagaimana disajikan pada Tabel 4.22 berikut.

Tabel 4.22

**Stakeholder yang Mendukung Prioritas Perwujudan Kemudahan Investasi
Untuk Pengembangan Sektor Pariwisata, Industri dan Perdagangan**

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2022	Strategi Yang Perlu Dukungan Stakeholder	Stakeholder
Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	Nilai Investasi	Rp. 600 M	Perwujudan kemudahan investasi untuk pengembangan sektor pariwisata, industri dan perdagangan	1. PHRI 2. PWI 3. ASITA 4. Dewan Kerajinan 5. Lembaga Adat Melayu 6. KADIN 7. HIPMI



4.3.3 Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Sasaran yang ingin diwujudkan pada prioritas ini adalah menurunnya tingkat kemiskinan. Selanjutnya sasaran, target sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan pada Tabel 4.23 berikut.

Tabel 4.23

**Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang
Percepatan Pengentasan Kemiskinan**

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022	Strategi dan Arah Kebijakan
Menurunnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan	4,12 %	Percepatan pengentasan kemiskinan dengan arah kebijakan : 1. Peningkatan kapasitas produksi dan hasil pengolahan perikanan 2. Peningkatan kesejahteraan petani 3. Diversifikasi konsumsi pangan pokok berbasis potensi local 4. Pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran, warga lanjut usia dan masyarakat terdampak bencana
Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,65 %	Peningkatan nilai tambah sektor unggulan melalui penguatan sektor industri pengolahan dan UMKM dengan arah kebijakan Pemberian bantuan modal kepada pelaku UMKM
	LPE Kategori Industri Pengolahan	1 %	
Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	Nilai Investasi	Rp. 600 M	Perwujudan kemudahan investasi untuk pengembangan sektor pariwisata, industri dan perdagangan dengan arah kebijakan Pengembangan kondusivitas penanaman modal wilayah untuk pengembangan sektor ekonomi unggulan
Meningkatnya	Tingkat		Peningkatan kualitas angkatan



kesempatan kerja masyarakat	Pengangguran Terbuka	6,45 %	kerja lokal dengan arah kebijakan Peningkatan jiwa kewirausahaan masyarakat
Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	93,21 %	Peningkatan kesejahteraan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak dengan arah kebijakan Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan
Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman layak huni	Rasio rumah layak huni	91 %	Peningkatan pengelolaan tata kota wilayah dengan arah kebijakan : 1. Penataan kawasan kumuh perkotaan 2. Peningkatan kapasitas rumah layak huni

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2022 untuk prioritas ini dilakukan melalui koordinasi beberapa perangkat daerah secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dengan rencana program pembangunan dan target indikator kinerja program baik yang prioritas maupun program pendukung sebagaimana disajikan pada Tabel 4.24 berikut.

Tabel 4.24

**Program Pembangunan Perangkat Daerah Yang Mendukung Pembangunan
Lintas Bidang Percepatan Pengentasan Kemiskinan**

No	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (Outcome)	Target 2022	
1	Peningkatan kapasitas produksi dan hasil pengolahan perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	1239.161 ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan Budidaya	2,475 ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan dan usaha pengolahan hasil perikanan	54.6 kg/kapita/tahun	Dinas Kelautan dan Perikanan



**RKPD KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2022**

2	Peningkatan kesejahteraan petani	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktifitas pertanian per hektar per tahun	90 %	Dinas Pangan dan Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja disektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	62.85 %	Dinas Pangan dan Pertanian
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	100 %	Dinas Pangan dan Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase penyuluhan Pertanian	100 %	Dinas Pangan dan Pertanian
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pelayanan kesehatan hewan	100 %	Dinas Pangan dan Pertanian
3	Diversifikasi konsumsi pangan pokok berbasis potensi lokal	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	85 %	Dinas Pangan dan Pertanian
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase pengadaan cadangan pangan	100 %	Dinas Pangan dan Pertanian
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH) mencapai; dan tingkat tingkat konsumsi ikan	88 %	Dinas Pangan dan Pertanian
4	Pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran, warga lanjut usia dan masyarakat terdampak bencana	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase peningkatan kapasitas PSKS dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial	75 %	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar	85 %	Dinas Sosial



**RKPD KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2022**

			panti Persentase PMKS lainnya bukan Korban Penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi diluar panti sosial	80 %	Dinas Sosial
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	60 %	
		Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	90 %	
5	Pemberian bantuan modal kepada pelaku UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha mikro yang menjadi wirausaha	2.2 %	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha mikro menjadi usaha kecil	1 %	
			Persentase akses UMKM (Usaha Mikro Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	30.25 %	
6	Pengembangan kondusivitas penanaman modal wilayah untuk pengembangan sektor ekonomi unggulan	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kota	40 %	Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	90 %	Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja
7	Peningkatan jiwa kewirausahaan masyarakat	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	6.23 %	Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja
8	Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung	0.85 %	Dinas PPPA dan KB
9	Penataan	Program Kawasan	Persentase	90%	Dinas Perkim



	kawasan kumuh perkotaan	Permukiman	penanganan kawasan permukiman kumuh		
			Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	5.23 %	
10	Peningkatan kapasitas rumah layak huni	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman di kota	85 %	Dinas Perkim
			Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	94 %	

4.3.4 Optimalisasi Perlindungan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat

Sasaran yang ingin diwujudkan pada prioritas ini adalah Meningkatkan kondisi keamanan daerah. Selanjutnya sasaran, target sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan pada Tabel 4.25 berikut.

Tabel 4.25

Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang Optimalisasi Perlindungan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022	Strategi dan Arah Kebijakan
Meningkatnya kondisi keamanan daerah	Angka Kriminalitas	125	Optimalisasi perlindungan keamanan dan kenyamanan masyarakat dengan arah kebijakan : 1. Peningkatan penegakan hukum dan perundang-undangan 2. Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan 3. Pembinaan Pembangunan Politik daerah



Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2022 untuk prioritas ini dilakukan melalui koordinasi beberapa perangkat daerah secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dengan rencana program pembangunan dan target indikator kinerja program baik yang prioritas maupun program pendukung sebagaimana disajikan pada Tabel 4.26 berikut.

Tabel 4.26

Program Pembangunan Perangkat Daerah Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang Optimalisasi Perlindungan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat

No	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (Outcome)	Target 2022	
1	Peningkatan penegakan hukum dan perundang-undangan	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Pelanggaran Trantibum yang Ditindaklanjuti	100 %	Satpol PP dan Damkar
			Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100 %	Satpol PP dan Damkar
			Persentase Peningkatan Kompetensi PPNS	100 %	Satpol PP dan Damkar
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan penanganan bencana kebakaran kota	100 %	Satpol PP dan Damkar
			Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	Satpol PP dan Damkar
2	Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan dan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pembinaan Ideologi Wawawasan	80 %	Badan Kesbangpol



	kenyamanan lingkungan		Kebangsaan		
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik sosial yang dapat diselesaikan	80 %	Badan Kesbangpol
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	12 %	Badan Kesbangpol
3	Pembinaan Pembangunan Politik daerah	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik	30 %	Badan Kesbangpol
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah ORMAS yang terdata	1 ormas	Badan Kesbangpol

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2022 untuk prioritas ini dilakukan juga melalui intervensi lintas sektor melibatkan para *stakeholder* secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat sebagaimana disajikan pada Tabel 4.2 berikut.



Tabel 4.27

**Stakeholder yang Mendukung Prioritas Optimalisasi Perlindungan
Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat**

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2022	Strategi Yang Perlu Dukungan Stakeholder	Stakeholder
Meningkatnya kondisi keamanan daerah	Angka Kriminalitas	125	Optimalisasi perlindungan keamanan dan kenyamanan masyarakat	1. Kepolisian 2. TNI 3. FKUB 4. Forkopimda lainnya

4.3.5 Pemantapan Reformasi Birokrasi

Sasaran yang ingin diwujudkan pada prioritas ini adalah Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya sasaran, target sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan pada Tabel 4.28 berikut.

Tabel 4.28

**Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang
Pemantapan Reformasi Birokrasi**

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022	Strategi dan Arah Kebijakan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	Nilai LPPD	3,2723	Pemantapan reformasi birokrasi dengan arah kebijakan : 1. Pengembangan sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu 2. Peningkatan kualitas koordinasi, fasilitasi kinerja pemerintah daerah, bina mental 3. Optimalisasi BUMD Pangkalpinang 4. Optimalisasi pengelolaan Keuangan, pendapatan dan barang milik daerah 5. Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan
	Nilai AKIP	65,50	
	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	



Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2022 untuk prioritas ini dilakukan melalui koordinasi beberapa perangkat daerah secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dengan rencana program pembangunan dan target indikator kinerja program baik yang prioritas maupun program pendukung sebagaimana disajikan pada Tabel 4.29 berikut.

Tabel 4.29

**Program Pembangunan Perangkat Daerah Yang Mendukung Pembangunan
Lintas Bidang Pemantapan Reformasi Birokrasi**

No	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (Outcome)	Target 2022	
1	Pengembangan sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan	65 %	Bappeda dan Litbang
			Persentase Kesesuaian Program di APBD dengan Program di RKPD tahunan	100 %	Bappeda dan Litbang
			Persentase data/informasi hasil pembangunan yang dapat diakses	85 %	Bappeda dan Litbang
			Persentase program dalam dokumen perencanaan yang mencapai target	80 %	Bappeda dan Litbang
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Prog. bid. PPM /bid. perekonomian dan SDA /bid. I % kewilayahan di RKPD tahunan dengan Prog. Bid. P dan PM/bid. perekonomian dan SDA/bid.infrastruktur dan kewilayahan di RPJMD	100 %	Bappeda dan Litbang
			Persentase Kesesuaian Prog.bid pemerintahan dan pembangunan manusia/bid. perekonomian dan SDA/bid.infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Prog. bid pemerintahan dan pembangunan manusia/bid.perekonomian dan SDA /bid. infrastruktur dan	100 %	Bappeda dan Litbang



**RKPD KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2022**

			kewilayahan di RKPD Tahunan		
			Persentase Prog bid. pemerintahan dan pembangunan manusia /bid. perekonomian dan SDA/ bid. infrastruktur dan kewilayahan yang mencapai target	80 %	Bappeda dan Litbang
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	100 %	Bappeda dan Litbang
2	Peningkatan kualitas koordinasi, fasilitasi kinerja pemerintah daerah, bina mental spiritual serta perekonomian dan pembangunan daerah	Program Administrasi Umum Setda	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	65,50 (B)	Setda Kota
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	Setda Kota
			Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	100 %	Setda Kota
			Persentase fasilitasi hukum yang dilaksanakan	100 %	Setda Kota
			Persentase kerjasama daerah yang dilaksanakan	100 %	Setda Kota
			Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	1 kebijakan	Setda Kota
3	Optimalisasi BUMD Pangkalpinang	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kegiatan pembangunan yang dilaksanakan	100 %	Setda Kota
			Persentase terpenuhinya pelaksanaan kebijakan perekonomian	100 %	Setda Kota
			Persentase pengadaan barang yang dilaksanakan	100 %	Setda Kota
			Persentase kebijakan terkait sumber daya alam yang dilaksanakan	100 %	Setda Kota
4	Optimalisasi pengelolaan Keuangan, pendapatan dan barang daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyampaian APBD/P tepat waktu	100 %	Bakeuda
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketersediaan manajemen aset/BMD	100 %	Bakeuda
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD	100 %	Bakeuda
			Penyampaian, pertumbuhan, pendapatan pajak daerah	4 %	Bakeuda
5	Peningkatan sistem pengawasan dan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase OPD dengan tingkat akuntabilitas Minimal BB	85 %	Inspektorat



	pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD dengan tingkat Index Reformasi Birokraksi Minimal B	85 %	Inspektorat

4.3.6 Peningkatan Pelayanan Publik

Sasaran yang ingin diwujudkan pada prioritas ini adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan profesionalitas ASN. Selanjutnya sasaran, target sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan pada Tabel 4.30 berikut.

Tabel 4.30
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang
Peningkatan Pelayanan Publik

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022	Strategi dan Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan profesionalitas ASN.	Rata-rata Nilai IKM	86	Peningkatan pelayanan publik dengan arah kebijakan : 1. Optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi 2. Peningkatan kapasitas dan kinerja ASN
	Indeks Profesionalitas ASN	78	

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2022 untuk prioritas ini dilakukan melalui koordinasi beberapa perangkat daerah secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dengan rencana program pembangunan dan target indikator kinerja program baik yang prioritas maupun program pendukung sebagaimana disajikan pada Tabel 4.31 berikut.



Tabel 4.31

**Program Pembangunan Perangkat Daerah Yang Mendukung Pembangunan
Lintas Bidang Peningkatan Pelayanan Publik**

No	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (Outcome)	Target 2022	
1	Optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah	100%	Dinas Kominfo
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet dan Pelayanan Publik yang terhubung Secara Online dan Terintegritas yang di fasilitasi Dinas Kominfo	69 %	Dinas Kominfo
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	90 %	Dinas Kominfo
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100%	Dinas Kominfo
		Program Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	670	Dinas Dukcapil
			Cakupan Kememilikan Kartu keluarga	96 %	Dinas Dukcapil
			Cakupan Pernerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	99.6 %	Dinas Dukcapil
			Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	100 %	Dinas Dukcapil
			Perekaman KTP elektronik	98 %	Dinas Dukcapil
			Persentase anak usia 0-7 tahun kurang 1 (satu) hari yg memiliki KIA	70 %	Dinas Dukcapil
		Program Pencatatan Sipil	Rasio Bayi Berakte Kelahiran per1000 penduduk	920	Dinas Dukcapil
			Kepemilikan Akte Kelahiran	88 %	Dinas Dukcapil
			Rasio Perkawinan yang tercatat di catatan sipil per 1000 penduduk	88 %	Dinas Dukcapil
			Cakupan Kepemilikan Akte Kematian	31 %	Dinas Dukcapil
			Peningkatan cakupan akta kelahiran yang diterbitkan	3.5	Dinas Dukcapil
			Persentase anak (0-18) tahun yang memiliki akta kelahiran	92 %	Dinas Dukcapil
			Peningkatan cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua	65 %	Dinas Dukcapil



**RKPD KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2022**

			pasangan		
			Peningkatan cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang perceraian tercatat	72 %	Dinas Dukcapil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	88 %	Dinas Dukcapil
			Persentase Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	2.1 %	Dinas Dukcapil
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase keserasian database kependudukan	96 %	Dinas Dukcapil
			Persentase tersajinya data kependudukan yang akurat	50	Dinas Dukcapil
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	100 %	Setwan
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase tingkat keselamatan lalu lintas dan layanan angkutan jalan	70 %	Dishub
			Persentase pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan	0	Dishub
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Terselenggaranya Urusan pemerintahan Umum di Kecamatan	100 %	Kecamatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun	80/100 %	Kecamatan
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif.	80/100 %	Kecamatan
			Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	Kecamatan
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	Kecamatan
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Terselenggaranya Urusan pemerintahan Umum di Kecamatan	80/100 %	Kecamatan
2	Peningkatan kapasitas dan kinerja ASN	Program Kepegawaian Daerah	Rasio pegawai fungsional	7.5 %	BKPSDMD
			Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100 %	BKPSDMD
			Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	100 %	BKPSDMD
		Program Pengembangan SDM	Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	78 %	BKPSDMD



4.3.7 Perwujudan Kualitas Pendidikan Berbasis Karakter

Sasaran yang ingin diwujudkan pada prioritas ini adalah Meningkatnya kualitas pendidikan. Selanjutnya sasaran, target sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan pada Tabel 4.32 berikut.

Tabel 4.32

**Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang
Perwujudan Kualitas Pendidikan Berbasis Karakter**

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022	Strategi dan Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	69,97	Perwujudan kualitas pendidikan berbasis karakter dengan arah kebijakan : 1. Peningkatan kualitas tata kelola /manajemen pendidikan 2. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik 3. Pengembangan sistem pendidikan berbasis budaya 4. Peningkatan minat baca masyarakat

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2022 untuk prioritas ini dilakukan melalui koordinasi beberapa perangkat daerah secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dengan rencana program pembangunan dan target indikator kinerja program baik yang prioritas maupun program pendukung sebagaimana disajikan pada Tabel 4.33 berikut.



Tabel 4.33

**Program Pembangunan Perangkat Daerah Yang Mendukung Pembangunan
Lintas Bidang Perwujudan Kualitas Pendidikan Berbasis Karakter**

No	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (Outcome)	Target 2022	
1	Peningkatan kualitas tata kelola /manajemen pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Capaian SPM PAUD	100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			APK SMP	103,5 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			APK SD	102,5 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			APK PAUD	36,20 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Capaian SPM Pendidikan Kesenjangan	100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Capaian SPM Pendidikan Dasar	100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin Operasional	100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF yang Berkualifikasi S1/DIV	74 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Pengembangan sistem pendidikan berbasis budaya	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Jumlah Aset Sejarah Daerah yang di Lestarkan	75 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengembangan kebudayaan	Persentase Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang di Lestarkan	93 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya (CB) yang di Lestarkan	84 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Peningkatan minat baca masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pelaksanaan pembinaan perpustakaan	36 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



4.3.8 Pengembangan Potensi Wisata Daerah

Sasaran yang ingin diwujudkan pada prioritas ini adalah Meningkatnya penggalian, pemanfaatan dan pengembangan potensi sektor pariwisata daerah. Selanjutnya sasaran, target sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan pada Tabel 4.34 berikut.

Tabel 4.34

**Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang
Pengembangan Potensi Wisata Daerah**

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022	Strategi dan Arah Kebijakan
Meningkatnya penggalian, pemanfaatan dan pengembangan potensi sektor pariwisata daerah	PAD Sektor Pariwisata	Rp. 16.983.806.356	Pengembangan potensi wisata daerah dengan arah kebijakan : 1. Optimalisasi Kawasan Kampung Wisata dan Pengembangan Destinasi Wisata Baru 2. Peningkatan implementasi protokol kesehatan pada aktivitas ekonomi sektor pariwisata
Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	Nilai Investasi	Rp. 600 M	Perwujudan kemudahan investasi untuk pengembangan sektor pariwisata, industri dan perdagangan dengan arah kebijakan Pengembangan kondusivitas penanaman modal wilayah untuk pengembangan sektor ekonomi unggulan
Meningkatnya kondisi keamanan daerah	Angka Kriminalitas	125	Optimalisasi perlindungan keamanan dan kenyamanan masyarakat dengan arah kebijakan 1. Peningkatan penegakan hukum dan perundang-undangan 2. Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan



Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum	Persentase panjang jalan kondisi mantap	94,90 %	Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dengan arah kebijakan : 1. Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar kehidupan masyarakat 2. Peningkatan kualitas tata ruang wilayah
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas ASN	Rata-rata Nilai IKM	86	Peningkatan pelayanan publik dengan arah kebijakan Optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi
	Indeks Profesionalitas ASN	78	

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2022 untuk prioritas ini dilakukan melalui koordinasi beberapa perangkat daerah secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dengan rencana program pembangunan dan target indikator kinerja program baik yang prioritas maupun program pendukung sebagaimana disajikan pada Tabel 4.35 berikut.

Tabel 4.35

Program Pembangunan Perangkat Daerah Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang Pengembangan Potensi Wisata Daerah

No	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (Outcome)	Target 2022	
1	Optimalisasi Kawasan Kampung Wisata dan Pengembangan Destinasi Wisata Baru	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	(8.9.1*) Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (PDRB selaku kewenangan Kota Pangkalpinang)	5.35 %	Dinas Pariwisata
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	10 %	
		Program Pengembangan Sumber Daya	Persentase jumlah pengembangan sumber daya	35 %	Dinas Pariwisata



**RKPD KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2022**

		Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	pariwisata dan ekraf (8.9.2*) Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	11.59 %	Dinas Pariwisata
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAKI	Persentase jumlah pengembangan ekonomi kreatif	35 %	
2	Peningkatan implementasi protokol kesehatan pada aktivitas ekonomi sektor pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	10 %	Dinas Pariwisata
			Tingkat hunian akomodasi	50 %	
			(8.9.1.(a))Jumlah wisatawan mancanegara	343 orang	
			(8.9.1.(b)) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	161370 orang	
3	Pengembangan kondusivitas penanaman modal wilayah untuk pengembangan sektor ekonomi unggulan	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kota	40 %	Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah investor	40 %	Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	90 %	Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja
4	Peningkatan penegakan hukum dan perundang-undangan	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Pelanggaran Trantibum yang Ditindaklanjuti	100 %	Satpol PP dan Damkar
			Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100 %	
5	Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	12 %	Badan Kesbangpol
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan	Persentase konflik sosial yang dapat diselesaikan	80 %	Badan Kesbangpol



		Konflik Sosial			
6	Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar kehidupan masyarakat	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	94.9 %	Dinas PUPR
7	Peningkatan kualitas tata ruang wilayah	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Terpenuhiannya peran tata ruang dan pertanahan	100 %	Dinas PUPR
8	Optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah	100 %	Dinas Kominfo
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase tingkat keselamatan lalulintas dan layanan angkutan jalan	70 %	Dinas Perhubungan

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2022 untuk prioritas ini dilakukan juga melalui intervensi lintas sektor melibatkan para *stakeholder* secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat sebagaimana disajikan pada Tabel 4.36 berikut.



Tabel 4.36
Stakeholder Yang Mendukung Prioritas Pengembangan
Potensi Wisata Daerah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2022	Strategi Yang Perlu Dukungan Stakeholder	Stakeholder
Meningkatnya penggalian, pemanfaatan dan pengembangan potensi sektor pariwisata daerah	PAD Sektor Pariwisata	Rp. 16.983.806.356	Pengembangan potensi wisata daerah	1. PHRI 2. PWI 3. ASITA 4. Dewan Kerajinan 5. Lembaga Adat Melayu 6. KADIN 7. HIPMI



- BAB V -

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Berdasarkan Sasaran, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2022 yang dibahas pada Bab IV, dengan merujuk kepada hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, disusun program dan kegiatan beserta indikator dan target yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 oleh perangkat daerah.

Pembahasan substansi pada Bab V diperoleh dari kondisi, permasalahan, isu strategis hingga menghasilkan prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan Tahun 2022 terdiri atas prioritas dan sasaran yang dijalankan melalui serangkaian Program Pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. Selanjutnya Program dan Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Pangkalpinang pada Tahun Anggaran 2022. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2022 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan dengan berbagai pendekatan.

Program dan kegiatan prioritas pembangunan merupakan program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah baik secara



langsung maupun tidak langsung mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan pembangunan, prioritas pembangunan daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dalam upaya memenuhi kewajiban daerah guna melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Proses penyusunan program dan kegiatan prioritas dilakukan melalui pendekatan perencanaan komprehensif yang meliputi pendekatan teknokratis, partisipatif, *bottom up*, *top-down*, dan politis serta unsur inovasi sehingga diperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Pangkalpinang.

1. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD Tahun 2022 berarti bahwa RKPD memuat metode dan kerangka berpikir ilmiah serta sistematis dalam melakukan analisis masalah. Dalam pendekatan teknokratis ini dilakukan pelibatan fungsional perencana yang berfungsi sebagai tim pelaksana penyusunan RKPD.
2. Pendekatan partisipatif dan *bottom-up* dalam penyusunan RKPD Tahun 2022 dilakukan melalui:
 - a. Pelaksanaan musrenbang RKPD yang berkualitas;
 - b. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan, dilakukan melalui aplikasi SIPD, sehingga masyarakat dapat memantau proses perencanaan pembangunan;



- c. Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal;
 - d. Pelibatan seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kota Pangkalpinang;
 - e. Pelibatan secara aktif warga dalam forum Rembug Kelurahan untuk menyepakati usulan yang akan disampaikan melalui aplikasi SIPD.
3. Pendekatan *top-down* yang dilaksanakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2022 dijalankan melalui penyusunan rencana kerja yang sinergi dengan agenda dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2022, sinergi dan konsisten dengan RPJMD maupun RPJPD, serta sinergi dan komitmen terhadap tujuan global seperti SDG's dan pemenuhan SPM.
4. Pendekatan politis pada prinsipnya memandang bahwa proses penyusunan rencana kerja harus mengedepankan kehendak dan kepentingan politis, diantaranya dilakukan melalui:
- a. Konsultasi dengan kepala daerah untuk penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi dan program kepala daerah.
 - b. Keterlibatan aktif DPRD dalam proses penyusunan rencana, diantaranya dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD maupun reses anggota DPRD.



5.1 Rencana Program Prioritas

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah. Adapun program prioritas berdasarkan masing-masing urusan adalah sebagai berikut.

1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan

Dasar

1 Pendidikan

- 1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan
- 1.01.04 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 1.01.05 Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

2 Kesehatan

- 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan
dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- 1.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia Kesehatan
- 1.02.04 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan
Makanan Minuman
- 1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang
Kesehatan

3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)



- 1.03.03 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum
- 1.03.05 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air
Limbah
- 1.03.06 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Drainase
- 1.03.07 Program Pengembangan Permukiman
- 1.03.08 Program Penataan Bangunan Gedung
- 1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan
- 1.03.11 Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- 1.03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

4 PerumahanDan Kawasan Permukiman

- 1.04.02 Program Pengembangan Perumahan
- 1.04.03 Program Kawasan Permukiman
- 1.04.04 Program Perumahan dan Kawasan permukiman
Kumuh
- 1.04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum (PSU)
- 1.04.06 Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi,
Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang
Perumahan dan Kawasan Permukiman



5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan

Masyarakat

1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1.05.03 Program Penanggulangan Bencana

1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

6 Sosial

1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial

1.06.03 Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial

1.06.05 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

1.06.06 Program Penanganan Bencana

2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1 TenagaKerja

2.07.02 Program Perencanaan Tenaga Kerja

2.07.03 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

2.07.04 Program Penempatan Tenaga Kerja

2.07.05 Program Hubungan Industrial



2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 2.08.02 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- 2.08.03 Program Perlindungan Perempuan
- 2.08.04 Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- 2.08.05 Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
- 2.08.06 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- 2.08.07 Program Perlindungan Khusus Anak

3 Pangan

- 2.09.03 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- 2.09.04 Program Penanganan Kerawanan Pangan
- 2.09.05 Program Pengawasan Keamanan Pangan

4 Pertanahan

- 2.10.02 Program Pengelolaan Izin Lokasi
- 2.10.04 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
- 2.10.05 Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
- 2.10.06 Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
- 2.10.08 Program Pengelolaan Tanah Kosong
- 2.10.09 Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah



2.10.10 Program Penatagunaan Tanah

5 Lingkungan Hidup

2.11.02 Program Perencanaan Lingkungan Hidup

2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

2.11.04 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

2.11.05 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

2.11.06 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

2.11.09 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

2.11.10 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan

6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.12.02 Program Pendaftaran Penduduk

2.12.03 Program Pencatatan Sipil

2.12.04 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

2.12.05 Program Pengelolaan Profil Kependudukan



7 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

- 2.14.02 Program Pengendalian Penduduk
- 2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- 2.14.04 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

8 Perhubungan

- 2.15.02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

9 Komunikasi Dan Informatika

- 2.16.02 Program (Pengelolaan) Informasi dan Komunikasi Publik
- 2.16.03 Program (Pengelolaan) Aplikasi Informatika

10 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- 2.17.03 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- 2.17.04 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- 2.17.05 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- 2.17.06 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- 2.17.07 Program Pemberdayaan UMKM
- 2.17.08 Program Pengembangan UMKM

11 Penanaman Modal

- 2.18.02 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- 2.18.03 Program Promosi Penanaman Modal
- 2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal



2.18.05 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

2.18.06 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

12 Kepemudaan Dan Olahraga

2.19.02 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

2.19.03 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

2.19.04 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

13 Statistik

2.20.02 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

14 Persandian

2.21.02 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

15 Kebudayaan

2.22.02 Program Pengembangan Kebudayaan

2.22.04 Program Pembinaan Sejarah

2.22.05 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

16 Perpustakaan

2.23.02 Program Pembinaan Perpustakaan

2.23.03 Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno



17 Kearsipan

2.24.02 Program Pengelolaan Arsip

2.24.03 Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1 KelautanDan Perikanan

2.25.03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

2.25.04 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

2.25.06 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

2 Pariwisata

2.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi
Pariwisata

2.26.03 Program Pemasaran Pariwisata

2.26.04 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui
Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan
Intelektual

2.26.05 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif

3 Pertanian

3.27.02 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana
Pertanian

3.27.03 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana
Pertanian

3.27.04 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan



Kesehatan Masyarakat Veteriner

3.27.05 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana
Pertanian

3.27.07 Program Penyuluhan Pertanian

4 Perdagangan

3.30.02 Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

3.30.03 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

3.30.04 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok
dan Barang Penting

3.30.05 Program Pengembangan Ekspor

3.30.06 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

3.30.07 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam
Negeri

5 Perindustrian

3.31.02 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

3.31.03 Program Pengendalian Izin Usaha Industri
Kabupaten/Kota

3.31.04 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri
Nasional

4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1 Sekretariat Daerah

4.01.01 Program Administrasi Umum (Program Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)



4.01.02 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

4.01.03 Program Perekonomian dan Pembangunan

2 Sekretariat DPRD

4.02.01 Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD
Kabupaten/Kota (Program Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)

4.02.02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
DPRD

5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1 Perencanaan

5.01.02 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

5.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah

2 Keuangan

5.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah

5.02.03 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

3 Kepegawaian

5.03.02 Program Kepegawaian Daerah

4 Pendidikan dan Pelatihan

5.04.02 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

5 Penelitian dan Pengembangan



5.05.02 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1 Inspektorat Daerah

6.01.02 Program Penyelenggaraan Pengawasan

6.01.03 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan
Asistensi

7 Unsur Kewilayahan

1 Kecamatan

7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pelayanan Publik

7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan

7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban
Umum

7.01.05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Umum

8 Unsur Pemerintahan Umum

1 Kesatuan Bangsa Dan Politik

8.01.02 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter
Kebangsaan

8.01.03 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan
Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan
Pengembangan Etika Serta Budaya Politik



- 8.01.04 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan
- 8.01.05 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan
Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- 8.01.06 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan
Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan
Konflik Sosial

5.2 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Penelaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD memuat aspirasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kota Pangkalpinang. Secara umum, aspirasi masyarakat yang terjaring berupa pendapat, keluhan dan usulan kegiatan pembangunan yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan secara keseluruhan meliputi fisik dan non fisik.

Dalam penyusunan RKPD, pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran oleh BAPPEDA dengan berkordinasi dengan Perangkat Daerah terkait. Adapun hasil



penelaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD, yang dapat diakomodir dalam RKPD 2022 disajikan dalam Tabel berikut:



Tabel 5.1

**Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD dan Validasi
Kota Pangkalpinang**

No.	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/Keterangan
1.04	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumahtangga kumuh perkotaan				
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha					
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah yang diperbaiki		KECAMATAN BUKIT INTAN		
1			1 unit	Pembangunan Rutilahu an. Mauliyana Sari RT 07 RW 03 Kota Pangkal Pinang, Bukit Intan, Air Itam	Dinas Perkim	diakomodir dinas perkim PB APBD tahun 2022 Rp84,500,000,00.-
2			1 unit	RT 02, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Bukitintan, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Perkim	BNBA tidak tertera
3			1 unit	Pembangunan Rutilahu an. Mauliyaba Sari, Jl. Batako Robi RT. 07 RW. 03, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	Dinas Perkim	diakomodir dinas perkim PB APBD tahun 2022 Rp84,500,000,00.-



No.	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/Keterangan
4			1 unit (30 Meter Persegi)	Pembangunan Rutilahu an. ROYADI Jl. Depati Hamzah Gg. Pelita RT. 09 RW. 03, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Sinar Bulan	Dinas Perkim	diakomodir dinas perkim PB APBD tahun 2022 Rp84,500,000,00.-
5			1 unit	RT. 07, RW. 03, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	Dinas Perkim	diakomodir dinas perkim PB APBD tahun 2022 Rp84,500,000,00.-
				KECAMATAN GIRIMAYA		
6			1 unit	Pembangunan Rutilahu an. Fauziah, an. Suhaikah, an. Tini Rt.03 Rw.03 Sriwijaya, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Batu Intan	Dinas Perkim	Fauziah: Sudah pernah diakomodir tahun 2020, Suhaikah: diakomodir dinas perkim PK APBD tahun 2022 Rp.59,435,000,00.-, Tini: Rumah masih layak huni
7			1 unit	Pembangunan Rutilahu an. Zulkipli Jl.Berlian IV RT.006 RW.003 Kota Pangkal Pinang, Girimaya	Dinas Perkim	diakomodir dinas perkim PB APBD tahun 2022 Rp.84,500,000,00.-



No.	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/Keterangan
8			1 unit	Pembangunan Rutilahu an. M.Hendra Jl.Basuki Rachmad; an. Rohati Jl.Berlian V Rt. 006 RW. 003; an. Mattari , an. Saturi , dan an. Martawan Jl. Perbakin Dalam RT. 007 RW. 002	Dinas Perkim	Hendra : diakomodir dinas perkim PK APBD tahun 2022 Rp59.435.000,00; Rohati : diakomodir dinas perkim PB APBD tahun 2022 Rp84.500.000,00; Mattari : diakomodir dinas perkim PK APBD tahun 2022 Rp59.435.000,00; Saturi : Sudah diakomodir tahun 2020; Martawan : diakomodir dinas perkim PB APBD tahun 2022 Rp84.500.000,00
9			1 unit	Pembangunan Rutilahu an. Li Hon Jan , dan Misilyeh , Jl. Bukit Tunggul II RT.008 RW.003 Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	Dinas Perkim	Li Hon Jan : diakomodir dinas perkim PB APBD tahun 2022 Rp84.500.000,00; Misilyeh : Bisa diakomodir apabila kelengkapan administrasi dilengkapi (Surat Tanah a.n. suami)



No.	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/Keterangan
10			1 unit	Pembangunan Rutilahu an. Nirah Jl. Basuki Rachmad Ujung II RT 008 RW 003, dan an. Airan Jl. Perbakin Gg. Metro RT 009 RW 003, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	Dinas Perkim	Niran: Bisa diakomodir apabila kelengkapan administrasi dilengkapi (Surat Tanah a.n. anak); Airan: Sudah diakomodir tahun 2020
11			1 unit	Pembangunan Rutilahu an. Maryemah Jl. Perbakin RW. 09 RW. 03 Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	Dinas Perkim	diakomodir dinas perkim PB APBD tahun 2022 Rp.84,500,000,00.-
				KECAMATAN PANGKALBALAM		
12			1 unit	Pembangunan Rutilahu an. BAPAK TOHAR RT 06, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Rejo Sari	Dinas Perkim	diakomodir dinas perkim PB APBD tahun 2022 Rp.84,500,000,00.-
				KECAMATAN RANGKUI		
13			1 unit	Gg. sempayo 1 RT 03, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Asam	Dinas Perkim	diakomodir dinas perkim PB APBD tahun 2022 Rp.84,500,000,00.-
14			1 unit	JL. DEWI SARTIKA RT. 003, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	Dinas Perkim	Sudah disurvei tetapi informasi dari RT tidak ada di lokasi tersebut
15			1 unit	JL. DEWI SARTIKA RT. 008, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	Dinas Perkim	Sudah disurvei tetapi informasi dari RT tidak ada di lokasi tersebut
16			1 unit	Pembangunan Rutilahu an. ZULKIPLI	Dinas Perkim	diakomodir dinas perkim PB ABT tahun



No.	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/Keterangan
				Jl. Pahlawan 12 RT. 003 RW. 001, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat		2021 Rp.69,500,000,00.-
17			1 unit	SAMSIAH Jl. Pahlawan 12, RT. 003 RW. 001 Belakang SDN 19, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	Dinas Perkim	diakomodir dinas perkim PB ABT tahun 2021 Rp.69,500,000,00.-
18			1 unit	ROZIANI Jl. K.H. Ahmad Dahlan RT. 008 RW. 003, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	Dinas Perkim	diakomodir dinas perkim PB ABT tahun 2021 Rp.69,500,000,00.-
19			1 unit	HARIPAH Jl. Pahlawan 12 RT. 009 RW. 003 (Belakang Kantor Lurah), Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	Dinas Perkim	diakomodir dinas perkim PB APBD tahun 2022 Rp.84,500,000,00.-
20			1 unit	HARY AR SUHAILI Jl. KH. Ahmad Dahlan RT. 008 RW. 003, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	Dinas Perkim	diakomodir dinas perkim PB APBD tahun 2022 Rp.84,500,000,00.-
				KECAMATAN TAMAN SARI		
21			1 unit	Jl. Depati Bahrin, RT.07, RW. 02. (Hilda Rahayu), Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Opas Indah	Dinas Perkim	
22			1 unit	Gang Mawar 7, RT. 03 (Wati), Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Opas Indah	Dinas Perkim	



No.	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/Keterangan
1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Permukiman Kumuh yang dipugar				
1			150	Pembuatan Bandar/ Drainase di Jl, Air Nangka II RT. 001 RW. 001, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	Dinas Perkim	diakomodir oleh program KOTAKU 2021
2			100 meter	Rehabilitasi Jalan Setapak RT 009 RW 003, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Rejo Sari	Dinas Perkim	diakomodir oleh program KOTAKU 2021
3			275 meter	Rehabilitasi Jalan Setapak di JL.NILA RT 08, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Rejo Sari	Dinas Perkim	diakomodir oleh program KOTAKU 2021
4			150 meter	Rehabilitasi Jalan Setapak di RT 09/03 kelurahan Rejosari kecamatan pangkal balam, Kota Pangkal Pinang	Dinas Perkim	diakomodir oleh program KOTAKU 2021
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan				
1.04.05.2.01	Urusan Penyeleng- garaan PSU Perumahan	Jumlah Psu yang dibangun				



No.	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/Keterangan
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Peru-mahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah PSU yang tersedia		KECAMATAN BUKIT INTAN		
1			200 meter	Pembangunan jalan setapak di RT.04 RW.02.Air Itam, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	Dinas Perkim	Lokasi diluar wilayah kumuh, menjadi kewenangan PUPR
2			200 meter	Pembuatan bandar/ drainase Rt.04 RT.02 Kel Air Itam, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	Dinas Perkim	Lokasi diluar wilayah kumuh, menjadi kewenangan PUPR
3			260 meter	Pembuatan Drainase Jl H.SULAITA belakang rumah jai RT 02, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	Dinas Perkim	Lokasi diluar wilayah kumuh, menjadi kewenangan PUPR
4			1 titik lokasi	Penyediaan sumber air bersih di Jl. Teluk Bayur, RT. 09, RW. 03., Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Pasir Putih	Dinas Perkim	Lokasi diluar wilayah kumuh, menjadi kewenangan PUPR
5			25 meter	Penyediaan tempat aliran air di Jl. Tambang, RT. 03, RW. 01, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Sinar Bulan	Dinas Perkim	Lokasi diluar wilayah kumuh, menjadi kewenangan PUPR
6			50 meter	Jl. Ratna, RT. 01, RW. 01. (Dekat gudang amuk), Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Pasir Putih	Dinas Perkim	diakomodir dinas perkim tahun 2021 ABT Rp.40,000,000,00.-



No.	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/Keterangan
				KECAMATAN GIRIMAYA		
7			200 meter	Pembuatan Jalan Setapak di belakang mushola Gg.Batu Akik I, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar	Dinas Perkim	
8			350 meter	Pembuatan jalan setapak dari samping Kantor DPD Jl.Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar	Dinas Perkim	
9			250 meter	Pembangunan Drainase/ Bandar Jl.Delima Siam VIII RT.04 RW.02 Batu Intan, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	Dinas Perkim	
10			80 meter	Pembuatan jalan setapak Jl. Tapak Jalk II RT. 004, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar	Dinas Perkim	
11			70 meter	Pembuatan jalan setapak di Jl. Terminal Dalam Rt.05, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar	Dinas Perkim	
12			100 meter	Pembuatan jalan setapak di Jl.Girimaya Rt.05, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar	Dinas Perkim	
13			60 meter	Pembuatan jalan setapak di Jl.Mutiara IV RT.007 Bukit Besar, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar	Dinas Perkim	



No.	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/Keterangan
14			150 meter	Rehabilitasi Jalan Setapak di Jl.Batu Akik VI RT.006 Bukit Besar, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar	Dinas Perkim	
15			125 meter	Rehabilitasi jalan setapak di Jl.Batin Ketapik Rt.009 Bukit Besar, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar	Dinas Perkim	
16			130 meter	Pembuatan Bandar/ Drainase di di Jl.Batu Rubi XI Bukit Besar, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar	Dinas Perkim	
17			70 meter	Pembuatan Bandar/ Drainase di di Jl.Batu Rubi XI Bukit Besar, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar	Dinas Perkim	
18			45 meter	Pembuatan Bandar/ Drainase di di Jl.Delima III Bukit Besar, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar	Dinas Perkim	
19			50 meter	Pembuatan Bandar/ Drainase di di Jl.Batu Akik VI Bukit Besar, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Girimaya, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Perkim	



No.	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/Keterangan
20			300 meter	Pembuatan Bandar/ Drainase di Perbatasan RT.007 dan RT.005 (Belakang rumah bpk.Akong) Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Girimaya, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Perkim	
21			144 meter	Pembuatan Bandar/ Drainase di Jl.Delima Siam II.Gg.Rahwana Ghg.Rahwana Rt.002 Rw.001 Sriwijaya, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	Dinas Perkim	
22			1000 meter	Pembuatan Bandar/ Drainase di Jl.Bukit Tunggal II RT.08 Rw.03 Sriwijaya, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	Dinas Perkim	
23			25 meter	Pembuatan Bandar/ Drainase di Gg.Salam RT.09 RW.03 Sriwijaya, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	Dinas Perkim	
24			132 meter	Rehabilitasi Jalan Setapak/pemasangan cornblock di Gg.Salam Rt.09 RW.03 Sriwijaya, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	Dinas Perkim	



No.	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/Keterangan
25			72 meter	Pembuatan Bandar/ Drainase di Jl.Delima Siuam VI Rt.002 RW.001 (belakang Rumdin Pemkot) Sriwijaya, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	Dinas Perkim	
26			105 meter	Rehabilitasi Jalan Setapak di Depan Masjid Baitul Rachman RT.005 RW.002 Sriwijaya, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	Dinas Perkim	
27			330 meter	Pembuatan Bandar/ Drainase di Jl.Basuki Rahmad Ujung II RT.008 RW.003, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	Dinas Perkim	
28			17 meter	Pembuatan Bandar/ Drainase di Jl.Sosial II Rt.009 RW.003 (samping gedung futsal)Sriwijaya, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	Dinas Perkim	
29			12 meter	Pembangunan/Perbaikan Saluran Rumah Tangga di Jl.Berlian V RT.006 RW.003 Sriwijaya, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	Dinas Perkim	
30			300 meter	Rehabilitasi Jalan Setapak di Jl.Delima Siam VII RT.003 RW.001 Sriwijaya, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	Dinas Perkim	



No.	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/Keterangan
31			1500 meter	Pembuatan Bandar/ Drainase Jl.Basuki Rachmad Ujung Rt.008 Rw.003 Sriwijaya, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	Dinas Perkim	
32			45 meter	Pembuatan Bandar/ Drainase di Jl.Basuki Rachmad Ujung II Rt.006 RW.003 Sriwijaya, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	Dinas Perkim	
33			66 meter	Rehab Jalan setapak (conblok) Jl.Perbakin Gg.salam Rt.009 Rw.003 Sriwijaya, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	Dinas Perkim	
34			84 meter	Rehab Jalan setapak (conblok) di Jl.Berlian IV RT.004 RW.001 Sriwijaya, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	Dinas Perkim	
35			225 meter	Pembuatan Bandar/ Drainase Jl.Basuki Rachmad Rt.006 RW.003, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	Dinas Perkim	
36			72 meter	Pembuatan Bandar/ Drainase di Jl.Delima Siam VIII RT.003 RW.001, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	Dinas Perkim	
37			73 meter	Rehab Jalan setapak (conblok) Perbakin GJlg.Salam Rt.009 RW.003, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	Dinas Perkim	



No.	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/Keterangan
38			31.5 meter	Pembuatan Bandar/ Drainase di Jl.Basuki Rahmad Ujung II Rt.008 RW.003, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	Dinas Perkim	
39			72 meter	Pembangunan/Perbaikan Saluran Rumah Tangga di Jl.Berlian IV Rt.006.RW.003 sriwijaya, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	Dinas Perkim	
40			43 meter	Pembangunan/Perbaikan Saluran Rumah Tangga di Jl.Berlian IV Rt.006.RW.003 sriwijaya, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	Dinas Perkim	
41			31 meter	Pembangunan/Perbaikan Saluran Rumah Tangga di Jl.Perbakin Gg.Salam Rt.009 Rw.003, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	Dinas Perkim	
42			13 meter	Pembangunan/Perbaikan Saluran Rumah Tangga di Jl.Perbakin Gg.Salam RT.009 RW.003, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	Dinas Perkim	
43			27 meter	Pembuatan Bandar/ Drainase di Jl.Perbakin RT.009 RW.003 Sriwijaya, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	Dinas Perkim	



No.	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/Keterangan
44			77 meter	Pembuatan Bandar/ Drainase di Jl.Perbakin Dalam Gg.Salam Rt.009 Rw.003 Sriwijaya, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	Dinas Perkim	
45			817 meter	Pembuatan Bandar/ Drainase di Jl.Basuki Rachmad Ujung Rt.006 Rw.003 Sriwijaya, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	Dinas Perkim	
46			45 meter	Pembuatan Jalan Setapak Jl.Basuki Rachmad RT.006 RW.003 Sriwijaya, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	Dinas Perkim	
47			300 meter	Rehabilitasi Jalan Setapak gang batu akik V sebelah advent, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar	Dinas Perkim	diakomodir dinas perkim tahun 2022 Rp.50,000,000,00.-
48			250 meter	Pembuatan Jalan Setapak Jalan Setapak RT 07 RW 03 Gang Satam IV ke Gang Satam V Kel. Semabung Baru Kec. Grimaya, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semabung Baru	Dinas Perkim	diakomodir dinas perkim tahun 2022 Rp.25,000,000,00.-
49			50 meter	Pembuatan Bandar/ Drainase Jl. Delima, RT. 04, RW.02, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	Dinas Perkim	Lokasi diluar wilayah kumuh, menjadi kewenangan PUPR



No.	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/Keterangan
50			50 meter	Pembuatan Jalan Setapak Jl. Basuki Rahmat (Samping sekolah kalam kudus), Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	Dinas Perkim	Lokasi diluar wilayah kumuh, menjadi kewenangan PUPR
51			129 meter	Pembuatan Bandar/ Drainase Gg. Permata RT. 05 Kel. Semabung Baru	Dinas Perkim	
				KECAMATAN RANGKUI		
52			45	Pembuatan saluran rumah tangga di JL. DUKU II RT. 002, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Pintu Air	Dinas Perkim	diakomodir dinas PUPR karena diluar wilayah kumuh
53			14	Pembuatan Jalan Setapak di DEPAN RUMAH KA. RT 007, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Pintu Air	Dinas Perkim	diakomodir dinas PUPR karena diluar wilayah kumuh
54			130	Pembuatan Jalan Setapak Jl. K.H AHMAD DALAN RT. 008, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Masjid Jamik	Dinas Perkim	diakomodir dinas PUPR karena diluar wilayah kumuh
55			45	Pembuatan Bandar/ Drainase Jl. Duku II RT 002 RW. 001, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	Dinas Perkim	diakomodir dinas perkim tahun 2022 Rp.24,000,000,00.-
56			14	Pembuatan saluran rumah tangga di Jl. Trem RT. 006 RW. 002, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	Dinas Perkim	diakomodir dinas perkim tahun 2021 Rp.27,000,000,00.-



No.	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/Keterangan
57			30	Pembuatan Bandar/ Drainase di Jl. Trem RT. 007 RW. 003, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	Dinas Perkim	tidak bisa dibangun karena kondisi lapangan tidak memenuhi syarat teknis
58			20	Pembuatan Bandar/ Drainase di Jl. Trem RT. 007 RW. 003, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	Dinas Perkim	
59			150	Pembuatan Bandar/ Drainase di Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Gg. Jambu RT 008 RW. 003, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	Dinas Perkim	
60			200	Pembuatan Jalan Setapak di Jl. Duku II RT. 002 RW. 001, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	Dinas Perkim	swakelola dinas perkim 2022 Rp.30,000,000,00.-
61			20	Pembuatan Jalan Setapak di Jl. Trem Dalam RT. 007 RW. 003, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	Dinas Perkim	
62			325	Pembuatan Jalan Setapak di Jl. K.H. Ahmad Dahlan RT. 008 RW. 003, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	Dinas Perkim	
				KECAMATAN PANGKALBALAM		
63			100 meter	Pembuatan Bandar/Drainase Jl Bedukang 1, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Pasir Garam	Dinas Perkim	diluar wilayah kumuh (di luar kewenangan Dinas Perkim)



No.	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/Keterangan
64			100 meter	Pembuatan Jalan Setapak Jl Kerisi RT 004 RW 002 Gang Kami Kawa, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Lontong Pancur	Dinas Perkim	diakomodir dinas perkim tahun 2022 Rp.44,000,000,00.-
65			100 meter	Perlunya Pembuatan Drainase Jl Kerisi RT 004 RW 002, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Lontong Pancur	Dinas Perkim	diakomodir dinas perkim tahun 2022 Rp.74,000,000,00.-
66			150 meter	Pembuatan Bandar/Drainase di Jl. Kakap 1 RT. 003 RW. 001, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Ampui	Dinas Perkim	diluar wilayah kumuh (di luar kewenangan Dinas Perkim)
67			40 meter	Pembuatan Bandar/Drainase di Jl. Bawal RT.002 RW. 001, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Ampui	Dinas Perkim	diluar wilayah kumuh (di luar kewenangan Dinas Perkim)
68			400 meter	Pembuatan Jalan Setapak di Jl. Patin I RT. 005 RW. 002, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Ampui	Dinas Perkim	diluar wilayah kumuh (di luar kewenangan Dinas Perkim)
69			100 meter	Pembuatan Jalan Setapak di Gg. Kakap III RT. 004 RW. 002, Kota Pangkal Pinang, Ampui	Dinas Perkim	diluar wilayah kumuh (di luar kewenangan Dinas Perkim)
70			162 meter	Pembuatan Jalan Setapak Gg. Kakap 5 RT. 004 RW. 002, Kota Pangkal Pinang, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Perkim	diluar wilayah kumuh (di luar kewenangan Dinas Perkim)



No.	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/Keterangan
71			25 meter	Pembuatan Bandar/Drainase di Gg. Kakap 5 RT. 004 RW. 002, Kota Pangkal Pinang, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Perkim	diluar wilayah kumuh (di luar kewenangan Dinas Perkim)
72			70 meter	Rehabilitasi Jalan Setapak di Jl. Patin 8 (Gang SD N 48), Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Ampui	Dinas Perkim	diluar wilayah kumuh (di luar kewenangan Dinas Perkim)
KECAMATAN GERUNGGANG						
73			-	Pembuatan Jalan Setapak DI SAMPING RUMAH H. HUSIN di jl raya tua tunu, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Tua Tunu	Dinas Perkim	diluar wilayah kumuh (di luar kewenangan Dinas Perkim)
74			-	Pembangunan/Perbaikan Saluran Rumah Tangga di tua tunu indah, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Tua Tunu	Dinas Perkim	diluar wilayah kumuh (di luar kewenangan Dinas Perkim)
75			300 meter	Rehabilitasi Jalan Setapak di Rumah Nul Jum RT.02.RW.01 Tuatunu, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Tua Tunu	Dinas Perkim	diluar wilayah kumuh (di luar kewenangan Dinas Perkim)
76			250 meter	Pembuatan Jalan Setapak jalan dekat rumah Sadam Rt.02Rw.01 Tuatunu, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Tua Tunu	Dinas Perkim	diluar wilayah kumuh (di luar kewenangan Dinas Perkim)
77			300 meter	Pembuatan Jalan Setapak di rt.03 rw.01, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Bukitmerapin	Dinas Perkim	diluar wilayah kumuh (di luar kewenangan Dinas Perkim)



No.	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/Keterangan
78			90 m2	Perbaikan Tempat Ibadah di Jl, Pahlawan 12 RT. 10 RW. 03, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Kacang Pedang	Dinas Perkim	diluar wilayah kumuh (di luar kewenangan Dinas Perkim)
79			196 m2	Perbaikan Tempat Ibadah Jl.Air Geligit RT.01 RW.01 Tutunu Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Tua Tunu	Dinas Perkim	diluar wilayah kumuh (di luar kewenangan Dinas Perkim)
80			250 meter	Rehabilitasi Jalan Setapak di Jl.air Dalam Rt.01 RW.01 Tuatunu, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Tua Tunu	Dinas Perkim	diluar wilayah kumuh (di luar kewenangan Dinas Perkim)
				KECAMATAN GABEK		
81			500 meter	Pembuatan Bandar/Drainase di Rumah Bahrain Rt.01 RW.01 Selindung, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Selindung	Dinas Perkim	diluar wilayah kumuh (di luar kewenangan Dinas Perkim)
82			600 meter	Rehabilitasi Jalan Setapak di RT.01,RT02,RT.03 RW.01 Gabek I, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Gabek Satu	Dinas Perkim	diluar wilayah kumuh (di luar kewenangan Dinas Perkim)
83			100 meter	Pembuatan Bandar/Drainase di Jl Selangat RT 006 RW 002, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Selindung Baru	Dinas Perkim	diluar wilayah kumuh (di luar kewenangan Dinas Perkim)



No.	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/Keterangan
84			100 meter	Pembuatan Bandar/Drainase di Wilayah Selindung Baru dan Wilayah Gabek, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Selindung Baru	Dinas Perkim	diluar wilayah kumuh (di luar kewenangan Dinas Perkim)
85			100 meter	Pembuatan Jalan Setapak di Jl Fatmawati Gang Kelapa RT 001 RW 001, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Selindung Baru	Dinas Perkim	diluar wilayah kumuh (di luar kewenangan Dinas Perkim)
86			400 meter	Pembuatan Bandar/Drainase Jl Sekolah RT 004 dan RT 007, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Selindung	Dinas Perkim	diluar wilayah kumuh (di luar kewenangan Dinas Perkim)
87			400 meter	Pembuatan Bandar/Drainase Jalan Sekolah RT04 RW 07, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Selindung	Dinas Perkim	diluar wilayah kumuh (di luar kewenangan Dinas Perkim)
88			110 meter	Rehabilitasi Jalan Setapak di GANG SELUANG 1 RT.07 RW.02, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Gabek Dua	Dinas Perkim	diluar wilayah kumuh (di luar kewenangan Dinas Perkim)
89			100 meter	Rehabilitasi Jalan Setapak di Jln. Pikas IV Kelurahan Air Salemba Kecamatan Gabek, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Air Salemba	Dinas Perkim	diluar wilayah kumuh (di luar kewenangan Dinas Perkim)
2.15.	PERHUBUNGAN			DINAS PERHUBUNGAN		
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Tingkat Keselamatan Laulintas Dan Layanan Angkutan Jalan				



No.	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/Keterangan
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota					
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota Yang Tersedia		KECAMATAN GERUNGGANG		
1			10 titik	Pemasangan Lampu Jalan di Kelurahan Taman Bunga, RT 09, RW 03, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Taman Bunga	Dinas Perhubungan	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
2			20 buah	Pemasangan Lampu Jalan di Perumnas Kampung Melayu, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Bukitmerapin	Dinas Perhubungan	Terakomodir di tahun 2023
3			500 meter	Pemasangan Lampu Jalan di jl.pemancingan kampak serasi, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Tua Tunu	Dinas Perhubungan	Terakomodir di tahun 2023
4			100 meter	Pemasangan Lampu Jalan di Simpang 4 Jalan Stania, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Taman Bunga	Dinas Perhubungan	Terakomodir di tahun 2022
5			20 Titik	Pemasangan Lampu Jalan di Jl. Masjid AL MIZAN, Kampak RT. 10 RW. 03, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Tua Tunu	Dinas Perhubungan	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023



No.	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/Keterangan
6			15 Titik	Pemasangan Lampu Jalan di Jl. Damai, Kampak RT. 10 RW. 03, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Tua Tunu	Dinas Perhubungan	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
7			6 titik	Pemasangan Lampu Jalan di Jl. Kampung Melayu, Gg. Sukun (SD Negeri 32 Pangkalpinang), Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Bukitsari	Dinas Perhubungan	Terakomodir di tahun 2023
				KECAMATAN PANGKALBALAM		
8			3 titik	Pemasangan Lampu Jalan di Jl Kakap 2 RT 004 RW 002, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Ampui	Dinas Perhubungan	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
9			3 titik	Pemasangan Lampu Jalan di Jl Tiram Raya, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Pasir Garam	Dinas Perhubungan	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
10			3 titik	Pemasangan Lampu Jalan di Jl Bedukang Raya, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Pasir Garam	Dinas Perhubungan	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
11			200 m	Penertiban parker liar di Pangkalbalam, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Ampui	Dinas Perhubungan	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
12			50 m	Pemasangan Lampu Jalan di Jalan Kakap 2 RT.04 RW.02, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Ampui	Dinas Perhubungan	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023



No.	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/Keterangan
13			50 m	Pemasangan Lampu Jalan di Jalan Bedukang 2, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Pasir Garam	Dinas Perhubungan	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
14			24 titik	Pemasangan Lampu Jalan di Jl. Kakap II RT 002 RW. 001, Kota Pangkal Pinang, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Perhubungan	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
15			12 titik	Pemasangan Lampu Jalan di Jln. Kakap 2 RT. 04 RW. 02, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Ampui	Dinas Perhubungan	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
16			1 unit	Pemasangan Cermin Cembung di tikungan di Jl. Bedukang II RT 002 RW. 001, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Pasir Garam	Dinas Perhubungan	Terakomodir di tahun 2021
17			5 titik	Pemasangan Lampu Jalan di Jl. Bawal III, RT. 06., Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Pasir Garam	Dinas Perhubungan	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
				KECAMATAN BUKIT INTAN		
18			80	Pemasangan Lampu Jalan di jl. depati amir dan jl. badeede, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Sinar Bulan	Dinas Perhubungan	Terakomodir di tahun 2021
19			10	Pemasangan Lampu Jalan di semabung lama, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semabung Lama	Dinas Perhubungan	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023



No.	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/Keterangan
20			5 buah	Pemasangan Lampu Jalan di jl.ratna, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semabung Lama	Dinas Perhubungan	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
21			500 m	Pemasangan Lampu Jalan di Semabung lama, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semabung Lama	Dinas Perhubungan	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
22			200 m	Pemasangan Lampu Jalan di Gg.Batu Giok I Kel.Batu Intan, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	Dinas Perhubungan	Terakomodir di tahun 2023
23			5 UNIT	Pemasangan Lampu Jalan di Jl. Tanjung Bunga RT 01, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Temberan	Dinas Perhubungan	Terakomodir di tahun 2023
24			20 unit	Pemasangan Lampu Jalan di Jalan Bedade RT. 06 RW. 02, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Sinar Bulan	Dinas Perhubungan	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
25			30 unit	Pemasangan Lampu Jalan di Jl. Sinar Bulan RT. 05 RW. 02, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Sinar Bulan	Dinas Perhubungan	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
26			20 unit	Pemasangan Lampu Jalan di Jl. Kampung Samak, RT. 03 RW. 01, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Sinar Bulan	Dinas Perhubungan	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023



No.	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/Keterangan
27			13 unit	Pemasangan Lampu Jalan di Jalan Eks Tambang 25 RT. 03 RW. 01 Kel. Sinar Bulan Kec. Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Sinar Bulan	Dinas Perhubungan	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
28			3 unit	Pemasangan Lampu Jalan di Jl. Depati Hamzah Gg. Thai Pak Men RT. 03 RW. 01, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Sinar Bulan	Dinas Perhubungan	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
				KECAMATAN GABEK		
29			3 titik	Pemasangan Lampu Jalan di Jl Rustam Effendi RT 006 RW 002 Gang Tembusan, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Selindung Baru	Dinas Perhubungan	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
30			50 m	Pemasangan Lampu Jalan di Samping Kelurahan Selindung RT.01RW.01, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Selindung	Dinas Perhubungan	Terakomodir di tahun 2022
31			3 titik	Pemasangan Lampu Jalan di Jl M.Saleh Zainudin, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Air Salemba	Dinas Perhubungan	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
32			100 meter	Pemasangan Lampu Jalan di Kelurahan Air Salemba, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Air Salemba	Dinas Perhubungan	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
33			3 titik	Pemasangan Lampu Jalan di Jl Sekolah, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Selindung	Dinas Perhubungan	Terakomodir di tahun 2022



No.	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/Keterangan
34			15 UNIT	Pemasangan Lampu Jalan di Jl.Sekolah Selindung RT 01 RW 01, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Selindung	Dinas Perhubungan	Terakomodir di tahun 2022
35			3 BUAH	Pemasangan Lampu Jalan di Gg. Gurami 2 RT 07, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Gabek Satu	Dinas Perhubungan	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
36			4 titik	Pemasangan Lampu Jalan di Jln. MZ. Zainudin Kelurahan Air Salemba Kecamatan Gabek, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Air Salemba	Dinas Perhubungan	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
37			150 meter	Penataan jalan di Kelurahan Air Salemba Kecamatan Gabek, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Air Salemba	Dinas Perhubungan	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
38			4 titik	Pemasangan Lampu Jalan di Jln. Sekolah Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Selindung	Dinas Perhubungan	Terakomodir di tahun 2022
				KECAMATAN GIRIMAYA		
39			50 m	Pemasangan Lampu Jalan di Gg.Mutiara 1 Rt.08.RW.03 Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar	Dinas Perhubungan	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023



No.	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/Keterangan
40			3 m	Pemasangan Cermin Cembung di tikungan di Gg.Batu Rubi RT.02 RW.01, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar	Dinas Perhubungan	Terakomodir di tahun 2021
41			225 m	Pemasangan Lampu Jalan di Jl.basuki Rahmad Ujung Rt.09 RW.03 Sriwijaya, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	Dinas Perhubungan	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
42			4 titik	Pemasangan Lampu Jalan di Gang Batu Giok, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	Dinas Perhubungan	Terakomodir di tahun 2023
43			1 buah	Pemasangan Cermin Cembung di tikungan di Jl. Permata, RT. 06, RW. 03, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Pasar Padi	Dinas Perhubungan	Terakomodir di tahun 2021
44			4 titik	Pemasangan Lampu Jalan di Gang Anggur I, RT. 06, RW 03, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Pasar Padi	Dinas Perhubungan	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
				KECAMATAN RANGKUI		
45			600 m	Pemasangan Lampu Jalan di RW.01, RW.02 , RW 03 RT.03 Parit Lalang, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Parit Lalang	Dinas Perhubungan	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
46			1 UNIT	Pemasangan Cermin Cembung di tikungan di Jl. Salak I RT. 003, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Asam	Dinas Perhubungan	Terakomodir di tahun 2021



No.	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/Keterangan
47			1 unit	Jl. Usada RT. 002 RW. 001, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	Dinas Perhubungan	Terakomodir di tahun 2021
48			1 unit	Pemasangan Cermin Cembung di tikungan di Jl. Salak I RT. 003 RW. 001, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	Dinas Perhubungan	Terakomodir di tahun 2021
49			2 buah	Pemasangan Cermin Cembung di tikungan di Jalan Kenali Asam Masjid Baiturrahman Kelurahan Pintu Air Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Perhubungan	Terakomodir di tahun 2021
				KECAMATAN TAMAN SARI		
50			10 titik	Pemasangan Lampu Jalan di Jl Teratai RT. 08 RW. 02, Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Gedung Nasional	Dinas Perhubungan	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
51			2 buah	Pemasangan Cermin Cembung di tikungan di kelurahan gedung nasional, RT 04 RW 01, Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Gedung Nasional	Dinas Perhubungan	Terakomodir di tahun 2021
52			1 UNIT	Pemasangan Cermin Cembung di tikungan di Jl. Usada RT. 002, Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Kejaksaan	Dinas Perhubungan	Terakomodir di tahun 2021



5.3 Aspirasi Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi yang terkait langsung dengan pelayanan perangkat daerah kabupaten/kota, berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota. Hasil penelaahan terhadap aspirasi masyarakat, yang dapat diakomodir dalam RKPD 2022 disajikan dalam Tabel 5.2 berikut:



Tabel 5.2
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kota Pangkalpinang

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1.04.	PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN				DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase rumahtangga kumuh perkotaan		
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		Jumlah rumah yang diperbaiki		
		KECAMATAN BUKIT INTAN			
1		Jalan Mustika IV Rt. 07 Rw. 02, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semabung Lama		2 unit rumah (ukuran 5x6m)	Bisa diakomodir apabila kelengkapan administrasi dilengkapi (Surat Tanah, KTP, KK)
2		Gang Mustika III, Rt. 10 Rw. 02, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semabung Lama		1 unit	diakomodir dinas perkim PB APBD tahun 2022 Rp.84,500,000,00.-
3		Rt. 02 rw. 01, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semabung Lama		1 unit	Bisa diakomodir apabila kelengkapan administrasi dilengkapi (Surat Tanah, KTP, KK)



No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
4		an. Acung Jalan Aleksander RT 02 RW 01, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Bacang		1 unit rumah (ukuran 6x7m)	diakomodir dinas perkim PB APBD tahun 2022 Rp.84,500,000,00.-
5		Rumah Atet, Gang Nilam VI RT 09 RW 03, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Bacang		1 unit rumah (ukuran 6x7m)	diakomodir dinas perkim PB APBD tahun 2022 Rp.84,500,000,00.-
6		Rumah Leo Sandi, Jalan Aleksander RT 04, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Bacang		1 unit rumah (ukuran 6x7m)	diakomodir dinas perkim PK APBD tahun 2022 Rp.59,435,000,00.-
7		Rumah Apo, Jalan Nilam II RT 06 RW 02, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Bacang		1 unit	Bisa diakomodir apabila dilengkapi administrasi dilengkapi (Surat Tanah, KTP, KK)
8		Rumah ROSIAH, jl. air kabung RT. 06 RW. 02, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam		1 unit	diakomodir dinas perkim PB APBD tahun 2022 Rp.84,500,000,00.-
9		Rumah YUNIAR, Jl. Hidayatussalikin dalam RT. 04 Rw. 02, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam		1 unit	diakomodir dinas perkim PB APBD tahun 2022 Rp.84,500,000,00.-
10		Rumah KASMAH, Gg. Bandes I RT. 07 RW. 03, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam		1 unit	diakomodir dinas perkim PB APBD tahun 2022 Rp.84,500,000,00.-
11		Rumah HARYANI, Jl. pasir padi RT. 06 RW.02, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam		1 unit	diakomodir dinas perkim PB APBD tahun 2022 Rp.84,500,000,00.-



No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
12		Rumah di RT. 02 RW. 01 (samping rumah H. samsir), Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam		1 unit	diakomodir dinas perkim PB APBD tahun 2022 Rp.84,500,000,00.-
		KECAMATAN GIRIMAYA			
1		a.n Holid Jl. Kelapa RT 002 RW 001, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Pasar Padi		1 unit	Bisa diakomodir apabila kelengkapan administrasi dilengkapi (Surat Tanah digadai)
2		a.n Perdiansyah Jl. Kelapa RT 002 RW 001, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Pasar Padi		1 unit	Bisa diakomodir apabila kelengkapan administrasi dilengkapi (Surat Tanah digadai)
3		a.n Herti Ayu Jl. Kelapa RT 002 RW 001, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Pasar Padi		1 unit	diakomodir dinas perkim PB APBD tahun 2021 Rp.69,500,000,00.-
4		a.n Sobri Jl. Kelapa RT 002 RW 001, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Pasar Padi		1 unit	diakomodir dinas perkim PK APBD tahun 2022 Rp.59,435,000,00.-
5		a.n M. Untung Jl. Kelapa RT 002 RW 001, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Pasar Padi		1 unit	diakomodir dinas perkim PK APBD tahun 2022 Rp.59,435,000,00.-
6		a.n Bong Moi Lan Gg. Anggur I RT 006 RW 003, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Pasar Padi		1 unit	diakomodir dinas perkim PK APBD tahun 2022 Rp.59,435,000,00.-



No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
7		an.kandar Gg.intan II RT 02/001, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan		1 unit	diakomodir dinas perkim PB APBD tahun 2022 Rp.84,500,000,00.-
8		an.Nina Gg. intan II RT.002/001, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan		1 unit	diakomodir dinas perkim PB APBD tahun 2022 Rp.84,500,000,00.-
		KECAMATAN GABEK			
1		Rumah Lie Tjin, Jl. Pikas 9 RT.002 RW.001, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Air Salemba		1 unit	Rumah terlalu besar dan masih layak huni
2		Rumah Teddy Hijanto, Jl. Belanak 7 RT.003 RW.002, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Air Salemba		1 unit	diakomodir dinas perkim PB APBD tahun 2022 Rp.84,500,000,00.-
3		Rumah Hakidah Husein, RT.005 RW.003, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Air Salemba		1 unit	Rumah terlalu besar dan masih layak huni
		KECAMATAN RANGKUI			
1		Jalan Marica RT. 008 RW. 003 (Rumah Mirwan), Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Pintu Air		1 unit	Bisa diakomodir apabila kelengkapan administrasi dilengkapi (Surat Tanah a.n Orang Tua)



No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Permukiman Kumuh yang dipugar			
1		Pembangunan/Rehabilitasi Bandar di jalan Gang Merah delima Rt.04 Rw.02, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Temberan		1 paket	diakomodir oleh program KOTAKU 2021
2		Pembangunan Jalan Cor di Jalan Rt. 04 Rw.02, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Temberan		1 paket	diakomodir oleh program KOTAKU 2021
3		Pembangunan/Rehabilitasi Bandar di Jalan Gg. Sinar Rt05 Rw.02, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Temberan		1 paket	diakomodir oleh program KOTAKU 2021
4		Pembangunan/Peningkatan Jalan Setapak di Jalan. Gg. Sinar Rt.06 Rw02, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Temberan		1 paket	diakomodir oleh program KOTAKU 2021



No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan			
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Psu yang dibangun			
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah PSU yang tersedia			
KECAMATAN BUKIT INTAN					
1		Pembangunan/Peningkatan Jalan Setapak di Jalan Fajar Bayangkara Rt.02 Rw. 01, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Temberan		1 paket	diakomodir dinas perkim tahun 2022 Rp.40,000,000,00.-
2		Normalisasi/Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase/Bandar di Jalan Perum Pepabri Rt.03 Rw.01, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Temberan		1 paket	diakomodir dinas perkim tahun 2022 Rp. 30,000,000,00,-
3		Normalisasi/Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase/Bandar di Jalan batas antara Rt03 dan Rt. 01 Rw. 01, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Temberan		1 paket	diakomodir swakelola dinas perkim 2022 Rp.30,000,000,00,-



No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
4		Normalisasi/Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase/Bandar di Jalan Safir biru 01 Rt.07 rw.02, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Temberan		1 paket	diakomodir swakelola dinas perkim 2022 Rp.30,000,000,00,-
5		Normalisasi/Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase/Bandar di Jalan Gg. Safir Biru III Rt.07 Rw.02, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Temberan		1 paket	diakomodir swakelola dinas perkim 2022 Rp.30,000,000,00,-
6		Pembangunan/Peningkatan Jalan Setapak di Jalan gg SD N 58 RT.004 RW.002, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Sinar Bulan		300 meter	diakomodir dinas PUPR karena diluar wilayah kumuh
7		PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE di Rt. 03 Rw. 01, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semabung Lama		ukuran L. 50cm P. 90 m	diakomodir dinas perkim tahun 2022 ABT Rp.55,000,000,00,-
8		Pembangunan/Rehabilitasi Bandar di Rt. 03 Rw. 01, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semabung Lama		ukuran L. 50cm P. 300 m	diakomodir swakelola dinas perkim 2022 Rp.30,000,000,00,-



No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
9		Pembangunan/Rehabilitasi Bandar (Rumah Pak muharen) di Jalan mustika IV rt. 07 Rw. 02, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semabung Lama		ukuran L.30 cm P. 40 m	diakomodir swakelola dinas perkim 2022 Rp.30,000,000,00,-
10		Normalisasi/Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase/Bandar (Rumah Pak RT) di Jalan mustika IV Rt. 07 Rw.02, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semabung Lama		ukuran L. 40cm P. 250 m	diakomodir dinas PUPR (saluran primer) tinggi lebih dari 1m
11		PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE di Jalan Zamrud Rt.14 Rw. 03, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semabung Lama		200 meter	tidak bisa dibangun karena kondisi lapangan tidak memenuhi syarat teknis (elevasi)
12		PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE di gang kadera Rt.14 Rw.03, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semabung Lama		400 meter	lahan untuk dibangun tidak mendapatkan izin dari warga
13		Pembangunan/Rehabilitasi Bandar (Samping Rumah Pak Samsirwan) di Jalan mustika IV Rt. 07 Rw. 02, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semabung Lama		ukuran L. 30cm P. 50 m	diakomodir dinas perkim athun 2022 Rp.30,000,000,00,-



No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
14		Normalisasi/Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase/Bandar di jalan batu nirwana Rt. 03 Rw. 01 Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semabung Lama		150 meter	diakomodir dinas perkim athun 2022 Rp.30,000,000,00,-
15		Pembangunan/Peningkatan Jalan Setapak (cornblock) di Rt. 03 Rw. 01, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semabung Lama		ukuran L. 120cm P. 130m	diakomodir dinas perkim athun 2022 Rp.30,000,000,00,-
16		PEMBANGUNAN JALAN (LAPEN) di Rt. 03 Rw. 01, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semabung Lama		ukuran l. 150cm P. 110m	diakomodir dinas perkim tahun 2022 Rp.30,000,000,00,-
17		PEMBANGUNAN JALAN (LAPEN) di Jalan mustika Iv Rt. 07 Rw. 02, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semabung Lama		ukuran L.2m P. 110m	diakomodir dinas perkim tahun 2022 ABT Rp.32,500,000,00.-
18		Pembangunan/Peningkatan Jalan Setapak di Jalan Depati Hamzah Rt. 07 Rw. 02, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semabung Lama		1 paket	diakomodir dinas perkim athun 2022 Rp.30,000,000,00,-



No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
19		Pengaspalan/Penebalan Jalan di Jalan zamrud IV Rt. 02 Rw. 01, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semabung Lama		ukuran L. 3m P. 50m	diakomodir dinas PUPR
20		Pengaspalan/Penebalan Jalan di Jalan Zamrud III. Rt. 13 Rw. 03, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semabung Lama		ukuran P. 50m	diakomodir dinas PUPR
21		Pembangunan Jalan Cor di Gang mustika 10 Rt. 04 Rw. 01, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semabung Lama		200 meter	diakomodir dinas perkim tahun 2022 Rp.30,000,000,00,-
22		Pembangunan/Peningkatan Jalan Setapak di Jl.Pasir padi (Mesjid thoriqul jannah) RT. 06 RW. 02, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam		volume 30 mtr X 2 mtr	diakomodir dinas PUPR diluar wilayah kumuh
		KECAMATAN GERUNGANG			
1		Pembangunan/Peningkatan Jalan Setapak (Sebelah Rumah Dadang) di RT.07 RW.03, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Kacang Pedang		P: 200 m X L : 2 M	diakomodir dinas PUPR karena diluar wilayah kumuh



No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
2		Pembangunan/Peningkatan Jalan Setapak (dgn Rumah Bpk Sutarman) di Jl. SDN.46 RT.002/001, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Bukitsari		50 M x 3 M	diakomodir dinas PUPR karena diluar wilayah kumuh
3		Pembangunan/Peningkatan Jalan Setapak di Jl. Jumat Yahya RT.003/001, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Bukitsari		60 m x 3 m	diakomodir dinas PUPR karena diluar wilayah kumuh
4		Pembangunan/Peningkatan Jalan Setapak di Jl. Gg. Aduma RT.010 RW.03, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Bukitmerapin		P 125 M x L 3 M	diakomodir dinas PUPR karena diluar wilayah kumuh
5		Pembangunan/Peningkatan Jalan Setapak di Jln.Dahlia 8 RT03/RW.03, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Bukitmerapin		P 130 M x L 3 M	diakomodir dinas PUPR karena diluar wilayah kumuh
6		Pembangunan/Peningkatan Jalan Setapak di Jl. Melangir Dalam RT.012 RW.03, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Bukitmerapin		3 x 60 m	diakomodir dinas PUPR karena diluar wilayah kumuh



No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
7		Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Gang di Jl.Gg.Nyiur dalam RT/RW/009/002, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Bukitmerapin		P 60 M x L 3 M	diakomodir dinas PUPR karena diluar wilayah kumuh
		KECAMATAN GIRIMAYA			
1		PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE di perbatasan Rt.007 dan Rt.006 (belakang rumah Bpk.Akong), Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya		volume P : 300m , L : 1m, T : 1,2m	diakomodir dinas PUPR (saluran primer) tinggi lebih dari 1m
2		PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE di Alamat : Jl. Permata RT 001 RW 001, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semabung Baru		Volume P=50 m L=1 m T= 1,5 m	diakomodir dinas PUPR (saluran primer) tinggi lebih dari 1m
3		Pembangunan/Peningkatan Jalan Setapak di Jl. Soekarno Hatta Samping Agen Sriwijaya, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semabung Baru		Volume : P: 90M L:2,5M	diakomodir dinas perkim tahun 2022 Rp.73,000,000,00.-



No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
4		Pembangunan/Peningkatan Jalan Setapak di Gg. Kedondong III RT 005 RW 003, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Pasar Padi		Volume : P : 100m L : 2,5m	diakomodir dinas perkim tahun 2021 ABT Rp.39,000,000,00.-
5		Perbaikan Jalan Setapak di Gg. Keduduk I RT 003 RW 002, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Pasar Padi		Volume : P : 90m L : 1m	Kondisi Jalan masih bagus berdasarkan hasil survei
6		PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE di Gg. Batu Rubi I RT 007/ 002, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan		Volume P 42m x L: 60 cm	Sudah diakomodir dinas PUPR
		KECAMATAN PANGKALBALAM			
1		PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE di Jalan Bandeng 4 RT.01, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Rejo Sari		P = 70 meter L=50 cm Tinggi 30 cm.	diakomodir dinas perkim tahun 2022 Rp.88,000,000,00.-
2		Pembangunan/Peningkatan Jalan Setapak di Jl.Kerisi Gang Kami Kawa RT.04/02, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Lontong Pancur		2 X 200 M	diakomodir dinas perkim tahun 2022 Rp.44,000,000,00.-



No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
3		Pembangunan/Peningkatan Jalan Setapak di Jl. Kko Usman Dari Tb Markidi s/d Rumah Junaidi RT.02/01, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Lontong Pancur		P=150 M, L=2,5 M	diakomodir dinas perkim tahun 2022 Rp.82,000,000,00.-
4		Normalisasi/Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase/Bandar di Jl. Kerapu + Jl. Kko Usman RT.03/01, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Lontong Pancur		P=120 M, L=50 CM, T=60 CM	diakomodir dinas perkim tahun 2022 Rp.31,000,000,00.-
5		Normalisasi/Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase/Bandar di Jl. KKO Harun RT 003/RW 002, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Ketapang		P=20m L=50cm T=50cm	diakomodir dinas perkim tahun 2022 Rp.55,000,000,00.-
6		PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE di Jl. tenggiri 5 RT 006/RW 003, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Ketapang		P=90 m L=100cm T=100cm	diakomodir dinas perkim tahun 2022 Rp.141,000,000,00.-



No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
7		PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE di Jl. Laksamana malahayati, Gg. Gereja RT 002/RW 001, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Ketapang		P=50m L=45cm T=50cm	diakomodir dinas perkim tahun 2022 Rp.60,000,000,00.-
		KECAMATAN RANGKUI			
1		Pembangunan/Rehabilitasi Bandar di Jl. Kemangi II RT. 003/002, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Parit Lalang		P=180m, L=80cm, T=80cm	diakomodir dinas perkim tahun 2022 Rp.150,000,000,00.-
2		Pembangunan/Rehabilitasi Bandar di Jl. TPA AL HUSNA RT. 001/003 (rumah Herman Kalok tembus jagal), Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Parit Lalang		P=150m, L=60cm, T=60cm	diakomodir dinas perkim tahun 2021 Rp.131,842,700,00.-
3		Pembangunan/Peningkatan Jalan Setapak di Jl. Lapangan bola dalam RT. 002/003, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Parit Lalang		P = 70m, L = 2m	diakomodir dinas perkim tahun 2021 Rp.55,029,000,00.-



No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
4		Pembangunan/Rehabilitasi Bandar di Jl. Cendawan dalam RT. 003/001 (belakang rumah Pak Zakaria), Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Parit Lalang		P=50m, L=1m, T=80cm	diakomodir dinas perkim tahun 2022 Rp.50,000,000,00.-
5		Pembangunan/Peningkatan Jalan Setapak di Jl. Air Nangka II RT. 001, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat		150 meter	diakomodir oleh program KOTAKU 2021
6		Pembangunan/Peningkatan Jalan Setapak di Gg. Semen RT. 008, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Bintang		P=180m, L=1,5m	diakomodir dinas perkim tahun 2022 Rp.30,000,000,00.-
7		Pembangunan/Peningkatan Jalan Setapak di Jl. Yang Zubaidah RT. 009, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Bintang		P= 50m, L= 1m	diakomodir dinas perkim tahun 2022 Rp.14,000,000,00.-
8		Pembangunan/Peningkatan Jalan Setapak di Jl. Belimbing IV RT. 002, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Bintang		P= 41m, L= 1,5m	diakomodir dinas perkim tahun 2022 Rp.14,000,000,00.-



No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
9		Pembangunan/Peningkatan Jalan Setapak di Jl. Jambu RT. 004, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Bintang		P= 100m, L= 1m	diakomodir dinas perkim tahun 2022 Rp.30,000,000,00.-
10		Pembangunan/Peningkatan Jalan Setapak di Gg. Walet RT. 008, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Bintang		P = 180m	diakomodir dinas perkim tahun 2022 Rp.30,000,000,00.-
11		Pembangunan/Peningkatan Jalan Setapak di Gg. Buntu RT. 008, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Bintang		P = 120m	diakomodir dinas perkim tahun 2022 Rp.45,000,000,00.-
12		Normalisasi/Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase/Bandar di Jl. Belimbing IV RT. 002, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Bintang		P=28m, L=1m	tidak bisa dibangun karena kondisi lapangan tidak memenuhi syarat teknis
13		Normalisasi/Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase/Bandar di Jl. Pamekasan I RT. 001, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Asam		Volume : 200m x 45 cm x 65 cm	diakomodir dinas PUPR dengan Lapen
14		Pembangunan/Rehabilitasi Bandar di Jl. Bina Marga PDAM RT. 006, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Asam		Ukuran : 50m x 50cm	diakomodir dinas PUPR (saluran primer) tinggi lebih dari 1m



No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
		KECAMATAN TAMANSARI			
1		Normalisasi/Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase/Bandar di Gg. Seroja VII RT. 01 RW. 03, Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Rawa Bangun		ukuran : 0,75 m x 1 m x 100 m	diakomodir dinas perkim tahun 2022 Rp.30,000,000,00.-
2		Pembangunan/Peningkatan Jalan Setapak di Gg. Kenanga II RT. 02 RW. 01, Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Rawa Bangun		ukuran : 1,20 m x 90 m	diakomodir dinas perkim tahun 2022 Rp.25,000,000,00.-
3		Pembangunan/Peningkatan Jalan Setapak di JL. Kenanga I RT. 01 RW. 01, Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Rawa Bangun		ukuran : 2,20 m x 18,60 m	diakomodir dinas perkim tahun 2022 Rp.23,000,000,00.-
4		Pembangunan/Peningkatan Jalan Setapak di JL. Mawar 3 RT. 02 RW. 01, Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Opas Indah		1 paket	diakomodir dinas perkim tahun 2022 Rp.93,000,000,00.-
5		Pembangunan/Peningkatan Jalan Setapak di JL. Mawar VI RT. 03 RW. 01, Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Opas Indah		1 paket	diakomodir dinas perkim tahun 2022 Rp.55,000,000,00.-



No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
6		Pembangunan/Peningkatan Jalan Setapak di JL. Asoka 2 RT. 05 RW. 02, Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Opas Indah		1 paket	diakomodir dinas perkim tahun 2022 Rp.24,000,000,00.-
7		Pembangunan/Peningkatan Jalan Setapak di JL. Depati Barin Gg. Asoka RT. 07 RW. 02, Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Opas Indah		1 paket	diakomodir dinas perkim tahun 2022 Rp.29,000,000,00.-
8		Pembangunan/Peningkatan Jalan Setapak di JL. Opas RT. 08 RW. 02, Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Opas Indah		1 paket	diakomodir dinas perkim tahun 2022 Rp.93,000,000,00.-
9		Normalisasi/Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase/Bandar di JL. Setia Bakti Gg. Mangga RT 01 RW 03, Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Kejaksaan		P : 300 m L : 3 m	diakomodir dinas perkim tahun 2022 Rp.45,000,000,00.-
10		Pembangunan/Peningkatan Jalan Setapak di Gg. Sakura I RT. 001 RW. 001, Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Gedung Nasional		P : 100 m L : 1,5 m	diakomodir dinas perkim tahun 2022 Rp.31,000,000,00.-



No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
11		Pembangunan/Peningkatan Jalan Setapak di Jl. Re Martadinata Gg. Aster I Rt. 005 Rw. 002, Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Gedung Nasional		ukuran 30 m	diakomodir dinas perkim tahun 2022 Rp.52,000,000,00.-
2.15.	PERHUBUNGAN				DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Persentase Tingkat Keselamatan Laulintas Dan Layanan Angkutan Jalan		
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota				
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota		Jumlah Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota Yang Tersedia		
		KECAMATAN BUKIT INTAN			
1		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Gg. bidan nuri RT. 04 RW. 02, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam		8 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023



No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
2		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di perumahan bangka pos, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam		4 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
3		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di RT. 04 RW.02, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam		11 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
4		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di jl. widuri bulan 2 dan 3 RT. 01 RW. 01, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam		11 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
5		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di RT. 02 RW. 01, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam		20 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
6		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di RT.06 RW. 02, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam		21 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
7		Pemasangan Cermin Cembung di RT. 02 RW. 01, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam		1 buah	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023



No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
8		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jalan menuju kantor Kelurahan Air Mawar yang baru RT.02/RW.01, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar		8 titik lampu	Terakomodir di tahun 2022
9		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jalan Arus Dalam RT.03/RW.02, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar		35 titik lampu	Terakomodir di tahun 2022
10		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Sepanjang jalan Perkuburan Aek Ati RT.01/RW.01, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar		5 titik lampu	Terakomodir di tahun 2022
11		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jalan Air Mawar RT.01,RW.01 (tikungan dekat pabrik bata), Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar		10 titik lampu	Terakomodir di tahun 2022



No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
12		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jalan Batu Kaldera gg. destiland RT.04/RW.02, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar		20 titik lampu	Terakomodir di tahun 2022
13		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jalan Koboij/jalan pabrik bata RT.04/RW.02, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar		20 titik lampu	Terakomodir di tahun 2022
14		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jalan Tirta Darma 1 RT.02/RW.01, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar		13 titik lampu	Terakomodir di tahun 2022
15		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di JL. Tirta Darma I RT.02/RW.01, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar		4 titik lampu	Terakomodir di tahun 2022
16		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jalan Air Mawar Gg. Jagung RT.02/RW.01, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar		15 titik lampu	Terakomodir di tahun 2022



No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
17		Pemasangan Cermin Cembung Jl Air Mawar depan mesjid baitul hasanah RT.01/RW.01, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar		1 buah	Terakomodir di tahun 2022
18		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jalan Air Mangkok RT 01 RW 01, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Bacang		13 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
19		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jalan Aleksander RT 02 RW 01, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Bacang		19 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
20		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jalan Kalamaya I RT 03 RW 01, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Bacang		4 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
21		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jalan Nilam RT 06 RW 02, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Bacang		11 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023



No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
22		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jalan Aleksander RT 04 RW 02, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Bacang		26 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
23		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jalan Nilam/ GBI RT 05 RW 02, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Bacang		3 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
24		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jalan Nilam Baru RT 07 RW 03, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Bacang		18 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
25		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Komp Bukit Intan Asri RT 08 RW 03, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Bacang		15 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
26		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jl Nilam RT 09 RW 03, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Bacang		21 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
27		Pemasangan pembatas/ pagar pengaman di Gg. Nilam rt 07 rw 03, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Bacang		150 meter	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023



No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
28		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Rt. 03 Rw.01, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semabung Lama		2 titik	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
29		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jalan Abdullah dan Jalan PGRI Rt.04, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semabung Lama		5 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
30		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Tikungan Patah SMK PGRI Rt. 05 dan Pemakaman Sentosa, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semabung Lama		3 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
31		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Gang Mustika III, Rt. 10 Rw. 02, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semabung Lama		2 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
32		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jalan Batu Kadera Rt. 011 Rw. 03, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semabung Lama		3 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023



No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
33		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jalan Kadera I dan Jalan Zamrud Rt. 12 Rw. 03, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semabung Lama		7 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
34		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Gang Zamrud II Rt. 13 Rw. 03, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semabung Lama		7 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
35		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Gang zamrud Rt. 14 rw. 03, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semabung Lama		8 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
36		Pemasangan Cermin Cembung di Jalan Mustika IV Rt. 007 Rw. 02, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semabung Lama		2 buah	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
37		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di jalan kampung samak dan jalan eks tambang 25 RT.003 RW.001, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Sinar Bulan		22 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023



No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
38		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di komp.sampur Gg.safir biru XV dan XVI RT.002 RW.001, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Sinar Bulan		5 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
39		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di jalan sinar bulan RT.005 RW.002, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Sinar Bulan		10 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
40		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Perumahan Cluster Mawar RT.007 RW.003, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Sinar Bulan		10 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
41		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jalan Tanjung Bunga Dalam RT.008 RW.002, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Sinar Bulan		50 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
42		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Gang Nasir RT.009 RW.003, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Sinar Bulan		15 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023



No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
43		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jalan Komplek Pepabri Rt.03 Rw.01, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Temberan			Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
44		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jalan Gg. Sapu sapu Rt.03 Rw.01, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Temberan			Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
45		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jalan Gg. Bhakti Rt.03 Rw. 01, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Temberan			Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
		KECAMATAN GABEK			
46		Pengadaan papan nama jalan dan papan nomor rumah di Seluruh Wilayah Kelurahan Air Selemba, Gabek, Kota Pangkal Pinang			Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
47		Pemasangan Pagar pengaman (GUARDRAILS) di Jl. Pikas 1 RT.005 RW.003, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Air Salemba		1 paket	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023



No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
48		Pemasangan Pagar pengaman (GUARDRAILS) di Jl. Pikas 12 /Jl. Bougenville RT.001 RW.001, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Air Salemba		1 paket	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
49		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jl. Sepat Siam RT. 002, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Selindung Baru		10 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
		KECAMATAN GERUNGGANG			
50		RT.08 RW.03 Jalur Dua ,jl. Kurma, Jl Gerunggang dan jl. Kurma Dalam, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Air Kepala Tujuh		Kabupaten/Kota	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
51		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di wilayah RT/RW.003/001, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Bukitmerapin		9 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
52		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di wilayah RT/RW.008/002, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Bukitmerapin		20 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023



No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
53		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di RT.002/001 Simpang Toko Gandhi, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Bukitsari		1 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
54		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Rt.002/001 Simpang Rumah Kiki Galon, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Bukitsari		1 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
55		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jl. Bukit Tani RT.003/001, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Bukitsari		1 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
56		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jl. Kayu Putih RT.003/001, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Bukitsari		1 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
57		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jl. Nyato dalam RT.006/002, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Bukitsari		4 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023



No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
58		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jl. Sukun RT.007/003, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Bukitsari		5 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
59		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jl. Duku Manis RT.007/003, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Bukitsari		5 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
60		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jl. Menaran Dalam RT.008/003, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Bukitsari		5 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
61		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Belakang Mardhatillah RT.09 RW.03, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Kacang Pedang		1 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
62		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jl. Raya Masjid ISTIQLAL RT.010 RW.02, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Kacang Pedang		8 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023



No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
63		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jl. adhiyaksa RT.01 RW.01, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Kacang Pedang		1 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
64		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Gg. Beo Rt.01 rw.01, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Kacang Pedang		1 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
65		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Gg. Panti Asuhan Aisyah Dan Gg Maleo RT.04 dan RT.03, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Kacang Pedang		2 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
66		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jl. Gandaria RT.09 RW.03, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Kacang Pedang		1 titik lampu	Terakomodir di tahun 2023
67		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Gg. Kutilang RT.01 RW.01, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Kacang Pedang		1 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023



No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
68		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jl. Adiyaksa Gg. Tiung RT.06 RW.02, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Kacang Pedang		2 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021, 2022, 2023
69		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jl. Lingkungan RT.010 RW.03, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Kacang Pedang		7 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021, 2022, 2023
70		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jl. Adiyaksa Depan Masjid Thoriqul Jannah, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Kacang Pedang		1 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021, 2022, 2023
71		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jl. Adiyaksa Gg. Sikun RT.06 RW.02, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Kacang Pedang		2 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021, 2022, 2023
72		Pembangunan Marka Kejut di Jl. Pinus 1 Dpn Kost Pak Jalil RT.08 RW.03, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Kacang Pedang		2 Titik	Terakomodir di tahun 2021
		KECAMATAN GIRIMAYA			



No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
73		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jalan Batu Akik VIII RT 005 RW 002, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar		2 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
74		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jalan Batu Akik III RT 006 RW 001, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar		2 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
75		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jalan Batu Akik I RT 006 RW 002, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar		2 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
76		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jalan Lapangan Golf RT 003 RW 001, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar		12 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
77		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jalan Batu Akik II RT 006 RW 002, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar		2 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023



No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
78		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jalan Batu Rubi VIII RT 001 RW 001, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar		4 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
79		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jalan Batu Rubi VII RT 001 RW 001, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar		2 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
80		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jalan Batu Rubi VI RT 001 RW 001, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar		3 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
81		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jalan Batin Ketapik RT 009 RW 003, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar		3 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
82		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jalan Mutiara VII RT 007 RW 003, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar		2 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023



No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
83		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jalan Tapak Jalak RT 004 RW 002, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar		3 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
84		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jalan Batu Rubi VIII RT 002 RW 001, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar		1 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
85		Pemasangan Cermin Cembung di Jalan Terminal Dalam RT 006 RW 002, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar		1 buah	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
86		Pemasangan Cermin Cembung di Jalan Batu Rubi X RT 002 RW 001, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar		1 buah	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
87		Pemasangan Cermin Cembung di Jalan Demang Singa Yuda RT 008 RW 003, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar		1 buah	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023



No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
88		Pemasangan Cermin Cembung di Jl. Berlian I RT 003/001, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Batu Intan		3 buah	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
89		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jl.Basuki Rachmad Gg.Intan II RT 002/001, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Batu Intan		2 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
90		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Gg.Batu Giok III RT.005/002, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Batu Intan		3 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
91		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Gg.Batu Rubi II dan Tikungan sumur umum RT.007/002, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Batu Intan		3 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
92		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jl.Berlian I dan Gg.Topaz II RT.003/001, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Batu Intan		17 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023



No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
93		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Gg.Batu Giok I s/d Gg.Batu giok II RT 004/002, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Batu Intan		8 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
94		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jl. Kelapa RT 002 RW 001, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Pasar Padi		6 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
95		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jl. R.E Martadinata RT 003 RW 002, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Pasar Padi		4 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
96		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jl. Ratu Tunggal RT 004 RW 002, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Pasar Padi		2 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
97		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jl. Garut RT 005 RW 003, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Pasar Padi		6 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023



No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
98		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jalan Garut RT 006 RW 003, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Pasar Padi		3 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
99		Pemasangan Cermin Cembung di Tikungan RT.02 RW.01 Gang Batu Rubi V dan Gang Batu Rubi IX, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Pasar Padi		1 buah	Terakomodir di tahun 2021
100		Pemasangan Cermin Cembung di Jl. Kelapa RT 002 RW 001, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Pasar Padi		1 buah	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
101		Pemasangan Cermin Cembung di Jl. Garut RT 006 RW 003, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Pasar Padi		1 buah	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
102		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jl. Perbakin Rt 001 Rw 001, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya		2 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023



No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
103		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jl. Perbakin dalam Rt.007 Rw.002 (belakang pos kamling),, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya		5 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
104		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jl. Berlian VI Rt.007 Rw.002 (Gg. Pesantren), Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya		3 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
105		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di jl. Perbakin Rt.009 Rw.003, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya		9 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
106		Pembangunan Tiang Listrik di Jl. Berlian VI Rt. 007 Rw. 002 (Gg. Pesantren), Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya		5 unit	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
107		Pembangunan Tiang Listrik di Jl. Perbakin Dalam Rt. 007 Rw. 002, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya		2 unit	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023



No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
108		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jl. Kakap II RT.002 RW.001, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Ampui		24 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
109		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di jln tiram raya,tiram 2,tiram 3, tiram 4 = 15 titik jl.bedukang 1,bedukang 2,bedukang 3,bedukang 4 = 5 titik jl.senangin 1, senangin 2,senangin 3 = 5 titik, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Pasir Garam		25 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
		KECAMATAN RANGKUI			
110		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di RT. 001, RT. 002, RT. 003, RT. 004, RT. 005, RT. 006, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Asam		RT. 001 = 3 titik, RT. 002 = 17 titik, RT. 003 = 4 titik, RT. 004 = 6 titik, RT. 005 = 11 titik, RT. 006 = 7 titik. Total = 48 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023



No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
111		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di RT. 01, RT. 06, RT. 07, RT. 08 (Jl. Gajah Mada dan Jl. Kopi), Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Gajah Mada		50 titik lampu	Terakomodir di tahun 2023
112		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jl. Masjid Jamik Gg. Kakao RT. 001, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Masjid Jamik		4 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
113		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Jl. Mandala RT. 007/003, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Melintang		2 titik lampu	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
		KECAMATAN TAMAN SARI			
114		Pemasangan Cermin Cembung di Jln. Bandalaleleo RT.02/03, Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal		1 buah	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
115		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Gg. Mushollah Nurul Ikhsan RT. 01/02, Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal			Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023



No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
116		Pemasangan Cermin Cembung di Jl. Cempaka Rt. 004 Rw. 001, Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Gedung Nasional		1 buah	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
117		Pemasangan Cermin Cembung di Jl. Teratai Rt. 008 Rw. 002, Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Gedung Nasional		1 buah	Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
118		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di JL. Adhyaksa Samping dinsos RT 003/001, Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Kejaksaan			Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023
119		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di jalan kolong retensi kacang pedang RT 01 RW 02, Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Kejaksaan			Terakomodir di tahun 2021
120		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di JL. RE. Martadinata, Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Opas Indah			Belum diakomodir di tahun 2021,2022, 2023



5.4 Pagu Indikatif

Pagu Indikatif merupakan batasan anggaran yang diberikan kepada masing-masing Perangkat Daerah untuk merencanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pagu Indikatif disajikan pada Tabel 5.3

Tabel 5.3

Pagu Indikatif Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	Pagu Belanja Tahun 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	135,738,473,000
2	Dinas Kesehatan	137,906,631,000
3	Dinas PUPR	150,230,434,000
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	17,842,921,000
5	Satpol PP	17,261,602,459
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8,169,431,000
7	Dinas Sosial	6,617,575,000
8	Dinas PMPTSP dan Naker	9,763,295,000
9	Dinas PPPA dan KB	8,495,586,000
10	Dinas Pangan dan Pertanian	9,322,971,000
11	Dinas Lingkungan Hidup	37,192,328,000
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4,446,389,000
13	Dinas Perhubungan	20,032,833,000
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	13,350,606,000
15	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan	12,500,000,000
16	Dinas Pemuda dan Olahraga	12,500,000,000
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5,434,821,000
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	6,000,000,000
19	Dinas Pariwisata	11,413,247,000
20	Sekretariat Daerah	52,027,581,000
21	Sekretariat DPRD	58,647,736,000
22	Bappelitbangda	10,213,856,000
23	Badan Keuangan Daerah	52,832,637,138
24	BKPSDMD	8,649,934,875
25	Inspektorat Daerah	9,288,577,000
26	Kecamatan Bukit Intan	11,303,399,081
27	Kecamatan Rangkui	12,755,289,884
28	Kecamatan Gerunggang	10,606,507,350
29	Kecamatan Taman Sari	8,653,277,080



30	Kecamatan Pangkalbalam	8,951,342,052
31	Kecamatan Girimaya	7,895,447,924
32	Kecamatan Gabek	10,592,152,827
33	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	5,391,222,000
	JUMLAH	892,028,103,670

TABEL V.4

**KESELARASAN PRIORITAS NASIONAL DENGAN PRIORITAS DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
RKPD KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022**

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.1.1 Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	1.1.1.1 Peningkatan nilai tambah sektor unggulan melalui penguatan agroindustri dan UMKM	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan
				Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
				Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
				Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan berbahaya	
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan
					Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
				Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan
					Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	
					Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
				Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggara-an Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Dagang Nasional	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan
					Pameran Dagang Lokal	
			Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan
					Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
					Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan
			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan
			Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	
			Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan
PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.1.2 Meningkatnya penggalan, pemanfaatan dan pengembangan potensi sektor pariwisata daerah	1.1.2.1 Pengembangan potensi wisata daerah	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Dinas Pariwisata
				Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Program Pemasaran Pariwisata	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pemberian Insentif	Dinas Pariwisata
					Fasilitasi Kekayaan Intelektual	
					Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Dinas Pariwisata
					Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
				Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	
PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.1.3 Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	1.1.3.1 Perwujudan kemudahan investasi untuk pengembangan sektor pariwisata, industri dan perdagangan	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggara-raan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas PMTPS dan Tenaga Kerja
					Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas PMTPSP dan Tenaga Kerja
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas PMTPSP dan Tenaga Kerja

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja
PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.2.2 Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat	1.2.2.1 Peningkatan kualitas angkatan kerja lokal	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	KEGIATAN Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja
				KEGIATAN Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Program Penempatan Tenaga Kerja	KEGIATAN Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja
				KEGIATAN Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	
				KEGIATAN Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Program Hubungan Industrial	KEGIATAN Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	SUB KEGIATAN Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	
				KEGIATAN Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					SUB KEGIATAN Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	
					SUB KEGIATAN Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	
			Program Perencanaan Tenaga Kerja	KEGIATAN Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.2.1 Menurunnya tingkat kemiskinan	1.2.1.1 Percepatan pengentasan kemiskinan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	
					Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
				Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
					Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
				Pengelolaan dan Penyelenggara-raan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
				Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
				Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	
				Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
					Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
				Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya an Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat		

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.2.1 Menurunnya tingkat kemiskinan	1.2.1.1 Percepatan pengentasan kemiskinan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman	
				Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
				Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2 B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2 B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP 2B Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
				Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
				Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
				Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
				Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	
					Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
			Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
					Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
					Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
				Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	3.1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	3.1.1.1 Pemantapan Reformasi Birokrasi	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Pelaksanaan Konsultasi Publik	BAPPEDA DAN LITBANG
					Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	
					Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
					Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	
					Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA DAN LITBANG
					Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	
					Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
					Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA DAN LITBANG
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
			Program Penelitian Dan Pengemba-ngan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	BAPPEDA DAN LITBANG
					Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
					Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
					Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
					Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	
					Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	
PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	3.1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	3.1.1.1 Pemantapan Reformasi Birokrasi	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	BADAN KEUANGAN DAERAH
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
					Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
					Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
					Penagihan Pajak Daerah	
					Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BADAN KEUANGAN DAERAH
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	
					Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
					Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
					Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	
					Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
					Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	
					Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
					Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	
					Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
				Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Inventarisasi dan analisis Data Bidang keuangan Daerah	
					Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	
					Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BADAN KEUANGAN DAERAH
					Pengamanan Barang Milik Daerah	
					Penilaian Barang Milik Daerah	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
					Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
					Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
PN 3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	1.2.1 Menurunnya tingkat kemiskinan	1.2.1.1 Percepatan pengentasan kemiskinan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	1. Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	DINAS SOSIAL
					2. Rujukan Anak-Anak Terlantar	
					3. Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
				2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					3. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
					4. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
			Program Pemberdayaan Sosial	2. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	DINAS SOSIAL
					1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
					5. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Program Rehabilitasi Sosial	1.Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Penyediaan Permakanan	DINAS SOSIAL
					2. Penyediaan Sandang	
					3. Penyediaan Alat Bantu	
					4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
					5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
					6. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					7. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	
					8. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
					11. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
					12. Pemberian Layanan Rujukan	
				2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
					2. Pemberian Layanan Kedaruratan	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					12. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	DINAS SOSIAL
					14. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	
			Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	DINAS SOSIAL
			Program Penanganan Bencana	1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1. Penyediaan Makanan	DINAS SOSIAL
					2. Penyediaan Sandang	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					3. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
					4. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
					5. Pelayanan Dukungan Psikososial	
PN 3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	3.1.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	3.1.2.1 Peningkatan pelayanan publik	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				Penyelenggara-raan Pendaftaran Penduduk	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				Penyelenggara-raan Pencatatan Sipil	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	
					Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	
					Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
					Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PN 3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	4.1.1 Meningkatnya kualitas pendidikan	4.1.1.1 Perwujudan kualitas pendidikan berbasis karakter	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DINAS PENDIDIKAN
					Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	
					Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	
					Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	
					Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah	
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
					Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
					Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	
					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	
					Pengelolaan Dana BOP PAUD	
				Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	
					Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	DINAS PENDIDIKAN
					Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	DINAS PENDIDIKAN

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	
PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4.1.1 Meningkatnya kualitas pendidikan	4.1.1.1 Perwujudan kualitas pendidikan berbasis karakter	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	DINAS PENDIDIKAN
			Program Pembinaan Sejarah	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	DINAS PENDIDIKAN
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	DINAS PENDIDIKAN
					Penetapan Cagar Budaya	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Perlindungan Cagar Budaya	
					Pengembangan Cagar Budaya	
					Pemanfaatan Cagar Budaya	
PN 3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	4.1.2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	4.1.2.1 Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	2 Pembangunan Puskesmas	DINAS KESEHATAN
					9 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	
					10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					12 Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					13 Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	DINAS KESEHATAN
					14 Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	
					15 Pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	
					16 Pengadaan obat Vaksin	
					17 Pengadaan bahan habis pakai	
					18 Pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan	
					19 Pemeliharaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					20 Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
					2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
					3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
					4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
					5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
					6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
					8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
					9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
					10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
					11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
					12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
					13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
					16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
					17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
					18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
					19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	
					20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
					21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	
					23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	
					24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	
					25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
					26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
					27 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	
					28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	
					30 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
					33 Operasional pelayanan Puskesmas	
					33 Operasional pelayanan Puskesmas	
					33 Operasional pelayanan Puskesmas	
					33 Operasional pelayanan Puskesmas	
					33 Operasional pelayanan Puskesmas	
					33 Operasional pelayanan Puskesmas	
					33 Operasional pelayanan Puskesmas	
					33 Operasional pelayanan Puskesmas	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					33 Operasional pelayanan Puskesmas	
					RSUD	
					34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	
					36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	
					37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	
					38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
				Penyelengga-raan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	1 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	DINAS KESEHATAN
					2 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
					3 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	
					Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	DINAS KESEHATAN
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	DINAS KESEHATAN
					Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (umot)	DINAS KESEHATAN

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	DINAS KESEHATAN
				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
				Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
				Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	
PN 3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	4.1.3 Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan	4.1.3.1 Peningkatan kesejahteraan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak	Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DPPPA DAN KB

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA DAN KB
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA DAN KB
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA DAN KB
			Program Pengendalian Penduduk	Pemaduan dan Singkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kota Dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kota Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	DPPPA DAN KB

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI, dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	
					Pelaksanaan Rapat Pengendalian program KKBPK	
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kota	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	
					Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	
					Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	
			Program Pembinaan KB	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruangan	DPPPA DAN KB
					Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	
					Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
					Penyediaan sarana pendukung Operasional PKB/PLKB	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana / Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	
					Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
				Pengendalian dan pendistribusi kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	DPPPA DAN KB
					Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPPA DAN KB

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	
				Pelaksanaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PIK-R, dan pemberdayaan Ekonomi)	
					Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyrakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PIK-R, dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPPA DAN KB

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	
			Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	DPPPA DAN KB
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	
					Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	DPPPA DAN KB
					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA DAN KB
PN 3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	4.1.4 Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	4.1.4.1 Peningkatan kualitas organisasi kepemudaan dan olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	
					Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	
					Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	
					Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
				Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	2.1.2 Meningkatnya kondisi keamanan daerah	2.1.2.1 Optimalisasi perlindungan keamanan dan kenyamanan masyarakat	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	KESBANGPOL

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	KESBANGPOL

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Peghayatan Kepercayaan di Daerah	KESBANGPOL

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	KESBANGPOL

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	KESBANGPOL

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3.1.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	3.1.2.1 Peningkatan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	KECAMATAN BUKIT INTAN
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN BUKIT INTAN
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Pasir Putih	
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Sinar Bulan	
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Temberan	
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Semabung Lama	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Air Mawar	
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Bacang	
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Air Itam	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	KECAMATAN BUKIT INTAN
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pair Putih	
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sinar Bulan	
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Temberan	
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Semabung Lama	
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Mawar	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bacang	
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Itam	
					Evaluasi Kelurahan	
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasir Putih	
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sinar Bulan	
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Temberan	
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Semabung Lama	
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Air Mawar	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bacang	
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Air Itam	
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan yang terlaksana	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN BUKIT INTAN
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	KECAMATAN BUKIT INTAN

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3.1.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	3.1.2.1 Peningkatan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	KECAMATAN RANGKUI
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Pintu Air	
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Bintang	
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Gajah Mada	
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Masjid Jamik	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Asam Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Melintang	
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Parit Lalang Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Keramat	KECAMATAN RANGKUI

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KECAMATAN RANGKUI
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Evaluasi Kelurahan	
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pintu Air	
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bintang	
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gajah Mada	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Masjid Jamik	
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Asam	
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Melintang	
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Parit Lalang	
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keramat	
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pintu Air	
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bintang	
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gajah Mada	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Masjid Jamik	
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Asam	
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Melintang	
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Parit Lalang	
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Keramat	
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	KECAMATAN RANGKUI
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	KECAMATAN RANGKUI
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3.1.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	3.1.2.1 Peningkatan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	KECAMATAN GERUNGANG
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Taman Bunga	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Bukit Merapin	
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Air Kepala Tujuh	
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Bukit Sari	
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Tua Tunu Indah	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Kacang Pedang	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	KECAMATAN GERUNGANG
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Evaluasi Kelurahan	
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Taman Bunga	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Merapin	
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Kepala Tujuh	
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Sari	
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tua Tunu Indah	
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kacang Pedang	
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Taman Bunga	
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bukit Merapin	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Air Kepala Tujuh	
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bukit Sari	
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tua Tunu Indah	
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kacang Pedang	
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN GERUNGANG

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	KECAMATAN GERUNGANG
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	
PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3.1.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	3.1.2.1 Peningkatan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	KECAMATAN TAMANSARI

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Opas Indah	
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Gedung Nasional	
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Batin Tikal	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Rawa Bangun	
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Kejaksaan	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat/Kecamatan Taman Sari	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	KECAMATAN TAMANSARI

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Opas Indah	
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gedung Nasional	
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Batin Tikal	
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rawa Bangun	
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kejaksaan	
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Opas Indah	
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gedung Nasional	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Batin Tikal	
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rawa Bangun	
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kejaksaan	
			Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	KECAMATAN TAMANSARI
PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3.1.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	3.1.2.1 Peningkatan pelayanan publik	Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	KECAMATAN PANGKALBALAM

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Pasir Garam	
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Lontong Pancur	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Ketapang	
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Ampui	
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Rejosari	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Evaluasi Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasir Garam Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lontong Pancur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ketapang Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ampui Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rejosari	KECAMATAN PANGKALBALAM

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasir Garam	
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lontong Pancur	
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ketapang	
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ketapang	
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rejosari	
			Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KECAMATAN PANGKALBALAM
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	KECAMATAN PANGKALBALAM
PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3.1.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	3.1.2.1 Peningkatan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	KECAMATAN GIRIMAYA
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Batu Intan	
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Bukit Besar	
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Semabung Baru	
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Sriwijaya	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Pasir Padi	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	KECAMATAN GIRIMAYA
					Evaluasi Kelurahan	
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Batu Intan	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Besar	
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Semabung Baru	
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sriwijaya	
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasir Padi	
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Batu Intan	
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bukit Besar	
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Semabung Baru	
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sriwijaya	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasir Padi		
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	KECAMATAN GIRIMAYA
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	KECAMATAN GIRIMAYA

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3.1.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	3.1.2.1 Peningkatan pelayanan publik	Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	KECAMATAN GABEK
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Gabek Satu	
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Gabek Dua	
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Selindung Baru	
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Air Salemba	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Selindung	
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Jerambah Gantung	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	KECAMATAN GABEK

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Evaluasi Kelurahan	
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gabek Satu	
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gabek Dua	
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Selindung Baru	
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Salemba	
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Selindung	
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jerambah Gantung	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gabek Satu	
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gabek Dua	
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Selindung Baru	
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Air Salemba	
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Selindung	
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jerambah Gantung	
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	KECAMATAN GABEK
			Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	KECAMATAN GABEK
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4.1.1 Meningkatnya kualitas pendidikan	4.1.1.1 Perwujudan kualitas pendidikan berbasis karakter	Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	
					Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	
					Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	
					Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Program Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
					Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	
				Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	
				Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	
PN 5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	3.1.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	3.1.2.1 Peningkatan pelayanan publik	Program (Pengelolaan) Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	DINAS KOMINFO

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	
					Pelayanan Informasi Publik	
					Layanan Hubungan Media	
			Program (Pengelolaan) Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	DINAS KOMINFO
					Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	
				Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	
					Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	
					Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	
					Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi	
					Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	
			Program Penyelenggaraa n Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkroniasi Pengumpulan, Pengeloaan, Analisis dan Desiminasi Data Statistik Sektoral	DINAS KOMINFO
					Membangun Metadata Statistik Sektoral	
					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
			Program Penyelenggaraa n Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelengga-raan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DINAS KOMINFO

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
				Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
PN 5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	3.1.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	3.1.2.1 Peningkatan pelayanan publik	Program Penyelenggaraa n Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	DINAS PERHUBUNGAN
					Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	
				Penerbitan Izin Penyelenggara-raan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	
					Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	
				Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	DINAS PERHUBUNGAN
					Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
				Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	
PN 5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	5.1.1 Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman layak huni	5.1.1.1 Peningkatan pengelolaan tata kota wilayah	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggara-raan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
					Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	
					Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Program Kawasan Permukiman	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
					Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	
					Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	
					Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	
					Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	
					Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	
					Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	
					Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	
					Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
					Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	
					Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
					Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
					Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	
			Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
					Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	
					Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	
					Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	
					Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	
				Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	
					Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	
					Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	
					Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
					Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
					Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
					Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	
				Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
				Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	
					Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	
					Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
				Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	
PN 5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	5.1.2 Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum	5.1.2.1 Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	DINAS PUPR
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	
					Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Pembangunan Tanggul Sungai	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	
					Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	
					Pembangunan Polder/Kolam Retensi	
					Peningkatan Tanggul Sungai	
					Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	
					Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	DINAS PUPR
					Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
					Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	
					Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	
			Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	DINAS PUPR
					Rekonstruksi Jalan	
					Pemeliharaan Berkala Jalan	
					Pemeliharaan Rutin Jalan	
					Pembangunan Jembatan	
					Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Daerah Kabupaten/Kota	DINAS PUPR
					Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	
			Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	DINAS PUPR
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	DINAS PUPR

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	DINAS PUPR
					Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	
				Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kota	
					Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	
					Sistem Informasi Penataan Ruang	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	
					Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	
			Program Pengelolaan Izin Lokasi	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	DINAS PUPR
			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	DINAS PUPR
					Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	DINAS PUPR
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	DINAS PUPR
					Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah	
					Koordinasi Penyelenggaraan redistribusi Tanah Obyek Reforma agraria dalam 1 (satu) kabupaten/kota	DINAS PUPR
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/kota	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Program Pengelolaan Tanah Kosong	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DINAS PUPR
				Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	
					Pemanfaatan Tanah Kosong	
			Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	DINAS PUPR
					Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	
			Program Penatagunaan Tanah	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	DINAS PUPR
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
PN6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	2.1.1 Meningkatnya keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana	2.1.1.1 Penanggulangan bencana alam	Program Penanggula-ngan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana kabupaten/Kota	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
					Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
					Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	
					Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
					Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
					Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
					Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
					Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	5.1.3 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	5.1.3.1 Rehabilitasi kerusakan lingkungan hidup	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Fasilitas Pemenuhan Komitmen izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DLH
				Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengelolaan, dan/atau Penimbunan	
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, udara dan laut	DLH
					Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penyusunan Kebijakan dan strategi daerah Pengelolaan Sampah Kota	DLH
					Penanganan sampah dengan melakukan Pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kota	
					Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam pengelolaan persampahan	
					Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Penyusunan Kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan	
					Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kota	
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat			DLH
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	DLH
					Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	
					Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
					Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	
					Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau Izin PPLH	DLH
					Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidiup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH) Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	DLH
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabputaten/kota	Penyusunan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	DLH
					Pengelolaan Kebun Raya	
					Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	
					Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	2.1.2 Meningkatnya kondisi keamanan daerah	2.1.2.1 Optimalisasi perlindungan keamanan dan kenyamanan masyarakat	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	SATPOL PP
					Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
					Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	
					Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	
					Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
					Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kententraman dan Ketertiban Umum	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Pencegahan Peraturan Daerah dan Perkada	SATPOL PP
					Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
PN7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	3.1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	3.1.1.1 Pemantapan Reformasi Birokrasi	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH
					Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	
					Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	
					Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	
				Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
					Fasilitasi Bantuan Hukum	
					Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	
				Fasilitasi Kerjasama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	
					Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	
					Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	
			Program Administrasi Umum	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	SEKRETARIAT DAERAH

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Fasilitasi Kerumahtang- gaan Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	
					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	
					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
				Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
					Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
					Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
					Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	
				Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Keprotokolan	SEKRETARIAT DAERAH
					Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	
					Pendokumentasian Tugas Pimpinan	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	SEKRETARIAT DAERAH
					Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	
PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	3.1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	3.1.1.1 Pemantapan Reformasi Birokrasi	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	INSPEKTORAT
					Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
					Reviu Laporan Kinerja	
					Reviu Laporan Keuangan	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
				Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
					Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	INSPEKTORAT
					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	
				Asistensi dan Pendampingan	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
					Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
					Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	
PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	3.1.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	3.1.2.1 Peningkatan pelayanan publik	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	SEKRETARIAT DPRD
					Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	
					Penyelenggaraan kajian Perundang-undangan	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Fasilitasi Penyusunan penjelasan/ keterangan naskah akademik	
				Peningkatan Kapasitas DPRD	Bimbingan Teknis DPRD	
					Publikasi dan Dokumentasi Dewan	
					Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	
					Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	
				Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	
					Pelaksanaan reses	
				Pembahasan Kerjasama Daerah	penyusunan bahan komunikasi dan publikasi	
				Fasilitasi Tugas DPRD	koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	
					penyusunan laporan kinerja DPRD	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD abupaten/Kota	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	SEKRETARIAT DPRD
					Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	
					Pelaksanaan Medical Check up	
				Layanan Administrasi DPRD	Fasilitasi Fraksi DPRD	
					Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	
PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	3.1.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	3.1.2.1 Peningkatan pelayanan publik	Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	BKPSDMD
					Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	
					Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Fasilitasi lembaga profesi ASN	
					Perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN	
					Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Pengelolaan Data Kepegawaian	
				Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	
					Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	
					Pengelolaan promosi ASN	
				Pengembangan Kompetensi ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	
					Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	
					Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	
					Fasilitasi Pengembangan karir dalam jabatan fungsional	

RPJMN 2020-2024	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023			RKPD 2022		OPD PENGAMPU
PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Program Pengembangan SDM	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDMD
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	03				KEPEGAWAIAN								7,474,934,875			7,641,683,000		
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								6,037,434,875			6,106,683,000		
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								13,750,000			14,000,000		
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen RENSTRA/RENJA BKPSDMD yang tersusun	Presentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 %	1 dokumen	100 %	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	4,000,000
5	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen DPA BKPSDMD yang tersusun	Presentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 %	1 dokumen	100 %	2,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,750,000
5	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen perubahan DPA BKPSDMD yang tersusun	Presentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 %	1 dokumen	100 %	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,500,000
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja (LKPJ, LKPJ AMJ, LPPD) yang tersusun	Presentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 %	2 dokumen	100 %	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,750,000
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen laporan kinerja perangkat daerah yang tersusun (dokumen SPIP, LAKIP, dan RB)	Presentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 %	3 dokumen	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,000,000
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5,107,184,875			5,138,683,000		
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Presentase administrasi keuangan perangkat daerah		100 %	35 orang	100 %	5,094,184,875	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	5,125,683,000
5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah dokumen penataan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Presentase administrasi keuangan perangkat daerah		100 %	1 dokumen	100 %	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	2,500,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 03 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah laporan rekonsiliasi pelaksanaan akutansi SKPD	Presentase administrasi keuangan perangkat daerah		100 %	1 laporan	100 %	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	2,500,000
5 03 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Presentase administrasi keuangan perangkat daerah		100 %	1 laporan	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	3,000,000
5 03 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	Presentase administrasi keuangan perangkat daerah		100 %	1 dokumen	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	2,000,000
5 03 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah laporan keuangan bulanan/semester SKPD	Presentase administrasi keuangan perangkat daerah		100 %	1 laporan	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	3,000,000
5 03 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								4,000,000				4,000,000	
5 03 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Presentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		78 %	1 dokumen	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	78 %	2,000,000
5 03 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun	Presentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		78 %	1 laporan	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	78 %	2,000,000
5 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								100,000,000				115,000,000	
5 03 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai	Prsentase administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 %	1 unit	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	25,000,000
5 03 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan yang diadakan	Prsentase administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 %	47 stel	100 %	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	35,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 03 01 2.05 07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah pemulangan ASN yang meninggal dunia	Prsentase administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 %	3 orang	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	30,000,000
5 03 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	jumlah pegawai yang mengikuti diklas sesuai dengan tugas dan fungsi	Prsentase administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 %	5 orang	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	25,000,000
5 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								207,500,000				215,000,000	
5 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Presentase administrasi umum perangkat daerah		100 %	11 Jenis	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	15,000,000
5 03 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Presentase administrasi umum perangkat daerah		100 %	12 set	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	15,000,000
5 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis bahan logistik yang disediakan	Presentase administrasi umum perangkat daerah		100 %	4 Jenis	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	25,000,000
5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Presentase administrasi umum perangkat daerah		100 %	14 set	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	15,000,000
5 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah bahan bacaan/ buku Peraturan Perundang - undangan yang disediakan	Presentase administrasi umum perangkat daerah		100 %	3 koran	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	5,000,000
5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Presentase administrasi umum perangkat daerah		100 %	35 kali	100 %	125,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	125,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 03 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah arsip dinamis yang ditata	Presentase administrasi umum perangkat daerah		100 %	50 berkas	100 %	12,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	15,000,000
5 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								30,000,000	50,000,000				
5 03 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Presentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	1 unit	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
5 03 01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah aset tetap lainnya yang disediakan	Presentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	1 unit	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	50,000,000
5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								395,000,000	395,000,000				
5 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah surat yang disediakan	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	50 surat	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	5,000,000
5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah aparatur internal BKPSDMD yang terlayani	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	46 orang	100 %	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	150,000,000
5 03 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	26 unit	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	30,000,000
5 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah aparatur internal BKPSDMD yang terlayani	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	46 orang	100 %	210,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	210,000,000
5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								180,000,000	175,000,000				
5 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Presentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah		100 %	1 unit	100 %	65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	65,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			daerah						Alokasi Umum				
5 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Presentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	4 unit	100 %	110,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	110,000,000
5 03 01 2.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Presentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	1 unit	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH								1,437,500,000				1,535,000,000	
5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN								770,000,000				805,000,000	
5 03 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah ASN yang Lulus Sesuai dengan Formasi yang diajukan	Prsentase pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN		100 %	165 Orang	100 %	75,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100 %	75,000,000
5 03 02 2.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah ASN yang diangkat menjadi ASN	Prsentase pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN		100 %	165 Orang	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100 %	25,000,000
5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah SK pensiun yang diterbitkan	Prsentase pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN		100 %	100 Orang	100 %	70,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100 %	80,000,000
5 03 02 2.01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pelaksanaan Perayaan HUT KORPRI	Prsentase pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN		100 %	3 event	100 %	110,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100 %	125,000,000
5 03 02 2.01 09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah data pelayanan kepegawaian yang dikelola dalam Aplikasi SAPK dan e-smile	Prsentase pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN		100 %	3000 data	100 %	350,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100 %	350,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	jumlah website yang dikelola dan dikembangkan	Prsentase pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN		100 %	1 website	100 %	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100 %	75,000,000
5 03 02 2.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Data Kepegawaian yang dikelola	Prsentase pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN		100 %	250 Orang	100 %	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100 %	75,000,000
5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN								287,500,000				295,000,000	
5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Rasio pegawai fungsional	Jumlah PNS yang mengikuti seleksi mutasi masuk dan seleksi jabatan pimpinan tinggi	Prsentase pelaksanaan mutasi dan promosi ASN		7,5 %	20 Orang	100 %	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio pegawai fungsional	7,5 %	150,000,000
5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Rasio pegawai fungsional	Jumlah SK pangkat ASN yang diterbitkan	Prsentase pelaksanaan mutasi dan promosi ASN		7,5 %	600 Orang	100 %	65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio pegawai fungsional	7,5 %	70,000,000
5 03 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Rasio pegawai fungsional	Jumlah pelaksanaan Pembinaan Karir PNS	Prsentase pelaksanaan mutasi dan promosi ASN		7,5 %	11 Kali	100 %	72,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio pegawai fungsional	7,5 %	75,000,000
5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN								295,000,000				335,000,000	
5 03 02 2.03 01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	Jumlah ASN yang Mengikuti Sosialisasi, Ujian Dinas dan Tambahan Masa Kerja untuk Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Prsentase pengembangan kompetensi ASN		100 %	100 Orang	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	100 %	125,000,000
5 03 02 2.03 03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	Jumlah ASN yang Mengikuti Sosialisasi, Ujian Dinas dan Tambahan Masa Kerja untuk Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Prsentase pengembangan kompetensi ASN		100 %	100 Orang	100 %	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	100 %	50,000,000
5 03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	Jumlah ASN Pemkot Pangkalpinang yang menerima bantuan biaya tugas belajar	Prsentase pengembangan kompetensi ASN		100 %	10 Orang	100 %	130,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	100 %	135,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 03 02 2.03 14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	Jumlah ASN yang diangkat dalam jabatan fungsional	Prsentase pengembangan kompetensi ASN		100 %	30 Orang	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	100 %	25,000,000
5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								85,000,000					100,000,000
5 03 02 2.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	Jumlah ASN yang akan dinilai (IP ASN) dan dievaluasi kinerja aparatur	Presentase penilaian dan evaluasi kinerja aparatur		100 %	3050 Orang	100 %	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	100 %	50,000,000
5 03 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	Jumlah ASN yang menerima penghargaan	Presentase penilaian dan evaluasi kinerja aparatur		100 %	200 Orang	100 %	22,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	100 %	25,000,000
5 03 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	Jumlah penyelesaian kasus ASN yang indisipliner	Presentase penilaian dan evaluasi kinerja aparatur		100 %	5 kasus	100 %	22,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	100 %	25,000,000
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								1,175,000,000					950,000,000
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								1,175,000,000					950,000,000
5 04 02 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis								175,000,000					250,000,000
5 04 02 2.01 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	jumlah ASN yang mengikuti pengembangan, uji kompetensi teknis umum dan diklat teknis dan fungsi	Presentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis		100 %	100 orang	100 %	175,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	100 %	250,000,000
5 04 02 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional								1,000,000,000					700,000,000
5 04 02 2.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan	Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	Jumlah ASN dan CASN yang mengikuti pengembangan kompetensi, pendidikan pelatihan kepemimpinan dan prajabatan	Presentase ASN yangb mengikuti sertifikasi kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional		78 %	150 orang	100 %	1,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	78 %	700,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
	Prajabatan												
TOTAL									8,649,934,875				8,591,683,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								5,391,222,000		5,659,703,192			
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3,324,860,350		3,394,703,192			
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								8,689,150		10,000,000			
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen Renstra/Renja	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	1 Dok	100 %	2,209,750	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,500,000	
8	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	1 Dok	100 %	3,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,500,000	
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	1 Dok	100 %	2,279,400	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,500,000	
8	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen LKPJ, LPPD dan LKPJ akhir masa jabatan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	1 Dok	100 %	1,200,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	1,500,000	
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,763,452,542		2,763,703,192			
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	32 Orang	100 %	2,758,503,192	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,758,503,192	
8	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	1 Lap	100 %	2,474,500	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,600,000	
8	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan /smesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	1 Lap	100 %	2,474,850	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,600,000	
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								5,000,000		10,000,000			
8	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi	Persentase ASN yang memenuhi standart kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	5 Orang	100 %	5,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	10,000,000	
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								85,261,508		113,000,000			
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	7 Jenis	100 %	2,673,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	3,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
8 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	20 Set	100 %	13,385,650	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	15,000,000
8 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	688 Jenis	100 %	15,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	20,000,000
8 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	6 Jenis	100 %	9,202,858	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	15,000,000
8 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang di lakukan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	40 Kali	100 %	45,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	60,000,000
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								290,253,150				318,000,000
8 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	38 Orang	100 %	58,800,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	60,000,000
8 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di perbaiki	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	5 Unit	100 %	5,328,040	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	8,000,000
8 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	7 Orang	100 %	226,125,110	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	250,000,000
8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								172,204,000				180,000,000
8 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di pelihara	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	11 Unit	100 %	172,204,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	180,000,000
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN								300,000,000				350,000,000
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								300,000,000				350,000,000
8 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurn Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan	Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan ideologi dan wawasan kebangsaan	Persentase Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	80 %	1 Lap	80 %	300,000,000		Persentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan	80 %	350,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK								1,415,080,900					1,450,000,000
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik								1,415,080,900					1,450,000,000
8 01 03 2.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Persentase pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik	Jumlah rekomendasi diskusi politik	Laporan pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik	Kota Pangkal Pinang, Gimimaya, Bukitintan	30 %	1 Rekomendasi	7 Lap	20,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik	30 %	30,000,000
8 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Persentase pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik	Jumlah dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban dana hibah parpol	Laporan pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik	Kota Pangkal Pinang, Gimimaya, Bukitintan Kota Pangkal Pinang, Gimimaya, Bukitintan	30 %	2 Dok	7 Lap	1,381,385,900	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik	30 %	1,400,000,000
8 01 03 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik	Jumlah laporan perkembangan politik	Laporan pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik	Kota Pangkal Pinang, Gimimaya, Bukitintan Kota Pangkal Pinang, Gimimaya, Bukitintan	30 %	4 Lap	7 Lap	13,695,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik	30 %	20,000,000
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN								22,000,000					30,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan							22,000,000				30,000,000		
8 01 04 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah dokumen ORMAS yang terdata	Jumlah Ormas yang terdata	Jumlah ORMAS yang terdata	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	60 data	60 Ormas	1 Lap	22,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah dokumen ORMAS yang terdata	60 data	30,000,000	
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA							29,280,750				35,000,000		
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya							29,280,750				35,000,000		
8 01 05 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahan ekonomi sosial dan budaya	Jumlah laporan monitoring	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	12 Lap	12 Lap	29,280,750	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahan ekonomi sosial dan budaya	100 %	35,000,000	
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							300,000,000				400,000,000		
8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial							300,000,000				400,000,000		
8 01 06 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase konflik sosial yang dapat diselesaikan	Jumlah laporan pemberdayaan tim terpadu	Persentase konflik sosial yang dapat diselesaikan	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	80 %	1 Lap	80 %	100,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase konflik sosial yang dapat diselesaikan	80 %	150,000,000	
8 01 06 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	Persentase konflik sosial yang dapat diselesaikan	Jumlah laporan koordinasi kewaspadaan dini di daerah	Persentase konflik sosial yang dapat diselesaikan	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	80 %	12 Lap	80 %	200,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase konflik sosial yang dapat diselesaikan	80 %	250,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													
TOTAL									5,391,222,000					5,659,703,192

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	02				KEUANGAN										52,832,637,138			52,333,310,000
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										33,616,663,338			33,428,036,200
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										51,000,000			53,578,500
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah dokumen Renstra/Renja	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		100 %	2 Dokumen	100 %	15,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	9,333,500
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah dokumen RKA- SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		100 %	1 Dokumen	100 %	1,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	3,000,000
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		100 %	1 Dokumen	100 %	1,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	3,000,000
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah dokumen DPA- SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		100 %	1 Dokumen	100 %	1,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	3,000,000
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		100 %	1 Dokumen	100 %	1,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	3,000,000
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		100 %	1 Dokumen	100 %	3,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	3,245,000
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen SPIP, LAKIP, dan Reformasi Birokrasi	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		100 %	3 Dokumen	100 %	29,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	29,000,000
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										29,373,714,188			29,986,184,550
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan		100 %	71 Orang	100 %	29,169,359,188	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	29,781,829,550
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan		100 %	12 Laporan	100 %	87,835,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	87,835,000
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan		100 %	1 Laporan	100 %	4,700,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	4,700,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan		100 %	1 Laporan	100 %	4,700,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	4,700,000
5 02 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan		100 %	1 Laporan	100 %	107,120,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	107,120,000
5 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								135,080,000			135,080,000		
5 02 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase OPD yang melaksanakan manajemen aset/BMD	Jumlah laporan penatausahaan BMD pada SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Barang Miik Daerah		0	12 Laporan	100 %	135,080,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase OPD yang melaksanakan manajemen aset/BMD	0	135,080,000
5 02 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								50,000,000			50,000,000		
5 02 01 2.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD*)	Persentase terlaksananya pelaporan pengelolaan retribusi daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian		100 %	100 %	100 %	50,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD*)	100 %	50,000,000
5 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								133,000,000			140,000,000		
5 02 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah laporan administrasi kepegawaian	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian		100 %	12 Laporan	100 %	63,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	63,000,000
5 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian		100 %	10 Orang	100 %	70,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	77,000,000
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,107,384,150			867,542,250		
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2. Meningkatnya rasio belanja terhadap anggaran belanja	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Terpenuhinya administrasi Umum		0	10 Unit	100 %	35,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		2. Meningkatnya rasio belanja terhadap anggaran belanja	0	10,505,000
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2. Meningkatnya rasio belanja terhadap anggaran belanja	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Terpenuhinya administrasi Umum		0	3 Unit	100 %	200,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		2. Meningkatnya rasio belanja terhadap anggaran belanja	0	192,280,000
5 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2. Meningkatnya rasio belanja terhadap anggaran belanja	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Terpenuhinya administrasi Umum		0	6 Unit	100 %	7,384,150	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		2. Meningkatnya rasio belanja terhadap anggaran belanja	0	3,300,000
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2. Meningkatnya rasio belanja terhadap anggaran belanja	Jumlah makanan dan minuman yang di sediakan	Terpenuhinya administrasi Umum		0	1340 Porsi	100 %	270,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		2. Meningkatnya rasio belanja terhadap anggaran belanja	0	231,021,750

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2. Meningkatnya rasio belanja terhadap anggaran belanja	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Terpenuhinya administrasi Umum		0	13 Set	100 %	75,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		2. Meningkatnya rasio belanja terhadap anggaran belanja	0	64,245,500
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2. Meningkatnya rasio belanja terhadap anggaran belanja	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Terpenuhinya administrasi Umum		0	45 Kali	100 %	400,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		2. Meningkatnya rasio belanja terhadap anggaran belanja	0	253,000,000
5 02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2. Meningkatnya rasio belanja terhadap anggaran belanja	Jumlah arsip dinamis yang ditata	Terpenuhinya administrasi Umum		0	30 Berkas	100 %	120,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		2. Meningkatnya rasio belanja terhadap anggaran belanja	0	113,190,000
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								675,000,000				441,298,000	
5 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Barang Miik Daerah		100 %	1 Unit	100 %	450,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	334,730,000
5 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Barang Miik Daerah		100 %		100 %	150,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	85,448,000
5 02 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang diadakan	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Barang Miik Daerah		100 %	1 Unit	100 %	75,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	21,120,000
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,371,485,000				1,342,577,250	
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah surat yang disediakan	Terpenuhinya Penyediaan Jasa		100 %	2500 Surat	100 %	56,485,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	56,485,000
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Terpenuhinya Penyediaan Jasa		100 %	156 Orang	100 %	700,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	740,000,000
5 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Terpenuhinya Penyediaan Jasa		100 %	100 Unit	100 %	200,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	124,465,000
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Terpenuhinya Penyediaan Jasa		100 %	156 Orang	100 %	415,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	421,627,250
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								720,000,000				411,775,650	
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Barang Miik Daerah		100 %	7 Unit	100 %	65,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	58,290,650

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Kendaraan Dinas Jabatan													
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Barang Miik Daerah		100 %	2 Unit	100 %	275,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	256,190,000
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Barang Miik Daerah		100 %	1 Unit	100 %	200,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
5 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Barang Miik Daerah		100 %	6 Unit	100 %	180,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	97,295,000
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								15,420,342,350				15,420,342,350	
5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah								2,783,134,055				2,783,134,055	
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	1. Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja keuangan daerah	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan		0	1 Dokumen	100 %	326,483,805	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1. Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja keuangan daerah	0	326,483,805
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1. Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja keuangan daerah	Jumlah dokumen perubahan KUA dan PPAS yang disusun	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan		0	1 Dokumen	100 %	336,700,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1. Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja keuangan daerah	0	336,700,000
5 02 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	1. Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja keuangan daerah	Jumlah RKA-SKPD yang disusun dan diverifikasi	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan		0	33 RKA SKPD	100 %	173,800,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1. Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja keuangan daerah	0	173,800,000
5 02 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	1. Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja keuangan daerah	Jumlah RKA Perubahan SKPD yang disusun dan diverifikasi	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan		0	33 RKAP SKPD	100 %	161,600,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1. Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja keuangan daerah	0	161,600,000
5 02 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	1. Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja keuangan daerah	Jumlah DPA-SKPD yang disusun dan diverifikasi	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan		0	33 DPA SKPD	100 %	139,723,560	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1. Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja keuangan daerah	0	139,723,560
5 02 02 2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	1. Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja keuangan daerah	Jumlah DPA Perubahan SKPD yang disusun dan diverifikasi	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan		0	33 DPAP SKPD	100 %	146,780,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1. Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja keuangan daerah	0	146,780,000
5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	1. Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja keuangan daerah	Jumlah Perda tentang APBD dan Perwako tentang Penjabaran APBD yang disusun	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan		0	2 Peraturan	100 %	394,890,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1. Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja keuangan daerah	0	394,890,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Penjabaran APBD													
5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1. Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja keuangan daerah	Jumlah Perda tentang perubahan APBD dan Perwako tentang Penjabaran APBD yang disusun	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan		0	2 Peraturan	100 %	399,483,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1. Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja keuangan daerah	0	399,483,000
5 02 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1. Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja keuangan daerah	Jumlah Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perda tentang Penyertaan Modal yang disusun	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan		0	1 Peraturan	100 %	378,190,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1. Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja keuangan daerah	0	378,190,000
5 02 02 2.01 10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1. Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja keuangan daerah	Jumlah laporan koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan		0	1 Laporan	100 %	189,833,690	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1. Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja keuangan daerah	0	189,833,690
5 02 02 2.01 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1. Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja keuangan daerah	Jumlah laporan koordinasi perencanaan anggaran belanja	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan		0	1 Laporan	100 %	135,650,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1. Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja keuangan daerah	0	135,650,000
5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah								720,499,945				720,499,945	
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase laporan perbendaharaan yang akuntabel	Jumlah Buku KAS Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan		0	15 Buku	100 %	274,652,400	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan perbendaharaan yang akuntabel	0	274,652,400
5 02 02 2.02 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase laporan perbendaharaan yang akuntabel	Jumlah Dokumen SPD	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan		0	8 Dokumen	100 %	141,710,745	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan perbendaharaan yang akuntabel	0	141,710,745
5 02 02 2.02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase laporan perbendaharaan yang akuntabel	Jumlah Register SP2D dan SP2D yang di terbitkan	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	12 Dokumen	100 %	304,136,800	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan perbendaharaan yang akuntabel	0	304,136,800
5 02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah								923,503,350				923,503,350	
5 02 02 2.03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan, dan Semesteran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan		100 %	3 Laporan	100 %	265,014,200	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	265,014,200
5 02 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat	Jumlah Laporan Konsolidasi	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan		100 %	1 Laporan	100 %	46,557,500	PENDAPAT AN ASLI DAERAH		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat	100 %	46,557,500

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Kuangan Pemerintah Daerah	waktu								(PAD)		waktu		
5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Perda dan Perwako Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan		100 %	2 Dokumen	100 %	549,946,650	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	549,946,650
5 02 02 2.03 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan		100 %	1 Dokumen	100 %	61,985,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	61,985,000
5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah								10,095,000,000				10,095,000,000	
5 02 02 2.04 02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Persentase jumlah aset yang dikelola pemerintah daerah	Jumlah laporan analisis investasi pemerintah daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan		0	1 Laporan	100 %	95,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah aset yang dikelola pemerintah daerah	0	95,000,000
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase jumlah aset yang dikelola pemerintah daerah		Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan		0		100 %	10,000,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah aset yang dikelola pemerintah daerah	0	10,000,000,000
5 02 02 2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah								898,205,000				898,205,000	
5 02 02 2.05 01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah laporan inventarisasi dan analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan		100 %	1 Laporan	100 %	102,830,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	102,830,000
5 02 02 2.05 02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah pengembangan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan		100 %	1 Sistem	100 %	589,750,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	589,750,000
5 02 02 2.05 03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pembinaan Sistem Informasi pemerintah daerah Bidang Keuangan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan		100 %	1 Sistem	100 %	205,625,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	205,625,000
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH								1,700,000,000				1,389,300,000	
5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah								1,700,000,000				1,389,300,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 02 03 2.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase ketersediaan manajemen aset/BMD	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Aset/BMD	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Barang Miik Daerah		100 %	214 Laporan	100 %	100,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketersediaan manajemen aset/BMD	100 %	57,200,000
5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase ketersediaan manajemen aset/BMD	Jumlah Sertipikat yang diterbitkan	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Barang Miik Daerah		100 %	20 Persil	100 %	650,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketersediaan manajemen aset/BMD	100 %	569,800,000
5 02 03 2.01 08	Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase ketersediaan manajemen aset/BMD	Jumlah Laporan Penilaian Aset/BMD daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Barang Miik Daerah		100 %	15 Laporan	100 %	250,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketersediaan manajemen aset/BMD	100 %	211,200,000
5 02 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase ketersediaan manajemen aset/BMD	Jumlah Laporan Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Barang Miik Daerah		100 %	50 Laporan	100 %	350,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketersediaan manajemen aset/BMD	100 %	244,475,000
5 02 03 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase ketersediaan manajemen aset/BMD	Jumlah Buku Neraca Ase/BMD	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Barang Miik Daerah		100 %	6 Buku	100 %	300,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketersediaan manajemen aset/BMD	100 %	275,000,000
5 02 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan manajemen aset/BMD	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Pengelolaan BMD	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Barang Miik Daerah		100 %	214 Orang	100 %	50,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketersediaan manajemen aset/BMD	100 %	31,625,000
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								2,095,631,450					2,095,631,450
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah								2,095,631,450					2,095,631,450
5 02 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Penyampaian, pertumbuhan, pendapatan pajak daerah	Jumlah Perda, Perwako, dan SK Walikota serta SK Kepala Badan yang disusun	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan		4 %	3 Peraturan	4 %	140,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Penyampaian, pertumbuhan, pendapatan pajak daerah	4 %	140,000,000
5 02 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyampaian, pertumbuhan, pendapatan pajak daerah	-	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 %	0 0	4 %	75,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Penyampaian, pertumbuhan, pendapatan pajak daerah	4 %	75,000,000
5 02 04 2.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Penyampaian, pertumbuhan, pendapatan pajak daerah	-	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 %	0 0	4 %	50,000,000			Penyampaian, pertumbuhan, pendapatan pajak daerah	4 %	50,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Penyampaian, pertumbuhan, pendapatan pajak daerah	Jumlah data wajib Pajak baru dan data yang terupdate	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 %	75000 Wajib Pajak	4 %	328,631,450	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Penyampaian, pertumbuhan, pendapatan pajak daerah	4 %	328,631,450
5 02 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Penyampaian, pertumbuhan, pendapatan pajak daerah	Jumlah Sistem Pajak dan Fasilitas Payment Online daerah yang terpelihara	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 %	5 Sistem	4 %	207,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Penyampaian, pertumbuhan, pendapatan pajak daerah	4 %	207,000,000
5 02 04 2.01 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penyampaian, pertumbuhan, pendapatan pajak daerah	Jumlah NJOP PBB dan BPHTB yang terupdate	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 %	66000 Wajib Pajak	4 %	425,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Penyampaian, pertumbuhan, pendapatan pajak daerah	4 %	425,000,000
5 02 04 2.01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Penyampaian, pertumbuhan, pendapatan pajak daerah	-	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 %	0 0	4 %	20,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Penyampaian, pertumbuhan, pendapatan pajak daerah	4 %	20,000,000
5 02 04 2.01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Penyampaian, pertumbuhan, pendapatan pajak daerah	-	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 %	0 0	4 %	20,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Penyampaian, pertumbuhan, pendapatan pajak daerah	4 %	20,000,000
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Penyampaian, pertumbuhan, pendapatan pajak daerah	Jumlah Ketetapan dan Piutang Pajak Daerah yang tertagih	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 %	30000 Wajib Pajak	4 %	280,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Penyampaian, pertumbuhan, pendapatan pajak daerah	4 %	280,000,000
5 02 04 2.01 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Penyampaian, pertumbuhan, pendapatan pajak daerah	-	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 %	0 0	4 %	50,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Penyampaian, pertumbuhan, pendapatan pajak daerah	4 %	50,000,000
5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Penyampaian, pertumbuhan, pendapatan pajak daerah	Jumlah Jenis Pajak di verifikasi dan diawasi	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 %	10 Wajib Pajak	4 %	435,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Penyampaian, pertumbuhan, pendapatan pajak daerah	4 %	435,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
5 02 04 2.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Penyampaian, pertumbuhan, pendapatan pajak daerah	-	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 %	0 0	4 %	65,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Penyampaian, pertumbuhan, pendapatan pajak daerah	4 %	65,000,000
TOTAL									52,832,637,138				52,333,310,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								8,169,431,000			8,851,432,575		
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3,232,856,000			3,401,667,575		
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								12,000,000			21,780,000		
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen Renstra/Renja	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	2 dokumen	100 %	4,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	7,260,000
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen LKPJ, LKPJ AMJ, LPPD yang disusun	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	2 dokumen	100 %	4,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	7,260,000
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen SPIP dan LAKIP	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	2 dokumen	100 %	4,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	7,260,000
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,231,367,165			2,287,728,845		
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	30 orang	100 %	2,223,667,165	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,279,258,845
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	1 laporan	100 %	3,850,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	4,235,000
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	1 laporan	100 %	3,850,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	4,235,000
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								55,000,000			60,500,000		
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya		100 %	7 orang	100 %	55,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	60,500,000
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								203,871,570			246,258,730		
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran		100 %	11 unit	100 %	3,850,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	4,235,000
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran		100 %	20 unit	100 %	50,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	100,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 05 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran		100 %	10 unit	100 %	20,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis bahan logistik yang disediakan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran		100 %	3 jenis	100 %	12,521,795			Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	13,773,975
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran		100 %	31428 unit	100 %	7,499,775	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	8,249,755
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran		100 %	126 kali	100 %	110,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	120,000,000
1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								130,914,515				70,000,000	
1 05 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah meubeler yang diadakan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		100 %	10 unit	100 %	130,914,515	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	70,000,000
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								359,702,750				385,000,000	
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		100 %	26 orang	100 %	99,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	100,000,000
1 05 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		100 %	36 unit	100 %	29,702,750	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	35,000,000
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		100 %	5 orang	100 %	231,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	250,000,000
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								240,000,000				330,400,000	
1 05 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		100 %	1 unit	100 %	50,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	60,000,000
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		100 %	7 unit	100 %	140,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	150,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 unit	100 %	29,600,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	100,000,000
1 05 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 unit	100 %	20,400,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	20,400,000
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								4,936,575,000				5,449,765,000
1 05 03 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota								540,000,000				293,500,000
1 05 03 2.01 01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah dokumen kajian risiko bencana yang disusun dan disahkan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		200.304 orang	1 dokumen	200304 orang	400,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	200.304 orang	0
1 05 03 2.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi yang dilakukan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		200.304 orang	200304 orang	200304 orang	140,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	200.304 orang	293,500,000
1 05 03 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								785,000,000				1,200,500,000
1 05 03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		500 orang	516 orang	500 orang	355,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	500 orang	538,500,000
1 05 03 2.02 03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah peralatan dan perlengkapan dalam pencegahan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		500 orang	125 unit	500 orang	100,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	500 orang	100,000,000
1 05 03 2.02 04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		500 orang	2000 orang	500 orang	10,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	500 orang	10,000,000
1 05 03 2.02 06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah kawasan tanggap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		500 orang	7 kawasan (kelurahan)	500 orang	90,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	500 orang	90,000,000
1 05 03 2.02 07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan	Jumlah bantuan yang disalurkan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan		500 orang	1 paket	500 orang	200,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan	500 orang	200,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		dan kesiapsiagaan terhadap bencana		dan kesiapsiagaan terhadap bencana						(PAD)	dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
1 05 03 2.02 08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah petugas bencana (Tim Reaksi Cepat) yang terlatih, termasuk petugas logistik dan pendataan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		500 orang	10 orang	500 orang	30,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	500 orang	262,000,000
1 05 03 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana									3,545,000,000			3,905,765,000
1 05 03 2.03 03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah korban bencana berhasil dicari ditolong dan dievakuasi	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		500 orang	500 orang	500 orang	3,395,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	500 orang	3,695,765,000
1 05 03 2.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		500 orang	400 orang	500 orang	75,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	500 orang	100,000,000
1 05 03 2.03 06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan respon penanganan bencana non alam/wabah penyakit secara cepat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		500 orang	100 orang	500 orang	75,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	500 orang	110,000,000
1 05 03 2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana									66,575,000			50,000,000
1 05 03 2.04 04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah web yang dikelola	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		200.304 orang	1 website	200304 orang	66,575,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	200.304 orang	50,000,000
TOTAL									8,169,431,000				8,851,432,575

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	01				PERENCANAAN											8,063,856,000		8,919,565,540
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											5,090,220,000		5,191,565,540
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											14,000,000		14,000,000
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen Renstra/Renja	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 persen	2,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,000,000
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 persen	2,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,000,000
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 persen	2,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,000,000
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen DPA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 persen	2,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,000,000
5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 persen	2,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,000,000
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 dokumen	100 persen	2,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,000,000
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen laporan kinerja	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 dokumen	100 persen	2,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,000,000
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											3,304,703,151		3,387,058,230

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
5 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	35	100 persen	3,294,203,151	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,376,558,230
5 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	648 dokumen	100 persen	5,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,000,000
5 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan bulanan pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 laporan	100 persen	1,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	1,000,000
5 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 laporan	100 persen	2,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,000,000
5 01 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 dokumen	100 persen	1,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	1,000,000
5 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 laporan	100 persen	1,500,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	1,500,000
5 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								5,000,000				5,000,000
5 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	1,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	1,000,000
5 01 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah aset SKPD yang diamankan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	530 unit	100 %	1,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	1,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 01 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah barang milik daerah yang dinilai	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	530 unit	100 %	1,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	1,000,000
5 01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah laporan barang milik daerah SKPD	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	1,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	1,000,000
5 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah laporan inventaris Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 laporan	100 %	1,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	1,000,000
5 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								120,000,000					132,000,000
5 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah pakaian yang di adakan	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	82 stel	100 persen	60,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	62,000,000
5 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 orang	100 persen	60,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	70,000,000
5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								215,500,000					200,500,000
5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 unit/set	100 persen	10,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	10,000,000
5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 unit/set	100 persen	5,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	5,000,000
5 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 unit/set	100 persen	3,500,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	3,500,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 unit/set	100 persen	20,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	20,000,000
5 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jumlah fasilitas kunjungan tamu	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 kali	100 persen	12,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	12,000,000
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 kali	100 persen	150,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	150,000,000
5 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah website/aplikasi yang dikelola	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 website	100 persen	15,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
5 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								498,009,539				520,000,000	
5 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah meubeler yang disediakan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 unit/set	100 persen	100,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	200,000,000
5 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 unit/set	100 persen	100,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	320,000,000
5 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang diadakan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 unit/set/kwh	100 persen	98,009,539	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
5 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasaranan pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang diadakan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 unit/set	100 persen	200,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								563,007,310				563,007,310	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah surat yang disediakan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	300 surat	100 persen	60,959,810	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	60,959,810
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	80 orang	100 persen	160,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	160,000,000
5 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 unit/set	100 persen	22,047,500	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	22,047,500
5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	80 orang	100 persen	320,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	320,000,000
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								370,000,000				370,000,000	
5 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 unit	100 persen	170,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	170,000,000
5 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah gedung kantor/bangunanlainnya yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 unit	100 persen	200,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	200,000,000
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH								1,273,636,000				1,413,000,000	
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan								535,000,000				658,000,000	
5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu ; Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan ; Persentase Kesesuaian	Jumlah laporan konsultasi publik	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu ; Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan ; Persentase Kesesuaian	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % ; 65 % ; 100 %	1 laporan	100 %	100,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu ; Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan ; Persentase Kesesuaian	100 % ; 65 % ; 100 %	165,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		Program di APBD dengan Program di RKPD tahunan		Program di APBD dengan Program di RKPD tahunan							Program di APBD dengan Program di RKPD tahunan		
5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu ; Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan ; Persentase Kesesuaian Program di APBD dengan Program di RKPD tahunan	Jumlah laporan Forum SKPD/Lintas SKPD	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu ; Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan ; Persentase Kesesuaian Program di APBD dengan Program di RKPD tahunan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % ; 65 % ; 100 %	1 laporan	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu ; Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan ; Persentase Kesesuaian Program di APBD dengan Program di RKPD tahunan	100 % ; 65 % ; 100 %	132,000,000
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu ; Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan ; Persentase Kesesuaian Program di APBD dengan Program di RKPD tahunan	Jumlah laporan hasil Musrenbang	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu ; Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan ; Persentase Kesesuaian Program di APBD dengan Program di RKPD tahunan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % ; 65 % ; 100 %	1 laporan	100 %	85,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu ; Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan ; Persentase Kesesuaian Program di APBD dengan Program di RKPD tahunan	100 % ; 65 % ; 100 %	85,000,000
5 01 02 2.01 06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu ; Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan ; Persentase Kesesuaian Program di APBD dengan Program di RKPD tahunan	Jumlah laporan hasil Musrenbang Kecamatan	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu ; Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan ; Persentase Kesesuaian Program di APBD dengan Program di RKPD tahunan		100 % ; 65 % ; 100 %	1 laporan	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu ; Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan ; Persentase Kesesuaian Program di APBD dengan Program di RKPD tahunan	100 % ; 65 % ; 100 %	56,000,000
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu ; Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan ; Persentase Kesesuaian	Jumlah Dokumen Perubahan RPJMD, RKPD, dan RKPD Perubahan yang disusun	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu ; Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan ; Persentase Kesesuaian	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % ; 65 % ; 100 %	2 dokumen	100 %	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu ; Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan ; Persentase Kesesuaian	100 % ; 65 % ; 100 %	220,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Program di APBD dengan Program di RKPD tahunan		Program di APBD dengan Program di RKPD tahunan								Program di APBD dengan Program di RKPD tahunan		
5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								343,636,000				360,000,000	
5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tersedianya data informasi komposit	Jumlah laporan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase data/informasi hasil pembangunan yang dapat diakses	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	1 laporan	85 %	125,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tersedianya data informasi komposit	0	150,000,000
5 01 02 2.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Persentase Tersedianya data informasi komposit	Jumlah laporan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Persentase data/informasi hasil pembangunan yang dapat diakses	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	1 laporan	85 %	100,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tersedianya data informasi komposit	0	100,000,000
5 01 02 2.02 03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya data informasi komposit	Jumlah Profil Pembangunan Kota Pangkalpinang	Persentase data/informasi hasil pembangunan yang dapat diakses	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	1 dokumen	85 %	118,636,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tersedianya data informasi komposit	0	110,000,000
5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								395,000,000				395,000,000	
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Persentase program dalam dokumen perencanaan yang mencapai target	Jumlah koodinasi pengendalian perencanaan pelaksanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan	Persentase program dalam dokumen perencanaan yang mencapai target	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	4 kali	80 %	120,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase program dalam dokumen perencanaan yang mencapai target	80 %	120,000,000
5 01 02 2.03 02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Persentase program dalam dokumen perencanaan yang mencapai target	Jumlah laporan hasil pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah	Persentase program dalam dokumen perencanaan yang mencapai target	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 laporan	80 %	85,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase program dalam dokumen perencanaan yang mencapai target	80 %	85,000,000
5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase program dalam dokumen perencanaan yang mencapai target	Jumlah Laporan Dalev yang tersusun	Persentase program dalam dokumen perencanaan yang mencapai target	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 dokumen	80 %	190,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase program dalam dokumen perencanaan yang mencapai target	80 %	190,000,000
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								1,700,000,000				2,315,000,000	
5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								555,000,000				730,000,000	
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan	Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bid. Pemerintahan	Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	90,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam	100 %	160,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
	RKPD)	/bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan		/bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan							/bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan		
5 01 03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan	Jumlah dokumen hasil asistensi OPD bid. Pemerintahan	Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	30,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	50,000,000
5 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi OPD bid. Pemerintahn	Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	30,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	50,000,000
5 01 03 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bid. Pembangunan	Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan,	100 %	1 dokumen	100 %	90,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	100,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	/bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan	Manusia	/bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan	Semua Kelurahan							/bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan		
5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan yang difasilitasi	Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	95,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan	100 %	120,000,000
5 01 03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan	Jumlah dokumen hasil asistensi OPD bid. Pembangunan manusia	Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	35,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan	100 %	50,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022													
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH													
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH													
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
5 01 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi OPD bid. Pembangunan manusia	Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 laporan	100 %	35,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	50,000,000
5 01 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 laporan	100 %	150,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	150,000,000
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)								605,000,000				635,000,000
5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah OPD Urusan Bidang Perekonomian	Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	145,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	150,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan		infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan								infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan		
5 01 03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan	Jumlah dokumen hasil Asistensi OPD Urusan Bidang Perekonomian	Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	45,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan	100 %	50,000,000
5 01 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan	Jumlah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi OPD Urusan Bidang Perekonomian	Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 laporan	100 %	45,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan	100 %	50,000,000
5 01 03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah OPD Urusan Bidang Perekonomian	Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 laporan	100 %	100,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan	100 %	100,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan		sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan								sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan		
5 01 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah OPD Urusan Bidang SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan	100 %	135,000,000
5 01 03 2.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan	Jumlah dokumen hasil Asistensi OPD Urusan Bidang SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan	100 %	25,000,000
5 01 03 2.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan	Jumlah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi OPD Urusan Bidang SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 laporan	100 %	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan	100 %	25,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan		manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan							manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan		
5 01 03 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah OPD Urusan Bidang SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 laporan	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	100,000,000
5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan								540,000,000				950,000,000
5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah OPD Urusan Bid. Infrastruktur	Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	70,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	100,000,000
5 01 03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di	Jumlah dokumen hasil Asistensi OPD Urusan Bidang infrastruktur	Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	50,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan		APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan							APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan		
5 01 03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan	Jumlah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi OPD Urusan Bidang infrastruktur	Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 laporan	100 %	30,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan	100 %	50,000,000
5 01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah OPD Urusan Bidang infrastruktur	Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 laporan	100 %	145,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan	100 %	250,000,000
5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPd, RPJMD dan	Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah OPD Urusan Bidang	Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	70,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam	100 %	150,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
	RKPD)	/bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan	infrastruktur	/bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan							/bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan		
5 01 03 2.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan	Jumlah dokumen hasil Asistensi OPD Urusan Bidang kewilayahan	Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	30,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	50,000,000
5 01 03 2.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan	Jumlah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi OPD Urusan Bidang kewilayahan	Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 laporan	100 %	30,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	50,000,000
5 01 03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan,	100 %	1 laporan	100 %	135,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	250,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	/bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan	Pembangunan Daerah OPD Urusan Bidang kewilayahan	/bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan	Semua Kelurahan							/bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan		
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								2,150,000,000				1,250,000,000	
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								2,150,000,000				1,250,000,000	
5 05 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan								450,000,000				0	
5 05 02 2.02 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	Jumlah dokumen kajian master plan penanggulangan kemiskinan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	200,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	100 %	0
5 05 02 2.02 09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	Jumlah dokumen kajian strategis penurunan angka pengangguran dan meningkatnya kesempatan kerja	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	250,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	100 %	0
5 05 02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan								525,000,000				0	
5 05 02 2.03 01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	Jumlah dokumen kajian strategis pengembangan koperasi dan UMKM bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah Jumlah dokumen pengkajian aktual peluang dan pengembangan ekonomi kreatif	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen 1 dokumen	100 %	350,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	100 %	0
5 05 02 2.03 02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	Jumlah dokumen pengkajian aktual pola distribusi dan konsumsi di Kota Pangkalpinang	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	175,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	100 %	0
5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi								1,175,000,000				1,250,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 05 02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	Jumlah pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 inovasi	100 %	200,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	100 %	250,000,000
5 05 02 2.04 02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	Jumlah Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	33 inovasi	100 %	450,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	100 %	450,000,000
5 05 02 2.04 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	Jumlah disemenasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 inovasi	100 %	425,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	100 %	425,000,000
5 05 02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitabangan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	Jumlah sosialisasi dan desiminasi hasil-hasil kelitabangan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 kali	100 %	50,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	100 %	75,000,000
5 05 02 2.04 05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	Jumlah Hak Kekayaan Intelektual yang difasilitasi	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 HKI	100 %	50,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	100 %	50,000,000
TOTAL									10,213,856,000			10,169,565,540		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								6,000,000,000		6,308,524,000			
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3,257,085,000		3,395,609,000			
3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								10,955,000		10,955,000			
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen Renstra/Renja	Tersedianya Laporan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	100 %	5 Dokumen	12 Bulan	3,555,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,555,000
3	25	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Laporan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	2,200,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,200,000
3	25	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Laporan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	2,200,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,200,000
3	25	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen SPIP, RB dan LAKIP yang disusun	Tersedianya Laporan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	100 %	3 Dokumen	12 Bulan	3,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,000,000
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,235,870,000		2,235,870,000			
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	100 %	19 Orang	12 Bulan	2,231,870,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,231,870,000
3	25	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	100 %	5 Laporan	12 Bulan	2,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,000,000
3	25	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan /semestran SKPD	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	100 %	5 Laporan	12 Bulan	2,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,000,000
3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								62,800,000		25,000,000			
3	25	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Tersedianya ASN yang memenuhi standar kompetensi /kualifikasi	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	100 %	56 stel	19 orang	37,800,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0
3	25	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi	Tersedianya ASN yang memenuhi standar kompetensi /kualifikasi	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	100 %	5 Orang	19 orang	25,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	25,000,000
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								130,500,000		230,500,000			
3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan,	100 %	7 Jenis	12 Bulan	3,500,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	3,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022														
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN														
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Bangunan Kantor		bangunan kantor yang disediakan	Daerah	Air Mawar					(PAD)				
3 25 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	100 %	3 Jenis	12 Bulan	10,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
3 25 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	100 %	2 Jenis	12 Bulan	15,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	15,000,000
3 25 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	100 %	7 Jenis	12 Bulan	12,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	12,000,000
3 25 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	100 %	12 Kali	12 Bulan	90,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	200,000,000
3 25 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								115,000,000			143,824,000		
3 25 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia	Terpenuhinya sarana dan prasarana Aparatur	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	100 %	2 jenis	2 Jenis	25,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	49,324,000
3 25 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang diadakan	Terpenuhinya sarana dan prasarana Aparatur	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	100 %	4 Unit	2 Jenis	90,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	94,500,000
3 25 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								427,500,000			427,500,000		
3 25 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah jenis Layanan Komunikasi sumber daya air dan listrik yang tertangani	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	2 Jenis	12 Bulan	36,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	36,000,000
3 25 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	100 %	13 Unit / Set	12 Bulan	12,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	12,000,000
3 25 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	22 Orang	12 Bulan	379,500,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	379,500,000
3 25 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								274,460,000			321,960,000		
3 25 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	100 %	1 Unit	12 Bulan	61,960,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	61,960,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 25 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	100 %	4 Unit	12 Bulan	141,200,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	141,200,000
3 25 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah gedung kantor /bangunan lainnya yang dipelihara	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	100 %	1 Unit	12 Bulan	71,300,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	118,800,000
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								862,915,000				922,915,000	
3 25 03 2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota								380,000,000				440,000,000	
3 25 03 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Peningkatan produksi perikanan tangkap	Jumlah dokumen yang tervalidasi	tersedianya bantuan untuk kelompok nelayan	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	1.239,161 ton	1 Dokumen	1 kelompok	185,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan produksi perikanan tangkap	1.239,161 ton	245,000,000
3 25 03 2.01 02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Peningkatan produksi perikanan tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang diadakan	tersedianya bantuan untuk kelompok nelayan	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	1.239,161 ton	1 Unit	1 kelompok	190,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan produksi perikanan tangkap	1.239,161 ton	190,000,000
3 25 03 2.01 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Peningkatan produksi perikanan tangkap	Jumlah kelompok yang mendapat bantuan	tersedianya bantuan untuk kelompok nelayan	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	1.239,161 ton	1 kelompok	1 kelompok	5,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan produksi perikanan tangkap	1.239,161 ton	5,000,000
3 25 03 2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota								305,000,000				305,000,000	
3 25 03 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Peningkatan produksi perikanan tangkap	Jumlah nelayan yang mengikuti Bintek	Tersedianya bantuan untuk kelompok nelayan	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	1.239,161 ton	30 Orang	5 kelompok	60,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan produksi perikanan tangkap	1.239,161 ton	60,000,000
3 25 03 2.02 02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Peningkatan produksi perikanan tangkap	Jumlah kelompok yang dibentuk	Tersedianya bantuan untuk kelompok nelayan	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	1.239,161 ton	10 kelompok	5 kelompok	40,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan produksi perikanan tangkap	1.239,161 ton	40,000,000
3 25 03 2.02 03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Peningkatan produksi perikanan tangkap	Jumlah kelompok yang mendapat bantuan	Tersedianya bantuan untuk kelompok nelayan	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	1.239,161 ton	5 kelompok	5 kelompok	205,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan produksi perikanan tangkap	1.239,161 ton	205,000,000
3 25 03 2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)								82,915,000				82,915,000	
3 25 03 2.03 02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Peningkatan produksi perikanan tangkap	Jumlah UPT TPI yang beroperasi	tersedianya UPT TPI yang beroperasi	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	1.239,161 ton	1 Unit	1 unit	82,915,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan produksi perikanan tangkap	1.239,161 ton	82,915,000
3 25 03 2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								35,000,000				35,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 25 03 2.04 02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Peningkatan produksi perikanan tangkap	Jumlah BPKP yang diterbitkan	tersedianya dokumen yang diterbitkan	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	1.239,161 ton	20 Dokumen	20 dokumen	35,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan produksi perikanan tangkap	1.239,161 ton	35,000,000
3 25 03 2.06	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								60,000,000				60,000,000	
3 25 03 2.06 02	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Peningkatan produksi perikanan tangkap	Jumlah Kapal Yang Terdata	tersedianya data kapal perikanan	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	1.239,161 ton	150 Kapal	150 kapal	60,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan produksi perikanan tangkap	1.239,161 ton	60,000,000
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA								1,525,000,000				1,625,000,000	
3 25 04 2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								150,000,000				150,000,000	
3 25 04 2.01 01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Peningkatan produksi perikanan Budidaya	Jumlah juknis yang disusun	Produksi Perikanan Budidaya	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	2.475 ton	2 Dokumen	2.475 Ton	50,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan produksi perikanan Budidaya	2.475 ton	50,000,000
3 25 04 2.01 02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Peningkatan produksi perikanan Budidaya	Jumlah SIUP bidang budidaya yang diberi rekomendasi	Produksi Perikanan Budidaya	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	2.475 ton	3 Dokumen	2.475 Ton	100,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan produksi perikanan Budidaya	2.475 ton	100,000,000
3 25 04 2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil								290,000,000				290,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 25 04 2.02 02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Peningkatan produksi perikanan Budidaya	Jumlah pokdakan yang mendapat fasilitas kelembagaan	Produksi Perikanan Budidaya	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	2.475 ton	15 Pokdakan	2.475 Ton	70,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan produksi perikanan Budidaya	2.475 ton	70,000,000
3 25 04 2.02 03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Peningkatan produksi perikanan Budidaya	Jumlah pokdakan yang mendapat fasilitas pembiayaan	Produksi Perikanan Budidaya	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	2.475 ton	15 Pokdakan	2.475 Ton	70,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan produksi perikanan Budidaya	2.475 ton	70,000,000
3 25 04 2.02 04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Peningkatan produksi perikanan Budidaya	Jumlah pokdakan yang mendapat pendampingan	Produksi Perikanan Budidaya	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	2.475 ton	32 Pokdakan	2.475 Ton	150,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan produksi perikanan Budidaya	2.475 ton	150,000,000
3 25 04 2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								140,000,000				140,000,000	
3 25 04 2.03 01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan produksi perikanan Budidaya	Jumlah dokumen Juknis	Produksi Perikanan Budidaya	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	2.475 ton	3 Dokumen	2.475 Ton	70,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan produksi perikanan Budidaya	2.475 ton	70,000,000
3 25 04 2.03 02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan produksi perikanan Budidaya	Jumlah TDPIK	Produksi Perikanan Budidaya	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	2.475 ton	100 TDPIK	2.475 Ton	70,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan produksi perikanan Budidaya	2.475 ton	70,000,000
3 25 04 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan								945,000,000				1,045,000,000	
3 25 04 2.04 01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan produksi perikanan Budidaya	Jumlah dokumen yang tervalidasi	Produksi Perikanan Budidaya	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	2.475 ton	1 Dokumen	2.475 Ton	160,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan produksi perikanan Budidaya	2.475 ton	210,000,000
3 25 04 2.04 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan produksi perikanan Budidaya	Jumlah bibit ikan yang tersedia	Produksi Perikanan Budidaya	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	2.475 ton	20000 Benih	2.475 Ton	365,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan produksi perikanan Budidaya	2.475 ton	415,000,000
3 25 04 2.04 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan produksi perikanan Budidaya	Jumlah kelompok yang mendapat bantuan	Produksi Perikanan Budidaya	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	2.475 ton	7 kelompok	2.475 Ton	170,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan produksi perikanan Budidaya	2.475 ton	170,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 25 04 2.04 04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan produksi perikanan Budidaya	Pengelolaan kesehatan ikan	Produksi Perikanan Budidaya	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	2.475 ton	30 Pokdakan	2.475 Ton	150,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan produksi perikanan Budidaya	2.475 ton	150,000,000
3 25 04 2.04 06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Peningkatan produksi perikanan Budidaya	Jumlah SED/DED /Masterplan/FS feasibility study	Produksi Perikanan Budidaya	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	2.475 ton	3 Dokumen	2.475 Ton	100,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan produksi perikanan Budidaya	2.475 ton	100,000,000
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN								355,000,000					365,000,000
3 25 06 2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil								30,000,000					30,000,000
3 25 06 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Angka konsumsi ikan dan usaha pengolahan hasil perikanan	Jumlah Dokumen yang tervalidasi	Tersedianya data statistik perikanan	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	54,6 kg/kapita /tahun	1 Dokumen	1 dokumen	30,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Angka konsumsi ikan dan usaha pengolahan hasil perikanan	54,6 kg/kapita /tahun	30,000,000
3 25 06 2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil								95,000,000					95,000,000
3 25 06 2.02 01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Meningkatnya Angka konsumsi ikan dan usaha pengolahan hasil perikanan	Jumlah UPI yang mendapatkan BIMTEK	terbentuknya Unit Pengolahan ikan	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	54,6 kg/kapita /tahun	30 Orang	3 kelompok	95,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Angka konsumsi ikan dan usaha pengolahan hasil perikanan	54,6 kg/kapita /tahun	95,000,000
3 25 06 2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota								230,000,000					240,000,000
3 25 06 2.03 01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Angka konsumsi ikan dan usaha pengolahan hasil perikanan	Angka konsumsi ikan	Terpenuhinya fasilitasi yang diberikan untuk pengolah	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	54,6 kg/kapita /tahun	54.3 Kapita/Tahun	4 paket	180,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Angka konsumsi ikan dan usaha pengolahan hasil perikanan	54,6 kg/kapita /tahun	180,000,000
3 25 06 2.03 02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Angka konsumsi ikan dan usaha pengolahan hasil perikanan	Jumlah fasilitas yang diberikan	Terpenuhinya fasilitasi yang diberikan untuk pengolah	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	54,6 kg/kapita /tahun	4 Paket	4 paket	50,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Angka konsumsi ikan dan usaha pengolahan hasil perikanan	54,6 kg/kapita /tahun	60,000,000
TOTAL									6,000,000,000					6,308,524,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								4,446,389,000		5,518,610,000			
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4,236,889,000		4,784,412,568			
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								21,000,000		43,500,000			
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen renstra/renja yang disusun	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah		100 %	2 dokumen	1 dokumen	8,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	25,500,000
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah		100 %	1 dokumen	1 dokumen	8,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	13,000,000
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah		100 %	1 Dokumen	1 dokumen	5,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,000,000
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,101,548,847		2,155,987,568			
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun		100 %	22 orang	1 dokumen	2,097,548,847	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,149,987,568
2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun		100 %	1 Dokumen	1 dokumen	2,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,000,000
2	12	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun		100 %	1 dokumen	1 dokumen	2,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,000,000
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								187,940,153		100,200,000			
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah pakaian yang diadakan	Tersedianya ASN yang berkualitas		100 %	75 stel	6 orang	70,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	40,000,000
2	12	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah dokumen monitoring,evaluasi dan penilaian kinerja	Tersedianya ASN yang berkualitas		100 %	2 Dokumen	6 orang	87,940,153	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	30,200,000
2	12	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi	Tersedianya ASN yang berkualitas		100 %	6 orang	6 orang	30,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	30,000,000
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								258,000,000		277,000,000			
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparatur		100 %	14 set	20 Orang	16,500,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	16,500,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
	Bangunan Kantor		bangunan kantor yang tersedia							(PAD)			
2 12 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparatur		100 %	36 set	20 Orang	22,500,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	24,000,000
2 12 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparatur		100 %	47 jenis	20 Orang	19,500,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	19,500,000
2 12 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparatur		100 %	12 set	20 Orang	19,500,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	20,500,000
2 12 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparatur		100 %	12 koran	20 Orang	5,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	5,000,000
2 12 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah pegawai yang melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparatur		100 %	20 Orang	20 Orang	50,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	61,500,000
2 12 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah arsip dinamis yang ditata	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparatur		100 %	15 berkas	20 Orang	125,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	130,000,000
2 12 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								160,100,000				520,025,000
2 12 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah meubeler yang disediakan	Tersedianya peralatan dan mesin kantor		100 %	7 unit	7 unit	50,100,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	200,825,000
2 12 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Tersedianya peralatan dan mesin kantor		100 %	7 unit	7 unit	110,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	319,200,000
2 12 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,328,300,000				1,460,100,000
2 12 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah aparatur internal SKPD yang tertangani	Tersedianya pelayanan umum kantor		100 %	12 Bulan	12 Bulan	135,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	165,000,000
2 12 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Tersedianya pelayanan umum kantor		100 %	60 unit	12 Bulan	60,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	102,000,000
2 12 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah waktu pengoperasian SIAK	Tersedianya pelayanan umum kantor		100 %	12 Bulan	12 Bulan	1,133,300,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	1,193,100,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 12 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								180,000,000					200,000,000
2 12 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan perorangan/dinas jabatan yang dipelihara	gedung kantor dan bangunan yang terpelihara		100 %	3 unit	1 unit	130,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	130,000,000
2 12 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	gedung kantor dan bangunan yang terpelihara		100 %	1 unit	1 unit	50,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	70,000,000
2 12 01 2.13	Penataan Organisasi								0					27,600,000
2 12 01 2.13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah jenis monitoring, evaluasi dan pengendalian pelayanan publik dan tata laksana	Terlaksananya pelayanan publik dan tata laksana		100 %	2 jenis	2 jenis	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	27,600,000
2 12 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK								42,000,000					246,500,000
2 12 02 2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk								27,000,000					231,500,000
2 12 02 2.01 02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	Jumlah jenis sarana pelayanan bidang kependudukan	jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk		96 %	2 jenis	2 jenis	27,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	96 %	231,500,000
2 12 02 2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk								15,000,000					15,000,000
2 12 02 2.03 01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase anak usia 0-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam penertiban pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah instansi dan lembaga yang berkoordinasi		70 %	5 lembaga	5 Lembaga	15,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase anak usia 0-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	70 %	15,000,000
2 12 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL								100,000,000					322,697,432
2 12 03 2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil								15,000,000					40,000,000
2 12 03 2.01 01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Peningkatan cakupan akta kelahiran yang diterbitkan	Jumlah jenis sarana pelayanan bidang capil	jumlah jenis peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil		3,5	2 Jenis	2 jenis	15,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan cakupan akta kelahiran yang diterbitkan	3,5	40,000,000
2 12 03 2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil								85,000,000					282,697,432
2 12 03 2.02 01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama	Rasio Perkawinan yang tercatat di catatan sipil per 1000 penduduk	Jumlah masyarakat yang terkoordinir pencatatan nikah, talak,cerai dan rujuk bagi penduduk beragama islam	Dokumen akta perkawinan tang teregistrasi		88	100 orang	450 data	25,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Perkawinan yang tercatat di catatan sipil per 1000 penduduk	88	182,697,432

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam													
2 12 03 2.02 04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Rasio Perkawinan yang tercatat di catatan sipil per 1000 penduduk	Jumlah data dokumen akta kematian yang teregistrasi	Dokumen akta perkawinan tang teregistrasi		88	100 data	450 data	20,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Perkawinan yang tercatat di catatan sipil per 1000 penduduk	88	35,000,000
2 12 03 2.02 06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Rasio Perkawinan yang tercatat di catatan sipil per 1000 penduduk	Jumlah dokumen akta perkawinan yang teregistrasi	Dokumen akta perkawinan tang teregistrasi		88	450 data	450 data	40,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Perkawinan yang tercatat di catatan sipil per 1000 penduduk	88	65,000,000
2 12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN								60,000,000				130,000,000	
2 12 04 2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan								45,000,000				105,000,000	
2 12 04 2.01 01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Persentase keserasian database penduduk	Jumlah jenis laporan informasi kependudukan	Terlaksananya perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan		96 %	1 jenis	10 OPD	30,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keserasian database penduduk	96 %	60,000,000
2 12 04 2.01 02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase keserasian database penduduk	Jumlah OPD yang mengakses data penduduk	Terlaksananya perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan		96 %	10 OPD	10 OPD	15,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keserasian database penduduk	96 %	45,000,000
2 12 04 2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								15,000,000				25,000,000	
2 12 04 2.03 03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	jumlah peserta fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan		100 %	3 Jenis	179 orang	15,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	25,000,000
2 12 05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN								7,500,000				35,000,000	
2 12 05 2.01	Penyusunan Profil Kependudukan								7,500,000				35,000,000	
2 12 05 2.01 02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Persentase keserasian Database Kependudukan	Tersedianya buku profil perkembangan penduduk kota pangkalpinang	Tersedianya buku profil perkembangan penduduk		0	1 dokumen	1 dokumen	7,500,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keserasian Database Kependudukan	0	35,000,000
TOTAL									4,446,389,000				5,518,610,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								96,412,083,112				97,790,295,159	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								82,610,690,912				84,496,902,959	
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								118,087,800				118,087,800	
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen Renstra/Renja	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 dokumen	100 Persen	11,445,500	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	11,445,500
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen RKA- SKPD	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 dokumen	100 Persen	13,419,100	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	13,419,100
1	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 dokumen	100 Persen	13,797,500	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	13,797,500
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen DPA- SKPD	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 dokumen	100 Persen	13,988,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	13,988,000
1	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 dokumen	100 Persen	13,861,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	13,861,000
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 dokumen	100 Persen	27,295,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	27,295,000
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Terlaksananya perencanaan da evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 dokumen	100 Persen	24,281,700	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	24,281,700
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								78,356,415,362				80,306,327,409	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022														
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	777 Orang	100 Persen	77,996,481,862	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	79,946,393,909
1 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah SDM yang melaksanakan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	78 orang	100 Persen	338,745,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	338,745,000
1 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 laporan	100 Persen	12,697,500	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	12,697,500
1 02 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 dokumen	100 Persen	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
1 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 laporan	100 Persen	8,491,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	8,491,000
1 02 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								5,000,000				5,000,000	
1 02 01 2.04 03	Penyuluhan dan Penyebarnya Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD*)	Jumlah blanko retribusi daerah yang tercetak	Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD*)	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	250 buku	100 Persen	5,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD*)	100 %	5,000,000
1 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								248,875,000				185,175,000	
1 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah pakaian yang diadakan	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	150 stell	100 Persen	63,700,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0
1 02 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 kali	100 Persen	185,175,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	185,175,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 orang	100 Persen	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0
1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								489,920,750				489,920,750	
1 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik/peneranga bangunan kantor yang disediakan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 unit	100 Persen	12,999,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	12,999,000
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	35 Unit	100 Persen	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
1 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 unit	100 Persen	47,734,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	47,734,000
1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jumlah makanan dan minuman yang di sediakan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5450 Porsi	100 Persen	140,368,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	140,368,000
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 unit	100 Persen	32,819,750	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	32,819,750
1 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 koran	100 Persen	6,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	6,000,000
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	113 kali	100 Persen	250,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	250,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
1 02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah arsip dinamis yang ditata	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Berkas	100 Persen	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
1 02 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah website/aplikasi yang dikelola	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Website	100 Persen	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									3,255,680,000			3,255,680,000
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	123 orang	100 Persen	201,440,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	201,440,000
1 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 unit	100 Persen	70,080,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	70,080,000
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	105 orang	100 Persen	2,984,160,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	2,984,160,000
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									136,712,000			136,712,000
1 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 unit	100 Persen	29,529,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	29,529,000
1 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 unit	100 Persen	107,183,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	107,183,000
1 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan,	100 %	1 unit	100 Persen	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Semua Kelurahan								
1 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 unit	100 Persen	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD									0			0
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD*)	Terlaksananya pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD*)	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 faskes	100 Persen	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD*)	100 %	0
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									13,685,392,200			13,187,392,200
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									399,201,200			246,201,200
1 02 02 2.01 02	Pembangunan Puskesmas	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	3 Puskesmas	90 Persen	150,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	90 %	0
1 02 02 2.01 03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang di Bangun	persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	1 -	90 Persen	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	90 %	0
1 02 02 2.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Jumlah Puskesmas yang di Rehabilitasi dan di Pelihara	persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	1 Puskesmas	90 Persen	500,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	90 %	0
1 02 02 2.01 10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang di Rehabilitasi dan di Pelihara	persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	1 faskes	90 Persen	500,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	90 %	0
1 02 02 2.01 12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang di Rehabilitasi dan dipelihara	persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	1 sarana	90 Persen	500,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	90 %	0
1 02 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di	Jumlah pengadaan prasarana dan	persentase ketersediaan obat dan vaksin di	Kota Pangkal Pinang,	90 %	1 prasarana	90 Persen	116,268,500	PENDAPAT AN ASLI	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di	90 %	116,268,500

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	puskesmas	pendukung fasilitas pelayana kesehatan	puskesmas	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DAERAH (PAD)		puskesmas		
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	1 Faskes	90 Persen	104,932,700	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	90 %	104,932,700
1 02 02 2.01 15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Terlaksananya kegiatan peningkatan alat dan perbekalan kesehatan yang dikalibrasi	persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	1 faskes	90 Persen	5,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	90 %	5,000,000
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Terlaksananya Pengadaan Obat dan Vaksin	persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas		90 %	5 Jenis	90 Persen	10,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	90 %	10,000,000
1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Terlaksananya Pengadaan Bahan Habis Pakai	persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	300 Jenis	90 Persen	10,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	90 %	10,000,000
1 02 02 2.01 18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	10 faskes	90 Persen	500,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	90 %	0
1 02 02 2.01 19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Terlaksananya layanan kefarmasian dan alat kesehatan	persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	10 faskes	90 Persen	500,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	90 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	10 faskes	90 Persen	500,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	90 %	0
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									13,212,314,300			12,867,314,300
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	4689 buku KIA	100 Persen	50,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	50,000,000
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	4475 buku KIA	100 Persen	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		tahun (age specific fertility rate/ASFR)										tahun (age specific fertility rate/ASFR)		
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	4361 Paket SHK	100 Persen	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	25,000,000
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	16123 buku KIA	100 Persen	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	15,000,000
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM Tingkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan,	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ;	2000 Buku Rapot	100 Persen	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ;	20,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)		Kabupaten/Kota	Semua Kelurahan	98,5 % ; 5 %						ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)	98,5 % ; 5 %	
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	2 Tabun N20 Crioterapi	100 Persen	20,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	20,000,000
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	15683 buku lansia	100 Persen	30,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	15,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022														
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)										yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)		
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	10 Moutpiece	100 Persen	15,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	15,000,000
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	48 Buku PTM	100 Persen	15,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	15,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)									yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)		
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	900 Brosur	100 Persen	25,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	15,000,000
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific	Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	100 Orang	100 Persen	20,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	15,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		fertility rate/ASFR)									fertility rate/ASFR)		
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)	Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standard	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	845 Orang	100 Persen	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	15,000,000
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)	Jumlah Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	24 Jam	100 Persen	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	15,000,000
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	20484 balita	100 Persen	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	50,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)			Kelurahan	%						ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)	%	
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	9 Puskesmas	100 Persen	5,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	5,000,000
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan	Terlaksananya Pelayanan Study EHRA	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	0 kota	100 Persen	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)										terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)		
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)	Terlaksananya pelayanan promosi kesehatan	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	4 Jenis Media promosi	100 Persen	15,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	15,000,000
1 02 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional lainnya	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	40 sarana	100 Persen	15,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	15,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)									terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)		
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)	Terlaksananya Surveilans Kesehatan	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	16 Faskes	100 Persen	75,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	50,000,000
1 02 02 2.02 21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	9 Puskesmas	100 Persen	15,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	15,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	9 Puskesmas	100 Persen	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	5,000,000
1 02 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)	Jumlah layanan pengelolaan upaya kesehatan khusus	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	2 rumah singgah	100 Persen	1,140,028,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	1,140,028,000
1 02 02 2.02 24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin	Terlaksananya kegiatan pengurangan krisis kesehatan	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	42 Kelurahan	100 Persen	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	100,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)									mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)		
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	12 Faskes	100 Persen	90,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	70,000,000
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong	Jumlah masyarakat yang diberi jaminan kesehatan	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	40400 orang	100 Persen	10,447,286,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	10,447,286,300

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)									oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)		
1 02 02 2.02 27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)	Jumlah orang yang diskrining	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	450 orang	100 Persen	15,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	10,000,000
1 02 02 2.02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas	Jumlah Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	10 sample	100 Persen	30,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	15,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)									kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)		
1 02 02 2.02 29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)	Terlaksananya penyelenggaraan kabupaten/kota sehat	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	42 Kelurahan	100 Persen	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	15,000,000
1 02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)	Terlaksananya layanan penyelenggaraan pemeriksaan Labkesda	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	15 sdm	100 Persen	650,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	650,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
1 02 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)	Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	6 faskes	100 Persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	0
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	16 Faskes	100 Persen	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	15,000,000
1 02 02 2.02 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin	Terlaksananya Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	53 Mingguan	100 Persen	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	15,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)										mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)		
1 02 02 2.02 38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)	Tersedianya Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	12 SDM	100 Persen	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil ; Prevalensi anemia pada ibu hamil ; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ; Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ; Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan ; Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)	100 % ; 10,50 % ; 100 % ; 98,5 % ; 98,5 % ; 5 %	0
1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi								18,876,700					18,876,700
1 02 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Data dan Informasi Kesehatan yang dikelola	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 dokumen	100 Persen	14,376,750	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 %	14,376,750
1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Tersedianya Data Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua	100 %	6 Puskesmas	100 Persen	4,499,950	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 %	4,499,950

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Kelurahan								
1 02 02 2.03 03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Tersedianya Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 puskesmas	100 Persen	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 %	0
1 02 02 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									55,000,000			55,000,000
1 02 02 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan RS kelas C dan D	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 RS	100 Persen	10,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 %	10,000,000
1 02 02 2.04 02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Terlaksananya Peningkatan Tata Kelola RS dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 RS	100 Persen	15,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 %	15,000,000
1 02 02 2.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Terlaksananya kegiatan peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan (ALKES/PKRT)	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 fasyankes	100 Persen	15,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 %	15,000,000
1 02 02 2.04 04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 Persen	15,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 %	15,000,000
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									40,000,000			30,000,000
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota									40,000,000			30,000,000
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Cakupan Kota yang memberikan pelayanan kesehatan	Terlaksananya layanan penyediaan tenaga pemenuhan standarisasi mutu pelayanan kesehatan	Cakupan Kota yang memberikan pelayanan kesehatan (100%) kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan (0,57%)	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 orang	100 Persen	25,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Kota yang memberikan pelayanan kesehatan	100 %	15,000,000
1 02 03 2.02 03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan Kota yang memberikan pelayanan kesehatan	Jumlah Lomba yang dilaksanakan	Cakupan Kota yang memberikan pelayanan kesehatan (100%) kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan (0,57%)	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 jenis lomba	100 Persen	15,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Kota yang memberikan pelayanan kesehatan	100 %	15,000,000
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN									52,000,000			52,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 02 04 2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								20,000,000					20,000,000
1 02 04 2.01 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase PIRT yang memiliki izin edar	Terlaksananya Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (umot)	Persentase PIRT yang memiliki izin edar	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41 %	36 lokasi	41 Persen	10,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PIRT yang memiliki izin edar	41 %	10,000,000
1 02 04 2.01 02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase PIRT yang memiliki izin edar	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Pengawasan obat dan perbekalan kesehatan di kota pangkalpinang	Persentase PIRT yang memiliki izin edar	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41 %	120 lokasi	41 Persen	10,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PIRT yang memiliki izin edar	41 %	10,000,000
1 02 04 2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								15,000,000					15,000,000
1 02 04 2.03 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase PIRT yang memiliki izin edar	Terlaksananya layanan pengawasan dan pengendalian keamanan, kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	Persentase PIRT yang memiliki izin edar	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41 %	182 PIRT Bersertifikasi	41 Persen	15,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PIRT yang memiliki izin edar	41 %	15,000,000
1 02 04 2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)								15,000,000					15,000,000
1 02 04 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase PIRT yang memiliki izin edar	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase PIRT yang memiliki izin edar	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41 %	175 TPM yang diperiksa	41 persen	15,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PIRT yang memiliki izin edar	41 %	15,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 02 04 2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan								2,000,000					2,000,000
1 02 04 2.05 01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase PIRT yang memiliki izin edar	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase PIRT yang memiliki izin edar	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41 %	200 Stiker	41 Persen	2,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PIRT yang memiliki izin edar	41 %	2,000,000
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								24,000,000					24,000,000
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								10,000,000					10,000,000
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan SDM kesehatan sesuai standar	Terlaksananya upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Cakupan SDM kesehatan sesuai standar	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Peserta Pertemuan	100 %	10,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan SDM kesehatan sesuai standar	100 %	10,000,000
1 02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								10,000,000					10,000,000
1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Cakupan SDM kesehatan sesuai standar	Terlasananya penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	Cakupan SDM kesehatan sesuai standar	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	9 Kelurahan PHBS	100 %	10,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan SDM kesehatan sesuai standar	100 %	10,000,000
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								4,000,000					4,000,000
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Cakupan SDM kesehatan sesuai standar	Jumlah Puskesmas yang di berikan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Cakupan SDM kesehatan sesuai standar	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	9 Puskesmas	100 Persen	4,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan SDM kesehatan sesuai standar	100 %	4,000,000
TOTAL									96,412,083,112					97,790,295,159

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								12,663,606,000			5,435,181,550		
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4,704,112,050			5,435,181,550		
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								22,787,520			20,888,560		
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Renstra/Renja	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 Persen	1,887,600	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	1,730,300	
2	16	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen RKA- SKPD	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 Persen	1,305,600	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	1,196,800	
2	16	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 Persen	1,081,200	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	991,100	
2	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen DPA- SKPD	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 Persen	1,900,920	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	1,742,510	
2	16	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 Persen	1,396,800	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	1,280,400	
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu		100 %		100 Persen	3,607,200	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,306,600	
2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen RB Jumlah Laporan SPIP	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen 1 Laporan	100 Persen	11,608,200	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	10,640,850	
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,589,463,499			4,300,718,629		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 16 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Tepat Waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	35 orang	100 Persen	3,579,073,059	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	4,291,194,059
2 16 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Tepat Waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 Persen	3,612,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,311,000
2 16 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan Keuangan bulanan/triwulnan /semesteran SKPD	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Tepat Waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 Persen	3,592,440	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,293,070
2 16 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Tepat Waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 Persen	3,186,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,920,500
2 16 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								126,400,000				200,000,000	
2 16 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan (2 jenis Pakaian kerja)	Terpenuhinya Adminitrasi Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	132 stel	30 Persen	86,400,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0
2 16 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi	Terpenuhinya Adminitrasi Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 orang	30 Persen	40,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	200,000,000
2 16 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								283,889,711				244,873,161	
2 16 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Terpenuhinya Adminitrasi Umum	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	11 Jenis	100 Persen	5,080,539	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	4,657,160
2 16 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Peralaatn dan PERengkapan Kntor yang disediakan	Terpenuhinya Adminitrasi Umum	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	13 Unit	100 Persen	97,500,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	73,270,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 16 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah layanan penyediaan ATK, makanan dan minuman yang tertangani	Terpenuhinya Adminitrasi Umum	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Jenis	100 Persen	47,953,172	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	44,703,001
2 16 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah layanan penyediaan Barang cetakan dan Penggadaan yang disediakan	Terpenuhinya Adminitrasi Umum	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Jenis	100 Persen	9,756,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	8,943,000
2 16 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran		Terpenuhinya Adminitrasi Umum		100 %		100 Persen	3,600,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	3,300,000
2 16 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran		Terpenuhinya Adminitrasi Umum		100 %		100 Persen	120,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	110,000,000
2 16 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								45,000,000				90,000,000	
2 16 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah mebeuler yang diadakan	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18 Unit	50 Persen	45,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	90,000,000
2 16 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								437,646,000				397,860,000	
2 16 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Surat yang disediakan	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	750 Surat	100 Persen	72,072,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	65,520,000
2 16 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Aparatur Internal SKPD yang terlayani	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	57 orang	100 Persen	146,520,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	133,200,000
2 16 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	32 Unit	100 Persen	10,051,800	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	9,138,000
2 16 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang urusan		100 %		100 Persen	209,002,200	PENDAPAT AN ASLI DAERAH		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	190,002,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
				Pemerintah Daerah						(PAD)				
2 16 01 2.09	Pemeliharaan Barang	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							198,925,320				180,841,200	
2 16 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	100 Persen	148,672,920	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	135,157,200
2 16 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Gedung Kantor/Bangunan lainnya yang dipelihara	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 Persen	30,452,400	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	27,684,000
2 16 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Unit	100 Persen	19,800,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	18,000,000
2 16 02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK								3,655,155,450				0	
2 16 02 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								3,655,155,450				0	
2 16 02 2.01 02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah	Jumlah Dokumen isu strategis yang direkomendasikan, jumlah aduan yang masuk dalam SP4N dan hasil pemantauan di media massa dan media sosial	Tersedianya Konten Informasi terkait Program dan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM)	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	75 Persen	105,155,450	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah	100 %	0
2 16 02 2.01 04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah	Persentase Konten Informasi terkait Program dan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM)	Tersedianya Konten Informasi terkait Program dan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM)		100 %	50 Persen	75 Persen	3,000,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah	100 %	0
2 16 02 2.01 06	Pelayanan Informasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah	Persentase desiminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditentukan	Tersedianya Konten Informasi terkait Program dan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM)	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Persen	75 Persen	500,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah	100 %	0
2 16 02 2.01 07	Layanan Hubungan Media	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi	Persentase kerjasama dengan media cetak, online elektronik yang	Tersedianya Konten Informasi terkait Program dan Kebijakan	Kota Pangkal Pinang, Semua	100 %	10 Persen	75 Persen	50,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022															
Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
		publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah	bermitra dengan pemerintah kota pangkalpinang	Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM)	Kecamatan, Semua Kelurahan						(PAD)		publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah		
2 16 03		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA							4,304,338,500						0
2 16 03 2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							2,696,912,500						0
2 16 03 2.01 02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet dan Pelayanan Publik yang terhubung secara Online dan Terintegritas yang difasilitasi Dinas Kominfo	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Tersedianya Sistem Elektronik Komunikasi Intra Pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, text, data dan sinyal lainnya) dengan Memanfaatkan Jaringan Intra Pemerintah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69 %	38 persen	50 Persen	95,050,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet dan Pelayanan Publik yang terhubung secara Online dan Terintegritas yang difasilitasi Dinas Kominfo	69 %	0
2 16 03 2.01 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet dan Pelayanan Publik yang terhubung secara Online dan Terintegritas yang difasilitasi Dinas Kominfo	Persentase titik jaringan intra pemerintah yang terkoneksi pada perangkat daerah atau menggunakan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	Tersedianya Sistem Elektronik Komunikasi Intra Pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, text, data dan sinyal lainnya) dengan Memanfaatkan Jaringan Intra Pemerintah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69 %	21 Persen	50 Persen	2,601,862,500	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet dan Pelayanan Publik yang terhubung secara Online dan Terintegritas yang difasilitasi Dinas Kominfo	69 %	0
2 16 03 2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							1,607,426,000						0
2 16 03 2.02 02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet dan Pelayanan Publik yang terhubung secara Online dan Terintegritas yang difasilitasi Dinas Kominfo	Jumlah regulasi penyelenggaraan e-government	Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet dan Pelayanan Publik yang terhubung secara Online dan Terintegritas yang di Fasilitasi Dinas Kominfo	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69 %	1 Dokumen	69 Persen	75,736,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet dan Pelayanan Publik yang terhubung secara Online dan Terintegritas yang difasilitasi Dinas Kominfo	69 %	0
2 16 03 2.02 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet dan Pelayanan Publik yang terhubung secara Online dan Terintegritas yang difasilitasi Dinas Kominfo	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data dan menyimpan di pusat data pemerintah	Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet dan Pelayanan Publik yang terhubung secara Online dan Terintegritas yang di Fasilitasi Dinas Kominfo	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69 %	34 persen	69 Persen	424,920,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet dan Pelayanan Publik yang terhubung secara Online dan Terintegritas yang difasilitasi Dinas Kominfo	69 %	0
2 16 03 2.02 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet dan Pelayanan Publik yang terhubung secara Online dan Terintegritas yang difasilitasi Dinas Kominfo	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet dan Pelayanan Publik yang terhubung secara Online dan Terintegritas yang di Fasilitasi Dinas Kominfo	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69 %	20 persen	69 Persen	75,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet dan Pelayanan Publik yang terhubung secara Online dan Terintegritas yang difasilitasi Dinas Kominfo	69 %	0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
2 16 03 2.02 06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet dan Pelayanan Publik yang terhubung secara Online dan Terintegritas yang difasilitasi Dinas Kominfo		Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet dan Pelayanan Publik yang terhubung secara Online dan Terintegritas yang di Fasilitas Dinas Kominfo	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69 %		69 Persen	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet dan Pelayanan Publik yang terhubung secara Online dan Terintegritas yang difasilitasi Dinas Kominfo	69 %	0
2 16 03 2.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet dan Pelayanan Publik yang terhubung secara Online dan Terintegritas yang difasilitasi Dinas Kominfo	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintah) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet dan Pelayanan Publik yang terhubung secara Online dan Terintegritas yang di Fasilitas Dinas Kominfo	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69 %	20 Persen	69 Persen	346,770,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet dan Pelayanan Publik yang terhubung secara Online dan Terintegritas yang difasilitasi Dinas Kominfo	69 %	0
2 16 03 2.02 08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet dan Pelayanan Publik yang terhubung secara Online dan Terintegritas yang difasilitasi Dinas Kominfo	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet dan Pelayanan Publik yang terhubung secara Online dan Terintegritas yang di Fasilitas Dinas Kominfo	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69 %	20 persen	69 Persen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet dan Pelayanan Publik yang terhubung secara Online dan Terintegritas yang difasilitasi Dinas Kominfo	69 %	0
2 16 03 2.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet dan Pelayanan Publik yang terhubung secara Online dan Terintegritas yang difasilitasi Dinas Kominfo	Persentase OPD yang memanfaatkan sumber daya TIK untuk mendukung terselenggaranya layanan pemerintah Berbasis Elektronik	Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet dan Pelayanan Publik yang terhubung secara Online dan Terintegritas yang di Fasilitas Dinas Kominfo	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69 %	25 persen	69 Persen	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet dan Pelayanan Publik yang terhubung secara Online dan Terintegritas yang difasilitasi Dinas Kominfo	69 %	0
2 16 03 2.02 11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet dan Pelayanan Publik yang terhubung secara Online dan Terintegritas yang difasilitasi Dinas Kominfo		Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet dan Pelayanan Publik yang terhubung secara Online dan Terintegritas yang di Fasilitas Dinas Kominfo		69 %		69 Persen	95,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet dan Pelayanan Publik yang terhubung secara Online dan Terintegritas yang difasilitasi Dinas Kominfo	69 %	0
2 16 03 2.02 12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet dan Pelayanan Publik yang terhubung secara Online dan Terintegritas yang difasilitasi Dinas Kominfo	Jumlah dokumen movev untuk mendukung implementasi SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet dan Pelayanan Publik yang terhubung secara Online dan Terintegritas yang di Fasilitas Dinas Kominfo	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69 %	3 Dokumen	69 Persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet dan Pelayanan Publik yang terhubung secara Online dan Terintegritas yang difasilitasi Dinas Kominfo	69 %	0
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								460,000,000				0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL								460,000,000					0
2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								460,000,000					0
2 20 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam Penyusunan, Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Data Statistik Sektoral yang dikumpulkan	Terpenuhinya Kelengkapan Metadata Kegiatan Statistik Sektoral	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	100 Persen	90 Persen	400,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam Penyusunan, Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	90 %	0
2 20 02 2.01 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam Penyusunan, Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Kegiatan denagn alur metadata statistik sektoral	Terpenuhinya Kelengkapan Metadata Kegiatan Statistik Sektoral	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	30 persen	90 Persen	50,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam Penyusunan, Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	90 %	0
2 20 02 2.01 04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam Penyusunan, Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Terpenuhinya Kelengkapan Metadata Kegiatan Statistik Sektoral		90 %		90 Persen	10,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam Penyusunan, Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	90 %	0
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								227,000,000					0
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI								227,000,000					0
2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								170,000,000					0
2 21 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat keamanan informasi pemerintah		Terlaksananya Titik yang Diamankan		100 %		100 Persen	50,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat keamanan informasi pemerintah	100 %	0
2 21 02 2.01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah sistem elektronik yang dipergunakan	Terlaksananya Titik yang Diamankan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Sistem elektronik	100 Persen	120,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat keamanan informasi pemerintah	100 %	0
2 21 02 2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota								57,000,000					0
2 21 02 2.02 01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat keamanan informasi pemerintah		Tersedianya Sistem Eklektronik Pemerintah Daerah yang telah Menerapkan Prinsip Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)		100 %		50 Persen	57,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat keamanan informasi pemerintah	100 %	0
TOTAL									13,350,606,000					5,435,181,550

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							7,550,000,000				7,833,500,000		
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							7,150,000,000				7,295,500,000		
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							10,500,000				17,000,000		
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen Renstra/Renja	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	1 dokumen	100 %	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	10,000,000
2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	1 Dokumen	100 %	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,500,000
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	1 dokumen	100 %	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,500,000
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							5,594,500,000				5,757,000,000		
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	60 orang	100 %	5,587,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,750,000,000
2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	1 Laporan	100 %	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,500,000
2	17	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	1 Laporan	100 %	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,500,000
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							99,000,000				131,000,000		
2	17	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	jumlah pakaian yang diadakan	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya		100 %	120 stel	100 %	74,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	78,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 17 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	jumlah dokumen penilaian angka kredit	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya		100 %	11 dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	18,000,000
2 17 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya		100 %	10 orang	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	35,000,000
2 17 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								271,000,000				357,500,000	
2 17 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	252 set	100 %	13,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	13,500,000
2 17 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	42 item	100 %	38,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	38,000,000
2 17 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jumlah makanan dan minuman yang di sediakan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	1200 Kotak	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	55,000,000
2 17 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	20 item	100 %	45,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	45,000,000
2 17 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	110 Kali	100 %	125,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	206,000,000
2 17 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								175,000,000				150,000,000	
2 17 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah meubeler yang disediakan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		100 %	30 unit	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	50,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 17 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang diadakan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		100 %	6 unit/set/ kwh	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	100,000,000
2 17 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasaranan pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang diadakan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		100 %	1 unit	100 %	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
2 17 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								480,000,000				493,000,000	
2 17 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan lisrik	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		100 %	12 bulan	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	100,000,000
2 17 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		100 %	10 unit	100 %	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	48,000,000
2 17 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		100 %	12 orang	100 %	345,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	345,000,000
2 17 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								520,000,000				390,000,000	
2 17 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		100 %	1 unit	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	65,000,000
2 17 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		100 %	2 unit	100 %	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	95,000,000
2 17 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah gedung kantor/bangunanlainnya yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		100 %	2 unit	100 %	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	80,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
										Alokasi Umum				
2 17 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		100 %	1 unit	100 %	350,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	150,000,000
2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI								6,000,000				10,000,000	
2 17 03 2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota								6,000,000				10,000,000	
2 17 03 2.01 02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	Jumlah Koperasi yang diperiksa	Persentase koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan		26,67 %	10 Kop	26.67 %	6,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	26,67 %	10,000,000
2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI								8,000,000				16,000,000	
2 17 04 2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								8,000,000				16,000,000	
2 17 04 2.01 01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase KSP/USP koperasi yang dinilai kesehatannya	Jumlah KSP/USP Kop yang dinilai	Persentase KSP/USP kopersai yang dinilai kesehatannya	Semua Kabupaten/K ota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	20 Kop	20 %	8,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase KSP/USP koperasi yang dinilai kesehatannya	0	16,000,000
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN								88,000,000				206,000,000	
2 17 05 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								88,000,000				206,000,000	
2 17 05 2.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan	Jumlah kader Koperasi yang terlatih Jumlah Pengurus koperasi yang terlatih	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan		55 %	50 orang 40 orang	55 %	88,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan	55 %	206,000,000
2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI								85,000,000				90,000,000	
2 17 06 2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota								85,000,000				90,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 17 06 2.01 01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan volume usaha, RAT Koperasi	Jumlah koperasi yang dibina dan dibedah	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 %	60 koperasi	14 %	85,000,000			Persentase peningkatan volume usaha, RAT Koperasi	14 %	90,000,000
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								63,000,000					66,000,000
2 17 07 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan								63,000,000					66,000,000
2 17 07 2.01 04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Usaha mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah Usaha Mikro yang dilatih	Persentase Usaha mikro yang menjadi wirausaha		2,2 %	50 UMi	2.2 %	47,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Usaha mikro yang menjadi wirausaha	2,2 %	48,500,000
2 17 07 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Persentase Usaha mikro yang menjadi wirausaha	Rakor Lintas Pelaku	Persentase Usaha mikro yang menjadi wirausaha		2,2 %	30 UMi	2.2 %	16,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Usaha mikro yang menjadi wirausaha	2,2 %	17,500,000
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM								150,000,000					150,000,000
2 17 08 2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil								150,000,000					150,000,000
2 17 08 2.01 01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Persentase Usaha mikro menjadi usaha kecil	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi permodalan	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil		1 %	60 UMi	1 %	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Usaha mikro menjadi usaha kecil	1 %	150,000,000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								3,270,000,000					7,173,121,000
3 30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN								163,130,000					170,000,000
3 30 02 2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan								55,000,000					25,000,000
3 30 02 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah dokumen laporan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)		42%	1 dokumen	42 %	55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	42%	25,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 30 02 2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang									40,000,000				30,000,000
3 30 02 2.02 01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah dokumen laporan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)		42%	1 dokumen	42 %	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	42%	30,000,000
3 30 02 2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat									43,130,000				75,000,000
3 30 02 2.05 01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah dokumen laporan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)		42%	1 dokumen	42 %	43,130,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	42%	75,000,000
3 30 02 2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota									25,000,000				40,000,000
3 30 02 2.06 01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah sarana penyimpanan B2 yang diperiksa	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)		42%	10 sarana penyimpanan	42 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	42%	40,000,000
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN									2,135,363,800				4,753,121,000
3 30 03 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan									2,075,363,800				4,668,121,000
3 30 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi / dibangun	Jumlah upaya peningkatan sarana distribusi perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi / dibangun		1 sarana distribusi	7 upaya	1 sarana distribusi	1,070,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi / dibangun	1 sarana distribusi	3,568,121,000
3 30 03 2.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi / dibangun	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi / dibangun		1 sarana distribusi	5 sarana distribusi	1 sarana distribusi	1,005,363,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi / dibangun	1 sarana distribusi	1,100,000,000
3 30 03 2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya									60,000,000				85,000,000
3 30 03 2.02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi / dibangun	jumlah pelaku usaha saran distribusi perdagangan yang dibina	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi / dibangun		1 sarana distribusi	60 orang	1 sarana distribusi	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi / dibangun	1 sarana distribusi	85,000,000
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING									306,506,200				450,000,000
3 30 04 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota									269,071,200				400,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 30 04 2.02 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase kinerja realisasi pupuk	Jumlah dokumen laporan	Persentase kinerja realisasi pupuk		94,5%	12 dokumen	94.50 persen	60,128,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kinerja realisasi pupuk	94,5%	85,000,000
3 30 04 2.02 02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Persentase kinerja realisasi pupuk	Jenis dokumen laporan	Persentase kinerja realisasi pupuk		94,5%	2 dokumen	94.50 persen	176,003,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kinerja realisasi pupuk	94,5%	190,000,000
3 30 04 2.02 03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase kinerja realisasi pupuk	Jumlah pelaksanaan operasi pasar	Persentase kinerja realisasi pupuk		94,5%	7 kali	94.50 persen	32,940,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kinerja realisasi pupuk	94,5%	125,000,000
3 30 04 2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								37,435,000					50,000,000
3 30 04 2.03 01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Persentase kinerja realisasi pupuk	Jenis izin yang diperiksa	Persentase kinerja realisasi pupuk		94,5%	6 jenis	94.50 persen	37,435,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kinerja realisasi pupuk	94,5%	50,000,000
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR								230,000,000					800,000,000
3 30 05 2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								230,000,000					800,000,000
3 30 05 2.01 02	Pameran Dagang Nasional	Nilai Ekspor Bersih	Jumlah event yang dilaksanakan	nilai ekspor bersih		665.000.000 Rp/US \$	3 event	665000000 Rp/US \$	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Ekspor Bersih	665.000.000 Rp/US \$	700,000,000
3 30 05 2.01 03	Pameran Dagang Lokal	Nilai Ekspor Bersih	Jumlah event yang dilaksanakan	nilai ekspor bersih		665.000.000 Rp/US \$	3 event	665000000 Rp/US \$	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Ekspor Bersih	665.000.000 Rp/US \$	100,000,000
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								365,000,000					900,000,000
3 30 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan								365,000,000					900,000,000
3 30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	1. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dn perlengkapan (UTTP)	Jumlah UTTP yang di tera/ tera ulang	1. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dn perlengkapan (UTTP)		80 %	1600 UTTP	80 persen	325,000,000	Dana Transfer Umum-		1. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dn perlengkapan (UTTP)	80 %	700,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		yangditera/tera ualng dalam tahun berjalan 2. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku		yangditera/tera ualng dalam tahun berjalan 2. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku						Dana Alokasi Umum		yangditera/tera ualng dalam tahun berjalan 2. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku		
3 30 06 2.01 02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	1. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dn perlengkapan (UTTP) yangditera/tera ualng dalam tahun berjalan 2. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	jumlah potensi UTTP	1. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dn perlengkapan (UTTP) yangditera/tera ualng dalam tahun berjalan 2. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku		80 %	2200 UTTP	80 persen	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dn perlengkapan (UTTP) yangditera/tera ualng dalam tahun berjalan 2. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	80 %	200,000,000
3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI								70,000,000				100,000,000	
3 30 07 2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri								70,000,000				100,000,000	
3 30 07 2.01 03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah upaya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Jenis data yang tersedia	Jumlah upaya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri		2 upaya	5 jenis	2 upaya	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah upaya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	2 upaya	100,000,000
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								1,680,000,000				1,805,000,000	
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								1,460,000,000				1,485,000,000	
3 31 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								1,460,000,000				1,485,000,000	
3 31 02 2.01 01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIK ; Proporsi Nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIK ; Proporsi Nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita		22% ; 23,60%	1 dokumen	22 %	190,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIK ; Proporsi Nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita	22% ; 23,60%	200,000,000
3 31 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pembangunan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIK ; Proporsi Nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita	Jumlah Dokumen	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIK ; Proporsi Nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita		22% ; 23,60%	1 dokumen	22 %	115,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIK ; Proporsi Nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita	22% ; 23,60%	120,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 31 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIK ; Proporsi Nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIK ; Proporsi Nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita		22% ; 23,60%	4 orang	22 %	150,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIK ; Proporsi Nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita	22% ; 23,60%	150,000,000
3 31 02 2.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIK ; Proporsi Nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita	Jumlah IKM Mendapat Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIK ; Proporsi Nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita		22% ; 23,60%	1 IKM	22 %	225,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIK ; Proporsi Nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita	22% ; 23,60%	225,000,000
3 31 02 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIK ; Proporsi Nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita	jumlah IKM yang terbina melalui pendampingan industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIK ; Proporsi Nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita		22% ; 23,60%	60 IKM	22 %	740,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIK ; Proporsi Nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita	22% ; 23,60%	750,000,000
3 31 02 2.01 06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIK ; Proporsi Nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita	Jumlah Dokumen	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIK ; Proporsi Nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita		22% ; 23,60%	1 dokumen	22 %	40,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIK ; Proporsi Nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita	22% ; 23,60%	40,000,000
3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA								80,000,000				150,000,000	
3 31 03 2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota								80,000,000				150,000,000	
3 31 03 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah ; Persentase Jumlah Hasil	Jumlah IUI, IUPI, IUKI, dan IPKI	1. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah		5 % ; 85 % ; 0,4 % ; 50,71 %	5 IKM	5 persen	40,000,000	Dana Transfer Umum- Dana		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah ; Persentase Jumlah Hasil	5 % ; 85 % ; 0,4 % ; 50,71 %	75,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Ijin Usaha Industri (IUI) dan Ijin Usaha Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait ; Laju pertumbuhnn PDRB Industri manufaktur ; Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur								Alokasi Umum		Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Ijin Usaha Industri (IUI) dan Ijin Usaha Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait ; Laju pertumbuhnn PDRB Industri manufaktur ; Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur		
3 31 03 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah ; Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Ijin Usaha Industri (IUI) dan Ijin Usaha Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait ; Laju pertumbuhnn PDRB Industri manufaktur ; Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	Jumlah Dokumen	1. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah		5 % ; 85 % ; 0,4 % ; 50,71 %	5 IKM	5 persen	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah ; Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Ijin Usaha Industri (IUI) dan Ijin Usaha Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait ; Laju pertumbuhnn PDRB Industri manufaktur ; Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	5 % ; 85 % ; 0,4 % ; 50,71 %	75,000,000
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL								140,000,000				170,000,000	
3 31 04 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota								140,000,000				170,000,000	
3 31 04 2.01 01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase Data Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota yang Masuk SIINas Terhadap Total Populasi Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota ; Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	Jumlah Dokumen Informasi	1. Persentase Data Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota yang Masuk SIINas Terhadap Total Populasi Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota		75% ; 1,25 %	1 Dokumen	75 persen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Data Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota yang Masuk SIINas Terhadap Total Populasi Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota ; Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	75% ; 1,25 %	60,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 31 04 2.01 02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Persentase Data Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota yang Masuk SIINas Terhadap Total Populasi Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota ; Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	Jumlah Dokumen Informasi	1. Persentase Data Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota yang Masuk SIINas Terhadap Total Populasi Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota		75% ; 1,25 %	1 dokumen	75 persen	40,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Data Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota yang Masuk SIINas Terhadap Total Populasi Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota ; Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	75% ; 1,25 %	50,000,000
3 31 04 2.01 03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Persentase Data Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota yang Masuk SIINas Terhadap Total Populasi Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota ; Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	Jumlah Dokumen Informasi	1. Persentase Data Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota yang Masuk SIINas Terhadap Total Populasi Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota		75% ; 1,25 %	1 dokumen	75 persen	50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Data Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota yang Masuk SIINas Terhadap Total Populasi Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota ; Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	75% ; 1,25 %	60,000,000
TOTAL									12,500,000,000					16,811,621,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								37,192,328,000			40,904,449,000			
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								6,887,775,687			6,887,774,800			
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								20,395,000			20,395,000			
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen renstra/renja	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	2,350,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,350,000	
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen LKPJ, LKPJ AMJ, LPPD yang disusun	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	2,350,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,350,000	
2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen SPIP, LAKIP, dan Reformasi Birokrasi	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	15,695,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	15,695,000	
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5,207,171,157			5,207,171,200			
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Presentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	46 Orang	100 %	4,644,799,957	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	4,644,800,000	
2	11	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Tenaga PHL yang tersedia	Presentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18 Orang	100 %	557,671,200	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	557,671,200	
2	11	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	2,350,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,350,000	
2	11	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Presentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	2,350,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,350,000	
2	11	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								7,378,930			7,378,000			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 11 01 2.04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD*)	Jumlah objek retribusi daerah yang terdata/terdaftar	Persentase terpenuhinya Administrasi PAD Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Orang	100 %	7,378,930	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD*)	100 %	7,378,000
2 11 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								70,000,000				70,000,000	
2 11 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi	Persentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Orang	100 %	60,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	60,000,000
2 11 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	Persentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Kali	100 %	10,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	10,000,000
2 11 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								264,040,000				264,040,000	
2 11 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Presentase terpenuhinya administrasi Umum	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Jenis	100 %	5,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	5,000,000
2 11 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Presentase terpenuhinya administrasi Umum	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	100 %	21,500,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	21,500,000
2 11 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	Presentase terpenuhinya administrasi Umum	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	51 Jenis	100 %	22,230,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	22,230,000
2 11 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Presentase terpenuhinya administrasi Umum	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	45000.12 Lembar/Jenis	100 %	15,310,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	15,310,000
2 11 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Presentase terpenuhinya administrasi Umum	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Kali	100 %	200,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	200,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 11 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								594,175,000					594,175,000
2 11 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	142,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	142,000,000
2 11 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	104 Unit	100 %	61,850,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	61,850,000
2 11 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah PHL Bagian Keuangan Jumlah PHL Tenaga Kebersihan Kantor	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Orang/bulan 2 Orang/bulan	100 %	390,325,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	390,325,000
2 11 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								724,615,600					724,615,600
2 11 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraaan dinas jabatan yang dipelihara	Persentase terepenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	9 Unit	100 %	307,535,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	307,535,000
2 11 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Persentase terepenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	169 Unit	100 %	367,080,600	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	367,080,600
2 11 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	Persentase terepenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	50,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	50,000,000
2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP								360,052,912					540,049,800
2 11 02 2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota								182,249,800					182,249,800
2 11 02 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersusun	Jumlah Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab./Kota	Tersedianya Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	132,249,800	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersusun	80 %	132,249,800

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
2 11 02 2.01 02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersusun	Jumlah Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota yang terpantau	Tersedianya Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersusun	80 %	50,000,000
2 11 02 2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota									177,803,112			357,800,000
2 11 02 2.02 01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersusun	Dokumen KLHS yang dibuat (KLHS Rencana Tata Ruang)	Terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 Dokumen	1 Kali	177,803,112	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersusun	80 %	177,800,000
2 11 02 2.02 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersusun	Dokumen KLHS yang dibuat (KLHS RPJPD/RPJMD)	Terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	0 Dokumen	1 Kali	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersusun	80 %	100,000,000
2 11 02 2.02 03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersusun	Dokumen KLHS yang dibuat (KLHS untuk KRP)	Terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	0 Dokumen	1 Kali	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersusun	80 %	80,000,000
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP									750,000,000			850,000,000
2 11 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota									750,000,000			850,000,000
2 11 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kualitas air danau ; Kualitas air sungai sebagai sumber air baku ; Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, udara dan laut Persentase jumlah usaha dan/kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran tanah, air, udara dan laut Persentase jumlah usaha dan/kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran tanah, air,	Terlaksananya pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 mg/l ; 4,27 mg/l ; 3%	0 Jenis 72.7 Indeks 80 % 96.8 Indeks	4 Dokumen	100,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kualitas air danau ; Kualitas air sungai sebagai sumber air baku ; Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	2 mg/l ; 4,27 mg/l ; 3%	100,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			udara dan laut Persentase jumlah usaha dan/kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran tanah, air, udara dan laut											
2 11 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kualitas air danau ; Kualitas air sungai sebagai sumber air baku ; Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Jumlah Dokumen Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang tersedia	Terlaksananya pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 mg/l ; 4,27 mg/l ; 3%	1 Dokumen	4 Dokumen	150,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Kualitas air danau ; Kualitas air sungai sebagai sumber air baku ; Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	2 mg/l ; 4,27 mg/l ; 3%	250,000,000
2 11 03 2.01 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kualitas air danau ; Kualitas air sungai sebagai sumber air baku ; Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Terlaksananya Hasil Uji Laboratorium Lingkungan Hidup	Terlaksananya pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 mg/l ; 4,27 mg/l ; 3%	275 Sertifikat	4 Dokumen	500,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Kualitas air danau ; Kualitas air sungai sebagai sumber air baku ; Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	2 mg/l ; 4,27 mg/l ; 3%	500,000,000
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)								4,919,543,721					5,939,891,200
2 11 04 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota								4,919,543,721					5,939,891,200
2 11 04 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Terbangun dan Terpeliharanya Sumber Daya Keanekaragaman Hayati Kota Pangkalpinang	Jumlah dokumen rencana pengelolaan keanekaragaman hayati	Terpeliharanya seluruh aset RTH Kota Pangkalpinang	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,3 %	1 Dokumen	1 Wilayah	83,643,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Terbangun dan Terpeliharanya Sumber Daya Keanekaragaman Hayati Kota Pangkalpinang	21,3 %	83,643,000
2 11 04 2.01 03	Pengelolaan Kebun Raya	Terbangun dan Terpeliharanya Sumber Daya Keanekaragaman Hayati Kota Pangkalpinang	Terlaksananya Pengelolaan Kebun Raya	Terpeliharanya seluruh aset RTH Kota Pangkalpinang		21,3 %	1 Kawasan	1 Wilayah	600,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Terbangun dan Terpeliharanya Sumber Daya Keanekaragaman Hayati Kota Pangkalpinang	21,3 %	800,000,000
2 11 04 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terbangun dan Terpeliharanya Sumber Daya Keanekaragaman Hayati Kota Pangkalpinang	Ruang Terbuka Hijau yang dikelola	Terpeliharanya seluruh aset RTH Kota Pangkalpinang	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,3 %	21.2 %	1 Wilayah	4,195,900,721	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Terbangun dan Terpeliharanya Sumber Daya Keanekaragaman Hayati Kota Pangkalpinang	21,3 %	5,016,248,200
2 11 04 2.01 07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Terbangun dan Terpeliharanya Sumber Daya Keanekaragaman Hayati Kota Pangkalpinang	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman hayati yang dikelola	Terpeliharanya seluruh aset RTH Kota Pangkalpinang	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,3 %	1 unit	1 Wilayah	40,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Terbangun dan Terpeliharanya Sumber Daya Keanekaragaman Hayati Kota Pangkalpinang	21,3 %	40,000,000
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)								85,455,500					85,455,500
2 11 05 2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3								0					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 11 05 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	-	-	-		0	0 -	0 -		0		-	0	0
2 11 05 2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								85,455,500					85,455,500
2 11 05 2.02 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase terkendalinya B3 dan Limbah B3	Jumlah Perusahaan Penghasil Limbah B3	Terkumpulnya Data perusahaan Penghasil Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	10 Perusahaa n	1 Data	39,057,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terkendalinya B3 dan Limbah B3	70 %	39,057,000
2 11 05 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Persentase terkendalinya B3 dan Limbah B3	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Provinsi	Terkumpulnya Data perusahaan Penghasil Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	1 Kali	1 Data	46,398,500	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terkendalinya B3 dan Limbah B3	70 %	46,398,500
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								56,053,442					56,054,000
2 11 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								56,053,442					56,054,000
2 11 06 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah perusahaan yang menerapkan SNI ISO 14001	Jumlah rekomendasi lingkungan dan/atau izin PPLH	Terbinanya Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 perusahaa n	80 %	4 Kali	14,888,442	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah perusahaan yang menerapkan SNI ISO 14001	1 perusahaa n	14,889,000
2 11 06 2.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang menerapkan SNI ISO 14001	Jumlah pelaksanaan pengawasan	Terbinanya Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 perusahaa n	45 Kali	4 Kali	41,165,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah perusahaan yang menerapkan SNI ISO 14001	1 perusahaa n	41,165,000
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								320,360,585					320,361,000
2 11 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								320,360,585					320,361,000
2 11 09 2.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Penyampaian Laporan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan	Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga	Kota Pangkal Pinang, Semua	1 pengharga an	1 Laporan	1 Dokumen	320,360,585	PENDAPAT AN ASLI DAERAH		Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	1 pengharga an	320,361,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
	Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lingkungan Hidup Daerah	Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tersedia	Kecamatan, Semua Kelurahan					(PAD)	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP								29,050,000				29,050,000
2 11 10 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota								29,050,000				29,050,000
2 11 10 2.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Kasus Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	5 Kali	5 Kasus	29,050,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	80 %	29,050,000
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								23,784,036,153				26,195,812,700
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah								23,784,036,153				26,195,812,700
2 11 11 2.01 01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani ; Persentase Timbunan Sampah yang di Daur Ulang	Tersusunnya Kebijakan dan Strategi daerah pengelolaan sampah kota	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88 % ; 12 %	1 Laporan	88 %	55,758,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani ; Persentase Timbunan Sampah yang di Daur Ulang	88 % ; 12 %	55,758,000
2 11 11 2.01 03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani ; Persentase Timbunan Sampah yang di Daur Ulang	Jumlah volume sampah yang tertangani	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88 % ; 12 %	166.74 m3	88 %	23,517,128,880	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani ; Persentase Timbunan Sampah yang di Daur Ulang	88 % ; 12 %	25,928,904,700
2 11 11 2.01 04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani ; Persentase Timbunan Sampah yang di Daur Ulang	Terlaksananya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88 % ; 12 %	2 kali	88 %	143,847,448	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani ; Persentase Timbunan Sampah yang di Daur Ulang	88 % ; 12 %	143,848,000
2 11 11 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani ; Persentase Timbunan Sampah yang di Daur Ulang	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88 % ; 12 %	12 kali	88 %	25,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani ; Persentase Timbunan Sampah yang di Daur Ulang	88 % ; 12 %	25,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 11 11 2.01 06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani ; Persentase Timbulan Sampah yang di Daur Ulang	Tersusunnya Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88 % ; 12 %	1 Dokumen	88 %	41,301,825	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani ; Persentase Timbulan Sampah yang di Daur Ulang	88 % ; 12 %	41,302,000
2 11 11 2.01 07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani ; Persentase Timbulan Sampah yang di Daur Ulang	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kota	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88 % ; 12 %	1 Unit	88 %	1,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani ; Persentase Timbulan Sampah yang di Daur Ulang	88 % ; 12 %	1,000,000
TOTAL									37,192,328,000					40,904,449,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								7,418,370,500			6,811,618,965		
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								6,840,370,500			6,233,618,965		
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								4,000,000			4,000,000		
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	jumlah dokumen renstra/renja	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	2 dokumen	100 %	1,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	1,000,000
2	09	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	2 dokumen	100 %	1,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	1,000,000
2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	jumlah dokumen LKPJ, LKPJAMJ, LPPD yang tersusun	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	2 dokumen	100 %	1,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	1,000,000
2	09	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	jumlah laporan SPIP, RB, LAKIP yang disusun	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	3 dokumen	100 %	1,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	1,000,000
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,639,045,927			4,639,045,927		
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	50 orang	100 %	4,636,045,927	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	4,636,045,927
2	09	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	5 Laporan	100 %	1,500,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	1,500,000
2	09	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	5 Laporan	100 %	1,500,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	1,500,000
2	09	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								4,000,000			4,000,000		
2	09	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD*)	jumlah laporan realisasi daerah	Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD*)		100 %	2 laporan	100 %	4,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD*)	100 %	4,000,000
2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								89,000,000			25,000,000		
2	09	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	jumlah pakaian dinas yang disediakan	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya		100 %	107 orang	100 %	64,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0
2	09	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Persentase ASN yang memenuhi standar	jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai	Persentase ASN yang memenuhi standar		100 %	8 orang	100 %	25,000,000	PENDAPAT AN ASLI		Persentase ASN yang memenuhi standar	100 %	25,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
	Berdasarkan Tugas dan Fungsi	kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	tupoksi	kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya						DAERAH (PAD)	kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya		
2 09 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								219,556,500				209,804,930
2 09 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran		100 %	12 unit	100 %	7,702,465	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	2,000,000
2 09 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran		100 %	30 set	100 %	45,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	46,902,465
2 09 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran		100 %	12 jenis	100 %	30,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	35,000,000
2 09 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran		100 %	12 jenis	100 %	15,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	15,000,000
2 09 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran		100 %	12 kali	100 %	121,854,035	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	110,902,465
2 09 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								370,000,000				200,000,000
2 09 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		100 %	0 Unit	100 %	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	200,000,000
2 09 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		100 %	1 unit	100 %	370,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
2 09 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor / Bangunan Lainnya yang diadakan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		100 %	0 Unit	100 %	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
2 09 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor / Bangunan Lainnya yang diadakan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		100 %	0 Unit	100 %	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
2 09 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								824,768,073				824,768,108
2 09 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		100 %	48 orang	100 %	156,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	156,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 09 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		100 %	12 unit	100 %	20,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	20,000,000
2 09 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	jumlah aparatur internal skpd yang terlayani	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		100 %	12 orang	100 %	648,768,073	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	648,768,108
2 09 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								690,000,000				327,000,000	
2 09 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		100 %	5 unit	100 %	190,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	190,000,000
2 09 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	jumlah gedung kantor/bangunan ainnya yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		100 %	1 unit	100 %	500,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	137,000,000
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								390,000,000				390,000,000	
2 09 03 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan								130,000,000				130,000,000	
2 09 03 2.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH) mencapai; dan tingkat tingkat konsumsi ikan.	Jumlah laporan neraca bahan makanan	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH) mencapai; dan tingkat tingkat konsumsi ikan.		88 %	3 laporan	88 %	5,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH) mencapai; dan tingkat tingkat konsumsi ikan.	88 %	5,000,000
2 09 03 2.01 04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH) mencapai; dan tingkat tingkat konsumsi ikan.	Jumlah laporan data hasil survey dan analisis harga pasokan dan akses pangan	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH) mencapai; dan tingkat tingkat konsumsi ikan.		88 %	5 laporan	88 %	15,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH) mencapai; dan tingkat tingkat konsumsi ikan.	88 %	15,000,000
2 09 03 2.01 06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH) mencapai; dan tingkat tingkat konsumsi ikan.	Jumlah kelompok P2L/KRPL yang dibina	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH) mencapai; dan tingkat tingkat konsumsi ikan.		88 %	9 kelompok	88 %	110,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH) mencapai; dan tingkat tingkat konsumsi ikan.	88 %	110,000,000
2 09 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi								260,000,000				260,000,000	
2 09 03 2.04 01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan	Jumlah laporan penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan		88 %	5 Laporan	88 %	10,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan	88 %	10,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		(PPH) mencapai; dan tingkat tingkat konsumsi ikan.	perkapita per tahun	(PPH) mencapai; dan tingkat tingkat konsumsi ikan.								(PPH) mencapai; dan tingkat tingkat konsumsi ikan.		
2 09 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH) mencapai; dan tingkat tingkat konsumsi ikan.	Jumlah gelar pangan yang diikuti	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH) mencapai; dan tingkat tingkat konsumsi ikan.		88 %	1 kali	88 %	250,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH) mencapai; dan tingkat tingkat konsumsi ikan.	88 %	250,000,000
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN								38,000,000					38,000,000
2 09 04 2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan								10,000,000					10,000,000
2 09 04 2.01 01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Persentase pengadaan cadangan pangan	Jumlah laporan dan peta ketahanan dan kerentanan pangan	Persentase pengadaan cadangan pangan		100 %	1 peta	100 %	10,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengadaan cadangan pangan	100 %	10,000,000
2 09 04 2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota								28,000,000					28,000,000
2 09 04 2.02 02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengadaan cadangan pangan	Jumlah pengadaan cadangan pangan	Persentase pengadaan cadangan pangan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 ton	100 %	28,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengadaan cadangan pangan	100 %	28,000,000
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN								150,000,000					150,000,000
2 09 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota								150,000,000					150,000,000
2 09 05 2.01 01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	Jumlah laporan hasil pengawasan	Persentase pangan yang aman dikonsumsi		85 %	4 laporan	85 %	100,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pangan yang aman dikonsumsi	85 %	100,000,000
2 09 05 2.01 04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	Jumlah pelaksanaan uji mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan yang aman dikonsumsi		85 %	3 kali	85 %	50,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pangan yang aman dikonsumsi	85 %	50,000,000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								1,904,600,500					2,740,375,500
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								455,000,000					455,000,000
3 27 02 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian								60,000,000					60,000,000
3 27 02 2.01 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi	Produktifitas pertanian per hektar per tahun	jumlah laporanhasil monitoring evaluasi pelaporan kebijakan subsidi pertanian	produktifitas pertanian per hektar per tahun		90 %	1 laporan	90 %	60,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Produktifitas pertanian per hektar per tahun	90 %	60,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	dan Spesifik Lokasi													
3 27 02 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota								60,000,000				60,000,000	
3 27 02 2.02 01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Produktifitas pertanian per hektar per tahun	jumlah petugas dan penangkar yang kompeten	produktifitas pertanian per hektar per tahun		90 %	5 orang	90 %	60,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Produktifitas pertanian per hektar per tahun	90 %	60,000,000
3 27 02 2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota								45,000,000				45,000,000	
3 27 02 2.03 01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan /Tanaman Skala Kecil	Produktifitas pertanian per hektar per tahun	jumlah laporan data pengawasan mutu benih/bibit ternak bahan pakan/pakan /tanaman skala kecil	produktifitas pertanian per hektar per tahun		90 %	2 dokumen	90 %	45,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Produktifitas pertanian per hektar per tahun	90 %	45,000,000
3 27 02 2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota								290,000,000				290,000,000	
3 27 02 2.05 03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Produktifitas pertanian per hektar per tahun	jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	produktifitas pertanian per hektar per tahun		90 %	40 hewan	90 %	40,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Produktifitas pertanian per hektar per tahun	90 %	40,000,000
3 27 02 2.05 05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Produktifitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah ketersediaan bibit dan hijauan pakan ternak	produktifitas pertanian per hektar per tahun		90 %	40 ton	90 %	250,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Produktifitas pertanian per hektar per tahun	90 %	250,000,000
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								569,225,000				1,405,000,000	
3 27 03 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian								509,225,000				525,000,000	
3 27 03 2.01 01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian ; Nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja disektor pertanian (rupiah per tenaga kerja) (2.3.1*)	jumlah lahan kelompok tani yang diolah	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian ; Nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja disektor pertanian (rupiah per tenaga kerja) (2.3.1*)		65 % ; 62,85 %	11 ha	65 %	484,225,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian ; Nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja disektor pertanian (rupiah per tenaga kerja) (2.3.1*)	65 % ; 62,85 %	500,000,000
3 27 03 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian ; Nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja disektor pertanian (rupiah per tenaga kerja) (2.3.1*)	jumlah dokumen regulasi yang disusun	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian ; Nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja disektor pertanian (rupiah per tenaga kerja) (2.3.1*)		65 % ; 62,85 %	1 dokumen	65 %	25,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian ; Nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja disektor pertanian (rupiah per tenaga kerja) (2.3.1*)	65 % ; 62,85 %	25,000,000
3 27 03 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian								30,000,000				850,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 27 03 2.02 09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian ; Nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja disektor pertanian (rupiah per tenaga kerja) (2.3.1*)	jumlah bangunan yang dipelihara	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian ; Nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja disektor pertanian (rupiah per tenaga kerja) (2.3.1*)		65 % ; 62,85 %	1 unit	65 %	30,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian ; Nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja disektor pertanian (rupiah per tenaga kerja) (2.3.1*)	65 % ; 62,85 %	850,000,000
3 27 03 2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota								30,000,000					30,000,000
3 27 03 2.03 02	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian ; Nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja disektor pertanian (rupiah per tenaga kerja) (2.3.1*)	jumlah sarana prasarana peternakan yang diadakan	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian ; Nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja disektor pertanian (rupiah per tenaga kerja) (2.3.1*)		65 % ; 62,85 %	1 paket	65 %	30,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian ; Nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja disektor pertanian (rupiah per tenaga kerja) (2.3.1*)	65 % ; 62,85 %	30,000,000
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER								623,300,000					623,300,000
3 27 04 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota								40,000,000					40,000,000
3 27 04 2.01 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase pelayanan kesehatan hewan	jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Persentase pelayanan kesehatan hewan		100 %	2 jenis	100 %	40,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan kesehatan hewan	100 %	40,000,000
3 27 04 2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota								178,000,000					178,000,000
3 27 04 2.03 02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Persentase pelayanan kesehatan hewan	jumlah PAD pelayanan kesehatan hewan	Persentase pelayanan kesehatan hewan		100 %	150000000 Rupiah	100 %	178,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan kesehatan hewan	100 %	178,000,000
3 27 04 2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner								405,300,000					405,300,000
3 27 04 2.04 01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Persentase pelayanan kesehatan hewan	Jumlah pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan	Persentase pelayanan kesehatan hewan		100 %	550 layanan	100 %	25,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan kesehatan hewan	100 %	25,000,000
3 27 04 2.04 02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Persentase pelayanan kesehatan hewan	Jumlah PAD retribusi jasa usaha rumah potong hewan	Persentase pelayanan kesehatan hewan		100 %	320000000 Rupiah	100 %	380,300,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan kesehatan hewan	100 %	380,300,000
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN								30,000,000					30,000,000
3 27 05 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota								30,000,000					30,000,000
3 27 05 2.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	jumlah kecamatan yang diawasi dan dilindungi	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		100 %	7 kecamatan	100 %	30,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	100 %	30,000,000
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN								227,075,500					227,075,500
3 27 07 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian								227,075,500					227,075,500

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 27 07 2.01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Persentase penyuluhan pertanian	jumlah THL/TBPP yang mendapat peningkatan kesejahteraan	PERSENTASE PENYULUHAN PERTANIAN		100 %	9 orang	100 %	192,075,500	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyuluhan pertanian	100 %	192,075,500
3 27 07 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Persentase penyuluhan pertanian	jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	PERSENTASE PENYULUHAN PERTANIAN		100 %	1000 Kelompok Tani	100 %	35,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyuluhan pertanian	100 %	35,000,000
TOTAL									9,322,971,000				9,551,994,465	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								11,413,247,000			12,625,368,000		
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4,578,247,000			4,808,368,000		
3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								48,000,000			50,000,000		
3	26	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen Renstra/Renja	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 dokumen	100 %	10,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	10,000,000
3	26	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen RKA- SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	8,000,000			Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	10,000,000
3	26	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen LKPJ, LPPD dn LKPJ Akhir Masa Jabatan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 dokumen	100 %	15,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	15,000,000
3	26	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen SPIP, LAKIP dan RB	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 dokumen	100 %	15,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	15,000,000
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,248,247,000			3,328,368,000		
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	34 orang	100 %	3,238,247,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,318,368,000
3	26	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 laporan	100 %	5,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,000,000
3	26	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 laporan	100 %	5,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,000,000
3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								110,000,000			110,000,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 26 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah pakaian yang diadakan	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	65 stel	100 %	60,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	60,000,000
3 26 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 orang	100 %	50,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	50,000,000
3 26 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								338,427,000					474,427,000
3 26 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 jenis	100 %	5,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	7,500,000
3 26 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	19 unit	100 %	103,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	134,000,000
3 26 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 unit/ set	100 %	7,500,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	60,000,000
3 26 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 jenis	100 %	26,785,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	26,785,000
3 26 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 jenis	100 %	16,142,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	16,142,000
3 26 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 kali	100 %	180,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	230,000,000
3 26 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								50,000,000					50,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 26 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah meubeler yang diadakan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	45 unit	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	50,000,000
3 26 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								500,000,000					510,573,000
3 26 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah jasa yang tersedia	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 jenis	100 %	170,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	180,573,000
3 26 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	61 unit/set	100 %	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	30,000,000
3 26 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	63 orang	100 %	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	300,000,000
3 26 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								283,573,000					285,000,000
3 26 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 unit	100 %	83,573,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	85,000,000
3 26 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 unit	100 %	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	200,000,000
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA								5,035,000,000					5,175,000,000
3 26 02 2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota								20,000,000					25,000,000
3 26 02 2.01 01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	(8.9.1*) proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (PDRB selaku kewenangan Kota Pangkalpinang) ; Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	(8.9.1*) proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (PDRB selaku kewenangan Kota Pangkalpinang) ; Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,35 % ; 10 %	20 dtw	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		(8.9.1*) proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (PDRB selaku kewenangan Kota Pangkalpinang) ; Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	5,35 % ; 10 %	25,000,000
3 26 02 2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								75,000,000					0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022														
Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA														
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 26 02 2.02 02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	(8.9.1*) proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (PDRB selaku kewenangan Kota Pangkalpinang) ; Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Jumlah dokumen pengembangan pariwisata	(8.9.1*) proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (PDRB selaku kewenangan Kota Pangkalpinang) ; Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,35 % ; 10 %	1 dokumen	100 %	65,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		(8.9.1*) proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (PDRB selaku kewenangan Kota Pangkalpinang) ; Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	5,35 % ; 10 %	0
3 26 02 2.02 05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	(8.9.1*) proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (PDRB selaku kewenangan Kota Pangkalpinang) ; Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Jumlah kawasan yang dimonitoring dan di evaluasi	(8.9.1*) proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (PDRB selaku kewenangan Kota Pangkalpinang) ; Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,35 % ; 10 %	1 kawasan	100 %	10,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		(8.9.1*) proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (PDRB selaku kewenangan Kota Pangkalpinang) ; Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	5,35 % ; 10 %	0
3 26 02 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								4,920,000,000				5,125,000,000	
3 26 02 2.03 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	(8.9.1*) proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (PDRB selaku kewenangan Kota Pangkalpinang) ; Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	(8.9.1*) proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (PDRB selaku kewenangan Kota Pangkalpinang) ; Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,35 % ; 10 %	1 destinasi	100 %	4,905,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		(8.9.1*) proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (PDRB selaku kewenangan Kota Pangkalpinang) ; Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	5,35 % ; 10 %	5,105,000,000
3 26 02 2.03 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	(8.9.1*) proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (PDRB selaku kewenangan Kota Pangkalpinang) ; Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan/sosialisasi/ lomba	(8.9.1*) proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (PDRB selaku kewenangan Kota Pangkalpinang) ; Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,35 % ; 10 %	10 orang	100 %	15,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		(8.9.1*) proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (PDRB selaku kewenangan Kota Pangkalpinang) ; Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	5,35 % ; 10 %	20,000,000
3 26 02 2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota								20,000,000				25,000,000	
3 26 02 2.04 04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	(8.9.1*) proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (PDRB selaku kewenangan Kota Pangkalpinang) ; Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Jumlah industri usaha pariwisata yang mendapat pembinaan dan pengawasan	(8.9.1*) proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (PDRB selaku kewenangan Kota Pangkalpinang) ; Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,35 % ; 10 %	13 industri pariwisata	100 %	20,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		(8.9.1*) proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (PDRB selaku kewenangan Kota Pangkalpinang) ; Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	5,35 % ; 10 %	25,000,000
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA								1,250,000,000				1,832,300,000	
3 26 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								1,250,000,000				1,832,300,000	
3 26 03 2.01 01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	(8.9.1.(a)) Jumlah wisatawan mancanegara ; (8.9.1.(b)) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ; Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan ; Tingkat hunian akomodasi	Jumlah jenis media promosi	(8.9.1.(a)) Jumlah wisatawan mancanegara ; (8.9.1.(b)) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ; Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan ; Tingkat hunian akomodasi	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	343 orang ; 161.370 orang ; 10 % ; 50 %	4 jenis	100 %	635,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		(8.9.1.(a)) Jumlah wisatawan mancanegara ; (8.9.1.(b)) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ; Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan ; Tingkat hunian akomodasi	343 orang ; 161.370 orang ; 10 % ; 50 %	700,000,000
3 26 03 2.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata	(8.9.1.(a)) Jumlah wisatawan mancanegara	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana	(8.9.1.(a)) Jumlah wisatawan mancanegara	Kota Pangkal Pinang,	343 orang ; 161.370	3 event	100 %	200,000,000	PENDAPAT AN ASLI		(8.9.1.(a)) Jumlah wisatawan mancanegara	343 orang ; 161.370	662,300,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	; (8.9.1.(b)) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ; Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan ; Tingkat hunian akomodasi	di dalam negeri	; (8.9.1.(b)) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ; Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan ; Tingkat hunian akomodasi	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	orang ; 10 % ; 50 %				DAERAH (PAD)		; (8.9.1.(b)) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ; Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan ; Tingkat hunian akomodasi	orang ; 10 % ; 50 %	
3 26 03 2.01 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	(8.9.1.(a)) Jumlah wisatawan mancanegara ; (8.9.1.(b)) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ; Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan ; Tingkat hunian akomodasi	Jumlah dokumen pengembangan pariwisata	(8.9.1.(a)) Jumlah wisatawan mancanegara ; (8.9.1.(b)) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ; Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan ; Tingkat hunian akomodasi	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	343 orang ; 161.370 orang ; 10 % ; 50 %	1 dokumen	100 %	30,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		(8.9.1.(a)) Jumlah wisatawan mancanegara ; (8.9.1.(b)) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ; Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan ; Tingkat hunian akomodasi	343 orang ; 161.370 orang ; 10 % ; 50 %	35,000,000
3 26 03 2.01 04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	(8.9.1.(a)) Jumlah wisatawan mancanegara ; (8.9.1.(b)) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ; Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan ; Tingkat hunian akomodasi	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	(8.9.1.(a)) Jumlah wisatawan mancanegara ; (8.9.1.(b)) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ; Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan ; Tingkat hunian akomodasi	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	343 orang ; 161.370 orang ; 10 % ; 50 %	25 industri pariwisata	100 %	350,000,000			(8.9.1.(a)) Jumlah wisatawan mancanegara ; (8.9.1.(b)) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ; Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan ; Tingkat hunian akomodasi	343 orang ; 161.370 orang ; 10 % ; 50 %	400,000,000
3 26 03 2.01 05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	(8.9.1.(a)) Jumlah wisatawan mancanegara ; (8.9.1.(b)) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ; Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan ; Tingkat hunian akomodasi	Jumlah monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata	(8.9.1.(a)) Jumlah wisatawan mancanegara ; (8.9.1.(b)) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ; Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan ; Tingkat hunian akomodasi	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	343 orang ; 161.370 orang ; 10 % ; 50 %	2 kali	100 %	35,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		(8.9.1.(a)) Jumlah wisatawan mancanegara ; (8.9.1.(b)) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ; Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan ; Tingkat hunian akomodasi	343 orang ; 161.370 orang ; 10 % ; 50 %	35,000,000
3 26 04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL								390,000,000					519,700,000
3 26 04 2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif								390,000,000					519,700,000
3 26 04 2.02 06	Pemberian Insentif	Persentase jumlah pengembangan ekonomi kreatif	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Persentase jumlah pengembangan ekonomi kreatif	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 %	10 lokasi	35 %	160,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah pengembangan ekonomi kreatif	35 %	280,000,000
3 26 04 2.02 07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Persentase jumlah pengembangan ekonomi kreatif	Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Persentase jumlah pengembangan ekonomi kreatif	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 %	100 orang	35 %	153,300,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah pengembangan ekonomi kreatif	35 %	160,000,000
3 26 04 2.02 10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase jumlah pengembangan ekonomi kreatif	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase jumlah pengembangan ekonomi kreatif	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 %	12 kali	35 %	76,700,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah pengembangan ekonomi kreatif	35 %	79,700,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								160,000,000					290,000,000
3 26 05 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar								100,000,000					220,000,000
3 26 05 2.01 02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	(8.9.2*) Jumlah pekeerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja ; Persentase jumlah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	(8.9.2*) Jumlah pekeerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja ; Persentase jumlah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,59 % ; 35 %	1 lokasi	100 %	50,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		(8.9.2*) Jumlah pekeerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja ; Persentase jumlah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf	11,59 % ; 35 %	70,000,000
3 26 05 2.01 05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	(8.9.2*) Jumlah pekeerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja ; Persentase jumlah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf	Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	(8.9.2*) Jumlah pekeerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja ; Persentase jumlah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,59 % ; 35 %	20 orang	100 %	50,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		(8.9.2*) Jumlah pekeerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja ; Persentase jumlah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf	11,59 % ; 35 %	150,000,000
3 26 05 2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif								60,000,000					70,000,000
3 26 05 2.02 02	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	(8.9.2*) Jumlah pekeerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja ; Persentase jumlah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf	Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	(8.9.2*) Jumlah pekeerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja ; Persentase jumlah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,59 % ; 35 %	40 orang	100 %	60,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		(8.9.2*) Jumlah pekeerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja ; Persentase jumlah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf	11,59 % ; 35 %	70,000,000
TOTAL									11,413,247,000					12,625,368,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022																				
Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												120,080,434,000		89,202,770,430	
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												10,446,905,400		8,676,554,343	
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												10,000,000		10,000,000	
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen Renstra/Renja	Presentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 dokumen	100 %	5,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,000,000		
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Presentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 dokumen	100 %	5,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,000,000		
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												5,212,970,400		5,343,049,660	
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Presentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 orang	100 %	5,202,970,400	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,333,049,660		
1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Presentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 dokumen	100 %	5,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,000,000		
1	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran SKPD	Presentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 dokumen	100 %	5,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,000,000		
1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												150,000,000		100,000,000	
1	03	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BMD OPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	150,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	100,000,000		
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												200,000,000		150,000,000	
1	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua	100 %	160 stel	100 %	200,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	150,000,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kelurahan									
1 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								723,935,000			733,935,000		
1 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 jenis	100 %	5,300,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	5,300,000
1 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 jenis	100 %	300,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	250,000,000
1 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah waktu tersedianya logistik kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	75,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	85,000,000
1 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 jenis	100 %	25,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	25,000,000
1 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 kali	100 %	250,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	300,000,000
1 03 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah arsip dinamis yang ditata	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 berkas	100 %	68,635,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	68,635,000
1 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								3,000,000,000			1,500,000,000		
1 03 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 unit	100 %	1,000,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	1,500,000,000
1 03 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua	100 %	0 unit	100 %	2,000,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kelurahan									
1 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								850,000,000					839,569,683
1 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 orang	100 %	300,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	289,569,683
1 03 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 unit/set	100 %	50,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	50,000,000
1 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah waktu penyediaan jasa Pelayanan Umum	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 bulan	100 %	500,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	500,000,000
1 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								300,000,000					0
1 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 unit	100 %	100,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 unit	100 %	200,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								8,450,000,000					15,350,000,000
1 03 02 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								8,450,000,000					15,350,000,000
1 03 02 2.01 03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota ; Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS	Jumlah dokumen rencana teknis dan konstruksi drainase utama perkotaan	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota ; Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	2 dokumen	0 0	800,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota ; Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS	0	100,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022													
Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		kewenangan kab/kota		kewenangan kab/kota							kewenangan kab/kota		
1 03 02 2.01 04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota ; Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan SDA di kota pangkalpinang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota ; Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	3 dokumen	0 0	350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	650,000,000
1 03 02 2.01 09	Pembangunan Tanggul Sungai	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota ; Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota	Jumlah Tanggul Sungai yang dibangun	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota ; Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	7 unit	0 0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	0
1 03 02 2.01 11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota ; Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota	Jumlah pintu air / bendung pengendali banjir yang dibangun	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota ; Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	1 unit	0 0	800,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	800,000,000
1 03 02 2.01 13	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota ; Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan	Jumlah stasiun pompa banjir yang dibangun	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota ; Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	2 unit	0 0	4,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	2,000,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022												
Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target
		abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota		abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota							abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota	
1 03 02 2.01 14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota ; Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota	Jumlah polder/kolam retensi yang dibangun	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota ; Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	1 kolam	0 0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota ; Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota	0
1 03 02 2.01 24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota ; Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota	Jumlah tanggul sungai yang direhabilitasi	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota ; Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	1 unit	0 0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota ; Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota	0
1 03 02 2.01 49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota ; Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota	Jumlah waduk yang dipelihara	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota ; Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	1 waduk	0 0	2,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota ; Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota	0
1 03 02 2.01 62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di	Terlaksananya Rakomtek	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua	0	1 hari	0 0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022														
Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Kabupaten/Kota	WS kewenangan Kab/Kota ; Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota		WS kewenangan Kab/Kota ; Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota	Kelurahan							WS kewenangan Kab/Kota ; Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota		
1 03 02 2.01 63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota ; Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota	Terbentuknya Tim Koordinasi Pengelolaan SDA di Kota Pangkapinang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota ; Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	1 tim	0 0	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota ; Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota	0	200,000,000
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								500,000,000				5,325,000,000	
1 03 03 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota								500,000,000				5,325,000,000	
1 03 03 2.01 03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kab/kota ; Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (6.1.1.(a)) ; Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau (6.1.1.(b)) ; Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan (6.1.1.(c))	Jumlah Unit Jaringan Pipa Distribusi Yang di Pasang	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan (6.1.1.(c));Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau (6.1.1.(b));Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (6.1.1.(a));Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98% ; 98% ; 115,5 ltr/detik ; 56,46%	8 unit	100 %	500,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kab/kota ; Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (6.1.1.(a)) ; Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau (6.1.1.(b)) ; Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan (6.1.1.(c))	98% ; 98% ; 115,5 ltr/detik ; 56,46%	5,325,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								900,000,000			0		
1 03 05 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota								900,000,000			0		
1 03 05 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik ; Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. (6.2.1.(b)) ; Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). (6.2.1 (c))	-	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik ; Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. (6.2.1.(b)) ; Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). (6.2.1 (c))	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 ; 100% ; 42 kelurahan (100 %)	0 -	100 %	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik ; Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. (6.2.1.(b)) ; Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). (6.2.1 (c))	0 ; 100% ; 42 kelurahan (100 %)	0
1 03 05 2.01 15	Pembangunan/Perbaikan Sarana dan Prasarana IPLT	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik ; Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. (6.2.1.(b)) ; Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). (6.2.1 (c))	-	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik ; Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. (6.2.1.(b)) ; Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). (6.2.1 (c))	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 ; 100% ; 42 kelurahan (100 %)	0 -	100 %	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik ; Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. (6.2.1.(b)) ; Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). (6.2.1 (c))	0 ; 100% ; 42 kelurahan (100 %)	0
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE								19,019,278,600			13,103,793,814		
1 03 06 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota								19,019,278,600			13,103,793,814		
1 03 06 2.01 02	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Tingkat Kemantapan Sistem Drainase	Jumlah dokumen outline plan kawasan genangan di kota pangkalpinang	Tingkat Kemantapan Sistem Drainase	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	2 dokumen	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kemantapan Sistem Drainase	0	200,000,000
1 03 06 2.01 05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Tingkat Kemantapan Sistem Drainase	Jumlah kecamatan yang dibangun sistem drainase	Tingkat Kemantapan Sistem Drainase	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	7 kecamatan	100 %	10,517,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kemantapan Sistem Drainase	0	8,403,793,814
1 03 06 2.01 07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Tingkat Kemantapan Sistem Drainase	Jumlah kecamatan	Tingkat Kemantapan Sistem Drainase	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	7 kecamatan	100 %	7,045,384,209	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kemantapan Sistem Drainase	0	4,000,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 03 06 2.01 08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Tingkat Kemantapan Sistem Drainase	Jumlah unit sarana sistem drainase perkotaan yang dibangun	Tingkat Kemantapan Sistem Drainase	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	5 unit	100 %	1,456,894,391	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kemantapan Sistem Drainase	0	500,000,000
1 03 07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN								4,167,364,926					700,000,000
1 03 07 2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota								4,167,364,926					700,000,000
1 03 07 2.01 01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Paket Inpeksi Jalan Inspeksi Yang di Bangun		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket		4,167,364,926	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				700,000,000
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG								60,932,635,074					9,472,161,178
1 03 08 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung								60,932,635,074					9,472,161,178
1 03 08 2.01 01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Rasio Kepatuhan IMB kab/Kota	-	Rasio Kepatuhan IMB kab/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0 -	100 %	150,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Kepatuhan IMB kab/Kota	0	300,000,000
1 03 08 2.01 02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Kepatuhan IMB kab/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan	Rasio Kepatuhan IMB kab/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	5 dokumen	100 %	59,012,635,074	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Kepatuhan IMB kab/Kota	0	4,497,161,178
1 03 08 2.01 04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Kepatuhan IMB kab/Kota	-	Rasio Kepatuhan IMB kab/Kota		0	0 -	100 %	100,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Kepatuhan IMB kab/Kota	0	150,000,000
1 03 08 2.01 09	Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Rasio Kepatuhan IMB kab/Kota	jumlah lokasi yang dilakukan penilikan	Rasio Kepatuhan IMB kab/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	50 lokasi	100 %	50,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Kepatuhan IMB kab/Kota	0	0
1 03 08 2.01 12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan IMB kab/Kota	Jumlah Bangunan yang di rehabilitasi	Rasio Kepatuhan IMB kab/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua	0	5 unit	100 %	1,620,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH		Rasio Kepatuhan IMB kab/Kota	0	4,525,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				Kecamatan, Semua Kelurahan					(PAD)				
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								13,764,250,000				34,675,261,092	
1 03 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota								13,764,250,000				34,675,261,092	
1 03 10 2.01 05	Pembangunan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dibangun	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94,90 %	6.67 km	94.90 %	6,359,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	94,90 %	5,000,000,000
1 03 10 2.01 08	Rekonstruksi Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang di rekonstruksi	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94,90 %	6.4 km	94.90 %	3,677,750,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	94,90 %	20,731,140,000
1 03 10 2.01 10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang di lakukan pemeliharaan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94,90 %	2.75 km	94.90 %	627,500,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	94,90 %	7,194,121,092
1 03 10 2.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan rutin	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94,90 %	2.5 kilometer	94.90 %	3,000,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	94,90 %	1,750,000,000
1 03 10 2.01 12	Pembangunan Jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah unit jembatan yang dibangun	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94,90 %	1 unit	94.90 %	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	94,90 %	0
1 03 10 2.01 23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengawasan teknis yang disusun	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94,90 %	1 -	94.90 %	100,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	94,90 %	0
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI								200,000,000				100,000,000	
1 03 11 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi								200,000,000				100,000,000	
1 03 11 2.01 06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi Yang Mempunyai Sertifikat	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0 orang	0 0	200,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0	100,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022														
Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG								1,700,000,000				1,800,000,003	
1 03 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota								680,229,983				682,565,582	
1 03 12 2.01 03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase Terpenuhinya peran tata ruang dan pertanahan ; Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan ; Jumlah Dokumen yang tersusun ; Jumlah Aplikasi Yang Dihasilkan	Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan	Persentase Terpenuhinya peran tata ruang dan pertanahan ; Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan ; Jumlah Dokumen yang tersusun ; Jumlah Aplikasi Yang Dihasilkan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % ; 4000 orang ; 5 dokumen ; 1 Aplikasi	1 dokumen	100 %	304,229,992	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhinya peran tata ruang dan pertanahan ; Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan ; Jumlah Dokumen yang tersusun ; Jumlah Aplikasi Yang Dihasilkan	100 % ; 4000 orang ; 5 dokumen ; 1 Aplikasi	305,397,791
1 03 12 2.01 04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Persentase Terpenuhinya peran tata ruang dan pertanahan ; Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan ; Jumlah Dokumen yang tersusun ; Jumlah Aplikasi Yang Dihasilkan	Jumlah Peserta Sosialisasi	Persentase Terpenuhinya peran tata ruang dan pertanahan ; Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan ; Jumlah Dokumen yang tersusun ; Jumlah Aplikasi Yang Dihasilkan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % ; 4000 orang ; 5 dokumen ; 1 Aplikasi	3000 orang	100 %	375,999,991	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhinya peran tata ruang dan pertanahan ; Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan ; Jumlah Dokumen yang tersusun ; Jumlah Aplikasi Yang Dihasilkan	100 % ; 4000 orang ; 5 dokumen ; 1 Aplikasi	377,167,791
1 03 12 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota								490,337,553				583,330,757	
1 03 12 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya peran tata ruang dan pertanahan ; Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan ; Jumlah Dokumen yang tersusun ; Jumlah Aplikasi Yang Dihasilkan	Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan	Persentase Terpenuhinya peran tata ruang dan pertanahan ; Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan ; Jumlah Dokumen yang tersusun ; Jumlah Aplikasi Yang Dihasilkan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % ; 4000 orang ; 5 dokumen ; 1 Aplikasi	1 dokumen	100 %	369,467,562	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhinya peran tata ruang dan pertanahan ; Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan ; Jumlah Dokumen yang tersusun ; Jumlah Aplikasi Yang Dihasilkan	100 % ; 4000 orang ; 5 dokumen ; 1 Aplikasi	461,292,966
1 03 12 2.02 03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Persentase Terpenuhinya peran tata ruang dan pertanahan ; Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan ; Jumlah Dokumen yang tersusun ; Jumlah Aplikasi Yang Dihasilkan	Jumlah Peserta	Persentase Terpenuhinya peran tata ruang dan pertanahan ; Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan ; Jumlah Dokumen yang tersusun ; Jumlah Aplikasi Yang Dihasilkan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % ; 4000 orang ; 5 dokumen ; 1 Aplikasi	1000 orang	100 %	120,869,991	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhinya peran tata ruang dan pertanahan ; Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan ; Jumlah Dokumen yang tersusun ; Jumlah Aplikasi Yang Dihasilkan	100 % ; 4000 orang ; 5 dokumen ; 1 Aplikasi	122,037,791
1 03 12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota								189,372,482				191,708,082	
1 03 12 2.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Persentase Terpenuhinya peran tata ruang dan pertanahan ; Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan ; Jumlah Dokumen yang tersusun ; Jumlah Aplikasi Yang Dihasilkan	Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan	Persentase Terpenuhinya peran tata ruang dan pertanahan ; Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan ; Jumlah Dokumen yang tersusun ; Jumlah Aplikasi Yang Dihasilkan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % ; 4000 orang ; 5 dokumen ; 1 Aplikasi	1 dokumen	100 %	122,129,991	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhinya peran tata ruang dan pertanahan ; Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan ; Jumlah Dokumen yang tersusun ; Jumlah Aplikasi Yang Dihasilkan	100 % ; 4000 orang ; 5 dokumen ; 1 Aplikasi	123,297,791
1 03 12 2.03 02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Persentase Terpenuhinya peran tata ruang dan pertanahan ; Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan ; Jumlah Dokumen yang	Jumlah Aplikasi Yang Dihasilkan	Persentase Terpenuhinya peran tata ruang dan pertanahan ; Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan ; Jumlah Dokumen yang	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % ; 4000 orang ; 5 dokumen ; 1 Aplikasi	1 aplikasi	100 %	67,242,491	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhinya peran tata ruang dan pertanahan ; Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan ; Jumlah Dokumen yang	100 % ; 4000 orang ; 5 dokumen ; 1 Aplikasi	68,410,291

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022														
Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		tersusun ; Jumlah Aplikasi Yang Dihasilkan		tersusun ; Jumlah Aplikasi Yang Dihasilkan								tersusun ; Jumlah Aplikasi Yang Dihasilkan		
1 03 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota								340,059,982				342,395,582	
1 03 12 2.04 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Persentase Terpenuhinya peran tata ruang dan pertanahan ; Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan ; Jumlah Dokumen yang tersusun ; Jumlah Aplikasi Yang Dihasilkan	Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan	Persentase Terpenuhinya peran tata ruang dan pertanahan ; Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan ; Jumlah Dokumen yang tersusun ; Jumlah Aplikasi Yang Dihasilkan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % ; 4000 orang ; 5 dokumen ; 1 Aplikasi	1 dokumen	100 %	102,429,991	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhinya peran tata ruang dan pertanahan ; Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan ; Jumlah Dokumen yang tersusun ; Jumlah Aplikasi Yang Dihasilkan	100 % ; 4000 orang ; 5 dokumen ; 1 Aplikasi	103,597,791
1 03 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase Terpenuhinya peran tata ruang dan pertanahan ; Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan ; Jumlah Dokumen yang tersusun ; Jumlah Aplikasi Yang Dihasilkan	Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan	Persentase Terpenuhinya peran tata ruang dan pertanahan ; Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan ; Jumlah Dokumen yang tersusun ; Jumlah Aplikasi Yang Dihasilkan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % ; 4000 orang ; 5 dokumen ; 1 Aplikasi	1 dokumen	100 %	237,629,991	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhinya peran tata ruang dan pertanahan ; Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan ; Jumlah Dokumen yang tersusun ; Jumlah Aplikasi Yang Dihasilkan	100 % ; 4000 orang ; 5 dokumen ; 1 Aplikasi	238,797,791
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								30,150,000,000				20,975,000,000	
2 10 02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI								75,000,000				75,000,000	
2 10 02 2.01	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								75,000,000				75,000,000	
2 10 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Persentase izin lokasi yan sesuai dengan RTRW	jumlah perizinan yang diawasi	Persentase izin lokasi yan sesuai dengan RTRW	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 dokumen	100 %	75,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase izin lokasi yan sesuai dengan RTRW	100 %	75,000,000
2 10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN								300,000,000				350,000,000	
2 10 04 2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota								300,000,000				350,000,000	
2 10 04 2.01 01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian sengketa tanah	Jumlah data konflik tanah antara Pemerintah Kota dengan masyarakat.	Persentase penyelesaian sengketa tanah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 data	100 %	150,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelesaian sengketa tanah	100 %	175,000,000
2 10 04 2.01 02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian sengketa tanah	Jumlah konflik tanah antara Pemerintah Kota dengan Masyarakat.	Persentase penyelesaian sengketa tanah		100 %	3 kasus	100 %	150,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelesaian sengketa tanah	100 %	175,000,000
2 10 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN								28,675,000,000				17,300,000,000	
2 10 05 2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								28,675,000,000				17,300,000,000	
2 10 05 2.01 01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah	Persentase ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Jumlah lahan tanah aset Pemerintah Kota untuk Pembangunan	Persentase ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan,	100 %	3 lahan	100 %	28,675,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100 %	16,700,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
	Kabupaten/Kota				Semua Kelurahan								
2 10 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Jumlah luasan tanah dan asset yang diamankan	Persentase ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 lahan	100 %	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100 %	600,000,000
2 10 06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE									350,000,000			400,000,000
2 10 06 2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									350,000,000			400,000,000
2 10 06 2.01 01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Persentase redistribusi tanah, serta ganti kerugian program program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Jumlah subyek dan obyek redistribusi tanah.	Persentase redistribusi tanah, serta ganti kerugian program program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 objek	100 %	100,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase redistribusi tanah, serta ganti kerugian program program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100 %	100,000,000
2 10 06 2.01 02	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Persentase redistribusi tanah, serta ganti kerugian program program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Jumlah subyek dan obyek serta rekomendasi obyek redistribusi tanah.	Persentase redistribusi tanah, serta ganti kerugian program program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 objek	100 %	100,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase redistribusi tanah, serta ganti kerugian program program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100 %	100,000,000
2 10 06 2.01 03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase redistribusi tanah, serta ganti kerugian program program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Jumlah objek lahan pelaksanaan kegiatan redistribusi TORA.	Persentase redistribusi tanah, serta ganti kerugian program program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 objek	100 %	75,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase redistribusi tanah, serta ganti kerugian program program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100 %	100,000,000
2 10 06 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase redistribusi tanah, serta ganti kerugian program program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Jumlah objek pemanfaatan redistribusi tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.	Persentase redistribusi tanah, serta ganti kerugian program program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 objek	100 %	75,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase redistribusi tanah, serta ganti kerugian program program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100 %	100,000,000
2 10 08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG									450,000,000			2,500,000,000
2 10 08 2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong									0			2,100,000,000
2 10 08 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kegiatan		0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			2,100,000,000
2 10 08 2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong									450,000,000			400,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 10 08 2.02 01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong		Jumlah objek tanah kosong milik Pemerintah Kota yang di data dan diukur		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 objek		350,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				300,000,000
2 10 08 2.02 02	Pemanfaatan Tanah Kosong		Jumlah rekomendasi atau pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kota yang dikeluarkan		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 objek		100,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
2 10 09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH								150,000,000					150,000,000
2 10 09 2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah								150,000,000					150,000,000
2 10 09 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	terdatanya pengelolaan izin membuka tanah	Jumlah dokumen pemberian izin dalam rangka membuka tanah.	terdatanya pengelolaan izin membuka tanah		100 %	0 dokumen	100 %	50,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		terdatanya pengelolaan izin membuka tanah	100 %	50,000,000
2 10 09 2.01 02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	terdatanya pengelolaan izin membuka tanah	Jumlah dokumen rekomendasi pemanfaatan tanah negara.	terdatanya pengelolaan izin membuka tanah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 dokumen	100 %	100,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		terdatanya pengelolaan izin membuka tanah	100 %	100,000,000
2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH								150,000,000					200,000,000
2 10 10 2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota								150,000,000					200,000,000
2 10 10 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Persentase.....	Jumlah Perda yang dihasilkan	Persentase.....	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 perda	100 %	75,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase.....	100 %	100,000,000
2 10 10 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Persentase.....	Jumlah obyek-obyek yang akan dilaksanakan konsolidasi tanah.	Persentase.....	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 objek	100 %	75,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase.....	100 %	100,000,000
TOTAL									150,230,434,000					110,177,770,430

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								5,365,846,000				6,112,935,822	
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4,524,976,000				4,814,550,233	
2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								14,000,000				17,500,000	
2	08	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen renstra/renja	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	2 dokumen	100 %	2,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,500,000
2	08	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen RKA- SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	1 dokumen	100 %	2,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,500,000
2	08	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	1 dokumen	100 %	2,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,500,000
2	08	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen DPA- SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	1 dokumen	100 %	2,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,500,000
2	08	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	1 dokumen	100 %	2,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,500,000
2	08	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen LKPJ, LKPJ AMJ, LPPD yang disusun	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	2 dokumen	100 %	2,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,500,000
2	08	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen LAKIP	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	1 dokumen	100 %	2,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,500,000
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,615,536,000				3,719,390,233	
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	35 Orang	100 %	3,607,536,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,709,390,233
2	08	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	1 Laporan	100 %	2,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,500,000
2	08	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	1 dokumen	100 %	2,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,500,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 08 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulan /semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	1 Laporan	100 %	2,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,500,000
2 08 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis realisasi anggaran	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	1 Laporan	100 %	2,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,500,000
2 08 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								70,000,000					75,000,000
2 08 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah Pakaian yang diadakan	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	75 stel	100 %	60,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	65,000,000
2 08 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	2 orang	100 %	10,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	10,000,000
2 08 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								134,000,000					217,500,000
2 08 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	10 jenis	100 %	5,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	10,000,000
2 08 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	2 unit	100 %	30,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	49,500,000
2 08 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	2 unit	100 %	4,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	8,000,000
2 08 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	2 jenis	100 %	30,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	40,000,000
2 08 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	10 jenis	100 %	25,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	30,000,000
2 08 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	12 kali	100 %	40,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	80,000,000
2 08 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								70,000,000					94,160,000
2 08 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Meubeler yang disediakan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Girimaya,	100 %	9 unit	100 %	15,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	35,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Sriwijaya					(PAD)			
2 08 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang diadakan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	1 unit	100 %	50,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	54,160,000
2 08 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang diadakan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	1 unit	100 %	5,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	5,000,000
2 08 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									415,301,600			426,000,000
2 08 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah surat yang disediakan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	2000 surat	100 %	200,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	200,000,000
2 08 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	jumlah aparatur internal SKPD yang dilayani	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	75 orang	100 %	125,301,600	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	126,000,000
2 08 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	jumlah aparatur internal SKPD yang dilayani	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	75 orang	100 %	90,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	100,000,000
2 08 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									206,138,400			265,000,000
2 08 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	1 unit	100 %	50,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	55,000,000
2 08 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	4 unit	100 %	129,440,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	140,000,000
2 08 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	10 unit	100 %	5,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	10,000,000
2 08 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	1 unit	100 %	21,698,400	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	60,000,000
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN									250,500,000			325,000,000
2 08 02 2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota									145,000,000			145,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022														
Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB														
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 08 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Presentase ARG pada belanja langsung	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah Kabupaten/Kota yang telah dilatih PUG	Presentase ARG pada belanja langsung		0,85 %	76 lembaga	0.85 %	35,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase ARG pada belanja langsung	0,85 %	35,000,000
2 08 02 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase ARG pada belanja langsung	Jumlah Program PUG ada Perangkat Daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat Kabupaten/Kota	Presentase ARG pada belanja langsung	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,85 %	13 Program	0.85 %	35,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase ARG pada belanja langsung	0,85 %	35,000,000
2 08 02 2.01 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Presentase ARG pada belanja langsung	Jumlah Kelurahan yang menyusun GAB GBS	Presentase ARG pada belanja langsung	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,85 %	30 Dokumen	0.85 %	40,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase ARG pada belanja langsung	0,85 %	40,000,000
2 08 02 2.01 04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Presentase ARG pada belanja langsung	Jumlah aparatur perencana yang terlatih	Presentase ARG pada belanja langsung	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,85 %	34 orang	0.85 %	35,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase ARG pada belanja langsung	0,85 %	35,000,000
2 08 02 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota								105,000,000				150,000,000	
2 08 02 2.02 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Presentase ARG pada belanja langsung	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Presentase ARG pada belanja langsung	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,85 %	1 kebijakan	0.85 %	30,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase ARG pada belanja langsung	0,85 %	50,000,000
2 08 02 2.02 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Presentase ARG pada belanja langsung	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan pelatihan	Presentase ARG pada belanja langsung	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,85 %	42 organisasi	0.85 %	75,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase ARG pada belanja langsung	0,85 %	100,000,000
2 08 02 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								500,000				30,000,000	
2 08 02 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase ARG pada belanja langsung	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga yang dilaksanakan	Presentase ARG pada belanja langsung	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,85 %	1 kegiatan	0.85 %	500,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase ARG pada belanja langsung	0,85 %	30,000,000
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								250,000,000				255,000,000	
2 08 03 2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								175,000,000				180,000,000	
2 08 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64	Kota Pangkal Pinang, Semua	0,028 %	1 kebijakan/program	0.028 %	45,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH		Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64	0,028 %	50,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan, selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan, selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	Kecamatan, Semua Kelurahan					(PAD)		Tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan, selain pasangan dalam 12 bulan terakhir		
2 08 03 2.01 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 Tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan, selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	Jumlah kasus penanganan kekerasan terhadap perempuan	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan, selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,028 %	20 kasus	0.028 %	130,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 Tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan, selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	0,028 %	130,000,000
2 08 03 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota								25,000,000				25,000,000	
2 08 03 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 Tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan, selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	Jumlah layanan rujukan	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan, selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,028 %	25 orang	0.028 %	25,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 Tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan, selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	0,028 %	25,000,000
2 08 03 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								50,000,000				50,000,000	
2 08 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 Tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan, selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan, selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,028 %	2 lembaga	0.028 %	50,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 Tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan, selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	0,028 %	50,000,000
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA								50,000,000				300,000,000	
2 08 04 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								50,000,000				300,000,000	
2 08 04 2.01 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kader yang aktif melaksanakan KIE kepada masyarakat	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	Persentase kader yang aktif melaksanakan KIE kepada masyarakat	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	1 kegiatan	100 %	50,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kader yang aktif melaksanakan KIE kepada masyarakat	100 %	300,000,000
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK								50,000,000				103,385,589	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 08 05 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									50,000,000				103,385,589
2 08 05 2.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Jumlah data gender dan anak yang tersedia	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 %	100 buku	12 %	50,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	12 %	103,385,589
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)									214,870,000				260,000,000
2 08 06 2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota									184,870,000				230,000,000
2 08 06 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Forum Anak Skala Kota	Jumlah peserta hari anak dan kongres anak	Persentase pengembangan forum anak skala kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	290 anak	100 %	94,870,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengembangan Forum Anak Skala Kota	100 %	100,000,000
2 08 06 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Forum Anak Skala Kota	Jumlah kecamatan prioritas program KLA	Persentase pengembangan forum anak skala kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 kecamatan	100 %	90,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengembangan Forum Anak Skala Kota	100 %	130,000,000
2 08 06 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota									30,000,000				30,000,000
2 08 06 2.02 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Forum Anak Skala Kota	Jumlah peserta sosialisasi	Persentase Pengembangan Forum Anak Skala Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 orang	100 %	30,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengembangan Forum Anak Skala Kota	100 %	30,000,000
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK									25,500,000				55,000,000
2 08 07 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									25,000,000				25,000,000
2 08 07 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	Jumlah kasus penanganan kekerasan terhadap anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,055 %	25 kasus	0,055 %	25,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	0,055 %	25,000,000
2 08 07 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									500,000				30,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 08 07 2.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,055 %	10 lembaga (PATBM)	0.055 %	500,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	0,055 %	30,000,000
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								3,129,740,000			3,594,771,178		
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK								295,870,000			438,385,589		
2 14 02 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk								165,000,000			230,000,000		
2 14 02 2.01 02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	TFR (Total Fertility Rate)	Tersedianya Pemanfaatan Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diperdakan	TFR (Total Fertility Rate)	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,9 Rata-rata Anak per Wanita	20 orang	1,9 Rata-rataAnak/ Wanita	30,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		TFR (Total Fertility Rate)	1,9 Rata-rata Anak per Wanita	40,000,000
2 14 02 2.01 07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	TFR (Total Fertility Rate)	Jumlah sekolah yang menyediakan dan pengembangan pendidikan kependudukan	TFR (Total Fertility Rate)	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,9 Rata-rata Anak per Wanita	6 sekolah	1,9 Rata-rataAnak/ Wanita	45,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		TFR (Total Fertility Rate)	1,9 Rata-rata Anak per Wanita	60,000,000
2 14 02 2.01 09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	TFR (Total Fertility Rate)	jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pelaksanaan pendidikan kependudukan	TFR (Total Fertility Rate)	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,9 Rata-rata Anak per Wanita	30 orang	1,9 Rata-rataAnak/ Wanita	45,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		TFR (Total Fertility Rate)	1,9 Rata-rata Anak per Wanita	60,000,000
2 14 02 2.01 15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	TFR (Total Fertility Rate)	jumlah Stakeholder/Pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyrakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	TFR (Total Fertility Rate)	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,9 Rata-rata Anak per Wanita	60 orang	1,9 Rata-rataAnak/ Wanita	45,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		TFR (Total Fertility Rate)	1,9 Rata-rata Anak per Wanita	70,000,000
2 14 02 2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								130,870,000			208,385,589		
2 14 02 2.02 03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana	TFR (Total Fertility Rate)	jumlah buku profil kependudukan, keluarga berencana dan	TFR (Total Fertility Rate)	Kota Pangkal Pinang, Semua	1,9 Rata-rata Anak per Wanita	40 buku	1,9 Rata-rataAnak/ Wanita	20,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH		TFR (Total Fertility Rate)	1,9 Rata-rata Anak per Wanita	35,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	dan Pembangunan Keluarga		pembangunan keluarga yang tersusun		Kecamatan, Semua Kelurahan					(PAD)				
2 14 02 2.02 05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	TFR (Total Fertility Rate)	Jumlah dokumen kajian dampak kependudukan yang tersedia	TFR (Total Fertility Rate)	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,9 Rata- rata Anak per Wanita	30 buku	1,9 Rata- rataAnak/ Wanita	25,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		TFR (Total Fertility Rate)	1,9 Rata- rata Anak per Wanita	35,000,000
2 14 02 2.02 08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	TFR (Total Fertility Rate)	Jumlah Rumah Data Kependudukan yang terbentuk	TFR (Total Fertility Rate)	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,9 Rata- rata Anak per Wanita	7 rumah data	1,9 Rata- rataAnak/ Wanita	35,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		TFR (Total Fertility Rate)	1,9 Rata- rata Anak per Wanita	63,385,589
2 14 02 2.02 12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	TFR (Total Fertility Rate)	Jumlah KK yang dilakukan Pendataan keluarga	TFR (Total Fertility Rate)	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,9 Rata- rata Anak per Wanita	60000 KK	1,9 Rata- rataAnak/ Wanita	50,870,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		TFR (Total Fertility Rate)	1,9 Rata- rata Anak per Wanita	75,000,000
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								1,130,000,000				1,023,385,589	
2 14 03 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal								65,000,000				85,000,000	
2 14 03 2.01 04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 Tahun yang berstatus kawin	Jumlah Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	81 %	7 Kali	81 %	40,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 Tahun yang berstatus kawin	81 %	45,000,000
2 14 03 2.01 05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 Tahun yang berstatus kawin	Jumlah penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	81 %	7 kali	81 %	25,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 Tahun yang berstatus kawin	81 %	40,000,000
2 14 03 2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)								200,000,000				245,000,000	
2 14 03 2.02 01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga	Jumlah Kader Yang Akan Mendapat Pembinaan	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya Kota Pangkal	79,84 %	124 Orang	79.84 %	50,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPAT		Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga	79,84 %	60,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern		berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Pinang, Girimaya, Sriwijaya					AN ASLI DAERAH (PAD)			berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern
2 14 03 2.02 02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Jumlah Sarana Pendukung Untuk Operasional PKB/PLKB	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	79,84 %	40 Jenis	79.84 %	50,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern 79,84 % 60,000,000
2 14 03 2.02 03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK Untuk Petugas Keluarga Berencana / Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	79,84 %	10 Kali	79.84 %	50,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern 79,84 % 60,000,000
2 14 03 2.02 04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Jumlah Pergerakan Kader IMP	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	79,84 %	7 Orang	79.84 %	50,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern 79,84 % 65,000,000
2 14 03 2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota								865,000,000				693,385,589
2 14 03 2.03 06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan KB	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi modern	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	79,84 %	42 Kelurahan	79.84 %	805,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern 79,84 % 605,000,000
2 14 03 2.03 11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode	Jumlah Fasilitas Kesehatan (Faskes) Yang Siap Melayani KB MKJP	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi modern	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	79,84 %	20 Faskes	79.84 %	60,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode 79,84 % 88,385,589

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		modern										modern		
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								1,703,870,000					2,133,000,000
2 14 04 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								200,870,000					330,000,000
2 14 04 2.01 04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)	Jumlah peserta yang mengikuti orientasi	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		8,20 Kelahiran per 1000 WUS	210 Orang	8.20 KelahiranPer1000WUS	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)	8,20 Kelahiran per 1000 WUS	80,000,000
2 14 04 2.01 07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)	Jumlah Siswa/Siswi yang dilatih	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	8,20 Kelahiran per 1000 WUS	25 Siswa	8.20 KelahiranPer1000WUS	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)	8,20 Kelahiran per 1000 WUS	100,000,000
2 14 04 2.01 08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)	Jumlah Orang Yang di Bina	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	8,20 Kelahiran per 1000 WUS	40 Orang	8.20 KelahiranPer1000WUS	100,870,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)	8,20 Kelahiran per 1000 WUS	150,000,000
2 14 04 2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								1,503,000,000					1,803,000,000
2 14 04 2.02 01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kab/kota dalam pembangunan	jumlah konsultasi dan koordinasi PKK Kota Pangkalpinang yang terfasilitasi	Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kab/kota dalam pembangunan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 kali	100 %	403,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kab/kota dalam pembangunan	100 %	423,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
2 14 04 2.02 02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kab/kota dalam pembangunan	jumlah pelaksanaan kegiatan HUT HKG Kota Pangkalpinang dan Jambore PKK Tingkat Nasional	Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kab/kota dalam pembangunan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 kali	100 %	330,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kab/kota dalam pembangunan	100 %	350,000,000
2 14 04 2.02 03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kab/kota dalam pembangunan	jumlah peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kab/kota dalam pembangunan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 kali	100 %	650,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kab/kota dalam pembangunan	100 %	900,000,000
2 14 04 2.02 04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kab/kota dalam pembangunan	jumlah promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja	Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kab/kota dalam pembangunan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 kelurahan	100 %	120,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kab/kota dalam pembangunan	100 %	130,000,000
TOTAL									8,495,586,000				9,707,707,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								12,500,000,000		25,495,267,003			
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3,039,888,836		3,320,629,544			
2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								17,581,750		20,681,750			
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen renstra/renja	persentase laporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 %	2 dokumen	100 persen	4,250,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	4,350,000
2	19	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen RKA SKPD	persentase laporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 %	1 dokumen	100 persen	3,750,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	4,750,250
2	19	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah DPA SKPD	persentase laporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 %	1 dokumen	100 persen	2,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,350,000
2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen LKPJ, LKPJAM, LPPD yang disusun	persentase laporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 %	2 dokumen	100 persen	3,571,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	4,571,500
2	19	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen SPIP, Lakip, RB	persentase laporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 %	3 dokumen	100 persen	3,660,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	4,660,000
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1,735,610,306		1,780,746,057			
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	100 Orang	1 tahun	1,729,430,056	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	1,772,565,807
2	19	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 laporan	1 tahun	3,415,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	4,415,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 19 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan /smesteran SKPD	persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 laporan	1 tahun	2,765,250	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	3,765,250
2 19 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								100,000				100,000	
2 19 01 2.04 06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD*)	Jumlah blanko retribusi daerah yang tercetak	persentrase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 buku	100 persen	100,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD*)	100 %	100,000
2 19 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								78,000,000				96,000,000	
2 19 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	65 stel	100 persen	48,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	56,000,000
2 19 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	jumlah pegawai diklat sesuai tupoksi	persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya		100 %	10 Orang	100 persen	30,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	40,000,000
2 19 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								285,299,880				311,299,880	
2 19 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantor	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 jenis	100 persen	5,087,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	7,087,000
2 19 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang di sediakan	persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantor		100 %	12 Unit	100 persen	95,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	120,000,000
2 19 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jumlah waktu peralatan rumah tnagga yang di sediakan	persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantor		100 %	6 Set	100 persen	12,800,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	6,800,000
2 19 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah bahan logistik yang tersedia	persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantor	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan,	100 %	2 jenis	100 persen	9,992,880	Dana Transfer Umum- Dana		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	11,992,880

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Semua Kelurahan					Alokasi Umum				
2 19 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantor	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 jenis	100 persen	12,420,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	15,420,000
2 19 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi yang di lakukan	persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantor		100 %	20 kali	100 persen	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	150,000,000
2 19 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								219,500,000				254,500,000	
2 19 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	jumlah kendaraan dinas oprasional atau lapangan yang disediakan	terpenuhinya peralatan perlengkapan kantor		100 %	3 Unit	100 persen	74,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	74,500,000
2 19 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Mebel Yang Disediakan	terpenuhinya peralatan perlengkapan kantor		100 %	5 Unit	100 persen	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	45,000,000
2 19 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	terpenuhinya peralatan perlengkapan kantor		100 %	3 Unit	100 persen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	135,000,000
2 19 01 2.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		terpenuhinya peralatan perlengkapan kantor		100 %		100 persen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
2 19 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								475,996,900				591,951,854	
2 19 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jumlah aparatur internal yang terlayani	persentase peningkatan pelayanan administrasi kantor		100 %	38 Orang	100 persen	165,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	175,000,000
2 19 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapannbkantor yang di perbaiki	persentase peningkatan pelayanan administrasi kantor		100 %	5 Unit	100 persen	75,000,000			Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	120,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 19 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jumlah aparatur internal yang terlayani	persentase peningkatan pelayanan administrasi kantor		100 %	38 Orang	100 persen	235,996,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	296,951,854
2 19 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								227,800,000				265,350,003	
2 19 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	jumlah kendaraan perorangan dinas jabatan yang terpelihara	tersedianya perlengkapan gedung kantor		100 %	2 Unit	100 persen	95,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	105,000,000
2 19 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 unit	100 persen	17,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	17,350,000
2 19 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	jumlah gedung kantor/bangunan yang dipelihara	tersedianya perlengkapan gedung kantor		100 %	1 Unit	100 persen	115,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	143,000,003
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN								1,138,931,000				1,503,931,000	
2 19 02 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota								988,931,000				1,203,931,000	
2 19 02 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah jenis upaya peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah Pemuda yang Mendapat Pelatihan Kader Pengembangan Kepemimpinan, Kepedulian, Kesukarelaan dan Kepeloporan Pemuda	jumlah jenis upaya peningkatan peran serta kepemudaan		0	24 Orang	36 Orang	180,920,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah jenis upaya peningkatan peran serta kepemudaan	0	250,920,000
2 19 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah jenis upaya peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah Pemuda yang Mendapat Pelatihan Kewirausahaan	jumlah jenis upaya peningkatan peran serta kepemudaan		0	50 Orang	36 Orang	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah jenis upaya peningkatan peran serta kepemudaan	0	150,000,000
2 19 02 2.01 04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif,	Jumlah jenis upaya peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah Perda Pemuda yang Dibuat	jumlah jenis upaya peningkatan peran serta kepemudaan		0	1 Dokumen	36 Orang	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah jenis upaya peningkatan peran serta kepemudaan	0	0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
	Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan												
2 19 02 2.01 07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah jenis upaya peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah Pemuda yang Mendapatkan Penghargaan	jumlah jenis upaya peningkatan peran serta kepemudaan		0	40 Orang	36 Orang	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah jenis upaya peningkatan peran serta kepemudaan	0	250,000,000
2 19 02 2.01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah jenis upaya peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelatihan Paskibraka	jumlah jenis upaya peningkatan peran serta kepemudaan		0	36 Orang	36 Orang	483,011,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah jenis upaya peningkatan peran serta kepemudaan	0	553,011,000
2 19 02 2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								150,000,000				300,000,000
2 19 02 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah Pemuda yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan		0	1 Organisasi	22 orang	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0	300,000,000
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN								7,921,180,164				19,991,480,164
2 19 03 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								3,008,480,164				1,621,480,164
2 19 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	2. Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti	jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi	Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang di ikuti		0	60 orang	71 orang	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti	0	125,000,000
2 19 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	2. Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti	jumlah kegiatan yang terlaksana	Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang di ikuti		0	3 kegiatan	71 orang	2,908,480,164	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti	0	1,496,480,164
2 19 03 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1,050,000,000				820,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 19 03 2.02 01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2. Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti	jumlah penyelenggaraan event olahraga berprestasi tingkah daerah	Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang di ikuti		0	3 Event	120 medali	1,050,000,000	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan		2. Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti	0	820,000,000
2 19 03 2.02 02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	2. Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti		Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang di ikuti		0		120 medali	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti	0	0
2 19 03 2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi								400,000,000				600,000,000	
2 19 03 2.03 01	Seleksi Atlet Daerah	2. Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti		Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang di ikuti		0		100 persen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti	0	0
2 19 03 2.03 03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	2. Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti	jumlah atlet yang terbina	Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang di ikuti		0	20 Orang	100 persen	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti	0	500,000,000
2 19 03 2.03 04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	2. Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti	Jumlah atlet berprestasi yang diberi penghargaan	Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang di ikuti	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	25 orang	100 persen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti	0	100,000,000
2 19 03 2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga								2,512,700,000				15,000,000,000	
2 19 03 2.04 02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan		jumlah organisasi keolahragaan yang mendapat pembinaan		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 organisasi		2,512,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000,000
2 19 03 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi								950,000,000				1,950,000,000	
2 19 03 2.05 01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	2. Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti	Jumlah kegiatan festival dan Olahraga Rekreasi	Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang di ikuti	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	4 kegiatan	2500 orang	650,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti	0	1,800,000,000
2 19 03 2.05 05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	2. Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang	jumlah orang yang mengikutiolahraga tradisional	Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang di ikuti		0	20 Orang	2500 orang	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana		2. Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang	0	150,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		diikuti								Alokasi Umum		diikuti		
2 19 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN								400,000,000				679,226,295	
2 19 04 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan								400,000,000				679,226,295	
2 19 04 2.01 05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase pengembangan kapasitas kepramukaan	jumlah organisasi yang menyelenggarakan kegiatan kepramukaan	persentase pengembangan kapasitas kepramukaan		0	1 organisasi	100 persen	400,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pengembangan kapasitas kepramukaan	0	679,226,295
TOTAL									12,500,000,000				25,495,267,003	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Sub Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								612,993,800			656,993,800		
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA								72,481,150			72,481,150		
2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)								72,481,150			72,481,150		
2	07	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja ; Persentase Tenaga Kerja Formal ; Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur ; Tingkat setengah pengangguran	dokumen perencanaan tenaga kerja kota	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja, persentase tenaga kerja formal, tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur, tingkat setengah pengangguran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 % ; 71 % ; 6,26 % ; 4 %	1 dokumen	100 persen	72,481,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja ; Persentase Tenaga Kerja Formal ; Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur ; Tingkat setengah pengangguran	80 % ; 71 % ; 6,26 % ; 4 %	72,481,150	
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								140,512,650			144,512,650		
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi								125,512,650			125,512,650		
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi ; Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan	jumlah pencari kerja yang dilatih	persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi, persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	6,23 % ; 0	45 orang	6.23 PERSEN	125,512,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi ; Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan	6,23 % ; 0	125,512,650	
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta								15,000,000			19,000,000		
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi ; Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi, persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,23 % ; 0	5 LPK	6.23 persen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi ; Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan	6,23 % ; 0	19,000,000	
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA								215,000,000			225,000,000		
2	07	04	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota								30,000,000			35,000,000		
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/ kota	jumlah pencari kerja yang terdaftar di kota	persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 %	350 orang	60 persen	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/ kota	60 %	35,000,000	
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja								152,000,000			155,000,000		
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/ kota	jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja online	persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 %	210 orang	60 persen	152,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/ kota	60 %	155,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022														
Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA														
Sub Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 07 04 2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								33,000,000					35,000,000
2 07 04 2.05 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/ kota	jumlah tenaga kerja asing terdaftar dalam kota	persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 %	7 orang	60 persen	33,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/ kota	60 %	35,000,000
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								185,000,000					215,000,000
2 07 05 2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								60,000,000					70,000,000
2 07 05 2.01 01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) ; Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan ; Upah rata-rata per jam pekerja	jumlah perusahaan yang telah memiliki PP/PKB	persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan), upah rata-rata per jam pekerja, proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,56 % ; 91,25 % ;19.502 ribu	53 perusahaa n	100 persen	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) ; Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan ; Upah rata-rata per jam pekerja	60,56 % ; 91,25 % ;19.502 ribu	35,000,000
2 07 05 2.01 03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) ; Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan ; Upah rata-rata per jam pekerja	jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan), upah rata-rata per jam pekerja, proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,56 % ; 91,25 % ;19.502 ribu	811 perusahaa n	100 persen	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) ; Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan ; Upah rata-rata per jam pekerja	60,56 % ; 91,25 % ;19.502 ribu	35,000,000
2 07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota								125,000,000					145,000,000
2 07 05 2.02 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) ; Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan ; Upah rata-rata per jam pekerja	jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit	persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan), upah rata-rata per jam pekerja, proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,56 % ; 91,25 % ;19.502 ribu	10 kasus	100 persen	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) ; Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan ; Upah rata-rata per jam pekerja	60,56 % ; 91,25 % ;19.502 ribu	30,000,000
2 07 05 2.02 02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Kota Pangkal Pinang, Semua	60,56 % ; 91,25 % ;19.502	37 kasus	100 persen	35,000,000			Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	60,56 % ; 91,25 % ;19.502	40,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022														
Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA														
Sub Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	(PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) ; Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan ; Upah rata-rata per jam pekerja	melalui perjanjian bersama oleh mediator hubungan industrial	(PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan), upah rata-rata per jam pekerja, proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Kecamatan, Semua Kelurahan	ribu						(PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) ; Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan ; Upah rata-rata per jam pekerja	ribu	
2 07 05 2.02 03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) ; Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan ; Upah rata-rata per jam pekerja	terbentuknya pengurus unit kerja serikat pekerja/ serikat buruh	persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan), upah rata-rata per jam pekerja, proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,56 % ; 91,25 % ;19.502 ribu	25 PUK SP/ SB	100 persen	30,000,000			Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) ; Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan ; Upah rata-rata per jam pekerja	60,56 % ; 91,25 % ;19.502 ribu	35,000,000
2 07 05 2.02 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) ; Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan ; Upah rata-rata per jam pekerja	jumlah rekomendasi yang dihasilkan	persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan), upah rata-rata per jam pekerja, proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,56 % ; 91,25 % ;19.502 ribu	1 rekomenda si	100 persen	35,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) ; Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan ; Upah rata-rata per jam pekerja	60,56 % ; 91,25 % ;19.502 ribu	40,000,000
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								9,150,301,200				9,851,463,171	
2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								7,895,301,200				8,503,463,171	
2 18 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								17,228,342				20,264,768	
2 18 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen Renstra/Renja	persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	2 dokumen	100 persen	7,305,264	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	10,341,690
2 18 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	jumlah dokumen DPA SKPD	persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	3 dokumen	100 persen	4,844,905	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	4,844,905
2 18 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Persentase laporan kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen LKPJ, LKPJ AMJ, LPPD yang	persentase laporan kinerja dan keuangan	Kota Pangkal Pinang,	100 %	2 dokumen	100 persen	5,078,173	Dana Transfer		Persentase laporan kinerja dan keuangan	100 %	5,078,173

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Sub Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	yang disampaikan tepat waktu	disusun	yang disampaikan tepat waktu	Girimaya, Semua Kelurahan					Umum-Dana Alokasi Umum	yang disampaikan tepat waktu		
2 18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,830,624,479				5,313,686,927
2 18 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	49 orang	100 persen	4,830,624,479	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,313,686,927
2 18 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								109,200,000				136,000,000
2 18 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang diadakan	persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/ kualifikasi pada unit kerjanya	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 jenis	100 persen	5,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0
2 18 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	jumlah pakaian yang diadakan	persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/ kualifikasi pada unit kerjanya	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	80 stel	100 persen	56,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	56,000,000
2 18 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi	persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/ kualifikasi pada unit kerjanya		100 %	6 orang	100 persen	48,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	80,000,000
2 18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								174,287,397				164,784,441
2 18 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 unit/ set/ jenis	100 persen	5,231,591	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	5,231,591
2 18 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 jenis	100 persen	22,580,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	22,580,000
2 18 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 unit/set /jenis	100 persen	11,221,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	11,221,700

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Sub Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 18 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	12 kali	100 persen	96,212,331	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	120,000,000
2 18 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah arsip dinamis yang ditata	persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5000 berkas	100 persen	39,041,775			Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	5,751,150
2 18 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								100,300,000				100,300,000	
2 18 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang diadakan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 unit/ set	100 persen	100,300,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	100,300,000
2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								211,853,600				273,853,600	
2 18 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	80 orang	100 persen	69,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	131,500,000
2 18 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	4 unit/ set	100 persen	32,200,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	32,200,000
2 18 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	80 orang	100 persen	110,153,600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	110,153,600
2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,451,807,382				2,494,573,435	
2 18 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	jumlah kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 unit	100 persen	128,187,400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	136,187,400
2 18 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Girimaya,	100 %	1 unit	100 persen	2,266,623,182	Dana Transfer Umum-		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	2,301,389,235

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Sub Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur			Target	
					Semua Kelurahan					Dana Alokasi Umum					
2 18 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	1 unit/ set	100 persen	56,996,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	56,996,800	
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL								282,000,000					150,000,000	
2 18 02 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								140,000,000					75,000,000	
2 18 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah investor	SOP pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	persentase peningkatan jumlah investor	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40%	1 jenis	40 persen	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan jumlah investor	40%	0	
2 18 02 2.01 02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah investor	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	persentase peningkatan jumlah investor	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40%	1 laporan	40 persen	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan jumlah investor	40%	75,000,000	
2 18 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota								142,000,000					75,000,000	
2 18 02 2.02 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah investor	Dokumen reviu RUPM	persentase peningkatan jumlah investor	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40%	1 dokumen	40 persen	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan jumlah investor	40%	0	
2 18 02 2.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah investor	dokumen peta potensi dan peluang investasi	persentase peningkatan jumlah investor	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40%	1 dokumen	40 persen	72,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan jumlah investor	40%	75,000,000	
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL								120,000,000					130,000,000	
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								120,000,000					130,000,000	
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan investasi di kota	kegiatan promosi penanaman modal	Persentase peningkatan investasi di Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40%	1 kegiatan	40 persen	120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan investasi di kota	40%	130,000,000	
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL								509,000,000					720,000,000	
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota								509,000,000					720,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Sub Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Indeks kepuasan masyarakat	penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	indeks kepuasan masyarakat	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	90	5000 izin	90 nilai	479,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks kepuasan masyarakat	90	690,000,000
2 18 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Indeks kepuasan masyarakat	jumlah konsultasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti	indeks kepuasan masyarakat	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90	15 konsultasi/ pengaduan	90 nilai	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks kepuasan masyarakat	90	30,000,000
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL								314,000,000				318,000,000	
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								314,000,000				318,000,000	
2 18 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM	koordinasi peningkatan mutu layanan penanaman modal	persentase perusahaan yang melaporkan LKPM	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	8,09 %	1 kali	8.09 Persen	109,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM	8,09 %	109,000,000
2 18 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM	Jumlah unit usaha yang di pantau berdasarkan izin yang diberikan	persentase perusahaan yang melaporkan LKPM	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,09 %	110 unit usaha	8.09 Persen	205,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM	8,09 %	209,000,000
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL								30,000,000				30,000,000	
2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								30,000,000				30,000,000	
2 18 06 2.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase jenis izin yang diterbitkan secara online	tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan secara elektronik	persentase jenis izin yang diterbitkan secara online	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	79,66 %	1 website/ aplikasi	79.66 persen	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jenis izin yang diterbitkan secara online	79,66 %	30,000,000
TOTAL									9,763,295,000				10,508,456,971	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								134,494,535,805				1,051,248,764,300	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								102,269,348,055				1,025,747,587,273	
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								60,000,000				45,000,000	
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen Renstra/Renja yang Tersusun	persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	10,000,000
1	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun	persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	10,000,000
1	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,000,000
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Laporan kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	10,000,000
1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang tersusun	persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	10,000,000
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								99,884,675,847				1,023,317,111,743	
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang di sampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1040 orang	100 %	99,834,675,847	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	1,023,264,111,743
1	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah sekolah yang dikoordinir	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang di sampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	76 Sekolah	100 %	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	38,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Kelurahan					Umum			
1 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang di sampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,000,000
1 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /semesteran SKPD Yang Disusun	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang di sampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,000,000
1 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang di sampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,000,000
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								377,196,678				475,000,000
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan yang diadakan	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Semua Kabupaten/K ota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	115 stel	100 %	85,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	95,000,000
1 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah dokumen kepegawaian yang di susun	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokmen	100 %	12,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	5,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022														
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 01 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	jumlah pegawai yang dimonitoring, dievaluasi dan dinilai	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya		100 %	1100 orang	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	20,000,000
1 01 01 2.05 06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	jumlah pegawai yang difasilitasi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 orang	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	15,000,000
1 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 orang	100 %	199,696,678	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	300,000,000
1 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	jumlah sekolah yang mengikuti bimbingan teknis Implementasi peraturan Perundang- undangan	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	110 orang	100 %	35,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	40,000,000
1 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								554,000,000				533,000,000	
1 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jumkah waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase tepenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	10,000,000
1 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jumlah jenis sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan berbasis manual/dan Tik	Persentase tepenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Jenis	100 %	350,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	340,000,000
1 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jenis peralatan rumah tangga yang di beli	Persentase tepenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Jenis	100 %	13,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
1 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jumlah jenis bahan logistik yang tersedia	Persentase tepenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Jenis	100 %	60,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	60,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jumlah waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase tepenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 jenis	100 %	23,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	25,000,000
1 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang di beli	Persentase tepenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 jenis	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	3,000,000
1 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jumlah waktu rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang di ikuti	Persentase tepenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	85,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	85,000,000
1 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jumlah waktu penataan arsip SKPD	Persentase tepenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	10,000,000
1 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								30,000,000				30,000,000	
1 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang Dladakan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 unit	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	15,000,000
1 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah jenis Sarana dan prasarana gedung Kantor atau bangunan lainnya yang di beli	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 unit	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	15,000,000
1 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,192,475,530				1,187,475,530	
1 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jumlah waktu penataan surat menyurat/arsip perkantoran	Persentase terpenuhi Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	10,000,000
1 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Persentase terpenuhi Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	403,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	403,200,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
1 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang mendapat perbaikan	Persentase terpenuhi Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 unit	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	15,000,000
1 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Persentase terpenuhi Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	71 orang	100 %	759,275,530	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	759,275,530
1 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									171,000,000			160,000,000
1 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 unit	100 %	90,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	80,000,000
1 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	jumlah perlatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 jenis	100 %	16,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	20,000,000
1 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 unit	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	45,000,000
1 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehab	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 unit	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	15,000,000
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									32,010,187,750			25,179,788,000
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									16,813,500,000			15,529,300,000
1 01 02 2.01 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	APK SD ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Di bangun (SD)	APK SD ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	102,5 % ; 100 %	1 unit	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APK SD ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	102,5 % ; 100 %	0
1 01 02 2.01 12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas	APK SD ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas sekolah yang	APK SD ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Kota Pangkal Pinang, Semua	102,5 % ; 100 %	1 unit	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum-	APK SD ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	102,5 % ; 100 %	200,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Sekolah		direhabilitas sedang/berat		Kecamatan, Semua Kelurahan					Dana Alokasi Umum				
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	APK SD ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah peserta didik yang menerima biaya personil	APK SD ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	102,5 % ; 100 %	500 orang	100 %	275,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		APK SD ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	102,5 % ; 100 %	275,000,000
1 01 02 2.01 22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	APK SD ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Sarana belajar SD yang dibeli	APK SD ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	102,5 % ; 100 %	1 paket	100 %	35,700,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		APK SD ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	102,5 % ; 100 %	35,700,000
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SD ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah satuan pendidik yang melaksanakan tindak lanjut Proses pembelajaran	APK SD ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	102,5 % ; 100 %	101 Sekolah	100 %	300,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		APK SD ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	102,5 % ; 100 %	300,000,000
1 01 02 2.01 24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	APK SD ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah satuan pendidikan yang di evaluasi	APK SD ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	102,5 % ; 100 %	101 sekolah	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		APK SD ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	102,5 % ; 100 %	200,000,000
1 01 02 2.01 25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	APK SD ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah siswa yang mengikuti Pembinaan minat,bakat dan kreativitas siswa	APK SD ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	102,5 % ; 100 %	1500 orang	100 %	150,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		APK SD ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	102,5 % ; 100 %	260,000,000
1 01 02 2.01 26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah dasar yang dikelola	APK SD ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	102,5 % ; 100 %	719 orang	100 %	15,432,800,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		APK SD ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	102,5 % ; 100 %	13,973,600,000
1 01 02 2.01 27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Yang Mendapat Peningkatan Kompetensi dan Karir	APK SD ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	102,5 % ; 100 %	170 orang	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		APK SD ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	102,5 % ; 100 %	200,000,000
1 01 02 2.01 30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Sekolah yang termonitoring dalam Pengelolaan Dana BOS Jenjang SD	APK SD ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua	102,5 % ; 100 %	101 sekolah	100 %	90,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi		APK SD ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	102,5 % ; 100 %	85,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kelurahan					Umum				
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								11,788,499,750			6,020,150,000		
1 01 02 2.02 01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	APK SMP ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Unit Sekolah baru yang di bangun	APK SMP ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,5 % ; 100 %	1 sekolah	100 %	5,513,399,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		APK SMP ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	103,5 % ; 100 %	0
1 01 02 2.02 24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	APK SMP ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Yang Direhab	APK SMP ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,5 % ; 100 %	1 paket	100 %	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		APK SMP ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	103,5 % ; 100 %	0
1 01 02 2.02 35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	APK SMP ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah sekolah yang mendapatkan peralatan dan media pendidikan (SMP)	APK SMP ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,5 % ; 100 %	1 paket	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		APK SMP ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	103,5 % ; 100 %	20,000,000
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SMP ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah satuan Pendidik yang Melaksanakan Tindak tindak lanjut Proses pembelajaran	APK SMP ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,5 % ; 100 %	30 sekolah	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		APK SMP ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	103,5 % ; 100 %	250,000,000
1 01 02 2.02 37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Satuan pendidikan yang Di evaluasi	APK SMP ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,5 % ; 100 %	30 sekolah	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		APK SMP ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	103,5 % ; 100 %	100,000,000
1 01 02 2.02 38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	APK SMP ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Siswa yang mengikuti Pembinaan minat bakat dan Kreativitas siswa	APK SMP ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,5 % ; 100 %	400 orang	100 %	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		APK SMP ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	103,5 % ; 100 %	120,000,000
1 01 02 2.02 39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Pendidik dan tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah menengah Pertama yang dikelola	APK SMP ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,5 % ; 100 %	268 orang	100 %	5,735,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		APK SMP ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	103,5 % ; 100 %	5,195,150,000
1 01 02 2.02 40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama yang mendapat peningkatan kompetensi dan karir	APK SMP ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,5 % ; 100 %	150 orang	100 %	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		APK SMP ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	103,5 % ; 100 %	250,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 01 02 2.02 43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APK SMP ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	jumlah sekolah yang termonitoring dalam pengelolaan dana BOS jenjang SMP	APK SMP ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,5 % ; 100 %	32 sekolah	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		APK SMP ; CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	103,5 % ; 100 %	85,000,000
1 01 02 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)								2,787,850,000				3,106,000,000	
1 01 02 2.03 03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	APK PAUD ; Capaian SPM PAUD	Jumlah Gedung/ruang kelas/Ruang Guru Puad yang di rehabilitasi sedang/berat	APK PAUD ; Capaian SPM PAUD	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,20 % ; 100 %	2 ruang	100 %	232,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		APK PAUD ; Capaian SPM PAUD	36,20 % ; 100 %	240,000,000
1 01 02 2.03 04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	APK PAUD ; Capaian SPM PAUD	Jumlah sarana,Prasarana dan Utilitas Paud yang direhabilitasi sedang/berat	APK PAUD ; Capaian SPM PAUD	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,20 % ; 100 %	2 unit	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		APK PAUD ; Capaian SPM PAUD	36,20 % ; 100 %	340,000,000
1 01 02 2.03 06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	APK PAUD ; Capaian SPM PAUD	Jumlah Sarana, Prasaran dan Utilitas PAUD yang mendapatkan Pemeliharaan	APK PAUD ; Capaian SPM PAUD	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,20 % ; 100 %	2 unit	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		APK PAUD ; Capaian SPM PAUD	36,20 % ; 100 %	120,000,000
1 01 02 2.03 10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	APK PAUD ; Capaian SPM PAUD	Jumlah siswa paud yang mendapatkan perlengkapan belajar	APK PAUD ; Capaian SPM PAUD	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,20 % ; 100 %	1100 orang	100 %	70,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		APK PAUD ; Capaian SPM PAUD	36,20 % ; 100 %	132,000,000
1 01 02 2.03 11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	APK PAUD ; Capaian SPM PAUD	Jumlah Peserta didik PAUD yang mendapatkan biaya personil	APK PAUD ; Capaian SPM PAUD	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,20 % ; 100 %	200 orang	100 %	70,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		APK PAUD ; Capaian SPM PAUD	36,20 % ; 100 %	132,000,000
1 01 02 2.03 14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	APK PAUD ; Capaian SPM PAUD	Jumlah lembaga pendidikan yang di evaluasi	APK PAUD ; Capaian SPM PAUD	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,20 % ; 100 %	110 lembaga	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		APK PAUD ; Capaian SPM PAUD	36,20 % ; 100 %	13,000,000
1 01 02 2.03 15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	APK PAUD ; Capaian SPM PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD yang dikelola	APK PAUD ; Capaian SPM PAUD	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,20 % ; 100 %	575 orang	100 %	2,040,850,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		APK PAUD ; Capaian SPM PAUD	36,20 % ; 100 %	1,974,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 01 02 2.03 16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	APK PAUD ; Capaian SPM PAUD	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan Mutu PTK PAUD	APK PAUD ; Capaian SPM PAUD	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,20 % ; 100 %	50 orang	100 %	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		APK PAUD ; Capaian SPM PAUD	36,20 % ; 100 %	100,000,000
1 01 02 2.03 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	APK PAUD ; Capaian SPM PAUD	Persentase pengelolaan Dana BOP Selama 12 bulan	APK PAUD ; Capaian SPM PAUD	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,20 % ; 100 %	12 bulan	100 %	65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		APK PAUD ; Capaian SPM PAUD	36,20 % ; 100 %	55,000,000
1 01 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								620,338,000					524,338,000
1 01 02 2.04 09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	CAPAIAN SPM PENDIDIKAN KESETARAAN	Jumlah perlengkapan Pendidikan Nonformal/kesetaraan yang dibeli	CAPAIAN SPM PENDIDIKAN KESETARAAN	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	140 unit	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		CAPAIAN SPM PENDIDIKAN KESETARAAN	100 %	12,000,000
1 01 02 2.04 10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	CAPAIAN SPM PENDIDIKAN KESETARAAN	Jumlah peserta didik Nonformal/Kesetaraan yang mendapatkan biaya operasional	CAPAIAN SPM PENDIDIKAN KESETARAAN	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	140 orang	100 %	65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		CAPAIAN SPM PENDIDIKAN KESETARAAN	100 %	12,000,000
1 01 02 2.04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	CAPAIAN SPM PENDIDIKAN KESETARAAN	Jumlah siswa SKB pangkalpinang yang mendapat pelayanan KBM	CAPAIAN SPM PENDIDIKAN KESETARAAN	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	218 siswa	100 %	455,338,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		CAPAIAN SPM PENDIDIKAN KESETARAAN	100 %	455,338,000
1 01 02 2.04 16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	CAPAIAN SPM PENDIDIKAN KESETARAAN	Jumlah lembaga Nonformal/Kesetaraan yang Dibina	CAPAIAN SPM PENDIDIKAN KESETARAAN	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 lembaga	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		CAPAIAN SPM PENDIDIKAN KESETARAAN	100 %	45,000,000
1 01 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN								120,000,000					170,000,000
1 01 04 2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								120,000,000					170,000,000
1 01 04 2.01 01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase guru Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF yang berkualifikasi S1/DIV	Jumlah satuan pendidikan yang mendapat verifikasi dan validasi Data pokok pendidikan	Persentase Guru Pendidikan Dasar PAUD Dan PNF yang Berkualifikasi S1/DIV	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 % ; 55 %	264 sekolah	74 %	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase guru Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF yang berkualifikasi S1/DIV	93 % ; 55 %	60,000,000
1 01 04 2.01 02	Penataan Pendistribusian	Persentase guru Pendidikan Dasar, PAUD	jumlah dokumen analisa kebutuhan guru	Persentase Guru Pendidikan Dasar PAUD	Kota Pangkal Pinang,	93 % ; 55 %	1 dokumen	74 %	60,000,000	Dana Transfer		Persentase guru Pendidikan Dasar, PAUD	93 % ; 55 %	110,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	dan PNF yang berkualifikasi S1/DIV		Dan PNF yang Berkualifikasi S1/DIV	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Umum-Dana Alokasi Umum		dan PNF yang berkualifikasi S1/DIV		
1 01 05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN								95,000,000				151,389,027	
1 01 05 2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat								70,000,000				131,389,027	
1 01 05 2.01 01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase satuan Pendidikan yang Memiliki Izin Operasional	jumlah satuan pendidikan yang mendapat penilaian	Persentase satuan Pendidikan yang Memiliki Izin Operasional	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 lembaga	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase satuan Pendidikan yang Memiliki Izin Operasional	100 %	31,389,027
1 01 05 2.01 02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase satuan Pendidikan yang Memiliki Izin Operasional	Jumlah satuan pendidikan yang dibina dan diawasi dalam perizinan	Persentase satuan Pendidikan yang Memiliki Izin Operasional	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	104 sekolah	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase satuan Pendidikan yang Memiliki Izin Operasional	100 %	100,000,000
1 01 05 2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat								25,000,000				20,000,000	
1 01 05 2.02 01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase satuan Pendidikan yang Memiliki Izin Operasional	Jumlah lembaga Pendidikan yang mendapat penilaian	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin Operasional	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	40 lembaga	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase satuan Pendidikan yang Memiliki Izin Operasional	100 %	20,000,000
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								1,243,937,195				1,104,339,020	
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								709,955,300				245,357,125	
2 22 02 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								257,000,000				20,000,000	
2 22 02 2.01 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang di Lestarikan	jumlah penyelenggaraan pelestarian sejarah dan tradisi masyarakat pangkalpinang	Persentase jumlah objek pemajuan kebudayaan daerah yang di lestarikan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 %	4 Event	100 %	257,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang di Lestarikan	93 %	20,000,000
2 22 02 2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								452,955,300				225,357,125	
2 22 02 2.02 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Persentase Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang di Lestarikan	Jumlah gelar seni budaya yang di selenggarakan	Persentase jumlah objek pemajuan kebudayaan daerah yang di lestarikan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 %	30 Event	100 %	255,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang di Lestarikan	93 %	177,401,825
2 22 02 2.02 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Persentase Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang di Lestarikan	Jumlah peserta yang mendapat penguatan materi seni budaya	Persentase jumlah objek pemajuan kebudayaan daerah yang di lestarikan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan,	93 %	60 orang	100 %	197,955,300	Dana Transfer Umum-Dana		Persentase Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang di Lestarikan	93 %	47,955,300

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Semua Kelurahan					Alokasi Umum			
2 22 04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH								195,871,195				60,871,195
2 22 04 2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								195,871,195				60,871,195
2 22 04 2.01 01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Aset Sejarah yang di Lestarikan	Jumlah peserta yang mendapat penguatan materi sejarah dan tradisi	Persentase jumlah aset sejarah daerah yang di lestarikan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	35 orang	75 %	61,041,260	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Jumlah Aset Sejarah yang di Lestarikan 75 %	26,041,260
2 22 04 2.01 02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Persentase Jumlah Aset Sejarah yang di Lestarikan	jumlah waktu penyelenggaraan pelestarian sejarah dan tradisi di kota pangkalpinang	Persentase jumlah aset sejarah daerah yang di lestarikan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	12 bulan	75 %	134,829,935	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Jumlah Aset Sejarah yang di Lestarikan 75 %	34,829,935
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA								338,110,700				798,110,700
2 22 05 2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota								143,110,700				273,110,700
2 22 05 2.01 01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya (CB) yang di Lestarikan	jumlah Cagar budaya yang tercatat di Website Register Nasional	Persentase Cagar Budaya (cb) yang di Lestarikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 %	5 Cagar budaya	84 persen	34,145,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Cagar Budaya (CB) yang di Lestarikan 84 %	154,145,000
2 22 05 2.01 02	Penetapan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya (CB) yang di Lestarikan	Jumlah Cagar Budaya yang terdaftar dan ditingkatkan statusnya	Persentase Cagar Budaya (cb) yang di Lestarikan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 %	10 cagar budaya	84 persen	108,965,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Cagar Budaya (CB) yang di Lestarikan 84 %	118,965,700
2 22 05 2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota								195,000,000				525,000,000
2 22 05 2.02 01	Pelindungan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya (CB) yang di Lestarikan	Jumlah Cagar Budaya yang mendapat pemeliharaan	Persentase Cagar Budaya (CB) Yang di lestarikan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 %	4 cagar budaya	84 Persen	125,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Cagar Budaya (CB) yang di Lestarikan 84 %	125,000,000
2 22 05 2.02 02	Pengembangan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya (CB) yang di Lestarikan	jumlah cagar budaya yang di kembangkan	Persentase Cagar Budaya (CB) Yang di lestarikan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 %	1 cagar budaya	84 Persen	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Cagar Budaya (CB) yang di Lestarikan 84 %	200,000,000
2 22 05 2.02 03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya (CB) yang di Lestarikan	jumlah cagar budaya yang dimanfaatkan	Persentase Cagar Budaya (CB) Yang di lestarikan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 %	1 cagar budaya	84 Persen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Cagar Budaya (CB) yang di Lestarikan 84 %	200,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
TOTAL									135,738,473,000			1,052,353,103,320		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							20,032,833,000			19,967,833,000			
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							9,726,971,119			9,661,971,119			
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							20,000,000			20,000,000			
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Renstra/Renja	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 %	2,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,000,000
2	15	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	JUmlah Dokumen RKA- SKPD	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Semua Kabupaten/K ota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 %	2,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,000,000
2	15	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 %	2,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,000,000
2	15	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen DPA- SKPD	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 %	2,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,000,000
2	15	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 %	2,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,000,000
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen LKPJ,LKPJ AMD,LPPD Yang Tersedia	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 %	2,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,000,000
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen,SPiP,LAKIP,RB Yang Tersedia	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Dokumen	100 %	8,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	8,000,000
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,161,146,829			3,161,146,829			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 15 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Orang	100 %	3,154,146,829	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,154,146,829
2 15 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	100 %	2,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,000,000
2 15 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanh /smesteran SKPD	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	100 %	2,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,000,000
2 15 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	3,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,000,000
2 15 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								186,000,000					166,000,000
2 15 01 2.04 01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD*)	Jumlah waktu layanan penyediaan kebutuhan peningkatan retribusi daerah	Persentase Terpenuhi Administrasi PAD Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	146,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD*)	100 %	146,000,000
2 15 01 2.04 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD*)	Jumlah jenis retribusi yang terdata	Persentase Terpenuhi Administrasi PAD Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	10,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD*)	100 %	10,000,000
2 15 01 2.04 06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD*)	Jumlah dokumen penetapan wajib retribusi	Persentase Terpenuhi Administrasi PAD Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	20,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD*)	100 %	0
2 15 01 2.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD*)	Jumlah laporan realisasi daerah	Persentase Terpenuhi Administrasi PAD Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	10,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD*)	100 %	10,000,000
2 15 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								100,000,000					85,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 15 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis sarana dan prasarana disiplin pegawai yang tersedia	Persentase Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Jenis	100 %	20,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	20,000,000
2 15 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Yang Tersedia	Persentase Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	40,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	40,000,000
2 15 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat Sesuai Tupksi	Persentase Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Orang	100 %	25,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	25,000,000
2 15 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran		Persentase Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %		100 %	15,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
2 15 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								374,494,500	344,494,500				
2 15 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum		100 %	3 Unit/Set	100 %	4,507,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	4,507,000
2 15 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit/Set	100 %	40,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	40,000,000
2 15 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum		100 %	15 Unit/Set	100 %	5,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	5,000,000
2 15 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang tersedia	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Jenis	100 %	10,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	10,000,000
2 15 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan,	100 %	3 Jenis	100 %	19,987,500			Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	9,987,500

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Semua Kelurahan									
2 15 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Buku/Kora n	100 %	10,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	15,000,000
2 15 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu dalam 1 tahun	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Kali	100 %	75,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	50,000,000
2 15 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Yang Dilakukan	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	35 Kali	100 %	160,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	160,000,000
2 15 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Website/Aplikasi Yang Dikelola	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Website/A plikasi	100 %	50,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	50,000,000
2 15 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								180,000,000	180,000,000				
2 15 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan terbangun	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan	Persentase Terpenuhi Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	3 Unit/Set	100 %	50,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan terbangun	0	50,000,000
2 15 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya Yang Diadakan	Persentase Terpenuhi Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	1 Unit/Set/K wh	100 %	80,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan terbangun	0	80,000,000
2 15 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan terbangun	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang Diadakan	Persentase Terpenuhi Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	2 Unit/Set	100 %	50,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan terbangun	0	50,000,000
2 15 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								5,168,916,290	5,168,916,290				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 15 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Jumlah Surat Yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	5 Surat	100 %	5,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	0	5,000,000
2 15 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Jumlah Jenis Layanan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Yang Tertangani	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	3 Jenis	100 %	4,533,511,340	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	0	4,533,511,340
2 15 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Di Perbaiki	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	10 Unit/Set	100 %	51,759,450	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	0	51,759,450
2 15 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Jumlah Aparatur Internal Kantor	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	35 Orang	100 %	578,645,500	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	0	578,645,500
2 15 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								536,413,500				536,413,500	
2 15 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Unit	100 %	336,413,500	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	336,413,500
2 15 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Gedung Kantor/Bangunan Lainnya Yang Dipelihara	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	200,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	200,000,000
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								10,305,861,881				10,305,861,881	
2 15 02 2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota								1,266,510,000				1,266,510,000	
2 15 02 2.01 02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase tingkat keselamatan lalu lintas dan layanan angkutan jalan	Jumah Peserta Sosialisasi Kebijakan Rencana Induk LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peraturan Bidang Perhubungan Yang Ditetapkan (Peraturan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	50 Orang/Peserta	3 Dokumen	50,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat keselamatan lalu lintas dan layanan angkutan jalan	70 %	50,000,000
2 15 02 2.01 03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ	Persentase tingkat keselamatan lalu lintas dan layanan angkutan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Pelaksanaan Rencana	Jumlah Dokumen Peraturan Bidang Perhubungan Yang	Kota Pangkal Pinang, Semua	70 %	4 Dokumen	3 Dokumen	1,216,510,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH		Persentase tingkat keselamatan lalu lintas dan layanan angkutan	70 %	1,216,510,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
	Kabupaten/Kota	jalan	Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Ditetapkan (Peraturan	Kecamatan, Semua Kelurahan					(PAD)	jalan		
2 15 02 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								6,453,619,031				6,453,619,031
2 15 02 2.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase tingkat keselamatan lalu lintas dan layanan angkutan jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota Yang Tersedia	Jumlah Layanan Pendukung Kinerja Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	1 Jenis	3 Layanan	5,013,465,031	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat keselamatan lalu lintas dan layanan angkutan jalan	70 %	5,013,465,031
2 15 02 2.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase tingkat keselamatan lalu lintas dan layanan angkutan jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Dapat Di Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Layanan Pendukung Kinerja Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	1 Jenis	3 Layanan	1,440,154,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat keselamatan lalu lintas dan layanan angkutan jalan	70 %	1,440,154,000
2 15 02 2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C								234,600,000				234,600,000
2 15 02 2.03 03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	Jumlah Terminal Yang Akan Dikembangkan (Terminal)	Jumlah Angkutan Umum Keluar/Masuk Terminal Dalam 1 Tahun	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	3 Lokasi/Unit	2500 Unit	234,600,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	0	234,600,000
2 15 02 2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir								1,200,000,000				1,200,000,000
2 15 02 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase tingkat keselamatan lalu lintas dan layanan angkutan jalan	Jumlah Titik/Lokasi Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Serta Pemenuhan Jasa Pendukung Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam 1 Tahun	Jumlah Titik/Zona Parkir Yang Diselenggarakan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	4 Dokumen	4 Dokumen	1,200,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat keselamatan lalu lintas dan layanan angkutan jalan	70 %	1,200,000,000
2 15 02 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								641,132,850				641,132,850
2 15 02 2.05 03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase tingkat keselamatan lalu lintas dan layanan angkutan jalan	Data Kendaraan Umum/Barang Yang Akurat	Jumlah Kendaraan Umum/Barang Laik Jalan Yang Lulus Uji Di Kota Pangkalpinang	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	8000 Unit/Kenda raan	8000 Unit Kendaraan	239,154,600	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat keselamatan lalu lintas dan layanan angkutan jalan	70 %	239,154,600
2 15 02 2.05 05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase tingkat keselamatan lalu lintas dan layanan angkutan jalan	Jumlah Peserta Sosialisasi SOP Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Umum/Barang Laik Jalan Yang Lulus Uji Di Kota Pangkalpinang	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	50 Orang/Pes erta	8000 Unit Kendaraan	21,353,750	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat keselamatan lalu lintas dan layanan angkutan jalan	70 %	21,353,750

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
2 15 02 2.05 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase tingkat keselamatan lalulintas dan layanan angkutan jalan	Jumlah Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Umum/Barang Laik Jalan Yang Lulus Uji Di Kota Pangkalpinang	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	4 Jenis	8000 Unit Kendaraan	380,624,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat keselamatan lalulintas dan layanan angkutan jalan	70 %	380,624,500
2 15 02 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota								30,000,000				30,000,000
2 15 02 2.06 05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase tingkat keselamatan lalulintas dan layanan angkutan jalan	Jumlah Peserta Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pendukung Kinerja Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kab/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	20 Orang/Peserta	3 Layanan	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat keselamatan lalulintas dan layanan angkutan jalan	70 %	30,000,000
2 15 02 2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota								120,000,000				120,000,000
2 15 02 2.07 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	Dokumen Penilaian Andalalin Tersusun	Jumlah Layanan Pendukung Kinerja Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	4 Dokumen	3 Layanan	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	0	60,000,000
2 15 02 2.07 04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	Jumlah Pengawasan Pada Rekomendasi Andalalin di Setiap Bangunan	Jumlah Layanan Pendukung Kinerja Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	4 Dokumen	3 Layanan	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	0	60,000,000
2 15 02 2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan								25,000,000				25,000,000
2 15 02 2.08 01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Persentase tingkat keselamatan lalulintas dan layanan angkutan jalan	ASN yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Layanan Pendukung Kinerja Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ Di Jalan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	1 Orang/ASN	4 Layanan	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat keselamatan lalulintas dan layanan angkutan jalan	70 %	25,000,000
2 15 02 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								160,000,000				160,000,000
2 15 02 2.09 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	Jumlah Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pendukung Kinerja Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	12 Kali	1 Layanan	160,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	0	160,000,000
2 15 02 2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								135,000,000				135,000,000
2 15 02 2.10 01	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Angkutan	Jumlah Layanan Pendukung Kinerja Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan,	0	1 Dokumen	2 Layanan	105,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	0	105,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
	Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelayanan Angkutan Perkotaan Yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kelurahan								
2 15 02 2.10 02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Angkutan Perkotaan Kewenanga Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pendukung Kinerja Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan Yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	20 Peserta/Or ang	2 Layanan	30,000,000		Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	0	30,000,000
2 15 02 2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								40,000,000				40,000,000
2 15 02 2.14 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	Adanya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pendukung Kinerja Penerbitan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/K ota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	1 Kegiatan	1 Layanan	40,000,000		Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	0	40,000,000
TOTAL									20,032,833,000				19,967,833,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								5,004,821,000				6,236,942,000			
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4,384,696,000				5,596,642,000			
2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								42,000,000				42,000,000			
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen Renstra/Renja	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	100 %	2 dokumen	11 dokumen	6,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	6,000,000		
2	23	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	100 %	1 dokumen	11 dokumen	6,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	6,000,000		
2	23	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	100 %	1 dokumen	11 dokumen	6,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	6,000,000		
2	23	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen DPA-SKPD	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	11 dokumen	6,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	6,000,000		
2	23	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	100 %	1 dokumen	11 dokumen	6,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	6,000,000		
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Ikj, Ikj akhir masa jabatan, LPPD yang disusun	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	100 %	2 dokumen	11 dokumen	6,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	6,000,000		
2	23	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	jumlah dokumen SPIP, LAKIP dan RB	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	100 %	3 dokumen	11 dokumen	6,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	6,000,000		
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,252,685,000				3,333,702,000			
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Terlaksananya adminisrasi keuangan perangkat daerah	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	100 %	34 orang	100 %	3,240,685,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	3,321,702,000		
2	23	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	100 %	3 laporan	100 %	6,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	6,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 23 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran SKPD	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	100 %	3 laporan	100 %	6,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	6,000,000
2 23 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								92,500,000				63,500,000	
2 23 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah pakaian yang di adakan	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	100 %	54 stel	100 %	42,500,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	48,500,000
2 23 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	100 %	6 orang	100 %	50,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	15,000,000
2 23 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								231,326,000				245,505,000	
2 23 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	100 %	10 jenis	100 %	15,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	15,000,000
2 23 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	100 %	5 jenis	100 %	50,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	55,000,000
2 23 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	100 %	2 jenis	100 %	10,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	5,505,000
2 23 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	100 %	2 jenis	100 %	48,326,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	50,000,000
2 23 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	100 %	2 jenis	100 %	18,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	20,000,000
2 23 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	100 %	30 kali	100 %	90,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	100,000,000
2 23 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								128,685,000				1,282,740,000	
2 23 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang diadakan	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	100 %	1 unit	100 %	98,685,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	1,210,000,000
2 23 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	Persentase sarana dan prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana gedung	Terlaksananya pengadaan barang milik	Kota Pangkal Pinang,	100 %	1 set	100 %	30,000,000	PENDAPAT AN ASLI		Persentase sarana dan prasarana Aparatur	100 %	72,740,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Kantor atau Bangunan Lainnya	dalam kondisi baik	kantor/bangunan lainnya yang didakan	daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Taman Sari, Batin Tikal					DAERAH (PAD)		dalam kondisi baik		
2 23 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								387,500,000				382,500,000	
2 23 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	100 %	53 orang	100 %	127,500,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	130,000,000
2 23 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	100 %	50 unit	100 %	25,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	20,000,000
2 23 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	100 %	53 orang	100 %	235,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	232,500,000
2 23 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								250,000,000				246,695,000	
2 23 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	100 %	1 unit	100 %	60,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	56,500,000
2 23 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	100 %	8 unit	100 %	140,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	160,000,000
2 23 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	100 %	1 unit	100 %	50,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	30,195,000
2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN								590,125,000				605,300,000	
2 23 02 2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								470,125,000				530,300,000	
2 23 02 2.01 01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Persentase pelaksanaan pembinaan perpustakaan	jumlah sarana dan prasarana layanan perpustakaan elektronik yang terpelihara	Terlaksananya pengelolaan perpustakaan tingkat daerah Kabupaten/Kota sesuai standar yang berlaku	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	36 %	5 unit	11 jenis	30,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaksanaan pembinaan perpustakaan	36 %	30,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
2 23 02 2.01 02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pembinaan perpustakaan	jumlah perpustakaan yang sesuai standar nasional perpustakaan	Terlaksananya pengelolaan perpustakaan tingkat daerah Kabupaten/Kota sesuai standar yang berlaku	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	36 %	1 perpustakaan	11 jenis	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pelaksanaan pembinaan perpustakaan	36 %	50,000,000
2 23 02 2.01 04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Persentase pelaksanaan pembinaan perpustakaan	jumlah perpustakaan sekolah yang beri bimbingan dan supervisi serta memperoleh kualifikasi pengelola perpustakaan terbaik	Terlaksananya pengelolaan perpustakaan tingkat daerah Kabupaten/Kota sesuai standar yang berlaku	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	36 %	40 perpustakaan	11 jenis	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pelaksanaan pembinaan perpustakaan	36 %	65,000,000
2 23 02 2.01 07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pembinaan perpustakaan	Jumlah jenis layanan perpustakaan rujukan tingkat kabupaten/kota yang dikembangkan	Terlaksananya pengelolaan perpustakaan tingkat daerah Kabupaten/Kota sesuai standar yang berlaku	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	36 %	4 jenis layanan	11 jenis	230,125,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pelaksanaan pembinaan perpustakaan	36 %	283,300,000
2 23 02 2.01 09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Persentase pelaksanaan pembinaan perpustakaan	Jumlah bahan pustaka yang dikelola dan dikembangkan	Terlaksananya pengelolaan perpustakaan tingkat daerah Kabupaten/Kota sesuai standar yang berlaku	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	36 %	2200 eksemplar	11 jenis	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pelaksanaan pembinaan perpustakaan	36 %	102,000,000
2 23 02 2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								120,000,000				75,000,000
2 23 02 2.02 04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Persentase pelaksanaan pembinaan perpustakaan		jumlah jenis pembudayaan gemar membaca tingkat daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	36 %		2 jenis	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pelaksanaan pembinaan perpustakaan	36 %	40,000,000
2 23 02 2.02 05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pembinaan perpustakaan	jumlah duta baca tingkat dasar	jumlah jenis pembudayaan gemar membaca tingkat daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	36 %	2 duta baca	2 jenis	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pelaksanaan pembinaan perpustakaan	36 %	35,000,000
2 23 03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO								30,000,000				35,000,000
2 23 03 2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota								30,000,000				35,000,000
2 23 03 2.01 02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Persentase koleksi naskah kuno yang dilestarikan	jumlah naskah kuno yang dikembangkan, diolah, dan dialih mediakan	Tersedianya naskah kuno milik daerah Kabupaten/Kota yang dilestarikan	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	100 %	1 naskah kuno	1 naskah kuno	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase koleksi naskah kuno yang dilestarikan	100 %	35,000,000
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								430,000,000				410,000,000
2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP								340,000,000				330,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022														
Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN														
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 24 02 2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota									155,000,000				100,000,000
2 24 02 2.01 02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	1. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan	jumlah jenis Arsip yang dipelihara dan disusutkan	Tersedianya Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola dan dipelihara	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	0	2 jenis arsip	2 jenis arsip	80,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan	0	40,000,000
2 24 02 2.01 03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan	jumlah pencipta arsip (OPD) yang memperoleh kualifikasi pengawasan kearsipan "baik"	Tersedianya Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola dan dipelihara	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	0	10 opd	2 jenis arsip	75,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan	0	60,000,000
2 24 02 2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota									40,000,000				40,000,000
2 24 02 2.02 02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	1. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan	jumlah Meter linier arsip yang didata dalam JRA	Tersedianya Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	0	30 meter linier	30 meter linier	40,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan	0	40,000,000
2 24 02 2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota									145,000,000				190,000,000
2 24 02 2.03 01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	1. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan	jumlah jenis arsip yang disediakan dan diakses melalui JIKN	Tersedianya berkas arsip yang ditayangkan melalui JIKN	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	0	7 jenis arsip	7 berkas	50,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan	0	60,000,000
2 24 02 2.03 02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan	jumlah unit kearsipan yang memperoleh bimbingan/penyuluhan /supervisi kearsipan dan kualifikasi pengelola arsip terbaik	Tersedianya berkas arsip yang ditayangkan melalui JIKN	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	0	19 unit kearsipan	7 berkas	95,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan	0	130,000,000
2 24 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP									90,000,000				80,000,000
2 24 03 2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun									50,000,000				40,000,000
2 24 03 2.01 01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Persentase arsip statis yang dilindungi dan diselamatkan	jumlah arsip usul musnah OPD/pencipta arsip yang dinilai dan dilakukan pemusnahan	Tersedianya arsip usul musnah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	100 %	10 meter linier	10 meter linier	50,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase arsip statis yang dilindungi dan diselamatkan	100 %	40,000,000
2 24 03 2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang									40,000,000				40,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 24 03 2.05 01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Persentase arsip statis yang dilindungi dan diselamatkan	jumlah arsip tokoh/bangunan bernilai sejarah yang dicari/ditelusuri	Terlaksananya pencarian/penelusuran arsip statis Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	100 %	4 berkas arsip	4 berkas arsip	40,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase arsip statis yang dilindungi dan diselamatkan	100 %	40,000,000
TOTAL									5,434,821,000	6,646,942,000				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								17,842,921,000			5,336,872,035		
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5,333,125,535			5,336,872,035		
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								41,500,535			41,500,535		
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen Renstra/Renja	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	1 dokumen	100 %	14,060,500	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	14,060,500
1	04	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	1 dokumen	100 %	3,360,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,360,000
1	04	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	1 dokumen	100 %	1,500,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	1,500,000
1	04	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen DPA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	1 dokumen	100 %	3,360,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,360,000
1	04	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen DPA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	1 dokumen	100 %	1,500,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	1,500,000
1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen LKPJ AMJ, dan LPPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	2 dokumen	100 %	3,360,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,360,000
1	04	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen evaluasi SPIP, LAKIP, RB dan SPM	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	5 Dokumen	100 %	14,360,035	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	14,360,035
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,664,775,000			3,664,775,000		
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	31 ASN	100 %	3,536,275,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,536,275,000
1	04	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen Penatausahaan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	1 dokumen	100 %	10,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	10,000,000
1	04	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan akuntansi	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	1 laporan	100 %	3,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 04 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	1 dokumen	100 %	3,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,000,000
1 04 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	1 dokumen	100 %	3,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,000,000
1 04 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	1 dokumen	100 %	107,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	107,000,000
1 04 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	1 dokumen	100 %	2,500,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,500,000
1 04 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								17,500,000			21,246,500		
1 04 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	1 laporan	100 %	2,500,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,500,000
1 04 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %		100 %	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
1 04 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %		100 %	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
1 04 01 2.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %		100 %	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
1 04 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %		100 %	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,746,500
1 04 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah penatausahaan barang	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	500 barang	100 %	15,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	15,000,000
1 04 01 2.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %		100 %	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
1 04 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								367,500,000			367,500,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022														
Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 04 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya		100 %		100 %	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0
1 04 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	jumlah Pakaian yang diadakan	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya		100 %	100 orang	100 %	150,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	150,000,000
1 04 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah dokumen kepegawaian	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya		100 %	1 dokumen	100 %	157,500,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	157,500,000
1 04 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya		100 %		100 %	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0
1 04 01 2.05 06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya		100 %		100 %	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0
1 04 01 2.05 07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya		100 %		100 %	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0
1 04 01 2.05 08	Pemindahan Tugas ASN	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya		100 %		100 %	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0
1 04 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya		100 %	10 ASN	100 %	50,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	50,000,000
1 04 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya		100 %		100 %	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0
1 04 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah Peserta	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya		100 %	15 orang	100 %	10,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	10,000,000
1 04 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								417,150,000	417,150,000				
1 04 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran		100 %	15 jenis	100 %	7,500,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	7,500,000
1 04 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran		100 %	3 set	100 %	2,150,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	2,150,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
										(PAD)			
1 04 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran		100 %		100 %	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 % 0
1 04 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran		100 %	20 jenis	100 %	24,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 % 24,000,000
1 04 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran		100 %	2 jenis	100 %	12,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 % 12,000,000
1 04 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran		100 %	6 koran	100 %	5,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 % 5,000,000
1 04 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran		100 %		100 %	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 % 0
1 04 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran		100 %		100 %	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 % 0
1 04 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran		100 %	12 kali	100 %	150,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 % 150,000,000
1 04 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah arsip dinamis yang ditata	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran		100 %	1 berkas	100 %	35,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 % 35,000,000
1 04 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah website/aplikasi yang dikelola	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran		100 %	2 aplikasi	100 %	181,500,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 % 181,500,000
1 04 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									150,000,000			150,000,000
1 04 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		100 %		100 %	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 % 0
1 04 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		100 %		100 %	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 % 0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022														
Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 04 01 2.07 03	Pengadaan Alat Besar	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		100 %		100 %	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1 04 01 2.07 04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		100 %		100 %	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1 04 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		100 %		100 %	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1 04 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		100 %	3 unit	100 %	150,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	150,000,000
1 04 01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		100 %		100 %	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1 04 01 2.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		100 %		100 %	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1 04 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		100 %		100 %	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1 04 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		100 %		100 %	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1 04 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		100 %		100 %	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1 04 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								345,000,000	345,000,000				
1 04 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah surat yang tertata	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		100 %	5 surat	100 %	45,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	45,000,000
1 04 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		100 %	31 orang	100 %	135,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	135,000,000
1 04 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		100 %		100 %	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 04 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		100 %	10 orang	100 %	165,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	165,000,000
1 04 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								329,700,000				329,700,000	
1 04 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana apapratur dalam kondisi baik		100 %	4 unit	100 %	175,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	175,000,000
1 04 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana apapratur dalam kondisi baik		100 %	7 Unit	100 %	29,700,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	29,700,000
1 04 01 2.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		Persentase sarana dan prasarana apapratur dalam kondisi baik		100 %		100 %	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1 04 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		Persentase sarana dan prasarana apapratur dalam kondisi baik		100 %		100 %	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1 04 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana apapratur dalam kondisi baik		100 %	4 set	100 %	25,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	25,000,000
1 04 01 2.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		Persentase sarana dan prasarana apapratur dalam kondisi baik		100 %		100 %	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1 04 01 2.09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		Persentase sarana dan prasarana apapratur dalam kondisi baik		100 %		100 %	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1 04 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah gedung kantor/bangunanlainnya yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana apapratur dalam kondisi baik		100 %	1 unit	100 %	100,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	100,000,000
1 04 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		Persentase sarana dan prasarana apapratur dalam kondisi baik		100 %		100 %	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 04 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		Persentase sarana dan prasarana apapratur dalam kondisi baik		100 %		100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1 04 01 2.09 12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		Persentase sarana dan prasarana apapratur dalam kondisi baik		100 %		100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								2,459,443,780				0	
1 04 02 2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								279,519,145				0	
1 04 02 2.01 01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kualitas perumahan	Jumlah Dokumen data identifikasi	Persentase peningkatan kualitas perumahan		80 %	1 Dokumen	80 %	124,999,855	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan kualitas perumahan	80 %	0
1 04 02 2.01 02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Persentase peningkatan kualitas perumahan	Jumlah Dokumen data identifikasi	Persentase peningkatan kualitas perumahan		80 %	1 Dokumen	80 %	34,820,060	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan kualitas perumahan	80 %	0
1 04 02 2.01 03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Persentase peningkatan kualitas perumahan	Jumlah Dokumen Pengumpulan Data	Persentase peningkatan kualitas perumahan		80 %	1 Dokumen	80 %	50,000,060	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan kualitas perumahan	80 %	0
1 04 02 2.01 04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Persentase peningkatan kualitas perumahan	Jumlah Dokumen Pendataan	Persentase peningkatan kualitas perumahan		80 %	1 Dokumen	80 %	35,263,285	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan kualitas perumahan	80 %	0
1 04 02 2.01 05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kualitas perumahan		Persentase peningkatan kualitas perumahan		80 %		80 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan kualitas perumahan	80 %	0
1 04 02 2.01 06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Persentase peningkatan kualitas perumahan	Jumlah Dokumen Pendataan	Persentase peningkatan kualitas perumahan		80 %	1 Dokumen	80 %	34,435,885	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan kualitas perumahan	80 %	0
1 04 02 2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								245,000,000					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 04 02 2.02 01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Persentase peningkatan kualitas perumahan	Jumlah Peserta Sosialisasi	Persentase peningkatan kualitas perumahan		80 %	20 orang	80 %	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan kualitas perumahan	80 %	0
1 04 02 2.02 02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Persentase peningkatan kualitas perumahan		Persentase peningkatan kualitas perumahan		80 %		80 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan kualitas perumahan	80 %	0
1 04 02 2.02 03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Persentase peningkatan kualitas perumahan	Jumlah Peserta Sosialisasi	Persentase peningkatan kualitas perumahan		80 %	20 Orang	80 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan kualitas perumahan	80 %	0
1 04 02 2.02 04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Persentase peningkatan kualitas perumahan	Jumlah tim yang terbentuk	Persentase peningkatan kualitas perumahan		80 %	20 Orang	80 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan kualitas perumahan	80 %	0
1 04 02 2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								200,000,000				0	
1 04 02 2.03 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Persentase peningkatan kualitas perumahan	Jumlah rumah yang direbahilitasi	Persentase peningkatan kualitas perumahan		80 %	3 Rumah	80 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan kualitas perumahan	80 %	0
1 04 02 2.03 02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kualitas perumahan	Jumlah Dokumen Siteplan/DED	Persentase peningkatan kualitas perumahan		80 %	1 Dokumen	80 %	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan kualitas perumahan	80 %	0
1 04 02 2.03 03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Persentase peningkatan kualitas perumahan		Persentase peningkatan kualitas perumahan		80 %		80 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan kualitas perumahan	80 %	0
1 04 02 2.03 04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Persentase peningkatan kualitas perumahan	Jumlah rumah yang dibangun	Persentase peningkatan kualitas perumahan		80 %	2 Rumah	80 %	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan kualitas perumahan	80 %	0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 04 02 2.03 05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kualitas perumahan		Persentase peningkatan kualitas perumahan		80 %		80 %		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan kualitas perumahan	80 %	
1 04 02 2.03 06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kualitas perumahan		Persentase peningkatan kualitas perumahan		80 %		80 %		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan kualitas perumahan	80 %	
1 04 02 2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								10,000,000					
1 04 02 2.04 01	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kualitas perumahan	Jumlah rumah yang dibagikan	Persentase peningkatan kualitas perumahan		80 %	5 Rumah	80 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan kualitas perumahan	80 %	
1 04 02 2.04 02	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kualitas perumahan	Jumlah Dokumen serah terima bantuan rumah	Persentase peningkatan kualitas perumahan		80 %	1 Dokumen	80 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan kualitas perumahan	80 %	
1 04 02 2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus								1,350,000,000					
1 04 02 2.05 01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Persentase peningkatan kualitas perumahan	Jumlah Peserta	Persentase peningkatan kualitas perumahan		80 %	30 orang	80 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan kualitas perumahan	80 %	
1 04 02 2.05 02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase peningkatan kualitas perumahan	Jumlah Waktu Pelayanan dan Pengelolaan UPT Rusunawa	Persentase peningkatan kualitas perumahan		80 %	75 Jumlah Penghuni	80 %	1,300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan kualitas perumahan	80 %	
1 04 02 2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan								325,000,000					
1 04 02 2.06 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Persentase peningkatan kualitas perumahan	Jumlah data izin yang difasilitasi secara elektronik	Persentase peningkatan kualitas perumahan		80 %	0 data	80 %	125,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan kualitas perumahan	80 %	
1 04 02 2.06 02	Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk	Persentase peningkatan kualitas perumahan	Jumlah peserta pembinaan	Persentase peningkatan kualitas perumahan		80 %	20 orang	80 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-		Persentase peningkatan kualitas perumahan	80 %	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
	Penyelenggaraan Rumah Sederhana									Dana Alokasi Umum			
1 04 02 2.06 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase peningkatan kualitas perumahan	Jumlah dokumen	Persentase peningkatan kualitas perumahan		80 %	1 dokumen	80 %	100,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan kualitas perumahan	80 %	0
1 04 02 2.06 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Persentase peningkatan kualitas perumahan	Jumlah kerjasama yang terjalin	Persentase peningkatan kualitas perumahan		80 %	1 dokumen	80 %	50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan kualitas perumahan	80 %	0
1 04 02 2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)								49,924,635				0
1 04 02 2.07 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Persentase peningkatan kualitas perumahan	Jumlah Dokumen Penerbitan SKGB	persentase peningkatan kualitas perumahan		80 %	1 Dokumen	80 %	49,924,635	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan kualitas perumahan	80 %	0
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN								6,677,500,000				0
1 04 03 2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman								1,557,500,000				0
1 04 03 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan		Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan		90 % ; 100 %		100 %	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan	90 % ; 100 %	0
1 04 03 2.01 02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana yang disusun/direview	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan		90 % ; 100 %	1 Dokumen	100 %	57,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan	90 % ; 100 %	0
1 04 03 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan	Jumlah Dokumen Pengendalian	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan		90 % ; 100 %	1 Dokumen	100 %	1,500,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan	90 % ; 100 %	0
1 04 03 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha								570,000,000				0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 04 03 2.02 01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan	Jumlah dokumen penetapan lokasi	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan		90 % ; 100 %	1 Dokumen	100 %	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan	90 % ; 100 %	0
1 04 03 2.02 02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan	Jumlah Dokumen yang disusun	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan		90 % ; 100 %	1 Dokumen	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan	90 % ; 100 %	0
1 04 03 2.02 03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan		Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan		90 % ; 100 %		100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan	90 % ; 100 %	0
1 04 03 2.02 04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan	Jumlah Dokumen	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan		90 % ; 100 %	1 Dokumen	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan	90 % ; 100 %	0
1 04 03 2.02 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan	Jumlah Dokumen	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan		90 % ; 100 %	1 Dokumen	100 %	120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan	90 % ; 100 %	0
1 04 03 2.02 06	Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan		Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan		90 % ; 100 %		100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan	90 % ; 100 %	0
1 04 03 2.02 07	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan		Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan		90 % ; 100 %		100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan	90 % ; 100 %	0
1 04 03 2.02 08	Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan	Jumlah dokumen kebijakan	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan		90 % ; 100 %	1 dokumen	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan	90 % ; 100 %	0
1 04 03 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha								4,550,000,000				0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022														
Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 04 03 2.03 01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Permugara n Permukiman Kumuh	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan	Jumlah Dokumeen DED	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan		90 % ; 100 %	1 dokumen	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan	90 % ; 100 %	0
1 04 03 2.03 02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan	Jumlah rumah yang diperbaiki	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan		90 % ; 100 %	15 Rumah	100 %	1,200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan	90 % ; 100 %	0
1 04 03 2.03 03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan	Jumlah kerjasama yang terjalin	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan		90 % ; 100 %	1 Dokumen	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan	90 % ; 100 %	0
1 04 03 2.03 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaa n Permukiman Kumuh	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan		Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan		90 % ; 100 %		100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan	90 % ; 100 %	0
1 04 03 2.03 05	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan		Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan		90 % ; 100 %		100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan	90 % ; 100 %	0
1 04 03 2.03 06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan	Jumlah Permukiman Kumuh yang dipugar	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan		90 % ; 100 %	40 Unit	100 %	3,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan	90 % ; 100 %	0
1 04 03 2.03 07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan	Jumlah dokumen data verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan		90 % ; 100 %	1 dokumen	100 %	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan	90 % ; 100 %	0
1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH								1,100,000,000					0
1 04 04 2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota								1,100,000,000					0
1 04 04 2.01 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya	persentase peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman di kota ; Proporsi rumah tangga	Jumlah Rumah yang diperbaiki	persentase peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman di kota ; Proporsi rumah tangga		85 % ; 94 %	50 unit	100 %	1,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		persentase peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman di kota ; Proporsi rumah tangga	85 % ; 94 %	0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau		yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau						Umum		yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau		
1 04 04 2.01 02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	persentase peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman di kota ; Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Jumlah PSU yang mendukung RTLH	persentase peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman di kota ; Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau		85 % ; 94 %	1000 Meter	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman di kota ; Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	85 % ; 94 %	0
1 04 04 2.01 03	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	persentase peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman di kota ; Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau		persentase peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman di kota ; Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau		85 % ; 94 %		100 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		persentase peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman di kota ; Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	85 % ; 94 %	0
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)								2,247,851,685					0
1 04 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan								2,247,851,685					0
1 04 05 2.01 01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Persentase peningkatan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Persentase peningkatan PSU Perumahan		75 %	1 Dokumen	75 %	116,996,795	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan PSU Perumahan	75 %	0
1 04 05 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Persentase peningkatan PSU Perumahan	Jumlah PSU yang tersedia	Persentase peningkatan PSU Perumahan		75 %	6 Unit	75 %	2,050,542,040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan PSU Perumahan	75 %	0
1 04 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Persentase peningkatan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen	Persentase peningkatan PSU Perumahan		75 %	3 Dokumen	75 %	80,312,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan PSU Perumahan	75 %	0
1 04 06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								25,000,000					0
1 04 06 2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil								25,000,000					0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 04 06 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Persentase pelayanan legalisasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah dokumen sertifikasi yang terbit	Persentase pelayanan legalisasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan legalisasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	100 %	0
TOTAL									17,842,921,000				5,336,872,035	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								6,617,575,000				7,366,241,000	
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4,270,304,743				4,661,739,499	
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								16,508,000				32,336,000	
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								4,500,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			20,000,000	
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		3,836,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			3,836,000	
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Kinerja		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Dokumen		8,172,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			8,500,000	
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,237,007,243				3,319,126,199	
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		36 Orang		3,232,318,243	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			3,313,126,199	
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD.		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		1,917,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			2,000,000	
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD.				3 Laporan		2,772,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			4,000,000	
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								67,947,000				72,947,000	
1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pakaian yang diadakan		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80 Stel		52,947,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			52,947,000	
1	06	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas		Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi.		Kota Pangkal Pinang, Semua		5 Orang		15,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH			20,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
	dan Fungsi				Kecamatan, Semua Kelurahan					(PAD)			
1 06 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								133,373,000				189,710,300
1 06 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan.		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Unit/Set		5,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			6,000,000
1 06 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 Unit/Set		8,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000
1 06 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah makanan dan minuman yang disediakan.		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		570 Porsi		28,373,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			31,210,300
1 06 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan.		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9 Unit/Set		10,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			11,000,000
1 06 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah makanan dan minuman yang disediakan.		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 Porsi		5,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			7,500,000
1 06 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan.		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		22 Kali		75,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			110,000,000
1 06 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah website/aplikasi yang dikelola.		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Website		2,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			14,000,000
1 06 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								50,000,000				115,000,000
1 06 01 2.07 05	Pengadaan Mebel		Jumlah meubeleu yang diadakan.		Kota Pangkal Pinang, Semua		15 Unit/Set		35,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH			50,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kecamatan, Semua Kelurahan					(PAD)				
1 06 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan.		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Unit/Set		15,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				65,000,000
1 06 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								407,149,500					415,100,000
1 06 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani.		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		95 Orang		77,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				84,700,000
1 06 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki.		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		38 Unit/Set		17,249,500	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				17,500,000
1 06 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor.		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13 Orang		312,900,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				312,900,000
1 06 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								358,320,000					517,520,000
1 06 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara.		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		44,760,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				45,960,000
1 06 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara.		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 Unit		268,560,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				286,560,000
1 06 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara.		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		45,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				185,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL								783,066,000				803,007,000
1 06 02 2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota								35,000,000				35,000,000
1 06 02 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				35,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			35,000,000
1 06 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota								748,066,000				768,007,000
1 06 02 2.03 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau relawan yang disediakan		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60 orang		685,327,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			685,327,000
1 06 02 2.03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota								31,500,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			31,500,000
1 06 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota								24,180,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			27,180,000
1 06 02 2.03 05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)								7,059,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			24,000,000
1 06 03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN								13,000,000				13,000,000
1 06 03 2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal								13,000,000				13,000,000
1 06 03 2.01 01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota yang dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 Orang		13,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			13,000,000
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								621,827,257				802,072,501
1 06 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								372,327,257				532,572,501

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 06 04 2.01 01	Penyediaan Permakanan		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan Gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi.		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200 Orang		82,400,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			137,400,000	
1 06 04 2.01 02	Penyediaan Sandang		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang menerima paket sandang		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200 Orang		42,400,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			68,400,000	
1 06 04 2.01 03	Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang memanfaatkan alat bantu		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		70 Orang		60,777,257	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			123,000,000	
1 06 04 2.01 04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang direunifikasi dengan keluarga		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40 Orang		10,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			15,000,000	
1 06 04 2.01 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut		Kota Pangkal Pinang, Semua		40 Orang		10,750,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH			15,750,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
			Usia Terlantar, dan Gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik,mental, spritual dan sosial sesuai standar dikeluarga, masyarakat, Dinas sosial, rumah singgah/shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial		Kecamatan, Semua Kelurahan					(PAD)			
1 06 04 2.01 06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 KK		85,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			88,022,501
1 06 04 2.01 07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 Orang		5,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000
1 06 04 2.01 08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 Orang		5,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			7,000,000
1 06 04 2.01 11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 Orang		5,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			7,000,000
1 06 04 2.01 12	Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang di rujuk		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		75 Orang		66,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			66,000,000
1 06 04 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial								249,500,000				269,500,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 06 04 2.02 01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 SLRT		60,600,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			65,600,000	
1 06 04 2.02 02	Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tim Patroli		63,400,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			63,400,000	
1 06 04 2.02 12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 RPS		100,500,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			110,500,000	
1 06 04 2.02 14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		Jumlah MoU/Kerjasama antar lembaga dan kemitraan yang disepakati		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 MoU		25,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			30,000,000	
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								248,850,000				331,850,000	
1 06 05 2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar								40,000,000				50,000,000	
1 06 05 2.01 01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang dijangkau		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 Orang		5,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	
1 06 05 2.01 02	Rujukan Anak-Anak Terlantar		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang dirujuk				20 Orang		25,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			30,000,000	
1 06 05 2.01 03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar		Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar skala kota		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Kali		10,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	
1 06 05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								208,850,000				281,850,000	
1 06 05 2.02 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah FM yang terdata dalam DTKS		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13000 KK		105,850,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			105,850,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 06 05 2.02 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah PMKS yang masuk dalam sistem Pemutakhiran Data		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2560 KK		2,000,000					27,000,000
1 06 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah FM (PKH dan Non PKH) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		28 KK		61,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				105,000,000
1 06 05 2.02 04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat								40,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				44,000,000
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA								680,527,000				754,572,000	
1 06 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota								130,500,000				195,000,000	
1 06 06 2.01 01	Penyediaan Makanan								40,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				60,000,000
1 06 06 2.01 02	Penyediaan Sandang								40,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				55,000,000
1 06 06 2.01 03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi								25,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
1 06 06 2.01 04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan								23,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				25,000,000
1 06 06 2.01 05	Pelayanan Dukungan Psikososial								2,500,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000
1 06 06 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota								550,027,000				559,572,000	
1 06 06 2.02 01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana								16,600,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				24,600,000
1 06 06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana								533,427,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				534,972,000
TOTAL									6,617,575,000				7,366,241,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN													
6	01				INSPEKTORAT DAERAH										9,288,577,000			0
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										6,774,824,300			0
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										24,895,500			0
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen Renstra/Renja	Terpenuhiya penyampaian laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar	100 %	2 Dokumen	100 %	3,556,500	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen RKA- SKPD	Terpenuhiya penyampaian laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	1 Dokumen	100 %	3,556,500	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
6	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terpenuhiya penyampaian laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	1 Dokumen	100 %	3,556,500	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
6	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen DPA- SKPD	Terpenuhiya penyampaian laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	1 Dokumen	100 %	3,556,500	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
6	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	Terpenuhiya penyampaian laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	1 Dokumen	100 %	3,556,500	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen LKPJ, LKPJ AMJ, LPPD yang disusun	Terpenuhiya penyampaian laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	1 Dokumen	100 %	3,556,500	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen LAKIP	Terpenuhiya penyampaian laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	1 Dokumen	100 %	3,556,500	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										4,299,246,500			0
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Terpenuhiya penyampaian laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 Orang	100 %	4,288,577,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Terpenuhiya penyampaian laporan kinerja dan keuangan	Kota Pangkal Pinang, Girimaya,	100 %	1 Laporan	100 %	3,556,500	PENDAPAT AN ASLI DAERAH		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	SKPD	waktu		perangkat daerah tepat waktu	Sriwijaya					(PAD)		waktu		
6 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran SKPD	Terpenuhinya penyampaian laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	1 Laporan	100 %	3,556,500	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
6 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Terpenuhinya penyampaian laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	1 Laporan	100 %	3,556,500	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
6 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								439,207,000					0
6 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah pakaian yang di adakan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	60 Stel	100 %	64,400,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0
6 01 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	4 Laporan	100 %	11,947,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0
6 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	50 Orang	100 %	362,860,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0
6 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,079,581,640					0
6 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	1 Jenis	100 %	35,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
6 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	2 Set	100 %	200,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
6 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	1 Set	100 %	150,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
6 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	2 Jenis	100 %	135,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
6 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	1 Jenis	100 %	75,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022														
Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	24 Kali	100 %	250,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
6 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Arsip Dinamis yang ditata	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	120 Berkas	100 %	61,158,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
6 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah website/aplikasi yang dikelola	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	5 173423640	100 %	173,423,640	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
6 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								357,033,660				0	
6 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah meubeler yang diadakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	1 Set	100 %	75,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
6 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	1 Set	100 %	75,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
6 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang didakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	1 Unit	100 %	150,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
6 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasaranan pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang diadakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	1 Unit	100 %	57,033,660	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
6 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								325,000,000				0	
6 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah surat yang disediakan	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	1500 Surat	100 %	75,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
6 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah waktu layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tertangani	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	12 Bulan	100 %	150,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
6 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	50 Unit	100 %	75,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
6 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya,	100 %	50 Orang	100 %	25,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Sriwijaya					(PAD)			
6 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								249,860,000				0
6 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah gedung kentor/bangunan lainnya yang dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Gimimaya, Sriwijaya	100 %	1 Unit	100 %	249,860,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN								1,768,767,700				0
6 01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal								1,342,789,700				0
6 01 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Pangkal Pinang, Gimimaya, Sriwijaya	0	150 LHP	100 %	457,016,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	0	0
6 01 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Pangkal Pinang, Gimimaya, Sriwijaya	0	2 LHP	100 %	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	0	0
6 01 02 2.01 03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Laporan Hasil Reviu Kinerja	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Pangkal Pinang, Gimimaya, Sriwijaya	0	68 LHR	100 %	129,928,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	0	0
6 01 02 2.01 04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Laporan Hasil Reviu Keuangan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Pangkal Pinang, Gimimaya, Sriwijaya	0	68 LHR	100 %	120,928,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	0	0
6 01 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Pangkal Pinang, Gimimaya, Sriwijaya	0		100 %	484,917,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	0	0
6 01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								425,978,000				0
6 01 02 2.02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Pelaksanaan Penyelesaian TPTGR oleh Majelis Pertimbangan dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Pangkal Pinang, Gimimaya, Sriwijaya	0	4 Laporan	100 %	216,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	0	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6 01 02 2.02 02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	0	10 Laporan	100 %	209,928,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	0	0
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								744,985,000				0	
6 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan								54,505,000				0	
6 01 03 2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Persentase OPD dengan tingkat Index Reformasi Birokrasi Minimal B	Jumlah Laporan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	85 %	5 Laporan	100 %	34,505,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase OPD dengan tingkat Index Reformasi Birokrasi Minimal B	85 %	0
6 01 03 2.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Persentase OPD dengan tingkat Index Reformasi Birokrasi Minimal B		Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan		85 %		100 %	20,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase OPD dengan tingkat Index Reformasi Birokrasi Minimal B	85 %	0
6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi								690,480,000				0	
6 01 03 2.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase OPD yang mendapatkan Asistensi dan Pendampingan	Jumlah Laporan Klinik Konsultasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kota Pangkalpinang	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	0	4 Laporan	100 %	71,765,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase OPD yang mendapatkan Asistensi dan Pendampingan	0	0
6 01 03 2.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase OPD yang mendapatkan Asistensi dan Pendampingan	Jumlah Laporan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	0	4 Laporan	100 %	61,680,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase OPD yang mendapatkan Asistensi dan Pendampingan	0	0
6 01 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase OPD yang mendapatkan Asistensi dan Pendampingan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	0	4 Laporan	100 %	419,375,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase OPD yang mendapatkan Asistensi dan Pendampingan	0	0
6 01 03 2.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Persentase OPD yang mendapatkan Asistensi dan Pendampingan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	0	4 Laporan	100 %	137,660,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase OPD yang mendapatkan Asistensi dan Pendampingan	0	0
TOTAL									9,288,577,000				0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BUKIT INTAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BUKIT INTAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								7,148,399,081					
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								6,498,399,081					
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								19,279,000					
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Renstra yang disusun	Persentase laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	12,273,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Renja (RKT,RKA) yang disusun	Persentase laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	3,503,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen SPIP yang disusun	Persentase laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	3,503,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5,561,483,500					
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Persentase laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	100 %	55 orang	100 %	5,555,289,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Persentase laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	3,077,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Persentase laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	3,117,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								60,000,000					
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah pakaian yang di adakan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	100 %	2 stel	100 %	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BUKIT INTAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BUKIT INTAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								182,136,581					0
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Pesentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Pesentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	100 %	4 Jenis	100 %	63,600,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Pesentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	100 %	8 jenis	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan	Pesentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	100 %	3 koran	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Pesentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	100 %	15 kali	100 %	88,536,581	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								558,000,000					0
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah surat yang disediakan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	100 %	10 Surat	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Layanan Komunikasi sumber daya air dan listrik yang tertangani	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	100 %	1 Tahun	100 %	80,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	100 %	8 Unit	100 %	28,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BUKIT INTAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BUKIT INTAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	100 %	18 orang	100 %	440,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								117,500,000				0	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	35,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara		100 %		100 %	32,000,000			Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara		100 %	1 Unit	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								220,000,000				0	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								140,000,000				0	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	100 %	1 Kegiatan	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	0
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Gotong Royong	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	100 %	300 orang	100 %	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	0
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								20,000,000				0	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu	Persentase terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu tingkat kecamatan	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	100 %	200 orang	200 orang	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	0
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								60,000,000				0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BUKIT INTAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BUKIT INTAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Kegiatan pelaksanaan Hari Jadi Kota Pangkalpinang	Persentase terlaksananya Hari Jadi Kota Pangkalpinang	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	100 %	2 Kegiatan	2 Kegiatan	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	0
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								190,000,000				0	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								190,000,000				0	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Kehadiran Masyarakat Yang Diundang Dalam Musrenbang	persentase terlaksananya pembangunan Sarana dan Prasarana di kelurahan Sinar Bulan	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	100 %	150 orang	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	0
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah PKK yang dibina	persentase terlaksananya pembangunan Sarana dan Prasarana di kelurahan Sinar Bulan	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	100 %	8 PKK	100 %	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	0
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah kelurahan Yang di Bina	persentase terlaksananya pembangunan Sarana dan Prasarana di kelurahan Sinar Bulan	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	100 %	7 Kelurahan	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	0
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								20,000,000				0	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								20,000,000				0	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah Patroli Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah Kecamatan	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan yang terlaksana	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	0	12 kali	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	0	0
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								220,000,000				0	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								220,000,000				0	
7 01 05 2.01 07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Di Kecamatan	Jumlah Peserta STQ/MTQ	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	100 %	150 orang	100 %	220,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Di Kecamatan	100 %	0
TOTAL									7,148,399,081				0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BUKIT INTAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Pasir Putih

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								595,000,000			0		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								145,000,000			0		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								145,000,000			0		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu Pelayanan adminitrasi Tepat Waktu	Jumlah Pegawai ASN Kelurahan Pasir Putih yang terlayani	Persentase Pelayanan terhadap masyarakat di kelurahan pasir putih yang terlaksanakan	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Pasir Putih	100 %	14 orang	100 %	145,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase waktu Pelayanan adminitrasi Tepat Waktu	100 %	0
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								450,000,000			0		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								450,000,000			0		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah Jenis Pembangunan Sarana dan prasarana Kel. Pasir Putih	persentase terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Pasir Putih	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Pasir Putih	100 %	3 jenis	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	100 %	0
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pasir Putih Yang Terlayani	persentase terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Pasir Putih	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Pasir Putih	100 %	4 lembaga	100 %	350,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	100 %	0
TOTAL													595,000,000			0		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BUKIT INTAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0002 Kelurahan Sinar Bulan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								595,000,000			0		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								145,000,000			0		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								145,000,000			0		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu Pelayanan adminitrasi Tepat Waktu		Persentase Pelayanan terhadap masyarakat di kelurahan Sinar Bulan yang terlaksanakan		100 %		100 %	145,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase waktu Pelayanan adminitrasi Tepat Waktu	100 %	0
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								450,000,000			0		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								450,000,000			0		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun		persentase terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Sinar Bulan	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Sinar Bulan	100 %		100 %	100,000,000			Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun	100 %	0
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sinar Bulan Yang Terlayani	persentase terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Sinar Bulan	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	100 %	4 lembaga	100 %	350,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun	100 %	0
TOTAL													595,000,000				0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BUKIT INTAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Temberan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN										575,000,000			
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										145,000,000			
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan										145,000,000			
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu Pelayanan adminitrasi Tepat Waktu	Jumlah Pegawai ASN Kelurahan Sinar Bulan yang terlayani	Persentase Pelayanan terhadap masyarakat di kelurahan Temberan yang terlaksanakan	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Temberan	100 %	13 orang	100 %	145,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase waktu Pelayanan adminitrasi Tepat Waktu	100 %	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										430,000,000			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										430,000,000			
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah Jenis Pembangunan Sarana dan prasarana Kel. temberan	persentase terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Temberan	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Temberan	100 %	3 jenis	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun	100 %	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Temberan Yang Terlayani	persentase terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Temberan	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Temberan	100 %	4 lembaga	100 %	330,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun	100 %	
TOTAL													575,000,000					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BUKIT INTAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Semabung Lama

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN							625,000,000				0		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							145,000,000				0		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							145,000,000				0		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu Pelayanan adminitrasi Tepat Waktu	Jumlah Pegawai ASN Kelurahan Semabung lama yang terlayani	Persentase Pelayanan terhadap masyarakat di kelurahan Semabung lama yang terlaksanakan	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semabung Lama	100 %	12 orang	100 %	145,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase waktu Pelayanan adminitrasi Tepat Waktu	100 %	0
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							480,000,000				0		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							480,000,000				0		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	persentase terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Semabung lama	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semabung Lama	100 %	3 jenis	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	100 %	0
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Semabung Lama Yang Terlayani	persentase terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Semabung lama	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semabung Lama	100 %	4 lembaga	100 %	380,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	100 %	0
TOTAL													625,000,000				0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BUKIT INTAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0005 Kelurahan Air Mawar

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN									575,000,000			0	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									145,000,000			0	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan									145,000,000			0	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu Pelayanan adminitrasi Tepat Waktu	Jumlah Pegawai ASN Kelurahan Air Mawar yang terlayani	Persentase Pelayanan terhadap masyarakat di kelurahan Air Mawar yang terlaksanakan	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	100 %	13 orang	100 %	145,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase waktu Pelayanan adminitrasi Tepat Waktu	100 %	0
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									430,000,000			0	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									430,000,000			0	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun		persentase terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Air Mawar		100 %		100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	100 %	0
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Air Mawar Yang Terlayani	persentase terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Air Mawar	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	100 %	4 lembaga	100 %	330,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	100 %	0
TOTAL													575,000,000			0		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BUKIT INTAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0006 Kelurahan Bacang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								595,000,000			0		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								145,000,000			0		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								145,000,000			0		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu Pelayanan adminitrasi Tepat Waktu	Jumlah Pegawai ASN Kelurahan Bacang yang terlayani	Persentase Pelayanan terhadap masyarakat di kelurahan Bacang yang terlaksanakan	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Bacang	100 %	14 orang	100 %	145,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase waktu Pelayanan adminitrasi Tepat Waktu	100 %	0
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								450,000,000			0		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								450,000,000			0		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah Jenis Pembangunan Sarana dan prasarana Kel. Air Mawar	persentase terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Bacang	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Bacang	100 %	3 jenis	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	100 %	0
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bacang Yang Terlayani	persentase terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Bacang	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Bacang	100 %	4 lembaga	100 %	350,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	100 %	0
TOTAL													595,000,000			0		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BUKIT INTAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0007 Kelurahan Air Itam

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								595,000,000				0	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								145,000,000				0	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								145,000,000				0	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu Pelayanan adminitrasi Tepat Waktu	Jumlah Pegawai ASN Kelurahan Air Itam yang terlayani	Persentase Pelayanan terhadap masyarakat di kelurahan Air Itam yang terlaksanakan	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	100 %	12 orang	100 %	145,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase waktu Pelayanan adminitrasi Tepat Waktu	100 %	0
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								450,000,000				0	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								450,000,000				0	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah Jenis Pembangunan Sarana dan prasarana Kel. Temberan	persentase terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Air Itam	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	100 %	3 jenis	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	100 %	0
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Air Itam Yang Terlayani	persentase terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Air Itam	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	100 %	4 lembaga	100 %	350,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	100 %	0
TOTAL													595,000,000				0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN GABEK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN GABEK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								6,632,152,827		6,853,086,000			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								6,163,029,543		6,268,962,716			
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								22,500,000		24,000,000			
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah dokumen Renstra/Renja	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan	100 %	4 dokumen	100 %	4,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	4,000,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan	100 %	2 dokumen	100 %	3,500,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	4,000,000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah dokumen Perubahan RKA -SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	3,500,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	4,000,000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah dokumen DPA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan	100 %	4 dokumen	100 %	3,500,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	4,000,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan	100 %	2 dokumen	100 %	4,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	4,000,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen LAKIP,RB,SPIP	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan	100 %	3 dokumen	100 %	4,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	4,000,000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,850,175,924		4,850,175,924			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan	100 %	60 orang	100 %	4,842,175,924	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	4,842,175,924
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan	100 %	1 laporan	100 %	4,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	4,000,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat	Kota Pangkal Pinang, Girimaya,	100 %	1 laporan	100 %	4,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat	100 %	4,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN GABEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN GABEK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	waktu		waktu	Semua Kelurahan					(PAD)		waktu		
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								47,500,000					60,000,000
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah pakaian yang di adakan	Persetanse ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan	100 %	38 stel	100 %	26,500,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	35,000,000
7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi	Persetanse ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan	100 %	7 orang	100 %	21,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	25,000,000
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								186,500,000					221,000,000
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan	100 %	13 unit/set	100 %	11,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	15,000,000
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan	100 %	35 unit/set	100 %	15,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	17,500,000
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan yang disediakan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan	100 %	6 unit/set	100 %	2,500,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	2,500,000
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan	100 %	500 porsi	100 %	12,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	12,000,000
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan	100 %	10 unit/set	100 %	15,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	18,000,000
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jumlah bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	5 buku/kora n	100 %	6,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	6,000,000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan	100 %	20 kali	100 %	125,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	150,000,000
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								111,353,619					153,786,792

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN GABEK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN GABEK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah meubeler yang diadakan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan	100 %	10 unit/set	100 %	31,353,619	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	53,786,792
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan	100 %	10 unit/set	100 %	80,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	100,000,000
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								785,000,000				795,000,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan	100 %	60 orang	100 %	85,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	90,000,000
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan	100 %	100 unit/set	100 %	25,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	30,000,000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah layanan jasa administrasi keuangan yang tertangani Jumlah layanan jasa kebersihan kantor yang tertangani	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan	100 %	20 orang 3 orang	100 %	675,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	675,000,000
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								160,000,000				165,000,000	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan	100 %	2 unit	1 unit	70,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	75,000,000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan	100 %	1 unit	1 unit	90,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	90,000,000
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								168,623,284				198,623,284	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								60,000,000				90,000,000	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Terlaksananya Pelayanan Hubungan Kemasyarakatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan	100 %	1 kali	100 %	50,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 %	75,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN GABEK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN GABEK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah Masyarakat yang ikut Gotong Royong	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan	100 %	1800 orang	100 %	10,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 %	15,000,000
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								15,000,000				15,000,000	
7 01 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah rekomendasi yang diberikan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan	100 %	1250 rekomendasi	100 %	15,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 %	15,000,000
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								93,623,284				93,623,284	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah Peserta Sosialisasi Kecamatan Layak Anak Jumlah UKS yang dibina Jumlah waktu pemberdayaan kapasitas kelembagaan Terlaksananya KSI Terlaksannya Hari Jadi Kota Pangkalpinang	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan	100 %	6 kelurahan 30 uks 50 orang 80 orang 1 kali	100 %	93,623,284	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 %	93,623,284
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								102,000,000				147,000,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								32,000,000				37,000,000	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Kehadiran Masyarakat Yang Diundang Dalam Musrenbang	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan	100 %	150 orang	100 %	20,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	25,000,000
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	Keikutsertaan Kelurahan Dalam Lomba Administrasi Terbinanya kelurahan terbaik	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan	100 %	6 kelurahan 1 kelurahan	100 %	12,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	12,000,000
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								70,000,000				110,000,000	
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah PKK yang dibina	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan	100 %	6 PKK	100 %	70,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	100 %	110,000,000
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								8,500,000				8,500,000	
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								8,500,000				8,500,000	
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persentase Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan	80 %	100 persen	100 %	8,500,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	80 %	8,500,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN GABEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN GABEK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								190,000,000					230,000,000
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								190,000,000					230,000,000
7 01 05 2.01 07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan	Jumlah Peserta STQ/MTQ	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan	100 %	150 orang	100 %	180,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan	100 %	220,000,000
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan	Jumlah Forum komunikasi Pimpinan di Wilayah Kecamatan	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan	100 %	6 orang	100 %	10,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan	100 %	10,000,000
TOTAL									6,632,152,827					6,853,086,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN GABEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0001 Kelurahan Gabek Satu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								660,000,000		775,000,000			
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								135,000,000		150,000,000			
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								135,000,000		150,000,000			
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah Pegawai Kelurahan Gabek Satu yang terlayani	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Gabek Satu	100 %	12 orang	100 %	135,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 %	150,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								525,000,000		625,000,000			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								525,000,000		625,000,000			
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Gabek Satu	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Gabek Satu	100 %	3 paket	100 %	160,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	100 %	250,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan di Kelurahan Gabek Satu	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Gabek Satu	100 %	3 lembaga	100 %	365,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	100 %	375,000,000
TOTAL													660,000,000		775,000,000			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN GABEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0002 Kelurahan Gabek Dua

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								660,000,000		775,000,000			
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								135,000,000		150,000,000			
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								135,000,000		150,000,000			
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah Pegawai Kelurahan Gabek Dua yang terlayani	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Gabek Dua	100 %	12 orang	100 %	135,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 %	150,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								525,000,000		625,000,000			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								525,000,000		625,000,000			
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Gabek Dua	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Gabek Dua	100 %	3 paket	100 %	160,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	100 %	250,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan di Kelurahan Gabek Dua	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Gabek Dua	100 %	3 lembaga	100 %	365,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	100 %	375,000,000
TOTAL												660,000,000		775,000,000				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN GABEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0003 Kelurahan Selindung Baru

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								660,000,000		775,000,000			
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								135,000,000		150,000,000			
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								135,000,000		150,000,000			
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah Pegawai Kelurahan Selindung Baru yang terlayani	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Selindung Baru	100 %	12 orang	100 %	135,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 %	150,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								525,000,000		625,000,000			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								525,000,000		625,000,000			
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Selindung Baru	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Selindung Baru	100 %	3 paket	100 %	160,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	100 %	250,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan di Kelurahan Selindung Baru	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Selindung Baru	100 %	3 lembaga	100 %	365,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	100 %	375,000,000
TOTAL													660,000,000		775,000,000			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN GABEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0004 Kelurahan Air Salemba

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN												660,000,000		775,000,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												135,000,000		150,000,000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan												135,000,000		150,000,000
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah Pegawai Kelurahan Air Selemba yang terlayani	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu		100 %	12 orang	100 %	135,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 %	150,000,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												525,000,000		625,000,000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												525,000,000		625,000,000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Air Selemba	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Air Salemba	100 %	3 paket	100 %	160,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	100 %	250,000,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan di Kelurahan Air Selemba	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Air Salemba	100 %	3 lembaga	100 %	365,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	100 %	375,000,000	
TOTAL													660,000,000				775,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN GABEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0005 Kelurahan Selindung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								660,000,000		775,000,000			
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								135,000,000		150,000,000			
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								135,000,000		150,000,000			
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah Pegawai Kelurahan Selindung yang terlayani	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Selindung	100 %	12 orang	100 %	135,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 %	150,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								525,000,000		625,000,000			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								525,000,000		625,000,000			
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Selindung	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Selindung	100 %	3 paket	100 %	160,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	100 %	250,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan di Kelurahan Selindung	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Selindung	100 %	3 lembaga	100 %	365,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	100 %	375,000,000
TOTAL													660,000,000		775,000,000			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN GABEK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0006 Kelurahan Jerambah Gantung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								660,000,000		775,000,000			
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								135,000,000		150,000,000			
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								135,000,000		150,000,000			
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah Pegawai Kelurahan Jerambah Gantung yang terlayani	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Jerambah Gantung	100 %	12 orang	100 %	135,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 %	150,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								525,000,000		625,000,000			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								525,000,000		625,000,000			
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Jerambah Gantung	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Jerambah Gantung	100 %	3 paket	100 %	160,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	250,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan di Kelurahan Jerambah Gantung	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Jerambah Gantung	100 %	3 lembaga	100 %	365,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	375,000,000
TOTAL													660,000,000		775,000,000			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GERUNGANG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GERUNGANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								6,617,102,832			7,077,819,485		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								6,022,823,462			6,402,109,865		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								13,604,500			13,944,614		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen Renstra/Renja yang disusun	Persentase Laporan Kinerja yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	5,701,500	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,844,038
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Persentase Laporan Kinerja yang disampaikan tepat waktu	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	3,951,500	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	4,050,288
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen LAKIP,RB,SPIP	Persentase Laporan Kinerja yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	3,951,500			Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	4,050,288
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,979,952,845			5,104,451,668		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Persentase Laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	100 %	85 Orang	100 %	4,972,049,845	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,096,351,092
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Persentase Laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	3,951,500	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	4,050,288
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	Persentase Laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	3,951,500	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	4,050,288
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								5,400,000			5,400,000		
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Barang Milik Daerah yang terinventarisir	Persentase Barang Milik Daerah yang terinventarisir	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	100 %	1 Orang	100 %	5,400,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,400,000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								75,400,000			75,400,000		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah Pakaian yang diadakan	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	100 %	84 Stell	100 %	50,400,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	50,400,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GERUNGANG

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GERUNGANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Kelurahan								
7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	100 %	2 Orang	100 %	25,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	25,000,000
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								212,500,617				292,806,533
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	100 %	15 Unit/Set /Jenis	100 %	11,543,496	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	15,000,000
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit/Set /Jenis	100 %	43,950,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	72,500,000
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan yang disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	100 %	6 Unit/Set /Jenis	100 %	21,600,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	25,600,000
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah layanan penyediaan alat kebersihan yang disediakan Jumlah layanan penyediaan ATK yang disediakan Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan Jumlah Materai/bendapos yang disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	100 %	20 Unit/Set /Jenis 35 Unit/Set /Jenis 350 Porsi 414 Lembar	100 %	66,695,880	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	92,500,000
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	100 %	10 Unit/Set /Jenis	100 %	14,665,500	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	20,000,000
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	100 %	5 Buku/koran	100 %	5,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	10,000,000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	100 %	40 Kali	100 %	49,045,741	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	57,206,533

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GERUNGANG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GERUNGANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								44,000,000						122,500,000
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Mebel yang diadakan	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur yang disediakan	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	100 %	50 Unit/Set /Jenis	100 %	44,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	72,500,000	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur yang disediakan	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit/Set /Jenis	100 %	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	50,000,000	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								555,055,000						637,005,500
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah surat yang tertata	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	100 %	1500 Surat	100 %	26,550,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	53,100,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tertangani	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	100 %	100 Tahun	100 %	76,600,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	84,260,000	
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang terpelihara	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	100 %	20 Unit/Set /Jenis	100 %	27,405,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	30,145,500	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	100 %	19 Orang	100 %	424,500,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	469,500,000	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								136,910,500						150,601,550
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	100 Persen	38,251,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	42,076,100	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 Persen	48,659,500	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	53,525,450	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GERUNGANG

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GERUNGANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 Persen	50,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	55,000,000
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								168,019,750				215,500,000	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								97,500,000				143,000,000	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Persentase Koordinasi tingkat kecamatan yang terlaksana	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	0	1 Kegiatan	100 Persen	85,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik di Kecamatan	0	118,000,000
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik di Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Gotong Royong	Persentase Koordinasi tingkat kecamatan yang terlaksana	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	0	500 Orang	100 Persen	12,500,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik di Kecamatan	0	25,000,000
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								10,519,750				12,500,000	
7 01 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik di Kecamatan	Jumlah rekomendasi yang diberikan	Persentase Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik yang ditangani	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	0	1250 Rekomend asi	100 Persen	10,519,750	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik di Kecamatan	0	12,500,000
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								60,000,000				60,000,000	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik di Kecamatan	Jumlah Kegiatan pelaksanaanhari jadi Kota PAngkalpinang	Terlaksanakannya Hari Jadi Kota Pangkalpinang	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	0	1 Kegiatan	100 Persen	60,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik di Kecamatan	0	60,000,000
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								143,921,620				169,921,620	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								24,564,000				24,564,000	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah Kehadiran Masyarakat Yang Diundang Dalam Musrenbang	Persentase Jumlah Usulan Pembangunan yang di fasilitasi	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	80 %	240 Orang	80 Persen	24,564,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	80 %	24,564,000
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								19,357,620				25,357,620	
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang dibina	Jumlah Kelurahan dalam lomba administrasi	Persentase Kelurahan yang dibina	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	6 Kelurahan	6 Kelurahan	80 Persen	19,357,620	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kelurahan yang dibina	6 Kelurahan	25,357,620
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								100,000,000				120,000,000	
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik di Kecamatan	Jumlah PKK yang dibina	Persentase PKK yang dibina	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang,	0	1 PKK	80 %	100,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH		Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik di Kecamatan	0	120,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GERUNGANG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GERUNGANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Semua Kelurahan					(PAD)				
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								27,050,000				35,000,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								15,000,000				20,000,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik di Kecamatan	Jumlah Patroli Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah Kecamatan	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	100 Kali	80 %	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik di Kecamatan	0	20,000,000
7 01 04 2.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah								12,050,000				15,000,000	
7 01 04 2.04 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik di Kecamatan	keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	100 Orang	100 Orang	12,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik di Kecamatan	0	15,000,000
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								255,288,000				255,288,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								255,288,000				255,288,000	
7 01 05 2.01 07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik di Kecamatan	Jumlah Peserta STQ/MTQ	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum dikecamatan	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	0	150 Orang	80 Persen	255,288,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik di Kecamatan	0	255,288,000
TOTAL									6,617,102,832				7,077,819,485	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GERUNGANG

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0001 Kelurahan Taman Bunga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								685,376,524			805,376,524		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								121,404,024			159,404,024		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								121,404,024			159,404,024		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	Pegawai Kelurahan Taman Bunga yang terlayani	Persentase Pelayanan administrasi kelurahan yang terpenuhi	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	0	15 Orang	100 Persen	121,404,024	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	0	159,404,024	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								563,972,500			645,972,500		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								563,972,500			645,972,500		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Taman Bunga	Persentase Sarana dan Prasarana yang dibangun	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Taman Bunga	0	3 Paket	80 Persen	176,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	0	213,540,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah lembaga Kemasyarakatan kelurahan yang terlayani	Persentase Sarana dan Prasarana yang dibangun	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	0	7 Lembaga	80 Persen	387,432,500	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	0	432,432,500	
TOTAL													685,376,524			805,376,524		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GERUNGANG

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0002 Kelurahan Bukit Merapin

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								698,697,000			816,697,000		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								115,956,000			153,956,000		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								115,956,000			153,956,000		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan yang baik	Pegawai Kelurahan Bukit Merapin yang terlayani	Persentase Pelayanan administrasi kelurahan yang terpenuhi	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	0	15 Orang	100 Persen	115,956,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan yang baik	0	153,956,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								582,741,000			662,741,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								582,741,000			662,741,000		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan	Persentase Pembangunan Sarana dan prasarana yang dibangun	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Bukitmerapi n	80 %	3 Paket	80 Persen	167,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	80 %	202,540,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah lembaga Kemasyarakatan kelurahan yang terlayani	Persentase Pembangunan Sarana dan prasarana yang dibangun	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	80 %	7 Lembaga	80 Persen	415,201,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	80 %	460,201,000
TOTAL													698,697,000			816,697,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GERUNGANG

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0003 Kelurahan Air Kepala Tujuh

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN									598,317,800		716,317,800		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									97,662,800		135,662,800		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan									97,662,800		135,662,800		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan yang baik	Pegawai Kelurahan yang terlayani	Persentase Pelayanan administrasi kelurahan yang terpenuhi	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Air Kepala Tujuh	0	15 Orang	100 Persen	97,662,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan yang baik	0	135,662,800
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									500,655,000		580,655,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									500,655,000		580,655,000		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan	Persentase Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Air Kepala Tujuh	80 %	3 Paket	80 Persen	127,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	80 %	162,540,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah lembaga Kemasyarakatan kelurahan yang terlayani	Persentase Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	80 %	7 Lembaga	80 Persen	373,115,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	80 %	418,115,000
TOTAL													598,317,800		716,317,800			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GERUNGANG

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0004 Kelurahan Bukit Sari

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN								665,606,000			783,606,000			
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								121,096,000			159,096,000			
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								121,096,000			159,096,000			
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan yang baik	Jumlah Pegawai Kelurahan yang dilayani	Persentase Pelayanan administrasi kelurahan yang terpenuhi	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	0	15 Orang	100 Persen	121,096,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan yang baik	0	159,096,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								544,510,000			624,510,000			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								544,510,000			624,510,000			
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan	Persentase Sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Bukitsari	0	3 Paket	80 Persen	169,540,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	0	204,540,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah lembaga Kemasyarakatan kelurahan yang terlayani	Persentase Sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	0	7 Lembaga	80 Persen	374,970,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	0	419,970,000	
TOTAL													665,606,000					783,606,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GERUNGANG

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0005 Kelurahan Tua Tunu Indah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								668,987,460			786,987,460		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								118,520,560			156,520,560		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								118,520,560			156,520,560		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan yang baik	Jumlah Pegawai Kelurahan yang dilayani	Persentase Pelayanan administrasi kelurahan yang terpenuhi	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	0	15 Orang	100 Persen	118,520,560	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan yang baik	0	156,520,560
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								550,466,900			630,466,900		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								550,466,900			630,466,900		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana yang dibangun	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Tua Tunu	0	3 Paket	80 Persen	166,540,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	0	201,540,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang terlayani	Persentase sarana dan prasarana yang dibangun	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	0	7 lembaga	80 Persen	383,926,900	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	0	428,926,900
TOTAL													668,987,460				786,987,460	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GERUNGANG

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0006 Kelurahan Kacang Pedang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								672,419,734			790,419,734		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								125,226,944			163,226,944		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								125,226,944			163,226,944		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan yang baik	Orang	Persentase Pelayanan administrasi kelurahan yang terpenuhi		0	15 Orang	100 Persen	125,226,944	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan yang baik	0	163,226,944
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								547,192,790			627,192,790		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								547,192,790			627,192,790		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana yang dibangun	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Kacang Pedang	0	3 Paket	80 Persen	167,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	0	202,540,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah Lembaga Masyarakat Kelurahan yang terlayani	Persentase Sarana dan Prasarana yang dibangun	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	0	7 Lembaga	80 Persen	379,652,790	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	0	424,652,790
TOTAL													672,419,734				790,419,734	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GIRIMAYA

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GIRIMAYA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								4,763,383,924			5,104,192,000		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4,280,667,544			4,529,302,544		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								4,535,000			14,300,000		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen Renstra/Renja	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	1,170,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,500,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	600,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	1,200,000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	600,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	1,200,000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	600,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	1,200,000
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	600,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	1,200,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 %	455,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,000,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen LAKIP,RB,SPIP	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 %	510,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,000,000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,460,132,544			3,465,002,544		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	41 Orang	100 %	3,459,002,544	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,459,002,544
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	620,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GIRIMAYA

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GIRIMAYA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	SKPD	waktu		waktu	Semua Kelurahan					(PAD)		waktu		
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	510,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,000,000
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								34,000,000				51,000,000	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah Pakaian yang Diadakan	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	30 Stel	100 %	21,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	21,000,000
7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	10 Orang	100 %	13,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	30,000,000
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								118,000,000				264,000,000	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	215 Unit	100 %	8,500,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	15,000,000
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	1 Set	100 %	15,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	30,000,000
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	1 Set	100 %	5,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	10,000,000
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah bahan logistik yang disediakan	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	2 Jenis	100 %	31,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	60,000,000
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	6 Set	100 %	18,500,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	25,000,000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	30 Kali	100 %	40,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	124,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GIRIMAYA

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GIRIMAYA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								498,000,000					575,000,000
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah surat yang disediakan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	1000 Surat	100 %	50,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	65,000,000
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	30 Orang	100 %	53,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	60,000,000
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	47 Unit	100 %	30,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	30,000,000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	30 Orang	100 %	365,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	420,000,000
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								166,000,000					160,000,000
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	100 %	66,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	70,000,000
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	100,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	90,000,000
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								103,000,000					150,000,000
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								63,000,000					100,000,000
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Terlaksananya Pelayanan Hubungan Kemasyarakatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	2 Kali	100 %	50,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 %	80,000,000
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah Masyarakat yang ikut Gotong Royong	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	600 Orang	100 %	13,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 %	20,000,000
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								15,000,000					15,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GIRIMAYA

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GIRIMAYA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah rekomendasi yang diberikan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	1000 Rekomendasi	100 %	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 %	15,000,000
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								25,000,000				35,000,000	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Terlaksannya Hari Jadi Kota Pangkalpinang	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	1 Kali	100 %	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 %	35,000,000
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								150,000,000				169,889,456	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								35,000,000				50,000,000	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Kehadiran Masyarakat Yang Diundang Dalam Musrenbang	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	80 Orang	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	20,000,000
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	Keikutsertaan Kelurahan Dalam Lomba Administrasi	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	5 Kelurahan	100 %	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	30,000,000
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								115,000,000				119,889,456	
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah PKK yang dibina	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	5 PKK	100 %	115,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	119,889,456
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								10,000,000				15,000,000	
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								10,000,000				15,000,000	
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Terlaksananya Keamanan dan Ketertiban Umum	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	0	1 Kali	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	0	15,000,000
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								219,716,380				240,000,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								219,716,380				240,000,000	
7 01 05 2.01 07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	Jumlah Peserta STQ/MTQ	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Di Kecamatan	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	150 Orang	100 %	199,716,380	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	100 %	220,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GIRIMAYA

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GIRIMAYA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal													
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	Jumlah rapat koordinasi forum komunikasi pimpinan tingkat kecamatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Di Kecamatan	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	1 Kali	100 %	20,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	100 %	20,000,000
TOTAL									4,763,383,924					5,104,192,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PANGKALBALAM

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PANGKALBALAM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN														6,495,418,001
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														5,994,418,001
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														30,000,000
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen Renstra/Renja	Persentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	100 %	4 dokumen	100 %	5,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,000,000	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen RKA- SKPD	Persentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	100 %	2 dokumen	100 %	5,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,000,000	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen Perubahan RKA -SKPD	Persentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	100 %	2 dokumen	100 %	5,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,000,000	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen DPA- SKPD	Persentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	100 %	2 dokumen	100 %	5,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,000,000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Persentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	100 %	2 dokumen	100 %	5,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,000,000	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LAKIP,RB,SPIP)	Persentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	5,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,000,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														4,619,384,688
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	100 %	73 orang	100 %	4,496,960,671	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	4,609,384,688	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022														
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PANGKALBALAM														
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PANGKALBALAM														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	5,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,000,000
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	5,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,000,000
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								100,000,000				101,288,700	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah pakaian yang di adakan	Presentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	100 %	73 stel	100 %	70,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	70,000,000
7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi	Presentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	100 %	10 orang	100 %	30,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	31,288,700
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								254,630,081				310,863,313	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Persentase terpenuhinya administrasi Umum	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	100 %	13 Unit/Set	100 %	10,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	10,000,000
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Persentase terpenuhinya administrasi Umum	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	30,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	30,000,000
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Persentase terpenuhinya administrasi Umum	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit/Set	100 %	30,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	30,000,000
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jumlah jenis bahan logistik yang disediakan	Persentase terpenuhinya administrasi Umum	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	100 %	555 Jenis	100 %	69,910,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	78,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PANGKALBALAM

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PANGKALBALAM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Persentase terpenuhinya administrasi Umum	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	100 %	8 Unit/Set	100 %	22,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	22,010,000
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Persentase terpenuhinya administrasi Umum	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	100 %	2 buku/koran	100 %	5,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	5,000,000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Persentase terpenuhinya administrasi Umum	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	100 %	20 kali	100 %	87,720,081	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	135,853,313
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								10,000,000				100,000,000	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Persentase terpenuhi Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit/Set	100 %	10,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	100,000,000
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								560,511,300				755,111,300	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah surat yang disediakan	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	100 %	2100 surat	100 %	84,551,300	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	113,651,300
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	100 %	73 orang	100 %	75,160,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	104,260,000
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	100 %	100 Unit/Set	100 %	30,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	50,000,000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	100 %	11 Orang	100 %	370,800,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	487,200,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PANGKALBALAM

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PANGKALBALAM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							77,770,000				77,770,000		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Persentase terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	42,440,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	42,440,000
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Persentase terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	35,330,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	35,330,000
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							51,010,000				121,000,000		
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							21,010,000				60,000,000		
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Terlaksananya Pelayanan Hubungan Kemasyarakatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	85 %	1 kali	100 %	11,010,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	85 %	30,000,000
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah Masyarakat yang ikut Gotong Royong	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	85 %	666 orang	100 %	10,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	85 %	30,000,000
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							7,000,000				10,000,000		
7 01 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah rekomendasi yang diberikan	persentase terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	85 %	100 rekomendasi	100 %	7,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	85 %	10,000,000
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							23,000,000				51,000,000		
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan	Terlaksananya Hari Jadi Kota Pangkalpinang	Persentase Terselenggaranya Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	80 %	1 kali	100 %	23,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan	80 %	51,000,000
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							113,010,000				160,000,000		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							32,000,000				50,000,000		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	Persentase sarana dan prasarana publik yang	Jumlah Kehadiran Masyarakat Yang	Persentase terselenggaranya	Kota Pangkal Pinang,	80 %	150 orang	100 %	22,000,000	PENDAPAT AN ASLI		Persentase sarana dan prasarana publik yang	80 %	30,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PANGKALBALAM

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PANGKALBALAM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	terbangun	Diundang Dalam Musrenbang	Pemberdayaan Kelurahan	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DAERAH (PAD)	terbangun		
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Keikutsertaan Kelurahan Dalam Lomba Administrasi	Persentase terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	80 %	5 kelurahan	100 %	10,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	80 %	20,000,000
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									81,010,000			110,000,000
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah PKK yang dibina	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	80 % ; 80 %	6 PKK	100 %	81,010,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	80 % ; 80 %	110,000,000
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									9,000,000			20,000,000
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									9,000,000			20,000,000
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	0	6 kali	100 %	9,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	0	20,000,000
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									160,000,000			200,000,000
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah									160,000,000			200,000,000
7 01 05 2.01 07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan	Jumlah Peserta STQ/MTQ	persentase terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	80 %	150 orang	100 %	160,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan	80 %	200,000,000
TOTAL									5,872,892,052				6,495,418,001

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PANGKALBALAM

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0001 Kelurahan Pasir Garam

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN										603,050,000			670,000,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										91,950,000			120,000,000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan										91,950,000			120,000,000
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah Pegawai Kelurahan Pasir Garam yang terlayani	persentase terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	85 %	13 Orang	100 %	91,950,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	85 %	120,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										511,100,000			550,000,000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										511,100,000			550,000,000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Pasir Garam	Persentase terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	80 % ; 80 %	1 paket	100 %	150,000,000	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	80 % ; 80 %	150,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan diKelurahan Pasir Garam	Persentase terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	80 % ; 80 %	5 Lembaga	100 %	361,100,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	80 % ; 80 %	400,000,000
TOTAL													603,050,000			670,000,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PANGKALBALAM

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0002 Kelurahan Lontong Pancur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN									613,850,000			670,000,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									91,950,000			120,000,000	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan									91,950,000			120,000,000	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah Pegawai Kelurahan Lontong pancur yang terlayani	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	85 %	15 orang	100 %	91,950,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	85 %	120,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									521,900,000			550,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									521,900,000			550,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Lontong Pancur	Persentase terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	80 % ; 80 %	1 paket	100 %	150,000,000	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	80 % ; 80 %	150,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan diKelurahan Lontong Pancur	Persentase terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	80 % ; 80 %	5 Lembaga	100 %	371,900,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	80 % ; 80 %	400,000,000
TOTAL													613,850,000			670,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PANGKALBALAM

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0003 Kelurahan Ketapang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN											618,650,000		670,000,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											85,950,000		120,000,000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan											85,950,000		120,000,000
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah Pegawai Kelurahan Ketapang yang terlayani	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	85 %	14 orang	100 %	85,950,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	85 %	120,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											532,700,000		550,000,000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											532,700,000		550,000,000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Ketapang	Persentase terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	80 % ; 80 %	1 Paket	100 %	150,000,000	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	80 % ; 80 %	150,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan diKelurahan Ketapang	Persentase terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	80 % ; 80 %	5 Lembaga	100 %	382,700,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	80 % ; 80 %	400,000,000
TOTAL													618,650,000			670,000,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PANGKALBALAM

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0004 Kelurahan Ampui

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN									602,050,000			670,000,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									101,750,000			120,000,000	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan									101,750,000			120,000,000	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah Pegawai Kelurahan Ampui yang terlayani	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	85 %	17 orang	100 %	101,750,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	85 %	120,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									500,300,000			550,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									500,300,000			550,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Ampui	Persentase terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	80 % ; 80 %	1 paket	100 %	150,000,000	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	80 % ; 80 %	150,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan diKelurahan Ampui	Persentase terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	80 % ; 80 %	4 Lembaga	100 %	350,300,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	80 % ; 80 %	400,000,000
TOTAL													602,050,000			670,000,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PANGKALBALAM

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0005 Kelurahan Rejosari

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN									640,850,000			670,000,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									85,950,000			120,000,000	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan									85,950,000			120,000,000	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah Pegawai Kelurahan Rejosari yang terlayani	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	85 %	17 orang	100 %	85,950,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	85 %	120,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									554,900,000			550,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									554,900,000			550,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Rejosari	Persentase terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	80 % ; 80 %	1 paket	100 %	150,000,000	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	80 % ; 80 %	150,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan diKelurahan Rejosari	Persentase terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	80 % ; 80 %	3 Lembaga	100 %	404,900,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	80 % ; 80 %	400,000,000
TOTAL													640,850,000				670,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN										7,840,841,884			8,656,454,400
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										7,260,841,884			7,971,454,400
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										13,000,000			15,000,000
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Renstra/Renja	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	5,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,000,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 %	4,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,000,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen LPPD, LKPJ, LAKIP, RB, SPIP	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	100 %	4,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,000,000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										6,068,241,828			6,221,747,874
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	75 Orang	100 %	6,060,241,828	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	6,211,747,874
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	4,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,000,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan Keuangan bulanan/triwulan /semesteran SKPD	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	1 laporan	100 %	4,000,000			Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,000,000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										75,000,000			100,000,000
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Pakaian yang di adakan	Presentase Terpenuhiya Administrasi Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	35 stell	100 %	35,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	50,000,000
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi	Presentase Terpenuhiya Administrasi Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	6 Orang	100 %	40,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	50,000,000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										299,000,056			565,006,526

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Persentase Terpenuhinya Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	25 Unit/Set	100 %	15,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	20,000,000
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Persentase Terpenuhinya Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	15 Unit/Set	100 %	40,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	200,000,000
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terpenuhinya Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	6 jenis	100 %	75,000,056	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	90,006,526
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	Persentase Terpenuhinya Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	2 Jenis	100 %	15,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	20,000,000
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Terpenuhinya Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	60 Buku/Kora n	100 %	4,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,000,000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Persentase Terpenuhinya Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	35 kali	100 %	130,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	200,000,000
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Website/Aplikasi yang dikelola	Persentase Terpenuhinya Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	2 Jenis	100 %	20,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	30,000,000
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								575,600,000					769,700,000
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah surat yang disediakan	Persentase Terpenuhinya Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	1500 Surat	100 %	60,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	65,000,000
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Persentase Terpenuhinya Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	20 Orang	100 %	100,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	120,000,000
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Persentase Terpenuhinya Administrasi	Kota Pangkal Pinang, Rangkui,	100 %	25 Unit/set	100 %	25,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat	100 %	35,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		waktu		Perkantoran	Semua Kelurahan					(PAD)	waktu		
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terpenuhinya Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	20 Orang	100 %	390,600,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	549,700,000
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									230,000,000			300,000,000
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	2 unit	100 %	40,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	50,000,000
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	2 unit	100 %	40,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	50,000,000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit/Set	100 %	150,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	200,000,000
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									120,000,000			160,000,000
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									75,000,000			90,000,000
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	terlaksananya pelayanan hubungan kemasyarakatan	Persentase waktu Pelayanan administrasi Tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	1 kali	100 %	40,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 %	50,000,000
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	jumlah masyarakat yang ikut gotong royong	Persentase waktu Pelayanan administrasi Tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	2000 orang	100 %	35,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 %	40,000,000
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan									15,000,000			20,000,000
7 01 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah rekomendasi yang diberikan	Persentase waktu Pelayanan administrasi Tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1000 rekomenda si	100 %	10,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 %	10,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022														
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI														
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu	Persentase waktu Pelayanan administrasi Tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	1000 Rekomendasi	100 %	5,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 %	10,000,000
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								30,000,000					50,000,000
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	terlaksananya hari jadi kota pangkalpinang	Persentase waktu Pelayanan administrasi Tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	1 kali	100 %	30,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 %	50,000,000
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								185,000,000					225,000,000
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								40,000,000					60,000,000
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	jumlah kehadiran masyarakat yang diundang dalam musrenbang	Persentase lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 % ; 100 %	150 orang	100 %	20,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	100 % ; 100 %	30,000,000
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	keikutsertaan kelurahan dalam lomba administrasi	Persentase lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 % ; 100 %	8 kelurahan	100 %	20,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	100 % ; 100 %	30,000,000
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								145,000,000					165,000,000
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	jumlah pkk yang di bina	Persentase lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 % ; 100 %	8 pkk	100 %	145,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	100 % ; 100 %	165,000,000
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								15,000,000					20,000,000
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								15,000,000					20,000,000
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	persentase peningkatan keamanan dan ketertiban umum	Presentase Keluhan Masyarakat Yang ditindaklanjuti	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	15,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	20,000,000
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								260,000,000					280,000,000
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								260,000,000					280,000,000
7 01 05 2.01 07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan	jumlah peserta STQ/MTQ	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	150 orang	100 %	250,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan	100 %	265,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal													
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan	jumlah waktu rapat koordinasi forum komunikasi pimpinan tingkat kecamatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	4 kali	100 %	10,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan	100 %	15,000,000
TOTAL									7,840,841,884					8,656,454,400

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN TAMAN SARI

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN TAMAN SARI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN								5,343,277,080				5,712,986,000		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4,994,327,633				5,112,265,700		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								12,370,000				12,370,000		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	jumlah dokumen renstra yang disusun	persentase perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	3,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,500,000	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	jumlah dokumen renja (RKT-RKA) yang disusun	persentase perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,000,000	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	jumlah dokumen spip yang disusun	persentase perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	3,870,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,870,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,206,895,700				4,206,895,700		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	jumlah ASN yang menerima gaji	persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Semua Kelurahan	0	45 orang	100 %	4,198,895,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	0	4,198,895,700	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Semua Kelurahan	0	1 dokumen	100 %	4,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	0	4,000,000	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Semua Kelurahan	0	1 dokumen	100 %	4,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	0	4,000,000	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								29,459,992				50,000,000		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah pakaian yang diadakan	persentase terpenuhinya kepegawaian	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Semua Kelurahan	100 %	4 jenis	100 %	9,459,992	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	30,000,000	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi	persentase terpenuhinya kepegawaian		100 %	8 orang	100 %	20,000,000			Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	20,000,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								132,316,433				145,000,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN TAMAN SARI

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN TAMAN SARI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	persentase terpenuhinya administrasi umum	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Semua Kelurahan	100 %	18 jenis	100 %	10,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	15,000,000
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	persentase terpenuhinya administrasi umum		100 %	2 jenis	100 %	52,316,433		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	60,000,000
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	persentase terpenuhinya administrasi umum		100 %	2 jenis	100 %	30,000,000		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	30,000,000
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	persentase terpenuhinya administrasi umum		100 %	3 koran	100 %	10,000,000		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	10,000,000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	persentase terpenuhinya administrasi umum		100 %	12 Bulan	100 %	30,000,000		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	30,000,000
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									533,285,508			578,000,000
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Layanan Komunikasi sumber daya air dan listrik yang tertangani Jumlah Waktu Pemeliharaan Website	persentase terpenuhinya penyediaan jasa	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan 12 bulan	100 %	173,285,508	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	178,000,000
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	persentase terpenuhinya penyediaan jasa	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Semua Kelurahan	100 %	5 jenis	100 %	30,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	40,000,000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	persentase terpenuhinya penyediaan jasa		100 %	14 orang	100 %	330,000,000		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	360,000,000
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									80,000,000			120,000,000
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah		100 %	1 unit	100 %	20,000,000		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	40,000,000
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah		100 %	3 unit	100 %	20,000,000		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	40,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN TAMAN SARI

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN TAMAN SARI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah		100 %	1 kali	100 %	40,000,000		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	40,000,000
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									99,341,947			175,000,000
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									64,341,947			85,000,000
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tertangani	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan gotong royong	persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan		100 %	48 kali	100 %	17,250,000		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tertangani	100 %	25,000,000
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tertangani	Jumlah kegiatan pelayanan hubungan kemasyarakatan yang terlaksana	persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan		100 %	2 jenis	100 %	47,091,947		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tertangani	100 %	60,000,000
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									35,000,000			90,000,000
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tertangani	Jumlah kegiatan pelaksanaan hari jadi kota pangkalpinang	persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan		100 %	1 kali	100 %	35,000,000		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tertangani	100 %	90,000,000
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									119,607,500			200,000,000
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									119,607,500			200,000,000
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah kehadiran masyarakat yang diundang dalam musrembang	persentase terlaksananya pemberdayaan pada tingkat kelurahan		100 %	100 orang	100 %	19,607,500		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	40,000,000
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah PKK yang dibina	persentase terlaksananya pemberdayaan pada tingkat kelurahan	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	100,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	160,000,000
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									130,000,000			225,720,300
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah									130,000,000			225,720,300
7 01 05 2.01 07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	Jumlah Peserta STQ/MTQ	persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Semua Kelurahan	100 %	1 kali	100 %	130,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	100 %	225,720,300
TOTAL									5,343,277,080				5,712,986,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN TAMAN SARI

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0001 Kelurahan Opas Indah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								670,000,000			790,000,000		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								170,000,000			180,000,000		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								170,000,000			180,000,000		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tertangani	Jumlah waktu Pegawai ASN Kelurahan Opas Indah yang terlayani	persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	170,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tertangani	100 %	180,000,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								500,000,000			610,000,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								500,000,000			610,000,000		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah waktu Pembangunan Sarana dan prasarana Kel. Opas Indah	persentase terlaksananya pemberdayaan pada tingkat kelurahan	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	100,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	200,000,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan Opas Indah yang terlayani	persentase terlaksananya pemberdayaan pada tingkat kelurahan		100 %	12 bulan	100 %	400,000,000		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	410,000,000	
TOTAL													670,000,000				790,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN TAMAN SARI

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0002 Kelurahan Gedung Nasional

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN							650,000,000				790,000,000		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							150,000,000				180,000,000		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							150,000,000				180,000,000		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tertangani	Jumlah waktu pegawai ASN kelurahan gedung nasional yang terlayani	persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan		100 %	12 bulan	100 %	150,000,000			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tertangani	100 %	180,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							500,000,000				610,000,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							500,000,000				610,000,000		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah waktu Pembangunan Sarana dan prasarana Kel. Gedung Nasional	persentase terlaksananya pemberdayaan pada tingkat kelurahan	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	100,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	200,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gedung Nasional Yang Terlayani	persentase terlaksananya pemberdayaan pada tingkat kelurahan	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	400,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	410,000,000
TOTAL													650,000,000				790,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN TAMAN SARI

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0003 Kelurahan Batin Tikal

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								650,000,000				790,000,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								150,000,000				180,000,000	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								150,000,000				180,000,000	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tertangani	Jumlah waktu Pegawai ASN Kelurahan Batin Tikal yang terlayani	persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	150,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tertangani	100 %	180,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								500,000,000				610,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								500,000,000				610,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah waktu Pembangunan Sarana dan prasarana Kel. Batin Tikal	persentase terlaksananya pemberdayaan pada tingkat kelurahan	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	100,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	200,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Batin Tikal Yang Terlayani	persentase terlaksananya pemberdayaan pada tingkat kelurahan	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	400,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	410,000,000
TOTAL													650,000,000				790,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN TAMAN SARI

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0004 Kelurahan Rawa Bangun

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								630,000,000			790,000,000		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								150,000,000			180,000,000		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								150,000,000			180,000,000		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tertangani	Jumlah waktu Pegawai ASN Kelurahan Rawa Bangun lama yang terlayani	persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	150,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tertangani	100 %	180,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								480,000,000			610,000,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								480,000,000			610,000,000		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah waktu Pembangunan Sarana dan prasarana Kel. Rawa Bangun	persentase terlaksananya pemberdayaan pada tingkat kelurahan	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	100,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	200,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Rawa Bangun Lama Yang Terlayani	persentase terlaksananya pemberdayaan pada tingkat kelurahan	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	380,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	410,000,000
TOTAL													630,000,000			790,000,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN TAMAN SARI

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0005 Kelurahan Kejaksaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								710,000,000			790,000,000		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								150,000,000			180,000,000		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								150,000,000			180,000,000		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tertangani	Jumlah waktu Pegawai ASN Kelurahan Kejaksaan yang terlayani	persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	150,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tertangani	100 %	180,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								560,000,000			610,000,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								560,000,000			610,000,000		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah waktu Pembangunan Sarana dan prasarana Kel. Kejaksaan	persentase terlaksananya pemberdayaan pada tingkat kelurahan	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	100,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	200,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kejaksaan Yang Terlayani	persentase terlaksananya pemberdayaan pada tingkat kelurahan	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	460,000,000			Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	410,000,000
TOTAL													710,000,000			790,000,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0005 Kelurahan Asam

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								612,064,000				635,651,200	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								142,064,000				162,151,200	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								142,064,000				162,151,200	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah pegawai kelurahan Asam yang terlayani	Persentase waktu Pelayanan administrasi Tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Asam	100 %	8 Orang	100 %	142,064,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 %	162,151,200
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								470,000,000				473,500,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								470,000,000				473,500,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Asam	Persentase lembaga Kemasyarakatan yang aktif ; Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Asam	100 % ; 100 %	3 Paket	100 %	100,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	100 % ; 100 %	100,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diperdayakan Kelurahan Asam	Persentase lembaga Kemasyarakatan yang aktif ; Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Asam	100 % ; 100 %	3 Lembaga	100 %	370,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	100 % ; 100 %	373,500,000
TOTAL													612,064,000				635,651,200	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GIRIMAYA

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0001 Kelurahan Batu Intan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								630,000,000				770,000,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								130,000,000				120,000,000	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								130,000,000				120,000,000	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah Pegawai Kelurahan Batu Intan yang terlayani	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	8 Orang	100 %	130,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 %	120,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								500,000,000				650,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								500,000,000				650,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Batu Intan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	3 Paket	100 %	100,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	250,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diperdayakan di Kelurahan Batu Intan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	3 Lembaga	100 %	400,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	400,000,000
TOTAL													630,000,000				770,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0002 Kelurahan Bintang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								612,064,000			635,651,200		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								142,064,000			162,151,200		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								142,064,000			162,151,200		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah pegawai kelurahan Bintang yang terlayani	Persentase waktu Pelayanan administrasi Tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Bintang	100 %	8 Orang	100 %	142,064,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 %	162,151,200
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								470,000,000			473,500,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								470,000,000			473,500,000		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Pintu Air	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Bintang	100 % ; 100 %	3 Paket	100 %	100,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	100 % ; 100 %	100,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Yang Diperdayakan Kelurahan Bintang	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Bintang	100 % ; 100 %	3 Lembaga	100 %	370,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	100 % ; 100 %	373,500,000
TOTAL													612,064,000			635,651,200		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GIRIMAYA

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0002 Kelurahan Bukit Besar

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								630,000,000		770,000,000			
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								130,000,000		120,000,000			
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								130,000,000		120,000,000			
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah Pegawai Kelurahan Bukit Besar yang terlayani	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar	100 %	8 Orang	100 %	130,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 %	120,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								500,000,000		650,000,000			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								500,000,000		650,000,000			
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Bukit Besar	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar	100 %	3 Paket	100 %	100,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	250,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diperdayakan di Kelurahan Bukit Besar	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar	100 %	3 Lembaga	100 %	400,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	400,000,000
TOTAL													630,000,000		770,000,000			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0003 Kelurahan Gajah Mada

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN							612,064,000			635,651,200			
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							142,064,000			162,151,200			
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							142,064,000			162,151,200			
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah pegawai kelurahan Gajah Mada yang terlayani	Persentase waktu Pelayanan administrasi Tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Gajah Mada	100 %	8 Orang	100 %	142,064,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 %	162,151,200
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							470,000,000			473,500,000			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							470,000,000			473,500,000			
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Gajah Mada	Persentase lembaga Kemasyarakatan yang aktif ; Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Gajah Mada	100 % ; 100 %	3 Paket	100 %	100,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	100 % ; 100 %	100,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diperdayakan Kelurahan Gajah Mada	Persentase lembaga Kemasyarakatan yang aktif ; Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Gajah Mada	100 % ; 100 %	3 Lembaga	100 %	370,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	100 % ; 100 %	373,500,000
TOTAL												612,064,000				635,651,200		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0008 Kelurahan Keramat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								612,064,000				635,651,200	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								142,064,000				162,151,200	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								142,064,000				162,151,200	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah pegawai kelurahan Keramat yang terlayani	Persentase waktu Pelayanan administrasi Tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	100 %	8 Orang	100 %	142,064,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 %	162,151,200
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								470,000,000				473,500,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								470,000,000				473,500,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Keramat	Persentase lembaga Kemasyarakatan yang aktif ; Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	100 % ; 100 %	3 Paket	100 %	100,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	100 % ; 100 %	100,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diperdayakan Kelurahan Keramat	Persentase lembaga Kemasyarakatan yang aktif ; Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	100 % ; 100 %	3 Lembaga	100 %	370,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	100 % ; 100 %	373,500,000
TOTAL													612,064,000				635,651,200	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0004 Kelurahan Masjid Jamik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								612,064,000			635,651,200		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								142,064,000			162,151,200		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								142,064,000			162,151,200		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah pegawai kelurahan Masjid jamik yang terlayani	Persentase waktu Pelayanan administrasi Tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Masjid Jamik	100 %	8 Orang	100 %	142,064,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 %	162,151,200
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								470,000,000			473,500,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								470,000,000			473,500,000		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Masjid Jamik	Persentase lembaga Kemasyarakatan yang aktif ; Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Masjid Jamik	100 % ; 100 %	3 Paket	100 %	100,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	100 % ; 100 %	100,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Masjid Jamik	Persentase lembaga Kemasyarakatan yang aktif ; Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Masjid Jamik	100 % ; 100 %	3 Lembaga	100 %	370,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	100 % ; 100 %	373,500,000
TOTAL													612,064,000		635,651,200			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0006 Kelurahan Melintang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN										612,064,000			635,651,200
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										142,064,000			162,151,200
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan										142,064,000			162,151,200
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah pegawai kelurahan Melintang yang terlayani	Persentase waktu Pelayanan administrasi Tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Melintang	100 %	8 Orang	100 %	142,064,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 %	162,151,200
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										470,000,000			473,500,000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										470,000,000			473,500,000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Melintang	Persentase lembaga Kemasyarakatan yang aktif ; Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Melintang	100 % ; 100 %	3 Paket	100 %	100,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	100 % ; 100 %	100,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diperdayakan Kelurahan Melintang	Persentase lembaga Kemasyarakatan yang aktif ; Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Asam	100 % ; 100 %	3 Lembaga	100 %	370,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	100 % ; 100 %	373,500,000
TOTAL													612,064,000				635,651,200	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0007 Kelurahan Parit Lalang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								612,064,000			635,651,200		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								142,064,000			162,151,200		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								142,064,000			162,151,200		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah pegawai kelurahan Parit Lalang yang terlayani	Persentase waktu Pelayanan administrasi Tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Parit Lalang	100 %	8 Orang	100 %	142,064,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 %	162,151,200
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								470,000,000			473,500,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								470,000,000			473,500,000		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Parit Lalang	Persentase lembaga Kemasyarakatan yang aktif ; Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Parit Lalang	100 % ; 100 %	3 Paket	100 %	100,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	100 % ; 100 %	100,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diperdayakan Kelurahan Parit Lalang	Persentase lembaga Kemasyarakatan yang aktif ; Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Parit Lalang	100 % ; 100 %	3 Lembaga	100 %	370,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif ; Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	100 % ; 100 %	373,500,000
TOTAL													612,064,000				635,651,200	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GIRIMAYA

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0005 Kelurahan Pasar Padi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								630,000,000			770,000,000		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								130,000,000			120,000,000		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								130,000,000			120,000,000		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah Pegawai Kelurahan Pasar Padi yang terlayani	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Pasar Padi	100 %	8 Orang	100 %	130,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 %	120,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								500,000,000			650,000,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								500,000,000			650,000,000		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Pasar Padi	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Pasar Padi	100 %	3 Paket	100 %	100,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	250,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diperdayakan di Kelurahan Pasar Padi	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Pasar Padi	100 %	3 Lembaga	100 %	400,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	400,000,000
TOTAL													630,000,000			770,000,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								17,261,602,459		1,394,000,000			
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								6,192,207,446		724,000,000			
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								34,000,000		14,000,000			
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen Renstra/Renja	Persentase Laporan Kinerja yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 Persen	15,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Persentase Laporan Kinerja yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 Persen	5,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	7,000,000
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen DPA-SKPD	Persentase Laporan Kinerja yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 Persen	7,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Persentase Laporan Kinerja yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 Persen	7,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	7,000,000
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,698,207,446		5,000,000			
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	jumlah ANS yang mendapat Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 Persen	4,693,207,446	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	jumlah dokumen yang tersusun	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 Persen	5,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,000,000
1	05	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								35,000,000		30,000,000			
1	05	01	2.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD*)	jumlah dokumen Pengolahan Data Retribusi Daerah	Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap (PAD)	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	35,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD*)	100 %	30,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022														
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								450,000,000					0
1 05 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah pakaian yang di adakan	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 stel	100 %	450,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								285,000,000					285,000,000
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 paket	100 Persen	5,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	5,000,000
1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	tersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	26 unit	100 Persen	100,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	100,000,000
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Tersedianya bahan logistik	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 Persen	15,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	15,000,000
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 paket	100 Persen	15,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	15,000,000
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jumlah rapat koordinasi	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 kali	100 Persen	150,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	150,000,000
1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								300,000,000					0
1 05 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Pos Kebakaran	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	100 %	300,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								240,000,000					240,000,000
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua	100 %	0 orang	100 Persen	100,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	100,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Kecamatan, Semua Kelurahan					(PAD)			
1 05 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 unit/set	100 Persen	30,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	30,000,000
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 paket	100 Persen	110,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	110,000,000
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								150,000,000				150,000,000
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 unit	100 %	150,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	150,000,000
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								5,976,947,613				600,000,000
1 05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								5,486,947,613				250,000,000
1 05 02 2.01 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Cakupan pelanggaran Trantibum yang ditindaklanjuti	Jumlah Kasus pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah	Cakupan Pelanggaran Trantibum Yang Ditindaklanjuti	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	290 Kasus	100 Persen	4,556,107,950	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan pelanggaran Trantibum yang ditindaklanjuti	100 %	0
1 05 02 2.01 02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Cakupan pelanggaran Trantibum yang ditindaklanjuti	Jumlah Kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang di tindak atau diselesaikan	Cakupan Pelanggaran Trantibum Yang Ditindaklanjuti	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	112 kasus	100 Persen	50,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan pelanggaran Trantibum yang ditindaklanjuti	100 %	0
1 05 02 2.01 03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan pelanggaran Trantibum yang ditindaklanjuti	Jumlah Kegiatan koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan	Cakupan Pelanggaran Trantibum Yang Ditindaklanjuti	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan,	100 %	19 kali	100 Persen	90,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan pelanggaran Trantibum yang ditindaklanjuti	100 %	0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		ketertiban umum serta perlindungan masyarakat		Semua Kelurahan									
1 05 02 2.01 04	Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan pelanggaran Trantibum yang ditindaklanjuti	jumlah masyarakat yang ikut dalam melaksanakan kegiatan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Pelanggaran Trantibum Yang Ditindaklanjuti	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	42 orang	100 Persen	200,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelanggaran Trantibum yang ditindaklanjuti	100 %	50,000,000
1 05 02 2.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Cakupan pelanggaran Trantibum yang ditindaklanjuti	Persentase aparaturnya yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Cakupan Pelanggaran Trantibum Yang Ditindaklanjuti	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 orang	100 Persen	50,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelanggaran Trantibum yang ditindaklanjuti	100 %	0
1 05 02 2.01 07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan pelanggaran Trantibum yang ditindaklanjuti	Jumlah pengawasan gabungan kelapangan dengan lembaga lain untuk penangan gangguan ketentrmn dan ketertiban umum	Cakupan Pelanggaran Trantibum Yang Ditindaklanjuti	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	36 kali	100 Persen	95,839,663	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelanggaran Trantibum yang ditindaklanjuti	100 %	0
1 05 02 2.01 08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan pelanggaran Trantibum yang ditindaklanjuti	Tersedianya sarana dan prasarana petunjang kegiaiatan penengakan perda dan peraturan kepala daerah	Cakupan Pelanggaran Trantibum Yang Ditindaklanjuti	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	104 unit	100 Persen	200,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelanggaran Trantibum yang ditindaklanjuti	100 %	200,000,000
1 05 02 2.01 10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Cakupan pelanggaran Trantibum yang ditindaklanjuti	Jumlah orang yang dapat Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah Dan Perkada	Cakupan Pelanggaran Trantibum Yang Ditindaklanjuti	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	227 orang	100 Persen	245,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelanggaran Trantibum yang ditindaklanjuti	100 %	0
1 05 02 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota								400,000,000			350,000,000		
1 05 02 2.02 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Cakupan pelanggaran Trantibum yang ditindaklanjuti	jumlah kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Cakupan Pelanggaran Trantibum Yang Ditindaklanjuti	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 kali	100 %	150,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelanggaran Trantibum yang ditindaklanjuti	100 %	150,000,000
1 05 02 2.02 02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Cakupan pelanggaran Trantibum yang ditindaklanjuti	jumlah Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan	Cakupan Pelanggaran Trantibum Yang Ditindaklanjuti	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 kali	100 %	200,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelanggaran Trantibum yang ditindaklanjuti	100 %	200,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022														
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA														
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Bupati/Wali Kota		Kelurahan									
1 05 02 2.02 03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Cakupan pelanggaran Trantibum yang ditindaklanjuti	jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Cakupan Pelanggaran Trantibum Yang Ditindaklanjuti	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	40 kali	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelanggaran Trantibum yang ditindaklanjuti	100 %	0
1 05 02 2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota								90,000,000				0	
1 05 02 2.03 01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Persentase peningkatan kompetensi PPNS	Jumlah anggota satpol pp yang memiliki Karir PPNS	Persentase Peningkatan Kompetensi PPNS	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Orang	100 %	90,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan kompetensi PPNS	100 %	0
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN								5,092,447,400				70,000,000	
1 05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								5,092,447,400				0	
1 05 04 2.01 02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penanganan bencana kebakaran kota ; Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	0	Cakupan penanganan bencana kebakaran kota ; Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % ; 15 menit	0 0	100 %	4,887,447,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan penanganan bencana kebakaran kota ; Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100 % ; 15 menit	0
1 05 04 2.01 05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Cakupan penanganan bencana kebakaran kota ; Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		Cakupan penanganan bencana kebakaran kota ; Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		100 % ; 15 menit		100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan penanganan bencana kebakaran kota ; Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100 % ; 15 menit	0
1 05 04 2.01 06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Cakupan penanganan bencana kebakaran kota ; Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pencegahan, Penanguulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Cakupan penanganan bencana kebakaran kota ; Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % ; 15 menit	23 Unit	100 %	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan penanganan bencana kebakaran kota ; Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100 % ; 15 menit	0
1 05 04 2.01 09	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan penanganan bencana kebakaran kota ; Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	jumlah kegiatan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan penanganan bencana kebakaran kota ; Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % ; 15 menit	1 kali	100 %	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan penanganan bencana kebakaran kota ; Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100 % ; 15 menit	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 05 04 2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran							0					20,000,000	
1 05 04 2.02 01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota	jumlah dokumen	Kali	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota	100 %	20,000,000
1 05 04 2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran							0					50,000,000	
1 05 04 2.04 01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		jumlah masyarakat		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 orang		0					50,000,000
TOTAL									17,261,602,459					1,394,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	01				SEKRETARIAT DAERAH								52,027,581,000			53,239,702,000		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								32,913,393,400			33,043,884,800		
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								34,000,000			37,400,000		
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen Renstra/Renja	Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja tepat waktu		100 %	1 dokumen	100 %	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	4,400,000
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja tepat waktu		100 %	1 dokumen	100 %	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	4,400,000
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja tepat waktu		100 %	1 dokumen	100 %	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	4,400,000
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen DPA-SKPD	Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja tepat waktu		100 %	1 dokumen	100 %	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	4,400,000
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja tepat waktu		100 %	1 dokumen	100 %	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	4,400,000
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen LKPj, LKPj AMJ, LPPD yang disusun	Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja tepat waktu		100 %	2 laporan	100 %	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	4,400,000
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen SPIP, Lakip, RB yang disusun	Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja tepat waktu		100 %	2 laporan	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	11,000,000
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								11,980,300,000			12,029,084,800		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Presentase terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan		100 %	85 orang	100 %	11,380,300,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	11,369,084,800
4 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran	Presentase terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan		100 %	1 laporan	100 %	600,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	660,000,000
4 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								252,000,000				253,000,000	
4 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Presentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah		100 %	1 dokumen	100 %	52,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	53,000,000
4 01 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah aset SKPD yang diamankan	Presentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah		100 %	1 unit	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	200,000,000
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								55,000,000				60,500,000	
4 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi	Presentase terpenuhinya administrasi kepegawaian		100 %	6 orang	100 %	55,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	60,500,000
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								4,310,000,000				4,695,470,000	
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Presentase terpenuhinya administrasi umum		100 %	10 unit	100 %	40,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	50,000,000
4 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang disediakan	Presentase terpenuhinya administrasi umum		100 %	10 unit	100 %	600,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	700,000,000
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah logistik yang disediakan	Presentase terpenuhinya administrasi umum		100 %	2 jenis	100 %	700,000,000	Dana Transfer Umum- Dana		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	800,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
										Alokasi Umum				
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Presentase terpenuhinya administrasi umum		100 %	2 set	100 %	220,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	220,000,000
4 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Presentase terpenuhinya administrasi umum		100 %	10 koran	100 %	300,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	300,000,000
4 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah jenis fasilitasi kunjungan tamu	Presentase terpenuhinya administrasi umum		100 %	2 jenis	100 %	1,900,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	1,900,000,000
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Presentase terpenuhinya administrasi umum		100 %	2 jenis	100 %	500,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	670,470,000
4 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah arsip dinamis SKPD	Presentase terpenuhinya administrasi umum		100 %	2 jenis	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	55,000,000
4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1,850,000,000				1,350,000,000	
4 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	Persentase pengadaan barang milik daerah		100 %	1 unit	100 %	500,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
4 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah mebel yang diadakan	Persentase pengadaan barang milik daerah		100 %	1 set	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	200,000,000
4 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Persentase pengadaan barang milik daerah		100 %	2 set	100 %	500,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	500,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
										Umum				
4 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Persentase pengadaan barang milik daerah		100 %	1 unit	100 %	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	150,000,000
4 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Persentase pengadaan barang milik daerah		100 %	2 set	100 %	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	500,000,000
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,480,000,000				1,630,000,000	
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah surat yang disediakan	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa		100 %	2 surat	100 %	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	300,000,000
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah jasa yang tersedia	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa		100 %	3 jenis	100 %	1,180,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	1,330,000,000
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								5,458,430,000				5,095,430,000	
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Persentase pemeliharaan barang milik daerah		100 %	6 unit	100 %	273,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	300,000,000
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Persentase pemeliharaan barang milik daerah		100 %	20 unit	100 %	1,960,430,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	1,960,430,000
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Persentase pemeliharaan barang milik daerah		100 %	4 unit	100 %	650,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	710,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	Persentase pemeliharaan barang milik daerah		100 %	2 unit	100 %	2,075,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	1,625,000,000
4 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	Persentase pemeliharaan barang milik daerah		100 %	1 unit	100 %	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	300,000,000
4 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	Persentase pemeliharaan barang milik daerah		100 %	1 unit	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	200,000,000
4 01 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								30,000,000					33,000,000
4 01 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah BLUD yang difasilitasi	Jumlah BLUD yang difasilitasi		100 %	1 BLUD	1 BLUD	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	33,000,000
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								2,050,000,000					2,175,000,000
4 01 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase operasional pimpinan daerah yang terpenuhi	Jumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menerima gaji dan tunjangan	Persentase fasilitas kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpenuhi		100 %	2 orang	100 %	800,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase operasional pimpinan daerah yang terpenuhi	100 %	825,000,000
4 01 01 2.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase operasional pimpinan daerah yang terpenuhi	Jumlah pakaian dan atribut kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disediakan	Persentase fasilitas kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpenuhi		100 %	5 stell	100 %	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase operasional pimpinan daerah yang terpenuhi	100 %	150,000,000
4 01 01 2.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase operasional pimpinan daerah yang terpenuhi	Jumlah operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disediakan	Persentase fasilitas kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpenuhi		100 %	1 jenis	100 %	1,100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase operasional pimpinan daerah yang terpenuhi	100 %	1,200,000,000
4 01 01 2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah								2,700,000,000					2,700,000,000
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Persentase operasional pimpinan daerah yang terpenuhi	Jumlah kebutuhan rumah tangga yang disediakan	Persentase kebutuhan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang difasilitasi		100 %	1 jenis	100 %	900,000,000	Dana Transfer Umum-Dana		Persentase operasional pimpinan daerah yang terpenuhi	100 %	900,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
										Alokasi Umum			
4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Persentase operasional pimpinan daerah yang terpenuhi	Jumlah kebutuhan rumah tangga yang disediakan	Persentase kebutuhan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang difasilitasi		100 %	1 jenis	100 %	900,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase operasional pimpinan daerah yang terpenuhi	100 %	900,000,000
4 01 01 2.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Persentase operasional pimpinan daerah yang terpenuhi	Jumlah kebutuhan rumah tangga yang disediakan	Persentase kebutuhan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang difasilitasi		100 %	1 jenis	100 %	900,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase operasional pimpinan daerah yang terpenuhi	100 %	900,000,000
4 01 01 2.13	Penataan Organisasi								730,250,000				775,000,000
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase kinerja organisasi yang ditingkatkan	Jumlah laporan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan yang disusun	Persentase penataan organisasi yang ditingkatkan		100 %	2 laporan	100 %	195,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kinerja organisasi yang ditingkatkan	100 %	205,000,000
4 01 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase kinerja organisasi yang ditingkatkan	Jumlah PD yang difasilitasi	Persentase penataan organisasi yang ditingkatkan		100 %	33 perangkat daerah	100 %	130,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kinerja organisasi yang ditingkatkan	100 %	140,000,000
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase kinerja organisasi yang ditingkatkan	Jumlah kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan	Persentase penataan organisasi yang ditingkatkan		100 %	2 kegiatan	100 %	170,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kinerja organisasi yang ditingkatkan	100 %	180,000,000
4 01 01 2.13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase kinerja organisasi yang ditingkatkan	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase penataan organisasi yang ditingkatkan		100 %	2 laporan	100 %	115,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kinerja organisasi yang ditingkatkan	100 %	120,000,000
4 01 01 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase kinerja organisasi yang ditingkatkan	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pangkalpinang	Persentase penataan organisasi yang ditingkatkan		100 %	1 laporan	100 %	120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kinerja organisasi yang ditingkatkan	100 %	130,000,000
4 01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan								1,983,413,400				2,210,000,000
4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase kegiatan pimpinan daerah yang difasilitasi	Jumlah acara/kegiatan pemerintah daerah	Persentase acara/kegiatan yang dilaksanakan		100 %	500 acara/kegiatan	100 %	900,000,000	Dana Transfer Umum-Dana	Persentase kegiatan pimpinan daerah yang difasilitasi	100 %	990,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
										Alokasi Umum			
4 01 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase kegiatan pimpinan daerah yang difasilitasi	Jumlah acara/kegiatan pemerintah daerah	Persentase acara/kegiatan yang dilaksanakan		100 %	400 acara/kegi atan	100 %	210,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase kegiatan pimpinan daerah yang difasilitasi	100 %	220,000,000
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase kegiatan pimpinan daerah yang difasilitasi	Jumlah acara/kegiatan pemerintah daerah	Persentase acara/kegiatan yang dilaksanakan		100 %	500 acara/kegi atan	100 %	873,413,400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase kegiatan pimpinan daerah yang difasilitasi	100 %	1,000,000,000
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									14,942,187,600			15,833,817,200
4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan									840,000,000			870,000,000
4 01 02 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi pemerintahan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan		100 %	1 laporan	100 %	370,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	380,000,000
4 01 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kewilayahan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan		100 %	1 laporan	100 %	210,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	220,000,000
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	Jumlah laporan LPPD, RLPPD, SPM, LKPJ dan LKPJ akhir masa jabatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan		100 %	4 laporan	100 %	260,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	270,000,000
4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat									11,862,187,600			12,691,817,200
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	Jumlah jenis fasilitasi bina mental spiritual yang terkelola	Persentase laporan kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan		100 %	8 jenis	100 %	8,762,187,600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	100 %	9,191,817,200
4 01 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	Jumlah laporan kebijakan evaluasi dan capaian kinerja kesejahteraan sosial	Persentase laporan kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan		100 %	1 laporan	100 %	3,000,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	100 %	3,400,000,000
4 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi,	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat	Jumlah laporan UKS yang dibina	Persentase laporan kebijakan kesejahteraan		100 %	1 laporan	100 %	100,000,000	Dana Transfer	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat	100 %	100,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	yang dilaksanakan		rakyat yang dilaksanakan						Umum- Dana Alokasi Umum		yang dilaksanakan		
4 01 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum								830,000,000				830,000,000	
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase fasilitasi hukum yang dilaksanakan	Jumlah produk hukum yang dihasilkan	Persentase pelayanan hukum yang difasilitasi		100 %	335 produk hukum	100 %	230,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase fasilitasi hukum yang dilaksanakan	100 %	230,000,000
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase fasilitasi hukum yang dilaksanakan	Jumlah kasus hukum yang difasilitasi	Persentase pelayanan hukum yang difasilitasi		100 %	6 kasus hukum	100 %	330,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase fasilitasi hukum yang dilaksanakan	100 %	330,000,000
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase fasilitasi hukum yang dilaksanakan	Jumlah publikasi produk hukum	Persentase pelayanan hukum yang difasilitasi		100 %	70 dokumen	100 %	270,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase fasilitasi hukum yang dilaksanakan	100 %	270,000,000
4 01 02 2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah								1,410,000,000				1,442,000,000	
4 01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase kerjasama daerah yang dilaksanakan	Jumlah kerja sama yang difasilitasi	Persentase kerjasama yang difasilitasi		100 %	10 kerja sama	100 %	1,220,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase kerjasama daerah yang dilaksanakan	100 %	1,240,000,000
4 01 02 2.04 02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Persentase kerjasama daerah yang dilaksanakan	Jumlah rencana kerja sama luar negeri yang difasilitasi	Persentase kerjasama yang difasilitasi		100 %	1 rencana kerja sama	100 %	170,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase kerjasama daerah yang dilaksanakan	100 %	180,000,000
4 01 02 2.04 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Persentase kerjasama daerah yang dilaksanakan	Jumlah laporan evaluasi kerja sama	Persentase kerjasama yang difasilitasi		100 %	1 laporan	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase kerjasama daerah yang dilaksanakan	100 %	22,000,000
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								4,172,000,000				4,362,000,000	
4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian								393,000,000				431,000,000	
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD	Persentase terpenuhinya pelaksanaan kebijakan perekonomian	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase dokumen kebijakan perekonomian yang dilaksanakan		100 %	4 laporan	100 %	115,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi		Persentase terpenuhinya pelaksanaan kebijakan perekonomian	100 %	120,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	dan BLUD									Umum				
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase terpenuhinya pelaksanaan kebijakan perekonomian	Jumlah laporan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase dokumen kebijakan perekonomian yang dilaksanakan		100 %	4 laporan	100 %	240,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya pelaksanaan kebijakan perekonomian	100 %	270,000,000
4 01 03 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Persentase terpenuhinya pelaksanaan kebijakan perekonomian	Jumlah dokumen kebijakan pendirian BUMD	Persentase dokumen kebijakan perekonomian yang dilaksanakan		100 %	2 dokumen	100 %	38,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya pelaksanaan kebijakan perekonomian	100 %	41,000,000
4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan								1,960,000,000					2,010,000,000
4 01 03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Persentase kegiatan pembangunan yang dilaksanakan	Jumlah dokumen program pembangunan yang disusun	Persentase laporan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan		100 %	1 dokumen	100 %	510,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kegiatan pembangunan yang dilaksanakan	100 %	510,000,000
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase kegiatan pembangunan yang dilaksanakan	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Persentase laporan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan		100 %	1 dokumen	100 %	1,150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kegiatan pembangunan yang dilaksanakan	100 %	1,200,000,000
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase kegiatan pembangunan yang dilaksanakan	Jumlah laporan pelaksanaan pembangunan	Persentase laporan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan		100 %	1 laporan	100 %	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kegiatan pembangunan yang dilaksanakan	100 %	300,000,000
4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa								1,780,000,000					1,880,000,000
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang yang dilaksanakan	Jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang terkelola	Persentase terpenuhinya pengelolaan pengadaan barang dan jasa		100 %	90 paket	100 %	800,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengadaan barang yang dilaksanakan	100 %	810,000,000
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Persentase pengadaan barang yang dilaksanakan	Jumlah paket pengadaan secara elektronik yang terkelola	Persentase terpenuhinya pengelolaan pengadaan barang dan jasa		100 %	90 paket	100 %	700,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengadaan barang yang dilaksanakan	100 %	770,000,000
4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang yang dilaksanakan	Jumlah pembinaan pengadaan barang dan jasa	Persentase terpenuhinya pengelolaan pengadaan barang dan jasa		100 %	3 pembinaan	100 %	280,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Persentase pengadaan barang yang dilaksanakan	100 %	300,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
										Umum				
4 01 03 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam								39,000,000				41,000,000	
4 01 03 2.04 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Persentase kebijakan terkait sumber daya alam yang dilaksanakan	Jumlah laporan Koordinasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Persentase terpenuhinya pemantauan kebijakan terkait sumber daya alam		100 %	4 laporan	100 %	29,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kebijakan terkait sumber daya alam yang dilaksanakan	100 %	30,000,000
4 01 03 2.04 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Persentase kebijakan terkait sumber daya alam yang dilaksanakan	Jumlah laporan Koordinasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Persentase terpenuhinya pemantauan kebijakan terkait sumber daya alam		100 %	2 laporan	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kebijakan terkait sumber daya alam yang dilaksanakan	100 %	11,000,000
TOTAL									52,027,581,000				53,239,702,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	02				SEKRETARIAT DPRD								58,647,736,000				56,892,801,866	
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								29,632,595,970				27,174,685,603	
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								10,000,000				10,000,000	
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen Renstra/Renja yang disusun	Persentase laporan kinerja & keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	4 Dokumen	100 %	5,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,000,000
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Persentase laporan kinerja & keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	3 Dokumen	100 %	5,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,000,000
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								8,239,228,090				8,444,883,792	
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	Persentase laporan kinerja & keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	35 Orang	100 %	8,226,228,090	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	8,431,883,792
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan akhir tahun SKPD	Persentase laporan kinerja & keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	1 Dokumen	100 %	5,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,000,000
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja & keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	1 Laporan	100 %	5,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,000,000
4	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Persentase laporan kinerja & keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	1 Laporan	100 %	3,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,000,000
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								180,000,000				189,000,000	
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah pakaian dinas ASN yang diadakan	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/ kualifikasi pada unit kerja		100 %	150 Stel	100 %	80,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	84,000,000
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/ kualifikasi pada unit kerja		100 %	20 orang	100 %	100,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	105,000,000
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,228,582,412				1,289,983,182	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	15 Jenis	100 %	25,806,375	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	27,096,694
4 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	36 Unit/jenis	100 %	297,029,124	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	311,880,580
4 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	6 Unit/jenis	100 %	207,291,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	217,655,550
4 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah bahan logistik yang disediakan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	2 jenis	100 %	372,217,613	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	390,800,143
4 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	15 Unit/set	100 %	139,692,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	146,676,600
4 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	2 Buku/kora n	100 %	24,471,300	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	25,694,865
4 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah tamu yang berkunjung	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	1500 orang	100 %	25,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	26,250,000
4 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilakukan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	20 Kali	100 %	117,075,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	122,928,750
4 02 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah website/aplikasi yang dikelola	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	2 Kali	100 %	20,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	21,000,000
4 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								677,360,754					713,886,442
4 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah mebeleur yang diadakan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		100 %	7 Unit/set	100 %	178,701,373	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	187,636,442
4 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		100 %	15 Unit/set	100 %	173,659,381	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	185,000,000
4 02 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang diadakan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		100 %	2 Unit	100 %	150,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	157,500,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
										(PAD)				
4 02 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang diadakan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		100 %	3 Unit/stel/kwh	100 %	75,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	78,750,000
4 02 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang diadakan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		100 %	2 Unit/set	100 %	100,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	105,000,000
4 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								942,244,134					976,738,079
4 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah jasa surat menyurat yang sediakan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		100 %	5000 Surat	100 %	22,500,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	23,625,000
4 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		100 %	170 orang	100 %	255,150,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	267,907,500
4 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		100 %	100 Unit/set	100 %	131,250,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	137,812,500
4 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		100 %	20 Jenis	100 %	533,344,134	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	547,393,079
4 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,002,891,244					962,032,375
4 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		100 %	1 Unit	100 %	50,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	50,000,000
4 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		100 %	12 Unit	100 %	461,721,244	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	484,807,306
4 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		100 %	2 Unit	100 %	41,170,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	78,287,000
4 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		100 %	4 unit	100 %	300,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	248,938,069

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
										(PAD)			
4 02 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung/kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		100 %	2 Unit	100 %	150,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	100,000,000
4 02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD									17,092,289,336			14,284,237,858
4 02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah anggota DPRD yang dibayarkan gaji dan tunjangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		100 %	30 orang	100 %	16,450,914,336	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	13,578,294,108
4 02 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah pakaian yang disediakan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		100 %	120 Stel	100 %	241,375,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	305,943,750
4 02 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Terlaksananya medical check up	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		100 %	30 orang	100 %	400,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	400,000,000
4 02 01 2.16	Layanan Administrasi DPRD									260,000,000			303,923,875
4 02 01 2.16 02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Terlaksananya fasilitasi fraksi	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		100 %	2 Jenis	100 %	10,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	10,000,000
4 02 01 2.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD yang dilaksanakan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		100 %	3 kali	100 %	250,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	293,923,875
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD									29,015,140,030			29,718,116,263
4 02 02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD									6,562,862,300			6,753,433,947
4 02 02 2.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	Terlaksananya penyusunan dan pembahasan propemperda	persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD		100 %	12 Kali	100 %	10,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	100 %	10,500,000
4 02 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Pembahasan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang dibahas	persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD		100 %	24 Perda	100 %	6,452,862,300		Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	100 %	6,614,183,947
4 02 02 2.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	Jumlah kajian Perundang-Undangan	persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD		100 %	1 Dokumen	100 %	50,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	100 %	50,000,000
4 02 02 2.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	Jumlah naskah akademik	persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD		100 %	3 Dokumen	100 %	50,000,000		Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	100 %	78,750,000
4 02 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD									5,817,397,500			5,789,819,938

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 02 02 2.04 02	Bimbingan Teknis DPRD	Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	Jumlah pendalaman tugas DPRD yang diikuti	persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 kali	100 %	4,000,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	100 %	4,230,000,000
4 02 02 2.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	Tersedianya dokumentasi DPRD	persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD		100 %	2 Jenis	100 %	5,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	100 %	5,000,000
4 02 02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	Tersedianya kelompok pakar dan tim ahli	persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD		100 %	10 orang	100 %	600,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	100 %	441,262,500
4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	Tersedianya tenaga ahli fraksi	persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD		100 %	40 orang	100 %	1,212,397,500	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	100 %	1,113,557,438
4 02 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat								142,088,000				149,692,400	
4 02 02 2.05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	Jumlah pikir DPRD yang ditindaklanjuti	persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD		100 %	1 dokumen	100 %	5,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	100 %	5,750,000
4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	Jumlah kegiatan reses yang dilaksanakan	persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD		100 %	3 kali	100 %	137,088,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	100 %	143,942,400
4 02 02 2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah								1,691,940,000				1,132,914,750	
4 02 02 2.07 02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	Terlaksananya penyusunan bahan komunikasi dan publikasi DPRD	persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Jenis	100 %	1,691,940,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	100 %	1,132,914,750
4 02 02 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD								14,800,852,230				15,892,255,228	
4 02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	Jumlah rapat-rapat konsultasi ke luar daerah yang diikuti	persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD		100 %	60 kali	100 %	14,167,702,230	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	100 %	15,243,197,728
4 02 02 2.08 02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	Jumlah jenis laporan alat kelengkapan DPRD	persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD		100 %	1 Laporan	100 %	633,150,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	100 %	649,057,500
TOTAL									58,647,736,000				56,892,801,866	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GIRIMAYA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0003 Kelurahan Semabung Baru

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								630,000,000		770,000,000			
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								130,000,000		120,000,000			
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								130,000,000		120,000,000			
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah Pegawai Kelurahan Semabung Baru yang terlayani	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semabung Baru	100 %	8 Orang	100 %	130,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 %	120,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								500,000,000		650,000,000			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								500,000,000		650,000,000			
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Semabung Baru	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semabung Baru	100 %	3 Paket	100 %	100,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	250,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diperdayakan di Kelurahan Semabung Baru	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semabung Baru	100 %	3 Lembaga	100 %	400,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	400,000,000
TOTAL													630,000,000		770,000,000			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GIRIMAYA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0004 Kelurahan Sriwijaya

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								630,000,000				770,000,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								130,000,000				120,000,000	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								130,000,000				120,000,000	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah Pegawai Kelurahan Sriwijaya yang terlayani	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semabung Baru	100 %	8 Orang	100 %	130,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 %	120,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								500,000,000				650,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								500,000,000				650,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Sriwijaya	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	3 Paket	100 %	100,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	250,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diperdayakan di Kelurahan Sriwijaya	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	3 Lembaga	100 %	400,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	400,000,000
TOTAL													630,000,000				770,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Air Itam

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1,294,857,800			1,238,744,753		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								1,294,857,800			1,238,744,753		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1,294,857,800			1,238,744,753		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah penyelenggaraan operasional pelayanan di puskesmas	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	68 SDM	100 persen	1,294,857,800	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 %	1,238,744,753
TOTAL													1,294,857,800				1,238,744,753	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 Puskesmas Gerunggang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1,099,021,800				1,099,021,800	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								1,099,021,800				1,099,021,800	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1,099,021,800				1,099,021,800	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah penyelenggaraan operasional pelayanan di puskesmas	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	58 SDM	100 persen	1,099,021,800	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 %	1,099,021,800
TOTAL													1,099,021,800				1,099,021,800	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Girmaya

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1,109,016,550			1,087,016,550		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								1,109,016,550			1,087,016,550		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1,109,016,550			1,087,016,550		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah penyelenggaraan operasional pelayanan di puskesmas	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	55 SDM	100 persen	1,109,016,550	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 %	1,087,016,550
TOTAL													1,109,016,550				1,087,016,550	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Kacang Pedang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								784,131,700			784,131,700		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								784,131,700			784,131,700		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								784,131,700			784,131,700		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah penyelenggaraan operasional pelayanan di puskesmas	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 SDM	100 persen	784,131,700	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 %	784,131,700
TOTAL													784,131,700				784,131,700	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Melintang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1,245,035,850			1,201,035,850		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								1,245,035,850			1,201,035,850		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1,245,035,850			1,201,035,850		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah penyelenggaraan operasional pelayanan di puskesmas	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	63 SDM	100 persen	1,245,035,850	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 %	1,201,035,850
TOTAL													1,245,035,850				1,201,035,850	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Pangkalbalam

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1,214,515,899			1,170,515,899		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								1,214,515,899			1,170,515,899		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1,214,515,899			1,170,515,899		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah penyelenggaraan operasional pelayanan di puskesmas	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	54 SDM	100 persen	1,214,515,899	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 %	1,170,515,899
TOTAL													1,214,515,899				1,170,515,899	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Pasir Putih

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								821,830,350				821,830,350	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								821,830,350				821,830,350	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								821,830,350				821,830,350	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah penyelenggaraan operasional pelayanan di puskesmas	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	56 SDM	100 persen	821,830,350	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 %	821,830,350
TOTAL													821,830,350					821,830,350

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Selindung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								972,616,000			972,616,000		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								972,616,000			972,616,000		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								972,616,000			972,616,000		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah penyelenggaraan operasional pelayanan di puskesmas	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	57 SDM	100 Persen	972,616,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 %	972,616,000
TOTAL													972,616,000				972,616,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Taman Sari

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								824,221,750			824,221,750		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								824,221,750			824,221,750		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								824,221,750			824,221,750		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah penyelenggaraan operasional pelayanan di puskesmas	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	58 SDM	100 persen	824,221,750	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 %	824,221,750
TOTAL													824,221,750				824,221,750	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 RSUD Depati Hamzah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								32,129,300,189		32,129,300,189			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								32,129,300,189		32,129,300,189			
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								107,683,432		107,683,432			
1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Sakit Rujukan Kab/Kota yang memenuhi sarana,prasarana, dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65 %	1 RS	65 Persen	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	65 %	0
1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit	Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Sakit Rujukan Kab/Kota yang memenuhi sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA) sesuai standard	Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65 %	1 rs	65 Persen	5,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	65 %	5,000,000
1	02	02	2.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah RS yang direhabilitasi dan dipelihara	Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65 %	1 RS	65 Persen	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	65 %	0
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65 %	1 Prasarana	65 Persen	32,346,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	65 %	32,346,000
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65 %	1 faskes	65 Persen	70,337,432	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	65 %	70,337,432
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								32,021,616,757		32,021,616,757			
1	02	02	2.02	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu	Tersedianya telemedicine di fasilitas pelayanan kesehatan	Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	1 RS	95 persen	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu	95 %	0
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu	Terlaksananya pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan badan layanan umum daerah	Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	127 orang	95 persen	32,021,616,757	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu	95 %	32,021,616,757
TOTAL													32,129,300,189		32,129,300,189			



- BAB VI -

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pada bab ini akan disampaikan penjabaran mengenai Indikator Kinerja Daerah. Indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota Pangkalpinang dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.



6.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Lebih lanjut penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Pangkalpinang Tahun 2019-2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022
Tujuan Daerah					
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	-3.02 %	0,83 %	1,67 %
		2. PDRB Perkapita	61,60 juta/kapita	62,42 juta/kapita	63,67 juta/kapita
2	Meningkatkan Kesejahteraan sosial masyarakat	3. Indeks Gini	0,277	0,272	0,267
3	Meningkatkan kualitas perlindungan masyarakat untuk ketentraman dan kenyamanan lingkungan	4. Indeks Ketertiban dan Ketentraman Kota	8,35	7,65	7,20
4	Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintah daerah	5. Indeks Reformasi Birokrasi	61,71	63,50	64,50
5	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender	6. Indeks Pembangunan Manusia	78,22	79,17	79,51
6	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar pembangunan melalui pengelolaan lingkungan hidup yang handal	7. Indeks Kualitas Infrastruktur	91,25	92,10	92,95
		8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63	62,44	62,97
Sasaran Daerah					
1	Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	1. LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-6,28 %	0,50 %	1,65 %
		2. LPE Kategori Industri Pengolahan	-4,52 %	0,50 %	1,00 %
2	Meningkatnya penggalan, pemanfaatan dan pengembangan potensi sektor pariwisata daerah	3. PAD Sektor Pariwisata	Rp. 14.036.203.600	Rp. 15.439.823.960	Rp. 16.983.806.356



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022
3	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	4. Nilai Investasi	Rp. 500 M	Rp. 550 M	Rp. 600 M
4	Menurunnya tingkat kemiskinan	5. Angka Kemiskinan	4,36 %	4,24 %	4,12 %
5	Meningkatnya kesempatan kerjamasyarakat	6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,93 %	6,74 %	6,45 %
6	Meningkatnya keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana	7. Indeks risiko bencana	82.5	80.85	79.23
7	Meningkatnya kondisi keamanan daerah	8. Angka Kriminalitas	175	150	125
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja daerah	9. Nilai LPPD	3,2721	3,2722	3,2723
		10. Nilai AKIP	61,77	63,30	65,50
		11. Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP
9	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis sistem informasi dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	12. Rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82	84	86
		13. Indeks Profesionalitas ASN	77,2	77,6	78
10	Meningkatnya kualitas pendidikan	14. Indeks Pendidikan	69,59	69,79	69,97
11	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	15. Indeks Kesehatan	82,00	82,14	82,39
12	Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan	16. IPG	93,12	93,16	93,21
13	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	17. Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	71,25 %	72,50 %	73,75 %
14	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman layak huni	18. Rasio rumah layak huni	89	90	91
15	Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum	19. Persentase Ketersediaan Infrastruktur	-	57,20 %	57,89 %
16	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	20. Indeks kualitas udara	96,20	88,72	88,82
		21. Indeks kualitas air	70,70	50,93	51,03
		22. Indeks Tutupan Lahan	42,75	33,62	35,65

Sumber: Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023



6.2 Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Target per tahun terhadap indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada tabel 6.2.

Tabel 6.2
TARGET CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2021	2022	2023		
URUSAN PENDIDIKAN						
Capaian SPM PAUD	%	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
APK SMP	%	103	103,5	104	104	
APK SD	%	102	102,5	103	103	
APK PAUD	%	36.10	36,20	36,50	36,50	
Capaian SPM Pendidikan Kesenjangan	%	100	100	100	y	
Capaian SPM Pendidikan Dasar	%	100	100	100	100	
Persentase Guru Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF yang Berkualifikasi S1/DIV	%	73	74	75	75	
Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin Operasional	%	100	100	100	100	
URUSAN KESEHATAN						
Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100	100	100	
Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100	100	100	

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2021	2022	2023		
Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	
Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100	100	100	
Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100	100	100	
Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100	100	100	
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	100	
Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standar	%	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standar	%	100	100	100	100	
Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	100	100	100	100	

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2021	2022	2023		
Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Prevalensi anemia pada ibu hamil	%	13,85	10,5	8,58	8,58	
Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	%	97,7	98,5	100	100	
Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	%	97,7	98,5	100	100	
Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate / ASFR</i>)	%	5,5	5	4,5	4,5	
Prevalensi tekanan darah tinggi	%	18	16	15	0	
Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Puskesmas	9	9	9	9	Dinas Kesehatan
Insiden Tuberculosis (ITB) per 100.000 penduduk	%	0,22	0,21	0,2	0,2	
Prevalensi HIV pada populasi dewasa	%	0,04	0,03	0,03	0,03	
Proporsi kematian akibat keracunan	%	0	0	0	0	
Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	%	99	99,5	100	100	
Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	%	100	100	100	0	

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2021	2022	2023		
Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B	%	100	100	100	0	Dinas Kesehatan
Kejadian malaria per 1.000 orang	per 1.000 orang	<1	<1	<1	<1	
Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Kabupaten/Kota	1	1	1	1	
Jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	%	0	0	0	0	
Jumlah kota dengan eliminasi kusta	Kota	0	0	0	0	
Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)	Kasus	0	0	0	0	
Persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun	%	0,2	0,15	0,15	0,15	Dinas Kesehatan
Persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun	%	0,25	0,15	0,1	0,1	
Prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun	%	0,4	0,4	0,3	0,3	
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	%	75	80	85	85	
Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	%	2,8	2,6	2,5	2,5	
Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	%	2,8	2,6	2,5	2,5	

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2021	2022	2023		
Prevalensi Kekurangan Gizi (<i>underweight</i>) pada Balita	%	7,8	7,5	7,3	7,3	Dinas Kesehatan
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun/Balita	%	0,5	0,25	0	0	
Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta	%	0,5	0,25	0	0	
Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	%	0,4	0,15	0	0	Dinas Kesehatan
Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	%	60	65	67	67	
Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu	%	95	95	95	95	
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	%	85	90	100	100	
Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	%	100	100	100	100	
Proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	%	61,93	80,1	80,1	80,1	
Jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan	%	0	0	0	0	
Cakupan SDM kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2021	2022	2023		
Persentase PIRT yang memiliki izin edar	%	40	41	42	42	Dinas Kesehatan
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	%	100	100	100	100	
Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda	per 100.000 Penduduk	84	85	86	86	Dinas Kesahatan
Cakupan Kota yang memberikan pelayanan kesehatan	%	100	100	100	100	
Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan	%	92,98	100	100	100	
Cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN)	%	91,23	93,96	96,96	96,96	
Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan.	%	82,5	91	100	100	
Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	%	91,68	93,8	96,52	96,52	
Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	%	0,58	0,57	0,57	0,57	
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	%	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2021	2022	2023		
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab /kota	%	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	%	97,5	98	98,5	98,5	
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (6.1.1.(a))	%	97,5	98	98,5	98,5	
Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau (6.1.1.(b))	ltr/detik	115	115,5	116	116	
Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan (6.1.1.(c))	%	42,5	56,46	70,43	70,43	
Persentase volume sampah yang tertangani	%	70	0	0	0	
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2021	2022	2023		
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.(6.2.1.(b))	%	100	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). (6.2.1 (c))	%	100	100	100	100	
Tingkat Kemantapan Sistem Drainase	%	0	0	0	0	
Persentase kawasan pemukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	%	50	55	60	60	
Rasio Kepatuhan IMB kab/Kota	%	65	67,5	70	70	
Rasio kepatuhan IMB	%	65	67,5	70	70	
Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	94,2	94,9	95,5	95,5	
Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	0	0	0	0	
Persentase Terpenuhiannya peran tata ruang dan pertanahan	%	100	100	100	100	
Persentase Terpenuhiannya peran tata ruang dan pertanahan	%	100	100	100	100	
Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan	Orang	4000	4000	4000	4000	
Jumlah Dokumen yang tersusun	Dokumen	5	5	5	5	
Jumlah Aplikasi yang Dihasilkan	Aplikasi	1	1	1	1	
URUSAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN						

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2021	2022	2023		
Persentase peningkatan kualitas perumahan	%	75	80	90	90	Dinas Perumahan dan Permukiman
Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh	%	80	90	100	100	
Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	%	8,76	5,23	0	0	
Persentase peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman di kota	%	75	85	95	95	
Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	%	88	94	100	100	
Persentase peningkatan PSU Perumahan	%	70	75	85	85	
Persentase pelayanan legalisasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	%	100	100	100	100	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
Cakupan Pelanggaran Trantibum yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	0	Satpol PP dan Damkar
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	%	100	100	100	100	
Persentase Peningkatan Kompetensi PPNS	%	100	100	100	100	
Cakupan penanganan bencana kebakaran kota	%	100	100	100	0	
Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2021	2022	2023		
Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran(WMK)	menit	15	15	15	15	Satpol PP dan Damkar
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	200304	200304	200304	200304	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	400	500	600	1500	
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	400	500	600	1500	
URUSAN SOSIAL						
Persentase peningkatan kapasitas PSKS dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial	%	70	75	85	85	Dinas Sosial
Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	%	0	60	80	80	
Persentase Penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	%	75	85	90	90	
Persentase PMKS lainnya bukan Korban Penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi diluar panti sosial	%	70	80	90	90	
Persentase Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemasyarakatan	%	70	80	80	80	

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2021	2022	2023		
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	%	80	90	100	100	Dinas Sosial
URUSAN TENAGA KERJA						
Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	0	80	80	80	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
Persentase tenaga kerja formal	%	70	71	71	71	
Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	%	7,22	6,26	5,3	5,3	
Tingkat setengah pengangguran	%	3,98	4	3,19	3,19	
Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	6,08	6,23	6,23	6,23	
Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan	%	0	0	23,05	23,05	
Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kota	%	50	60	70	70	
Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	59,29	60,56	61,82	61,82	
Upah rata-rata per jam pekerja	ribu	18.506	19.502	20.000	20.000	

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2021	2022	2023		
Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	%	82,5	91,25	100	100	
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB						
Persentase ARG pada belanja langsung	%	0,82	0,85	0,88	0,88	Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan KB
Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 Tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual atau emosional)oleh pasangan atau mantan pasangan selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	%	0,029	0,028	0,026	0,026	
Persentase Kader yang aktif melaksanakan KIE kepada masyarakat	%	100	100	100	100	
Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	%	11	12	13	13	
Persentase Pengembangan Forum Anak Skala Kota	%	100	100	100	100	
Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	%	0,06	0,055	0,05	0,05	
URUSAN PANGAN DAN PERTANIAN						
Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH)	%	86	88	90	90	Dinas Pangan dan Pertanian
Persentase pengadaan cadangan pangan	%	100	100	100	100	
Persentase pangan yang aman dikonsumsi	%	80	85	90	90	

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2021	2022	2023		
URUSAN PERTANAHAN						
Persentase izin lokasi yan sesuai dengan RTRW	%	100	100	100	100	Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang
Persentase penyelesaian sengketa tanah	%	100	100	100	100	
Persentase ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	%	100	100	100	100	
Persentase redistribusi tanah, serta ganti kerugian program program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	%	100	100	100	100	
Persentase luas tanah yang dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah	%	85	87,5	90	90	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Terdatanya pengelolaan izin membuka tanah	%	100	100	100	100	
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	85	87,5	90	90	
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP						
Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersusun	%	80	80	80	80	Dinas Lingkungan Hidup
Kualitas air danau	mg/l	2	2	2	2	

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2021	2022	2023		
Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	%	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup
Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	mg/I	5,54	4,27	3	3	
Persentase Terbangun dan Terpeliharanya Sumber Daya Keanekaragaman Hayati Kota Pangkalpinang	%	21,1	21,3	21,3	21,3	
Persentase terkendalinya B3 dan Limbah B3	%	70	70	70	70	
Jumlah perusahaan yang menerapkan SNI ISO 14001	Perusahaan	0	1	1	2	
Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penghargaan	1	1	1	3	
Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	%	80	80	80	80	
Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	%	86,5	88	89,5	89,5	
Persentase Timbulan Sampah yang di Daur Ulang	%	13,5	12	10,5	10,5	
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	N/A	650	670	690	690	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Cakupan Kememilikan Kartu keluarga	%	95	96	97	97	
Cakupan Pernerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	99,1	99,6	99,6	99,6	Dinas Dukcapil

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2021	2022	2023		
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	%	100	100	100	100	Dinas Dukcapil
Perakaman KTP elektronik	%	97	98	99	99	
Persentase anak usia 0-7 tahun kurang 1 (satu) hari yg memiliki KIA	%	65	70	75	75	
Rasio Bayi Berakte Kelahiran per1000 penduduk	N/A	890	920	920	920	
Kepemilikan Akte Kelahiran	%	84	88	92	92	
Rasio Perkawinan yang tercatat di catatan sipil per 1000 penduduk	N/A	84	88	92	92	
Cakupan Kepemilikan Akte Kematian	%	28	31	35	35	
Peningkatan cakupan akta kelahiran yang diterbitkan	N/A	2,7	3,5	4	4	
Persentase anak (0-18) tahun yang memiliki akta kelahiran	%	87	92	95	95	
Peningkatan cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan	%	61	65	68	68	
Peningkatan cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang perceraianya tercatat	%	65	72	75	75	Dinas Dukcapil
Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang lahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	%	87	88	89	89	

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2021	2022	2023		
Persentase Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	1,4	2,1	2,8	2,8	Dinas Dukcapil
Persentase keserasian database kependudukan	%	95	96	96,5	96,5	
Persentase tersajinya data kependudukan yang akurat	%	50	50	50	50	
URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
TFR (Total Fertility Rate)	Rata-rata Anak per Wanita	2	1,9	1,65	1,65	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 Tahun yang berstatus kawin	%	80	81	82	82	
Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode mode	%	79,74	79,84	79,94	79,94	
Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS	8,23	8,2	8,17	8,17	
Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kab/kota dalam pembangunan	%	100	100	100	100	
URUSAN PERHUBUNGAN						

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2021	2022	2023		
Persentase tingkat keselamatan lalu lintas dan layanan angkutan jalan	%	65	70	75	75	Dinas Perhubungan
Persentase pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan	%	0	0	2,17	2,17	
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet dan Pelayanan Publik yang terhubung Secara Online dan Terintegritas yang di fasilitasi Dinas Kominfo	%	9	69	100	100	
URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
Persentase Usaha Simpan Pinjam yang memiliki Izin	%	31,25	43,75	56,25	56,25	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Persentase Koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	%	0	26,67	43,33	43,33	
Persentase KSP/USP koperasi yang dinilai kesehatannya	%	20	20	20	20	
Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan	%	40	55	70	70	
Persentase peningkatan volume usaha, RAT Koperasi	%	12	14	16	16	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Persentase Usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	2	2,2	2,4	2,4	

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2021	2022	2023		
Persentase Usaha mikro menjadi usaha kecil	%	1	1	1	1	
Persentase akses UMKM (Usaha Mikro Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	%	26,5	30,25	32	32	
URUSAN PENANAMAN MODAL						
Persentase peningkatan jumlah investor	%	30	40	50	50	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
Persentase peningkatan investasi di Kota	%	30	40	50	50	
Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85	90	95	95	
Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM	%	5,15	8,09	11,03	11,03	
Persentase jenis izin yang diterbitkan secara online	%	76,27	79,66	83,05	83,05	
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	BELUM ADA	80	85	90	90	Dinas Pemuda dan Olahraga
Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	0	0	0	0	
Persentase pengembangan kapasitas kepramukaan	%	1	1	1	1	
URUSAN STATISTIK						
Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	%	80	90	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
URUSAN PERSANDIAN						

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2021	2022	2023		
Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
URUSAN KEBUDAYAAN						
Persentase Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang di Lestarkan	%	87	93	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Persentase Jumlah Aset Sejarah Daerah yang di Lestarkan	%	50	75	100	100	
Persentase Cagar Budaya (CB) yang di Lestarkan	%	71	84	100	100	
URUSAN PERPUSTAKAAN						
Persentase pelaksanaan pembinaan perpustakaan	%	18	36	36	36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	%	0	100	100	100	
URUSAN KEARSIPAN						
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan	%	87	87	87	87	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Persentase arsip statis yang dilindungi dan diselamatkan	%	100	100	100	100	
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN						
Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	1126,51	1239,161	1363,077	3.728,75	Dinas Kelautan dan Perikanan
Jumlah produksi perikanan Budidaya	Ton	2.250	2.475	2.805	7.530	
Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan dan usaha pengolahan hasil perikanan	Kg/Kapita/Tahun	52	54,6	57	57	

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2021	2022	2023		
URUSAN PARIWISATA						
(8.9.1*) Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (PDRB selaku kewenangan Kota Pangkalpinang)	%	5,2	5,35	5,5	5,5	Dinas Pariwisata
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	10	10	10	10	Dinas Pariwisata
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	%	10	10	10	30	
Tingkat hunian akomodasi	%	50	50	50	50	
(8.9.1.(a))Jumlah wisatawan mancanegara	Orang	312	343	377	1032	
(8.9.1.(b)) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Orang	146700	161370	177507	485577	
Persentase jumlah pengembangan ekonomi kreatif	%	35	35	30	100	
Persentase jumlah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf	%	30	35	35	100	
(8.9.2*) Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	%	10,72	11,59	12,47	12,47	
URUSAN PERTANIAN						
Produktifitas pertanian per hektar per tahun	%	80	90	95	95	Dinas Pangan dan Pertanian
Nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja disektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	%	52,40	62.85	62.85	62.85	
Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana Pertanian	%	60	65	70	70	

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2021	2022	2023		
Persentase pelayanan kesehatan hewan	%	100	100	100	100	Dinas Pangan dan Pertanian
Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian	%	100	100	100	100	
Persentase penyuluhan Pertanian	%	100	100	100	100	
URUSAN PERDAGANGAN						
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	41	42	43	43	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi /dibangun	sarana distribusi	1	1	1	3	
Persentase kinerja realisasi pupuk	%	94	94,5	95	95	
Nilai Ekspor Bersih	Rp/ US \$	662.016.695	665.000.000	667.000.000	1.994.016.695	
Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dn perlengkapan (UTTP) yang ditera/tera ualng dalam tahun berjalan	%	80	80	85	85	
Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	%	80	80	85	85	
Jumlah upaya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Upaya	2	2	3	7	
URUSAN PERINDUSTRIAN						

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2021	2022	2023		
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIK	%	22	22	22	22	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Proporsi Nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita	%	21,95	23,6	23,6	23,6	
Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	%	5	5	5	5	
Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Ijin Usaha Industri(IUI) dan Ijin Usaha Perluasan Industri(IPUI) Kecil dan Industri	%	80	85	90	90	
Laju pertumbuhan PDRB Industri manufaktur	%	0,3	0,4	0,5	0,5	
Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	%	40,58	50,71	60,84	60,84	
Persentase Data Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Perusahaan Kawasan ndustri di Kabupaten/Kota yang Masuk SIINas Terhadap Total Populasi Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota	%	70	75	80	80	
Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	%	1	1,25	1,5	1,5	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
SEKRETARIAT DAERAH						

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2021	2022	2023		
Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Nilai	63,30 (B)	65,50 (B)	67,70 (B)	67,70 (B)	Sekretariat Daerah
Persentase pelayanan BLUD yang ditingkatkan	%	100	100	100	100	
Persentase operasional pimpinan daerah yang terpenuhi	%	100	100	100	100	
Persentase kinerja organisasi yang ditingkatkan	%	100	100	100	100	
Persentase kegiatan pimpinan daerah yang difasilitasi	%	100	100	100	100	
Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	
Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	
Persentase fasilitasi hukum yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	
Persentase kerjasama daerah yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	
Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	Kebijakan	1	1	1	3	
Persentase kegiatan pembangunan yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	
Persentase terpenuhinya pelaksanaan kebijakan perekonomian	%	100	100	100	100	

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2021	2022	2023		
Persentase pengadaan barang yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	
Persentase kebijakan terkait sumber daya alam yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	
SEKRETARIAT DPRD						
Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	%	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
PERENCANAAN						
Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan	%	60	65	70	70	Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah
Persentase Kesesuaian Program di APBD dengan Program di RKPD tahunan	%	100	100	100	100	
Persentase data/informasi hasil pembangunan yang dapat diakses	%	80	85	90	90	Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah
Persentase program dalam dokumen perencanaan yang mencapai target	%	75	80	85	85	
Persentase Kesesuaian Prog. bid. PPM /bid. perekonomian dan SDA /bid. I % kewilayahan di RKPD tahunan dengan Prog. Bid. P dan PM/bid. perekonomian dan SDA/bid.infrastruktur dan kewilayahan di RPJMD	%	100	100	100	100	

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2021	2022	2023		
Persentase Kesesuaian Prog.bid pemerintahan dan pembangunan manusia/bid. perekonomian dan SDA/bid.infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Prog. bid pemerintahan dan pembangunan manusia/bid.perekonomian dan SDA / bid. infrastruktur dan kewilayahan di RKPDP Tahunan	%	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah
Persentase Prog bid. pemerintahan dan pembangunan manusia /bid. perekonomian dan SDA/ bid. infrastruktur dan kewilayahan yang mencapai target	%	75	80	85	85	
KEUANGAN						
Persentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD	%	100	100	100	100	Badan Keuangan Daerah
Persentase penyampaian APBD/P tepat waktu	%	100	100	100	100	
Persentase ketersediaan manajemen aset/BMD	%	100	100	100	100	
Penyampaian, pertumbuhan, pendapatan pajak daerah	%	3	4	4	4	
KEPEGAWAIAN						
Rasio pegawai fungsional	%	7,04	7,5	7,8	7,8	Badan Kepegawaian Pengembangan SDM Daerah
Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	100	100	100	

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2021	2022	2023		
Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	%	100	100	100	100	Badan Kepegawaian Pengembangan SDM Daerah
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	%	77	78	79	79	BKPSDMD
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	Bappeda dan Litbang
INSPEKTORAT						
Persentase OPD dengan tingkat akuntabilitas Minimal BB	%	75	85	95	95	Inspektorat Daerah
Persentase OPD dengan tingkat Index Reformasi Birokraksi Minimal B	%	75	85	95	95	
KECAMATAN BUKIT INTAN						
Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	100	100	100	100	Kecamatan Bukit Intan
Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun	%	100	100	100	100	
Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	
Persentase Terselenggaranya Urusan pemerintahan Umum di Kecamatan	%	100	100	100	100	
KECAMATAN RANGKUI						
Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif.	%	100	100	100	100	Kecamatan Rangkui

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2021	2022	2023		
Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun.	%	100	100	100	100	Kecamatan Rangkui
Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	
Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan.	%	100	100	100	100	
KECAMATAN GERUNGGANG						
Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	60	80	80	80	Kecamatan Gerunggang
Persentase sarana dan prasarana Publik yang Terbangun	%	60	80	80	80	
Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	60	80	80	80	
Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	%	60	80	80	80	
KECAMATAN TAMAN SARI						
Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tertangani	%	100	100	100	100	Kecamatan Taman Sari
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100	100	
Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjut	%	100	100	100	100	Kecamatan Taman Sari
Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	%	100	100	100	100	

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2021	2022	2023		
KECAMATAN PANGKALBALAM						
Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif,	%	60	80	100	100	Kecamatan Pangkalbalam
Persentase sarpras publik yang terbangun	%	100	100	100	100	
Persentase keluhan masyarakat yang ditindak lanjuti	%	60	80	100	100	
Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	%	60	80	100	100	
KECAMATAN GIRIMAYA						
Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	100	100	100	100	Kecamatan Girimaya
Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	
Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	%	100	100	100	100	
KECAMATAN GABEK						
Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	100	100	100	100	Kecamatan Gabek
Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	%	100	100	100	100	
Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	%	100	100	100	100	
Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	60	80	100	100	
Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	60	80	100	100	

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Pelaksana
		2021	2022	2023		
Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan	%	100	100	100	100	Kecamatan Gabek
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
Persentase Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan	%	70	80	85	90	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Persentase pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik	%	70	30	30	60	
Jumlah ORMAS yang terdata	Data	60	1	1	60	
Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	%	100	12	12	90	
Persentase konflik sosial yang dapat diselesaikan	%	75	80	85	90	



- BAB VII -

P E N U T U P

RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-undang tersebut, RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah sebagai penjabaran dari Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 yang diselaraskan dengan agenda Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang kemudian dijabarkan dalam RKP Tahun 2022.

RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022 merupakan penjabaran pelaksanaan tahun keempat dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023, yang harus menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan Rencana Kerja untuk Tahun 2022, dan penyusunan KUA/PPAS, yang dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022. Untuk menjamin konsistensi perencanaan dan pelaksanaan RKPD dengan APBD, pemerintah daerah berkewajiban untuk mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam RKPD dan APBD pada kurun waktu yang telah ditentukan.



Penyusunan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022 telah dilaksanakan dengan melakukan beberapa inovasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sehingga dokumen yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara optimal. Proses yang telah dilaksanakan antara lain :

1. Penyusunan RKPD Tahun 2022 digunakan dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD.
2. Proses asistensi *offline* maupun *online* terhadap kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah dilakukan secara intensif yang bertujuan agar program prioritas yang telah disusun beserta indikator kinerja dan target dapat tercapai secara optimal serta dapat mengacu dan selaras dengan dokumen Perubahan RPJMD dan Dokumen Perubahan Renstra Tahun 2018-2023
3. Upaya menjaga keselarasan antara RKPD dengan RPJMD pada Tahun keempat dilakukan dengan secara konsisten menjadikan Perubahan RPJMD sebagai pedoman, dimana sasaran daerah dalam Perubahan RPJMD diimplementasikan dalam program tahunan Perangkat Daerah.
4. Penyelenggaraan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyepakati prioritas pembangunan Tahun 2022 dilakukan secara efektif dimana proses musyawarah dilakukan



dengan berdiskusi kelompok, survey lapangan dan disepakati langsung antara masyarakat dan perangkat daerah terkait

Dalam penyusunan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022 untuk menjamin terlaksananya program dan kegiatan pembangunan secara terarah, efektif dan efisien, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang berkewajiban melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2022 secara sinergis dan terintegrasi;
- 2) Program, kegiatan dan sub kegiatan beserta alokasi anggaran yang telah dituangkan dalam dokumen RKPD Tahun 2022 selaras dengan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan menjadi dasar bagi perjanjian kinerja Kepala Perangkat Daerah yang pencapaiannya diukur secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- 3) Pemerintah Kota Pangkalpinang berkewajiban menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran. Sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Kota Pangkalpinang Tahun 2022, RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022.
- 4) Dalam rangka sinkronisasi & sinergitas pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan, baik yang pendanaannya



bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun dan membuat Renja Perangkat Daerah, sebagai dasar pelaksanaan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 dengan berpedoman pada dokumen RPKD 2022.

- 5) Pemerintah Kota Pangkalpinang berkewajiban memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022.
- 6) Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana program/kegiatan/sub kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Walikota melalui Kepala Bappeda dan Litbang.
- 7) Apabila realisasi SILPA pada akhir tahun anggaran 2021 melebihi dari proyeksi, maka kelebihan tersebut dapat diprioritaskan untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pembangunan Infrastruktur pelayanan publik;
 - b. Kegiatan/Sub Kegiatan yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. Kegiatan/Sub Kegiatan yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi dampak COVID-19 dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19;
 - d. Kegiatan/Sub Kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah berbasis pengurangan volume sampah di masyarakat;



- e. Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Kepala Daerah; dan
 - f. Kegiatan/Sub Kegiatan lain untuk menunjang dan/atau dalam rangka akselerasi capaian target Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023.
- 8) Kepala Bappeda dan Litbang menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
- 9) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, dimungkinkan terjadi perubahan RKPD Kota Pangkalpinang tahun 2022 bila diperlukan.

Pada akhirnya, komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan, dan mewujudkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022 ini menjadi sangat penting. Untuk itu, Pemerintah Kota Pangkalpinang mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan kemantapan pembangunan Kota Pangkalpinang secara menyeluruh, demi mewujudkan Kota Pangkalpinang yang Sejahtera, Nyaman, Unggul dan Makmur.

WALIKOTA PANGKALPINANG,



H. MAULAN AKLIL